PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
bappeda.babelprov.go.id

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

(1) Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
(2) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.

(4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(5) Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

(6) Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

(7) Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(8) Rencana pembangunan tahunan satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(9) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

(10) Kebijakan Umum APBD atau disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

(11) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(12) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.

(13) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

(14) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(15) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, mempedomani RPJMD dan mengacu kepada RKP Tahun 2016 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, sumber pendanaan dan prakiraan maju yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

(4) RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai :

a. pedoman penyusunan Renja-SKPD;
b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Provinsi Tahun Anggaran 2016;
c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2016.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD;
f. penetapan RKPD.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 untuk:

a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD;
b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala SKPD melakukan pemantauan;
b. kepala bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
c. masing-masing Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD;
d. kepala bappeda melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2015

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

H. RUSTAM EFFENDI, SE.

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 26 SERI E

# DAFTAR ISI


PERGUB KEP. BANGKA BELITUNG
TENTANG RKPD TAHUN 2016 i
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL xiv

**BAB I PENDAHULUAN I**

1.1. Latar Belakang .... I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .... I.6
1.3. Hubungan Antar Dokumen .... I.8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD .... I.9
1.5. Maksud dan Tujuan .... I.10

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN II**

2.1. Kondisi Umum Daerah .... II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .... II.1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi danWilayah .... II.1
A. Luas dan Batas Wilayah .... II.1
B. Letak dan Kondisi Geografis .... II.3
C. Topografi .... II.6
D. Geologi .... II.7
E. Hidrologi .... II.7
F. Klimatologi .... II.6
G. Flora dan Fauna .... II.9
H. Penggunaan Lahan .... II.9
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah .... II.10
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana .... II.17
2.1.1.4. Demografi .... II.19

2.1.2. Aspek Kesejahteran Masyarakat .... II.21
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .... II.21
A. Pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian dan PDRB Per Kapita .... II.21
B. Laju Inflasi .... II.25
C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan .... II.27
D. Indeks Ketimpangan Williamson .... II.28
E. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan .... II.21
F. Perkembangan Nilai Investasi .... II.31
G. Angka Kriminalitas .... II.32
H. Perkembangan Sosial .... II.32
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .... II.34

A. Angka Melek Huruf ..... II.34
B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ..... II.36
C. Angka Partisipasi Kasar ..... II.37
D. Angka Kematian Bayi ..... II.40
E. Usia Harapan Hidup ..... II.42
F. Rasio Penduduk yang Bekerja ..... II.43
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ..... II.46
A. Seni Budaya ..... II.46
B. Pemuda ..... II.47
C. Olahraga ..... II.47

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II.48
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II.48
A. Urusan Pendidikan ..... II.48
1. Angka Partisipasi Sekolah ..... II.48
2. Angka Partisipasi Murni ..... II.50
a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah ..... II.50
b. Rasio Murid dan Guru ..... II.51
B. Urusan Kesehatan ..... II.52
C. Urusan Pekerjaan Umum ..... II.57
D. Urusan Perumahan ..... II.57
E. Urusan Penataan Ruang ..... II.57
F. Urusan Perencanaan Pembangunan ..... II.57
G. Urusan Perhubungan ..... II.58
H. Urusan Lingkungan Hidup ..... II.58
I. Urusan Pertanahan ..... II.59
J. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..... II.59
K. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II.60
L. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... II.61
M. Urusan Sosial ..... II.61
N. Urusan Ketenagakerjaan ..... II.62
O. Urusan Penanaman Modal ..... II.62
P. Urusan Kebudayaan ..... II.62
Q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..... II.63
R. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri ..... II.63
S. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ..... II.63
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ..... II.64
A. Urusan Pertanian ..... II.64
B. Urusan Kehutanan ..... II.64
C. Urusan Energi dan Sumber ..... II.65
D. Urusan Pariwisata ..... II.65
E. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... II.65
F. Urusan Perdagangan ..... II.66
G. Urusan Industri ..... II.66
H. Urusan Ketransmigrasian ..... II.66
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ..... II.67
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ..... II.67
A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ..... II.67
B. Nilai Tukar Petani ..... II.67
C. Pengeluaran Konsumsi Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) ..... II.68
D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja ..... II.68

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ..... II.69
A. Luas Wilayah Produktif ..... II.69
B. Infrastruktur ..... II.69
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ..... II.70
A. Angka Kriminalitas ..... II.70
B. Jumlah Demonstrasi ..... II.71
C. Lama Perizinan ..... II.71
D. Pengenaan Pajak Daerah ..... II.72
E. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha ..... II.73
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusaia ..... II.73
A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3) ..... II.73
B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) ..... II.74
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II.74
2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRD ..... II.210
2.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah ..... II.242
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II.242
A. Urusan Wajib ..... II.242
B. Urusan Pilihan ..... II.247
2.5.1. Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II.249
2.5.1.1. Peralihan *Millenium Development Goals (MDGs)* menuju *Sustainability Development Goals (SDGs)* ..... II.249
2.5.1.2. Standar Pelayanan Minimal ..... II.250
2.5.1.3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca ..... II.251
2.5.1.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... II.251
2.5.1.5. Tata Kelola Pemerintahan ..... II.253

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III.1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi ..... III.1
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... III.1
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..... III.6
3.1.1.3. PDRB Per Kapita ..... III.8
3.1.1.4. Struktur Sektor Ekonomi ..... III.9
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB ..... III.11
3.1.1.6. Tingkat Inflasi ..... III.12
3.1.1.7. ICOR ..... III.13
3.1.1.8. Tingkat Investasi ..... III.14
3.1.1.9. Ekspor dan Impor ..... III.15
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan ..... III.16
3.1.2.1. Pengangguran ..... III.16
3.1.2.2. Kemiskinan ..... III.17
3.1.2.3. Ketimpangan Regional ..... III.18
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan ..... III.19
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 ..... III.20
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2015 dan

2016 ..... III.20
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung 2015 dan 2016 ..... III.21
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 ..... III.23
3.1.3.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III.23
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III.24
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... III.26
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III.29
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III.29
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III.31
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III.35

**BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH IV**

4.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV.1
4.1.1. Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 ..... IV.1
4.1.2. Perumusan Prioritas Pembangunan ..... IV.4
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV.5
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV.11
4.4. Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan ..... IV.26
4.4.1. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs ..... IV.26
4.4.2. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pelaksanaan SPM ..... IV.28
4.4.3. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi ..... IV.30
4.4.4. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pengentasan Kemisikinan ..... IV.31
4.4.5. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja ..... IV.36
4.4.6. Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan ..... IV.37
4.5. Prioritas dan Strategi Pembangunan Kewilayahan ..... IV.37
4.5.1. Aspek Kewilayahan yang Mendukung Prioritas Nasional ..... IV.37
4.5.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... IV.38
4.5.2.1. Rencana Pola Ruang ..... IV.38
4.5.2.2. Rencana Struktur Ruang Wilayah ..... IV.44
4.5.2.3. Penetapan Kawasan Strategis ..... IV.49
4.5.2.4. Kawasan Andalan ..... IV.50
4.5.2.5. Indikasi Program Utama 5 Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 ..... IV.50
4.6. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) ..... IV.76
4.7. Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan ..... IV.83
4.8. Prioritas dan Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2016 ..... IV.86

**BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF V**

5.1. Rencana Program Prioritas ..... V.1
A. Program yang Dilaksanakan Setiap SKPD ..... V.1
B. Urusan Wajib dan Pilihan ..... V.1

5.2. Pagu Indikatif Dana Hibah dan Bantuan Sosial ..... V.40

**BAB VI PENUTUP** **VI**

**LAMPIRAN I**

Rencana Program dan Kegiatan Priorotas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... Lampiran I.1

# DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman


**BAB I**

| | | |
|---|---|---|
| Gambar I.1. | Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi | I.5 |
| Gambar I.2. | Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD | I.8 |

**BAB II**

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.1. | Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | II.2 |
| Gambar II.1. | Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.2 |
| Tabel II.2. | Jumlah Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.3 |
| Tabel II.3. | Nama dan Kondisi Pulau Berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.3 |
| Gambar II.2. | Peta Topografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.6 |
| Gambar II.3. | Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.7 |
| Gambar II.4. | Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.8 |
| Gambar II.5. | Peta Curah Hujan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.9 |
| Tabel II.4. | Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.10 |
| Gambar II.6. | Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.16 |
| Gambar II.7. | Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.17 |
| Tabel II.5. | Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.17 |
| Tabel II.6. | Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.18 |
| Gambar II.8. | Peta Kejadian Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.19 |
| Gambar II.9. | Perkembangan Jumlah Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2014 | II.20 |
| Tabel II.7. | Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 | II.20 |
| Tabel II.8. | Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2013 | II.21 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.9. | PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2010-2014 (juta rupiah) | II.22 |
| Tabel II.10. | Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2014 | II.24 |
| Tabel II.11. | Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Beberapa Lapangan Usaha 2014 | II.24 |
| Gambar II.10. | PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 | II.25 |
| Gambar II.11. | Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2014 | II.26 |
| Tabel II.12. | Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 | II.26 |
| Gambar II.12. | Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional Tahun 2014 | II.27 |
| Gambar II.13. | Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 | II.27 |
| Gambar II.14. | Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 | II.28 |
| Tabel II.13. | Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 s.d. 2014 | II.28 |
| Tabel II.14. | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 s.d. 2014 | II.29 |
| Tabel II.15. | Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.29 |
| Gambar II.15. | Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional Tahun 2013 | II.30 |
| Gambar II.16. | Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional dan Kab/Kota, Tahun 2012 | II.30 |
| Gambar II.17. | Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Prov. Kep. Babel dengan Nasional Tahun 2013 | II.31 |
| Tabel II.16. | Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014 | II.31 |
| Tabel II.17. | Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.32 |
| Tabel II.18. | Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | II.32 |
| Tabel II.19. | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d. 2014 | II.33 |
| Tabel II.20. | Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2009 s.d 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.33 |
| Tabel II.21. | Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.34 |
| Gambar II.18. | Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2013 Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.34 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.22. | Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2013 | II.35 |
| Gambar II.19. | Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.35 |
| Tabel II.23. | Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.36 |
| Gambar II.20. | Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.36 |
| Tabel II.24. | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014 | II.37 |
| Gambar II.21. | Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2008 s.d 2012 | II.37 |
| Tabel II.25. | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014 | II.38 |
| Gambar II.22. | Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2008 s.d 2012 | II.38 |
| Tabel II.26. | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014 | II.39 |
| Gambar II.23. | Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2008 s.d 2012 | II.39 |
| Tabel II.27. | Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2014 | II.40 |
| Gambar II.24. | Perbandingan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2008 s.d 2014 | II.40 |
| Tabel II.28. | Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 | II.40 |
| Tabel II.29. | Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2014 | II.42 |
| Tabel II.30. | Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2013 | II.42 |
| Tabel II.31. | Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2014 | II.43 |
| Gambar II.25. | Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 s.d 2013* | II.43 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.32. | Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2014* | II.44 |
| Gambar II.26. | Tingkat Pengganggguran Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.44 |
| Tabel II.33. | Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | II.45 |
| Tabel II.34. | Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 (Persen) | II.45 |
| Tabel II.35. | Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2013 | II.46 |
| Tabel II.36. | Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2014 | II.46 |
| Tabel II.37. | Jumlah Perkumpulan 6 (Enam) Cabang Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.48 |
| Tabel II.38. | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d.2013/2014 | II.49 |
| Gambar II.27. | Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008/2009 s.d 2012/201 | II.49 |
| Tabel II.39. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | II.50 |
| Tabel II.40. | Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.51 |
| Tabel II.41. | Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2013 | II.51 |
| Gambar II.28. | Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 | II.52 |
| Tabel II.42. | Perkembangan Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.52 |
| Tabel II.43. | Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.53 |
| Tabel II.44. | Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.53 |
| Tabel II.45. | Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.54 |
| Gambar II.29. | Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.55 |
| Tabel II.46. | Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.55 |
| Tabel II.47. | Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.56 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel II.48. | Perkembangan Jumlah Dokter di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.56 |
| Tabel II.49. | Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.60 |
| Tabel II.50. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.60 |
| Tabel II.51. | Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dari Tahun 2008–2013 | II.64 |
| Tabel II.52. | Angka Konsumsi RT per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.67 |
| Tabel II.53. | Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.68 |
| Tabel II.54. | Persentase Konsumsi RT Non-Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.68 |
| Tabel II.55. | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.69 |
| Tabel II.56. | Rasio Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 | II.69 |
| Tabel II.57. | Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013 | II.70 |
| Tabel II.58. | Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2013 | II.70 |
| Tabel II.59. | Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013 | II.71 |
| Tabel II.60. | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2014 | II.72 |
| Tabel II.61. | Rasio Lulusan S1/S2/S3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008-2012 | II.74 |
| Tabel II.62. | Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2012 | II.74 |
| Tabel II.63. | Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 | II.76 |
| Tabel II.64. | Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | II.206 |
| Tabel II.65. | Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.211 |
| Tabel II.66. | Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | II.250 |
| Tabel II.67. | Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah | II.254 |
| **BAB III** | | |
| Tabel III.1. | PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Tahun 2012-2016 (juta rupiah) | III.2 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel III.2. | PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahu Dasar 2010,2012-2016 (juta rupiah) | III.3 |
| Tabel III.3. | Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) | III.4 |
| Tabel III.4. | Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016 Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah) | III.5 |
| Gambar III.1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016 | III.6 |
| Tabel III.5. | Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2016 | III.7 |
| Gambar III.2. | PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015 (dalam ribu) | III.9 |
| Gambar III.3. | Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 | III.10 |
| Tabel III.6. | Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010–2015 | III.10 |
| Tabel III.7. | Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010–2015 (persen) | III.11 |
| Gambar III.4. | Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2010-2015 | III.12 |
| Tabel III.8. | Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 | III.12 |
| Gambar III.5. | Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012 | III.13 |
| Tabel III.9. | Perkembangan Nilai Investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2014 | III.14 |
| Gambar III.6. | Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010- 2014 (dalam juta US$) | III.15 |
| Gambar III.7. | Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 | III.16 |
| Tabel III.10. | Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010–2016 | III.16 |
| Gambar III.8. | Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016 | III.17 |
| Gambar III.9. | Perbandingan Garis Kemiskinan Kota dan Desa (rupiah/kapita/bulan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Nasional, 2014 | III.18 |
| Tabel III.11. | Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009–2016) | III.19 |
| Tabel III.12. | Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2016) | III.19 |
| Gambar III.10. | Perbandingan Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, 2010-2014 | III.20 |
| Tabel III.13. | Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2014 s.d tahun 2017 | III.28 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel III.14. | Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2014 s.d Tahun 2017 | III.33 |
| Tabel III.15. | Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2017 | III.36 |

**BAB V**

| | | |
|---|---|---|
| Gambar IV.1. | Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 | IV.1 |
| Gambar IV.2. | Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017 | IV.2 |
| Gambar IV.3. | Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2016 Terhadap Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | IV.4 |
| Tabel IV.1. | Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 | IV.6 |
| Gambar IV.4. | Target Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015/2016 | IV.8 |
| Tabel IV.2. | Matriks Indikator Sasaran | IV.8 |
| Tabel IV.3. | Keterkaitan antara Nawa Cita, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah | IV.14 |
| Tabel IV.4. | Keterkaitan antara Skaal Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi | IV.17 |
| Tabel IV.5. | Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 | IV.20 |
| Tabel IV.6. | Keterkaitan Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Sasaran SKPD pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 | IV.21 |
| Tabel IV.7. | Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Merespon Program MDGs | IV.27 |
| Tabel IV.8. | Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Mendukung Pelaksanaan SPM | IV.29 |
| Tabel IV.9. | Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | IV.37 |
| Tabel IV.10. | Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 | IV.51 |
| Tabel IV.11. | Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah | IV.79 |
| Tabel IV.12. | Prioritas dan Indikasi Program Dukungan Pengembangan Daerah Kepulauan Tahun 2016 | IV.83 |
| Gambar IV.5. | Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal | IV.86 |

| | | |
|---|---|---|
| Gambar IV.6. | Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | IV.87 |
| **BAB V** | | |
| Tabel V.1. | Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2016 | V.1 |
| Tabel V.2. | Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | V.40 |

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

# BAB I
# PENDAHULUAN

Lampiran
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 30 Tahun 2015
Tanggal 21 Mei 2015

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
# PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
# TAHUN 2016

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan

mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah :

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Hal penting lain yang diperhatikan adalah, bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terlepas dari kerangka pembangunan nasional sehingga perlu diperhatikan upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui proses penyelarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.
   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:
   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD.
   Rancangan awal RKPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD, aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.
   a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
      1) Pengolahan data dan informasi.
      2) Analisis gambaran umum kondisi daerah.
      3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
      4) Evaluasi kinerja tahun lalu.
      5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional.

6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi.
7) Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi.
8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
11) Pelaksanaan forum konsultasi publik.
12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. Penyajian rancangan awal RKPD.
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
1) Pendahuluan.
2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu.
3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4) Prioritas dan sasaran pembangunan.
5) Rencana program prioritas daerah.

c. Penyusunan rancangan RKPD.
Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD provinsi sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD provinsi.

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.
Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.
2) Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi pada Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum Musrenbang RKPD provinsi dilaksanakan.
3) Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi.
4) Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
5) Sinergi dengan RKP.

3. Perumusan rancangan akhir RKPD.
Pada perumusan rancangan akhir RKPD, verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

4. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan dalam rangka penyelarasan terhadap:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi.

Sedangkan mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD 2012-2017, yang merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Gambar I.1**

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

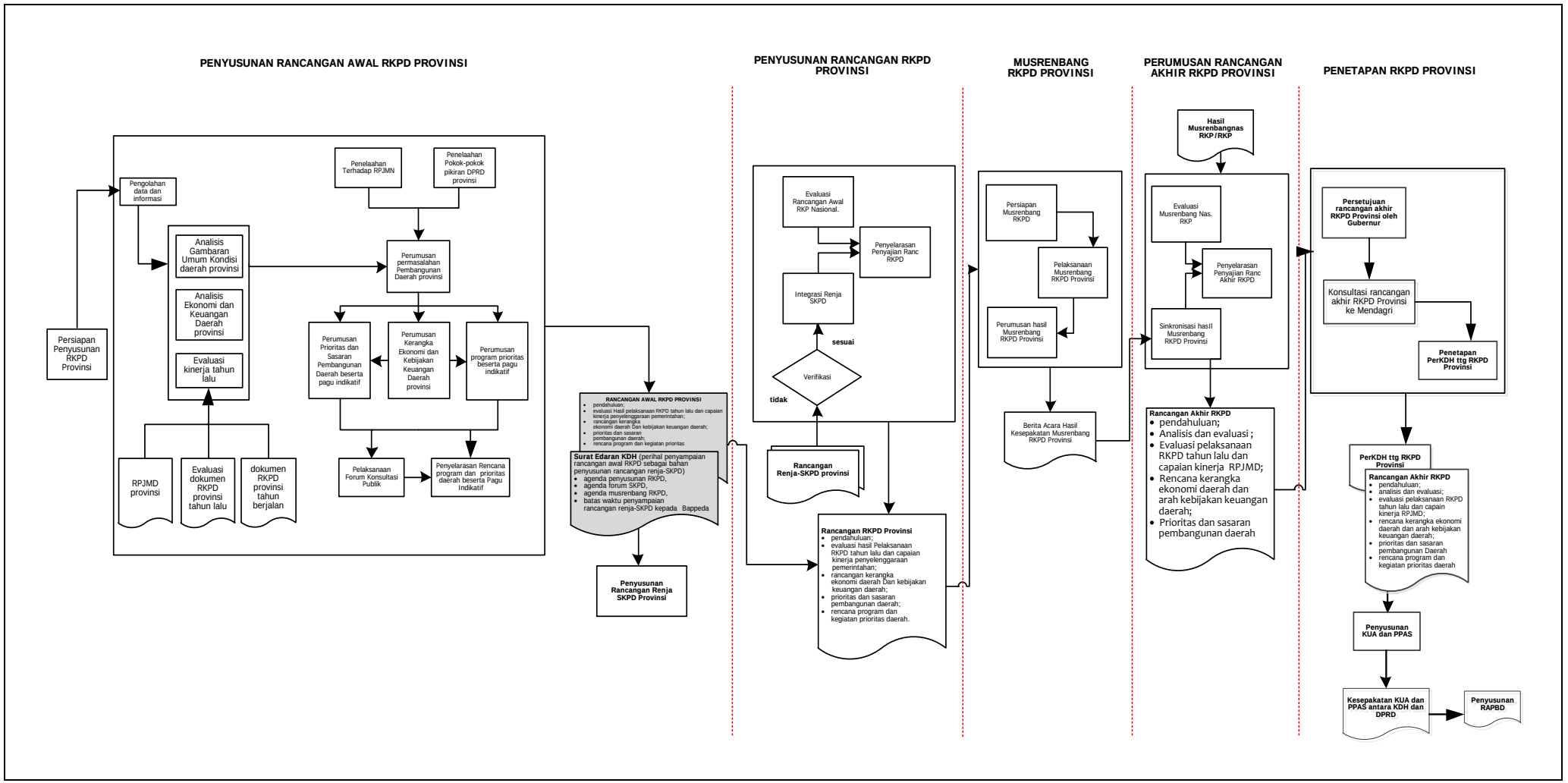


*Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010*

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014Nomor 1 Seri E).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

**Gambar I.2**
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

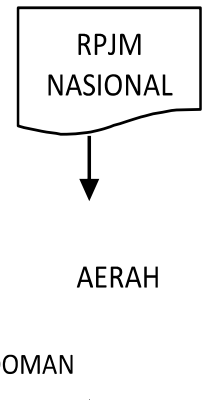


*Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010*

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

## 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

**BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2015.

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

**BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2016.

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

# BAB II
# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

# BAB II
# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## 2.1 Kondisi Umum Daerah

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

**A. Luas dan Batas Wilayah**

Provinsi ini secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh. Sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:
- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Luas wilayah mencapai 81.725,23 km$^2$. Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km$^2$ atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km$^2$ atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Gambar II.1.

**Tabel II.1**

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

| Nama Kota/Kabupaten | Nama Ibu Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Luas Wilayah ($Km^2$) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kabupaten Bangka | Sungai Liat | 8 | 62 | 9 | 2.950,69 |
| Kabupaten Bangka Barat | Muntok | 6 | 60 | 4 | 2.820,61 |
| Kabupaten Bangka Tengah | Koba | 6 | 56 | 7 | 2.126,36 |
| Kabupaten Bangka Selatan | Toboali | 8 | 50 | 3 | 3.607,08 |
| Kabupaten Belitung | Tanjungpandan | 5 | 42 | 7 | 2.293,69 |
| Kabupaten Belitung Timur | Manggar | 7 | 39 | 0 | 2.507,00 |
| Pangkalpinang | Pangkalpinang | 7 | 0 | 42 | 118,80 |
| Luas Daratan | | | | | 16.424,23 |
| Luas Laut | | | | | 65.301,00 |
| **Provinsi Kep. Babel** | | **47** | **309** | **72** | **81.725,23** |

*Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung 2014*

**Gambar II.1.**

Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

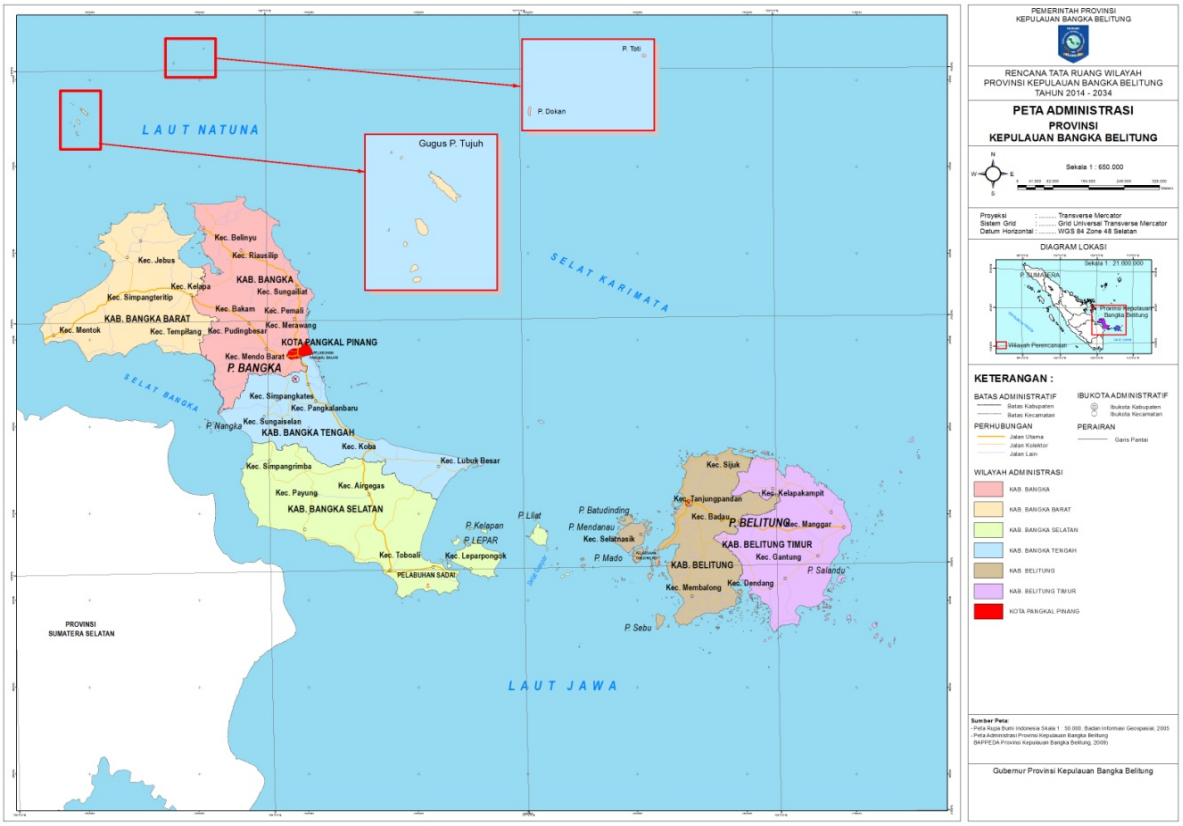


Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang kaya akan sumberdaya laut. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 470 buah pulau yang tersebar di 6 Kabupaten dan wilayah perairan provinsi, dengan 51 buah diantaranya pulau berpenghuni. Daftar pulau dan pulau berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel II.2 dan Tabel II.3.

**Tabel II.2.**
Jumlah Pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Verifikasi | Berpenghuni |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Kabupaten Bangka | 48 | 1 |
| Kabupaten Bangka Barat | 89 | 0 |
| Kabupaten Bangka Tengah | 20 | 6 |
| Kabupaten Bangka Selatan | 59 | 8 |
| Kabupaten Belitung | 111 | 15 |
| Kabupaten Belitung Timur | 141 | 19 |
| Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 2 |
| **JUMLAH** | 470 | 51 |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2011*

**Tabel II.3.**
Nama dan Kondisi Pulau Berpenghuni di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kabupaten | Kecamatan | Nama Pulau | Kondisi |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| BANGKA | Belinyu | Penyusuk | Ada penunggu suar |
| | | | |
| BANGKA SELATAN | Pulau Besar | Besar | Ada penunggu suar, luas 18.241 ha, 90 menit dariSadai,air bersih tadah hujan |
| | Toboali | Dapur | Ada penunggu suar, 30 menit dariSadai, listrik genset, air bersih tadah hujan |
| | Lepar Pongok | Tinggi | Berpenghuni, 40 KK, luas 312 ha, 15 menit dari Sadai,ada dermaga |
| | | Panjang | Berpenghuni, 50 KK, luas 92,58 ha, air bersih, jalan semen, SD, 15 menit dari Sadai |
| | | Kelapan | Berpenghuni, 50 KK, 30 menit dari Sadai, luas 362,21 ha, listrik genset, telepon satelit, sumur air tawar, jalan , dermaga, SD, masjid. |
| | | Lepar | Berpenghuni 3 dusun, 6.000 jiwa, luas 25.416,380 ha, 60 menit dari Sadai, Listrik PLN, air bersih sumur, jalan bisa untuk mobil, dermaga, SD, SMP, pasar, masjid dan kantor desa |
| | | Celagen | Berpenghuni, 1.500 Jiwa |
| | | Liat | Berpenghuni 1 dusun, luas 4.651,882 ha, 5.000 jiwa, 1.30 menit dari Sadai, air bersih, listrik |

| Kabupaten | Kecamatan | Nama Pulau | Kondisi |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | genset, SD |
| | | | |
| BANGKA TENGAH | Koba | Ketawai | Berpenghuni, luas 57,53 ha, 2 KK penjaga perkebunan kelapa,90 menit dari Kurau, jalan semen, listrik genset, air bersih |
| | | Gusung Asam | berpenghuni, 16 KK, luas 8,56 ha, 120 menit dari Kurau |
| | | Bebuar | Berpenghuni , 3 KK,dahulu banyak penduduk, ada bekas gedung SD dan mushola, luas 25,067 ha |
| | Pangkalanbaru | Semujur | berpenghuni, luas 57,11 ha, 30 KK,75 menit dari Kurau, jalan semen, listrik genset, air bersih |
| | Sungai Selan | Nangka | berpenghuni, 320 Jiwa, 64 KK, ada SD, luas 344,51 ha, 2 jam dari Sungai Selan, jalan berbatu, listrik genset, daerah berbukit, tanaman cengkih, durian, nangka, |
| | | Pelepas | berpenghuni petugas mercusuar, ada mercu suar,luas 11,75 ha |
| | | | |
| BELITUNG | Selat Nasik | Mendanau | Berpenghuni, Ibukota kecamatan Selatnasik, lusa 12.097 ha, 2.335 jiwa, 3,61 mil laut ( 2 jam) ke kota Belitung. Ada listrik, telepon celluler (XL), air bersih, jalan beraspal, dermaga, masjid, SD,SMP,SMA,Puskesmas, Kantor Desa, Pos Keamanan dan Penginapan Wisma Mendanau |
| | | Aur | Berpenghuni |
| | | Gersik | Berpenghuni, tempat pembuatan kapal |
| | | Kuil | Berpenghuni |
| | | Kalangbau | Berpenghuni |
| | | Buntar | Berpenghuni, 1 dusun |
| | | Naduk | Berpenghuni dekat peternakan mutiara. Luas 2.352,18 ha, 3,63 mil laut (3jam) dari kota Belitung. Cocok untuk kawasan konservasi, budi daya laut dan peternakan. |
| | | Sebongkok | Berpenghuni, luas 339,76 ha, 3,38 mil laut dari Kota Belitung (2 jam). Potensi Terumbu Karang dan padang lamun |
| | Tanjungpandan | Kalimambang | Berpenghuni 140 jiwa, terdapat 1 dusun, luas 38,93 ha, 2,64 Mil Laut. |
| | Sijuk | Lengkuas | Berpenghuni penjaga mercusuar, luas 5,39 ha, 4,56 mil laut,ada listrik genset dan air bersih |
| | Badau | Rengit | Berpenghuni, luas 244,80 ha, Terdapat 1 dusun |
| | | Ruk | Berpenghuni, 179, 18 ha, 60 jiwa, Tempat usaha kerang mutiara |
| | Membalong | Betangan | Berpenghuni satu dusun, 3.457 jiwa, luas 12.097 ,18 ha , 1,78 mil laut dari kota Belitung |

| Kabupaten | Kecamatan | Nama Pulau | Kondisi |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | Seliu | Berpenghuni satu desa (1.229 jiwa), luas 1.678,30 ha, 2,01 mil laut, ada listrik,air bersih, telepon celluler XL, jalan beraspal,dermaga, masjid, SD, puskesmas,kantor desa. |
| | | Semedang | Berpenghuni, satu desa(550 jiwa), luas 23,30 ha, ada mercusuar, 23,39 mil laut, 3 jam, listrik genset, jalan beraspal,dermaga, SD, masjid, puskesmas,Kantor Desa, |
| | | | |
| BELITUNG TIMUR | Dendang | Ketapang | berpenghuni, 60 KK, 193 jiwa, kelapa dan pohon ketapang |
| | | Batun | berpenghuni, 83 KK, 254 jiwa, penduduk mayoritas suku Buton |
| | Gantung | Air Masin | berpenghuni, 1 KK, 3 jiwa banyak pohon ulin dan kelapa |
| | | Sekunyit | berpenghuni, 70 KK, 212 jiwa, kelapa, SD |
| | | Rotan | Berpenghuni tidak tetap, kelapa, bakau |
| | | Tepi | berpenghuni 2 jiwa, kelapa |
| | | Long | Berpenghuni 307 jiwa, 101 KK, SD dan Puskesmas Pembantu, Kelapa Beringin, luas 8,91 ha, 18,51 mil laut |
| | | Tapok | berpenghuni 1 keluarga besar 16 jiwa, luas 46,45 ha , 0,25 mil laut,kelapa, dan keramba jaring apung |
| | | Sekepar | berpenghuni (musiman), kelapa, ada villa |
| | | Ayam Besar | berpenghuni, budidaya rumput laut, kelapa dan pepaya |
| | | Melidang | berpenghuni, 1 KK, kelapa |
| | Manggar | Bukulimau | 1 desa, 1.295 jiwa, 197 KK, luas 12,71 ha, 6,54 mil laut dari kota Belitung laut, listrik genset, telepon celluler XL, jalan semen, dermaga, masjid, puskesmas, Kantor Desa |
| | | Mempirak | berpenghuni, 1 KK |
| | | Gerisik | berpenghuni, 18 KK, luas 2,44 ha, 29,07 mil laut dari kota Belitung |
| | | Tempuling | berpenghuni 12 jiwa, kelapa |
| | | Berlian | berpenghuni, 84 jiwa, bakau dan kelapa |
| | | Pesemut | ada penjaga mercu suar |
| | | Memperang | Berpenghuni, 6 KK |
| | | | |
| Provinsi | | Bangka | Berpenghuni, PULAU BESAR |
| | | Belitung | Berpenghuni, PULAU BESAR |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung, 2011*

## C. Topografi

Keadaan alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Ketinggian dataran rendah Rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan ketinggian daerah pegunungan antara lain untuk gunung Maras mencapai 699 meter, gunung Tajam ketinggiannya kurang lebih 500 meter diatas permukaan laut. Untuk daerah perbukitan seperti bukit Menumbing ketinggiannya mencapai kurang lebih 445 meter dan bukit Mangkol dengan ketinggian sekitar 395 meter di atas permukaan laut.

Profil wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen tersebar di Pulau Bangka dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa yang terdapat disebagian wilayah Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah.

**Gambar II.2**
Peta Topografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

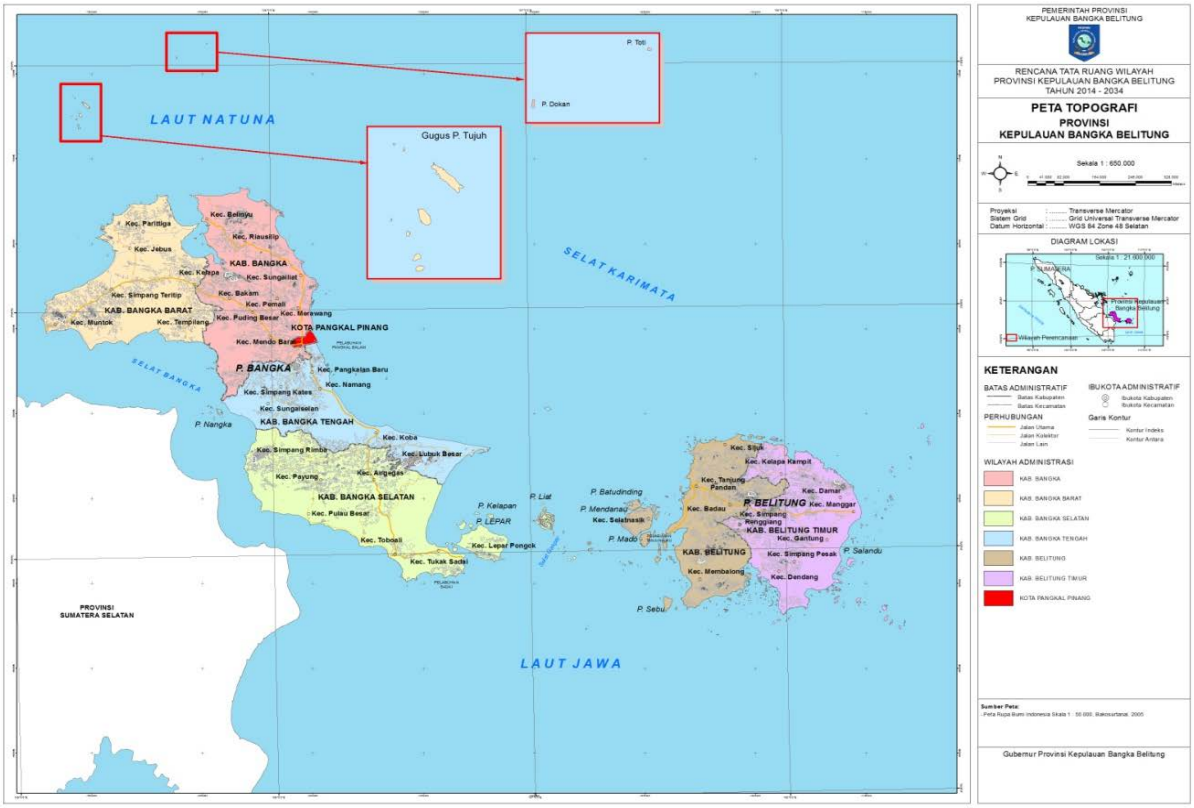


*Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

## D. Geologi

Keadaan tanah Kepulauan Bangka Belitung secara umum mempunyai PH atau reaksi tanah yang asam Rata-rata dibawah 5, akan tetapi memiliki kandungan aluminium yang sangat tinggi. Didalamnya mengandung mineral bijih timah *(tin),* kaolin, kuarsa *(quartz).* Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa lebih putih dan butirannya lebih kecil dibandingkan pasir biasa. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

**Gambar II.3**

Peta Geologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

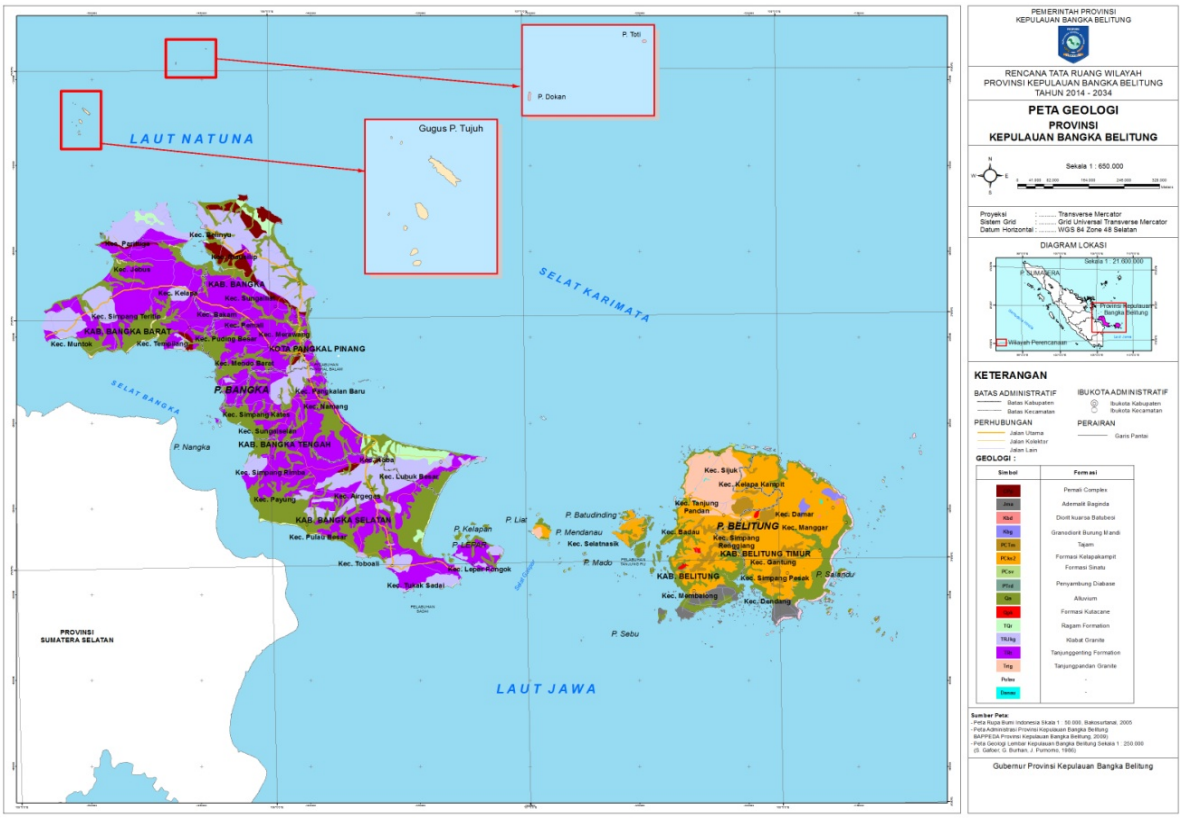


*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

## E. Hidrologi

Daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Sebagai daerah perairan, Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat

perairan terbuka. Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti: Sungai Baturusa, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cerucuk, Sungai Buding, Sungai Lenggang dan Sungai Sembulu.

**Gambar II.4**

Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

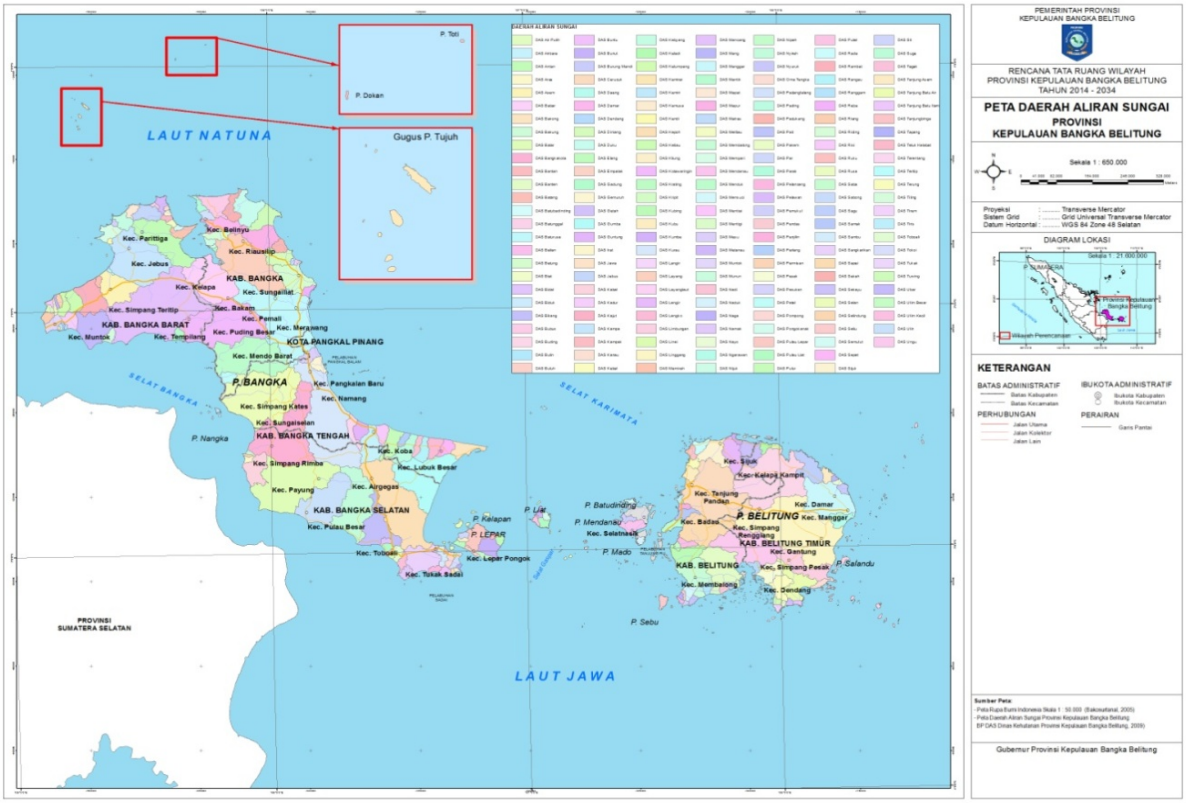


*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

## F. Klimatologi

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Sepanjang tahun, bulan kering hanya terjadi selama 9 bulan yaitu bulan Januari, April-Oktober dan Desember yangditandai dengan curah hujan di bawah 200 mm. Sedangkan bulan basah terjadi pada bulan Februai, Maret dan November, dengan curah hujan 215,6 hingga 466,2 mm.

Gambar II.5
Peta Curah Hujan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

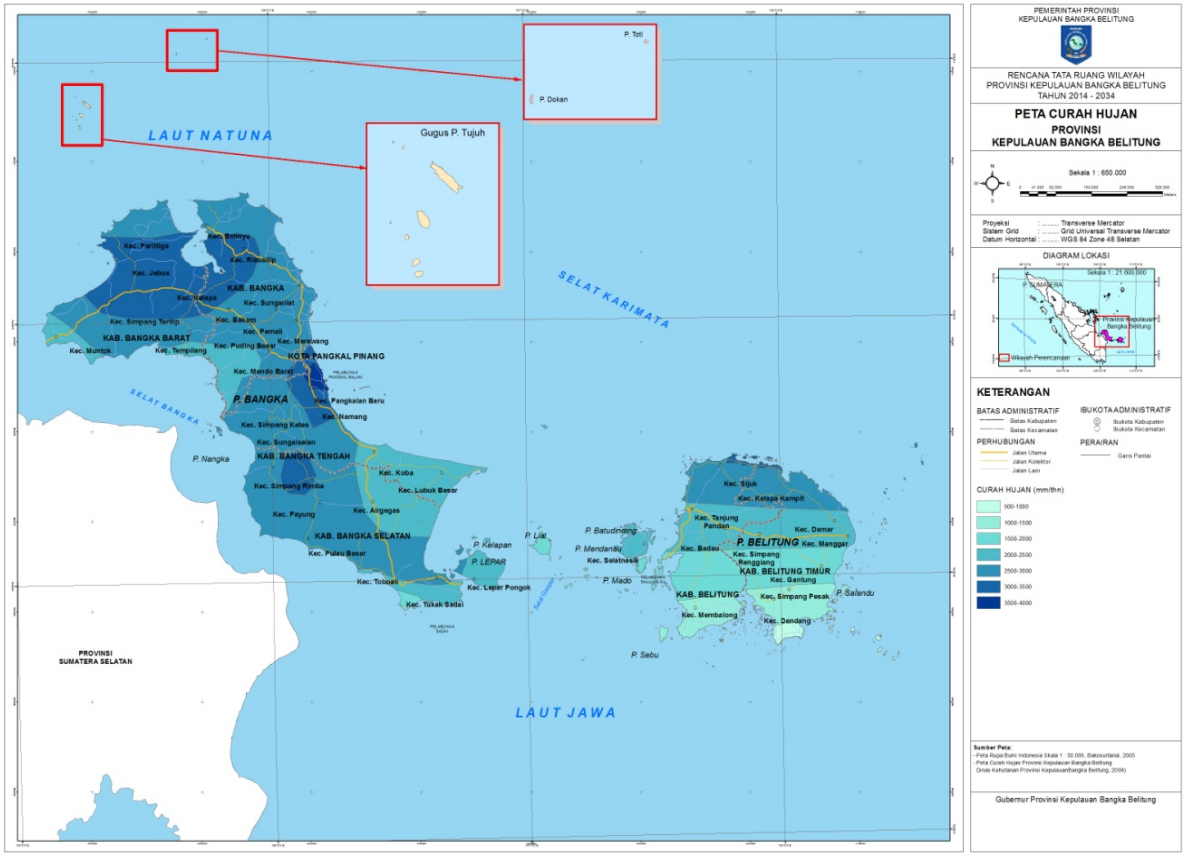


*Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

## G. Flora dan Fauna

Di Kepulauan Bangka Belitung tumbuh bermacam-macam jenis kayu berkualitas yang diperdagangkan ke luar daerah seperti: kayu Meranti, Ramin, Mambalong, Mandaru, Bulin, dan Kerengas. Tanaman hutan lainnya adalah: Kapuk, Jelutung, Pulai, Gelam, Meranti rawa, Mentagor, Mahang, Bakau dan lain-lain. Hasil hutan lainnya merupakan hasil ikutan terutama madu alam dan rotan. Madu Kepulauan Bangka Belitung terkenal dengan madu pahit.

Fauna di Kepulauan Bangka Belitung lebih memiliki kesamaan dengan fauna di Kepulauan Riau dan semenanjung Malaysia daripada dengan daerah Sumatera. Beberapa jenis hewan yang dapat ditemui di Kepulauan Bangka Belitung antara lain: Rusa, Beruk, Monyet, Lutung, Babi, Tringgiling, Kancil, Musang, Elang, Ayam Hutan, Pelanduk, berjenis-jenis ular dan Biawak

## H. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan masih didominasi lahan bukan pertanian (54,38%) daripada lahan pertanian. Sementara itu pada lahan pertanian, penggunaan lahan sawah hanya mencakup 2,40% dari keseluruhan lahan pertanian. Sebanyak 97,60% lahan pertanian bukan sawah. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.4.

Tabel II.4
Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| **I.** | **LAHAN PERTANIAN** | **1.116.111** |
| I.1. | Lahan Sawah | 11.521 |
| | a. Irigasi | 5.731 |
| | b. Tadah hujan | 3.622 |
| | c. Pasang surut | 168 |
| | d. Lebak | 2.000 |
| I.2. | Lahan Bukan Sawah | 1.104.590 |
| | a. Tegal | 122.777 |
| | b. Ladang | 48.960 |
| | c. Perkebunan | 332.179 |
| | d. Hutan rakyat | 85.738 |
| | e. Pengembalaan | 6.086 |
| | f. Sementara tidak diusahakan | 121.407 |
| | g. Lain-lain | 387.443 |
| **II.** | **LAHAN BUKAN PERTANIAN** | **526.303** |
| | a. Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll | 526.303 |
| | **JUMLAH** | **1.642.414** |

*Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2013*

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, kawasan budidaya di Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

A. Kawasan hutan produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dilakuka melalui:

a) penataan batas kawasan peruntukan hutan produksi;
b) identifikasi dan rehabilitasi kawasan peruntukan hutan produksi yang kritis dan/atau yang mengalami kerusakan (deforestasi);
c) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi dengan pendekatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan;
d) peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi oleh pembangunan di luar sektor kehutanan sesuai peraturan perundangan;
e) pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi;
f) pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan peruntukan hutan produksi (kayu dan non kayu); dan
g) pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna kawasan peruntukan hutan produksi baik pembangunan sektor kehutanan maupun non kehutanan.

Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi meliputi:

a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.780 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh) Ha;

b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.639 (enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Ha;
c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 85.083 (delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga ) Ha;
d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 107.668 (seratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan) Ha;
e) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 38.512 (tiga puluh delapan ribu lima ratus dua belas) Ha; dan
f) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 56.633 (lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga) Ha.

B. Kawasan peruntukan pertanian

Pengembangan kawasan peruntukan pertanian dilakukan melalui :

a) penetapan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional;
b) pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura dengan memperhatikan aspek sumber daya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, serta kekhususan dari wilayah;
d) penetapan kawasan peruntukan budidaya hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lainnya;
e) meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultura;
f) mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan/atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala;
g) penetapan kawasan peruntukan budidaya perkebunan sebagai usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan diversifikasi usaha dengan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
h) penetapan kawasan peruntukan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultura dan atau perkebunan;
i) penetapan kawasan peruntukan budidaya peternakan ternak besar, kecil dan unggas melalui komoditas ternak unggulan nasional, daerah dan atau komoditas ternak strategis dengan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok usaha dan dapat diintegrasikan pada kawasan budidaya lainnya dan didukung oleh ketersediaan sumber air, pangan, teknologi, kelembagaan serta pasar;
j) pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
k) penetapan tata batas kawasan peruntukan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
l) membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.

Penetapan kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh) Ha terdiri atas:

a) Kawasan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih355.453 Ha, meliputi:
   (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha;
   (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha;
   (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha;
   (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha;
   (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha;
   (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473; dan
   (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 60 Ha.

b) Kawasan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha, meliputi:
   (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha;
   (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha;
   (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha;
   (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha;
   (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha;
   (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha; dan
   (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 70 Ha.

c) Kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha, meliputi:
   (1) Perkebunan Besar meliputi :
      (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808Ha;
      (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590Ha;
      (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908Ha;
      (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329Ha;
      (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047Ha; dan
      (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188Ha.

   (2) Perkebunan rakyat meliputi :
      (a) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120Ha;
      (b) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660Ha;
      (c) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687Ha;
      (d) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326Ha;
      (e) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264Ha; dan
      (f) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456Ha.

d) Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha, meliputi:
   (1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha;
   (2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha;
   (3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha;
   (4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha;
   (5) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha;
   (6) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha; dan
   (7) Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha.

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah kabupaten/kota perlu menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

C. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan melalui :

a) penetapan kawasan sentra perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap dengan pendekatan minapolitan;
b) menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya laut, payau, tawar dan tangkap;
c) pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
d) pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya laut, payau dan tawar;
e) penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap (pelabuhan);
f) pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan, budidaya laut, payau, tawar dan perikanan tangkap; dan
g) pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan balai budidaya dan laboratorium.

Penetapan kawasan peruntukan perikanan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi :

1. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eklslusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
2. perikanan budidaya yang terdiri dari budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Pengembangan kawasan perikanan dapat dilakukan dengan pendekatan minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan didukung dengan penyediaan pelabuhan ikan yang terdiri atas:

a) Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) yang terdiri atas:
   (1) PPN Sungailiat;
   (2) PPN Tanjungpandan.

b) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) terdiri atas :
   (1) PPI Bangka Kota;
   (2) PPI Permis;
   (3) PPI Pulau Pongok;
   (4) PPI Batubetumpang;
   (5) PPI Tanjung Sangkar;
   (6) PPI Ketapang;
   (7) PPI Batu Dinding Belinyu;
   (8) PPI Kurau;
   (9) PPI Manggar;
   (10) PPI Muntok;
   (11) PPI Sadai;

(12) PPI Selat Nasik;
(13) PPI Pulau Seliu;
(14) PPI Sungai Selan;
(15) PPI Tanjung Binga;
(16) PPI Toboali;
(17) PPI Selendang; dan
(18) PPI Dendang.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya didukung dengan:
a) Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Pemali seluas 5 Ha;
b) Balai Benih Udang (BBU) Tanjung Krasak seluas 7,5 Ha; dan
c) Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tanjung Rusa 15 Ha.

D. Kawasan pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :
a) memfasilitasi kegiatan eksplorasi bagi pihak yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi;
b) peningkatan status WIUP eksplorasi menjadi WIUP operasi produksi sesuai hasil kajian teknis;
c) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasi produksi;
d) identifikasi dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR);
e) memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pertambangan rakyat; dan
f) memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan kawasan darat seluas 357.746Ha di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota, yang terdiri atas:
(a) Wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi dengan luas 8.879 Ha; dan
(b) Wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 348.867 Ha.

E. Kawasan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui :
a) menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung;
b) membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri;
c) membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri;
d) penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi baru terbarukan dan energi terbarukan; dan
e) mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.

Penetapan kawasan peruntukan industri yang meliputi:
a) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Muntok di Kabupaten Bangka Barat;
b) Kawasan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
c) Kawasan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
d) Kawasan industri Ketapang di Pangkalpinang;
e) Kawasan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;

f) Kawasan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
g) Kawasan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

F. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan melalui:

a) identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh;
b) penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung;
c) revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada;
d) pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan strategis pariwisata provinsi; dan
e) peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata.

Penetapan kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:

a) Wisata alam, meliputi seluruh wilayah pantai Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil yaitu:
   (1) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur;
   (2) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
   (3) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan;
   (4) Taman wisata laut;
   (5) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
   (6) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.

b) Wisata budaya, Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   (1) Kawasan Kota Tua Muntok di kabupaten Bangka Barat;
   (2) Situs Kota kapur di Kabupaten Bangka;
   (3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di kabupaten/kota;
   (4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya *tangible* maupun *intangible* yang ada di kabupaten/kota;
   (5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
   (6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di kabupaten/kota.

c) Wisata buatan adalah kawasan wisata yang didalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema, resort serta fasilitas olahraga yang ada di kabupaten/kota.

G. Kawasan peruntukan permukiman

Perwujudan kawasan peruntukan permukiman dilakukan dengan cara berikut :

a) penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan;

b) penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota;
c) penyusunan masterplan perencanaan kota yang ditetapkan;
d) identifikasi dan perbaikan perumahan yang rusak.

Penetapan kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan) Ha, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan di seluruh wilayah provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

H. Kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi:

a) Kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
b) Kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
c) Kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
d) Kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

**Gambar II.6**

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

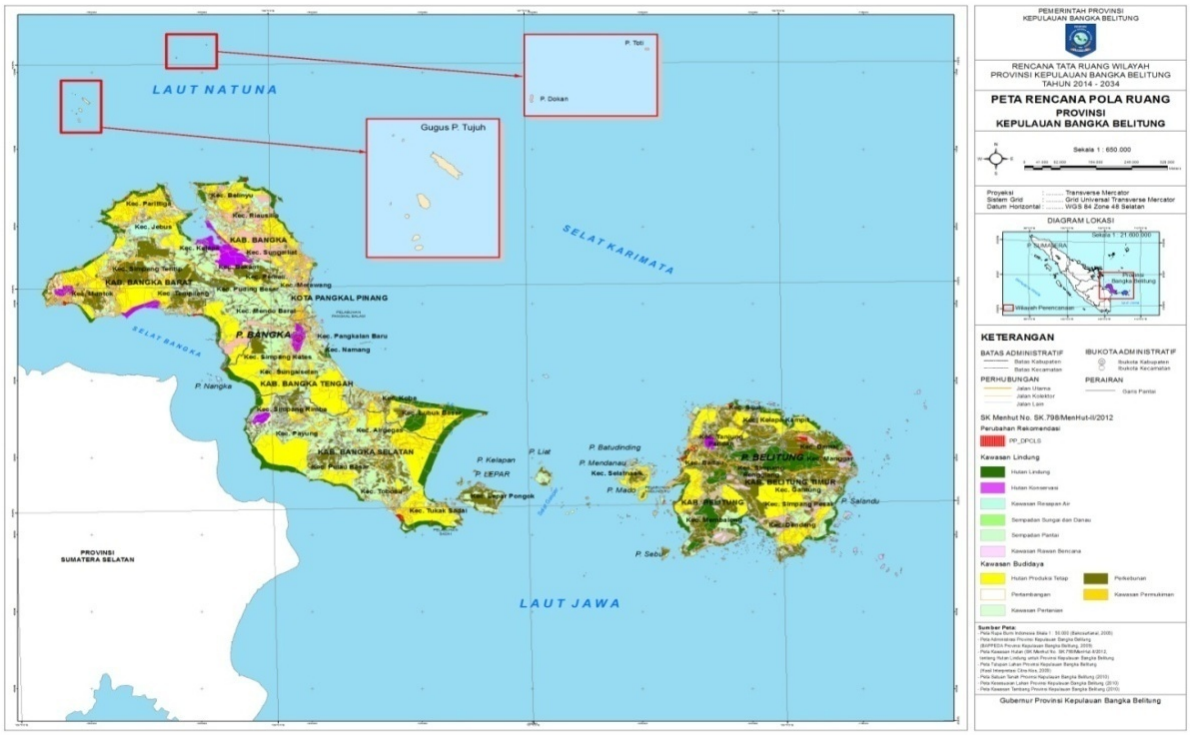


*Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

Gambar II.7
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

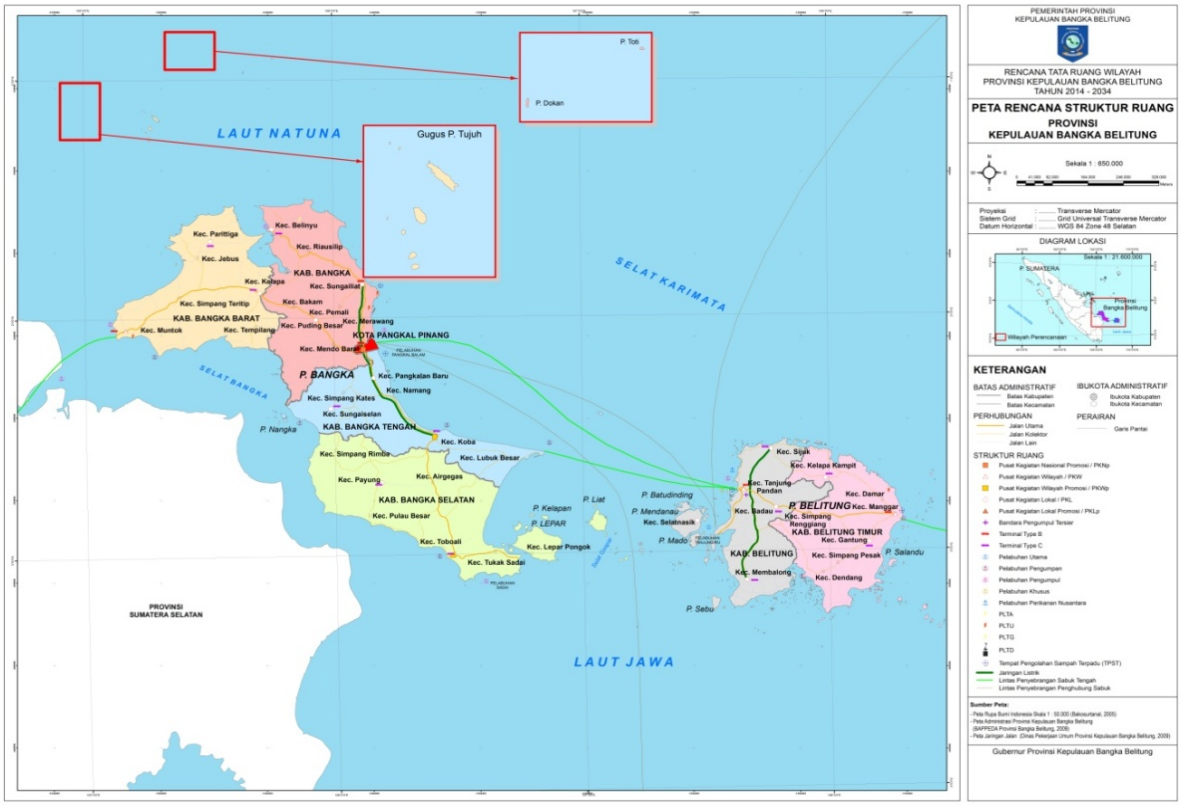


Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari bencana alam, non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam berupa banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Sedangkan bencana non alam seperti kerusuhan) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 8 (delapan) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Data bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel II.5 dan II.6.

Tabel II.5.
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kejadian | Jumlah Kejadian | Meninggal | Luka-luka | Hilang | Korban | Menderita | Dipindahkan | Mengungsi | Rumah Rusak Berat | Rumah Rusak Sedang | Rumah Rusak Ringan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Banjir | 20 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kebakaran | 125 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabut asap | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angin puting beliung | 26 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tersambar | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Kejadian | Jumlah Kejadian | Meninggal | Luka-luka | Hilang | Korban | Menderita | Dipindahkan | Mengungsi | Rumah Rusak Berat | Rumah Rusak Sedang | Rumah Rusak Ringan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| petir | | | | | | | | | | | |
| KLB DBD | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gempa bumi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerusuhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | **192** | **14** | **0** | **0** | **135** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia 2014*

**Tabel II.6.**
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Lokasi Bencana | Jenis Bencana | Intensitas |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Bangka | Banjir dan Puting beliung | Sedang |
| Bangka Tengah | Banjir, Pergerakan Tanah | Rendah |
| Bangka Selatan | Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah | Sedang, tinggi |
| Bangka Barat | Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah | Sedang |
| Belitung | Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah | Sedang |
| Belitung Timur | Banjir, Puting Beliung, Pergerakan Tanah | Rendah, sedang |
| Pangkalpinang | Banjir, Puting Beliung, | Rendah, sedang |

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2014*

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi sebanyak 18 (delapan belas) kejadian yang terjadi dari tahun 2007 dan 2014. Bencana banjir terjadi pada tahun 2007 di Kabupaten Bangka Selatan yang menyebabkan 14 rumah rusak berat dan 76 penduduk mengungsi, di Kabupaten Bangka Tengah menyebabkan 68 penduduk mengungsi dan di Kota Pangkal Pinang menyebabkan 300 penduduk mengungsi. Peristiwa banjir lainnya di tahun 2013 di Kabupaten Bangka Barat menyebabkan 110 penduduk mengungsi dan di tahun yang sama banjir di Kabupaten Bangka menyebabkan 3 penduduk meninggal dan 2 penduduk hilang.
2. Bencana Tanah Longsor telah terjadi sebanyak 4 (empat) kejadian yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Bencana tanah longsor pada tahun 2013 terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang menyebabkan 5 penduduk meninggal, di Kota Pangkalpinang menyebabkan 1 penduduk meninggal dan di Kabupaten Belitung Timur menyebabkan 3 penduduk menghilang. Pada tahun 2014 terjadi lagi bencana tanah longsor di Kabupaten Belitung Timur menyebabkan 1 penduduk meninggal.
3. Bencana cuaca ekstrim (puting beliung), tercatat sebanyak 9 (sembilan) kejadian. Kejadian terburuk terjadi pada 2007 di Kabupaten Belitung menyebabkan 35 rumah rusak berat dan 73

rumah rusak ringan. Pada tahun 2008 di Kota Pangkalpinang terjadi puting beliung yang menyebabkan 472 rumah rusak ringan.

Untuk mengetahui tingkat kejadian bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar II.8.

**Gambar II.8**

Peta Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

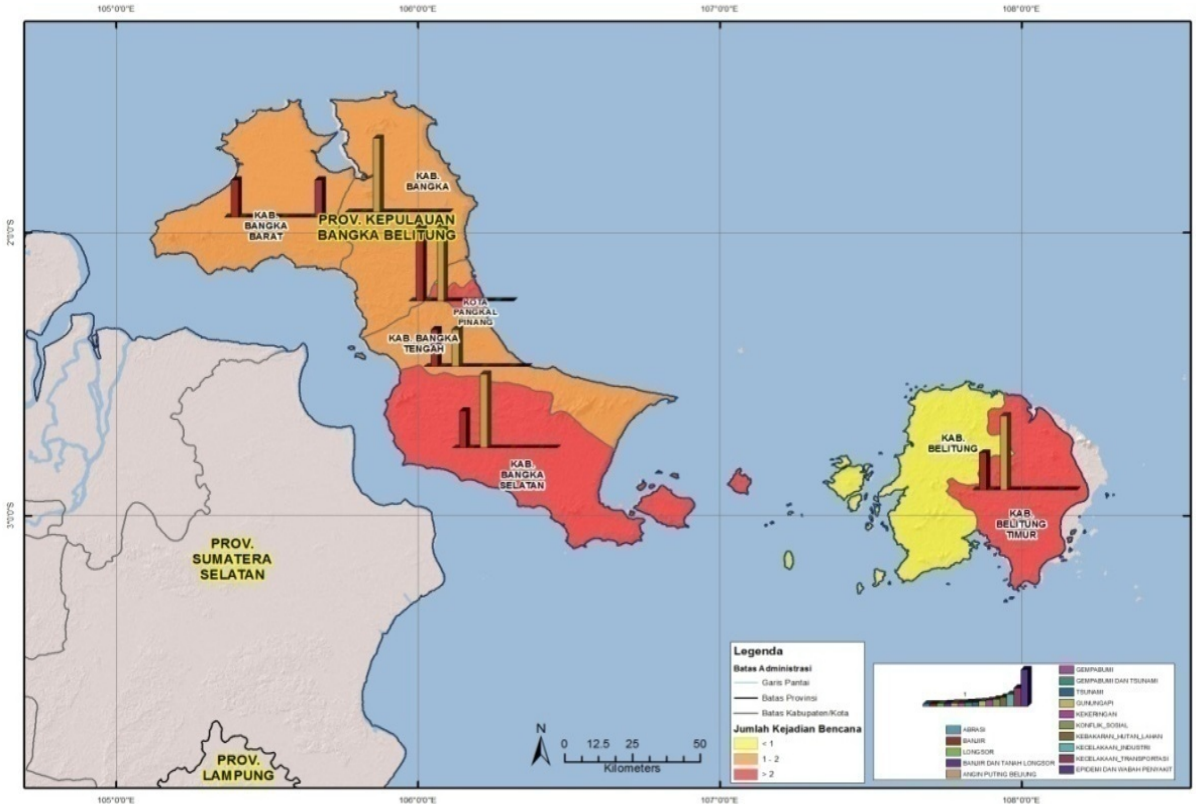


*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kejadian lebih dari 2 kali untuk bencana banjir, bencana tanah longsor dan cuaca ekstrim, sedangkan Kabupaten Belitung tidak ada kejadian bencana di wilayah tersebut.

### 2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk yang mendiami Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi penduduk pada tahun 2014 sebesar 1.343.881 jiwa, sebagaimana yang tergambar pada Gambar II.9.

**Gambar II.9**
Perkembangan Jumlah Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2014

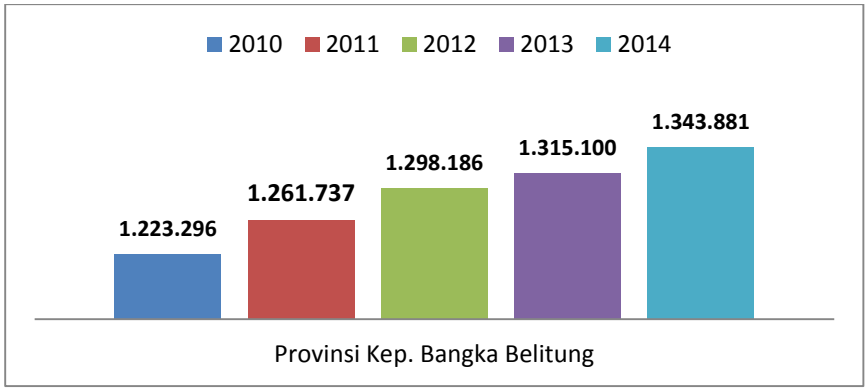


*Sumber: Indikator Sosial Ekonomi, BPS Prov. Kepulauan Bangka Belitung,2014*

Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.7).

**Tabel II.7**
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk
Kepulauan Bangka Belitung Menurut Kabupaten/KotaTahun 2014

| Kabupaten /Kota | Penduduk (jiwa) | Distribusi Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km²) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bangka | 304.485 | 22,66 | 101 |
| Belitung | 171.271 | 12,74 | 73 |
| Bangka Barat | 192.395 | 14,32 | 67 |
| Bangka Tengah | 177.218 | 13,18 | 82 |
| Bangka Selatan | 189.492 | 14,11 | 51 |
| Belitung Timur | 117.026 | 8,70 | 46 |
| Pangkalpinang | 191.994 | 14,29 | 1.582 |
| **Kepulauan Bangka Belitung** | **1.343.881** | **100,00** | **80** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 adalah 80 jiwa per km². Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan kepadatan penduduk sebesar 1.564 jiwa per km², sangat berbeda dibandingkan kabupaten lainnya yang mempunyai kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa per km² atau lebih rendah. Bahkan Belitung Timur mempunyai kepadatan penduduk yang hanya sebesar 46 jiwa per km².

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi masyarakat dengan berfokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, antara lain pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, persentase penduduk diatas garis kemiskinan dan pengangguran.

#### A. Pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian dan PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,68 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,22 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran dan disisi lainnya masih dikarenakan terjadinya perlambatan perekonomian global yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Disisi sektoral, membaiknya harga beberapa komoditi unggulan yang diikuti dengan peningkatan jumlah produksi menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

Pada tahun 2014, hampir semua sektor mengalami perlambatan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,2 persen, diikuti Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Jasa Lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen dan 7,95 persen.

Gambaran mengenai perkemabangan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2010 – 2014, sebagaimana terlihat pada table II.8.

**Tabel II.8**

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014, Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar (Persen)

| Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,26 | 8,94 | 6,47 | 6,86 | 9,24 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 0,80 | 3,06 | 0,10 | -0,54 | 1,97 |
| C. Industri Pengolahan | 3,34 | 3,72 | 3,04 | 3,49 | 1,32 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 4,52 | 13,22 | 10,19 | 4,93 | 8,55 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 12,22 | 7,82 | 5,73 | 4,19 | 4,95 |
| F. Konstruksi | 12,88 | 8,94 | 13,61 | 8,96 | 4,03 |
| G. Perdagangan Besar dan EceranMotor | 7,29 | 9,35 | 7,09 | 5,74 | 4,44 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 7,92 | 9,53 | 8,80 | 7,23 | 5,95 |
| I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 11,57 | 8,83 | 7,75 | 6,91 | 7,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. | Informasi dan Komunikasi | 11,15 | 8,11 | 8,64 | 8,97 | 6,85 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,07 | 16,38 | 7,35 | 17,14 | 5,45 |
| L. | Real Estate | 9,92 | 11,28 | 10,58 | 7,96 | 7,72 |
| M, N. | Jasa Perusahaan | 9,24 | 9,88 | 7,82 | 6,80 | 7,01 |
| 0. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 9,96 | 11,33 | 5,34 | 7,55 | 7,33 |
| P. | Jasa Pendidikan | 13,05 | 6,99 | 8,76 | 10,13 | 7,18 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,01 | 10,29 | 11,43 | 7,31 | 5,98 |
| R,S.T.U | Jasa Lainnya | 9,06 | 7,61 | 7,87 | 6,84 | 7,95 |
| | **PDRB** | ***5,89*** | ***6,90*** | ***5,50*** | ***5,22*** | ***4,68*** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Pada tahun 2014 peranan capaian sektor berkontribusi paling besar adalah industri pengolahan sebesar Rp. 10.280,9 milyar diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.8.256,15 milyar kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6.352,55 milyar diikuti oleh sektor-sektor lainnya dan sektor yang terendah adalah Jasa Perusahaan sebesar Rp. 115,69 milyar. Proporsi kontribusi tersebut relatif sama pada tahun 2015 di mana proyeksi kontribusi antar sektor tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun 2014. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 mengalami perlambatan yang dipicu oleh antara lain rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan timah yang juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor kontruksi. Pada sektor pertambangan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah antara lain adanya kewajiban ekspor timah harus melalui bursa komoditi yang mensyaratkan kualitas tinggi dan asal kuasa penambangan menyebabkan produksi timah menurun. Selain itu, pemerintah juga memperketat pemberian ijin pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak salah satu produsen timah terbesar.

**Tabel II.9**
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Tahun 2010-2014 (juta rupiah)

| Lapangan Usaha | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6.097.691,31 | 7.070.641,47 | 8.111.873,43 | 9.269.819,71 | 10.836.997,55 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 6.077.439,20 | 6.810.151,35 | 6.975.347,45 | 7.097.518,72 | 7.620.761,91 |
| C. Industri Pengolahan | 9.174.667,79 | 10.321.934,66 | 11.043.825,57 | 12.093.054,14 | 12.890.074,75 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 24.117,15 | 26.151,26 | 27.089,35 | 27.367,54 | 40.961,42 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 6159,64 | 7.296,18 | 8.155,04 | 9.149,48 | 10.371,48 |
| F. Konstruksi | 2.531.854,85 | 2.927.076,61 | 3.523.144,50 | 4.139.266,59 | 4.712.122,52 |
| G. Perdagangan Besar dan EceranMotor | 4.720.707,47 | 5.477.834,76 | 6.193.486,73 | 6.670.326,53 | 7.570.023,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 1.161.976,28 | 1.349.921,54 | 1.577.156,28 | 1.864.719,90 | 2.128.766,34 |
| I. | Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 742.772,19 | 852.232,27 | 992.568,39 | 1.152.328,30 | 1.321.690,83 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 578.288,09 | 634.381,46 | 708.586,22 | 770.239,84 | 849.134,58 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 499.641,15 | 615.803,14 | 728.769,97 | 902.450,19 | 1.004.182,48 |
| L. | Real Estate | 987.085,00 | 1.178.229,32 | 1.388.288,28 | 1.602.869,70 | 1.836.553,09 |
| M, N. | Jasa Perusahaan | 85.434,70 | 99.907,87 | 116.137,59 | 134.448,22 | 153.989,64 |
| 0. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.597.080,96 | 1.993.797,05 | 2.243.455,66 | 2.618.022,68 | 3.042.905,19 |
| P. | Jasa Pendidikan | 706.120,23 | 823.969,23 | 997.993,51 | 1.173.738,75 | 1.369.797,36 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 360.424,98 | 417.347,05 | 487.637,43 | 552.656,72 | 629.862,75 |
| R, S.T .U | Jasa Lainnya | 210.443,17 | 242.367,29 | 276.712,93 | 315.929,30 | 371.658,40 |
| | ***PDRB*** | ***35.561.904,17*** | ***40.849.042,50*** | ***45.400.228,31*** | ***50.393.906,29*** | ***56.389.853,43*** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan sektor terhadap PDRB tersebut dapat dilihat seberapa jauh kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Selain itu dapat diperoleh informasi sektor dominan dan sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan.

Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 tumbuh sebesar 4,68 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24 persen, diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,55 persen dan Jasa Lainnya sebesar 7,95 persen.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (22,37 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (18,69 persen) dan Pertambangan dan Penggalian (14,38 persen).

Tabel II.10
Pertumbuhan dan Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2014

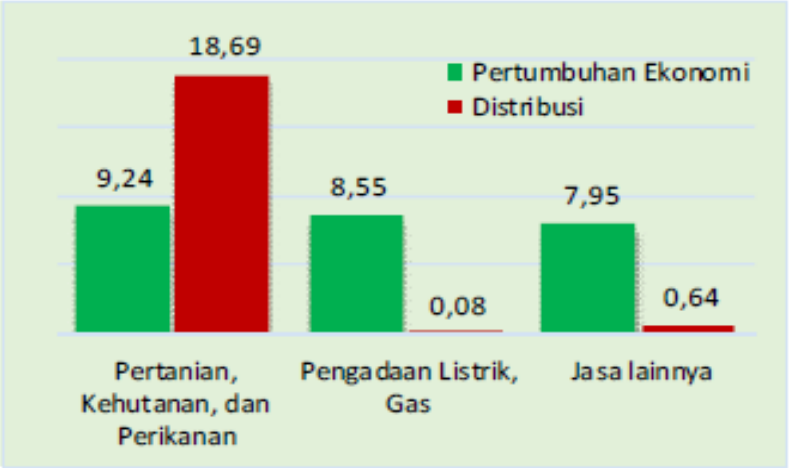


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,65 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,61 persen; kemudian Industri Pengolahan sebesar 0,32.

Tabel II.11
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Beberapa Lapangan Usaha 2014

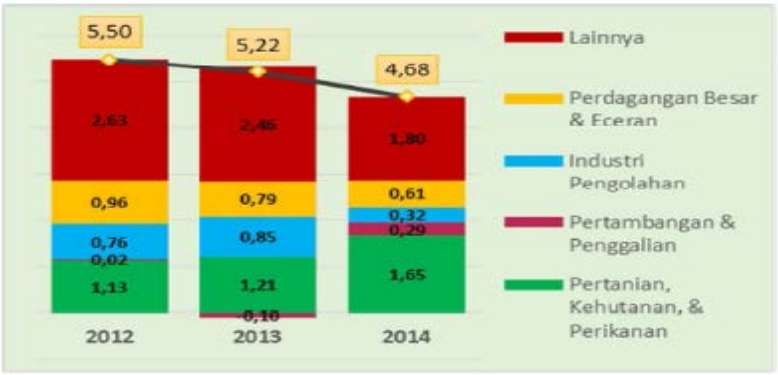


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera hanya mencapai 4,66 persen. Pertumbuhan ekonomi ini mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 4,97 persen. Kebijakan penghematan anggaran menjadi salah satu penyebab terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terjadi perlambatan perekonomian global yang membawa dampak bagi Indonesia termasuk wilayah Sumatera.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera tahun 2014 terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Delapan provinsi (termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera yang menunjukkan bahwa

provinsi-provinsi tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan dua provinsi lainnya di Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Aceh).

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Provinsi Jambi sebesar 7,93 persen, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 7,32 persen, dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,85 persen. Sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan kedelapan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68 persen. Struktur perekonomian Pulau Sumatera tahun 2014 secara spasial didominasi oleh tiga Provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Kontribusi ketiga provinsi tersebut mencapai 60,66 persen

terhadap total PDRB ADHB Pulau Sumatera. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat provinsi-provinsi tersebut merupakan provinsi yang kaya sumber daya alam. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menempati urutan kesembilan sebagai penyumbang PDRB di Pulau Sumatera, masih di bawah Provinsi Aceh yang menempati urutan kedelapan, namun di atas Provinsi Bengkulu yang menempati urutan terakhir. Kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan IV-2014 hanya sebesar 2,36 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,54 persen terhadap total PDRB 33 provinsi di Indonesia.

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2010- 2014 mengalami peningkatan, dapat dilihat pada Gambar II.10. Pada tahun 2010, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar 28,9 Juta rupiah, kemudian naik mencapai 32,8 juta rupiah pada tahun 2014 atau sebesar 3,9 juta rupiah.

**Gambar II.10**
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014

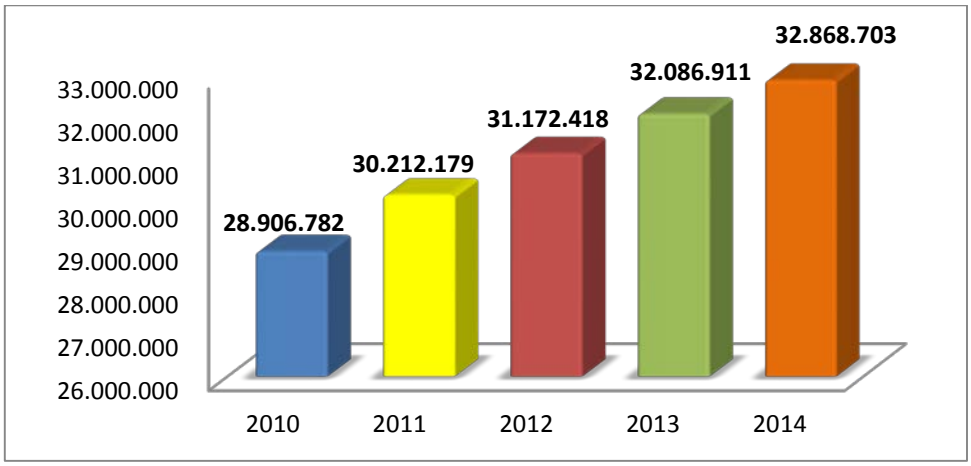


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2014*

## B. Laju Inflasi

Dalam periode waktu tahun 2010-2014, terjadi fluktuasi inflasi di Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2010 Inflasi menunjukkan angka 9,36 persen, kemudian pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 5,00 persen. Sedangkan pada tahun 2012 inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 6,57 persen dan di tahun 2013 sebesar 8,71 persen, namun pada tahun 2014 inflasi mengalami penurunan menjadi 6,81 persen.

**Gambar II.11**
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2010-2014

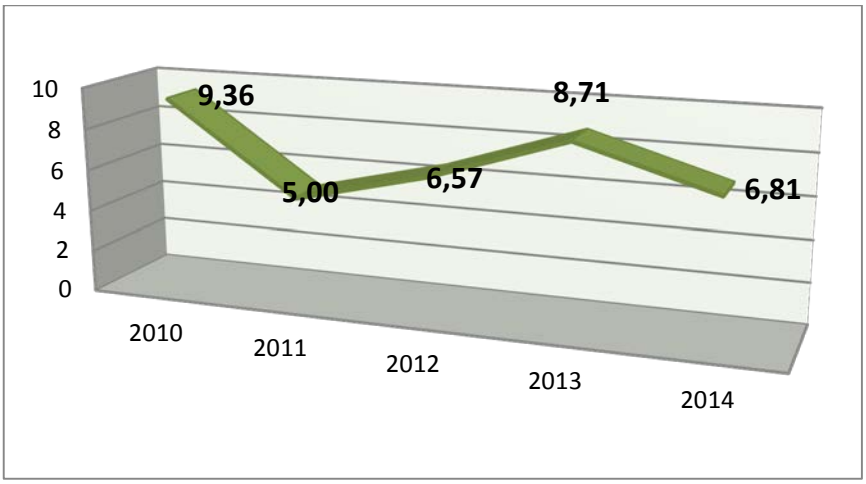


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Jika dicermati menurut kelompoknya, pada tahun 2014 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi, sedangkan kelompok perumahan mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,85 persen.

**Tabel II.12.**
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014

| Kelompok Pengeluaran | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **Umum** | **9,36** | **5,00** | **6,57** | **8,71** | **6,81** |
| 1. Bahan Makanan | 17,68 | -0,50 | 8,50 | 11,08 | 3,39 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau | 8,01 | 5,32 | 7,95 | 6,82 | 8,63 |
| 3. Perumahan | 4,08 | 7,52 | 5,81 | 9,20 | 8,85 |
| 4. Sandang | 4,86 | 8,83 | 5,79 | 1,63 | 6,61 |
| 5. Kesehatan | 2,98 | 7,09 | 5,19 | 5,08 | 8,13 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 21,33 | 8,73 | 10,31 | 3,77 | 6,65 |
| 7. Transportasi dan Komunikasi | 0,68 | 10,55 | -0,11 | 11,17 | 6,98 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, yang ditenggarai semakin tingginya permintaan akan produk terkait masalah kebutuhan perumahan, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Sementara itu, jika dibandingkan pada tahun 2010 sampai 2013 dengan inflasi nasional, Kota Palembang dan Kota sebagai wilayah yang terdekat dengan Kota Pangkalpinang, maka inflasi Kota Pangkalpinang selalu lebih tinggi. Namun pada tahun 2014 inflasi Kota Tanjungpandan mulai dihitung dan jika dibandingkan dengan inflasi nasional, Kota Palembang dan Kota Pangkalpinang, maka inflasi Kota Tanjungpandan paling tinggi diantara lainnya. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada gambar II.12.

**Gambar II.12**
Perbandingan Angka Inflasi Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional
Tahun 2014

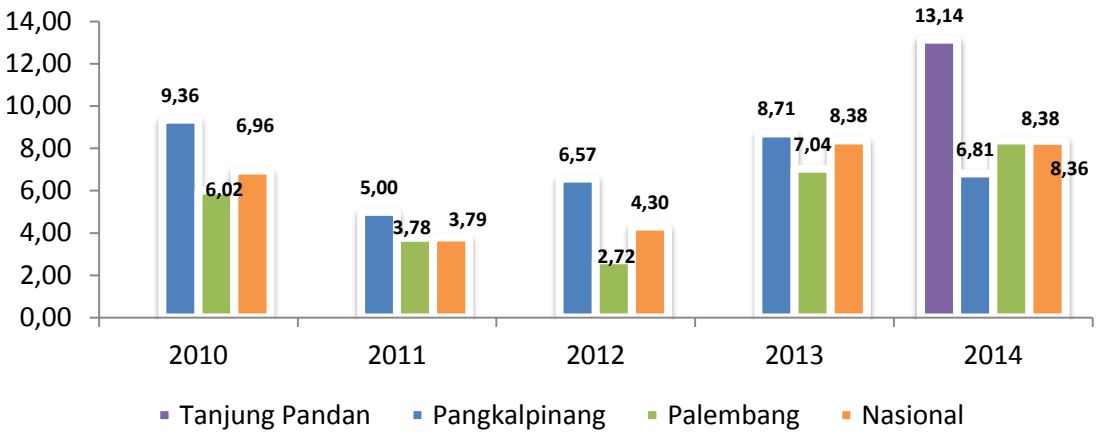


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*
*Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2014*

## C. Indeks Gini dan Pemerataan Pendapatan

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini cenderung menurun dari 0,30 pada tahun 2011 menjadi 0,29 pada tahun 2012 dan naik kembali pada tahun 2013 sebesar 0,31. Fenomena penurunan Rasio Gini sebagaimana yang ditampilkan pada gambar II.13 menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata.

**Gambar II.13**
Indeks Gini
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014

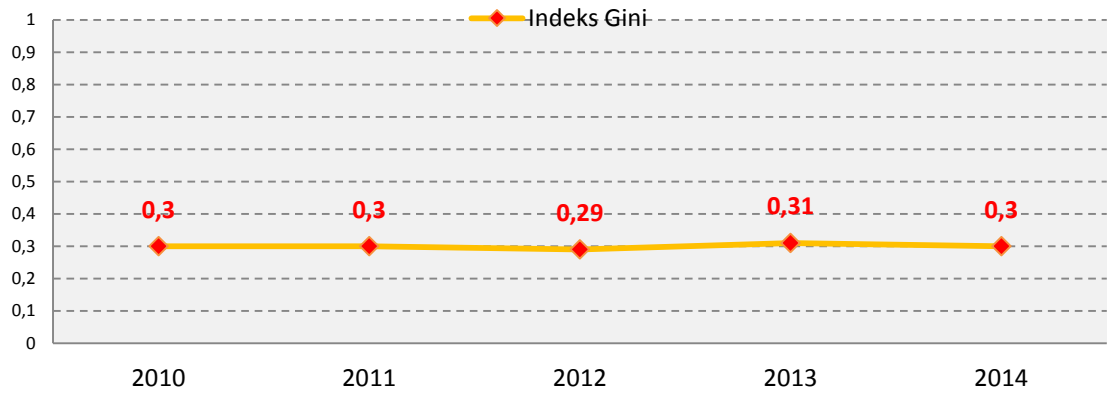


Sumber : *BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

## D. Indeks Ketimpangan Williamson

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang semakin menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 angka indeks sebesar 0,297 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284, dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar II.14 berikut:

**Gambar II.14**
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2014

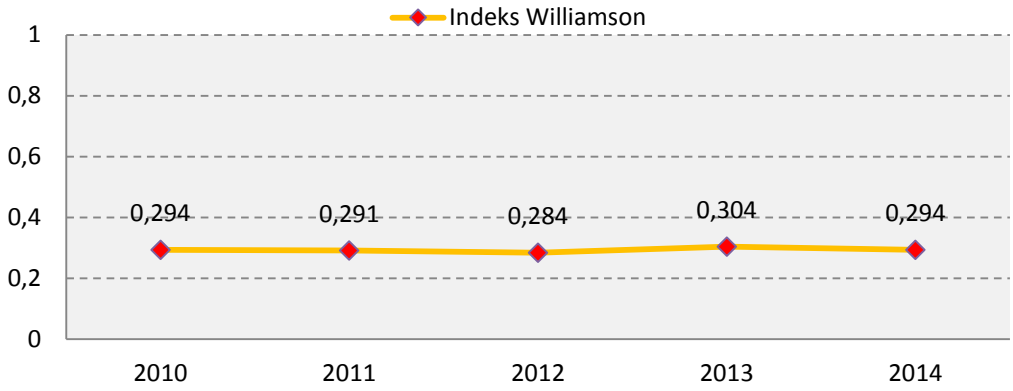


Sumber : Bappeda (diolah)

## E. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2009-2014 telah mengalami penurunan, yaitu dari 7,37% pada tahun 2009 menjadi 5,16% pada tahun 2011, namun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2012 menjadi 5,37%. Dan selanjutnya menurun pada tahun 2013 menjadi  Kemungkinan kenaikan dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah angkatan kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan masih kurang. Selain itu tingkat migrasi tinggi, sementara kualitas penduduk yang masuk tersebut relatif masih rendah. Sementara itu Indeks Kedalaman Kemiskinan secara konsisten menurun dalam 5 tahun terakhir. Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai angka  terendah pada tahun 2012 (Tabel II.13).

**Tabel II.13**
Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010 s.d. 2014

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Persentase Penduduk Miskin (%) | 6,51 | 5,16 | 5,37 | 5,25 | 4,97 |
| 2. | Jumlah Penduduk Miskin | 67.750 | 65.550 | 70.210 | 70.900 | 67.230 |
| 3. | Garis Kemiskinan (Rp) | 286.330 | 243.729 | 382.412 | 427.081 | 469.814 |
| 4. | Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) | 0,93 | 0,84 | 0,65 | 0,62 | 0,60 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Tabel II.14**
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010 s.d. 2014

| No. | Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Tingkat Kemiskinan Kota (%) | 4,39 | 3,35 | 3,37 | 3,47 | 3,04 |
| 2. | Tingkat Kemiskinan Desa (%) | 8,45 | 6,91 | 6,69 | 6,97 | 6,84 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Memperhatikan Tabel II.14, pada tahun 2014 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sedikit meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Data tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan di perdesaan masih dominan daripada di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

**Tabel II.15**
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

| No. | Kabupaten/ Kota | Persentase Penduduk Miskin (%) | Jumlah Penduduk Miskin | Garis Kemiskinan (Rp) | Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks keparahan Kemiskinan (P2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kab. Bangka | 5,36 | 15.410 | 315.548 | 0,63 | 0,13 |
| 2. | Kab. Belitung | 6,97 | 11.290 | 416.041 | 0,81 | 0,13 |
| 3. | Kab. Bangka Barat | 3,59 | 6.530 | 305.500 | 0,57 | 0,14 |
| 4. | Kab. Bangka Tengah | 5,56 | 9.300 | 387.786 | 0,78 | 0,19 |
| 5. | Kab. Bangka Selatan | 4,23 | 7.600 | 308.328 | 0,56 | 0,11 |
| 6. | Kab. Belitung Timur | 7,13 | 7.880 | 380.813 | 0,90 | 0,24 |
| 7. | Kota Pangkalpinang | 4,15 | 7.530 | 378.275 | 0,46 | 0,10 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.15,dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin dan indeks keparahannya yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur. Persentase indeks dengan tingkat keparahan terendah adalah Kota Pangkalpinang.

Sementara itu berdasarkan Gambar II.15 berikut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2013 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional). Dari 33 provinsi yang ada, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada peringkat ke 4 (empat).

**Gambar II.15**
Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional
Tahun 2013

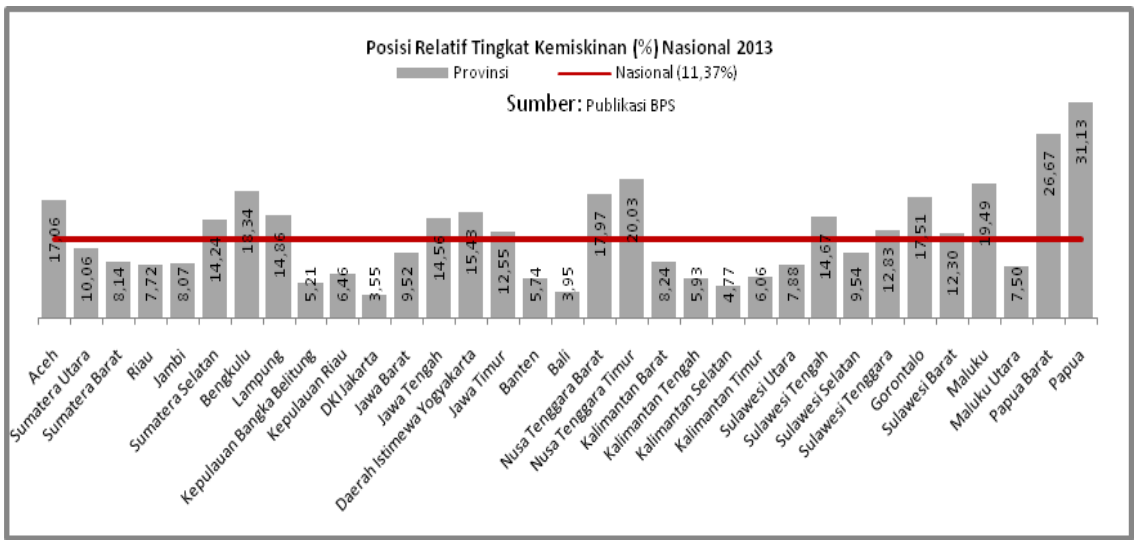


Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Berdasarkan Gambar II.16 memperlihatkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang tajam dalam tingkat kemiskinan (%) antar wilayah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung Timur perlu mendapat perhatian khusus dalam intervensi kebijakan, karena tingkat kemiskinan (%) berada jauh di atas rata-rata provinsi.

**Gambar II.16**
Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Prov. Kep. Babel dengan Nasional dan Kab/Kota,
Tahun 2012

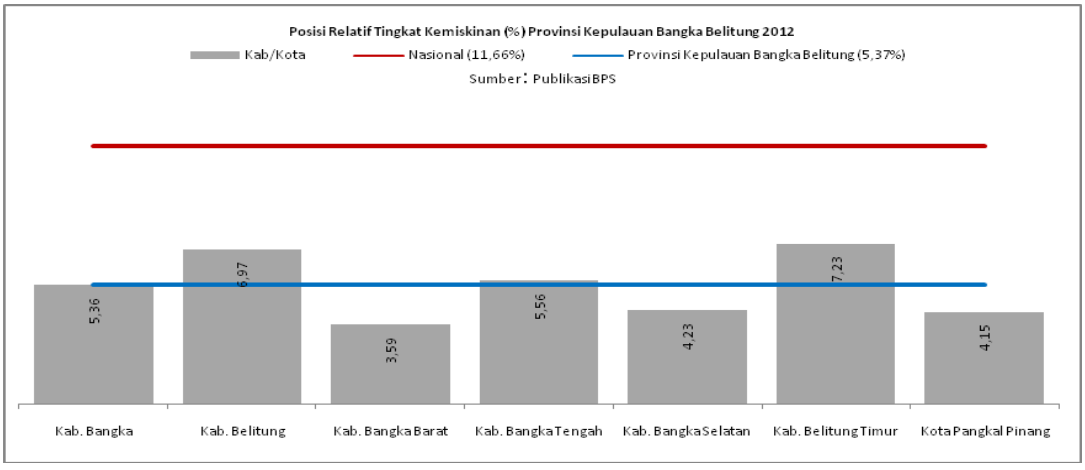


*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dibandingakan dengan rata-rata nasional. Dimana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah 69.220 jiwa sedangkan nasional berjumlah 28.066.560 jiwa.

**Gambar II.17**
Grafik Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Prov. Kep. Babel dengan Nasional
Tahun 2013

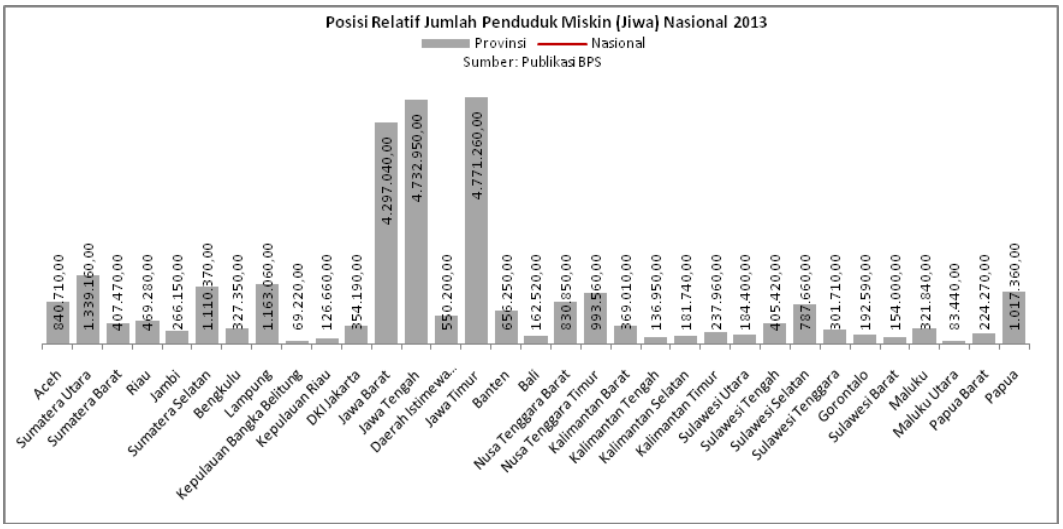


*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

## F. Perkembangan Nilai Investasi

Perkembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 menunjukkan pertumbuhan, baik Penanaman Modal Luar Negeri maupun Penanaman Modal Dalam Negeri.

**Tabel II.16**
Perkembangan Nilai Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2010-2014

| Investasi | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jan-Sept |
| PMA | Jumlah Proyek | 22 | 48 | 46 | 37 | 27 |
| | Nilai (Rp Milyar) | 21,96 | 146,05 | 59,18 | 81,52 | 903,11 |
| PMDN | Jumlah Proyek | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| | Nilai (Rp Milyar) | 0,36 | 514,40 | 533,46 | 542,3 | 113,85 |

*Sumber: BP2TPM, 2014*

Pertumbuhan investasi terutama terjadi pada investasi non bangunan yang terindikasi dari masih tingginya pertumbuhan impor mesin di triwulan III 2013 untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Data dari BKPM juga menunjukkan adanya peningkatan realisasi PMDN pada triwulan laporan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

## G. Angka Kriminalitas

Dalam penciptaan iklim investasi, angka kriminalitas di suatu daerah menjadi perhatian investor untuk melakukan investasi. Berdasarkan data, tindak pidana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan keamanan masyarakat. Adapun perkembangan angka kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.17.

**Tabel II.17**
Jumlah Tindak Pidana Menurut Jenisnya
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2013

| No | Jenis Tindak Pidana | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Pencurian/perampokan | 198 | 217 | 120 | 318 | 357 |
| 2. | Penganiayaan | 76 | 65 | 48 | 75 | 98 |
| 3. | Pembunuhan | 11 | 4 | - | 12 | 13 |
| 4. | Kesusilaan | 2 | 1 | - | 50 | 39 |
| 5. | Psikotropika | 151 | 115 | 138 | 187 | 152 |

*Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

## H. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial menunjukkan adanya kemajuan dari tahun ke tahun. Tabel II.18 menunjukkan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun signifikan sejak tahun 2009. Kendatipun demikian permasalahan kesejahteraan sosial tetap merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Perkembangan data sosial disajikan pada Tabel II.18 danTabel II.19.

**Tabel II.18**
Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

| No. | Jenis PMKS | Total |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Anak Balita Terlantar (ABT) | 197 |
| 2 | Anak Terlantar (AT) | 1.608 |
| 3 | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 48 |
| 4 | Anak Jalanan | 9 |
| 5 | Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) | 529 |
| 6 | Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah) | 69 |
| 7 | Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus | 25 |
| 8 | Lanjut Usia Terlantar | 2.958 |
| 9 | Penyandang Disabilitasan | 5.056 |
| 10 | Tuna Susila | 84 |
| 11 | Gelandangan | 4 |
| 12 | Pengemis | 1 |
| 13 | Pemulung | 75 |

| No. | Jenis PMKS | Total |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 14 | Kelompok Minoritas | 10 |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP) | 175 |
| 16 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) | 53 |
| 17 | Korban Penyalahgunaan Napza | 360 |
| 18 | Korban Trafficking | 1 |
| 19 | Korban Tindak Kekerasan | 140 |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 1 |
| 21 | Korban Bencana Alam | 589 |
| 22 | Korban Bencana Sosial | 21 |
| 23 | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 2.552 |
| 24 | Fakir Miskin (FM) | 24.448 |
| | **Total Keseluruhan PMKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **39.013** |

*Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Tabel II.19**
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 s.d 2014

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 53.584 | 38.710 | 29.177 | 38.506 | 43.968 |

*Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Kondisi keluarga pra sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2010 – 2013 sebagaimana yang terlihat pada tabel II.20 berikut

**Tabel II.20**
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Tahun 2009 s.d 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No. | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Pra Sejahtera | 9.182 | 11.652 | 11.840 | 10.462 | 8.667 |
| 2. | Sejahtera 1 | 39.601 | 41.392 | 35.769 | 33.228 | 30.487 |
| 3. | Sejahtera 2 | 133.514 | 133.459 | 144.377 | 141.694 | 161.569 |
| 4. | Sejahtera 3 | 118.263 | 127.348 | 149.937 | 127.141 | 159.803 |
| 5. | Sejahtera 3+ | 4.767 | 5.271 | 5.863 | 9.333 | 32.909 |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Tabel II. 21**
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera
Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

| No. | Kab/Kota | Pra Sejahtera | Sejahtera 1 | Sejahtera 2 | Sejahtera 3 | Sejahtera +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Bangka | 1.697 | 4.181 | 32.264 | 38.059 | 2.691 |
| 2 | Belitung | 1.182 | 4.340 | 12.831 | 21.530 | 666 |
| 3 | Bangka Barat | 1.123 | 4.417 | 17.533 | 25.175 | 1.048 |
| 4 | Bangka Tengah | 1.599 | 5.837 | 23.462 | 22.866 | 3.697 |
| 5 | Bangka Selatan | 1.384 | 4.398 | 41.052 | 12.115 | 22.717 |
| 6 | Belitung Timur | 1.653 | 3.797 | 11.710 | 15.636 | 734 |
| 7 | Pangkalpinang | 29 | 3.557 | 22.717 | 24.827 | 1.366 |
| | **Prov.Kep. Babel** | **8.667** | **30.487** | **161.569** | **160.208** | **10.311** |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Gambar II.18**
Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Tahun 2013
Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung

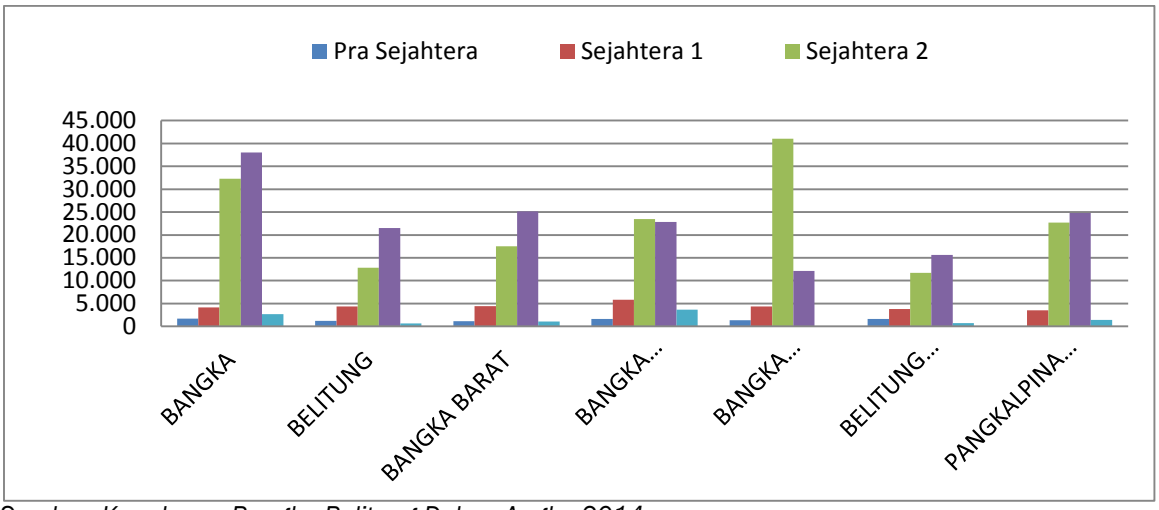


*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

Banyaknya keluarga pra sejahtera dan sejahtera di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut**.** Berdasarkan tingkatannya maka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak jumlahnya adalah Keluarga sejahtera 2, yang pada tahun 2013 mencapai angka 161.569 orang.

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Angka Melek Huruf

Salah satu indikator terlaksananya dengan baik pendidikan untuk masyarakat dapat diketahui melalui angka melek huruf. Angka Melek Huruf menggambarkan persentase penduduk umur 15 - 24 tahun yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, mulai dari tahun 2009 – 2013.

Tingkat atau ukuran angka melek huruf yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah, akan mampu memberikan gambaran tingkat kualitas penduduk wilayah tersebut secara umum. Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertera pada TabelII.22 dan Gambar II.19.

**Tabel II.22.**
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 +
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009 s.d 2013

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Kab. Bangka | 96,15 | 96,31 | 96,65 | 96,71 | 96,80 |
| 2 | Kab. Bangka Barat | 96,42 | 96,51 | 96,57 | 96,57 | 97,65 |
| 3 | Kab. Bangka Tengah | 92,89 | 92,86 | 93,59 | 93,85 | 94,08 |
| 4 | Kab. Bangka Selatan | 95,80 | 95,90 | 95,95 | 96,79 | 96,81 |
| 5 | Kab. Belitung | 92,67 | 93,62 | 93,66 | 93,68 | 94,60 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 96,63 | 96,69 | 96,71 | 96,74 | 97,63 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 98,18 | 98,18 | 98,20 | 98,22 | 98,30 |
| | **Provinsi Kep.BangkaBelitung** | **95,63** | **95,69** | **95,83** | **95,88** | **96,44** |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2014*

**Gambar II.19.**
Angka Melek Huruf Usia 15 + Tahun Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

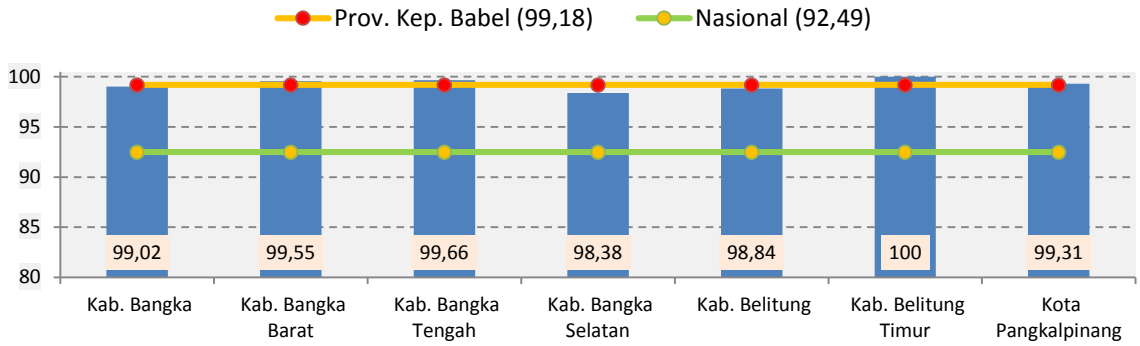


*Sumber:Bangka Belitung Dalam Angka Tahun 2014*

Pencapaian angka melek huruf yang belum sampai 100 menunjukkan bahwa di provinsi ini belum bebas buta huruf, kemungkinan bisa disebabkan oleh masih ada penduduk berusia diatas 15 tahun yang sudah berusia lanjut dan tidak bisa membaca dan menulis. Terdapat anggapan pada masyarakat awam bahwa kebutuhan untuk bisa membaca dan menulis berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah berumur tua dan tidak akan bekerja lagi, atau pekerjaannya tidak memerlukan kecakapan membaca dan menulis, maka mereka menganggap tidak perlu lagi untuk belajar membaca dan menulis. Tantangannya adalah untuk membuka wawasan bahwa baca dan tulis tidak kalah penting dibandingkan kebutuhan lainnya.

## B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Tabel II.23**
Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

| No | Provinsi/Kabupaten/Kota | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Kab. Bangka | 7,58 | 7,64 | 8,00 | 8,10 | 8,10 |
| 2 | Kab. Belitung | 7,79 | 7,81 | 7,84 | 7,85 | 7,99 |
| 3 | Kab. Bangka Barat | 6,77 | 6,87 | 6,95 | 7,02 | 7,09 |
| 4 | Kab. Bangka Tengah | 6,94 | 6,86 | 6,96 | 7,17 | 7,18 |
| 5 | Kab. Bangka Selatan | 6,02 | 5,99 | 6,01 | 6,04 | 6,44 |
| 6 | Kab. Belitung Timur | 7,61 | 7,48 | 7,72 | 7,74 | 7,76 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 9,17 | 9,50 | 10,03 | 10,05 | 10,06 |
| | **Provinsi Kep.Bangka Belitung** | **7,41** | **7,45** | **7,58** | **7,68** | **7,73** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014*

**Gambar II.20**
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

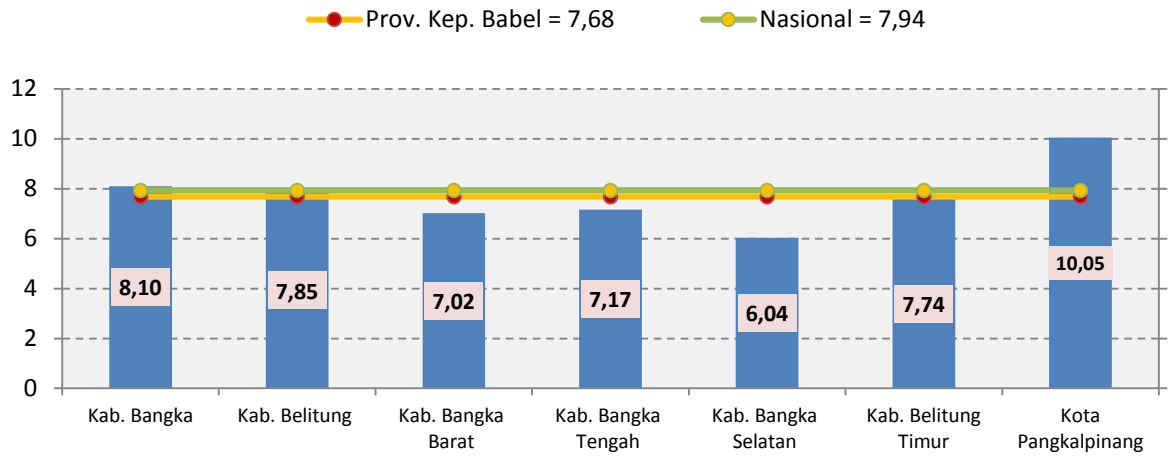


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013*

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2008-2013 berkisar antara 5,99 – 10,06 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2013 masih berada di Kota Pangkalpinang yaitu sebesar 10,06 tahun dan yang terendah masih ada di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 6,44 tahun, sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.23 dan Gambar II.20.

Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota. Tantangan yang ada yaitu berasal dari tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota. Rata-rata lama sekolah tertinggi adalah di Kota Pangkalpinang yaitu 10 tahun atau setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 2 (dua) tetapi belum tamat. Sedangkan rata-rata lama sekolah terendah adalah di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 6 (enam) tahun atau setingkat dengan SMP kelas 1 (satu) tetapi belum tamat. Perkembangan di Kabupaten Bangka Selatan relatif lambat dibandingkan kabupaten/kota lain. Capaian 2 (dua) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melampaui angka nasional yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sehingga bisa dikatakan masih terdapat disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

## C. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Perkembangan APK dan APM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebarannya pada tahun 2009/2010 – 2013/2014 pada berbagai jenjang pendidikan adalah sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.24, Tabel II.25 dan Tabel II.26.

**Tabel II.24**
Perkembangan APK SD/MI dan APM SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014

| No | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2009/2010 | | 2010/2011 | | 2011/2012 | | 2012/2013 | | 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Bangka | 120,58 | 95,44 | 118,64 | 93,91 | 113,37 | 92,82 | 116,01 | 96,80 | 114.22 | 94.64 |
| 2 | Belitung | 123,89 | 98,32 | 111,72 | 91,68 | 109,67 | 91,26 | 108,81 | 90,16 | 107.16 | 88.43 |
| 3 | Bangka Barat | 119,81 | 95,08 | 119,70 | 94,83 | 118,92 | 98,33 | 118,10 | 98,70 | 109.16 | 88.87 |
| 4 | Bangka Tengah | 121,53 | 96,08 | 116,32 | 93,58 | 116,41 | 94,24 | 111,68 | 91,03 | 115.13 | 96.50 |
| 5 | Bangka Selatan | 117,09 | 92,74 | 114,34 | 94,91 | 114,47 | 97,46 | 110,89 | 96,20 | 109.18 | 94.57 |
| 6 | Belitung Timur | 116,77 | 92,29 | 108,48 | 89,19 | 106,21 | 89,74 | 114,19 | 96,74 | 113.45 | 94.60 |
| 7 | Pangkalpinang | 126,76 | 99,78 | 121,69 | 98,64 | 121,10 | 102,51 | 130,21 | 109,64 | 126.62 | 102.67 |
| | **Provinsi Kep.Bangka Belitung** | **120,94** | **95,71** | **116,42** | **94,05** | **114,64** | **95,27** | **115,72** | **97,01** | **109,97** | **95,72** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Gambar II.21**
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional
Tahun 2008 s.d 2012

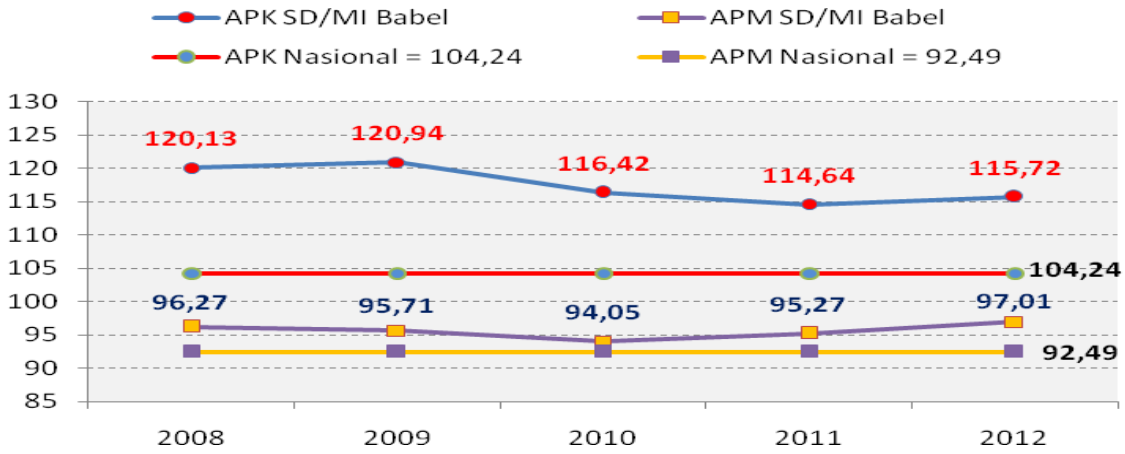


*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

**Tabel II.25**
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014

| No | Provinsi/ Kabupaten/Kota | 2009/2010 | | 2010/2011 | | 2011/2012 | | 2012/2013 | | 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Bangka | 94,96 | 71,90 | 96,89 | 72,49 | 94,17 | 60,94 | 100,86 | 66,14 | 96,79 | 64,75 |
| 2 | Belitung | 105,31 | 78,06 | 97,67 | 75,08 | 90,99 | 65,78 | 106,45 | 64,55 | 104,34 | 63,62 |
| 3 | Bangka Barat | 89,13 | 69,34 | 89,36 | 66,45 | 85,68 | 67,85 | 98,23 | 62,02 | 83,22 | 51,15 |
| 4 | Bangka Tengah | 92,74 | 63,99 | 90,80 | 65,36 | 96,80 | 62,75 | 85,24 | 52,87 | 92,61 | 62,95 |
| 5 | Bangka Selatan | 92,08 | 62,94 | 92,54 | 70,36 | 88,24 | 64,57 | 91,07 | 64,18 | 86,40 | 62,26 |
| 6 | Belitung Timur | 104,54 | 68,06 | 99,60 | 72,16 | 80,80 | 56,68 | 100,43 | 63,55 | 105,51 | 87,54 |
| 7 | Pangkalpinang | 113,55 | 87,17 | 113,27 | 82,91 | 102,07 | 71,50 | 107,20 | 68,33 | 121,92 | 77,84 |
| **Provinsi Kep.Bangka Belitung** | | **98,21** | **71,93** | **97,16** | **72,26** | **92,07** | **64,24** | **99,77** | **63,33** | **73,38** | **63,83** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Gambar II.22**
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional
Tahun 2008 s.d 2012

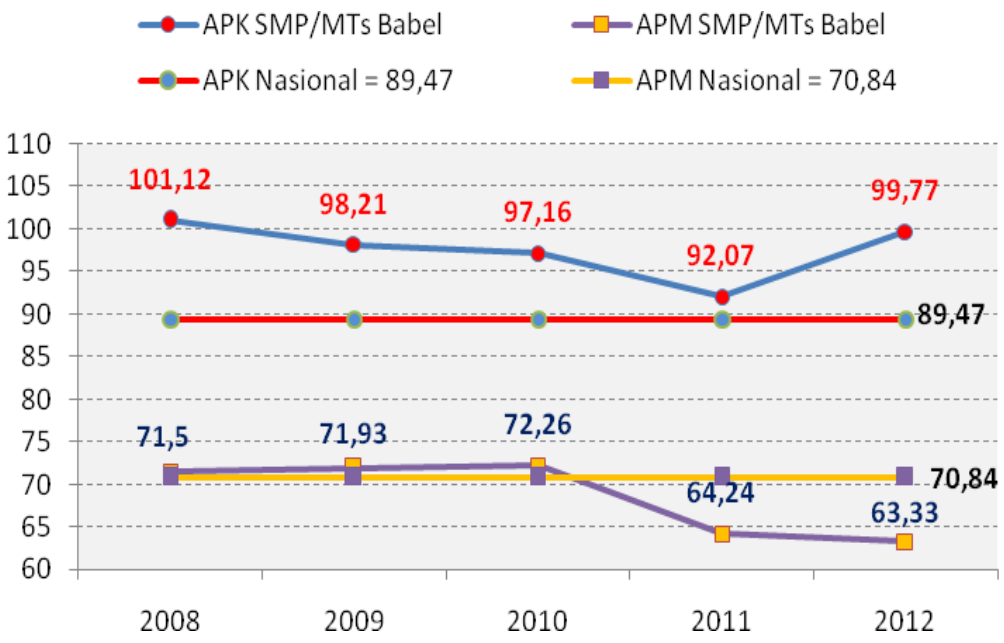


*Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

**Tabel II.26**
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009/2010 s.d 2013/2014

| No | Provinsi/ Kabupaten/ Kota | 2009/2010 | | 2010/2011 | | 2011/2012 | | 2012/2013 | | 2013/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM | APK | APM |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Bangka | 79,71 | 61,17 | 73,57 | 57,07 | 94,17 | 58,76 | 68,82 | 46,55 | 73,09 | 51,54 |
| 2 | Belitung | 76,98 | 61,86 | 71,16 | 55,09 | 66,88 | 36,90 | 76,76 | 50,81 | 75,12 | 49,96 |
| 3 | Bangka Barat | 60,50 | 48,67 | 62,66 | 48,16 | 55,60 | 40,53 | 71,00 | 47,87 | 55,57 | 38,55 |
| 4 | Bangka Tengah | 57,32 | 45,24 | 61,93 | 47,98 | 61,04 | 37,05 | 57,98 | 35,57 | 60,59 | 41,75 |
| 5 | Bangka Selatan | 51,73 | 38,77 | 55,59 | 42,20 | 55,49 | 35,17 | 53,92 | 37,25 | 44,90 | 33,09 |
| 6 | Belitung Timur | 61,61 | 48,92 | 62,62 | 48,13 | 65,13 | 35,16 | 64,30 | 36,14 | 77,98 | 67,46 |
| 7 | Pangkalpinang | 109,41 | 88,49 | 113,33 | 85,83 | 125,02 | 82,30 | 123,00 | 81,70 | 109,51 | 72,59 |
| **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | | **72,80** | **57,41** | **72,84** | **55,93** | **76,06** | **47,57** | **73,28** | **48,18** | **68,50** | **50,80** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Gambar II.23**
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA dan Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional
Tahun 2008 s.d 2012

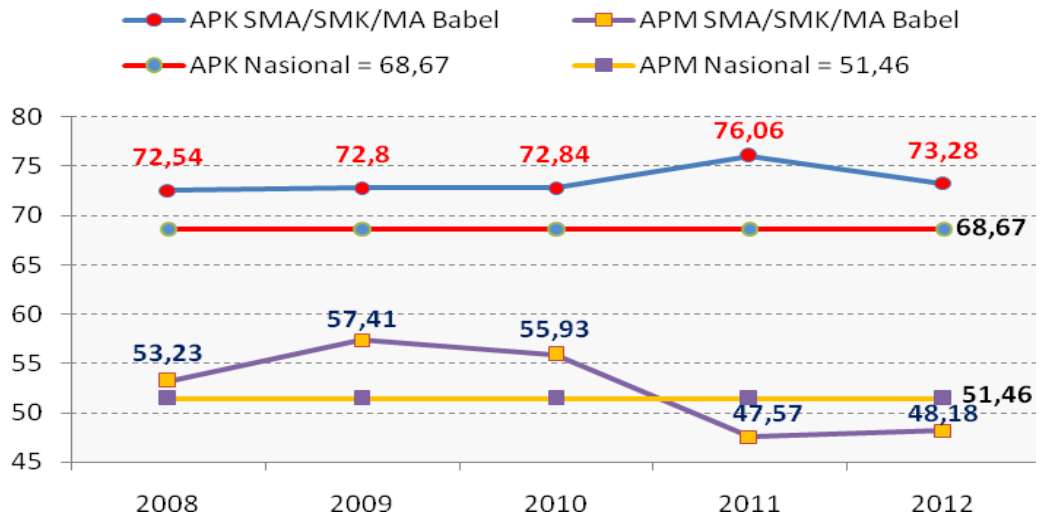


## D. Angka Kematian Bayi

Kesehatan menjadi salah satu topik perhatian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan harus menjadi topik strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel II.27**
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2011-2014

| No | Kabupaten/ Kota | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bayi | Bayi | Balita | Bayi | Balita | Bayi | Balita |
| (1) | (2) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| 1 | Bangka | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,80 | 6,96 | 16,2 | 5,35 | 6,73 |
| 2 | Belitung | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 16,78 | 14,75 | 14,16 | 12,91 | 13,81 |
| 3 | Bangka Tengah | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 10,23 | 4,95 | 4,95 | 5,74 | 6,74 |
| 4 | Bangka Barat | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 12,00 | 9,21 | 8,48 | 7,61 | 7,87 |
| 5 | Bangka Selatan | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 8,45 | 8,84 | 7,74 | 7,37 | 8,42 |
| 6 | Belitung Timur | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 10,63 | 14,73 | 12,84 | 10,22 | 11,15 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 7,20 | 4,73 | 3,48 | 2,92 | 3,16 |
| | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **9,67** | **9,67** | **9,67** | **10,45** | **8,52** | **7,60** | **6,92** | **7,78** |
| | **Nasional** | **3.40** | **4,00** | **3.40** | **4,00** | **3.40** | **4,00** | **3.40** | **4,00** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

**Gambar II.24**
Perbandingan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Tingkat Nasional Tahun 2008 s.d 2012

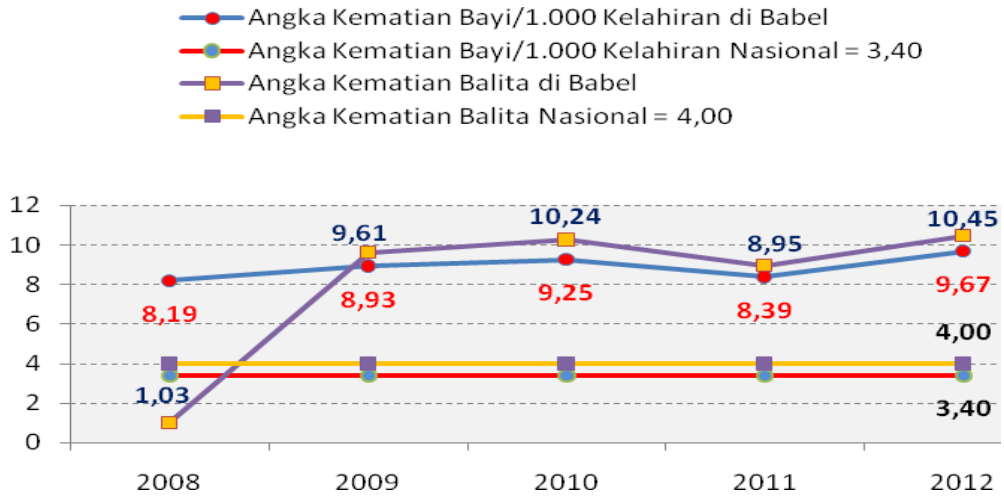


Berdasarkan Tabel II.24, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2008–2014 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan menurun, Untuk Tahun 2014 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,91 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 13,81. Meskipun di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi sebesar 6.92 dan balita sebesar 7.78 pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013 akan tetapi angka tersebut masih tinggi dibanding dengan angka kematian bayi ditingkat nasional yaitu angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar 3,40 dan angka kematian bayi ditingkat nasional sebesar 4,00 pada tahun 2014

**Tabel II.28**
Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk
di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2014

| No | Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (7) | (7) |
| 1 | Bangka | 0 | 0,69 | 0,72 | 0,78 | 0,72 |
| 2 | Belitung | 0 | 2,05 | 0 | 0,01 | 0 |
| 3 | Bangka Tengah | 0,07 | 2,11 | 0,05 | 0,11 | 0,05 |
| 4 | Bangka Barat | 0,13 | 2,67 | 0,20 | 0,17 | 0,20 |
| 5 | Bangka Selatan | 0,15 | 0,46 | 1,75 | 0,92 | 1,75 |
| 6 | Belitung Timur | 0,12 | 4,12 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 0,05 | 1,26 | 0,31 | 0,19 | 0,31 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **0,06** | **1,66** | **0,26** | **0,26** | **0,26** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Tabel II.29
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2014

| No | Kabupaten/Kota | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (7) |
| 1 | Bangka | 131,77 | 62,02 | 107,16 | 121,03 | 107,00 |
| 2 | Belitung | 199,27 | 99,04 | 167,84 | 176,99 | 120,05 |
| 3 | Bangka Tengah | 209,52 | 170,84 | 215,29 | 82,554 | 149,81 |
| 4 | Bangka Barat | 107,53 | 228,08 | 174,96 | 124,41 | 104,96 |
| 5 | Bangka Selatan | 141,64 | 156,45 | 109,02 | 107,12 | 105,26 |
| 6 | Belitung Timur | 223,59 | 210,53 | 151,90 | 92,081 | 46,45 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 130,79 | 198,76 | 74,53 | 124,6 | 48,63 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **154,24** | **149,83** | **137,56** | **119,69** | **100,88** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Angka kematian ibu pada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namum pada tahun 2014 daerah yang mengalami penurunan tingkat angka kematian ibu, yaitu pada Kota Pangkalpinang.

## E. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 sebesar 69,21 tahun. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 70,65 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung 69,36 tahun, Kabupaten Belitung Timur 69,28 tahun, dan Kabupaten Bangka Tengah 68,19 tahun, Kabupaten Bangka Selatan 68,13 tahun, Kabupaten Bangka 68,02 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 68,02 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

Tabel II.30
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2008-2013

| Provinsi/Kabupaten /Kota | Usia Harapan Hidup (tahun) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Bangka | 67,22 | 67,43 | 67,64 | 67,85 | 67,85 | 68,06 |
| Belitung | 68,99 | 69,08 | 69,17 | 69,26 | 69,26 | 69,36 |
| Bangka Barat | 67,54 | 67,66 | 67,78 | 67,90 | 67,90 | 68,02 |
| Bangka Tengah | 67,66 | 67,79 | 67,92 | 68,05 | 68,05 | 68,19 |
| Bangka Selatan | 67,31 | 67,51 | 67,72 | 67,92 | 67,92 | 68,13 |
| Belitung Timur | 68,36 | 68,60 | 68,83 | 69,06 | 69,06 | 69,28 |
| Pangkalpinang | 70,22 | 70,32 | 70,43 | 70,54 | 70,54 | 70,65 |
| **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **68,60** | **68,75** | **68,64** | **69,05** | **69,20** | **69,21** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014*

## F. Rasio Penduduk yang Bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Perkejaan di bidang pemerintahan, swasta, pertambangan, pertanian dan perkebunan, perikanan, jasa, dan sebagainya menjadi magnet tersendiri dalam ketenagakerjaan. Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka pertisipasi angkatan kerja, dan analisis perbandingan tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel dan Gambar berikut.

**Tabel II.31**
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2014

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Penduduk Usia kerja | 829.103 | 932.061 | 893.894 | 920.065 | 948.702 | 973.192 |
| 2. | Angkatan Kerja | 539.410 | 620.063 | 611.698 | 604.163 | 619.700 | 636.959 |
| 3. | Penduduk yang Bekerja | 506.284 | 585.136 | 589.634 | 583.102 | 596.786 | 604.223 |
| 4. | Pengangguran | 33.126 | 34.927 | 22.064 | 21.061 | 22.914 | 32.736 |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Gambar II.25**
Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 s.d 2013*

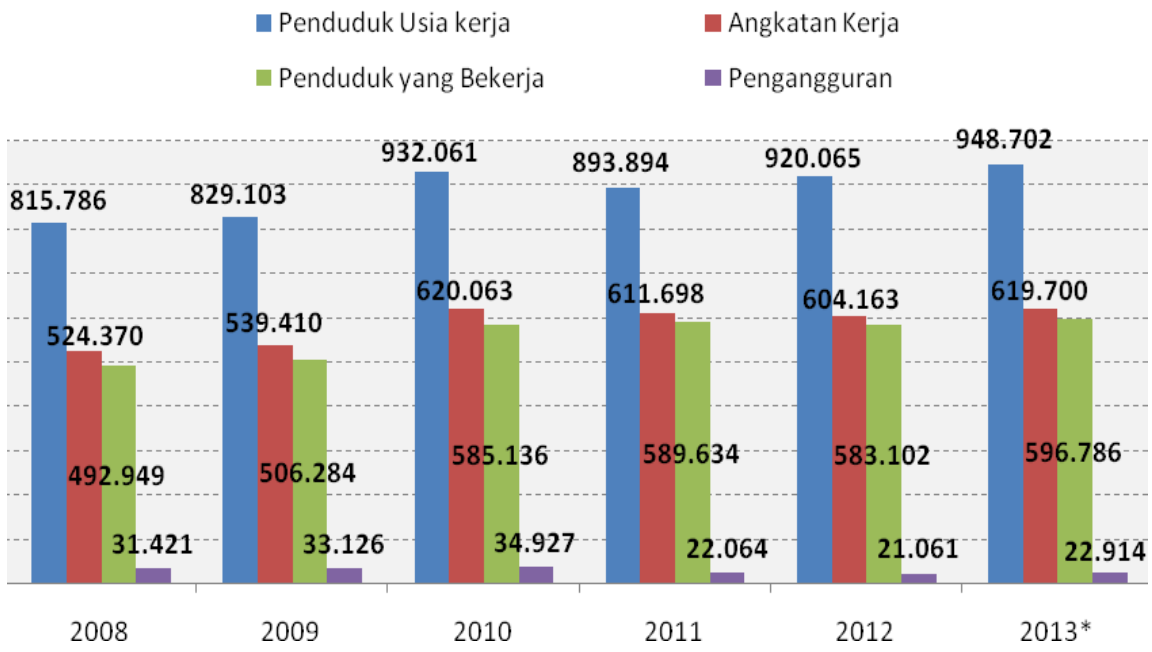


*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013*

**Tabel II.32**
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat PengangguranProvinsi kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009 s.d 2014*

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 65.06 | 66.53 | 68.43 | 65.67 | 62.91 | 65,45 |
| 2. | Tingkat Pengangguran | 6.14 | 5.63 | 3.61 | 3.49 | 3.70 | 5,14 |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Gambar II.26**
Tingkat Pengggangguran Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013

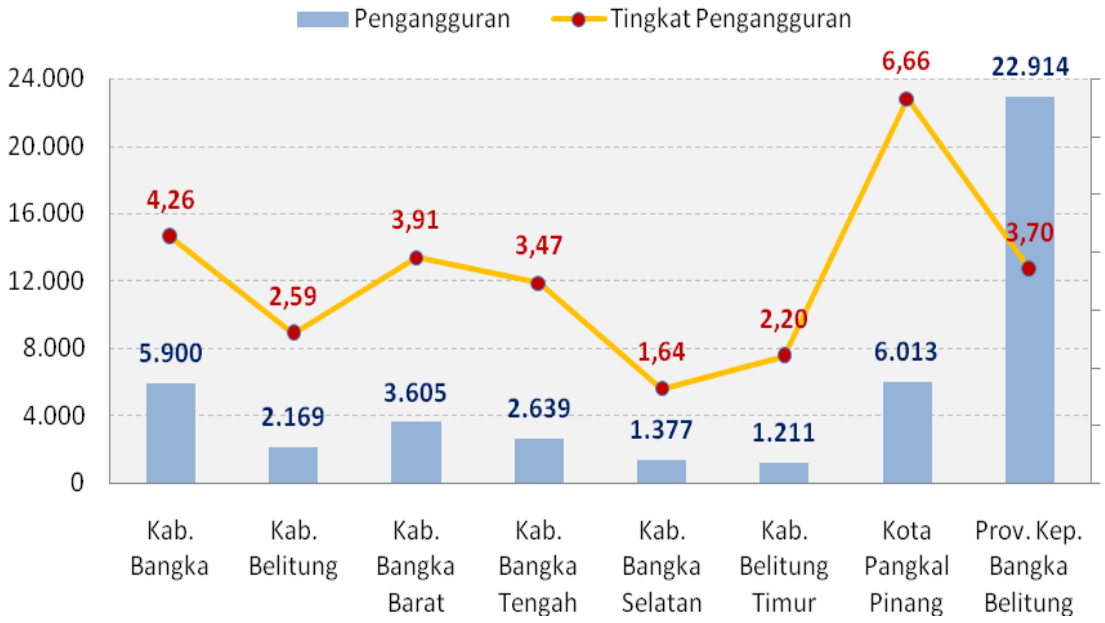


*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013*

Berdasarkan data yang telah ditampilkan, pada bidang ketenagakerjaan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan tahun 2014 menunjukkan adanya kenaikan tingkat pengangguran ke level 5,14 persen dengan jumlah pengangguran sebanyak 32.736 orang, angka ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 3,70 dengan jumlah pengangguran sebanyak 22.914 orang. Angka tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pangkalpinang dengan 8,84 persen dengan jumlah 8.204 orang dan yang terendah berada di Kabupaten Bangka barat dengan 1,21 persen dengan jumlah 1.083 orang. Namun yang perlu untuk mendapat perhatian adalah kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka yang pada tahun 2013 sebesar 4,26 persen dengan jumlah 5.900 orang menjadi sebesar 8,36 persen dengan jumlah sebesar 12.053 orang pada tahun 2014 itu berari naik sebesar 104,29 persen.

**Tabel II.33**
Data Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

| No | Kabupaten/Kota | Penduduk Usia kerja | TPAK | Angkatan Kerja | Penduduk yang Bekerja | Penganggu ran | Tingkat Penganggu ran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Kab. Bangka | 220.272 | 65,46 | 144.181 | 132.128 | 12.053 | 8,36 |
| 2. | Kab. Belitung | 126.662 | 67,08 | 84.969 | 82.200 | 2.769 | 3,26 |
| 3. | Kab. Bangka Barat | 136.813 | 63,48 | 86.854 | 84.219 | 2.635 | 3,03 |
| 4. | Kab. Bangka Tengah | 135.701 | 62,48 | 78.532 | 74.102 | 4.430 | 5,64 |
| 5. | Kab. Bangka Selatan | 133.833 | 67,12 | 89.823 | 88.740 | 1.083 | 1,21 |
| 6. | Kab. Belitung Timur | 86.961 | 68,79 | 59.821 | 58.259 | 1.562 | 2,61 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 142.950 | 64,90 | 92.779 | 84.575 | 8.204 | 8,84 |
| | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **973.192** | **65,45** | **636.959** | **604.223** | **32.736** | **5,14** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya walaupun ada sedikit perubahan persentase di setiap sektor. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertanian pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2012 yaitu dari 28.06 persen menjadi 31,41 persen ini dipicu karena semakin membaiknya harga lada di pasaran sehingga memberi motivasi bagi masyarakat untuk menanam lada. Namun penurunan persentase penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor pertambangan yaitu dari 21,28 persen tahun 2013 menjadi 17,50 persen pada tahun 2014 hal ini karena semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah.

**Tabel II.34**
Penduduk 15 tahun ke atas menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2014 (Persen)

| Lapangan Pekerjaan Utama | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014* |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **Sektor Primer :** | | | | | |
| 1. Pertanian | 32,72 | 25,93 | 28,60 | 28,06 | 31,41 |
| 2. Pertambangan | 20,00 | 25,19 | 22,10 | 21,28 | 17,50 |
| **Sektor Sekunder:** | | | | | |
| 3. Industri Pengolahan | 4,47 | 5,46 | 6,20 | 6,06 | 5,88 |
| 4. Listrik, Gas dan Air | 0,13 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,21 |
| 5. Bangunan | 4,45 | 4,55 | 5,40 | 4,99 | 5,16 |
| **Sektor Tersier:** | | | | | |
| 6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 21,48 | 18,98 | 19,90 | 18,49 | 20,45 |
| 7. Angkutan, Pergudangan & Telekomunikasi | 2,58 | 2,24 | 2,40 | 2,90 | 2,86 |
| 8. Keuangan dan Jasa Perusahaan | 0,93 | 1,90 | 1,80 | 1,93 | 2,19 |
| 9. Jasa Kemasyarakatan | 13,23 | 15,51 | 13,40 | 15,94 | 14,35 |
| **Jumlah** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2014*

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

#### A. Seni Budaya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilkinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalahPerang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu, Maras Taun, Beripat, dsb. Pelestarikan nilai-nilai seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tak lepas dari peran grup kesenian yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, sebagaimana yang tergambarkan pada Tabel II.35. Kendatipun demikian hingga saat ini belum ada satu pun gedung kesenian di Provinsi ini.

**Tabel II.35**
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 s.d 2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Jumlah Grup Kesenian | 106 | 114 | 169 | 217 | 217 | 260 |
| 2. | Jumlah Gedung Kesenian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014*

**Tabel II.36**
Perkembangan Seni dan Budaya
Provinsi kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2014

| No | Grup Kesenian | Pangkalpinang | Bangka | Bangka Tengah | Bangka Selatan | Bangka Barat | Belitung | Belitung Timur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Sanggar | 40 | 30 | 19 | 21 | 23 | 44 | 40 |
| 2. | Grup Rabana | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 3. | Grub Dambus | - | 19 | - | - | - | - | - |
| 4. | Perk. Barongsai | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | Jumlah | 40 | 69 | 19 | 22 | 23 | 45 | 42 |

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2014*

## B. Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktifdibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan,harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan takberguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwakepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosialmerupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yangbermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obatdanterlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positifdan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio - ekonomi danpolitik.

Pemuda adalah aset dan sumber daya yang terus dipanggil untukberpartisipasi dalam komunitas dan juga isu-isu keuangan, disamping memberikanpelayanan pada masyarakat yang berefek pembelajaran keterampilan untuk bekerjabertanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang

ada di masyarakat. Pemuda dijadikan mitra bersama masyarakat untuk menciptakanlingkungan yang kondusif dan memfasilitasi untuk berkarya. Disamping itu pemudajuga mesti memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untukberpartisipasi dalam perubahan di dalam komunitasnya.

## C. Olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelakupembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007–2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakannya lahan seluas ± 50 Ha untuk pembangunan *Sport Center,* saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

Sampai dengan tahun 2012 jumlah prasarana olahraga yang paling banyak terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lapangan bola voli dengan 526 lapangan, kemudian secara berurutan, lapangan sepakbola (456 lapangan), lapangan bulutangkis (287 lapangan), lapangan tenis (171 lapangan), lapangan basket (108 lapangan), lapangan futsal (79 lapangan), hall fitnes (21 hall), lapangan voli pantai (13 lapangan), stadion sepakbola (12 lapangan), GOR (10 GOR), dan kolam renang (9 tempat).

Data yang diperoleh dari SKPD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335perkumpulan), kemudian bola voli (84 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan).

Tabel II.37
Jumlah Perkumpulan 6 (Enam) Cabang Olahraga
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

| No | Cabang Olahraga | Bangka | Belitung | Bangka Barat | Bangka Tengah | Bangka Selatan | Belitung Timur | Pangkal pinang | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Atletik | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | Sepakbola | 33 | 66 | 64 | 36 | 58 | 65 | 13 | 335 |
| 3 | Bola Voli | 4 | 15 | 19 | 16 | 23 | 4 | 3 | 84 |
| 4 | Bola Basket | 10 | 3 | 14 | - | 3 | 2 | 10 | 42 |
| 5 | Bulutangkis | 10 | 12 | 4 | 19 | 5 | 3 | 14 | 67 |
| 6 | Pencak silat | 9 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 18 | 52 |
| | **Jumlah** | **68** | **103** | **103** | **82** | **102** | **77** | **60** | **595** |

Sumber: SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kep. Babel
dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

#### A. Urusan Pendidikan

#### 1. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tercantum dalam tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan bahwa *stakeholder* pendidikan menganggap pendidikan adalah kebutuhan hidup yang penting. Hal ini dipertegas lagi melalui angka partisipasi sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan perbandingan jumlah murid kelompok usia tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Berdasarkan data, Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya disemua jenjang pendidikan yang ada. Perkembangan APS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2009/2010 – 2013/2014,sebagaimana yang tercantum pada Tabel II.38 dan Gambar II.28.

**Tabel II.38**

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009/2010 s.d.2013/2014

| No | Jenjang Pendidikan | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1.1. | Jumlah murid usia 7-12 thn | 121.462 | 126.973 | 131.465 | 153.832 | 149.999 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun | 128.066 | 135.784 | 138.919 | 141.915 | 146.526 |
| 1.3. | APS SD/MI | 94,84 | 93,51 | 94,63 | 108,40 | 102,37 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | |
| 2.1. | Jumlah murid usia 13-15 thn | 39.509 | 37.859 | 40.859 | 57.500 | 59.893 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 56.561 | 57.742 | 62.001 | 62.850 | 65.640 |
| 2.3. | APS SMP/MTs | 69,85 | 65,56 | 65,90 | 91,49 | 91,24 |
| 3 | SMA/SMK/MA | | | | | |
| 3.1. | Jumlah murid usia 16-18 thn | 35.484 | 29.380 | 25.430 | 36.420 | 37.878 |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun | 54.134 | 56.592 | 54.729 | 61.593 | 60.657 |
| 3.3. | APS SMA/SMK/MA | 65,55 | 51,91 | 46,46 | 59,13 | 62,45 |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Gambar II.27**

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008/2009 s.d 2012/2013

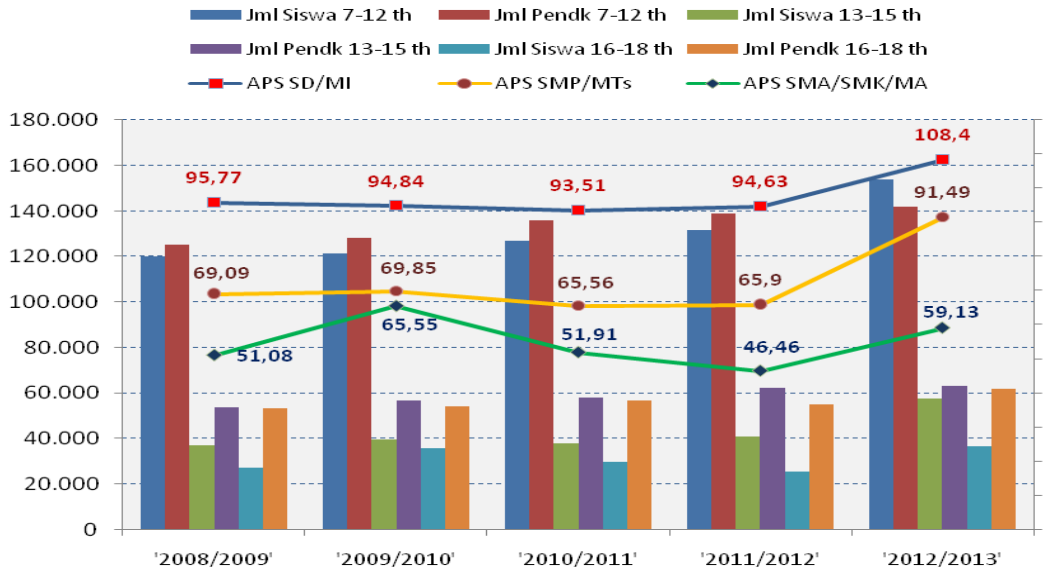


*Sumber:Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

Kondisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APS pada berbagai jenjang pendidikan di kabupaten/kota tahun 2012 ditampilkan pada Tabel II.38.

**Tabel II.39**
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

| No | Kabupaten /Kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/SMK/MA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | jumlah murid usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS | Jumlah murid 16-18thn | Jumlah penduduk usia 16-18thn | APS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Bangka | 33.722 | 34.451 | 102,16 | 14.610 | 13.701 | 93,78 | 9.992 | 8.217 | 82,24 |
| 2 | Belitung | 18.052 | 18.425 | 102,07 | 8.075 | 7.646 | 94,69 | 8.012 | 4.959 | 61,89 |
| 3 | Bangka Tengah | 19.243 | 19.201 | 99,78 | 8.176 | 6.651 | 81,35 | 8.404 | 4.182 | 49,76 |
| 4 | Bangka Barat | 24.164 | 22.169 | 91,74 | 10.703 | 8.409 | 78,57 | 9.562 | 4.690 | 49,05 |
| 5 | Bangka Selatan | 21.972 | 22.112 | 100,64 | 10.357 | 7.999 | 77,23 | 10.285 | 4.140 | 40,25 |
| 6 | Belitung Timur | 10.272 | 11.824 | 115,11 | 4.923 | 5.447 | 110,64 | 5.265 | 4.141 | 78,65 |
| 7 | Pangkalpinang | 19.101 | 21.817 | 114,22 | 8.796 | 10.040 | 114,14 | 9.137 | 7.549 | 82,62 |
| | **Jumlah** | **146.526** | **149.999** | **102,37** | **65.640** | **59.893** | **91,24** | **60.657** | **37.878** | **62,45** |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Memperhatikan data pada Tabel II.38, Tabel II.39 dan Gambar II.29, maka terlihat telah terjadi peningkatan yang cukup besar untuk APS tahun 2012/2013 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil identifikasi peningkatan APS pada jenjang pendidikan tersebut disebabkan karena makin tingginya angka melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih itnggi.

## 2. Angka Partisipasi Murni

### a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakatakan pendidikan tersebut. Dukungan di dalam pendidikan diwujudkan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengindikasikan daya serapan sekolah berbanding dengan peserta didik sebagaimana tertera pada Tabel II.40.

Tabel II.40
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013

| No | Kabupaten/ Kota | SD/MI | | | SMP/MTs | | | SMA/SMK/MA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah gedung sekolah | Jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio | Jumlah gedung sekolah | Jumlah penduduk 16-18 tahun | rasio |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Bangka | 183 | 35.949 | 50,91 | 51 | 13.352 | 38,20 | 32 | 16.354 | 19,57 |
| 2 | Belitung | 126 | 18.748 | 67,21 | 29 | 8.513 | 34,07 | 16 | 8.275 | 19,34 |
| 3 | Bangka Tengah | 95 | 20.582 | 46,16 | 23 | 7.993 | 28,78 | 14 | 9.123 | 15,35 |
| 4 | Bangka Barat | 136 | 21.769 | 62,47 | 48 | 8.785 | 54,64 | 20 | 8.729 | 22,91 |
| 5 | Bangka Selatan | 88 | 24.684 | 35,65 | 31 | 9.839 | 31,51 | 17 | 8.395 | 20,25 |
| 6 | Belitung Timur | 105 | 14.463 | 72,60 | 22 | 5.944 | 37,01 | 12 | 4.413 | 27,19 |
| 7 | Pangkalpinang | 85 | 19.966 | 42,57 | 26 | 8.424 | 30,86 | 22 | 8.974 | 24,52 |
| **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | **818** | **156.161** | **52,38** | **230** | **62.850** | **36,60** | **133** | **64.263** | **20,70** |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015*

## b. Rasio Murid dan Guru

Rasio murid per guru dididefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel dan Gambar berikut.

Tabel II.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2007-2013

| No | Jenjang Pendidikan | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | SD/MI | | | | | | | |
| 1.1. | Jumlah Guru | 8.092 | 8.255 | 9.356 | 9.561 | 9.687 | 9.905 | 9.843 |
| 1.2. | Jumlah Murid | 144.345 | 148.494 | 151.827 | 155.774 | 159.256 | 161.533 | 163.325 |
| 1.3. | Rasio | 17,84 | 17,99 | 16,23 | 16,29 | 16,44 | 16,31 | 17 |
| 2 | SMP/MTs | | | | | | | |
| 2.1. | Jumlah Guru | 3.261 | 3.295 | 3.571 | 3.790 | 3.753 | 3.934 | 4.063 |
| 2.2. | Jumlah Murid | 45.724 | 48.550 | 49.158 | 51.101 | 53.538 | 58.517 | 62.411 |
| 2.3. | Rasio | 14,02 | 14,73 | 13,77 | 13,48 | 14,27 | 14,87 | 15 |
| 3 | SMA/SMK/MA | | | | | | | |
| 3.1 | Jumlah Guru | 2.870 | 2.977 | 3.124 | 3.290 | 3.306 | 3.458 | 3.407 |
| 3.2. | Jumlah Murid | 33.524 | 34.938 | 34.072 | 27.213 | 38.356 | 41.999 | 45.330 |
| 3.3. | Rasio | 11,68 | 11,73 | 10,90 | 8,27 | 11,60 | 12,15 | 13 |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Gambar II.28**
Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012

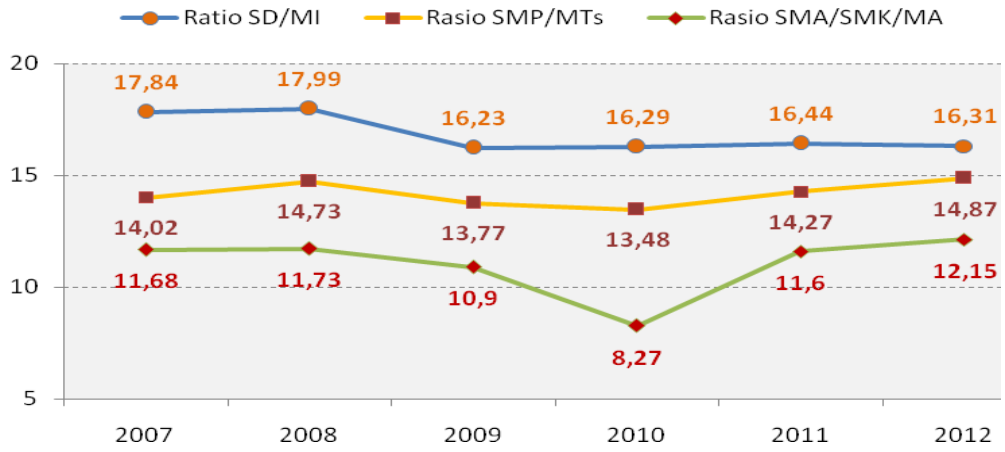


*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013*

## B. Urusan Kesehatan

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.42, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2012 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar, seperti terjadi di Kabupaten Belitung yang mengalami peningkatan sebesar 78,44 persen, diikuti Kabupaten Belitung Timur 72,39 persen, Kota Pangkalpinang 91,84 persen, Kabupaten Bangka Tengah 78,87 persen dan Kabupaten Bangka Selatan 73,80 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Bangka Barat menjadi 54,66 persen dan Kabupaten Bangka menjadi 81,39 persen.

**Tabel II.42**
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Bangka | 62,99 | 68,01 | 30,55 | 83,3 | 81,39 | 87,7 |
| 2 | Belitung | 52,33 | 11,84 | 48,15 | 15,5 | 78,44 | 75,6 |
| 3 | Bangka Tengah | 80,70 | 17,74 | 62,21 | 60,8 | 78,87 | 48,2 |
| 4 | Bangka Barat | 69,77 | 85,24 | 70,86 | 78,5 | 54,66 | 87,4 |
| 5 | Bangka Selatan | 96,76 | 11,94 | 13,41 | 62,7 | 73,80 | 76,4 |
| 6 | Belitung Timur | 42,72 | 2,42 | 25,49 | 48,6 | 72,39 | 100 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 11,42 | 5,37 | 13,29 | 50,6 | 91,84 | 92,0 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **58,28** | **28,29** | **36,69** | **60,00** | **76,38** | **80,2** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.43**
Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Bangka | 9,47 | 4,05 | 1,71 | 1,77 | 1,67 | 0,97 |
| 2 | Belitung | 6,31 | 3,20 | 2,72 | 2,61 | 1,97 | 0,66 |
| 3 | Bangka Tengah | 5,06 | 6,81 | 5,91 | 8,27 | 4,28 | 2,13 |
| 4 | Bangka Barat | 18,50 | 16,58 | 14,10 | 8,62 | 4,52 | 4,23 |
| 5 | Bangka Selatan | 8,87 | 14,83 | 4,93 | 5,64 | 2,08 | 0,66 |
| 6 | Belitung Timur | 6,61 | 9,62 | 5,03 | 0,95 | 1,58 | 0,57 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 10,43 | 7,35 | 1,48 | 1,02 | 0,67 | 0,39 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **9,47** | **8,46** | **4,82** | **4,10** | **2,36** | **1,39** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2008–2012 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya walaupun ada yang mengalami kenaikan seperti yang terjadi di Kabupaten Belitung Timur sebesar 1,58 pada tahun 2012. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian seriusdari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianyaakses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang terlaporkan pun semakin banyak. AIDS(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karenamenurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*).Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa populasiberisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah denganepidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67 %, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 disajikan dalam gambar berikut:

**Tabel II.44**
Perkembangan Prevelensi HIV
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) |
| 1 | Bangka | 0,99 | 0 | 0 | 8,33 | 3,94 | 3,94 |
| 2 | Belitung | 4,67 | 4,67 | 0,56 | 2,70 | 1,80 | 0 |
| 3 | Bangka Tengah | 14,58 | 0 | 8,11 | 2,50 | 0,01 | 0 |
| 4 | Bangka Barat | 9,09 | 2,37 | 4,94 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bangka Selatan | 0,00 | 2,27 | 0 | 3,17 | 9,84 | 1,08 |
| 6 | Belitung Timur | 2,04 | 2,84 | 3,85 | 0,20 | 0,02 | 2,17 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 10,99 | 0 | 1,96 | 6,98 | 10,33 | 6,67 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **5,53** | **3,0** | **8,11** | **8,33** | **10,33** | **13,86** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwapeningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan,melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang terlaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

**Tabel II.45**
Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
per 100.000 penduduk(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Bangka | 4,13 | 20,82 | 8,08 | 5,60 | 25,92 | 43,15 |
| 2 | Belitung | 38,04 | 15,02 | 56,94 | 19,88 | 214,38 | 111,81 |
| 3 | Bangka Tengah | 2,13 | 51,04 | 38,22 | 3,33 | 111,48 | 87,21 |
| 4 | Bangka Barat | 14,30 | 27,78 | 40,12 | 49,10 | 98,85 | 66,72 |
| 5 | Bangka Selatan | 3,17 | 9,44 | 4,15 | 46,95 | 75,93 | 26,47 |
| 6 | Belitung Timur | 12,46 | 56,42 | 21,16 | 22,66 | 13,24 | 7,72 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 11,86 | 55,07 | 49,89 | 29,17 | 88,48 | 27,68 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **11,25** | **31,43** | **29,37** | **27,93** | **86,17** | **53,4** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2008-2013 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya, meskipun di beberapa daerah kabupaten/kota mengalami penurunan. Pada tahun 2013, kenaikan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah. Adapun daerah yang mengalami penurunan terdapat di Kabupaten Belitung Timur.

Secara umum, perkembangan angka penyakit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008–2013, ditampilkan pada Gambar II.29.

**Gambar II.29**
Perkembangan Angka Penyakit Tahun 2012
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

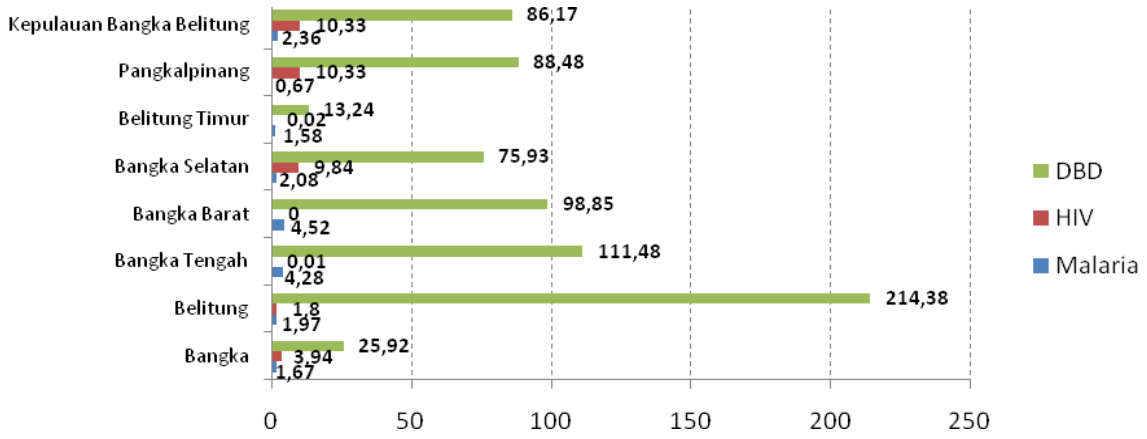


*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.46 dan Tabel II.47.

**Tabel II.46**
Perkembangan Jumlah Puskesmas
Di Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Bangka | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Belitung | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Bangka Tengah | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Bangka Barat | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Bangka Selatan | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | Belitung Timur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | **Kepulauan Bangka Belitung** | **54** | **55** | **58** | **58** | **59** | **60** |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2014*

**Tabel II.47**
Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

| No | Kabupaten/Kota | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Puskesmas | Puskesmas Pembantu |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Bangka | 11 | 37 | 11 | 35 | 11 | 37 | 11 | 36 | 12 | 36 |
| 2 | Belitung | 9 | 31 | 9 | 31 | 9 | 31 | 9 | 31 | 9 | 31 |
| 3 | Bangka Tengah | 7 | 28 | 7 | 17 | 7 | 21 | 7 | 18 | 7 | 18 |
| 4 | Bangka Barat | 6 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 | 8 | 19 |
| 5 | Bangka Selatan | 6 | 28 | 8 | 28 | 8 | 28 | 9 | 29 | 9 | 29 |
| 6 | Belitung Timur | 6 | 16 | 6 | 18 | 6 | 17 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 7 | 9 | 19 | 9 | 19 |
| | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **54** | **178** | **58** | **167** | **58** | **160** | **59** | **169** | **60** | **169** |

*Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2013*

**Tabel II.48**
Perkembangan Jumlah Dokter Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

| Wilayah | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp | U | G | Sp |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| Prov. Kep. Babel | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | | | |
| Bangka | 48 | 13 | 17 | 63 | 11 | 17 | 60 | 13 | 17 | 60 | 11 | 22 | 9 | 61 | 16 |
| Belitung | 34 | 8 | 4 | 36 | 8 | 3 | 40 | 10 | 2 | 41 | 10 | 4 | 10 | 40 | 6 |
| Bangka Tengah | 35 | 8 | 2 | 30 | 5 | 0 | 39 | 7 | 2 | 42 | 7 | 4 | 7 | 44 | 5 |
| Bangka Barat | 29 | 4 | 2 | 31 | 6 | 2 | 38 | 5 | 2 | 54 | 5 | 4 | 7 | 36 | 3 |
| Bangka Selatan | 20 | 3 | 0 | 24 | 4 | 0 | 27 | 5 | 0 | 27 | 6 | 0 | 7 | 23 | 3 |
| Belitung Timur | 24 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 34 | 8 | 2 | 10 | 32 | 4 |
| Pangkalpinang | 63 | 15 | 46 | 59 | 17 | 30 | 61 | 17 | 41 | 61 | 21 | 51 | 19 | 56 | 42 |
| **Jumlah** | **256** | **54** | **72** | **261** | **54** | **52** | **305** | **63** | **64** | **329** | **68** | **88** | **69** | **29** | **2** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014*

Keterangan :
U : Dokter Umum
G : Dokter gigi
Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.48 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

## C. Urusan Pekerjaan Umum

Penanganan urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan di bidangsumber daya air, keciptakaryaan, dan kebinamargaan. Di bidang sumber daya air,Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakanpengelolaan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan provinsi,dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yang meliputi: konservasi sumber dayaair, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Bidangkebinamargaan bertanggungjawab untuk melaksanaan pengelolaan jalan danjembatan yang berstatus jalan provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin,rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan jaringan jalan yang ada di wilayah Bangka Belitung. Sedangkan bidang keciptakaryaan melaksanakan ketugasan penyediaaninfrastruktur dasar (*basic infrastructure*) untuk peningkatan ekonomi lokal,pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarianlingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi: (1)Permukiman, (2) Air Minum, (3) Air Limbah, (4) Persampahan, (5) Drainase, dan (6) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melaluiProgram Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih.Dengan tersedianya irigasi, petanitelah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.

## D. Urusan Perumahan

Upaya mengatasi penurunan *backlog* (rumah layak huni) yang dimiliki olehmasyarakat melalui beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untukmengatasi masalah perumahan berupa tersedianya Rumah Sederhana, Layak Huni dan Sehat.

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengatasi permasalahan penyediaan perumahan dilakukan melalui kegiatan Bedah Rumah Program SATAM EMAS.

## E. Urusan Penataan Ruang

Pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadapluasan lahan melalui pembuatan pengaturan pengendalianpemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang sertapenyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi. Disamping ituuntuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahandan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukimandan penggunaaan lahan pada kawasan lindung.

## F. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia. Perencanaan secara umum diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dalam sebuah proses perencanaan, lembaga perencana wajib memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan serta kualitas sumber daya yang ada.

Perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan implementatif dalam arti mempunyai tujuan dan antisipasi jangka panjang serta dapat dilaksanakan dan adaptif dalam arti menyesuaikan dengan kondisi lokal dan telah mengakomodir kebijakan-kebijakan yang bernuansa global dan nasional seperti Gas Rumah Kaca,MDGs, *sustainable development* serta muatan yang bersifat spesifik dan kekinian.

## G. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional.

## H. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

## I. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang berpengaruh terhadap realisasi pembangunan lainnya, terutama pembangunan fisik konstruksi. Status tanah menjadi hal pokok yang harus diselesaikan pada saat realisasi fisik pembangunan sarana pemerintah daerah yang dibiayai dari dana APBD. Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota untuk mendukung salah satu sasaran pokok pembangunan yaitu "tersedianya lahan untuk pelayanan dasar yang layak". Indikator kinerja luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan seluas 6.567.221,67 $M^2$ pada Tahun 2013. Pada tahun 2012 dilaksanakan ganti Rugi Dan Bangunan Untuk Kepentingan Umum Seluas 680.749,86 $M^2$. Urusan Pertanahan Diselenggarakan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

## J. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.

Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan urusan kependudukan ini adalah Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, *updating* dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

## K. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

*Indeks Pembangunan Gender* (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengembilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.49 dan Tabel II.50.

**Tabel II.49**
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2008-2013

| NO | Kabupaten/kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Bangka | 46.56 | 46.85 | 57.39 | 52,85 | 58,07 | 59,40 |
| 2. | Belitung | 45.36 | 45.81 | 49.27 | 49,21 | 49,37 | 48,56 |
| 3. | Bangka Barat | 42.41 | 43,00 | 53.32 | 56,29 | 58,28 | 54,81 |
| 4. | Bangka Tengah | 46.07 | 46.56 | 52.92 | 44,54 | 45,08 | 54,93 |
| 5. | Bangka Selatan | 42.40 | 42.49 | 39.16 | 43,77 | 45,79 | 37,80 |
| 6. | Belitung Timur | 47.29 | 47.87 | 42.25 | 47,21 | 49,65 | 50,11 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 47.59 | 48.12 | 49.60 | 50,01 | 55,20 | 56,10 |
| | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **44.11** | **44.86** | **55.62** | **56,03** | **56,54** | **57,29** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

**Tabel II.50**
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
| 1. | Bangka | 58,17 | 58,50 | 59,65 | 60,08 | 60,75 | 61,65 |
| 2. | Belitung | 56,67 | 56,80 | 58,01 | 58,32 | 58,87 | 59,80 |
| 3. | Bangka Barat | 59,07 | 59,11 | 59,74 | 60,25 | 60,72 | 61,32 |
| 4. | Bangka Tengah | 54,69 | 55,23 | 56,46 | 56,89 | 57,43 | 58,13 |

| No | Kabupaten/Kota | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (8) |
| 5. | Bangka Selatan | 49,30 | 49,46 | 50,36 | 51,29 | 51,75 | 52,83 |
| 6. | Belitung Timur | 59,29 | 59,69 | 60,84 | 61,25 | 61,75 | 62,36 |
| 7. | Kota Pangkal Pinang | 64,49 | 65,15 | 65,70 | 66,19 | 66,72 | 67,56 |
| | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **59,69** | **60,05** | **60,36** | **60,79** | **61,38** | **62,38** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional,IPD masih berada di peringkat 32 dan IPG di peringkat 30, tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka pangkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

## L. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah.

## M. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

## N. Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

## O. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu : “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menyajikan data terkini (up to date) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, Terkoneksinya kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, Tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan marketing investasi..

Dalam rangka melaksanakan pelayanan prima, peningkatan transparasi dan mutu pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal, meningkatkan sarana prasarana yang memadai.

## P. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya,, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

## Q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olah raga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda

## R. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada umumnya urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2007-2012 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek, diantaranya ; terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk tingkat provinsi, terjalinnya Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Instansi Vertikal seperti POLRI,TNI,Kejaksaan, KEMENKUMHAM, dan BIN Daerah Babel melalui Operasional Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlaksananya Pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

Ada beberapa kekurangan dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka antara lain ; terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan secara berkesinambungan, minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan kurang sinkronnya program / kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten / Kota.

## S. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain.

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Pertanian

Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya ; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertania, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

#### B. Urusan Kehutanan

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, luas hutan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 tercatat 659.014 Ha yang terdiri dari 432.884 Ha Hutan Produksi, 189.965 Ha Hutan Lindung, 35.473 Ha Hutan Konservasi dan 692 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.51.

**Tabel II.51**
Luas Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dari Tahun 2008–2013

| Luas Kawasan Hutan | 2008 (Ha) | 2009 (Ha) | 2010 (Ha) | 2011 (Ha) | 2012 (Ha) | 2013 (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Hutan Produksi | 428.181 | 466.090 | 466.090 | 466.090 | 432.884 | 432.882,82 |
| Hutan Lindung | 195.740. | 156.730 | 156.730 | 156.730 | 189.965 | 189.972,25 |
| Hutan Konservasi | 33.589 | 34.690 | 34.690 | 34.690 | 35.473 | 35.472,19 |
| Hutan Produksi Konversi | N/A | N/A | N/A | N/A | 692 | 692,59 |
| **Jumlah** | **461.770** | **657.510** | **657.510** | **657.510** | **659.014** | **659.019,85** |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2013*

### C. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006.

### D. Urusan Pariwisata

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya SKPD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

### E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas Dinas Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa faktor penghambat, faktor penghambat dimaksud berupa ; Rentang koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di era otonomi daerah ini, konflik kepentingan antar sektor, yaitu antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan, khususnya di wilayah laut dan pesisir, belum optimalnya dukungan dana yang dialokasikan pada sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih belum optimalnya penempatan sumber daya manusia yang sesuai latar belakang pendidikan pada dinas teknis seperti Dinas Kelautan dan Perikanan.

## F. Urusan Perdagangan

Tantangan di sektor Perdagangan sebagai berikut:

Dengan diberlakukannya AFTA atau pasar bebas maka produk – produk dari luar negeri bebas memasuki pasar dalam negeri sehingga menimbulkan persaingan ketat dalam meningkatkan mutu produk dari barang yang dihasilkan. Masih tingginya persentasi penggunaan dan peredaran UTTP yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh karena belum di Tera/ Tera Ulang akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia. Masih kurangnya pemahaman masyarakat pelaku usaha tentang arti pentingnya Metrologi dalam transaksi perdagangan sehingga di perlukan adanya penyuluhan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai kemetrologian. Pembentukan UPTD Metrologi di Kab / Kota harus di percepat sehingga pelayanan kemetrologian dapat lebih merata sampai kepelosok daerah yang belum terjangkau oleh UPTD Provinsi.

Kelemahan urusan perdagangan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Terbatasnya sarana dan prasarana dalam usaha pembinaan dan pengembangan di bidang industri dan perdagangan; - Kurangnya profesionalisme aparatur; - Peralatan laboratorium sudah sangat tua; - Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh lapangan; - Adanya rangkap kewenangan antara pelayanan dan pengawasan pada UPT Metrologi.

## G. Urusan Industri

Beberapa isu – isu strategis yang diperkirakan berpengaruh terhadap aktivitas industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Belum ada unit Kerja Kemetrologian Legal di Daerah Tk. II Kabupaten/Kota.
2. Belum terlaksananya pemisahan kewenangan antara kewenangan pelayanan dengan kewenangan pengawasan.
3. Belum optimalnya pengawasan mutu oleh Laboratorium Penguji Mutu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pengembangan standarisasi belum optimal.
5. Belum tertibnya pelaksanaan ketentuan Ekspor Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Industri pengolahan potensi sumber daya alam masih bersifat hulu.
7. Belum optimalnya pengelolaan / pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Belum terbentuknya *cluster* industri prioritas.

## H. Urusan Ketransmigrasian

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean, masih rendahnya

partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi per kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.52.

**Tabel II.52**
Angka Konsumsi RT per Kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008-2013

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Total Pengeluaran RT | 10.838.810 | 12.277.355 | 13.865.667 | 15.598.162 | 17.814.518 | |
| 2 | Jumlah RT | 280.632 | 284.532 | 288.432 | 292.332 | 296.332 | |
| 3 | Rasio | 38,62 | 43,15 | 48.07 | 53.36 | 60,16 | |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2013*

**B. Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Rasio nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.53.

**Tabel II.53**
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2014

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Indeks Yang Diterima Petani (It) | 102,97 | 107,69 | 117,57 | 121,70 | 123,52 | 118,81 |
| 2 | Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) | 109,07 | 112,43 | 118,55 | 122,73 | 122,89 | 116,18 |
| 3 | Rasio | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1,99 | 1,02 |

*Sumber: *) diolah Bappeda dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

NTP Pada bulan Desember 2013, NTP Provinsi (NTP Prov) umum tercatat sebesar 1,99 atau mengalami kenaikan sebesar 0,01 dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,99 persen. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik 1,82 persen lebih tinggi dari Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang naik sebesar 0,16 persen.

## C. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan tentang konsumsi rumah tangga non pangan per keluarga. Konsumsi non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.54.

**Tabel II.54**
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2013

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Total pengeluaran RT non pangan | 3.748.535 | 4.333.764 | 5.021.613 | 5.817.236 | 6.827.649 | 8.340.756 |
| 2. | Total pengeluaran | 10.947.929 | 12.407.801 | 13.925.146 | 15.598.162 | 17.814.518 | 21.294.372 |
| 3. | Rasio | 2,92 | 2,86 | 2,77 | 2,68 | 2,61 | 2,55 |

*Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2013*

## D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.55.

Tabel II.55
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7) |
| 1 | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 1.110 | 4.604 | 2.061 | 19.664 | 12.532 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | 13 | 5 | 17 | 39 | 40 |
| 3 | Rasio daya serap tenaga kerja | 85,38 | 920,80 | 121,23 | 504,20 | 313,30 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### A. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahanyang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.56.

Tabel II.56
RasioLuas Wilayah Produktif
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012

| No | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah Produktif | Luas Seluruh Wilayah Budidaya | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kabupaten Bangka | 12.350 Ha | 282.719 Ha | 0.04 |
| 2 | Kabupaten Bangka Barat | 15.560 Ha | 266.501 Ha | 0.06 |
| 3 | Kabupaten Bangka Selatan | 18.155 Ha | 342.553 Ha | 0.05 |
| 4 | Kabupaten Bangka Tengah | 23.741 Ha | 188.895 Ha | 0.13 |
| 5 | Kabupaten Belitung | 46.225 Ha | 183.144 Ha | 0.25 |
| 6 | Kabupaten Belitung Timur | 40.709 Ha | 269.982 Ha | 0.19 |
| 7 | Kota Pangkalpinang | - | 11.880 Ha | 0.00 |
| | **Jumlah** | **156.740 Ha** | **1.485.674 Ha** | **0.11** |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

#### B. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan

diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.57.

**Tabel II.57**
Infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2013

| No | Infrastruktur | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 4,17 | 3,67 | 3,60 | 4,07 | 4,25 | 5,83 |
| 2. | Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| 3. | Ketaatan terhadap RTRW | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4. | Persentase Penduduk berakses airminum | - | 12,32 | 15,02 | 15,19 | 29,29 | 64,98 |
| 5. | Rasio daya tersambung pada rumah tangga | 69,29 | 67,87 | 65,69 | 69,9 | 69,13 | 67,95 |
| 6. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 45,55 | 48,52 | 48,06 | 62,76 | 92,81 | 80,96 |
| 7. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 0,62 | 0,77 | 0,67 | 0,61 | 0,65 | 0,66 |
| 8. | Panjang jalan dilalui roda 4 | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,95 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### A. Angka Kriminalitas

Kasus tindak kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari kurun waktu 2008-2012 terus mengalami peningkatan kecuali pada jenis kasus transnasional yang mengalami penurunan sebanyak 17 kasus. Tahun 2012 tercatat sebanyak 4273 kasus (diantaranya yang mengalami peningkatan pada jenis kasus konvensional 3757 kasus, merugikan negara 377 kasus, berimplikasi kontijensi 2 kasus) sedangkan yang mengalami penurunan pada kasus transnasional yang semula dapat tahun 2011 sebanyak 194 kasus pada tahun 2012 turun menjadi 177 kasus.

**Tabel II.58**
Jumlah Tindak Kejahatan menurut Jenis Kasus di POLDA
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2009-2013

| Jenis Kasus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Konvensional | 2374 | 2363 | 2984 | 3757 | 4033 |
| Transnasional | 125 | 157 | 194 | 177 | 281 |
| Merugikan negara | 144 | 211 | 183 | 377 | 586 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berimplikasi kontijensi | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 2647 | 2721 | 3361 | 4273 | 4900 |

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka 2013, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung – POLDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relative sedikit. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas kehidupan bermasyarakat relative baik sehingga mampu menciptakan iklim kehidupan yang kondusif. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.59.

**Tabel II.59**
Jumlah Demo di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2009-2013

| No | Uraian | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Bidang politik | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 |
| 2 | Ekonomi | 7 | 19 | 18 | 23 | 31 |
| 3 | Kasus pemogokan kerja | 5 | 12 | 12 | 16 | 15 |
| 4 | Jumlah unjuk rasa | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 |

*Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

## C. Lama Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis

perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

## D. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada kas negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Perkembangan penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomer 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

**Tabel II.60**
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2013-2014

| URAIAN | Tahun 2013 | | Tahun 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) |
| **Pajak Daerah** | | | | |
| Pajak Kendaraan Bermotor | 151.034.970.754,20 | 149.719.572.524,00 | 155.769.428.882,00 | 162.036.291.096,00 |
| Bea Balik Nama Kend. Bermotor | 143.964.317.500,00 | 154.884.483.572,00 | 134.458.011.317,00 | 139.175.293.731,00 |
| Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor | 135.136.441.670,00 | 139.313.507.235,30 | 156.222.691.663,46 | 163.479.972.233,53 |
| Pajak Air Permukaan | 3.171.787.336,88 | 3.544.635.700,98 | 3.450.862.673,28 | 4.036.065.908,35 |
| Pajak Rokok | - | - | 49.302.000.000,00 | 39.534.993.927,00 |

*Sumber: DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

### E. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Salah satu implikasi dari otonomi daerah adalah kemunculan banyak peraturan daerah (perda) baru yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Yang menjadi persoalan, banyak perda yang dibuat *grusa-grusu* atau berwawasan sempit, sehingga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Lebih penting dari itu, banyak di antara ratusan bahkan ribuan perda baru di berbagai kota, kabupaten dan provinsi yang dinilai memberatkan pengusaha, sehingga menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan otonomi, daerah berlomba-lomba meningkatan PAD dengan membuat perda-perda baru. Justru karena itulah kemudian timbul masalah, karena selain kurang adanya pengawasan juga lemah dalam koordinasi. Mereka hanya melihat kepentingannya, seakan tidak peduli pada daerah lain atau pun peraturan yang ada di pusat. Proses yang terlalu cepat cenderung mengabaikan aturan serta dampak negatif lain. Ada beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung iklim usaha antara lain :

a. Perda Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

b. Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan.

c. Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel.

d. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel.

e. Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan BUMD Pt. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

f. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung.

g. Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

h. Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah.

## 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya manusia

### A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam proses percepatan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah memberikan gambaran secara tidak langsung terhadap kualitas daerah. Rasio tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan seperti ditampilkan pada Tabel II.61.

**Tabel II.61**
Rasio Lulusan S1/S2/S3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008-2012

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 12.842 | 15.160 | 18.106 | 27.797 | 28.822 |
| 2. | Jumlah penduduk | 1.122.526 | 1.138.129 | 1.223.296 | 1.261.737 | 1.298.168 |
| 3. | Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2) | 0.0114 | 0.0133 | 0.0148 | 0.0220 | 0,0222 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

### B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Berdasarkan Tabel II.61 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2011, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2012 seperti terlihat pada tabel II.62 berikut.

**Tabel II.62**
Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008-2012

| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun | 162.206 | 311.308 | 360.592 | 190.699 | 382.658 |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun | 24.002 | 47.401 | 44.629 | 21.063 | 47.360 |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2) | 186.208 | 358.709 | 405.221 | 211.762 | 430.018 |
| 4. | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun | 936.318 | 779.420 | 818.075 | 1.049.975 | 868.330 |
| 5. | Rasio Ketergantungan (3)/(4) | 0,199 | 0,460 | 0,495 | 0,202 | 0,331 |

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013*

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Kondisi ideal terhadap pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah dilaksanakan secara sinergis baik antar tingkatan maupun antar tahapan. Pentahapan pembangunan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten) direncanakan dalam RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk periode tima tahunan dan RKPD untuk jangka waktu satu tahun. Perencanaan tersebut kemudian dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk

tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan harus dievaluasi untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah:

a) Gagal dalam proses lelang.

b) Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain, sehingga beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.

c) Terbatasnya waktu pelaksanaan

d) Belum selesainya dokumen perencanaan, seperti DED, kajian lingkungan.

e) Belum sepakatnya isi subtansi dari beberapa Perda, sehingga beberapa perda belum ditetapkan.

f) Belum selesainya pembebasan lahan.

g) Akibat kondisi geografis dan cuaca.

h) Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah/luar negeri.

i) Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.

j) Berkurangnya peserta diklat atau pelatihan yang hadir.

k) Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.

l) Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun 2013 dan perkiraan tahun 2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel II. 63 dibawah ini yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana capaian target program kegiatan sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD 2012-2017.

Tabel II. 63

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 01 | | | | WAJIB | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 15 | | Program Pendidikan Anak Usia Dini | | | | | | | | | | |
| | | | | | APK PAUD | 50,04% | 19,22% | 31,87% | 31,87% | 100% | 37,97% | 37,97% | 75,88% | DINDIK |
| | | | | | Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100,00% | DINDIK |
| 01 | 01 | 16 | | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | | | | | |
| | | | | | APK SD/MI | 116,26% | 116,22% | 116,23% | 116,23% | 100% | 116,26% | 116,26% | 100,00% | DINDIK |
| | | | | | APK SMP/MTs | 97,96% | 92,38% | 94,63% | 99,77% | 105% | 95,75% | 95,75% | 97,74% | DINDIK |
| | | | | | APM SD/MI | 97,00% | 95,07% | 95,84% | 97,01% | 101% | 96,23% | 96,23% | 99,21% | DINDIK |
| | | | | | APM SMP/MTs | 84,00% | 64,35% | 72,21% | 72,21% | 100% | 76,14% | 76,14% | 90,64% | DINDIK |
| | | | | | Angka DO SD/MI | 0,30% | 0,45% | 0,39% | 0,39% | 100% | 0,36% | 0,36% | 83,33% | DINDIK |
| | | | | | Angka DO SMP/MTs | 0,40% | 1,21% | 0,72% | 0,72% | 100% | 0,60% | 0,60% | 66,67% | DINDIK |
| | | | | | Persentase Kelulusan SD/MI | 100,00% | 93,58% | 100,00% | 100,00% | 100% | 100% | 100% | 100,00% | DINDIK |
| | | | | | Persentase | 99,35% | 98,32% | 99,86% | 99,86% | 100% | 99,27% | 99,27% | 99,92% | DINDIK |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Kelulusan SMP/MTs | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Melanjutkan SD/MI | 100,00% | 96,20% | 97,72% | 97,72% | 100% | 100% | 100% | | DINDIK |
| | | | | | Angka Melanjutkan SMP/MTs | 100,00% | 94,32% | 99,54% | 99,54% | 100% | 99,27% | 99,27% | 99,27% | DINDIK |
| | | | | | Angka Mengulang SMP/MTS | 0,45% | 0,79% | 0,70% | | 100% | 0,62% | 0,62% | 0,62% | DINDIK |
| | | | | | Angka Mengulang SD/MI | 4,00% | 7,74% | 6,81% | | 100% | 5,87% | 5,87% | | DINDIK |
| 01 | 01 | 18 | | Program Pendidikan Non Formal | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C | | | 8.452 | | | 9.172 | 9.172 | | DINDIK |
| | | | | | Angka Buta Aksara | 2,50% | 4,37% | 3,60% | 3,60% | 100,00% | 3,25% | 3,25% | | DINDIK |
| | | | | | Persentase Kelulusan UNPK | 78,00% | 60,00% | 86,40% | | | | | | DINDIK |
| | | | | | Persentase Pengangguran Terlatih | 19,23% | 15,21% | 17,88% | 17,88% | 100,00% | 18,31% | 18,31% | | DINDIK |
| 01 | 01 | 22 | | Program Manajemen Layanan Pendidikan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel | 2 Dok | 2 Dok | 2 Dok | | | 2 Dok | 2 Dok | | DINDIK |
| | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan | 4 Dok | 4 Dok | 4 Dok | | | 3 Dok | 3 Dok | | DINDIK |
| | | | | | Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | | | 3 Dok | 3 Dok | | DINDIK |
| 01 | 01 | 28 | | Program Pendidikan Menengah dan Tinggi | | | | | | | | | | |
| | | | | | APK SMA/MA/SMK | 95,95% | 76,25% | 84,14% | 84,14% | 100,00% | 89,60% | 89,60% | | DINDIK |
| | | | | | APM SMA/MA | 75,00% | 47,66% | 58,60% | 58,60% | 100,00% | 61,06% | 61,06% | | DINDIK |
| | | | | | Angka DO SMA/MA | 0,31% | 2,52% | 1,26% | 1,26% | 100,00% | 1,66% | 1,66% | | DINDIK |
| | | | | | Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA | 99,00% | 98,65% | 99,90% | 99,90% | 100,00% | 99,43% | 99,43% | | DINDIK |
| | | | | | Angka Mengulang Pendidikan Menengah | 0,60% | 0,90% | 0,83% | 0,83% | | 0,75% | 0,75% | | DINDIK |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Persentase Kelulusan Siswa SMK | 99,00% | 98,20% | 99,90% | 99,90% | 100,00% | 99,70% | 99,70% | | DINDIK |
| | | | | | Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan | 750 Org | 0 | 159 Org | | | | | | DINDIK |
| 02 | | | | WAJIB | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. | 100 | 101 | 100 | | | 100 | 100 | 100% | Dinkes |
| 2 | 2 | 2 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU) | 27 | 36 | 33 | | | 31 | 31 | 115% | Dinkes |
| | | | | | Persentase | 98 | 96,6 | 97 | | | 97,5 | 97,5 | 99% | Dinkes |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU) | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Dasar (IKU) | 28 | 36 | 33 | | | 31 | 31 | 111% | Dinkes |
| | | | | | Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM) | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 100% | Dinkes |
| 2 | 2 | 3 | | Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU) | 70 | | 60 | | | 60 | 60 | 85,71% | Dinkes |
| | | | | | Persentase | 40 | | 28 | | | 30 | 30 | 75,00% | Dinkes |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU) | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU) | 78 | | 60 | | | 65 | 65 | 83,33% | Dinkes |
| 2 | 2 | 5 | | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU) | 90 | | 80 | | | 85 | 85 | 94,44% | Dinkes |
| | | | | | Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas | 74 | | 64 | | | 68 | 68 | 91,89% | Dinkes |
| 2 | 2 | 6 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Kesakitan | 1 | 3,75 | 3 | | | 2 | 2 | 200,00% | Dinkes |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU) | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU) | 46 | 24,11 | 52 | | | 51 | 51 | 110,87% | Dinkes |
| | | | | | Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU) | 10 | 7,15 | 10 | | | 10 | 10 | 100,00% | Dinkes |
| | | | | | Persent6ase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan | 90 | | 90 | | | 90 | 90 | 100,00% | Dinkes |
| 2 | 2 | 8 | | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 100,00% | Dinkes |
| 2 | 2 | 9 | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dsn Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku) | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 100,00% | Dinkes |
| 2 | 2 | 11 | | Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) | 9,7 | | 6,8 | | | 7,5 | 7,5 | | Dinkes |
| | | | | | Rasio dokter umur per 100.000 penduduk (IKU) | 34,4 | | 28,2 | | | 29,7 | 29,7 | | Dinkes |
| | | | | | Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) | 337,6 | | 264,2 | | | 282,5 | 282,5 | | Dinkes |
| | | | | | Rasio Bidan | 96 | | 75,8 | | | 80,8 | 80,8 | | Dinkes |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | per 100.000 penduduk (IKU) | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 12 | | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 28 | 9,54 | 33 | | | 31 | 31 | 111% | Dinkes |
| 2 | 2 | 13 | | Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) | 100 | 43 | 80 | | | 85 | 85 | 85,00% | Dinkes |
| 2 | 2 | 14 | | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan | 85 | 51 | 65 | | | 70 | 70 | 82,35% | Dinkes |
| 2 | 2 | 15 | | Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup | 27 | 36 | 33 | | | 31 | 31 | 115% | Dinkes |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | (IKU) | | | | | | | | | |
| | | | | | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 28 | 36 | 33 | | | 31 | 31 | 111% | Dinkes |
| 2 | 2 | 16 | | Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan | Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU) | 100 | 101 | 100 | | | 100 | 100 | 100% | Dinkes |
| 2 | 2 | 17 | | Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya | Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS)) | 100 | 71 | 60 | | | 100 | 100 | 100% | Dinkes |
| 2 | 2 | 18 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes | 1). Cakupan pelayanan Laboratorium | 95 | 71 | 75 | | | 80 | 80 | 84% | Dinkes |
| 2 | 2 | 19 | | Program Pengembangan Sumber Daya | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) | 9,7 | 6,2 | 6,8 | | | 7,5 | 7,5 | 77% | Dinkes |
| | | | | | Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) | 34,3 | 26,8 | 28,2 | | | 29,7 | 29,7 | 87% | Dinkes |
| | | | | | Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU) | 337,6 | 245,9 | 264,2 | | | 282,5 | 282,5 | 84% | Dinkes |
| | | | | | Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU) | 96 | 70,8 | 75,8 | | | 80,8 | 80,8 | 84% | Dinkes |
| 2 | 2 | 20 | | Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan | Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana | 100 | 101 | 100 | | | 100 | 100 | 100% | Dinkes |
| 02 | | | | WAJIB | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | KESEHATAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya Jasa | 265 | 266 | 265 | | | 265 | 265 | 100% | RSJ |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien | 95 | 77 | 80 | | | 85 | 85 | 89% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 22 | 15 | 16 | | | 18 | 18 | 82% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial | 500 | 351 | 385 | | | 420 | 420 | 84% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak | 170 | 151 | 155 | | | 160 | 160 | 94% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Pelayan Rumah Sakit | 25 | 21 | 20 | | | 22 | 22 | 88% | RSJ |
| 2 | 2 | 7 | | Program Standarisasi Pelayanan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Kesehatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI)) | 50% (Madya) | 6 pelayanan | 25% (Pratama) | | | 37,50% | 37,50 | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima | 100% (BLUD Penuh) | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun | 7 | | 4 | | | 5 | 5 | 71,43% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Izin Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit | 1 | | | | | | | | RSJ |
| 2 | 2 | 9 | | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | paru/rumah sakit mata. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan | 60 | | 45 | | | 50 | 50 | 83,33% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia | 85 | | 70 | | | 75 | 75 | 88,24% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit | 45 | | 40 | | | 40 | 40 | 88,89% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Gudang Obat/apotik | | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan | 2 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Gedung Dapur Bersih | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Gedung Trauma Center | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumalah Ruang | 2 | | | | | | | | RSJ |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Laboratorium | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | 20,00% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi | 1 | | | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | 1 | | | | | 1 | 1 | 100,00% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Billing Sistem Yang | 1 | | 1 | | | | | | RSJ |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Tersedia | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan | 2 | | 1 | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan | 2 | | 1 | | | | | | RSJ |
| | | | | | Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun | 1 | | 1 | | | | | | RSJ |
| 2 | 2 | 10 | | Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 100% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 100% | RSJ |
| | | | | | Jumlah | 1 | | 1 | | | | | | RSJ |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 100% | RSJ |
| | | | | | Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi | 3 | | 3 | | | 3 | 3 | 100% | RSJ |
| | | | | WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | PEKERJAAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jalan yang terbangun | 12,00 | 100% | 3 km | | | 3 km | 3,00 | 25,00% | Dinas PU |
| | | | | | Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter | 1.870,00 | | 375 km | | | 374,00 | 374,00 | 20,00% | Dinas PU |
| | | | | | Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km | 125,00 | | 25 km | | | 25,00 | 25,00 | 20,00% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 2 | | Program Rehabilitasi/Pemelih | Panjang jalan dan jambatan | 874,33 km | Pemeliharaan jalan | 874,33 km | | | 874,33 km | 874,33 km | 100% | Dinas PU |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | araan Jalan dan Jembatan | provinsi yang terpelihara dengan baik | | sepanjang 816.2 km | | | | | | | |
| 2 | 3 | 3 | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan | | | - | | | | | | | |
| | | | | Terpeliharanya jalan/jambatan yang dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat | 3,00 | 100% | 1 unit | | | 1 unit | 1,00 | 33,33 | Dinas PU |
| 2 | 3 | 4 | Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan | Tersedianya dokumen database jalan dan jambatan provinsi | 7 Dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi | 4 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi | 1 Dokumen | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 5 | Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan | 1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium | 31 % alat-alat berat dan alat laboratorium | 2 unit alat-alat berat alat lab | | | 2 unit alat-alat berat alat lab | 2 unit alat-alat berat alat lab | 100% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 6 | Program Pengembangan dan | Terwujudnya sistem jaringan | 7.572 | 1.000 Ha | 1,214 Ha | | | 1,429 Ha | 1,429 Ha | 19% | Dinas PU |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 7 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Terwujudnya layanan air baku untuk air minum | 75 Ha | 6 Ha | 15 Ha | | | 20 Ha | 20 Ha | 27% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 8 | Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air | 98 Ha | 5 Ha | 16 Ha | | | 20 Ha | 20,00 | #VALUE! | Dinas PU |
| 2 | 3 | 9 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah | Tersedianya sumber air baku, bersih dan pengelolaan limbah | Jumlah prasarana air bersih dikws khusus 20% | 3 kws di 20 ksk/ksp/ksn | | | 3 kws di ksk/ksp/ksn | 3 kws di ksk/ksp/ksn | 100% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 10 | Program Pengendalian Banjir | Terwujudnya sistem pengendalian banjir | 52.515 $M^2$ | 2.000 M' | 10,938 M | | | 8,099 M | 8,099 M | 15% | Dinas PU |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 2 | 3 | 11 | Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial | 3 kws di ... ksk/ksp/ksn | Jumlah Jaringan jalan di kws strategis,khusus dan potensial 35% kws minapolitan/ agropolitan,KEK dll | 3 kws di 20 ksk/ksp/ ksn | | | 3 kws di ... ksk/ksp/ksn | 3 kws di ... ksk/ksp/ksn | 100% | Dinas PU |
| 2 | 3 | 12 | Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan | Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 kws di 3 kab | Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45% | 2 kws di 3 kab | | | 2 kws di 3 kab | 2 kws di 3 kab | 100% | Dinas PU |
| | | | | | 35 desa | Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 % | 35 desa | | | 35 desa | 35 desa | 100% | Dinas PU |
| | | | | | 10 desa di 6 | Jumlah Desa | 30 desa | | | 30 desa di 6 | 30 desa di 6 | 100% | Dinas PU |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kab | terlayani air minum 45% | di 6 kab | | | kab | kab | | |
| | | | | | 6 desa/6 kab | Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30% | 10 desa di 6 kab | | | 10 desa di 6 kab | 10 desa di 6 kab | 100% | Dinas PU |
| | | | | | 6 desa/6 kab | Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45% | 6 desa/6 kab | | | 6 desa/6 kab | 6 desa/6 kab | 100% | Dinas PU |
| | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | PERUMAHAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | Program Perencanaan Pengembangan Perumahan | Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat | 135 unit di 7 kab/kota | terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani | 135 unit di 7 kab/kota | | | 135 unit di 7 kab/kota | 135 unit di 7 kab/kota | 100% | Dinas PU |
| 2 | 4 | 2 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Terbangunnya serana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR | 7 kws di 7 kab/kota | terdapat 60% kws MBR yang belum terlayani air bersih dan sanitasi | 7 kws di 7 kab/kota | | | 7 kws di 7 kab/kota | 7 kws di 7 kab/kota | 100% | Dinas PU |
| 2 | 4 | 3 | Program Pemberdayaan Komunitas | Terwujudnya sapras lingkungan | 50 desa di 7 kab/kota | terdapat 70% kws/desa tertinggal | 50 desa di 7 kab/kota | | | 50 desa di 7 kab/kota | 50 desa di 7 kab/kota | 100% | Dinas PU |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Perumahan | perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat | | kekurangan sapras perumahan dan permukiman | | | | | | | |
| 2 | 4 | | 4 | Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial | Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial | 7 kws di 7 kab/kota | terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana | 7 kws di 7 kab/kota | | | 7 kws di 7 kab/kota | 7 kws di 7 kab/kota | 100% | Dinas PU |
| 01 | 07 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | PERUHUBUNGAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 1 | | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengembangan pelabuhan tanjung belikat | | | 1.000 | | | | | | DISHUB |
| | | | | | Pengembangan pelabuhan tanjung batu | | | 1.000 | | | | | | DISHUB |
| | | | | | Pengembangan status bandara | Tersedianya kajian | | 1.000 | | | peluasan lahan untuk | | | DISHUB |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | depati amir menjadi internasional | pengembangan bandara dan penambahan area | | | | | bandara | | | |
| | | | | | Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung | Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan | | 750 persiapan pengembangan pelabuhan | | | 750 persiapan pengembangan pelabuhan | 750 persiapan pengembangan pelabuhan | | DISHUB |
| | | | | | Riontisan pengadaan angkutan laut | terpenuhinya angkutan laut hingga 55% | | 45 | | | 50 | 50 | | DISHUB |
| 2 | 7 | 2 | | Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85% | Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ sampai 85% | | Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi | | | Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi | Pemeliharaan rutin prasarana transportasi di jalan nasional/provinsi | 100% | DISHUB |
| | | | | | | | | pemeliharaan rutin 2 (dua) | | | pemeliharaan rutin 2 (dua) | pemeliharaan rutin 2 (dua) | 100% | DISHUB |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | jambatan timbang | | | | jambatan timbang | jambatan timbang | | |
| | | Tersedianya angkutan umum yang nyaman dan memenuhi standar | Tersedianya angkutan massal sebanyak 18 unit | | Peremajaan angkutan massal 4 unit | | | Peremajaan angkutan massal 4 unit | Peremajaan angkutan massal 4 unit | 100% | DISHUB |
| | | Peningkatan fasilitas pelayanan angkutan umum AKDP dan AKAP | Tersedianya terminal terpadu sebanyak 2 terminal dan pengembangan terminal AKDP sebanyak 3 terminal | | Evaluasi kinerja terminal AKDP dan penetapan terminal terpadu | | | Pengembangan terminal AKDP 2 kab | Pengembangan terminal AKDP 2 kab | 100% | DISHUB |
| | | Peningkatan pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan setiap tahun | Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 70% | | Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubungan naik menjadi 55% | | | Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubung naik menjadi 60% | Pengendalian dan pemeriksaan kelaikan sarana perhubung naik menjadi 60% | 100% | DISHUB |
| | | Peningkatan kualitaspemeriksaan dan pengawasan | Pengendalian dan pengawasan sarana dan | | pengedalian dan pengawasan sarana dan | | | pengedalian dan pengawasan sarana dan | pengedalian dan pengawasan sarana dan | | DISHUB |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | terhadap kelebihan muatan angkutan barang | prasarana jembatan timbang dalam keadaan baik | | prasarana jembatan timbang | | | prasarana jembatan timbang | prasarana jembatan timbang | | |
| 2 | 7 | 3 | | Program Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan | | | | | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | | | | | Pembangunan terminal | Terlaksananya pembangunan terminal di 7 kab/kota | | Peningkatan status terminal yang ada | | | Peningkatan status terminal yang ada | Peningkatan status terminal yang ada | 100% | DISHUB |
| | | | | | pembangunan dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk | Terpenuhinya dermaga di pulau-pulau kecil berpenduduk hingga 35% | | 25 | | | 30 | 30 | 100% | DISHUB |
| | | | | | Rehabilitasi dermaga tukak sadai | Rehabilitasi dermaga tukak sadai hingga 100% | | | | | Dermaga tukak sadai | Dermaga tukak sadai | 100% | DISHUB |
| | | | | | peningkatan pelabuhan beserta pembangunan sarana | Peningkatan pelabuhan beserta pembangunan sarana | | 90 | | | 95 | 95 | 100 | DISHUB |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | penunjang pelabuhan tanjung batu | penunjang pelabuhan tanjung batu hingga 100% | | | | | | | | |
| | | Pengembangan bandara depati amir | | | 100 | | | | | 100 | DISHUB |
| 1.08.1.08.02 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | |
| 1.08.1.08.02.15. | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | |
| | | Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan | 7 Kab/Kota | 1 kab/kota | 4 Kab/Kota | | | 5 Kab/Kota | 5 Kab/Kota | 71% | BLHD |
| | | Cakupan pelayanan persampahan | 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel | 35% TPA Regional yang belum mendapat penanganan (sharing pemerintah pusat) | Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel | | | Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel | Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov. Kep. Babel | 100% | Dinas PU |
| 1.08.1.08.02.16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Terpantaunya status mutu air | 7 smbr air | 3 smbr air | 4 smbr air | | | 5 smbr air | | | BLHD |
| | | | | | Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup | 18 org | 9 org | 12 org | | | 14 org | | | BLHD |
| | | | | | Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat | 1500 org | 241 org | 750 org | | | 1000 org | | | BLHD |
| | | | | | Adanya Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup | 18 kasus | 1 kasus | 5 kasus | | | 3 kasus | | | BLHD |
| | | | | | Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL | 50 keg | 7 keg | 25 keg | | | 35 keg | | | BLHD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL | 7 kab/kota | 7 kab/kota | 7 kab/kota | | | 7 kab/kota | | | BLHD |
| | | Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL | 45 keg/usaha | 19 keg/usaha | 30 keg/usaha | | | 35 keg/usaha | | | BLHD |
| | | Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | BLHD |
| 1.08.1.08.02.19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | |
| | | Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup | 8 jaringan | 1 jaringan | 4 jaringan | | | 6 jaringan | 6 jaringan | 100,00% | BLHD |
| | | Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah | 1 dokumen | 2 dokumen | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | BLHD |
| | | Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi | terbentuknya dan beroperasinya KPHL, | terbentuknya 1 unit KPHP model di bangka | terbentuknya 2 unit KPHP model di | | | terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka | terbentuknya 2 unit KPHP model di Bangka | 100,00% | DISHUT |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam | sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan alam | tengah | bangka tengah | | | | | | |
| 1.08.1.08.02.20 | Program Peningkatan Pengendalian Polusi | Terpantaunya status mutu udara | 7 Kota | 2 kota | 4 kota | | | 5 kota | 5 kota | 71,43% | BLHD |
| 1.08.1.08.02.19 | Program pengelolaan ruang terbuka hijau | | | | | | | | | | |
| | | Tingkat kualitas liingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu | 14 KSP (30%) | 1 KSP (0%) | RTH 4 KSP | | | RTH 4 KSP | RTH 4 KSP | 28,57% | Dinas PU |
| | | Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel | 7 Kab/Kota | 1 kab/kota | 1 kab/kota | | | 1 kab/kota | 1 kab/kota | 100% | BLHD |
| 1 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | ANAK | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | 20 | | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 18,6 % (8 dari 43 SKPD) | | 4,6% (2 dari 43 SKPD) | 4,6% (2 dari 43 SKPD) | 100% | 9,3% (4 dari 43 skpd) | 9,3% (4 dari 43 skpd) | 50% | BPPKBPA |
| | | | | | Persentase SKPD yang memiliki data terpilah | 23,3 % (10 dari 43 SKPD) | 16,3 % (7 dari 43 SKPD) | 18,6 % (8 dari 43 SKPD) | 18,6 % (8 dari 43 SKPD) | 100% | 18,6% (8 dari 43 skpd) | 18,6% (8 dari 43 skpd) | 80% | BPPKBPA |
| | | | | | Jumlah lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan | 32 Instansi | 30 Instansi | 30 Instansi | | 100% | 30 | 30 | 94% | BPPKBPA |
| 1 | 1 1 | 21 | | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebijakan | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 1 kebijakan | | 100% | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 100% | BPPKBPA |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | 6,06% | 5,90% | 5,96% | 5,96% | 491,36% | 5,99% | 5,99% | 99% | BPPKBPA |
| | | | | | Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan | 6,54% | 6,17% | 6,31% | 6,31% | 381,30% | 6,38% | 6,38% | 98% | BPPKBPA |
| 1 | 11 | 22 | | Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak | 3 kebijakan | 1 kebijakan | 3 kebijakan | | 100% | 2 kebijakan | 2 kebijakan | 67% | BPPKBPA |
| | | | | | Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan | 11 instansi | 11 instansi | 11 instansi | | 100% | 11 instansi | 11 instansi | 100% | BPPKBPA |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | perempuan dan anak dari tindak kekerasan | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA) | 2 Kab/Kota | 0 | 1 Kab/Kota | | 100% | 1 kab/kota | 1 kab/kota | 50% | BPPKBPA |
| 1 | 11 | 23 | | Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 1 kebijakan | | 100% | 1 kebijakan | 1 kebijakan | 100% | BPPKBPA |
| | | | | | Tingkat prevalensi peserta KB aktif | 78,76% | 81,62% | 78,72% | 78,72% | 100% | 78,73% | 78,73% | 100% | BPPKBPA |
| | | | | | Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I | 10,69% | 12,03% | 12,69% | 12,69% | 100% | 12,19% | 12,19% | 114% | BPPKBPA |
| 13 | 01 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 13 | 01 | 26 | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pmks penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jasmani sosial | | 14.745 orang | 550 orang | | | 550 orang | 550 orang | 7% | Dinkesos |
| | | | | | Persentase desa yang di interpensi program | | 6,70% | 10,3% | | | 10,3% | 10,3% | | Dinkesos |
| | | | | | Persentase kelurahan yang 10% intervensi program | | 106% | 10 | | | 10% | 10% | | Dinkesos |
| 13 | 01 | 27 | | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase PMKS | | | | | | | | | Dinkesos |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase PSKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejateraan sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial | | | | | | | | | Dinkesos |
| | | | | | Persentase desa yang di intervensi program | | | | | | | | | Dinkesos |
| | | | | | persentase kelurahan yang di intervensi program | | | | | | | | | |
| 13 | 01 | | 27 | Program Rehabilitasi Sosial | | 1.475 | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase PMKS penerima manfaat yang | 7,375 orang | | 1,474 orang | | | 1,475 orang | 1,475 orang | | Dinkesos |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitas sosial | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase desa yang di intervensi program | | | 6,7% | | | 6,7% | 6,7% | - | Dinkesos |
| | | | | | Persentase kelurahan yang di intervensi program | | | 6 | | | 6% | 6% | | Dinkesos |
| X1 | X2 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | | | |
| | 2 | 14 | 1 | Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing | | 1 | 60 | | | 60 | 60 | | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah peserta pemagangan Perusahaan. | | 1 | 100 | | | 100 | 100 | | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Jumlah peserta pemagangan Dalam dan Luar Negeri. | | 1 | 50 | | | 50 | 50 | | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan berbasis kompentensi | 1000 orang | 1001 Org | 200 orang | | | 200 orang | 200 orang | 20% | Disnaker trans |
| | | | | | Pelatihan Kewirausahaan Produktif Bagi Wirausaha Baru ( pasca lulusan pelatihan BLKI) | 800 orang | 801 Org | 160 orang | | | 160 orang | 160 orang | 18,73% | Disnaker trans |
| | | | | | Pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja | 700 orang | 701 Pelaku Usahadi 35 Desa | 140 orang | | | 140 orang | 140 orang | 20% | Disnaker trans |
| | | | | | Pembinaan Desa Produktif | 35 desa | 36 desa 701 orang | 7 desa 140 org | | | 7 desa 140 org | 7 desa 140 org | 100,00% | Disnaker trans |
| | 2 | 14 | 2 | Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal | 750 orang | | 150 orang | | | 150 orang | 150 orang | 20,00% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | di pedesaan dan perkotaan | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah padat karya produktif dan instruktur di pendesaan dan perkotaan | 750 orang | | 150 orang | | | 150 orang | 150 orang | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah masyarakat pedesaan dan perkotaan yang melaksanakan terapan teknologi tepat guna | 750 orang | | 150 orang | | | 150 orang | 150 orang | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Pemberdayaan pendampingan tenaga -kerja mandiri dan kerja sama antar lembaga | 100 orang | | 20 orang | | | 20 orang | 20 orang | 20,00% | Disnaker trans |
| | 2 | 14 | 3 | Program Pengembangan HI dan Jamsostek | | | | | | | | | | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah PP yang disahkan | 660 PP | | 70 PP | | | 105 PP | 105 PP | 15,91% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah perjajian kerja bersama (PKB) yang didaftar | 554 PKB | | 70 PKB | | | 105 PKB | 105 PKB | 18,95% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan kesetaraan di tempat kerja | 765 Prshn | | 70 PKB | | | 105 PKB | 105 PKB | 13,89% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah pembentukan lembaga kerjasama (LKS) rinartip diperusahaan | 475 Prshn | | 80 Prshn | | | 90 Prshn | 90 Prshn | 18,95% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah Pembinaan lembaga kerjasama (LKS) tripartif di kab/kota | 7 kab/kot | | 7 kab/kota | | | 7 kab/kota | 7 kab/kota | 100,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Rasio penyelesaian perselisihan HI di luar Pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama | 75% | | 75 | | | 75 | 75 | 100,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah Tk yang bekerja dalam | 50,356 Tk | | 350 Tk | | | 350 Tk | 350 Tk | 0,70% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah TK luar hubungan kerja (LHK) yang menjadi peserta jamsostek | 1000 Tk | | 200 Tk | | | 200 Tk | 200 Tk | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah | 865 Prshn | | 35 Prshn | | | 35 Prshn | 35 Prshn | 4,05% | Disnaker trans |
| | 2 | 14 | 4 | Program Perlindungan Tenaga Keja dan Pengembangan Sitem Pengawasan Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah pekerja anak yang ditarik BPTA | 500 anak | | 100 anak | | | 100 anak | 100 anak | 20,00% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak | 50% | | 10 | | | 10 | 10 | 50,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Kerjasama pener apan norma kerja perempuan dan anak | 50% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Perusahaan yang melaksanakan aturan waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan | 55% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 18,18% | Disnaker trans |
| | | | | | Perusahaan yang melaksanakan aturan penempatan dan pelatihan tenaga kerja | 50% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | perusahaan yang melaksanakan aturan | 70% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 14,29% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | hubungan kerja dan kebebasan berserikat | | | | | | | | | |
| | | | | | Pekerja yang memperoleh hak jaminan sosial tenaga kerja (jk dan jkk) | 100% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 10,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 | 60% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 16,67% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan norma mekanik, uap,berjana tekan,listrik,konstruksi bangunan dan penanggulangan kebakaran | 50% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 20,00% | Disnaker trans |
| | | | | | Jumlah perusahaan yang menerapkan | 70% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 14,29% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | norma kesehatan kerja, lingkungan kerja dan bahan berbahaya | | | | | | | | | |
| | | | | | Kualitas teknis pemeriksa norma ketenagakerjaan | 85% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 11,76% | Disnaker trans |
| | | | | | Kerjasam lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan | 100% | | naik 10% | | | naik 10% | naik 10% | 10,00% | Disnaker trans |
| | 2 | 14 | 5 | Program Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) | Persentase instrastruktur yang terbangun | 100% | | 17 | | | 19 | 19 | 19% | Disnaker trans |
| | 2 | 14 | 6 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | | | | | | | | | | Disnaker trans |
| | | | | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan | 95% | | 60 | | | 70 | 70 | 70% | Disnaker trans |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dokumen RKPD | | | | | | | | | |
| 0 | 2 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | | PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Program Perencanaan Tata Ruang | Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan | Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterpian unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj, Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL | Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitasi Percepatan Legislasi RTRW Kab/Kota | 2 RDTR KSP | | | 1 RDTR KSP & 2R Semua KSP | 1 RDTR KSP & 2R Semua KSP | 100% | BAPPEDA |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Program Pemanfaatan Ruang | Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan | 1 | Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra | Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona laut | | | Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut | Sinkronisasi Peta Citra Satlit QuickBird zona darat dan laut | 100% | BAPPEDA |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | rakyat | | Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung | 40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraan PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota | 6 PPNS Prov. Kep. Babel/Kab/Kota | Peningkatan kapasitas 40 PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR | | | Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR | Alat peralatan pendukung PPNS dan 1 Laporan Penyelenggaraan PR | 100% | BAPPEDA |
| 0 | 10 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 15 | | Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | a). Tersedianya | 1 | | 1 | 1 | | | | | BAPPEDA |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Perda/Pergub mengenai laporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah dalam lingkup SKPD Provinsi | Perda/Pergub terkait Pelaporan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah | | Perda/Pergub | Perda/Pergub | | | | | |
| | | | | | b). Tersedianya Sistem Pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah berbasis IT pada beberaoa sektor pelaporan turunan dari PP Nomor 8 Tahun 2008 | Tersedianya Sistem Pelaporan berbasis e-government terhadap pelaporan penyelenggaraan Rencana Kerja Pembangunan Daerah | | | | | 1 Sistem Pelaporan e-Government | | | |
| | | | | | c). Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem | Selarasnya instrumen Evaluasi Pelaporan dengan Dokumen Perencanaan | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan | yang baru | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 16 | | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usaha dan swasta | 4 (tiga) kerjasama antarprovinsi | 2 (dua) kerjasama | 2 (dua) kerjasama | | penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | penetapan kebijakan terkait dengan kerjasama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | BAPPEDA |
| 1 | 06 | 18 | | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kebijakan terkait dengan wilayah | data dan kebijakan wilayah | Tersedianya data wilayah strategis dan | Tersedianya roadmap | | | Penyesuaian terhadap kebijakan | Penyesuaian terhadap kebijakan | 100% | BAPPEDA |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | strategis dan cepat tumbuh | strategis dan cepat tumbuh | cepat tumbuh | dukungan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Sumatera | | | pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh | pusat terkait dengan kawasan strategis dan cepat tumbuh | | |
| | | | | | Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis | - | 1(satu) Perda RTR | 1(satu) Perda RTR | | Perda RTR Kawasan Strategis | Perda RTR Kawasan Strategis | 100% | BAPPEDA |
| 1 | 0 | 6 | 20 | Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kebijakan bidang perekonomian | | | | | | | | | BAPPEDA |
| 1 | 0 | 6 | 21 | Program Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 22 dokumen | 5 dokumen | 4 dokumen | 4 dokumen | | 5 dokumen | 5 dokumen | 22,73% | BAPPEDA |
| 1 | 0 6 | 22 | | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 23 dokumen | 6 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | | 6 dokumen | 6 dokumen | 26,09% | BAPPEDA |
| | 0 6 | 23 | | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | 5 dokumen | | 3 dokumen | 3 dokumen | | 5 dokumen | 5 dokumen | 100% | BAPPEDA |
| 2 | 2 0 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 27 | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase BPBP Kab/Kota yang Terbentuk | 100% | 114% | 42% | | | 56% | 56% | 56% | BPBD |
| | | | | | Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan | 100% | 200% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | BPBD |
| 2 | 20 | 28 | | Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana | 100% | 200% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | BPBD |
| | | | | | Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana | 100% | 125% | 50% | | | 75% | 75% | 75% | BPBD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana | 75% | 105% | 20% | | | 40% | 40% | 53% | BPBD |
| 2 | 20 | 29 | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon | 50% | 100% | 20% | | | 30% | 30% | 60% | BPBD |
| | | | | | Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana | 70% | 100% | 30% | | | 40% | 40% | 57% | BPBD |
| 1 | 15 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 15 | | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | | | | | | | | | | Dinas KUMKM |
| | | | | | Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 1 | 15 | 16 | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah ragam kemasan KUMKM | | | 2 jenis | | | 2 jenis | 2 jenis | | Dinas KUMKM |
| | | | | | Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro | | | | | | | | | |
| 1 | 15 | 17 | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | | | | | | | | | | Dinas KUMKM |
| | | | | | Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan | Kredit Perbankan=2,60T. dana BUMN/CSR=28M, Daba Pemerintah=70M, dana LPDB=2M | kredit perbankan=2,225T, dana BUMN/CSR=24,24M, Daba pemerintah=67,839M, dana LPDB=2M | kredit perbankan=2,25T, dana BUMN/CSR=25M, Daba pemerintah=68M, dana LPDB=2M | | | kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M | kredit perbankan=2,40T, dana BUMN/CSR=26M, Daba pemerintah=69M, dana LPDB=2M | 100% | |
| | | | | | Jumlah Kerjasama dengan | Lembaga perbankan=8, lembaga | Lembaga perbankan=4, lembaga | Lembaga perbankan=1, | | | Lembaga perbankan=1, lembaga | Lembaga perbankan=1, lembaga | 100% | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Lembaga Perbankan, Lembaga Penjamim Kredit, dan BUMN | penjamin kredit=1, BUMN=14, 20 Pasar | penjamin kredit=0, BUMN=5 | lembaga penjamin kredit=1, BUMN=3 | | | penjamin kredit=0, BUMN=3 | penjamin kredit=0, BUMN=3 | | |
| | | | | | Jumlah pasar Tradisional yang dibangun melalui koperasi yang tersebar di 7 Kabupaten/kota | 20 Pasar | 4 | 3 pasar | | | 4 pasar | 4 pasar | 20% | |
| | | | | | Jumlah OVOP UMKM | 12 | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 17% | |
| 2 | 15 | 8 | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM) | | | | | | | | | | Dinas KUMKM |
| 1 | 15 | 18 | | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi & UMKM (KUMKM) | Balai Latihan Koperasi dan UMKM (unit) | DED Balatkop | | | | | | | | Dinas KUMKM |
| | | | | | Gedung Promosi dan Bisnis UMKM | 1 unit gedung promosi dan bisnis | | | | | 1 unit gedung promosi dan bisnis | 1 unit gedung promosi dan bisnis | 100% | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dan Koperasi | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM | Pedesaan = 375, Perkotaan = 678 | Pedesaan= 305, perkotaan= 644 | Pedesaan = 14, perkotaan= 7 | | | Pedesaan= 14, perkotaan= 7 | Pedesaan= 14, perkotaan= 7 | 100% | |
| | | | | | Persentase Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan | Perikanan=32%, Perkebunan= 48%, Pariwisata=7%, Perdagangan =236%, Pangan=85% | Perikanan=22%, perkebunan= 28%, pariwisata=2%, perdagangan = 188%, pangan=60% | Perikanan =2%, perkebunan=4%, pariwisata=1%, perdagangan= 6%, pangan= 5% | | | Perikanan=2%, perkebunan= 4%, pariwisata=1%, perdagangan = 6%, pangan=5% | Perikanan=2%, perkebunan= 4%, pariwisata=1%, perdagangan = 6%, pangan=5% | 100% | |
| | | | | | Persentase koperasi aktif | 80% | 178% | 78% | | | 79% | 79% | 99% | |
| | | | | | Jumlah produk yang memperoleh sertifikat halal | 25 produk | 1 | 5 produk | | | 5 produk | 5 produk | 20% | |
| 2 | 1 | 5 | 7 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | | | | | | | | | | Dinas KUMKM |
| | | | | | Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% | | | 12% | | | 12% | 12% | 100% | |
| 1 | 1 | 5 | 19 | Program Pengembangan | Jumlah SDM Koperasi dan | 103.837 orang | 101.837 org | 400 org | | | 400 org | jk | 0% | Dinas KUMKM |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | SDM KUMKM yang terlatih | | | | | | | | | |
| 16 | 02 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH | | | | | | | | | | |
| 16 | 02 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing | Terpromosikan potensi unggulan daerah untuk menarik minat investor | | 5 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri | | | 6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri | 6 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri | 100% | BPPTPM |
| 16 | 02 | 16 | | Program Peningkatan Iklim Investasi | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan | 10 laporan kegiatan penanaman modal dan | | 10 laporan kegiatan penanam | | | 10 laporan kegiatan penanaman modal dan | 10 laporan kegiatan penanaman modal dan | 100% | BPPTPM |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | terselesaikan 5 permasalahan penanaman modal | | an modal dan terselesaikan 2 permasalahan penanaman modal | | | terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal | terselesaikan 3 permasalahan penanaman modal | | |
| 16 | 02 | 17 | | Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana | Tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah | Tersedianya informasi peluang usaha dari 5 sektor usaha unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | data potensi investasi yang tersedia belum lengkap | 4 sektor usaha unggulan | | | 5 sektor usaha unggulan | 5 sektor usaha unggulan | 100% | BPPTPM |
| 16 | 02 | 18 | | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat | 60 standar operasional prosedur | tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan penanaman modal | 45 standar operasional prosedur | | | 48 standar operasional prosedur | 48 standar operasional prosedur | 80% | BPPTPM |
| | | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| | | | | PARIWISATA | | | | | | | | | | |
| | | | | Program | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 2. Jumlah wisatawan mancanegara ke daerah (ribu orang/wisman) | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 3. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 4. Jumlah kegiatan promosi luar negeri | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 5. Jumlah kegiatan promosi dalam negeri | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 6. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dalam negeri | | | | | | | | | |
| | | | | | 7. Jumlah transaksi pelaksanaan promosi pariwisata daerah di pasar luar negeri | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 8. Produkvitas investasi pemasaran luar negeri | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 9. Produktivitas investasi pemasaran dalam negeri | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 10. Jumlah daerah yang dipromosikan sebagai daerah tujuan wisata KIE dan minat khusus | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 11. Jumlah publikasi dan pencitraan pariwisata daerah | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 12. Jumlah peserta | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Widyawisata Pengenalan (Familiarization Trip) | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah desa sebagai desa wisata (Destinasi) | 95 | | 50 | | | 70 | 70 | 74% | DISBUDPAR |
| | | | | | Persentase Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung pariwisata | 75% | | 60% | | | 65% | 65% | 87% | DISBUDPAR |
| 3 | 2 | 3 | | Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Kemitraan dengan pelaku wisata | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | Jumlah SDM Desa yang menjadi tenaga kerja di sektor | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Pariwisata | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. Jumlah peserta pelatihan manajemen dan teknis | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 2. Jumlah SDM yang kompetensinya meningkat/bersertifikasi | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 3. Jumlah partisipasi kegiatan forum kerjasama dan implementasinya | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 3 | 2 | 4 | | Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. Kontribusi sektor EKSB terhadap PDRB | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKSB | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKSB | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | terhadap daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | 4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 5. Jumlah pengembangan ruang kreatif | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan jejaring | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKSB yang mengalami peningkatan akses pasar | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 8. Jumlah pelaku kreatif EKSB yang mengalami peningkatan | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif | | | | | | | | | |
| | | | | | 9. Jumlah SDM yang difasilitasi untuk meningkatkan kemampuan kerja dan pengetahuan kerja dan pengetahuan terkait EKSB | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 3 | 2 | 5 | | Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1. Kontribusi sektor EMDI terhadap PDRB | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 2. Tingkat Partisipasi tenaga kerja EKMDI | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 3. Kontribusi jumlah usaha sektor EKMDI terhadap daerah | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | 4. Jumlah karya kreatif yang difasilitasi pendaftaran HKI bagi karya kreatif | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 5. Jumlah pengembangan ruang kreatif | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 6. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan jejaring | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 7. Jumlah pelaku kreatif sektor EKMDI yang mengalami peningkatan akses pasar | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 8. Jumlah pelaku kreatif EKMDI yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dan | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | produksi karya kreatif | | | | | | | | | |
| | | | | | 9. Jumlah kerjasama pengembangan dan pemanfaatan lisensi teknologi | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | 10. Jumlah pusat kreatif yang terbentuk atau direvitalisasi | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | KEBUDAYAAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 1 | | Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya | Persentase budaya yang dilestarikan | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 2 | 17 | 2 | | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Persentase budaya yang dilestarikan | 80% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik | 150% | 60% | | | 70% | 70% | 88% | DISBUDPAR |
| 2 | 17 | 3 | | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Persentase budaya yang dilestarikan | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 2 | 17 | 4 | | Program Pengembangan | Persentase Kemitraan | | | | | | | | | DISBUDPAR |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | dengan pelaku budaya | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 5 | | Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman | Persentase cagar budaya dan museum yang dilestarikan | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| | | | | | Persentase pengunjung pada museum | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 6 | | Program Pembinaan Seni dan Perfilman | Persentase hasil karya seni dan perfilman | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 2 | 17 | 7 | | Program Internalisasi Nillai dan Diplomasi Budaya | | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 2 | 17 | 8 | | Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya | Persentase pemberdayaan komunikasi pemerhati sejarah dan budaya | | | | | | | | | DISBUDPAR |
| 18 | 01 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | 16 | | Program Peningkatan Peran | Jumlah pemuda yang | 1428 pemuda | 317 pemuda | 287 pemuda | | | 287 pemuda | 287 pemuda | 20% | Dispora |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Serta Kepemudaan | mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | 17 | | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan /keterampilan | 370 pemuda | 137 pemuda | 74 pemuda | | | 74 pemuda | 74 pemuda | 20% | Dispora |
| 18 | 01 | 18 | | Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba | 250 pemuda | 71 pemuda | 50 pemuda | | | 50 pemuda | 50 pemuda | 20% | Dispora |
| 18 | 01 | 19 | | Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga | 15 kali | 6 kali | 2 kali | | | 3 kali | 3 kali | 20% | Dispora |
| 18 | 01 | 20 | | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | | | | | | | | | | |
| | | | | | Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA, | 28 even | 25 even | 5 even (POPDA, POPWIL, Rekreasi, SKJ dan | | | 6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda | 6 even (POPNAS, POPCANAS, Rekreasi, SKJ, Kejurda | 100% | Dispora |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Kejurda, POPWIL, POPNAS, POPCANAS, Olahraga Rekreasi, SKJ dan HAORNAS) | | | HAORNAS) | | | dan HAORNAS) | dan HAORNAS) | | |
| | | | | | Jumlah atlet dan pelatih yang dibina | 333 orang | 76 orang | 70 orang | | | 70 orang | 70 orang | 21% | Dispora |
| 18 | 01 | 21 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 11 Sarpras | 2 GOR | 4 Sarpras : Lapangan Sepak Bola Pendamping, Kolam Renang, GOR Mini, dan Pondoka Atlet | | | 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis | 2 Sarpras : Lapangan Tembak dan Lapangan Tenis | 100% | Dispora |
| 18 | 01 | 22 | | Program Pembinaan Generasi Muda | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda | 160 pemuda | 161 pemuda | 32 pemuda | | | 32 pemuda | 32 pemuda | 20% | Dispora |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5 kali | 6 kali | 1 kali | | | 1 kali | 1 kali | 20% | Dispora |
| 1.19 | 01 | | | URUSAN RUTIN | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI | | | | | | | | | | |
| 2 | 19 | 1 | | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| | | | | | persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (dari jumlah total desa) | | | 25% | | | 30% | 30% | 100% | |
| 1.19 | 16 | | | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan | | | | | | | | | | Kesbanglinmas |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Pencegahan Tindak Kriminal | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa) | | | 0 | | | 30% | 30% | 100% | |
| 1.19 | 17 | | | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Meningkatnya wawasan kebangsaan | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| 1.19 | 18 | | | Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| | | | | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| 1.19 | 19 | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban | | | | | | | | | | Kesbanglinmas |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | dan Keamanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total) | | | 40% | | | 50% | 50% | | |
| 1.19 | 21 | | | Program Pendidikan Politik Masyarakat | | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| | | | | | Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok) | | | 25% | | | 30% | 30% | 100% | |
| | | | | Program Kemitraan Kamtibnas | | | | | | | | | | Kesbanglinmas |
| | | | | | Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas | | | 50% | | | 60% | 60% | 100% | |
| | | | | Program Ketahanan Ekonomi Masyarakat | Terciptanya Stabilitas | | | | | | | | | Kesbanglinmas |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Politik dan Keamanan Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 1 | | Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu | | Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPUD | Terlaksanaanya monev persiapan Pemilu DPRD, terlaksanaanya verifikasi dan terbitnya SK | | | Terlaksanaanya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD | Terlaksanaanya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | | | Gubernur tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota dan terlaksanaanya verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD | | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | | Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/K | Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala | | | | Terlaksanaanya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi | Terlaksanaanya fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walikota di Provinsi | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | ota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Daerah dan wakil Kepala Daerah | | | | Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | |
| 2 | 20 | 3 | | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | -Terciptanya aturan dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah | - Belum terlaksananya pelaksanaan tugas pembantuan yang diserahkan dari Pemerintah Provinsi kepada | Terlaksananya pelaksanaan TP di 2 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak | | | Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksanany | Terlaksananya pelaksanaan TP di 3 Kab/Kota serta peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksanany | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, Peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tertibnya penyampaian laporan pelaksanaan keuangan di daerah | pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah, masih kurangnya pemahaman oleh SDM tentang aturan-aturan pelaksanaan tugas pembantuan di wilayah provinsi dan belum optimalnya penyampaian laporan keuangan | 80 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota | | | a pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota | a pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 Kab/Kota | | |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala | Terwujudnya kelancaran pelaksanaan Pemilukada | Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi | | | | Terlaksanany a fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walik | Terlaksanany a fasilitasi pelantikan 4 Bupati/Walik | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Daerah/ Wakil Kepala Daerah | Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah | | | | ota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan terwujudnya monev pesiapan Pilkada 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | |
| | | | | | | - Terlaksanany a rapat evaluasi dan monitoring serta terwujudnya kelancaran pengiriman laporan keuangan daerah, terwujudnya koordinasi yang baik | -Belum terlaksanany a rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah, belum terlaksanany a rakor pengembang an sumber pendapatan | - Terlaksan anya satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitorin g 7 kabupate n/kota, terlaksan anya dua kali rapat koordinas | | | - Terlaksanany a satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/k ota, terlaksanany a dua kali rapat koordinasi dan meningkatny | - Terlaksanany a satu kali rapat evaluasi dan tiga kalo monitoring 7 kabupaten/k ota, terlaksanany a dua kali rapat koordinasi dan meningkatny | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | dengan aparat instansi terkait dan tercapainya peningkatan pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan des dan pungutan desa, terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah serta meningkatnya kualitas SDM pengelola keuangan daerah | desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, belum terlaksananya kegiatan sosialisasi pengembangan sumber pendapatan daerah, belum tersedianya data base | i dan meningkatnya pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 40 peserta dan meningkatnya pengembangan | | | a pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base | a pemahaman 80 peserta dalam hal pengembangan sumber pendapatan desa, inventarisasi kekayaan desa dan pungutan desa, terwujudnya peningkatan kualitas SDM 50 peserta dan meningkatnya pengembangan sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | | | sumber pendapatan daerah yang potensi secara optimal, tersedianya 100 buku data base sumber pendapatan desa, kekayaan | | | sumber pendapatan desa, kekayaan | sumber pendapatan desa, kekayaan | | |
| 2 | 20 | 4 | | Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B) | 41 SKPD | 9 SKPD | 6 SKPD | | | 7 SKPD | 7 SKPD | 17% | Inspektorat, Biro Organisasi |
| 2 | 2 | 6 | | Program Penataan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | 0 | | | dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | LAKIP (Nilai C) | LAKIP (Nilai C) | | | LAKIP (Nilai C) | LAKIP (Nilai C) | 10% | Biro Organisasi, Inspektorat, |
| 2 | 2 0 | | 8 | Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | Terwujudnya optimalisasi perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah | Terwujudnya kerjasama daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah, pengelolaan daerah yang berbatasan dan penanggulangan potensi konflik antar daerah yang berbatasan | Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, belum adanya database potensi kerjasama daerah, dan masih kurangnya pemahaman | Terfasilitasinya proposal bidang yang akan dikerjasamakan, terfasilitasinya materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian | | | Terpublikasinya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota | Terpublikasinya peta daerah potensi kerjasama daerah, dan terbentuknya networking kerjasama daerah antar daerah tingkat provinsi dan kab/kota | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | | aparat pelaksana kerjasama tentang kerjasama daerah | kerjasama serta tersusunnya Perda tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah | | | | | | |
| 2 | 20 | 9 | | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 20 | 10 | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah | Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Belum terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah serta masih belum tertatanya urusan kewenangan antara pemerintah provinsi | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 3 kabupaten/kota serta terlaksan | | | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 4 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 16 urusan wajib dan pilihan terkait dengan | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | | dengan kabupaten/kota | anya sosialisasi 12 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota | | | pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota | pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota | | |
| 2 | 20 | 11 | | Program Pembinaan dan Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Kab/Kota | Jumlah Perda Kab/Kota yang dievaluasi dan diverifikasi | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 20 | 12 | | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, | Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintaha | Tersedianya pedoman Peraturan tentang | | | Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, | Tersedianya pedoman Peraturan tentang kecamatan, | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | dan Kelurahan | desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/keluraha nterhadap peraturan perundangan yang berlaku | desa/kelurahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku sehingga da[at meningkatkan kinerja aparatur/SDM tersebut | n kecamatan, desa/kelurahan serta kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan | kecamatan, desa/kelurahan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur | | | desa/kelurahan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur | desa/kelurahan, terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur | | |
| 2 | 20 | 13 | | Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta | | 43 SKPD (ABK); 43 SKPD (Peta Jabatan); | 42 SKPD (rumpun jabatan) | | | 42 SKPD (anjab) | 42 SKPD (anjab) | 100% | Biro Organisasi |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 14 | | Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah | | Dokumen SOP, SPM, Maklumat, IKM, SP Belum disusun, TND belum disosialisasikan | 42 SKPD (SOP, SP, SPM, TND) 30 SKPD (Maklumat, IKM) | | | 42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM) | 42 SKPD (SOP, SPM, SP, IKM) | 100% | Biro Organisasi |
| 2 | 20 | 15 | | Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar | 61 Perda | 62 PERDA (2007 s/d 2011) | 12 Perda | | | 12 Perda | 12 Perda | 19% | Biro Hukum |
| 2 | 20 | 16 | | Program Bantuan Hukum | Jumlah bantuan hukum yang diberikan | | | | | | | | | Biro Hukum |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kepada aparatur/masyarakat | | | | | | | | | |
| 2 | 0 | 17 | | Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | Jumlah Perda/Pergub yang terkait dengan pelayanan publik | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 0 | 18 | | Program Penataan dan Dokumentasi Hukum | Jumlah Perda/Pergub yang sudah ditata dan didokumentasikan | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 0 | 19 | | Program Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan | Jumlah sosialisasi Penyuluhan Hukum/Perundang-undangan yang dilakukan | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 0 | 20 | | Program Penataan di bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat | | | | | | | | | Biro Hukum |
| 2 | 0 | 21 | | Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala | Terwujudnya transparansi dan | Terwujudnya kinerja pelaporan | Masih rendahnya kinerja | Tersusunnya pelaporan | | | Tersusunnya pelaporan Kepala | Tersusunnya pelaporan Kepala | 100% | Biro Pemerintahan |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Daerah | akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah | Kepala Daerah dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah | pelaporan Kepala Daerah serta kurangnya pemahaman SDM terhadap sistem pelaporan Kepala Daerah | Kepala Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah | | | Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah | Daerah yang akuntabel dan akuntabilitas serta peningkatan kualitas pemahaman oleh aparatur tentang sistem pelaporan Kepala Daerah | | |
| 2 | 20 | 22 | | Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | Meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD | | | 16 Dinas | | | 23 UPTD | 23 UPTD | 100% | Biro Organisasi |
| 2 | 20 | 23 | | Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan | Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota | | | 2 Kab | | | 1 Kab | 1 Kab | 100% | Biro Organisasi |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | dalam penataan kelembagaan SKPD | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 24 | | Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD | | | 16 Dinas | | | 23 UPTD | 23 UPTD | 100% | Biro Organisasi |
| 2 | 20 | 32 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 4 | | Program Pembinaan Generasi Muda | Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan tekhnis kepemudaan | 520 | 1 | 428 | | | 456 | 456 | 88% | Biro Kesra |
| 2 | 13 | 5 | | Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama | | | | | | | | | | Biro Kesra |
| 2 | 13 | 6 | | Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial | Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel | | 1 | | | | | | | Biro Kesra |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 2 | 13 | 7 | | Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah | Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal | 90% | 130% | 70% | | | 75% | 75% | 83% | Biro Kesra |
| 2 | 13 | 8 | | Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika | Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur | 90% | | 70% | | | 75% | 75% | 83% | Biro Kesra |
| 2 | 13 | 9 | | Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama | 90% | | 70% | | | 75% | 75% | 83% | Biro Kesra |
| 2 | 13 | 10 | | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni | 60 | | 12 | | | 12 | 12 | 20% | Biro Kesra |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 1 | | Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 30 Diklat | 31 Diklat | 6 Diklat | | | 6 Diklat | 6 Diklat | 199% | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Lamanya proses pembahasan Perda/Pergub | | | 3 Bulan | | | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | Sekretariat DPRD |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan Kapasirtas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | | | | | | | | Sekretariat DPRD |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 4 | | Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada | | | | | | | | | Inspektorat, Satpol PP |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | negara/daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti | 4.659 Rekomendasi | 3535 Rekomendasi | 215 Rekomendasi | | | 220 Rekomendasi | 220 Rekomendasi | 5% | Inspektorat, Satpol PP |
| | | | | | Jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai minimal dengan kategori baik (B) | 41 SKPD | 9 SKPD | 6 SKPD | | | 7 SKPD | 7 SKPD | 17% | Inspektorat, Biro Organisasi |
| 2 | 20 | 5 | | Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD | 84 orang | 46 Orang | 7 orang | | | 8 orang | 8 orang | 10% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat | 277 orang | 41 Orang | 46 orang | | | 48 orang | 48 orang | 17% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan Profesionalism | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | e tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | |
| 2 | 2 0 | 6 | | Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | adanya kebijakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi pengawasan | 2 sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | | | 0 Sistem | 0 Sistem | 0% | Inspektorat |
| | | | | | Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | LAKIP (Nilai C) | LAKIP (Nilai C) | | | LAKIP (Nilai C) | LAKIP (Nilai C) | 10% | Biro Organisasi, Inspektorat, |
| 2 | 2 0 | 7 | | Program Mengintensifkan Penanganan | Jumlah penangganan pengaduan | 27 kasus | 4 kasus | 5 kasus | | | 5 kasus | 5 kasus | 19% | Inspektorat |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Pengaduan Masyarakat | Masyarakat yang dapat diselesaikan | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 5 | | Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD | 84 orang | 46 Orang | 7 orang | | | 8 orang | 8 orang | 10% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat | 277 orang | 41 Orang | 46 orang | | | 48 orang | 48 orang | 17% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| 2 | 20 | 30 | | Program Pendidikan Kedinasan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan | 275 | 1 | 55 | | | 55 | 55 | 20% | Badan Diklat/BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kedinasan | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 31 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | | Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | | | | | | | | Badan Diklat/BKD |
| | | | | | Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan | | | | | | | | | Badan Diklat/BKD |
| 2 | 20 | 32 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 85 | | 1 | | | 0 | | | BKD |
| | | | | | Terlaksananya penempatan dan promosi pegawai melalui proses Assesment Center | 100% | | 40% | | | 60% | | | BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Terwujudnya kebijakan tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja (berdasarkan job grading) | 100% | | 100% | | | 0 | | | BKD |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 5 | | Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya | | | | | | | | | |
| | | | | | a. Pegawai sudah sertifikasi penjejangan JFA/P2UPD | 84 orang | 46 Orang | 7 orang | | | 8 orang | 8 orang | 10% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | b. Pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat | 277 orang | 41 Orang | 46 orang | | | 48 orang | 48 orang | 17% | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| | | | | | Terwujudnya Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | | | | | | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |
| 2 | 20 | 30 | | Program Pendidikan Kedinasan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan | 275 | 1 | 55 | | | 55 | 55 | 20% | Badan Diklat/BKD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kedinasan | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 31 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | | Meingkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur | | | | | | | | | Badan Diklat/BKD |
| | | | | | Persentase pegawai yang menduduki jabatan karier yang sudah didiklatkan | | | | | | | | | Badan Diklat/BKD |
| 2 | 20 | 32 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase pegawai yang mendapat pengembangan kapasitas | 1960 | | 390 | | | 400 | | | Badan Diklat |
| | | | | | Terwujudnya peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | 280 | | 0 | | | 120 | | | Badan Diklat |
| 2 | 2 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 32 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | | 70% | | | 65% | | | Sekretariat DPP/KORPRI |
| 2 | 20 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | | Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | peningkatan fasilitasi pelayanan kepemerintahan hubungan antar lembaga. (mess daerah, promosi dan informasi) | 5 kali acara halal bihalal | 5 kali acara halal bihalal | 1 kali acara halal bihalal | | | 1 kali acara halal bihalal | 1 kali acara halal bihalal | 100% | Kantor Perwakilan Bangka Belitung |
| 1 | 21 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG KETAHANAN PANGAN | | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 15 | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | | | | | | | | | | Badan Ketahanan Pangan |
| | | | | | Persentase cadangan pangan pemerintah | 100% | 1 | 75% | | | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | Skor pola pangan harapan | 95 | 80,7 | 83,9 | | | 90,3 | 90,3 | 95% | |
| | | | | | Jumlah komoditi pangan segar yang aman dikonsumsi di Babel | 253 | 36 | 45 | | | 50 | 50 | 20% | |
| | | | | | Meningkatkan ketersediaan | 95% | 1,7 | 80% | | | 80% | 0,8 | 84% | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | informasi,pasokan harga, distribusi dan akses pangan 14 komoditi bahan pangan pokok (%) | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pembentukan desa mandiri pangan sebanyak 3 desa per tahun | 15 desa | - | 3 desa | | | 3 desa | 3 desa | 20% | |
| | | | | | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di daerah rawan pangan (jumlah desa) | 75 desa | 61 | 3 | | | 3 | 3 | 4% | |
| 2 | 22 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | 1 | | Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase BUMDes yang | 100% | 110% | 50% | | | 70% | 70% | 70% | BPMD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | aktif | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pasar desa yang aktif | 50 desa | 3 desa | 10 Desa | | | 15 desa | 15 desa | 30% | BPMD |
| | | | | | PKK aktif (Jumlah seluruh PKK) | 100% | 185% | 90% | | | 90% | 90% | 90% | BPMD |
| | | | | | Posyandu aktif (Jumlah seluruh posyandu) | 100% | 190% | 95% | | | 95% | 95% | 95% | BPMD |
| | | | | | Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang berfungsi (jumlah keseluruhan desa) | 90% | 130% | 50% | | | 75% | 75% | 83% | BPMD |
| | | | | | Prosentase pasar desa yang aktif | 100% | 110% | 50% | | | 70% | 70% | 70% | BPMD |
| 2 | 22 | 2 | | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) | 90% | 100% | 30% | | | 45% | 45% | 50% | BPMD |
| | | | | | Persentase desa yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan asset desa atau kelurahan yang mengaplikasikannya (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) | | 200% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | BPMD |
| 2 | 22 | 3 | | Program Peningkatan Lembaga | | | | | | | | | | BPMD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif (Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan) | 100% | 150% | 60% | | | 75% | 75% | 75% | |
| | | | | | Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan. .kondisi skr 6 kelompok)) | 0,6% | 0,21% | 0,35% | | | 0,40% | 0,40% | 66,67% | |
| 2 | 22 | 5 | | Program Pengelolaan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase posyantek yang berfungsi (Jumlah seluruh Kecamatan) | 100% | 110% | 50% | | | 70% | 70% | 70% | BPMD |
| | | | | | Persentase desa yang mengembangkan energy terbarukan (jumlah seluruh desa) | 100% | 110% | 40,00% | | | 60% | 60% | 60% | BPMD |
| | | | | | Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG | 55% | 115% | 30% | | | 40% | 40% | 73% | BPMD |
| # | | 22 | 6 | Program Beras Miskin Gratis (Raskintis) | Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin) | 100% | 200% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | BPMD |
| X1 | | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.2.6.01 | 15 | | Progam Perbaikan Sistem Administasi Kearsipan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase Sistem Kearsipan yang diterapkan | | | | | | | | | BPAD |
| 1 | 1.2.6.01 | 16 | | Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokument/Arsip Daerah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan | | | | | | | | | BPAD |
| 1 | 1.2.6.01 | 17 | | Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan | | | | | | | | | BPAD |
| 1 | 1. | 18 | | Program | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | 2 6. 0 1 | | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/keluraha n | 180 desa/kelurah an | 1 desa/kelurah an | 40 desa/kelu rahan | | | 40 desa/kelurah an | 40 desa/kelurah an | 22% | BPAD |
| 1 | 1. 2 6. 0 1 | 21 | | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase desa/keluraha n yang diinterpensi pengembangan budaya baca | 592 Desa | 66 Desa | 115 Desa | | | 115 Desa | 115 Desa | 19% | BPAD |
| | | | | | Jumlah Desa/keluraha n yang | 105 Desa/Kel | 1 | 21 Desa/Kel | | | 21 Desa/Kel | 21 Desa/Kel | 20% | BPAD |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dikembangkan perpustakaan desa/keluraha n | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah SDM Perpustakaan yang dibina | 680 Org | 1 | 120 Org | | | 160 Org | 160 Org | 24% | BPAD |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan | 680 org | 1 org | 160 org | | | 160 org | 160 org | 24% | BPAD |
| | | | | Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Persentase sistem kearsipan yang diterapkan | | | | | | | | | BPAD |
| 2 | | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| 2 | 25 | | | BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | Program | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | 5 | | | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terpenuhnya infrastruktur dan komunikasi dan infromatika di tujuh Kab/Kota | | - | - | - | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | 25 | 2 | | Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedia panduan jangka panjang Percepatan Pengembangan E-Gov Provinsi Kep. Babel | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Tersedianya SDM Aparatur Pemerintah yang terlatih | | 50 org | | | | | | | DISKOMINFO |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | sebanyak 50 instansi provinsi/kab/kota | | | | | | | | | |
| | | | | | Terselenggaranya Rakor Komunikasi dan Informatika | | 1 keg | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Tersedianya data Monev Kab/Kota | | 1 paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Terlaksananya Bimtek Kajian Bidang Pos dan Telekomunikasi | | 1 keg | | | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | 25 | 3 | | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM di Bidang | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Postel melalui Bimtek dan Pelatihan | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Tenaga Teknis Profesional Bidang Pos dan Jasa Titipan | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Terwujudnya PNS yang berkualifikasi sandi da kamar sandi representatif dalam rangk aptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi persandian | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | 25 | 4 | | Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya Majalah Kominfo Prov. | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |
| | | | | | Terpublikasinya kegiatan pembangunan daerah melalui | | 1 Paket | | | | | | | DISKOMINFO |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | konfrensi pers | | | | | | | | | |
| | | | | | Terjaganya kelestarian budaya/tradisi masyarakat lokal melalui Pekan Informasi | | 1 Keg | | | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | 25 | 5 | | Program Optimalisasi Pemanfaat Teknologi Informasi | | | | | | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | 25 | 6 | | Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | | | | | | DISKOMINFO |
| 2 | | | | URUSAN WAJIB PILIHAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 15 | | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tapi miskin) | | - | - | - | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 2 | 02 | 17 | | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan | | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota | Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 21 | | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas | Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung | | Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung | | | Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung | Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung | 100% | |
| | | | | Program Peningkatan produksi hasil peternakan | | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Persentase | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin) | | | | | | | | | |
| | | | | Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan | | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Tersedianya fasilitas pemotongan hewan yang bersih dan higienis di kab/kota | Pembangunan fasilitas/sarana pemotongan hewan | | | | | | | | |
| 2 | 02 | 24 | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pengembangan kawasan perkebunan | Tersedianya sarana dan prasarana | Sarana prasarana teknologi | Meningkatnya sarana | | | Meningkatnya sarana dan prasarana | Meningkatnya sarana dan prasarana | 100% | DISTANBUNAK |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | | teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna | pertanian/perkebunan yang tepat guna dirasa belum memadai | dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna | | | teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna | teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna | | |
| | | | | | Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna pada kawasan pengembangan lada | Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan | | | | | Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan | Terwujudnya penerapan teknologi bercocok tanam lada yang ramah lingkungan | 100% | DISTANBUNAK |
| | | | | Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang | Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan | sarana dan prasarana untuk peningkatan produksi belum | Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan | | | Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan | Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan | 100% | DISTANBUNAK |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | memadai | | memadai | | | | | | | |
| | | | | | Terbangunnya sentra pengembangan lada putih (Muntok White Pepper) | Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada | | Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada | | | Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada | Meningkatnya kesejahteraan petani dan lada | 100% | DISTANBUNAK |
| | | | | | Kawasan pengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi | Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan | | Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan | | | Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan | Pengembangan integrasi tanaman ternak dan lahan pertanian/perkebunan | 100% | DISTANBUNAK |
| | | | | | Pengembangan gembilik | 25ha | | 5ha | | | 5ha | 5ha | 100% | DISTANBUNAK |
| | | | | | Jumlah bibit unggul yang berhasil dikembangkan | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | | Persentase petani yang menerima manfaat (dari jumlah total petani miskin yang dibina) | | | | | | | | | DISTANBUNAK |
| | | | | BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 2 | 02 | | | URUSAN WAJIB PILIHAN | | | | | | | | | | |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya | 100 kelompok | 21 kelompok | 20 kelompok | | | 20 kelompok | 20 kelompok | 20% | Bakorluh |
| | | | | | Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang melakukan pembelajaran dangan metode percontohan | 95 kelompok | 20 kelompok | 19 kelompok | | | 19 kelompok | 19 kelompok | 20% | Bakorluh |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas SDM | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah SDM Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 Penyuluh | 31 Penyuluh | 20 kelompok | | | 30 Penyuluh | 30 Penyuluh | 20% | Bakorluh |
| | | | | | Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya | 750 Orang | 20 kelompok | 151 Orang | | | 150 Orang | 150 Orang | 20% | Bakorluh |
| | | | | Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang tersusun dan terdistribusi | 30 Judul Leaflet, 15 Judul Brosur | 7 judul leaflet, 3 Judul Brosur | 6 judul leaflet, 3 Judul Brosur | | | 6 judul leaflet, 3 Judul Brosur | 6 judul leaflet, 3 Judul Brosur | 20% | Bakorluh |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dalam berbagai media cetak | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 kabupaten/kota se-Prov. Babel | 30 unit BPP/BPK | 7 unit BPP/BPK | 6 unit BPP/BPK | | | 6 unit BPP/BPK | 6 unit BPP/BPK | 20% | Bakorluh |
| 3 | | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | KEHUTANAN | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi | 4 kelompok | 5 kelompok | 4 kelompok | | | 4 kelompok | 4 kelompok | 100% | DISHUT |
| | | | | | Jumlah kabupaten yang fasilitasi pembangunan | 6 kabupaten | | 6 kabupaten | | | 6 kabupaten | 6 kabupaten | 100% | DISHUT |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terencananya pengelolaan DAS terpadu | Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di | Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Ajang Mabat-Macung | Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu pada 1 SWP Sungai Kurau | | | Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu | Pengendalian pelaksanaan rencana pengelolaan DAS terpadu | 100% | DISHUT |
| | | | | | Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi | Terkendalinya pelaksanaan | Terbentuknya tim pengendali | Terkendalinya pelaksan | | | Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi | Terkendalinya pelaksanaan | 100% | DISHUT |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | rehabilitasi dan reklamasi hutan provinsi kep. Babel | aan rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | | | hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | | |
| 3 | 2 | 3 | | Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat | Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan | Keputusan mentri hehutanna Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tentang penunjukan Kawasan hutan wilaya provinsi | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib | | | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penatagunaan kawasan | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertib penatagunaan kawasan | 100% | DISHUT |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | dilaksanakan secara optimal | sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal | kepulauan bangka belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitian tim terpadu penyelesaian subtansi kehutanan dalam rangka penyusunan RTRWP. | penata gunaan kawasan hutan | | | hutan | hutan | | |
| 3 | 2 | 4 | | Program perlindungan dan konservasi SDA | | | | | | | | | | |
| | | | | | Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan | Terlaksananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dari 10 polisi kehutanan (PNS) | Penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (Honorer) | Terlaksanya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan | | | Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan | Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan | 100% | DISHUT |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Meningkatnya kapasitas lembaga pengelolaan hutan lindung, dan kepastian bentuk pengolahan kawasan hutan konservasi dalam rangka terselenggaranya pelayanan Publik kerjasama konservasi alam | Terbentuknya dan beroperasinya KPHL, kepastian bentuk pengelolaan kawasan hutan konservasi (sebagai Taman Hutan raya/taman wisata alam/cagar alam/taman buru) dalam rangka terwujudnya optimalisasi pemanfaatan SDA dalam rangka terselenggaranya pelayanan publik dan kerjasama konservasi alam | Penetapan 2 wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Menteri Kehutanan , 6 lokasi hutan konservsi dan penetapan 3 kawasan lindung (di kab. Bangka Tengah, Kab Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang) | Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung pulau bangka | | | Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung pulau bangka | Tersusunnya rencana pengelolaan hutan lindung pulau bangka | 100% | DISHUT |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 02 | 03 | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| | | | | BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | | | |
| 02 | 03 | 15 | | Program Pembinaan dan Pengawasaan bidang Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | | |
| | | | | | DBH Sektor Migas (milyar rupiah) | 30 | 8,9 | 6.000 | | | 6.000 | 6.000 | 100% | DISTAMBEN |
| | | | | | DBH Sektor Tambang (milyar rupiah) | 325 | 89,59 | 65.000 | | | 65.000 | 65.000 | 100% | DISTAMBEN |
| | | | | | Jumlah KK yang telah melakukan konversi minyak tanah ke gas (KK) | 300.000 | 0 | 200.000 | | | | | | DISTAMBEN |
| | | | | | Jumlah SPBG (unit) | 2 | 0 | 1 | | | | | | |
| 02 | 03 | 16 | | Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung | 200 laporan | - | 40 laporan | - | | 40 laporan | 40 laporan | 100% | DISTAMBEN |
| 02 | 03 | 17 | | Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | | | | | | | | | | |
| | | | | | PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) | PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 | | DED PLTMH; PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; EBT 1 paket; PLTU 30,5 MW; JTM 214,2 kms; JTR 239.9 kms; 1 | | | PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms | PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 221,3 kms; JTR 247,8 kms | 100% | DISTAMBEN |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Peraturan Gubernur | (satu) Peraturan Gubernur | | Peraturan Gubernur | | | | | | |
| | | | | | Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan | | | 97% | | | 98% | 98% | 100% | |
| | | | | | Jumlah desa mandiri energi | 3 desa | | | | | 1 desa | 1 desa | 100% | DISTAMBEN |
| | | | | | Tingkat penerapan hemat energi | 32% Penghematan | | 25% Penghematan | | | 27% Penghematan | 27% Penghematan | 100% | DISTAMBEN |
| | | | | | Tingkat fasilitasi investasi energi ketenagalistrikan | 2 PLTU | | 2 PLTU | | | 50.000 | 50.000 | 100% | DISTAMBEN |
| 02 | 03 | 22 | | Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah | | | | | | | | | | |
| | | | | | Tersedianya laporan pelaksanaa program reklamasi dan pasca Tamban sebanyak 75 laporan. 1 PERGUB | 75 laporan. 1 PERGUB Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan | - | 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku | | | 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 | 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap Pelaku Tambang yang dibina dan 4 | 100% | DISTAMBEN |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Mineral, 65 Pelaku Tambang yang dibina dan 19 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi | kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi | | Tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM | | | kegiatan peningkatan SDM | kegiatan peningkatan SDM | | |
| | | | | Program Penyusunan Peraturan Daerah tentang Distribusi dan Penggunaan BBM Bersubsidi*) | Tersedianya Peraturan tentang Distribusi BBM tingkal provinsi | 1 Perda | | 1 Perda tentang Distribusi BBM | | | | | | DISTAMBEN |
| | | | | Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal *) | Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal | 24.000 | | Pengembangan energi alternatif (2 unit) | | | Pengembangan energi alternatif (2 unit) | Pengembangan energi alternatif (2 unit) | 100% | DISTAMBEN |
| 2.05 | 01 | | | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | |
| 2.05 | 2.05 | | | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | |
| 2.05 | 2.05 | 01 | 15 | Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta Ha) | 400 Ha | | 2000 Ha | | | 3000 Ha | 3000 Ha | 100% | DKP |
| | | | | | Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil terluar yang dikelola(pulau) | 12 Pulau | | 7 Pulau | | | 10 Pulau | 10 Pulau | 100% | DKP |
| 2.05 | 2.05 | 01 | 20 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Produksi perikanan budidaya (ton/tahun) | 68,581 | - | 49,275 | | | 62,046 | 62,046 | 90% | DKP |
| | | | | | nilai tukar pembudidaya ikan(NTPi) Provinsi | 127 | | | | | 125 | 125 | 98% | DKP |
| 2.05 | 2.05 | 01 | 21 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah | 181,000 | | 161,000 | | | 169,000 | 169 | 93% | DKP |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun) | | | | | | | | | |
| | | | | | Nilai tukar Nelayan (NTN) | 127 | | 119 | | | 122 | 122 | 96% | DKP |
| 2.05 | 2.05 | 01 | 26 | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah unit pengolahan ikan | 2.800 | | 1.980 | | | 2200 | 2200 | 79% | DKP |
| | | | | | Nilai ekspor Hasil Perikanan (USD/tahun) | 24.120.000 | | 13.000.000 | | | 17.370.000 | 17.370.000 | 72% | DKP |
| | | | | | Konsumsi Ikan(kg/kap/th) | 49 | | 45 | | | 47 | 47 | 96% | DKP |
| | | | | | Jumlah Kredit yang difasilitasi KKMB(milyar) | 1,6 | | 1,2 | | | 1,4 | 1,4 | 88% | DKP |
| 2 | 07 | | | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | |
| | | | | PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 16 | Program Pengembangan | | | | | | | | | | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | Industri kecil dan Menengah | | | | | | | | | | |
| | | | | | jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 7145 unit | | | | | | | | | Disperindag |
| | | | | | total nilai investasi industri kecil dan menengah(RP. Milyar) | | | | | | | | | Disperindag |
| 2 | 07 | 01 | 18 | Program Penataan Struktur Industri | Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis | 7 | | 1 | | | 1 | 1 | 14% | Disperindag |
| 2 | 07 | 01 | 19 | Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah OVOP IKM percontohan | 7 | | 1 | | | 2 | 2 | 29% | Disperindag |
| | | | | | Jumlah forum pembentukan OVOP | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | 20% | Disperindag |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| 2 | 07 | 01 | 20 | Program Pengembangan Industri Berbasi Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro) | 7 | | 1 | | | 1 | 1 | 14% | Disperindag |
| | | | | PERDAGANGAN | | | | | | | | | | |
| 2 | 07 | 01 | 16 | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah kecamatan yang terlayani sebanyak 50 kecamatan | 50 | | 45 | | | 47 | 47 | 94% | Disperindag |
| | | | | | Retribusi Tera (Rp. Juta) | 1221 | | 220 | | | 242 | 242 | 20% | Disperindag |
| 2 | 07 | 01 | 16 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah pedagang | 6670 | | 1318 | | | 1338 | 1338 | 20% | Disperindag |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014 | | | Target Prog/Keg RKPD Tahun 2015 Realisasi RKPD Tahun 2014 | Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2015 | | SKPD Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target RKPD Tahun 2014 | Realisasi RKPD Tahun 2014 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015 | Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=(5+7+9)* | 11=10/4 | 12 |
| | | | | | UMKM sebanyak 1/378 pedagang | | | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Pasar Percontohan sebanyak 7 unit | 18,000 | | 2 | | | 3 | 3 | 17% | Disperindag |

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

   Dari jumlah program pada program utama sebanyak 204 program dengan jumlah kegiatan total sebanyak 1.599 kegiatan, terdapat 81 kegiatan yang capaian fisiknya tidak selesai 100%, atau 5,6% dari seluruh kegiatan yang ada. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel II.64**
Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

| SKPD | No | Judul Kegiatan | Realisasi Fisik (%) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| BIRO HUKUM | 1 | Evaluasi RAPERDA Tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR | 85 |
| | 2 | Penyelesaian Sengketa TUN Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan PEMDA | 50 |
| DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 3 | Penyusunan Profil Dinas Pemuda dan Olahraga | 73,71 |
| BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTUNAN | 4 | Keikutsertaan pada Event Penyuluhan Tingkat Nasional Regional | 67,84 |
| DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 5 | Pembentukan Pengurus Forum Koordinasi OVOP Provinsi | 85,71 |
| | 6 | Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor | 85 |
| INSPEKTORAT DAERAH | 7 | Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintah Di bawahnya | 0 |
| BAPPEDA | 8 | Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (REVIEW NSDA). | 0 |
| | 9 | Studi Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | 0 |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 10 | Identifikasi dan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah | 0 |
| | 11 | Pengadaan Kebutuhan Lab.BBIS Pemali | 80 |
| | 12 | Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan | 60 |
| | 13 | Pendataan UMKM Sektor Kelautan dan Perikanan Bidang P2HP | 0 |
| | 14 | Pengadaan Bantuan Peralatan dan Pengolahan Hasil Perikanan | 0 |
| | 15 | Profil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Bangka Belitung Tahun 2012 | 0 |
| | 16 | Temu Koordinasi UMLKM,KKMB (Tenaga Pendamping) dan Pihak Perbankan | 0 |
| DINAS PERHUBUNGAN | 17 | Kegiatan Penyusunan Raperda TATRAWIL | 0 |
| DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL | 18 | Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS | 5,48 |
| | 19 | Fasilitasi Penyelesaian Kredit Usaha Ekonomi Kerakyatan | 0 |
| DINAS PEKERJAAN UMUM | 20 | Perencanaan Pembangunan Jembatan | 50 |

| SKPD | No | Judul Kegiatan | Realisasi Fisik (%) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 21 | Pembangunan Jembatan Batu Rusa II | 88,7 |
| | 22 | Pembangunan Jembatan | 96,72 |
| | 23 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 96,96 |
| | 24 | Inspeksi Kondisi Jalan | 48 |
| | 25 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah | 50 |
| RUMAH SAKIT JIWA | 26 | Pendidikan/Pelatihan Informal | 80 |
| | 27 | Pembuatan Izin Mendirikan Rumah Sakit | 40 |
| | 28 | Pembuatan AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan) Rumah Sakit | 70 |
| | 29 | Pengembangan tipe rumah sakit | 87 |
| | 30 | Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit | 0 |
| | 31 | Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap | 34 |
| RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI | 32 | Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit | 70,83 |
| | 33 | Cetak dan Pengandaan Formulir Rumah Sakit Provinsi | 65,94 |
| | 34 | Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Pegawai RS | 45,80 |
| | 35 | Pengadaan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja, dan Pakaian Khusus (bagi pegawai dan pasien RS) | 50,49 |
| | 36 | Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit | 92,90 |
| | 37 | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Rumah Sakit Umum Provinsi | 36,69 |
| | 38 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pegawai RS Provinsi | 43,79 |
| | 39 | Pengadaan Instalasi Telepon RS Provinsi | 40 |
| | 40 | Pembangunan Pintu Gerbang Pos Jaga dan Portal RS Provinsi | 0 |
| | 41 | Pembangunan Garasi Mobil RS Provinsi | 0 |
| | 42 | Pengadaan Instalasi Genset RS | 0 |
| | 43 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | 70,83 |
| | 44 | Pemeliharaan Instalasi Oksigen Sentral | 0 |
| DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI | 45 | Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 0 |
| | 46 | Survey Pemetaan Sumber Daya Mineral Non Timah | 0 |
| DINAS PENDIDIKAN | 47 | Perluasan dan Peningkatan mutu Pendidikan TK/RA | 91,98 |
| | 48 | Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA | 93,57 |
| | 49 | Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK | 98 |
| DINAS KESEHATAN | 50 | Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 0 |
| | 51 | Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Obat Rasional | 0 |
| | 52 | Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai | 70 |
| | 53 | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | 0 |
| | 54 | Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat | 50 |
| | 55 | Percepatan Pelaksanaan Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | 0 |
| | 56 | Pertemuan Pembentukan Jejaring Laboratorium Malaria | 0 |
| | 57 | Survey Dinamika Penularan | 0 |
| | 58 | Pemeliharaan Kantor Malaria Centre | 0 |
| | 59 | Pelaksanaan BIAS | 33,3 |
| | 60 | Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Program dalam rangka Eliminasi Malaria | 0 |

| SKPD | No | Judul Kegiatan | Realisasi Fisik (%) |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 61 | Investigasi Pelacakan Kasus PD3I (Campak, TN, AFP, Difteri) | 33,3 |
| | 62 | Pertemuan Koordinasi Surveilans Epidemiologi | 0 |
| | 63 | Penguatan Program Kesehatan Matra | 85,71 |
| | 64 | Peningkatan Kapasitas Management Vektor bagi Petugas Kabupaten/Kota | 0 |
| | 65 | Pertemuan Penguatan Jejaring Layanan HIV/AIDS | 0 |
| | 66 | Mobile Kilinik HIV dan IMS | 20 |
| | 67 | Pertemuan Programatik Manajemen of Drug Resistance Tuberkulosis di Babel | 0 |
| | 68 | Monitoring Evaluasi Programatik Manajemen of Drug Resistance Tuberkulosis | 0 |
| | 69 | Konsultasi dan Koordinasi Mitra Kerja | 0 |
| | 70 | Pertemuan Pembuatan Mapping Kasus Malaria dalam Menentukan Fokus Eliminasi | 0 |
| | 71 | Pembinaan Terpadu Program Kesehatan | 40 |
| | 72 | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) | 50 |
| | 73 | Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan dan Spesialis Baru | 50 |
| | 74 | Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium | 50 |
| | 75 | Honorarium Tim Jabatan Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus | 97 |
| | 76 | Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan | 0 |
| | 77 | Pengadaan IPAL dan Incenerator | 50 |
| | 78 | Peningkatan Kemampuan Bidan dalam Penerapan Standar dan Pedoman Asuhan Kebidanan di RS PONEK dan Puskesmas PONED | 0 |
| | 79 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza | 0 |
| | 80 | Fasilitasi dan Evaluasi Petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi | 0 |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 81 | Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 33,33 |

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

   Untuk program/kegiatan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan target kinerja hasil, adalah di luar kegiatan-kegiatan yang capaiannya kurang dari 100% di atas. Sehingga jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan pada TA 2014 adalah 1.518 kegiatan atau 94,4%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melampaui target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah:
   a) Gagal dalam proses lelang.
   b) Duplikasi dengan kegiatan yang dibiayai dari sumber pembiayaan lain, sehingga

beberapa kegiatan APBD tidak dilaksanakan.

c) Terbatasnya waktu pelaksanaan
d) Belum selesainya dokumen perencanaan, seperti DED, kajian lingkungan.
e) Belum sepakatnya isi subtansi dari beberapa Perda, sehingga beberapa perda belum ditetapkan.
f) Belum selesainya pembebasan lahan.
g) Akibat kondisi geografis dan cuaca.
h) Akibat terlambatnya pasokan material dari luar daerah/luar negeri.
i) Adanya perubahan dan pelepasan kepemilikan aset.
j) Berkurangnya peserta diklat atau pelatihan yang hadir.
k) Berkurangnya klaim terhadap pasien yang mendapat pelayanan kesehatan.
l) Selain itu juga terdapat sisa-sisa lelang, sifat kegiatan yang lintas sector/lintas instansi/lintas tingkatan pemerintahan hingga efisiensi dalam pelaksanaan program/kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah

   Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan proiritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

   Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah 100% dapat disimpulkan sebagai berikut;

   a) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya keterkaitan dengan kegiatan yang lain dengan mendukung upaya pencapaian target RPJMD, maka perlu dialokasikan pada tahun berikutnya.
   b) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena bersifat antisipatif harus tetap dianggarkan karena harus dilaksanakan bilamana dibutuhkan.
   c) Untuk lebih menjamin keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditingkatkan sinkronisasi dan sinergi kegiatan yang dibiayai dari seluruh sumber pembiayaan.
   d) Agar kegiatan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan, maka perlu ditingkatkan fungsi pengendalian terhadap seluruh kegiatan oleh masing-masing kepala SKPD.
   e) Untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang memerlukan dukungan perencanaan teknis, maka penyusunan dokumen teknisnya dilakukan sebelum pekerjaan fisik dianggarkan atau dilaksanakan dan disosialisasikan pada awal tahun anggaran.

## 2.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihannya. Selanjutnya hasil Reses ini akan dipilah berdasarkan kabupaten/kota, program dan kegiatan, SKPD penanggungjawab dan kewenangan dari program/kegiatan yang diusulkan. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada tabel II.65.

Tabel II. 65
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. | URUSAN WAJIB | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | |
| | | Penyediaan Bea Siswa Tepat Sasaran | Desa Sungai Selan -Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Regulasi |
| | | Pengadaan Pagar untuk sekolah PAUD | Desa Kurau Barat - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Peningkatan Fasilitas SMA Negeri 2 Sungai Selan | Desa Keretak - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Penyediaan alat-alat laboratorium SMA Negeri 2 Sungai Selan | Desa Keretak - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Rehabilitasi Pagar SMA Negeri 2 Sungai Selan | Desa Keretak - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Rehabilitasi WC SMA Negeri 2 Sungai Selan | Desa Keretak - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Pagar SD Negeri 4 Namang | Desa Cambai - Bateng | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Insentif Guru Honorer Ponpes Nurul Falah | Ponpes Nurul Falah Air Mesu | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Peningkatan Dukungan Pengembangan TPA, PAUD, dan madrasah | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Madrasah | Desa Neknang - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bea Siswa Putra-putri PNS | Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Sosialisasi Kurikulum kepada wali murid | Kec. Puding Besar - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Pendidikan | Kec. Puding Besar - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Peningkatan Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Mendo Barat | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Perbaikan Jalan Menuju SMK Negeri 1 Mendo Barat | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Pagar dan Musholah SD Negeri 5 Petaling | Desa Petaling - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (Pagar SD, Rehab Gedung SD, Pembangunan Gedung PAUD, Drumband Sekolah) | Desa Simpang Ibul - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Kurangnnya Sumber Daya Manusia (SDM) | Desa Simpang Ibul - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Regulasi |
| | | Pembangunan Pagar SD Desa Ibul dan Rehab Gedung SD Desa Ibul | Desa Simpang Ibul - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan Drumband Desa Ibul | Desa Simpang Ibul - Bangka | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan Sarana-prasarana TPA | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Gedung PAUD | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pemberian insentif guru PAUD | Desa Air Belo - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Beasiswa Guru PAUD (Program Penyetaraan Guru) | Desa Air Belo - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Gedung PAUD | Desa Air Belo - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan PAUD dan TK di Teluk Rubia | Kec. Mentok - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Usul Diklat Sertifikasi Guru dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Regulasi |
| | | Rehabilitasi Prasarana Sekolah-sekolah (Pagar, Jendela) | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Mushollah MTs Negeri 1 Kelapa | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan SMA di Desa Kacung | Desa Kacung - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan kenaikan insentif guru | Desa Tanjung Niur - Bangka Barat | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Pagar SD | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Tambahan Ruang Gedung SD Peliang | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Gedung SD 8 Rajik | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Gedung TK dan SD Kec. Payung | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan Insentif Guru Honorer | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan Bus Sekolah | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan ruang kelas TPA | Desa Gadung - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan MCK Ponpes Darul Hikmah | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pengadaan Kendaraan Ponpes Darul Hikmah | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Operasional Biaya Santri Ponpes Darul Hikmah | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Peningkatan Kesejahteraan Guru-guru di Ponpes Darul Hikmah | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Adanya Pembangunan Sekolah-sekolah tidak tepat sasaran | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Pendidikan | Kerangka Regulasi |
| | | FS Pembangunan SLTA di Tanjung Binga | Kec. Sijuk - Belitung | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Bantuan Drumband di Kec. Simpang Renggiang | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Dinas Pendidikan | Kerangka Pendanaan |
| | | Pembangunan Fakultas Perikanan UBB di Kec. Dendang | Kec. Dendang - Beltim | Dinas Pendidikan | Kerangka Regulasi |
| | | | | | |
| 2 | Kesehatan | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rontgen dan Rekam Jantung di Puskesmas | Kec. Pangkal Balam | Dinas Kesehatan | |
| | | Pengadaan Ambulance Desa | Desa Tanjung Gunung - Bateng | Dinas Kesehatan | |
| | | Pemberian Hak Pakai Gedung Posyandu | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas Kesehatan | |
| | | Pengadaan Mobil Ambulance | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas Kesehatan | |
| | | Pembangunan Pos Kesdes Dusun Rangkui Desa Kayu Arang | Desa Kayu Arang - Bangka Barat | Dinas Kesehatan | |
| | | Penambahan tenaga medis pada Puskesmas Payung | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas Kesehatan | |
| | | Pembangunan Ruang Rawat Inap, UGD dan Kendaraan Operasional Puskesmas Batu Betumpang | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Kesehatan | |
| | | Penanggulangan Penyakit Busung Lapar/Gizi Buruk | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas Kesehatan | |
| | | | | | |
| 3 | Pekerjaan Umum | | | | |
| | 1 | Perbaikan Kantor Balai Desa | Kec. Gerunggang - Pangkalpinang | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2 | | Penyediaan Sumber Air Bersih | Kec. Gerunggang - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| 3 | | Pembangunan Pagar Kuburan | Kec. Gerunggang - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pengerasan Jalan Mulia | Kel. Bukit Merapin - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Stania (RST - Bukit Merapin) | Kel. Bukit Merapin - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Penyediaan Lahan Pekuburan | Kel. Bukit Merapin - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Penanggulanan daerah rawan banjir | Kel. Asam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Penanggulanan daerah rawan banjir | Kel. Aer Itam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Penanggulanan daerah rawan banjir | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan Puskesmas Jerambah Gantung - Kampak | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan Inspeksi/Jalan Pinggir Sungai Kerabut | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pendalaman Kolong Retensi Kacang Pedang | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Gerbang Kota | Kelurahan Selindung - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Pengerukan sungai selindung | Kelurahan Selindung - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Optimalisasi pemanfaatan rusunawa | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Sungai Selan | Desa Sungai Selan - Bateng | Dinas PU | |
| | | Perawatan Selokan | Desa Sungai Selan - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pembangunan WC umum | Desa Sungai Selan - Bateng | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Seberang Sungai | Desa Sungai Selan - Bateng | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Sungai Air Mesu | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Peningkatan Jalan Air Mesu | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Bukit Tringgiling | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pengaspalan Jalan (Dari dusun - Lapen) | Desa Tanjung Gunung - Bateng | Dinas PU | |
| | | Perpanjangan Jalan Pelabuhan - Dermaga | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pengaspalan Jalan menuju Tapak Antu | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan RT 4 Desa Batu Belubang | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pengerukan sungai Lubuk Besar | Desa Lubuk Besar - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pemeliharaan Tanaman Sepanjang Jalan Desa Cambai | Desa Cambai - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pengendalian Banjir | Desa Sungkap - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pembuatan talud/bandar | Desa Sungkap - Bateng | Dinas PU | |
| | | Pengaspalan Jalan di Ponpes Nurul Falah | Ponpes Nurul Falah Air Mesu | Dinas PU | |
| | | Bangunan Air Isi Ulang belum serah terima dari Dinas PU Provinsi | Desa Bakam - Bangka | Dinas PU | |
| | | Peningkatan Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani | Desa Neknang - Bangka | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Muara Alur Sungai Jelitik | Bangka | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Alur Muara yang dilaksanakan oleh PT. Timah Tbk dan PT. Pulomas kurang efektif, karena material yang dikeruk dibuang dekat sungai | Bangka | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kota Kapur - Desa Labu Air Pandan | Bangka | Dinas PU | |
| | | Rehabilitasi Jalan Desa Penagan - Simpang Pasir Garam | Bangka | Dinas PU | |
| | | Percepatan Pembangunan Jalan Simpang Merawang - Petaling | | Dinas PU | |
| | | Ganti rugi lahan untuk pelebaran jalan di Riau Silip | Kec. Riau Silip - Bangka | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Desa Jade - Desa Kimak | Desa Jade Barin - Bangka | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Talud Jalan Nasional Wilayah Timur Desa Zed | Desa Zed - Bangka | Dinas PU | |
| | | Peningkatan Jalan Desa Zed | Desa Zed - Bangka | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Desa Payabenua - Desa Labu | Desa Payabenua - Bangka | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Siring/Talud Desa Payabenua - Desa Labu | Desa Payabenua - Bangka | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Kotawaringin - Sungai Dua | Kec. Puding Besar - Bangka | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jembatan Teluk Kelabat | Kec. Belinyu - Bangka | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Riau Silip - Tanjung Gudang | Kec. Belinyu - Bangka | Dinas PU | |
| | | Bantuan dana pembangunan jembatan penghubung menuju daerah persawahan Desa Pangkalniur | Desa Pangkalniur - Bangka | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kota Kapur - Desa Labu Air Pandan | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Desa Penagan - Simpang Desa Pasir Garam | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Raya Jebus - Pradong | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Proyek PAM Dusun Penegak tidak bisa digunakan | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Rehabilitasi Jalan Provinsi Simpang Tempilang tidak selesai | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang Tempilang - Tempiang - Sungai Dua | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Peningkatan Jalan Desa Tempilang | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Sungai Daerah Payuh - Sungai Buluh | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Optimalisasi PAM Desa Mislak (3 tahun tidak jalan) | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Optimalisasi Kolong Retensi Bozem di Teluk Rubia dan Tanjunng Kelian Mentok | Kec. Mentok - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Pembuatan Siring/Talud Jalan Provinsi Kelapa - Kayu Arang | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Talud penahan gelombang | Desa Tanjung Niur - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Pengaspalan Jalan Dusun Serdang | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pelebaran Jala Permis - Bangka Kota | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Rehabilitasi Jembatan Kota | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Dermaga Desa Rajik | Kec. Simpang Rimba - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Siring pada Jalan Provinsi | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Peningkatan Jalan Raya Payung - Permis | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan Dusun Simpang Baru | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan di Desa Aik Dulang | Desa Aik Dulang - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Lenggang | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Usaha Tani ke Sawah Air Lawai | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan Menuju Dusun Gusung Baru | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Simpang Air Gegas - Payung | Kec. Air Gegas - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Optimalisasi PDAM Kec. Air Gegas | Kec. Air Gegas - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pengaspalan Jalan Desa Paya Tunggal | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Bantuan Air Bersih Desa Suka Jaya | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Payung - Pulau Besar | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Perbaikan Jalan Tembus Batu Betumpang - Toboali | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Peningkatan Jalan Sumber Jaya - Permai Indah | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Instalasi Air Bersih yang dibiayai APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Bangka Selatan tidak berfungsi | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Provinsi (Manggar - Tanjungpandan) via Kelapa Kampit. | Kacang Botor, Air Batu Buding - Belitung | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Simpang Badau - Simpang Renggiang | Kec. Badau - Belitung | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Sungai Air Selumar | Kec. Sijuk - Belitung | Dinas PU | |
| | | Normalisasi Sungai di Desa Terong | Kec. Sijuk - Belitung | Dinas PU | |
| | | Pendalaman Alur Kapal di Sungai Padang | Sungai Padang - Belitung | Dinas PU | |
| | | Penyelesaian Pekerjaan Akhir di Sekitar Jembatan Sungai Padang (masih ada timbunan tanah puru) | Sungai Padang - Belitung | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jaringan Irigasi Lahan Sawah di Desa Sungai Padang (Irigasi Primer Jebol) | Sungai Padang - Belitung | Dinas PU | |
| | | Pembuatan Jembatan Air Raya di Air Seru | Desa Air Seru - Belitung | Dinas PU | |
| | | Pelebaran Jalan Provinsi Simpang Empat Sijuk - Tanjungpandan | Kec. Sijuk - Belitung | Dinas PU | |
| | | Rehabilitasi Dermaga dan Penambahan Panjang Dermaga Desa Tanjung Binga | Kec. Sijuk - Belitung | Dinas PU | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pembangunan Saluran Drainese di Desa Lintang | Desa Lintang - Beltim | Dinas PU | |
| | | Perbaikan Jalan Provinsi di Desa Dendang | Desa Dendang - Beltim | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Jalan Pintas Desa Jangka - Desa Kembiri | Belitung - Beltim | Dinas PU | |
| | | Pemasangan Talud Desa Mentigi | Desa Mentigi - Belitung | Dinas PU | |
| | | | | Dinas PU | |
| 4 | Perumahan Rakyat | | | | |
| | | Pembangunan Rumah Layak Huni | Bangka | Dinas PU | |
| | | Bedah Rumah Program Satam Emas | Kec. Mentok - Bangka Barat | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Nadung | Kec. Payung - Bangka Selatan | Dinas PU | |
| | | Pembangunan Ruma Layak Huni | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas PU | |
| 5 | Penataan Ruang | | | | |
| 6 | Perencanaan Pembangunan | | | | |
| | | Usulan musrenbang desa tidak diakomodir | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Bappeda | |
| | | Pengembangan Program Pasca Tambang (Pemanfaatan Lahan eks. Tambang) | kec. Badau - Belitung | Bappeda | |
| | | Penyusunan Juknis Program Satam Emas | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Bappeda | |
| | | Penyusunan Kebijakan Pemerintah Provinsi Pasca Tambang | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Bappeda | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7 | Perhubungan | | | | |
| | | Penertiban Lahan Parkir Pasar Pagi | Kel. Asam - Pangkalpinang | Dinas Perhubungan | |
| | | Pembangunan *Traffic light* di Simpang Empat Desa Puding Besar | Kec. Puding Besar - Bangka | Dinas Perhubungan | |
| | | Pemasangan Lampu Navigasi di Pelabuhan Mentigi | Desa Mentigi - Belitung | Dinas Perhubungan | |
| 8 | Lingkungan Hidup | | | | |
| | | Pencemaran limbah pabrik PT. GPL | Desa Simpang Ibul - Bangka | BLHD | |
| 9 | Pertanahan | | | | |
| 10 | Kependudukan Dan Catatan Sipil | | | | |
| | | Pengadaan e-KTP | Desa Air Mesu - Bateng | Biro Pemerintahan | |
| 11 | Pemberdayaan Perempuan | | | | |
| | | Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan | Desa Sungai Selan - Bateng | BP3AKB | |
| | | Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan | Desa Tanjung Gunung - Bateng | BP3AKB | |
| | | Penyediaan Lapangan Pekerjaan untuk Kaum Perempuan | Desa Batu Belubang - Bateng | BP3AKB | |
| 12 | Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13 | Sosial | | | | |
| | 1 | Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan Narkoba | Kec. Gerunggang-Pangkalpinang | BNN Provinsi | |
| | | Bantuan Gas LPG 3 Kg | Kel Bukit Merapin - Pangkalpinang | Distamben | |
| | | Sosialisasi BPJS | Kel. Asam - Pangkalpinang | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Peningkatan kegiatan majelis taklim, TPA, Masjid, Pondok Pesantren | Kel. Asam - Pangkalpinang | Dinas Sosial | Koordinasi dg Biro Kesra |
| | | Peningkatan kesejahteraan ustad dan ustazah | Kel. Asam - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Peningkatan Kegiatan PKK | kec. Bukit Intan | BP3A KB | |
| | | Peningkatan kegiatan majelis taklim, TPA, Masjid, Pondok Pesantren | Kel. Aer Itam - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Pagar di Pekuburan Ampui | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Pembangunan Pagar Pekuburan Gabek | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Masjid di Jalan Jerambah Gantung | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Penyediaan lahan pemakaman umum | Kel. Selindung Baru - Pangkalpinang | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Pagar Kuburan | Desa Sungai Selan -Bateng | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Masjid At-Taqwa Air Mesu | Desa Air Mesu - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Gedung TPA | Desa Tanjung Gunung - Bateng | Biro Kesra | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Bantuan Santunan Bagi Lansia | Desa Tanjung Gunung - Bateng | Dinas Sosial | |
| | | Bantuan Santunan Bagi Lansia | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas Sosial | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Sarang Mandi - Bateng | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Lubuk Besar - Bateng | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Peningkatan kesejahteraan ustad dan ustazah | Desa Cambai - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pengadaan Mobil Jenazah | Desa Cambai - Bateng | Dinas Kesehatan | |
| | | Peningkatan kesejahteraan ustad dan ustazah | Desa Lampur - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Dukungan Pelaksanaan MTQ 2016 | Ponpes Nurul Falah Air Mesu Timur | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Iuran BPJS para guru swasta dan honorer | Ponpes Nurul Falah Air Mesu Timur | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Dukungan dana abadi untuk pengembangan komoditas pertanian | Ponpes Nurul Falah Air Mesu Timur | Biro Kesra | |
| | | Hibah Pembangunan Masjid sudah masuk ke rekening panitia tidak bisa dicairkan | Desa Bakam - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Bakam - Bangka | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Pemberian Tambahan Insentif Guru TPA dan Madrasah | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Hibah Pembangunan Masjid Desa Neknang | Desa Neknang - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Peningkatan insentif guru TPA | Desa Neknang - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR bagi masyarakat | Desa Neknang - Bangka | UMKM | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Neknang - Bangka | Dinkes | Koordinasi dg |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | BPJS |
| | | Dana Hibah Pembangunan Masjid Desa Kota Kapur Tahun 2014 belum bisa cair | Desa Kota Kapur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Madrasah Kota Kapur | Desa Kota Kapur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi TPA Kota Kapur | Desa Kota Kapur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Tambahan Insentif Guru TPA Kota Kapur | Desa Kota Kapur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Perayaan 1 Muharram di Desa Kenanga | Desa Kenanga - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Rehabiliitasi Balai Adat di Kelurahan Kenanga | Desa Kenanga - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Kec. Riau Silip - Bangka | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Optimalisasi Pemanfaatan Dana CSR PT. THEP bagi masyarakat | Kec. Riau Silip - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Proses Pemberian Hibah dan Bansos untuk kebutuhan Masjid dan Keramaian Desa dipermudah | Kec. Riau Silip - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Masjid Desa Limbung (WC, Atap, dan Sumur Bor) | Desa Limbung - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Penambahan Ruang Kelas TPA Desa Limbung | Desa Limbung - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Masjid Desa Payabenua | Desa Payabenua - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Proses Pemberian Hibah dan Bansos untuk kebutuhan Masjid dan Keramaian Desa dipermudah | Kec. Belinyu - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Masjid Al Ikhlas Desa Pangkalniur | Desa Pangkalniur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Dana Hibah Pembangunan Masjid Desa Kota Kapur Tahun 2014 belum bisa cair | Kec. Mendo Barat - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Dana hibah yang sudah ditransfer untuk Bantuan Masjid dan Pagar Perkuburan di tarik kembali oleh Biro Kesra | Desa Kelubi dan Tanjung Niur - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Bantuan kendaraan roda 3 | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Pemberian Tambahan Insentif Guru TPA dan Madrasah | Desa Mislak - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Pemberian Insentif Pengurus Masjid | Desa Mislak - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Belar - Bangka Barat | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Optimalisasi pemanfaatan dana CSR PT. BPL | Desa Ibul - Bangka Barat | | |
| | | Sosialisasi BPJS | Desa Kayu Arang - Bangka Barat | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Bantuan kegiatan majelis ta'lim | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Dana hibah yang sudah ditransfer untuk Bantuan Masjid di tarik kembali oleh Biro Kesra | Desa Tanjung Niur - Bangka Barat | Biro Kesra | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Penyederhaan Pengajuan Proposal Hibah/Bansos | Desa Tanjung Niur - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Rehab Masjid Baiturrahman Desa Nadung | Desa Nadung - Bangka Selatan | Biro Kesra | |
| | | Sosialisasi BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar | Kec. Pulau Besar - Bangka Selatan | Dinkes | Koordinasi dg BPJS |
| | | Rehabilitasi masjid Nurul Hikmah Desa Keciput | Kec. Sijuk - Belitung | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Masjid Di Desa Mentigi | Desa Mentigi - Belitung | Biro Kesra | |
| 14 | Tenaga Kerja | | | | |
| | | Standar UMK Rp. 2.200.000 berdampak pada upaya PHK oleh Pihak Perusahaan | Desa Simpang Ibul - Bangka | Disnakertrans | |
| | | Sosialisasi Tenaga Kerja oleh Perusahaan | Desa Simpang Ibul - Bangka | Disnakertrans | |
| | | Tinjau ulang rencana PHK besar-besaran oleh PT. GPL | Desa Simpang Ibul - Bangka | Disnakertrans | |
| | | Bantuan Hukum tentang kejelasan status pegawai kontrak dengan masa kerja diatas 20 tahun | Desa Belar - Bangka Barat | Disnakertrans | |
| | | Penciptaan lapangan kerja | Kelurahan Tanjung - Bangka Barat | Disnakertrans | |
| 15 | Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah | | | | |
| | | Pengembangan akses permodalan | Desa Bakam - Bangka | Dinas KUMKM | |
| | | Tambahan Modal Usaha | Parit Pekir Sungailiat - Bangka | Dinas KUMKM | |
| | | Bantuan Modal Bagi UMKM | Kec. Mentok - Bangka Barat | Dinas KUMKM | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Bantuan Modal Bagi UMKM (Pandai Besi) | Kec. Badau - Belitung | Dinas KUMKM | |
| 16 | Penanaman Modal | | | | |
| 17 | Kebudayaan | | | | |
| | | Bantuan Pembangunan Studio Band | Desa Lubuk Besar - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Rebbana | Desa Lubuk Besar - Bateng | Biro Kesra | |
| 18 | Pemuda Dan Olah Raga | | | | |
| | | Optimalisasi Kegiatan Kepemudaan | Kec. Bukit Intan | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Lapangan Sepak Bola | Desa Sungai Selan - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Lapangan Sepak Bola | Desa Air Mesu - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Lapangan Sepak Bola | Desa Tanjung Gunung -Bateng | Biro Kesra | |
| | | Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola | Desa Sarang Mandi -Bateng | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Tiang Bola, Bola, dan Kostum Bola | Desa Sarang Mandi -Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Kolam Renang | Desa Lampur - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Lapangan futsal | Ponpes Nurul Falah Air Mesu - Bateng | Biro Kesra | |
| | | Pengembangan Lapangan Bola Kaki | Desa Kota Kapur - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Bantuan dana untuk olah raga Desa Bencah | Desa Bencah - Bangka Selatan | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Fasilitas Olahraga (Lahan tersedia 5 Ha) | Desa Badau - Belitung | Biro Kesra | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pemuda dan Olah Raga | Kec. Sijuk - Belitung | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pemuda dan Olah Raga | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Biro Kesra | |
| | | Pembangunan Lapangan Volly | Desa Terong - Belitung | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Seragam Olahraga dan Perlengkapan alat olah raga | Desa Terong - Belitung | Biro Kesra | |
| | | Pemasangan Fasilitas Penerangan di Lapangan Volly | Desa Terong - Belitung | Biro Kesra | |
| 19 | Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri | | | | |
| | | Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Berjudi, Minum-minuman keras) | Desa Neknang - Bangka | Kesbanglinmas | |
| 20 | Pemerintahan Umum | | | | |
| | | Optimalisasi pemanfaatan dana CSR PT. Wali Tampas | Desa Perlang - Bateng | Biro Ekonomi | |
| | | Pembentukan unit pelayanan Perbankan | Desa Bakam - Bangka | Biro Ekonomi | |
| | | Dana Hibah Provinsi TA 2014 tidak bisa dicairkan dan tidak bisa dipergunakan | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Biro Kesra | |
| | | Pemekaran Kabupaten Bangka Utara | Kec. Belinyu - Bangka | Biro Pemerintahan | |
| | | Peningkatan kunjungan anggota DPRD Provinsi ke Desa-desa | Kec. Mendo Barat - Bangka | Sekwan | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Kurangnya Dana Bantuan dari Pemerintah | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Pengajuan proposal bantuan tidak sesuai dengan realisasi | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Biro Kesra | |
| | | Bantuan Serifikasi Tanah | Desa Air Belo - Bangka Barat | Biro Pemerintahan | |
| | | Penyusunan Perda tentang Perizinan | Desa Mislak - Bangka Barat | Biro Hukum | |
| | | Peningkatan gedung serbaguna Kec. Simpang Rimba | Kec. Simpang Rimba - Bangka Barat | Biro Pemerintahan | |
| | | Pencairan dana hibah pada awal tahun | Kec. Payung - Bangka Selatan | Biro Kesra | |
| | | Pemasangan Tapal Batas Desa | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Biro Pemerintahan | |
| | | Penyelesaian Batas Wilayah Bangka Selatan dan Bangka Tengah | Kec. Payung - Bangka Selatan | Biro Pemerintahan | |
| | | Karyawan BUMD belum dapat honor | Kec. Toboali - Bangka Selatan | Biro Ekonomi | |
| | | Penyelesaian Batas Wilayah Bangka Selatan dan Bangka Tengah | Kec. Air Gegas - Bangka Selatan | Biro Pemerintahan | |
| | | Bantuan Kendaraan Roda 2 dan 4 ke TNI AD dalam mendukung Ketahanan Pangan | Kec. Sijuk - Belitung | Biro Umum | |
| | | Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Belitung dan Belitung Timur | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Biro Pemerintahan | |
| | | Penyusunan Perda tentang Bantuan Hukum | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Biro Hukum | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 21 | Kepegawaian | | | | |
| | 1 | Transparansi dalam penerimaan PNS, THL, PHT | Kec. Gerunggang-Pangkalpinang | BKD | |
| 22 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa | | | | |
| | | Optimalisasi penyaluran raskin | Kec. Bukit Intan | BPMPD | |
| | | Peningkatan Kualitas Beras Raskin | Kel. Selindung Baru - Pangkalpinang | BPMPD | |
| | | Pengadaan Mobil Khusus Desa | Desa Tanjung Gunung - Bateng | BPMPD | |
| | | Peningkatan Honor Perangkat Desa | Kec. Bukit Intan | BPMPD | |
| | | Pembangunan Balai Desa | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | BPMPD | |
| | | Peningkatan Honor Perangkat Desa | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | BPMPD | |
| | | Usulan Program 1 milyar 1 Desa | Desa Kurau Barat - Bateng | BPMPD | |
| | | Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa | Desa Payabenua - Bangka | BPMPD | |
| | | Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa | Desa Pangkalniur - Bangka | BPMPD | |
| | | Dana Desa 1,4 M belum ada kejelasan | Desa Kayu Arang - Bangka Barat | BPMPD | |
| | | Penertiban Pengelolaan Dana Perangkat Desa | Desa Kayu Arang - Bangka Barat | BPMPD | |
| | | Program PNPM Mandiri dapat dilanjutkan | Kec. Toboali - Bangka Selatan | BPMPD | |
| | | Up dating data penerima Raskin | Kec. Toboali - Bangka Selatan | BPMPD | |
| | | Pendataan Masyarakat Miskin sampai ke tingkat Desa | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | BPMPD | |
| 23 | Statistik | | | | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 24 | Arsip Dan | | | | |
| 25 | Komunikasi Dan Informatika. | | | | |
| | | Minimnya informasi bantuan dari pemerintah | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dinas Kominfo | |
| | | Minimnya informasi bantuan dari pemerintah | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas Kominfo | |
| | | Pembangunan Tower Seluler | Kec. Pulau Besar -Bangka Selatan | Dinas Kominfo | |
| **B.** | **URUSAN PILIHAN** | | | | |
| 1 | Pertanian | | | | |
| | | Penyediaan Bibit Sahang | Desa Sungai Selan - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Sahang (polibag) | Desa Air Mesu - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Sawit, Karet, Gaharu, Cabe, dll | Desa Sarang mandi - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Pertanian | Desa Kurau Barat - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Pertanian | Desa Lubuk Besar - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Penyediaan mesin sit karet | Desa Cambai - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Karet dan Lada (Polibag) | Desa Cambai - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengembangan Sektor Pertanian dan Perkebunan | Desa Lampur - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Peningkatan kesejahteraan para petani | Desa Sungkap - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Optimalisasi pengadaan bibit dan pupuk pertanian | Desa Sungkap - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Penyediaan bibit singkong kasesa (Ubi Tapioka) | Desa Sungkap - Bateng | Dispertanbunnak | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pengadaan bibit karet dan lada berkualitas | Desa Sungkap - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan bibit pasca banjir | Desa Perlang - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan bibit karet dan lada berkualitas | Desa Perlang - Bateng | Dispertanbunnak | |
| | | Penyelesaian sengketa perdata PT. THEP dengan Masyarakat | Desa Bakam - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Penambahan kuota pupuk subsidi | Desa Kota Kapur - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Karet bersertifikasi | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Revilitasi Sawah Puding Besar | Kec. Puding Besar - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Pembangunan Irigasi / Cetak Sawah Desa Pangkalniur | Desa Pangkalniur - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Karet dan Lada Unggul | Desa Pangkalniur - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Karet Unggul | Kec. Mendo Barat -Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Pembersihan saluran irigasi | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Pembangunan Jalan Usaha Tani ke lokasi Persawahan | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Peningkatan kuota pupuk subsidi | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Turunnya harga karet | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | PT. BPL tidak bersedia membeli TBS Kelapa Sawit Rakyat | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Perbaikan jaringan irigasi | Desa Simpang Ibul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Bantuan Bibit Karet | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Bantuan Bibit Karet | Desa Mancung, Desa Simpang Yul - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Bantuan Mesin Pompa Air | Kelurahan Tanjung - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Bantuan Bibit Karet | Kelurahan Tanjung - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Bantuan Bibit Sapi | Kelurahan Tanjung - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Karet, Lada, Kelapa Sawit | Kec. Kelapa - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Percetakan Sawah di Kec. Kelapa (Irigasi, JUT, Jembatan) | Kec. Kelapa - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Fasilitasi Alih Fungsi Lahan untuk Lahan Sawah | Kec. Kelapa - Bangka | Dispertanbunnak | |
| | | Bantuan Bibit Lada di Desa Nadung | Desa Nadung - Bangka Selatan | Dispertanbunnak | |
| | | Optimalisasi Irigasi Di Desa Rias | Desa Rias - Bangka Barat | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan Bibit Pertanian | Kec. Air Gegas - Bangka Selatan | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan/Perikanan | Kec. Air Gegas - Bangka Selatan | Dispertanbunnak | |
| | | Pengembangan Industri Hilir sektor Pertanian dan Perikanan | Kec. Badau - Belitung | Dispertanbunnak | |
| | | Optimalisasi Irigasi Sawah di Desa Sungai Samak | Kec. Badau - Belitung | Dispertanbunnak | |
| | | Penyusunan SID Cetak Sawah Desa Keciput | Desa Keciput - Belitung | Dispertanbunnak | |
| | | Penyelesaian HGU PT. Rebinmas Jaya yang masuk ke areal Sawah di Desa Simpang Tiga | Desa Simpang Tiga - Beltim | Dispertanbunnak | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Sosialisasi Standar Pupuk Subsidi dan Non Subsidi | Desa Simpang Tiga - Beltim | Dispertanbunnak | |
| | | Pembangunan Irigasi di Desa Lintang | Desa Simpang Tiga - Beltim | Dispertanbunnak | |
| | | Optimalisasi Irigasi Desa Jangkang | Desa Jangkang - Beltim | Dispertanbunnak | |
| | | Pengadaan bibit sawit tahun 2009 kurang bagus dan tidak berbuah | Desa Mentigi - Belitng | Dispertanbunnak | |
| 2 | Kehutanan | | | | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Sungai Selan - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Sarang Mandi - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Lubuk Besar - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Dusun Parit III Kel. Sungai Selan | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Lampur - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Menolak Pembangunan HTI | Desa Sungkap - Bateng | Dinas Kehutanan | |
| | | Fasilitasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Tambatan Perahu | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas Kehutanan | |
| | | Identifikasi masyarakat yang melakukan aktivitasi di Kawasan Hutan Produksi | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemasangan Tapal Batas Kawasan Hutan | Kec. Badau - Belitung | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyelesaian Pemukiman Masyarakat yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL) | Kec. Badau - Belitung | Dinas Kehutanan | |
| | | Fasilitasi Memperoleh Hutan Desa | Kec. Simpang Reggiang - Beltim | Dinas Kehutanan | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Adanya Keresahan Masyarakat tentang adanya HTI | Kec. Simpang Reggiang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Inspeksi Mendadak oleh Polisi Kehutanan Provinsi dianggap meresahkan masyarakat di Desa Lintang | Desa Lintang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Adanya Keresahan Masyarakat tentang adanya HTI | Desa Lintang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Pemasangan Tapal Batas Kawasan Hutan Lindung Pantai | Kec. Dendang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Mengusulkan Kawasan Hutan Rakyat | Kec. Dendang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Permohonan Mempersempit Hutan Lindung Pantai untuk Pengembangan Pelabuhan di Desa Dendang | Kec. Dendang - Beltim | Dinas Kehutanan | |
| | | Penyelesaian Pemukiman Masyarakat yang masuk Kawasan Hutan Lindung (HL) | Dusun Kurak Desa Mentigi - Belitung | Dinas Kehutanan | |
| 3 | Energi Dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| | | Pembangunan Line Listrik | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas Tamben | |
| | | Kaji ulang rencana Pemangkasan Bukit Tunggal | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas Tamben | |
| | | Pengadaan Genset | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas Tamben | |
| | | Penyediaan Jaringan Listrik menuju Tapak Antu | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas Tamben | |
| | | Pengadaan Mesin Air | Desa Kurau Barat - Bateng | Dinas Tamben | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Penyediaan Air Bersih | Dusun Parit III Kel. Sungai Selan | Dinas Tamben | |
| | | Kaji ulang rencana Pemangkasan Bukit Tunggal | Desa Cambai - Bateng | Dinas Tamben | |
| | | Penyediaan Air Bersih | Ponpes Nurul Falah Air Mesu | Dinas Tamben | |
| | | Inspeksi terhadap aktivitas PT. Wali Tampas | Desa Perlang - Bateng | Dinas Tamben | |
| | | Penerangan lampu jalan desa | Desa Bakam - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penyediaan jaringan listrik ke madrasah Desa Mabat | Desa Mabat - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Pembangunan Penerangan/Lampu Jalan | Kelurahan Sungailiat - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Pembangunan Penerangan/Lampu Jalan | Desa Neknang - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penertiban Aktivitas Pertambangan di Alur Sungai Jelitik | Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penerangan lampu jalan desa | Desa Kota Kapur - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penerangan lampu jalan desa | Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Pemasangan Listrik Masih dikenakan biaya | Kec. Riau Silip - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penertiban Tambang Ilegal (TI) | Kec. Puding Besar - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Peningkatan Kapasitas Aliran Listrik (Sering terjadi pemadaman listrik) | Kec. Belinyu - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Pembangunan Lampu Jalan | Kec. Belinyu - Bangka | Dinas Tamben | |
| | | Penertiban aktivitas pertambangan di Kec. Tempilang | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas Tamben | |
| | | Reklamasi Eks. Tambang PT. Kobatin di Desa Malih | Desa Malih - Bangka Selatan | Dinas Tamben | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pemasangan Batas IUP PT. Timah Tbk di Desa Cerucuk | Desa Badau - Belitung | Dinas Tamben | |
| | | Tidak beroperasinya perubahan tambang batu besi karena tidak mampu membangun smelter | Kec. Simpang Renggiang - Beltim | Dinas Tamben | |
| | | Pembangunan Lampu Jalan Desa Lintang | Desa Lintang - Beltim | Dinas Tamben | |
| | | Pemasangan Aliran Listrik Lampu Jalan Desa Mentigi | Desa Mentigi - Belitung | Dinas Tamben | |
| 4 | Pariwisata | | | | |
| | | Pengembangan Objek Wisata Pemandian Air Panas Nyelanding | Desa Nyelading - Bangka Selatan | Disbudpar | |
| | | Pengembangan Destinasi Wisata Alam Bukit Meramun Desa Air Selumar | Kec. Sijuk - Belitung | Disbudpar | |
| | | Dukungan Festival Jerambah II | Sungai Padang - Belitung | Disbudpar | |
| 5 | Kelautan Dan Perikanan | | | | |
| | | Pengadaan Bibit Ikan Lele | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Alat Tangkap Ikan | Desa Tanjung Gunung -Bateng | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Armada Tangkap 10 GT dan Alat Tangkap | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas KP | |
| | | Peningkatan Lelang Ikan | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Alat Tangkap Ikan | Desa Kurau Barat - Bateng | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Armada Tangkap dan Alat Tangkap | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas KP | |
| | | Pengadaan mesin pelet ikan | Ponpes Nurul Falah Air Mesu | Dinas KP | |
| | | Pembuatan Tambak Ikan Lele | Ponpes Nurul Falah Air Mesu | Dinas KP | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pembentukan Polisi Masyarakat (POLMAS) Maritim | Bangka | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Alat Tangkap (Pancing dan Bubu) | Bangka | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Mesin Tempel dan Alat Tangkap | Desa Limbung - Bangka | Dinas KP | |
| | | Pengadaan Perahu Nelayan | Kec. Mendo Barat - Bangka | Dinas KP | |
| | | Penataan Zonasi Wilayah Laut | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas KP | |
| | | Rehabilitasi Pelabuhan Tambat Labu | Desa Tanjung Niur - Bangka Barat | Dinas KP | |
| | | Pengembangan Sektor Perikanan Desa Tepus | Desa Tepus - Bangka Selatan | Dinas KP | |
| | | Pembangunan Dermaga Tambatan Perahu | Desa Mentigi - Belitung | Dinas KP | |
| 6 | Perdagangan | | | | |
| | | Pembangunan Pasar Tradisional | Kec. Bukit Intan - Pangkalpinang | Dinas Perindag | |
| | | Pembangunan Pasar Tradisional | Kec. Pangkal Balam - Pangkalpinang | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Sarang Mandi - Bateng | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Cambai - Bateng | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Sungkap - Bateng | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Perlang - Bateng | Dinas Perindag | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Penyelesaian masalah alokasi petak pasar modern Sungailiat | Parit Pekir Sungailiat - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Terdapat pedagang lama yang tidak mendapatkan petak pasar | Parit Pekir Sungailiat - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Petak pasar modern dimiliki oleh pihak yang bukan pedagang di pasar tersebut, sedangkan pedagang pasar menyewa dari pihak bukan pedagang pasar | Parit Pekir Sungailiat - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Dukungan Pembentukan Asosiasi Pedagang Kecil Bangka | Parit Pekir Sungailiat - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Kota Kapur - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Kec. Riau Silip - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Jade Barin - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Zed - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Payabenua - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Pangkalniur - Bangka | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Kec. Tempilang - Bangka Barat | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Desa Mislak - Bangka Barat | Dinas Perindag | |
| | | Kebijakan pengendalian Harga Karet Rakyat | Kec. Kelapa - Bangka Barat | Dinas Perindag | |

| No | Urusan | Program/Kegiatan | Lokasi | SKPD terkait | Validasi/ Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7 | Perindustrian Dan | | | | |
| | | Pengembangan Home Industri | Desa Air Mesu - Bateng | Dinas Perindag | |
| | | Penyediaan Bantuan alat/mesin pengolahan hasil perikanan | Desa Batu Belubang - Bateng | Dinas Perindag | |
| 8 | Transmigrasi. | | | | |

## 2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor:*15*/PRT/M/*2009* Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, telah dituangkan dan ditetapkan melalui perda no 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang no 26 Tahun 2007, PeraturanMenteri PU Nomor:16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri PU Nomor:17/PRT/M/2009Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana TataRuang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh Kabupaten / Kota dalam menyusunRencana Tata Ruang Wilayahnya. Namun demikian, sampai dengan saat ini masih terdapat 3 (tiga) kabupaten yang belum menetapkan Ranperda RTRW yaitu, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan evaluasi Tim BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menjado kendala dari belum ditetapkannya Ranperda RTRW 3 (tiga) kabupaten tersebut adalah masih belum selesainya pembahasan Ranperda RTRW di DPRD Kabupaten masing-masing, Pada tahun 2014, ditargetkan ketiga kabupaten tersebut dapat menetapkan Perda RTRW Kabupaten masing-masing, sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan didaerah.

## 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memperhatikan permasalahan seperti yang disajikan pada Tabel II.61, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya disajikan sebagai berikut.

### A. Urusan Wajib

1. Pendidikan

   Permasalahan di bidang pendidikan diantaranya adalah rata-rata lama sekolah yang masih berada dibawah rata-rata lama sekolah Nasional, masih tingginya angka putus sekolah, masih tingginya disparitas mutu pendidikan dan masih rendahnya angka melanjutkan ke perguruan tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan akses pendidikan di semua kawasan, untuk semua umur dan semua golongan ekonomi. Selain itu juga meningkatkan peran orangtua dan masyarakat dalam dunia pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan di desa dan kota, meningkatkan akses pendidikan ke perguruan tinggi, serta mandorong masyarakat yang sudah masuk usia kerja yang belum menamatkan sekolah SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat untuk menapatkan program Paket A, Paket B dan paket C.

2. Kesehatan

   Permasalahan di bidang kesehatan diantaranya adalah angka harapan hidup masih dibawah rata-rata nasional, tingginya angka kematian bayi, masih terjadimya kasus gizi buruk dan rendahnya rasio dokter terhadap jumlah penduduk, serta tingginya tingkat penderita penyakit tidak menular. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kesadaran akan kesehatan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup menjadi 70 tahun sesuai dengan angka harapan hidup nasional,

peningkatan kesehatan ibu dan bayi, peningkatan pemahaman tentang pangan dan gizi, dan penambahan jumlah dokter khususnya dokter spesialis di rumah sakit dan Puskesmas serta memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pola hidup dan pola konsumsi yang sehat untuk pencegahan terhadap penyakit tidak menular.

3. Pekerjaan Umum dan Perumahan

   Permasalahan pekerjaan umum diantaranya penanganan dan peningkatan persentase ruas jalan nasional belum maksimal, masih adanya rumah belum layak huni dan belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan irigasi. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengembangan/ peningkatan jalan nasional secara rutin (1 tahun sekali) atau dalam kondisi tertentu dan pemeliharaan secara berkala (5 tahun sekali) terutama pada ruas jalan dalam kondisi rusak, meningkatkan jumlah pembangunan rumah sederhana dan meningkatkan rasio jaringan irigasi yang selama ini terpusat di Bangka Selatan.

4. Penataan Ruang

   Permasalahan dalam penataan ruang disebabkan karena RTRW belum dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di aerah dan belum adanya SOP pengendalian pemanfaatan ruang, strategi RTRW sebagai dokumen perencanaan spasial harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

5. Perencanaan Pembangunan

   Permasalahan perencanaan pembangunan yang masih terjadi yaitu tingkat keselarasan dan keserasian antar dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota masih rendah. Serta belum optimalnya keterpaduan rencana pembangunan antarsektor dan antarwilayah. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi proses perencanaan, sehingga tingkat keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antarwilayah, antarsektor dan antarpemangku kepentingan semakin meningkat.

6. Perhubungan

   Permasalahan di bidang perhubungan diantaranya yaitu rendahnya jumlah penumpang darat yang terlayani oleh angkutan umum, belum tersedianya transportasi laut antarpulau-pulau kecil, yang memiliki standar keselamatan serta belum tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang berstandar internasional. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui pendataan terhadap jumlah penumpang angkutan darat, penyediaan dan peningkatan trasnsportasi antar pulau yang memenuhi standar keselamatan laut serta melalui percepatan pembangunan pelabuhan kelas dunia, terutama dengan meminta peran yang besar dari pihak PT. Pelindo dan Kementrian Perhubungan sesuai dengan kewenangannya.

7. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

   Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diantaranya rendahnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya frekuensi terjadinya bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perbaikan kualtas lingkungan hidup, peningkatan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat terhadap bencana yang terjadi, baik bencana alam maupun bencana sosial, pembangunan ekonomi ibukota provinsi yang didasarkan pada green ekonomi sebagai asset ekonomi di kota Pangkalpinang.

8. Pertanahan

   Permasalahan pertanahan diantaranya masih ada lahan pemerintah yang terbengkalai, sering terjadi sengketa kepemilikan lahan, sulitnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan serta tingginya biaya sertifikasi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pengelolaan dan pengamanan lahan milik pemerintah, mediasi penyelesaian sengketa lahan, kerjasama pengadaan lahan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), subsidi pembuatan sertifikasi tanah bagi masyarakat yang kurang mampu.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

   Permasalahan kependudukan yaitu tingginya laju migrasi penduduk dari luar daerah, masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akte kelahiran termasuk yang belum memiliki e-KTP serta kualitas manusia yang sangat di pengaruhi oleh rata-rata lama sekolah masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendataan penduduk dari luar daerah, penciptaan lapangan pekerjaan baru, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akte kelahiran termasuk e-KTP, i serta mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah bagi seluruh jenjang umur masyarakat.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya yaitu rendahnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang masih berada di bawah rata-rata nasional, masih adanya perdagangan manusia (*trafficking*), mempekerjakan anak dibawah umur dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dapat dilakukan yaitu penerapan perencanaan yang responsif gender, pemberdayaan terhadap perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan traficking, peningkatan pengawasan di tempat-tempat hiburan, meningkatkan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di semua wilayah (wajib belajar 12 tahun)).

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

    Permasalahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diantaranya adalah rendahnya persentase penduduk ber-KB dan tingginya angka kelahiran, kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi, masih rendahnya masyarakat yang menggunaka metode kontrasepi jangka panjang (MKJP) serta peran serta laki-laki ber KB. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui program Dua Anak Lebih Baik, peningkatan persentase pencapaian target peserta ber-KB, dan peningkatan kesehatan ibu dan bayi, menjamin ketersedian alat kontrasepsi, mendorong masyarakat untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta meningkatkan laki-laki untuk ber KB melalui peningkatan pelaksanaan KIE.

12. Sosial

    Permasalahan sosial yang dihadapi yaitu masih tingginya persentase penduduk miskin di perdesaan, meningkatnya masyarakat pra sejahtera dan ti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak balita terlantar, anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, lanjut usa terlantar, penyadang disabilitas, tuna susila. Bekas warga binaan lembaga permasyarakatn, orang dengan HIV/AIDS, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, dan fakir miskin Upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan lapangan pekerjaan di perdesaan yang langsung menyasar masyarakat miskin

dipedesaan, meningkatkan pelaksaanaan penanggulangan kemiskinan di desa dan di kota, peningkatan pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan program jaminan sosial bagi para PMKS, serta peningkatan pembinaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di masyarakat.

13. Ketenagakerjaan

    Permasalahan ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan produktifitas dalam menghadapi *ASEAN Economic Communty*, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya tingkat ketergantungan lapangan kerja pada sektor pertambangan, serta masih kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang sifatnya sektor produksi komoditas untuk konsumsi rumah tangga sehari-hari dan untuk diekspor keluar dengan produksi skala rumah tangga. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasaahan ini yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja dalam rangka menciptakan tenaga kerja terampil, meningkatkan peluang investasi, meningkatkan fokus pada investasi yang padat karya serta mempersiapkan sektor selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung, serta mendorong peningkatan pelaksanaan pelatihan wirausaha berbasis komoditas konsumsi rumah tangga untuk pencipataan lapangan kerja baru bagi masyarakat

14. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

    Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu rendahnya persentase KUMKM produktif, minimnya koperasi di pedesaan, belum optimalnya pemanfaatan alokasi program CSR untuk UMKM, minimnya persentase penyerapan kredit UMKM, serta masih terbatasnya UMKM yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui pembentukan dan bantuan KUMKM, pembentukan dan peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi di perdesaan, pengembangan dan pembentukan koperasi komoditi, peningkatan kepedulian perusahaan untuk membantu UMKM terutama para petani dan nelayan, peningkatan target kuantitas dan kualitas kredit bagi UMKM, peningkatan target dan pencapaian kredit produktif non konsumtif, serta menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan.

15. Penanaman Modal

    Permasalahan penanaman modal diantaranya yaitu minimnya informasi mengenai potensi unggulan daerah yang dilihat secara komprehensif, masih rendahnya tingkat kesadaran SKPD Teknis Lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyerahkan proses perizinan kepada BP2TPM sehingga pelayanan terpadu satu pintu belum optimal. Untuk mengatasi hai ini, maka diperlukan kajian secara komprehensif terhadap potensi investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka diharapkan agar SKPD teknis dapat menyerahkan kewenangan perizinan kepada BP2TPM.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu masih terbatasnya jumlah kebudayaan yang mendapatkan legalitas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan hak paten, belum terintegrasinya pengembangan kebudayaan yang masih dilakukan secara parsial dan sendiri-sendiri, serta belum terpetanya kontribusi kebudaya di dalam pembangunan apakah sebagai pendukung pariwisata, sebagai pembentuk jati diri daerah atau hal lainnya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu melalui menginventarisasi jenis kebudayaan, hasil kerajinan tangan (hand craft) serta makanan dari Bangka Belitung yang dapat diajukan untuk memperoleh paten dan Haki, termasuk mendorong dosen-dosen dan tenaga peneliti untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipatenkan. Mensinergikan dengan mengkatkan koordinasi seluruh sektor yang mendukung pengembangan kebudayaan untuk mendukung sektor pariwisata, sebagai eksistensi jati diri daerah atau hal lainya.

17. Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan pemuda dan olah raga yaitu masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional dan internasional, belum optimalnya pelaksaanan pembibitan dan pembinan olah raga, belum produktifnya organisasi kepemudaan, minimnya penyelenggaraan turnamen tingkat daerah dan nasional sehingga upaya penelusuran atlet berbakat belum maksimal, serta masih sedikitnya wirausaha pemuda yang tercipta. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui pembangunan dan peningkatan sarana sarana olah raga, peningkatan peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan serta peningkatan even dan turnamen olah raga, peningkatan pembibitan dan pembinaan olah raga serta peningkatan pembentukan wirausaha pemuda.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan yang ada di urusan ini yaitu terjadinya peningkatan angka kriminalitas dan demonstrasi serta rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilukada. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan hukum dan sosial serta meningkatkan koordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk dengan seluruh komponen masyarakat lainnya. Kemudian dapat juga dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian.

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ini yaitu belum tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP), belum selarasnya disain organisasi dalam mendukung kinerja RPJMD, rendahnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, masih belum efektifnya pola penempatan pejabat struktural. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi perencanaan, penggunaan dan pelaporan keuangan, menindaklanjuti temuan BPK serta mendorong implementasi Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) dalam mendukung *Good Governance and Clean Government,* melakukan evaluasi dan kajian terhadap kebijakan disain organisasi yang diarahkan kepada pencapaian kinerja RPJMD, menyusun rencana aksi dalam upaya melakukan intesifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan, melakukan analisa secara komprehensif terhadap kebijakan dan kebutuhan akan penempatan pejabat struktural dan pegawai.

20. Ketahanan Pangan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, tingginya konsumsi beras, tingginya tingkat ketergantungan pangan dan peredaran bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, peningkatan dan pengembangan profesionalitas penyuluh, penganekaragaman pangan, memperlancar distribusi bahan pangan, pemantauan peredaran bahan makanan.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan yang dihadapi diantaranya, masih adanya desa tertinggal yang harus dientaskan, lemahnya pengelolaan administrasi pemerintah desa, belum adanya rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), terbatasnya kompetensi aparatur pemerintah desa, minimnya sarana prasarana pendukung di pedesaan serta masih sedikitnya BUMdes dan pasar desa yang ada disetiap desa. Strategi yang dapat dilakukan melalui mendorong pembangunan disemua desa tertinggal, meningkatkan pembentukan BUMdes untuk setiap desa, peningkatan pembangunan pasar desa disetiap desa, peningkatan tata kelola pemerintah desa, pendampingan penyusunan RPJMDes, peningkatan kompetensi aparatur desa serta penyediaan sarana prasarana yang memadai di pedesaan untuk mengkatkan setatus desa menjadi desa mandiri.

22. Statistik

Permasalahan statistik yaitu, belum terpadunya pengelolaan data dan informasi daerah, belum tersedianya pusat data dan informasi, masih ada perbedaan data yang disajikan oleh penyedia data serta kurang tersedianya database di masing-masing SKPD secara time series. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembentukan pusat data dan informasi daerah secara terpadu serta pembentuk forum data.

23. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama dibidang komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah belum optimalnya keterpaduan aplikasi-aplikasi sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing SKPD, belum memiliki sistem integrasi WAN/LAN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan/antar kabupaten/kota, terbatasnya area hotspot internet gratis dalam menunjang penyebarluasan informasi dan internet sehat.

## B. Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar petani, produksi komoditi pertanian masih rendah serta rendahnya industri pengolahan hasil. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk pertanian, stabilisasi harga hasil pertanian, percepatan peningkatan produksi dan produktifitas padi, serta penetapan arah pengembangan pertanian berkelanjutan dan penerapan teknologi tepat guna dalam industri pengolahan hasil pertanian.

2. Kehutanan

   Permasalahan kehutanan diantaranya yaitu rendahnya persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi dan terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan kehutanan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui perlindungan dan perluasan tutupan hutan, perbaikan izin pertambangan timah yang memperhatikan ekosistem hutan, percepatan pemulihan lahan kritis dan lahan eks tambang serta melakukan rekrutmen tenaga polisi hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

   Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya rasio elektrifikasi, kapasitas pembangkit listrik masih rendah, kelangkaan bahan bakar terutama solar serta ketergantungan pada sektor pertambangan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui peningkatan kapasitas pembangkit, menyiapkan infrastruktur kelistrikan, peningkatan perawatan pembangkit listrik, penyelesaian pembangkit listrik yang sedang dibangun, mempersiapkan pembangkit-pembangkit listrik yang baru, memperlancar proses distribusi BBM dan mempersiapkan sektor lain selain tambang sebagai lokomotif perekonomian Bangka Belitung.

4. Pariwisata

   Permasalahan yang dihadapi yaitu belum terpadunya pengelolaan dan promosi pariwisata, belum optimalnya pemberdayaan budaya daerah sebagai komoditi wisata, belum tersedianya transportasi umum menuju objek wisata, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang sadar wisata serta tingginya biaya transportasi dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kalender wisata dan *travel pattern* secara terpadu, pemberdayaan budaya lokal, peningkatan dan penyediaan transportasi umum menuju objek wisata, peningkatan dan sosialisasi sadar wisata, serta melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan.

5. Kelautan dan Perikanan

   Permasalahan yang dihadapi yaitu rendahnya nilai tukar nelayan, serta rendahnya kontribusi sektor kelautan perikanan terhadap PDRB. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini yaitu melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi produk kelautan perikanan, percepatan peningkatan produksi dan produktifitas budidaya perikanan, stabilisasi harga hasil perikanan di pasar serta penetapan arah pengembangan perikanan berkelanjutan.

6. Perdagangan

   Permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan yaitu tingginya tingkat ketergantungan kebutuhan bahan pokok terhadap daerah lain dan ekonomi biaya tinggi. Upaya yang dapat dilakukan melalui pengembangan sentra-sentra produksi, memperlancar proses distribusi barang yang masuk ke Bangka Belitung.

7. Perindustrian

   Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kawasan industri dan industri hilir, minimnya produk hasil industri yang memenuhi standar. Upaya yang dapat dilakukan mempercepat pengembangan kawasan industri, pengembangan OVOP, pengembangan industri hilir, memperkuat kerja sama desa dan kota (*rural urban linkage*s) serta meningkatkan kualitas hasil industri.

8. Ketransmigrasian

Permasalahan ketransmigrasian yang dihadapi meliputi sulitnya mencari lahan transmigrasi baru, masyarakat setempat mendorong untuk kepesertaan transmigrasi yang baru diharapkan dari masyarakat lokal, belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat transmigrasi, sarana dan prasarana diwilayah transmigrasi yang masih kurang, serta belum terpadunya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang termasuk wilayah transmigrasi lainnya. Upaya yang dapat dilakuan melalui Memetakan untuk lahan transmigrasi baru, Memasukan kepesertaan transmigrasi dari masyarakat lokal, meningkatakan pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembangunan sarana dan prasarana dilokas transmigrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan antar tingkat pemerintahan guna percepatan pengembangan KTM.

### 2.5.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut beberapa permasalahan yang memiliki nilai prioritas bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya RPJMD 2012-2017, SDG's, SPM, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan.

#### 2.5.1.1 Peralihan *Millenium Development Goals* (MDGs) menuju *Sustainability Development Goals* (SDGs)

Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan telah dituangkan di dalam RAD MDGs Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 52 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dapat diketahui cara yang tepat untuk mencapai target MDG's yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program percepatan pencapaian target MDG's yang dilakukan.

Setelah pelaksanaan MDGs periode 2010-2015, saat ini sedang digagas agenda pasca MDGs yaitu *Sustainability Development Goals (SDGs)* yang ruang lingkupnya lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDGs untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) SDGs tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDGs yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDGs akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDGs akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi

pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep SDGs akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Agenda pasca MDGs 2015 akan diputuskan pada sidang umum PBB yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara pada Bulan September 2015.

### 2.5.1.2 Standar Pelayanan Minimal

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secr Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah. Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yg ditetapkan oleh Daerah, digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar, daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yg ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.

Walaupun secara umum target pencapaian SPM telah banyak berakhir pada tahun 2014, namun beberapa SPM yang masih tersisa tetap menjadi prioritas pembangunan tahun 2015 dan meskipun beberapa SPM telah melawati target waktu pencapaian namun indikator SPM tersebut tetap digunakan sebagai salah satu target kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun SPM yang menjadi kewenangan daerah yaitu sebagaimana tertuang dalam tabel II.66 di bawah ini.

**Tabel II.66**
Target Pelaksanaan SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| No | SPM | Jenis Pelayanan | Jumlah Indikator | Target Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Perumahan*) | 2 | 3 | 2025 |
| 2 | Pemdagri | 3 | 6 | 2011 |
| 3 | Sosial*) | 4 | 14 | 2015 |
| 4 | Kesehatan | 4 | 18 | 2015 |
| 5 | PP & PA*) | 5 | 8 | 2014 |
| 6 | Lingkungan Hidup*) | 7 | 7 | 2013 |
| 7 | KB & KS | 3 | 9 | 2014 |
| 8 | Ketenaga Kerjaan*) | 5 | 8 | 2016 |
| 9 | Pendidikan | 2 | 27 | 2014 |
| 10 | PU & PR | 8 | 23 | 2014 |
| 11 | Ketahanan Pangan*) | 4 | 7 | 2015 |

| No | SPM | Jenis Pelayanan | Jumlah Indikator | Target Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 12 | Kesenian*) | 2 | 7 | 2014 |
| 13 | Kominfo | 1 | 2 | 2014 |
| 14 | Perhubungan*) | 8 | 43 | 2014 |
| 15 | Penanaman Modal*) | 7 | 10 | 2014 |
| | **Jumlah** | **65** | **192** | |

### 2.5.1.3 Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK)di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah tetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). Kegiatan yang relevan yang mendukung pencapaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Penggunaan pupuk organic semaksimal mungkin;
2. Pengarahan kepada petani untuk membuka lahan pertanian tanpa di bakar;
3. Pelatihan PTT dan PHT;
4. Rehebililitasi hutan/reboisasi hutan (gerhan);
5. Gerakan penanaman sejuta pohon.

Pada tahun 2014 akan dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Reporting (MER), namun sampai saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu mekanisme MER yang akan digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

### 2.5.1.4 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Reformasi birokrasi adalah sebuah komitmen nasional untuk mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih dan melayani. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan reformasi sangatlah strategis. Salah satu peran peran konkrit pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi nasional adalah dengan turut menjadi pelaku reformasi tersebut.

Adapun tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pencapaian arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah yang telah disepakati bersama;

2. Terwujudnya model manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan menekankan pada efisiensi, efektivitas dan keadilan;
3. Terwujudnya sosok aparatur negara yang profesional, bersih dari praktek KKN, dan berintegritas tinggi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aparatur negara yang kompeten dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan tersentralisasi;
4. Tersedianya ruang bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima melalui perkonsultasian dan advokasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat dan bermanfaat;
5. Terselenggaranya Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima.

Berbagai persoalan yang dihadapi birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Secara kelembagaan masih ditemukan adanya tumpang tindih dalam tugas dan fungsi serta beban kerja yang belum terdistribusikan secara optimal, sehingga ditemukan adanya satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki beban berlebih, demikian juga sebaliknya. Tumpang tindih terjadi baik antar dinas ataupun antara dinas dengan lembaga teknik daerah lainnya.
b. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) masih belum mencerminkan terbentuknya aparatur yang professional. Pembenahan manajemen SDA menjadi tuntutan yang mutlak untuk mewujudkan birokrat yang kompeten.
c. Ketatalaksanaan masih belum didukung oleh sistem informasi yang berbasis kepada teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan. *Standard Operating Procedures* (SOP) yang sudah dirancang belum dilaksanakan secara optimal.
d. Sistem akuntabilitas dan pengawasan masih belum optimal. Hal ini dibuktikan penilaian akuntabilitas pengelolaan keuangan yang masih dalam kategori wajar dengan pengecualian (WDP) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang masih mendapat nilai “C”.
e. Pola pikir dan budaya kerja yang masih birokratis serta belum menumbuhkan budaya kerja yang inovatif.

Hasil penilaian (*assessment)* terhadap kondisi organisasi saat ini memunculkan 2 hal yang ingin dicapai yaitu pertama, dalam rangka mengidentifikasi berbagai permasalahan birokrasi yang memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi. Kedua, mengidentifikasi berbagai pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan.Untuk bisa melakukan diagnosis yang akurat terhadap problematika actual dan juga berbagai capaian yang sudah diraih maka sangat penting untuk melibatkan *stakeholders*yang berasal perwakilan SKPD terkait dalam *assessment yang* difokuskan pada area-area perubahan reformasi birokrasi.Berikut adalah hasil dari *Focus Group Discussion*(FGD) yang dilaksanakan bulan Juli-Desember 2012, melibatkan pimpinan dan staf dari SKPD provinsiKepulauan Bangka Belitung dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti alim ulama, tokoh kepemudaan, masyarakat pengusaha dan cendekiawan dari universitas-universitas di Bangka Belitung. Dalam FGD tersebut dibahas berbagai isu yang menyangkut persoalan-persoalan yang dihadapi oleh birokrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, rekomendasi dan saran-saran yang bisa diajukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi, serta postur ideal yang terbentuk lima tahun ke depan. Untuk mempertajam lingkup

birokrasi yang dibahas, maka pembahasan bertolak dari 8 (delapan) area perubahan yang telah ditetapkan dalam program reformasi birokrasi nasional, yakni:

1. Area Kelembagaan
2. Area Ketatalaksanaan
3. Area Perundang-undangan (kebijakan/regulasi)
4. Area Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Area Pengawasan
6. Area Akuntabilitas
7. Area Pelayanan Publik
8. Area Pola Pikir dan Budaya Kerja (*Mindset dan Cultureset*).

#### 2.5.1.5 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah merupakan suatu proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan, regulasi dan prioritas pembangunan melalui interaksi antar eksekutif, legislatif dan birokrasi dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi/bisnis".

Penentuan indeks tata kelola pemerintah mencakup pengukuran pada arena pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Pada pemerintahan meliputi fungsi-fungsi kerangka kebijakan, penganggaran, koordinasi pembangunan, dan pengawasan pembangunan. Pada arena birokrasi meliputi pengumpul pendapatan daerah, pelayanan publik, pengatur kegiatan ekonomi. Pada arena masyarakat sipil meliputi fungsi advokasi dan pemberdayaan. Pada arena masyarakat ekonomi meliputi fungsi upaya perlindungan kepentingan bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha. Pada masing-masing arena dan fungsi tersebut ada indikator partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas.

Hasil penelitian menunjukkan tata kelola pemerintahan tahun 2012 Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi ke 11 diantara 33 provinsi. Indeks yang diperoleh sebesar 5,95, diatas rata-rata nasional yaitu 5,67. Secara umum prinsip-prinsip tata kelola pemerintahanProvinsi Kepualuan Bangka Belitung sudah masuk kategori "CUKUP" diatas rata-ratanasional, dengan catatan sebagai berikut:

1. Diperlukan sarana partispasi publik untuk pelayanan publik yanglebih baik.
2. Akses informasi yang lebih terbuka untuk dokumen-dokumenpublik (APBD, Perda/Pergub, RKA/DPA, DanaAspirasi dan lain-lain), karena ini dijamin dalam UU KebebasanInformasi.
3. Ekologi dan ekonomi Kepuauan Bangka Belitung pasca tambang perlu dipikirkansecara lebih serius dan *actionable.*

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Tabel II.67.

Tabel II.67
Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

| No | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| I | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | |
| a. | Tataran Pengambil Kebijakan | | | |
| | • Ketentraman dan ketertiban umum daerah | Wajib (Kesbangpol) | Jika tingkat kriminalitas menurun | Tingginya tingkat pengangguran yang disebabkan tidak menentunya kondisi perekonomian. |
| | • Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah | Wajib (Pemerintahan) | Jika sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan meningkat | Lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi |
| | • Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah | Wajib (Perencanaan) | Jika keterkaitan perencanaan dan penganggaran meningkat | Lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi |
| | • Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD | Wajib (Pemerintahan) | Jika keselarasan perencanaan dan penganggaran secara politik dan teknokratik meningkat | Kurangnya sinerginya antar unsur pemerintah daerah dan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran |
| | • Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan | Wajib (Pemerintahan) | Jika implementasi Perda yang diterbitkan meningkat | 1. Kurangnya penerapan perda yang di terbitkan<br>2. Belum tersediannya petunjuk teknis dan pentunjuk pelaksanaan perda di maksud |
| | • Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan | Wajib (Pemerintahan) | Jika implementasi Pergub dan keputusan gubernur yang diterbitkan meningkat | 3. Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang di terbitkan<br>4. Belum tersediannya petunjuk |

| No | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | teknis dan pentunjuk pelaksanaan Pergub dan Keputusan Gubernur dimaksud |
| | • Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan | Wajib (Hukum) | Meningkatnya tata kelola pemerintahan | Rendahnya tingkat pelayanan publik |
| | • Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah | Wajib (Perencanaan) | Meningkatnya partisipasi masyarakat | Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap rencana strategis pemerintahan |
| | • Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil | Wajib (Keuangan Daerah) | Meningkatnya kualitas penilaian penyelenggaraan keuangan daerah | Belum tersusunnya data aset daerah |
| | • Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah | Wajib (Keuangan Daerah) | Meningkatnya kapasitas keuangan daerah | Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber pembiayaan yang sah |
| | • Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD | Wajib (Perencanaan dan Pengawasan) | Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD | - Rendahnya kapasitas perencana di masing-masing SKPD<br>- Rendahnya realisasi APBD<br>- Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD |
| | • Pengelolaan potensi daerah | Pilihan | Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB | Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah |
| | • Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan | Wajib | Meningkatnya inovasi daerah | - Belum adanya kelembagaan litbang<br>- Belum tersedianya SDM fungsional |

| No | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | daerah | | | perencana dan fungsional peneliti |
| b. | Tataran Pelaksana Kebijakan | | | |
| | • Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan | Wajib | Tersedianya dokumen pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah | Belum tersedianya SOP |
| | • Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan | Wajib | Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan | Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan |
| | • Tingkat capaian SPM | Wajib | Target SPM SKPD terkait tercapai | Belum ada kesesuaian antara program di SKPD untuk mencapai target SPM tersebut |
| | • Penataan kelembagaan daerah | Wajib | Kesesuaian visi dan misi RPJMD dengan struktur organisasi kelembagaan daerah | Kurangnya pemahaman aparatur terhadap visi dan misi RPJMD dalam penataan kelembagaan daerah |
| | • Pengelolaan kepegawaian daerah | Wajib (Kepegawaian) | - Tersedianya grand design kepegawaian daerah sesuai visi dan misi RPJMD | - Belum optimalnya perencanaan kepegawaian (beban kerja, kompetensi) |
| | • Perencanaan pembangunan daerah | Wajib (Perencanaan Pembangunan) | Tercapainya indikator pembangunan daerah | - Perencanaan masih bersifat sektoral<br>- Belum berlandaskan data dan informasi yang akurat<br>- Belum optimalnya sinergi perencanaan dan penganggaran |
| | • Pengelolaan keuangan daerah | Wajib (Keuangan Daerah) | Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru |
| | • Pengelolaan barang milik daerah | Wajib (DPPKAD) | Tertibnya administrasi pengelolaan barang daerah | Banyaknya asset daerah yang tidak terdata |
| | • Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat | Wajib | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan |
| II | Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | |
| | • Kesejahteraan masyarakat | Wajib (Kesra) | - Menurunnya tingkat kemiskinan | Belum optimalnya sinergisitas program |

| No | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | - Menurunnya tingkat pengangguran<br>- Meningkatnya pembangunan manusia | antar sektor, antar wilayah, dan antar hierarki pemerintahan |
| | • Pelayanan umum | Wajib | Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan umum | Masih minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan umum |
| | • Daya saing daerah | Wajib (Aspek Ekonomi, Hankam) | Meningkatnya investasi | - Belum optimlanya pelayanan terpadu<br>- Belum tersedianya infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih) |
| III | Daerah Otonomi Baru | | | |
| | • Perkembangan penyusunan perangkat daerah | Wajib (Organisasi) | Tersusunnya SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD | Belum adanya dokumen perencanaan kebutuhan SOTK sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD |
| | • Pengisian personil | Wajib (Kepegawaian) | Terpenuhinya personil sesuai kebutuhan | Belum tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan pegawai |
| | • Pengisian keanggotaan DPRD | Wajib | Terpenuhinya keanggotaan DPRD berbasis gender (keterwakilan perempuan) | Masih rendahnya kompetensi calon legislatif perempuan |
| | • Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan | Wajib | Terlaksananya semua urusan pemerintah daerah (wajib dan pilihan) | - Masih terjadinya tumpang tindih tupoksi<br>- Belum efektifnya SOTK |
| | • Pembiayaan | Wajib | Terlaksananya kebijakan program strategis sesuai dengan isu-isu daerah dan nasional | Dana yang tersedia belum sepenuhnya dapat membiayai penyelesaian isu-isu strategis |
| | • Pengalihan aset dan dokumen | Wajib | Meningkatnya akuntabilitas status aset daerah | Belum tertibnya penatausahaan aset dan dokumen |
| | • Pelaksanaan penetapan batas wilayah | Wajib | Terwujudnya kesepakatan batas antar wilayah | Masih adanya kepentingan pengelolaan kewilayahan oleh masing-masing kepala daerah (kabupaten/kota) |
| | • Penyediaan sarana dan prasana | Wajib | Tersedianya sarana prasarana pemerintah | - Masih ada SKPD yang belum |

| No | Kriteria / Aspek | Urusan | Faktor-faktor penentu keberhasilan | Permasalahan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | pemerintahan | | untuk mendukung operasional pelayanan publik | memiliki kantor yang representatif<br>- Belum terpadunya sistem teknologi informasi |
| | • Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan | Wajib | - | - |

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pengembangan ekonomi kerakyatan yang merupakan misi pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 menjadi landasan bagi arah kebijakan perekonomian Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut. Tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut, berangkat dari keadaan perekonomian Bangka Belitung terkini dan proyeksinya beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi.

### 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

#### 3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB bermanfaat sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita dan sebagai indikator disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi didaerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2014 menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 beserta proyeksi tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2.

**Tabel III.1**

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, 2012-2016 (juta rupiah)

| Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016*) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 8.111.873,43 | 9.269.819,71 | 10.836.997,55 | 12.021.824,11 | 13.206.650,67 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 6.975.347,45 | 7.097.518,72 | 7.620.761,91 | 8.006.592,59 | 8.392.423,27 |
| C. Industri Pengolahan | 11.043.825,57 | 12.093.054,14 | 12.890.074,75 | 13.818.926,49 | 14.747.778,23 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 27.089,35 | 27.367,54 | 40.961,42 | 45.172,49 | 49.383,56 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 8.155,04 | 9.149,48 | 10.371,48 | 11.424,44 | 12.477,40 |
| F. Konstruksi | 3.523.144,50 | 4.139.266,59 | 4.712.122,52 | 5.257.189,44 | 5.802.256,36 |
| G. Perdagangan Besar dan EceranMotor | 6.193.486,73 | 6.670.326,53 | 7.570.023,14 | 8.282.352,06 | 8.994.680,98 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1.577.156,28 | 1.864.719,90 | 2.128.766,34 | 2.370.463,86 | 2.612.161,37 |
| I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 992.568,39 | 1.152.328,30 | 1.321.690,83 | 1.466.420,49 | 1.611.150,15 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 708.586,22 | 770.239,84 | 849.134,58 | 916.846,20 | 984.557,83 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 728.769,97 | 902.450,19 | 1.004.182,48 | 1.130.317,81 | 1.256.453,15 |
| L. Real Estate | 1.388.288,28 | 1.602.869,70 | 1.836.553,09 | 2.048.920,11 | 2.261.287,14 |
| M, N. Jasa Perusahaan | 116.137,59 | 134.448,22 | 153.989,64 | 171.128,38 | 188.267,11 |
| 0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.243.455,66 | 2.618.022,68 | 3.042.905,19 | 3.404.361,25 | 3.765.817,31 |
| P. Jasa Pendidikan | 997.993,51 | 1.173.738,75 | 1.369.797,36 | 1.535.716,64 | 1.701.635,93 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 487.637,43 | 552.656,72 | 629.862,75 | 697.222,19 | 764.581,64 |
| R,S.T.U Jasa Lainnya | 276.712,93 | 315.929,30 | 371.658,40 | 411.962,21 | 452.266,02 |
| ***PDRB*** | ***45.400.228,31*** | ***50.393.906,29*** | ***56.389.853,43*** | ***61.596.840,75*** | ***66.803.828,06*** |

*Sumber: 2012-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 56.389,8 milyar, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp 50.393,9 milyar sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2014 besarnya mencapai Rp 44.171,6 milyar, meningkat dari tahun 2013 yang sebesar Rp 42.198 milyar.

**Tabel III.2**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, 2012-2016 (juta rupiah)

| Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015)* | 2016)* |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 7,072,887.38 | 7,557,862.74 | 8,256,150.92 | 9.024.798,57 | 9.870.422,20 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 6,270,079.12 | 6,230,132.14 | 6,352,554.97 | 6.312.082,53 | 6.360.778,60 |
| C. Industri Pengolahan | 9,804,877.79 | 10,147,360.73 | 10,280,893.24 | 10.416.182,95 | 10.684.522,94 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 30,087.00 | 31,570.62 | 34,271.12 | 37.431,92 | 41.246,60 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 7,021.87 | 7,315.76 | 7,677.76 | 8.113,16 | 8.573,24 |
| F. Konstruksi | 3,133,802.14 | 3,414,739.79 | 3,552,204.62 | 3.747.575,87 | 4.014.403,28 |
| G. Perdagangan Besar dan EceranMotor | 5,528,136.96 | 5,845,425.00 | 6,104,737.08 | 6.510.956,46 | 6.944.206,34 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1,384,756.11 | 1,484,921.04 | 1,573,245.41 | 1.697.197,53 | 1.819.962,59 |
| I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 870,984.28 | 931,152.92 | 1,000,753.83 | 1.069.887,11 | 1.147.025,97 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 679,225.21 | 740,153.28 | 790,872.34 | 845.066,93 | 911.706,74 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 624,227.89 | 731,241.37 | 771,100.97 | 827.761,34 | 888.585,11 |
| L. Real Estate | 1,215,662.47 | 1,312,637.13 | 1,413,993.26 | 1.523.175,67 | 1.640.788,67 |
| M, N. Jasa Perusahaan | 101,222.99 | 108,110.49 | 115,691.85 | 123.563,85 | 131.971,49 |
| 0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,873,015.70 | 2,014,416.58 | 2,162,116.96 | 2.277.653,98 | 2.399.364,96 |
| P. Jasa Pendidikan | 821,705.93 | 904,906.50 | 969,893.27 | 1.037.730,70 | 1.112.256,37 |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 442,949.37 | 475,322.73 | 503,757.13 | 533.892,51 | 565.830,63 |
| R,S.T.U Jasa Lainnya | 244,263.93 | 260,965.18 | 281,710.13 | 303.021,18 | 325.944,39 |
| **PDRB** | ***40,104,906.13*** | ***42,198,234.01*** | ***44,171,624.84*** | ***46.296.092,26*** | ***48.867.590,11*** |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 (*y on y*) adalah sebesar 4,68 persen, namun demikian jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 mengalami perlambatan pertumbuhan dimana pada tahun 2013, perekonomian Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 5,22 persen. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada

tahun 2014 terjadi pada Sektor Pertanian sebesar 9,24 persen, diikuti Sektor Pengadaan Listik dan Gas serta Sektor Jasa Lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen dan sebesar 7,95 persen.

Sektor lapangan usaha sebagai peningkat PDRB harga berlaku dari tahun 2010-2014 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan diikuti sektor Industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran Motor diikuti dengan sektor-sektor lainnya yang senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015-2016 sektor-sektor lapangan usaha PDRB cenderung akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pada tahun 2014 peranan capaian sektor berkontribusi paling besar adalah industri pengolahan sebesar Rp. 10.280,9 milyar diikuti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.8.256,15 milyar kemudian sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6.352,55 milyar diikuti oleh sektor-sektor lainnya dan sektor yang terendah adalah Jasa Perusahaan sebesar Rp. 115,69 milyar. Proporsi kontribusi tersebut relatif sama pada tahun 2015 di mana proyeksi kontribusi antar sektor tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun 2014. Namun telah dijelaskan sebelumnya bahwa pertumbuhan PDRB pada tahun 2014 mengalami perlambatan yang dipicu oleh antara lain rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan timah yang juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor kontruksi. Pada sektor pertambangan, regulasi yang dikeluarkan pemerintah antara lain adanya kewajiban ekspor timah harus melalui bursa komoditi yang mensyaratkan kualitas tinggi dan asal kuasa penambangan menyebabkan produksi timah menurun. Selain itu, pemerintah juga memperketat pemberian ijin pertambangan serta tidak diperpanjangnya kontrak salah satu produsen timah terbesar.

Sementara itu, PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah. PDRB demikian itu disebut sebagai PDRB menurut penggunaan atau disebut PDRB menurut pengeluaran (Gross Regional Domestic Product by Expenditure), atau biasa juga disebut sebagai PDRB yang ditinjau dari sisi permintaan (demand side).

Menurut pengeluaran, pada tahun 2014, ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 17,03% (yoy), diikuti pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga sebesar 6,79%. Peningkatan ekspor luar negeri disebabkan peningkatan ekspor logam timah dan indikasi penyebab tingginya konsumsi LNPRT adalah adanya pelaksanaan pemilihan legislative dan pemilihan presiden tahun 2014.

Perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2012-2014 dan proyeksi tahun 2015-2016 dapat terlihat pada Tabel III.3 dan Tabel III.4 berikut:

**Tabel III.3**
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta rupiah)

| | Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015)* | 2016)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 22.650.828,98 | 25.835.498,52 | 29.353.475,16 | 33.185.761,84 | 37.518.378,41 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 236.500,61 | 278.910,93 | 339.554,13 | 399.443,45 | 469.895,82 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi | 4.594.417,99 | 5.231.493,74 | 5.713.327,20 | 6.466.347,10 | 7.318.615,47 |

| | Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015)* | 2016)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Pemerintah | | | | | |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 9.811.558,35 | 11.149.060,54 | 13.146.055,80 | 15.121.023,72 | 17.392.696,47 |
| 5 | Perubahan Inventori | 1.031.024,52 | 1.156.629,94 | 1.201.018,01 | 1.258.429,69 | 1.318.585,79 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 25.410.825,57 | 28.047.085,40 | 27.777.269,79 | 31.799.272,06 | 36.403.639,05 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 1.383.714,26 | 1.146.114,54 | 1.366.237,63 | 1.442.868,38 | 1.523.797,26 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | -16.951.213,46 | -20.158.658,24 | -19.774.609,02 | (26.161.117,28) | (30.318.054,37) |
| | **PDRB** | **45.400.228,31** | **50.393.906,29** | **56.389.853,43** | **63.512.028,94** | **71.627.553,90** |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015 Proyeksi Bappeda*

**Tabel III.4**
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2016
Atas Dasar Harga Konstan (milyar rupiah)

| | Pengeluaran | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 19.889.508,67 | 21.115.227,97 | 22.375.359,48 | 24.147.839.62 | 25.667.044.11 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 211.066,32 | 232.043,04 | 261.724,85 | 283.096.53 | 306.518.14 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 3.995.334,02 | 4.212.839,02 | 4.499.036,47 | 4.739.988.29 | 5.310.567.21 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 8.551.676,03 | 8.970.322,63 | 9.394.610,61 | 10.326.987.07 | 11.589.869.22 |
| 5 | Perubahan Inventori | 771.265,32 | 798.018,08 | 869.154,43 | 949.928.88 | 1.099.883.61 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 22.220.162,18 | 23.716.450,31 | 27.755.618,35 | 28.761.925.7 | 29.289.778.74 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 1.250.390,25 | 915.701,38 | 1.042.266,87 | 933.732.65 | 1.022.657.31 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | -14.283.716,15 | -15.930.965,66 | -19.941.612,48 | -21.979.941.18 | -23.373.413.6 |
| | **PDRB** | **40.104.906,13** | **42.198.234,01** | **44.171.624,84** | **46.296.092,26** | **48.867.590,11** |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

Beradasarkan tabel diatas, jika dilihat dari sisi pengeluaran dari total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2014 yang sebesar Rp 56.389,85 milyar, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp 22.375,36 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi lembaga swasta nirlaba sebesar Rp 339,55 milyar. Komponen penggunaan lainnya meliputi konsumsi pemerintah sebesar Rp5.713,32 milyar, pembentukan modal tambah bruto sebesar Rp 13.146,05 milyar, perubahan inventori sebesar Rp1.201,02 milyar, transaksi ekspor sebesar Rp. 27.777,3 milyar dan impor sebesar Rp 1.366,2 milyar.

Pada tahun 2015 diperkirakan sumber utama pertumbuhan dari sisi pengeluaran tetap akan bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Pelaku usaha masih terlihat optimis untuk meningkatkan kinerja dari sisi volume.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan terus menguat pada tahun 2015 hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya Tingkat Keyakinan Konsumen di Kota Pangkalpinang yang masih menunjukkan optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun

2015 yang masih akan terjadi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Investasi pada tahun 2015 diperkirakan akan masih tetap tinggi terkait dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *row materials* sumber daya mineral di Kepulauan Bangka Belitung serta adanya rencana penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis yang didukung oleh daya tarik investasi yang tinggi karena potensi sumber daya alam yang melimpah.

Ekspor diperkirakan akan naik seiring dengan membaiknya perekonomian dunia, penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai tumbuh. Namun demikian, neraca perdagangan Kepulauan Bangka Belitung harus dijaga karena adanya kecenderungan aktivitas impor lebih tinggi daripada ekspor.

### 3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh sebesar 4,68 persen, mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang sebesar 5,22 persen. Kondisi ini terjadi disebabkan dengan adanya kebijakan penghematan anggaran dan disisi lainnya masih dikarenakan terjadinya perlambatan perekonomian global yang membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung, namun pertumbuhan PDRB tahun 2015 akan didorong oleh perbaikan kinerja perdagangan internasional yang mulai membaik dengan percepatan ekspor,. Disisi sektoral, membaiknya harga beberapa komoditi unggulan yang diikuti dengan peningkatan jumlah produksi menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung.

Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kepulaun Bangka Belitung diperkirakan akan semakin baik. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diikuti pula dengan adanya fenomena bahwa pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2014 tidak hanya semata-mata bergantung dari sub sektor industri pengolahan logam, hal ini diindikasikan dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya pertumbuhan sub sektor makanan, minuman dan tembakau. Gambaran mengenai perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2010-2016 dapat terlihat pada Gambar III.1 sebagai beikut:

**Gambar III.1**
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016

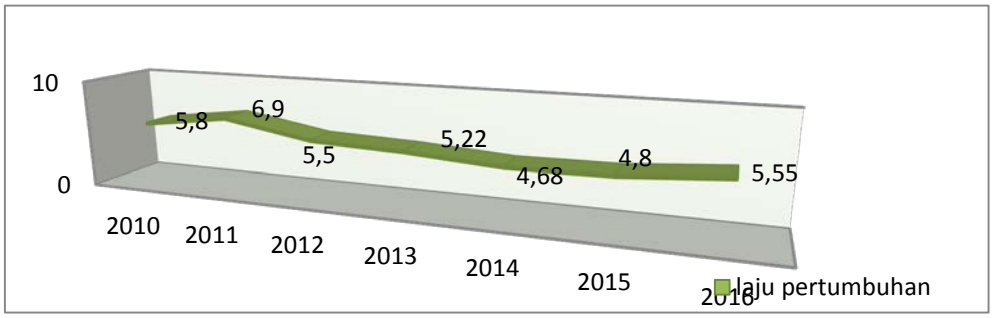


*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

Berdasarkan lapangan usaha, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2010-2014 serta proyeksi pertumbuhan 2015-2016 sebagaimana yang dapat terlihat pada Tabel III.5.

**Tabel III.5**
Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010–2016

| | Lapangan Usaha | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 6,47 | 6,86 | 9,24 | 9,31 | 9,37 |
| B. | Pertambangan dan Penggalian | 0,10 | -0,54 | 1,97 | -0,64 | 0,77 |
| C. | Industri Pengolahan | 3,04 | 3,49 | 1,32 | 1,32 | 2,58 |
| D. | Pengadaan Listrik dan Gas | 10,19 | 4,93 | 8,55 | 9,22 | 10,19 |
| E. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 5,73 | 4,19 | 4,95 | 5,67 | 5,67 |
| F. | Konstruksi | 13,61 | 8,96 | 4,03 | 5,50 | 7,12 |
| G. | Perdagangan Besar dan EceranMotor | 7,09 | 5,74 | 4,44 | 6,65 | 6,65 |
| H. | Transportasi dan Pergudangan | 8,80 | 7,23 | 5,95 | 7,88 | 7,23 |
| I. | Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 7,75 | 6,91 | 7,47 | 6,91 | 7,21 |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 8,64 | 8,97 | 6,85 | 6,85 | 7,89 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,35 | 17,14 | 5,45 | 7,35 | 7,35 |
| L. | Real Estate | 10,58 | 7,96 | 7,72 | 7,72 | 7,72 |
| M, N. | Jasa Perusahaan | 7,82 | 6,80 | 7,01 | 6,80 | 6,80 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,34 | 7,55 | 7,33 | 5,34 | 5,34 |
| P. | Jasa Pendidikan | 8,76 | 10,13 | 7,18 | 6,99 | 7,18 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 11,43 | 7,31 | 5,98 | 5,98 | 5,98 |
| R,S.T.U | Jasa Lainnya | 7,87 | 6,84 | 7,95 | 7,56 | 7,56 |
| | **PDRB** | ***5,50*** | ***5,22*** | ***4,68*** | ***4,81*** | ***5,55*** |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

Pada tahun 2014, hampir semua sektor mengalami perlambatan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,2 persen, diikuti Sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Sektor Jasa Lainnya masing-masing sebesar 8,55 persen dan 7,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2015-2016 dilihat dari sisi produksi, diproyeksikan masih tetap didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas serta Tranportasi dan Pergudangan. Kinerja sektor pertanian diperkirakan mengalami peningkatan yang terjadi di semua subsektor yaitu perkebunan, tanaman, bahan makan, dan perikanan. Permintaan akan subsektor perkebunan, kelapa sawit, karet, lada, diperkirakan tetap tinggi, sehingga meningkatkan harga. Meski demikian, diperkirakan kondisi cuaca tetap akan membatasi produksi.

Pada tahun 2016 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan didalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 adalah sebesar 5,5 – 5,7 persen, dengan memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, angka yang telah ditetapkan di RPJMN dan RKP tersebut dapat mungkin tercapai dan melihat target

pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran 5,55 untuk mencapaikan hal ini tentu saja membutuhkan kerja keras dari seluruh stakeholder pembangunan.

Sektor pertambangan dan industry yang berbasis timah diperkirakan akan tetap melambat, dimana harga komoditas timah pada tahun 2015 dan 2016 di[erkirakan masih belum mebaik seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang masih lesu. Adanya pembatasan produksi timah oleh pemerintah, diperkirakan menjadi salah satu penghambat kinerja perekonomian secara umum. Namun demikian, permintaan timah untuk industry strategis masih tetap menjanjikan.

Sementara itu, sector pertanian diperkirakan akan terus meningkat yang didukung meningkatnya produksi sawit dan padi. Harga CPO yang cukup stabil dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan seiring denga banyaknya kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi. Demikian halnya dengan produktivitas padi yang semikin meningkat seiiring dengan bertambahnya luas area tanam. Pada sisi yang lain, komoditas pertanian unggulan lainnya seperti lada juga diperkirakan akan terus meningkat . namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah, adanya resiko terhadap penurunan harga karet yang dipicu oleh gaktor eksternal, dimana Cina sebagai Negara tujuan ekspor karet Bangka Belitung saat ini tengah menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, pemerintah daerah harus segera melakukan langkah strategis guna mempercepat proses transformasi ekonomi dari yang berbasis pertambangan menjadi perekonomian yang berbasis potensi lokal lainnya sehingga pembangunan sektor dan sub sektor lain harus terus dipacu. Berdasarkan data dan berbagai kajian yang ada, beberapa sektor dan sub sektor yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi Bangka Belitung yaitu pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata sementara sektor industri dan sektor lainnyapun harus diarahkan pada sektor yang menjadi potensi lokal tersebut.

#### 3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas

Dalam kurun waktu 2010-2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB perkapita penduduk berdasarkan Harga berlaku di Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan sebesar Rp.41.960.451. Adapun gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Beitung tahun 2010-2015 adalah sebagaimana tergambar pada Gambar III.2.

Gambar III.2
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2015
(dalam ribu)

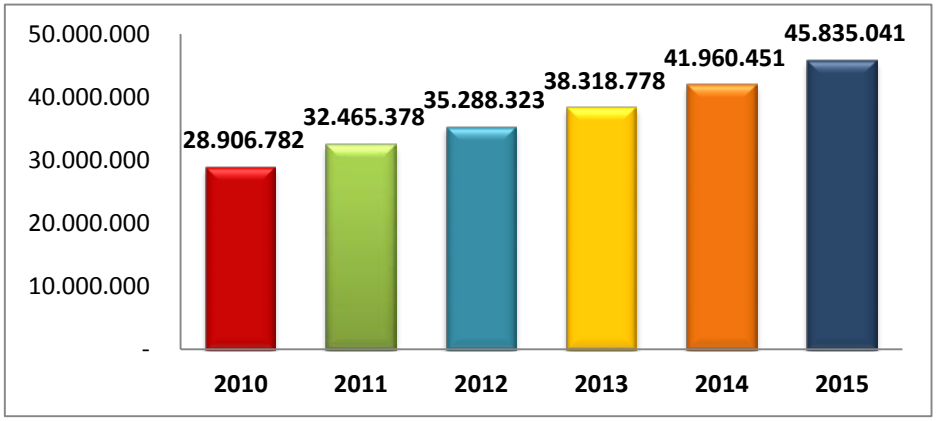


*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015 Proyeksi Bappeda*

Sementara itu pada tahun 2015 diproyeksikan PDRB perkapita Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami kenaikan hingga Rp45.835.041.

### 3.1.1.4 Struktur Sektor Ekonomi

Sementara dari struktur ekonomi, dimana gambaran dari struktur ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Dengan demikian, diperoleh informasi sektor dominan dan sektor potensial yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut.

Pada tahun 2014 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi sebesar 22,86 namun mengalami penurunan dari tahun 2013 yang sebesar 24 persen, kemudian kontribusi yang paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2014 sektor ini berada pada peringkat kedua dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 19,22 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,51 persen dan kemudian sektor yang memberikan kontribusi cukup signifikan tinggi yaitu sektor perdagangan besar, eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,42 persen. Gambaran mengenai distribusi persentase sektoral terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dapat terlihat pada Gambar III.3. Struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah ini:

**Gambar III.3**
Struktur Perekonomian menurut Lapangan Usaha
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014

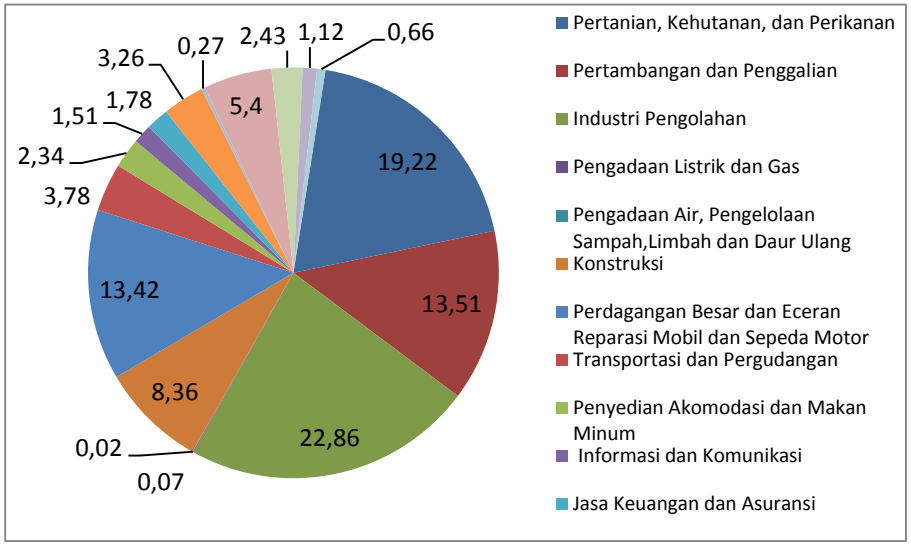


*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)*

Sementara itu, pada tahun 2015, diperkirakan akan terjadi pergeseran struktur perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang akan semakin besar dalam memberikan kontribusinya di dalam struktur PDRB, disisi lain sektor perdagangan dan eceran diperkirakan akan memberikan kontribusi terbesar selanjutnya setelah industri pengolahan. Beberapa sektor lain yang juga diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2015 adalah sektor Kontruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi dan sektor-sektor lainnya, sementara itu sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan semakin menurun, diikuti pula oleh sektor industri pengolahan. Hal ini sebagaimana tergambar pada Tabel III.6.

**Tabel III.6**
Distribusi Persentase PDRB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010–2015

| Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015)* | 2016)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 17,31 | 17,87 | 18,39 | 19,22 | 19.49 | 20.20 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 16,67 | 15,36 | 14,08 | 13,51 | 13.63 | 13.02 |
| C. Industri Pengolahan | 25,27 | 24,33 | 24,00 | 22,86 | 22.50 | 21.86 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0.08 | 0.08 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0.02 | 0.02 |
| F. Konstruksi | 7,17 | 7,76 | 8,21 | 8,36 | 8.09 | 8.21 |
| G. Perdagangan Besar dan EceranMotor | 13,41 | 13,64 | 13,24 | 13,42 | 14.06 | 14.21 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 3,30 | 3,47 | 3,70 | 3,78 | 3.67 | 3.72 |
| I. Penyedian Akomodasi dan Makan Minum | 2,09 | 2,19 | 2,29 | 2,34 | 2.31 | 2.35 |

| | Lapangan Usaha | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015)* | 2016)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| J. | Informasi dan Komunikasi | 1,55 | 1,56 | 1,53 | 1,51 | 1.83 | 1.87 |
| K. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,51 | 1,61 | 1,79 | 1,78 | 1.79 | 1.82 |
| L. | Real Estate | 2,88 | 3,06 | 3,18 | 3,26 | 3.29 | 3.36 |
| M, N. | Jasa Perusahaan | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0.27 | 0.27 |
| O. | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,88 | 4,94 | 5,20 | 5,40 | 4.92 | 4.91 |
| P. | Jasa Pendidikan | 2,02 | 2,20 | 2,33 | 2,43 | 2.24 | 2.28 |
| Q. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,02 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1.15 | 1.16 |
| R,S.T.U | Jasa Lainnya | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0.65 | 0.67 |
| | **PDRB** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***100,00*** |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015-2016 Proyeksi Bappeda*

### 3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015 pada setiap komponen pengeluaran. Pada tahun 2014, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih komponen pengeluaran yang dominan dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 52,05 persen. Meningkat jika dibandingkan tahun seblumnya yang sebesar 51,27. Komponen pengeluaran lainnya yang meningkat adalah pada pembentukan modal tetap bruto, dimana pada tahun 2013 sebesar 22,12 persen dan meningkat menjadi 23,31 persen pada tahun 2014. Sementara itu, komponen pengeluaran lainnya cenderung mengalami penurunan. Termasuk ekspor yang juga diikuti dengan meningkatnya impor Kepulauan Bangka Belitung.
Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2011 – 2016 adalah sebagaimana yang terdapat dalam Tabel III.7.

**Tabel III.7**
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2010–2015 (persen)

| | Pengeluaran | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 49,35 | 49,89 | 51,27 | 52,05 | 52.16 | 52.52 |
| 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | 0.61 | 0.63 |
| 3 | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 9,88 | 10,12 | 10,38 | 10,13 | 10.24 | 10.87 |
| 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto | 21,55 | 21,61 | 22,12 | 23,31 | 22.31 | 23.72 |
| 5 | Perubahan Inventori | 3,16 | 2,27 | 2,30 | 2,13 | 2.05 | 2.25 |
| 6 | Ekspor Luar Negeri | 63,46 | 55,97 | 55,66 | 49,26 | 62.13 | 59.94 |
| 7 | Impor Luar Negeri | 3,52 | 3,05 | 2,27 | 2,42 | 2.02 | 2.09 |
| 8 | Net Ekspor Antar Daerah | -44,35 | - 37,34 | - 40,00 | -35,07 | -47.48 | 57.84 |

| Pengeluaran | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*) | 2016*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| PDRB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 |

*Sumber: 2010-2014 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,*
**)2015 Proyeksi Bappeda*

### 3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2014, Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan mengalami inflasi masing-masing sebesar 6,81 persen dan 13,14 persen baik selama tahun kalender (Januari-Desember 2014) maupun secara *year on year* (Desember 2014 terhadap Desember 2013).

**Gambar III.4**
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2010-2015

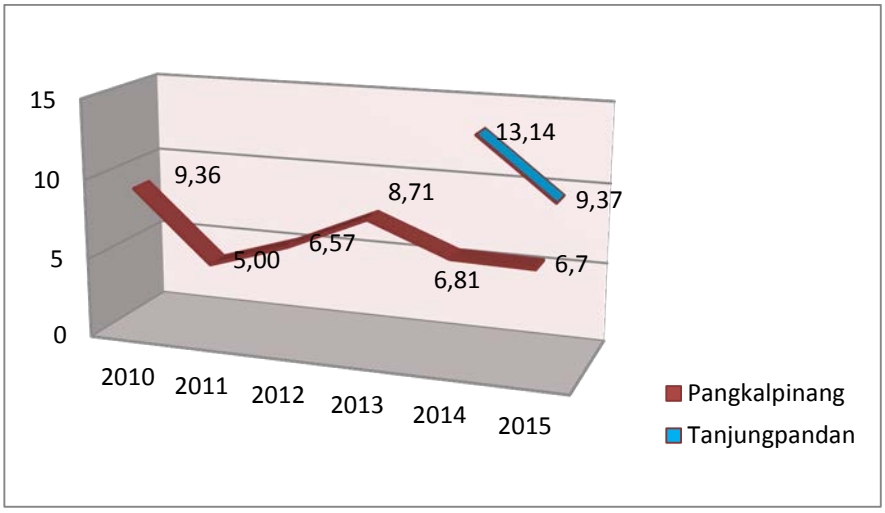


*Sumber : 2010-2014 (BPS), *)2015 (Proyeksi Bappeda)*

**Tabel III.8**
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2010-2014

| Kelompok Pengeluaran | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (4) | (5) |
| Umum | 9,36 | 5,00 | 6,57 | 8,71 | 6,81 |
| 1. Bahan Makanan | 17,68 | -0,50 | 8,50 | 11,08 | 5,29 |
| 2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok danTembakau | 8,01 | 5,32 | 7,95 | 6,82 | 8,35 |
| 3. Perumahan | 4,08 | 7,52 | 5,81 | 9,20 | 8,51 |
| 4. Sandang | 4,86 | 8,83 | 5,79 | 1,63 | 6,44 |
| 5. Kesehatan | 2,98 | 7,09 | 5,19 | 5,08 | 7,91 |
| 6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga | 21,33 | 8,73 | 10,31 | 3,77 | 6,45 |
| 7. Transportasi dan Komunikasi | 0,68 | 10,55 | -0,11 | 11,17 | 7,03 |

*Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2014*

Pada tahun 2015, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 6,7 persen untuk kota Pangkalpinang dan 9,37 persen untuk kotaTanjungpandan, dimana Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.

### 3.1.1.7 ICOR

Tingkat efisiensi suatu perekonomian diukur dengan angka *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). Suatu daerah memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang semakin efisien jika nilai ICOR-nya semakin kecil yang menunjukkan semakin sedikitnya modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat output tertentu. Hal ini berarti tingkat produktifitas investasi dan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat, di mana ICOR yang lebih rendah menunjukkan adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Tren ICOR diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang menunjukkan perbaikan efisiensi aktivitas ekonomi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2009 nilai ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,78 sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,74 persen. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2009 kegiatan ekonomi kurang produktif salah satunya disebabkan oleh adanya krisis ekonomi dii negara maju. Antara 2009 dengan 2010 terjadi proses perbaikan dari fungsi-fungsi produksi kegiatan ekonomi. Nilai ICOR mulai turun sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,5 persen dengan ICOR sebesar 4,6 persern kondisi ini menggambarkan terjadi perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2011 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 6,9 persen dengan ICOR sebesar 4,05.

**Gambar III.5**
Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008–2012

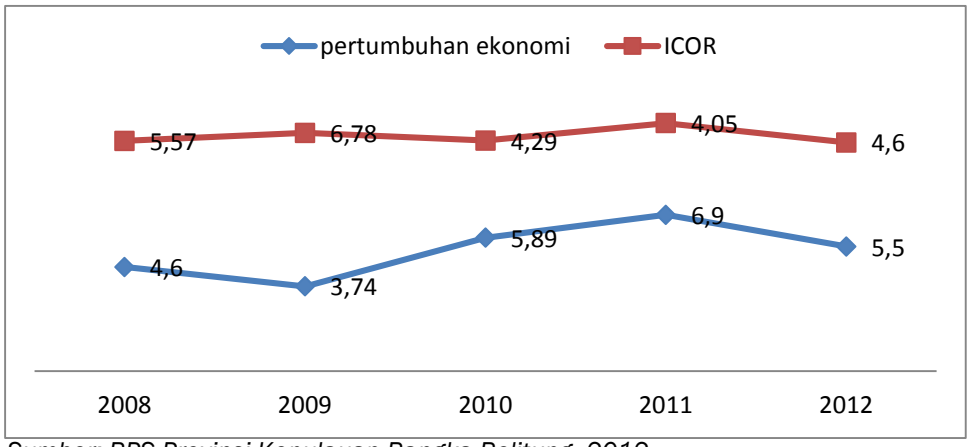


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2012*

Proyeksi angka ICOR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun selanjutnya diharapkan semakin cenderung untuk turun atau adanya perbaikan produktivitas aktivitas ekonomi diharapkan dapat berdampak langsung terhadap perkembangan perekonomian Bangka Belitung ke arah yang lebih baik. Ini disebabkan semakin membaiknya/mengecilnya nilai ICOR diharapkan akan mampu meningkatkan kapasitas produksi perekonomian daerah (PDRB) yang pada akhirnya dapat mencapai target-target makroekonomi yang telah direncanakan. Pencapaian target-target makroekonomi ini akan bermanfaat dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan salah satunya oleh pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

ICOR Kepulauan Bangka Belitung menurut sektor dan sub sektor cenderung bervariasi. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertambangan dan penggalian mempunyai ICOR relatif lebih baik dibanding sektor lainnya. Rendahnya angka ICOR sektor pertanian disebabkan oleh proses produksi yang pendek dan kecilnya proporsi investasi dibanding biaya antara (*intermediate cost*) dalam struktur ongkos usaha taninya. Untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran rendahnya ICOR disebabkan oleh perputaran modal yang cepat dan proses produksi yang sangat pendek khususnya subsektor perdagangan dan restoran. Rendahnya angka ICOR sektor pertambangan dan penggalian disebabkan oleh faktor tidak banyaknya investasi baru yang masuk disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan terkait dengan upaya pembatasan ekspor timah.

### 3.1.1.8 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah.Nilai investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan III tahun 2014 adalah sebesar Rp 903,11milyar dan investasi PMDN sebesar Rp 113,85 milyar. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar di dalam Tabel III.9.

**Tabel III.9**
Perkembangan Nilai Investasi
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010–2014

| Investasi | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 Jan-Sept |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PMA | Jumlah Proyek | 22 | 48 | 46 | 37 | 27 |
| | Nilai (Rp Milyar) | 21,96 | 146,05 | 59,18 | 81,52 | 903,11 |
| PMDN | Jumlah Proyek | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 |

| Investasi | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 Jan-Sept |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nilai (Rp Milyar) | 0,36 | 514,40 | 533,46 | 542,3 | 113,85 |

*Sumber: BP2TPM, 2014*

Pada tahun 2015 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

### 3.1.1.9 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Total ekspor tertinggi sebesar US$ 2.833,0 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahun 2011 baik dari ekspor logam timah yang sebesar US$ 2.089,0 maupun ekspor non logam timah yang sebesar US$ 744,0, kemudian pada tahun 2012 mulai menurun total ekspor menjadi sebesar US$ 1.761,9 dimana ekspor logam timah yang sebesar US$ 1.527,9 maupun ekspor non logam timah yang sebesar US$ 233,6, tahun 2013-2014 total ekspor menurun kembali, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2014 total ekspor sebesar US$ 1.653,0 baik dari ekspor logam timah yang sebesar US$ 1.376,8 maupun ekspor non logam timah yang sebesar US$ 276,3.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 dan jika dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun sebelumnya, sebagaimana tersaji pada gambar III.6 dan gambar III.7 berikut:

**Gambar III. 6**
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010- 2014 (dalam juta US$)

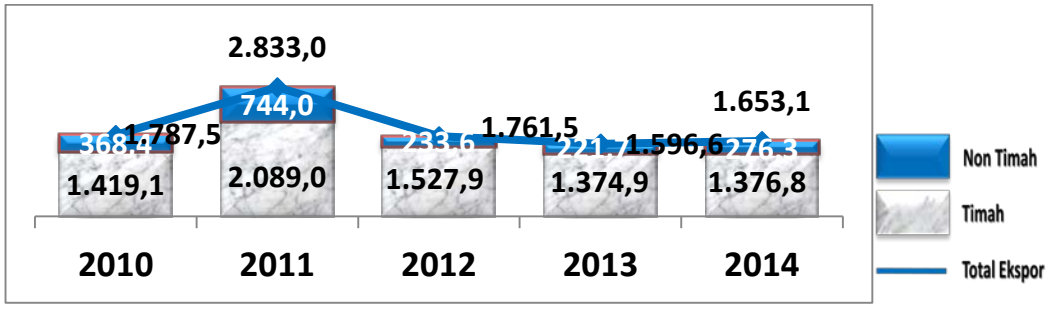


*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

Total nilai impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 mencapai US$58,0 juta, naik 8,9 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$49,1juta. Kenaikan nilai impor tersebut disebabkan oleh naiknya impor non migas hingga 2,9 persen dari US$ 34,8 menjadi US$ 37,7 juta. Sedangkan impor migas mengalami peningkatan sebesar 6 persen dari US$14,3 juta menjadi US$20,3 juta.

**Gambar III. 7**
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2010-2014

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014*

### 3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

#### 3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2013. TPT pada 2013 sebesar 3,70 persen menjadi 5,13 persen pada 2014. Peningkatan angka pengangguran ini disebabkan oleh banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja pada sektor pertambangan. Penurunan produktivitas sektor pertambangan secara gradual menyebabkan meningkatnya pengangguran pada sektor ini.

**Tabel III.10**
Angka Tingka Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2011–2016

| Kegiatan Utama | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,61 | 3,49 | 3,70 | 5,14 | 3,4 | 3,1 |

*Sumber: 2011 – 2014 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)*
**) 2015 -2016 Proyeksi (Bappeda Prov. Kep. Babel)*

Pada tahun 2015 dan 2016, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakukan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *row materials* akan menyebabkan

industri pengolahan akan semakin tumbuh berkembang yang akhirnya akan berimbas bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru.

### 3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2014 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 70,90 ribu jiwa dengan persentase 5,25 persen sementara pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 67,23 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 4,97 persen. Namun demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2014 yang berjumlah72,03 ribu orang (5,36 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 4,8 ribu orang dan persentasenya naik sebesar 0,36 persen pada kurun waktu Maret – September 2014. Sementara itu, pada 2014 Garis Kemiskinan naik dari Rp. 427.081,- per kapita per bulan pada tahun 2013 menjadi Rp. 469.814,- per kapita per bulan pada bulan September 2014.

**Gambar III.8**
Diagram Penduduk Miskin Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2016

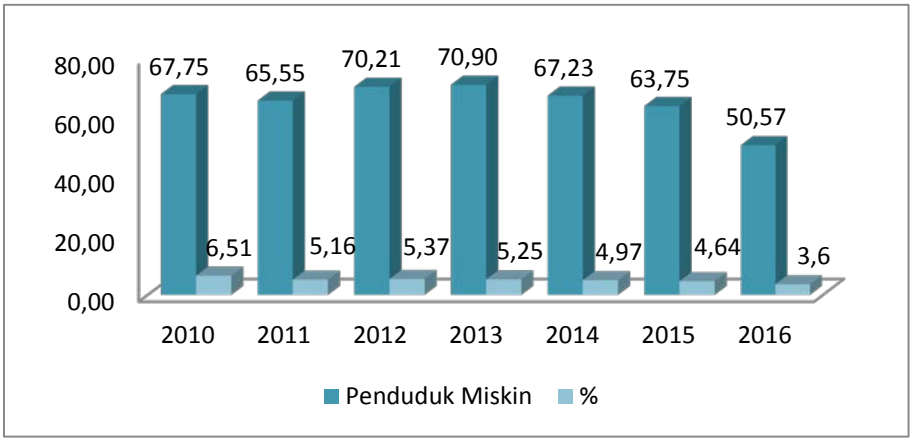


*Sumber: 2010 – 2014 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)*
**) 2015-2016 (Proyeksi Bappeda)*

Pada tahun 2015 dan 2016, angka kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan

difokuskan di daerah perdesaan mengingat di Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan tertinggi terjadi di daerah perdesaan.

**Gambar III.9**
Perbandingan Garis Kemiskinan Kota dan Desa (rupiah/kapita/bulan)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Nasional, 2014

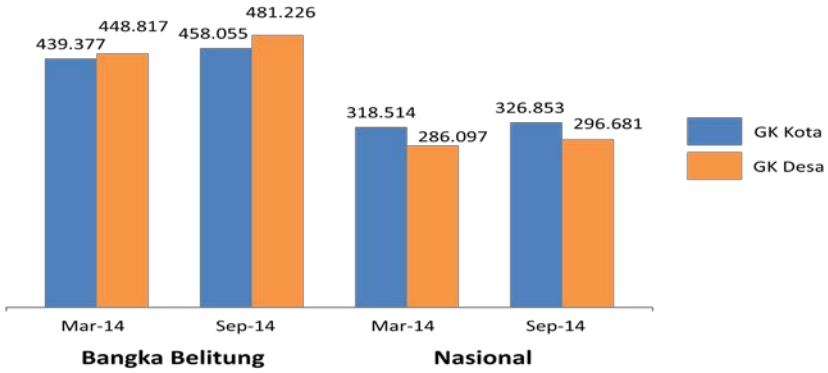


Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2014

### 3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah 0 < IW < 1

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif cenderung menurun meskipun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2009 angka indeks sebesar 0,297 dan menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,294. Berdasarkan angka ini, dimana angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, maka pembangunan wilayah semakin mendekati merata. Seperti sebagimana yang ditampilkan pada Tabel III.13. Penurunan angka indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2015 diperkirakan ketimpangan pembangunan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung menurun menjadi sebesar 0,291 dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 0,288, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel III.11**
Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2009–2016)

| Tahun | Indeks Ketimpangan Willamson |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2009 | 0,297 |
| 2010 | 0,294 |
| 2011 | 0,291 |
| 2012 | 0,284 |
| 2013 | 0,304 |
| 2014 | 0,294 |
| 2015 *) | 0,291 |
| 2016 *) | 0,288 |

*Sumber: 2009-2014 (BPS.Ri)*
**) 2015-2016 (Proyeksi Bappeda)*

### 3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.14, pada tahun 2013 adalah sebesar 0,31, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,30. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatan koefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 diperkirakan koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,30 dan pada tahun 2016 diperkirakan turun menjadi 0,29 yang artinya pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata..

Secara lengkap, perkembangan angka koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel III.12.

**Tabel III.12**
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2016)

| Tahun | Koefisien Gini |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2010 | 0,30 |
| 2011 | 0,30 |
| 2012 | 0,29 |
| 2013 | 0,31 |
| 2014 **) | 0,30 |
| 2015*) | 0,30 |

| Tahun | Koefisien Gini |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2016*) | 0,29 |

*Sumber: 2010-2014** Sep) BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2014*
*2015-2016*) Proyeksi Bappeda*

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi cenderung merata dengan angka rasio di tahun 2010 sebesar 0,30 dan di tahun 2014 (September) sebesar 0,30 jauh lebih merata dibandingkan dengan koefisien Gini Nasional yang pada tahun 2010 sebesar 0,38 kemudian tahun 2014 sebesar 0,41 kecenderungan koefesien Gini Nasional adalah naik yang artinya terjadi peningkatan ketidakmerataan pendapatan. Dilihat dari Gambar III.& dibawah ini bahwa koefisien gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah koefisien gini Nasional.

**Gambar III.10**
Perbandingan Gini Rasio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, 2010-2014

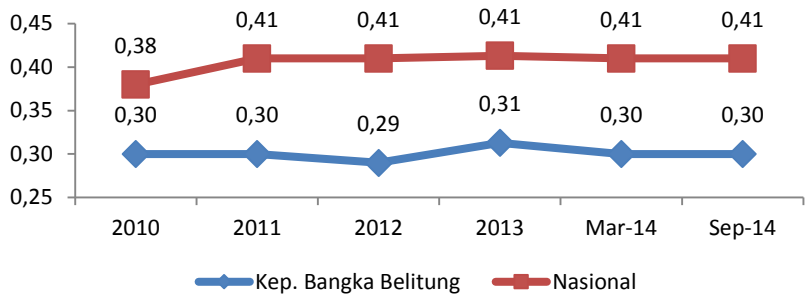


*Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2014*

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016

#### 3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2015 dan 2016

Kondisi perekonomian global saat ini ditandai dengan pertumbuhan yang cenderung bias ke bawah, disertai masih tingginya risiko di pasar keuangan global. Ekonomi dunia, yang semula tahun ini diperkirakan dapat tumbuh empat persen, sesuai perkembangan terakhir proyeksi tersebut harus dikoreksi menjadi tiga persen.

Potensi bias ke bawah tersebut terutama didorong oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang tidak sekuat proyeksi sebelumnya. Selain itu, potensi bias ke bawah terjadi lantaran ada perlambatan ekonomi di Tiongkok. Kekhawatiran akan kenaikan suku bunga The Fund Rate, masih kata Ronald, juga menimbulkan ketidakpastian di pasar dan memengaruhi perkembangan ekonomi global. Normalisasi kebijakan The Fed tersebut berpotensi memicu *capital outflows*, sehingga dapat menimbulkan tekanan pada pasar keuangan di kawasan, tak terkecuali di Indonesia.

Dari sisi lain, lanjutnya, krisis ekonomi yang melanda Yunani memaksa negara kawasan Eropa meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko negatif yang mungkin ditimbulkan. Walaupun kesepakatan telah dicapai antara Yunani dengan pihak kreditur, namun proses penyelamatan dan restrukturisasi Yunani masih membutuhkan serangkaian asesmen dan negosiasi komprehensif yang panjang.

Pemulihan ekonomi dunia yang lemah juga ditandai dengan terus menurunnya harga komoditas. Pada triwulan II-2015, komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, timah dan kopi mengalami penurunan harga bila dibandingkan dengan triwulan I-2015. Selain itu, , harga minyak yang sudah sempat beranjak naik menembus USD60 per barel kembali jatuh di bawah USD50 per barel. Bagi negara yang perekonomiannya bertumpu pada komoditas mentah seperti Indonesia tentunya hal ini menyiratkan pesan bahwa tantangan pemulihan ekonomi ke depan akan semakin berat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 dan 2016 diperkirakan mengalami moderasi. Perkiraan tersebut seiiring dengan pemulihan ekonomi dunia yang akan terus berlanjut dan ditopang oleh perbaikan perekonomian Amerika Serikat.

### 3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung 2015 dan 2016

Pada tahun 2015 dan 2016 diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 dan 2016, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;
4. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terus menerus;
5. Kapasitas pengolahan CPO yang ada di Bangka Belitung masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan. Gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun dstribusi yang disebabkan gangguan cuaca dan factor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada serentak di 4 kabupaten juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lainnya terkait dengan pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 terutama dalam persaingan ekonomi regional yang saat ini telah berlangsung mencakup beberapa hal, antara lain:

1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga

neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk dalam daerah akan semakin terpinggirkan.

2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.

3) Pengembangan sektor unggulan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet). Industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.

4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.

5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.

6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi, utamanya sektor produksi dan bagi pasar.

7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah, Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.

8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

### 3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer, sehingga berdampak positif pada peningkatan ekspor Babel yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 antara lain adalah:

1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016.
2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian yang relatif baik pada tahun 2014 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Bangka Belitung pada tahun 2016. Peningkatan investasi yang terus berlanjut dan pertumbuhan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Bangka Belitung dimasa yang akan datang, di samping sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pertambangan.

## 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2012-2014, arah kebijakan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2016 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain:

1) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

2) Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
3) Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
4) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
6) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).
7) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah degan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
8) Pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;
2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari besaran-besaran belanja dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas
2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja
3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD)
4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) daerah. Prioritas-prioritas pembangunan dalam RKPD, RPJM dan RPJP inilah yang akan menentukan pola alokasi belanja di daerah selain sumber-sumber pembiayaannya yang ideal.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah

pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2016 di Kepulauan Bangka Belitung diarahkan untuk:

1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2012-2017.

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*". Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang didalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah sebagai yang tertuang pada Tabel III.15.

**Tabel III.13**

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 s.d tahun 2017

| NO | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2014 (N-2) | Proyeksi / Target 2015 (N-1) | Proyeksi / Target 2016 (N) | Proyeksi / Target 2017 (N+1) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **1.1** | **Pendapatan asli daerah** | **563.108.840.861,42** | **558.971.218.953,00** | **567.635.349.541.,2** | **575.722.066.246,57** |
| 1.1.1 | Pajak daerah | 508.262.616.895,88 | 500.844.014.371,82 | 500,844,014,371.82 | 539.995.060.971,20 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah | 9.357.405.765,00 | 8.446.070.286,00 | 9.061.667.223,45 | 5.327.340.928,00 |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 1.205.926.846,39 | 7.500.00.00,00 | 7.500.000.000,00 | 7.500.000.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | 44.282.891.354,15 | 42.181.134.295,72 | 50.228.848.630,26 | 38.135.121.544,37 |
| **1.2** | **Dana perimbangan** | **1.025.142.797.595,00** | **1.179.487.500.000,00** | **1,124,042,730,000.00** | **1.180.244.865.000,50** |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak | 174.950.191.595,00 | 226.155.287.000,00 | 226.155.287.000,00 | |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum | 806.820.146.000,00 | 897.887.443.000 | 897.887.443.000,00 | |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus | 43.372.460.000,00 | 55.444.770.000,00 | - | - |
| **1.3** | **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** | **131.522.785.000,00** | **179.626.400.000,00** | **184.626.400.000,00** | **179.626.400.000,00** |
| 1.3.1 | Hibah | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Dana darurat | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya | **131.522.785.000,00** | - | - | - |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | 179.626.400.000,00 | 179.626.400.000,00 | - |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) | - | - | - | - |
| 1.3.6 | Sumbangan Pihak Ketiga | | | 5.000.000.000,00 | |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah (1.1 +1.2+1.3)** | **1.719.774.423.456,42** | **1.918.085.18.953,54** | **1.876.304.479.541,42** | **1.935.593.331.247,07** |

### 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

#### 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016 yang merupakan potensii daerah dan sebagai penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah:

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat *Outlet*;

e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;

f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;

j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

   a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

   b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.

   c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

   d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.

f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.16.

**Tabel III.14**

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 s.d Tahun 2017

| NO | Uraian | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2014 (N-2) | Proyeksi / Target 2015 (N-1) | Proyeksi / Target 2016 (N) | Proyeksi / Target 2017 (N+1) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **2.1** | **Belanja Tidak Langsung** | **855.780.981.423,84** | **1.152.668.096.324,74** | **126,1317,266,496.97** | **856.252.762.646,61** |
| 2.1.1 | Belanja pegawai | 274.339.635.936,42 | 329.023.179.838,35 | 417,011,551,775.76 | 356.990.150.124,61 |
| 2.1.2 | Belanja bunga | | - | - | - |
| 2.1.3 | Belanja subsidi | | - | 3,000,000,000.00 | - |
| 2.1.4 | Belanja hibah | 167.022.782.500,00 | 284.091.950.000,00 | 267,181,606,574 | 194.402.800.000,00 |
| 2.1.5 | Belanja bantuan sosial | 745.500.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* | 212.859.716.663,42 | 280.474.272.314,38 | 214,696,408,147.21 | 250.811.768.350,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa* | 200.796.461.884,00 | 256.078.694.72,00 | 368,059,700,000 | 48.048.044.172,00 |
| 2.1.8 | Belanja tidak terduga | 16.884.440,00 | 2.000.000.000,00 | 2,000,000,000.00 | 5.000.000.000,00 |
| **B** | **Jumlah Belanja Tidak Langsung** | **855.780.981.423,84** | **1.152.668.096.324,74** | **126,1317,266,496.97** | **856.252.762.646,61** |
| **2.2** | **Belanja Langsung** | **740.305.877.055,36** | **977.894.380.560,50** | **1,055,644,225,563** | **1.210.511.286.998,86** |
| 2.2.1 | Belanja pegawai | 70.712.733.013,01 | 91.216.604.900,00 | | 189.522.014.098,09 |
| 2.2.2 | Belanja barang dan jasa | 364.039.655.088,00 | 575.987.487.344,50 | | 312.972.861.933,00 |
| 2.2.3 | Belanja modal | 305.553.488.954,35 | 310.690.288.316,00 | | 708.016.410.967,77 |
| **C** | **Jumlah Belanja Langsung** | **740.305.877.055,36** | **977.894.380.560,50** | **1,055,644,225,563** | **1.210.511.286.998,86** |
| **D** | **Total Jumlah Belanja** | **1.596.086.858.479,20** | **2.130.562.476.885,23** | **2,316,961,492,059.97** | **2.066.764.049.645,47** |

Kebijakan belanja daerah tahun 2016 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.

2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2016 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional" Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan: "Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji", guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.

5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost, regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:

   a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
   b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
   c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD,
   d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).

6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2012-2017, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 sebagaimana yang tergambar pada Tabel 3.17, diarahkan pada:

1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2016;
2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**Tabel III.15**

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d Tahun 2017

| NO | Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Realisasi Tahun 2014 (N-2) | Proyeksi / Target 2015 (N-1) | Proyeksi / Target 2016 (N) | Proyeksi / Target 2017 (N+1) |
| (1) | (2) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| **3.1** | **Penerimaan pembiayaan** | **201.966.080.663,95** | **227.501.516.638,72** | 450,657,012,518.55 | **131.170.718.398,40** |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) | 201.966.080.663,95 | 227.501.516.638,72 | 450,657,012,518.55 | **131.170.718.398,40** |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Penerimaan pinjaman daerah | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Penerimaan piutang daerah | - | - | - | - |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **201.966.080.663,95** | **227.501.516.638,72** | 450,657,012,518.55 | **131.170.718.398,40** |
| **3.2** | **Pengeluaran pembiayaan** | **-** | - | **10,000,000,000** | **-** |
| 3.2.1 | Pembentukan dana cadangan | | - | - | - |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi) daerah | - | - | 10,000,000,000 | - |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang | | - | - | - |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah | | - | - | - |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **-** | - | **10,000,000,000** | - |
| | **Jumlah Pembiayaan Netto** | **201.966.080.663,95** | **227.501.516.638,72** | 440,657,012,518.55 | **131.170.718.398,40** |
| **3.3** | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkala (SiLPA)** | **325.653.645.641,17** | **227.501.516.638,72** | - | **131.170.718.398,40** |

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
# PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
# TAHUN 2016

# BAB IV
# TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

# BAB IV
# TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.1.1 Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

   Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun II (2012–2017) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2012–2017) adalah Ekonomi dan Sumber Daya Alam, lingkungan hidup, Prasarana dan Sarana, SDM dan Kependudukan, Pemerintahan, dan Sosial, Budaya dan Politik.

**Gambar IV.1**
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025
dan RPJMD Tahun 2012-2017

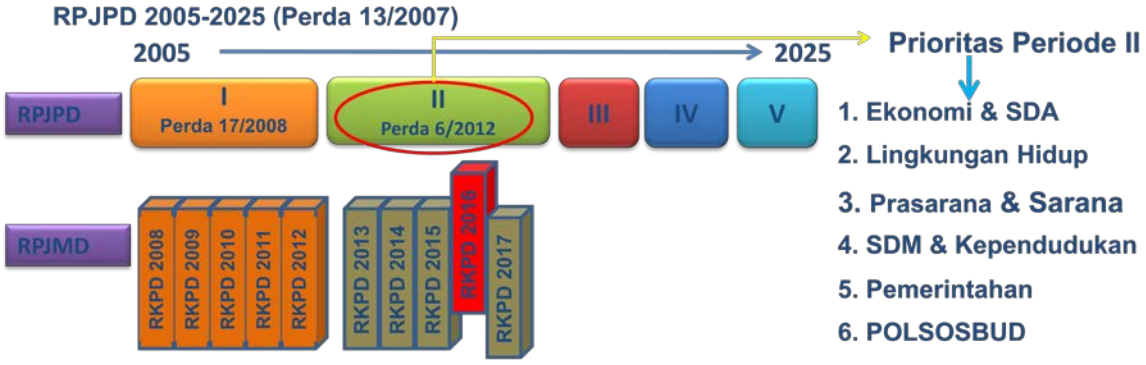


2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034.

   Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap I (2014-2016). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, dimana dalam rangka:
   a. Pemantapan Sistem Perkotaan.
   b. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah.

c. Rencana Pola Ruang.
d. Perwujudan Kawasan Strategis.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017.

Arah Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang merupakan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2012-2017 difokuskan untuk mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, sinkronisasi pembangunan antaralevel pemerintahah daerah, dan memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, dan kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik.

**Gambar IV.2**
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017

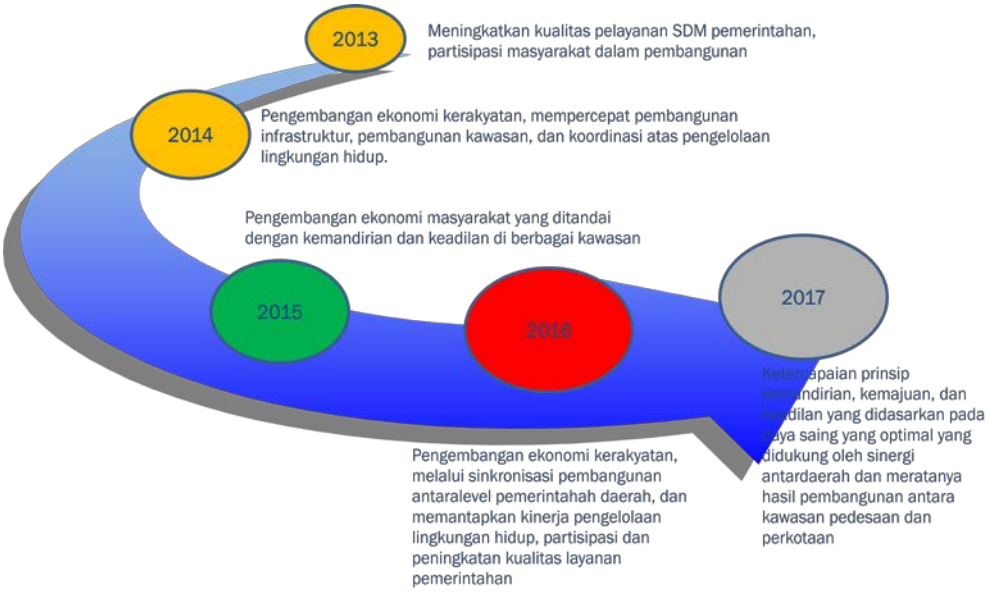


4. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014.
b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya.
c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:

1) Ketergantungan Sumber Daya Alam masih tinggi serta daya dukung lingkungan cenderung melemah;
2) Kualitas SDM dan Kependudukan belum mantap;
3) Sosial Budaya, (meningkatnya kriminalitas; penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); pengendalian penyakit; penanggulangan bencana; dan belum optimalnya pengembangan seni budaya lokal;
4) Ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi;
5) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah belum memadai;
6) Tingginya tingkat ketergantungan Pangan;
7) Rendahnya kualitas lingkungan hidup;

8) Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah dan sumber daya alam;
9) Kualitas tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan;
10) Pembangunan di pulau kecil dan daerah pesisir;
11) *Linkage* pembangunan desa dan kota

Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2016 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, melaksanakan *quick wins* dan program lanjutan yaitu "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas", melalui tiga dimensi pembangunan yaitu:

a) Dimensi Pembangunan Manusia utamanya akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban dasar yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan serta pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi.

b) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan diarah pada perkuatan kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatan kemandirian ekonomi. Pangan merupakan hal utama yang harus dipenuhi.

c) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan akan difokuskan pada pengembangan sistem perlindungan sosial, pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, pemberian pelatihan dasar bagi pengembangan kewirausahaan dan perbaikan pendataan masyarakat miskin, serta pembangunan wilayah perdesaan dan perbatasan.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 adalah "Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"
Makna tema:

1. **Memantapkan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
2. **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dalam rangka membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Gambar IV.3
Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2016 Terhadap Nasional dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

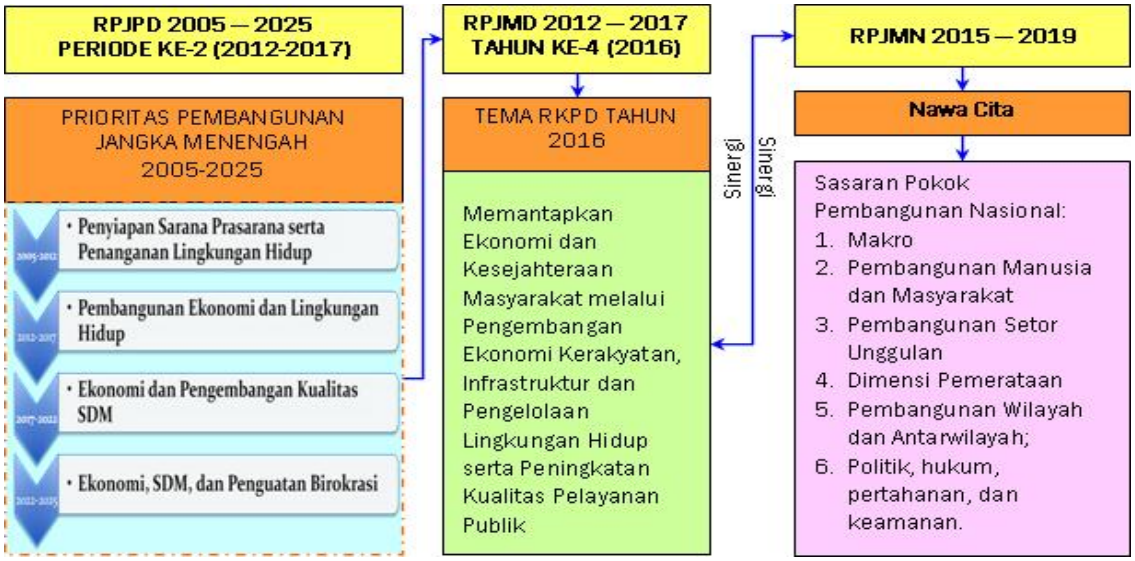


### 4.1.2 Perumusan Prioritas Pembangunan

Sebagai upaya untuk memantapkan arah dan tujuan pembangunan pada Tahun 2016 diidentifikasi terdapat prioritas lainnya yang menjadi permasalahan dan perlu dilaksanakan yaitu:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. percepatan pembangunan daerah;
3. iklim investasi yang kondusif;
4. keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara; serta,
5. pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2012-2017 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Selanjutnya penyusunan prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan daerah, selanjutnya dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun 2016. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1) pencapaian prioritas pembangunan nasional, seperti terhadap MDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan berkelanjutan program;

2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;

3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan

4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2016. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi kriteria *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro sustainable/ environment;*

2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2012-2017;

4) Merupakan respon relevan terhadap isu stategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2016;

5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;

6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan

7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

## 4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapai visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017, maka pembangunan daerah Tahun 2016 diarahkan pada upaya mengevaluasi kinerja program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merata di semua kawasan, sinkronisasi pembangunan antaralevel pemerintahah daerah, dan memantapkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, dan kualitas layanan pemerintahan yang semakin baik. Tahun keempat juga diarahkan untuk pengembangan potensi lokal, peningkatan kapasitas SDM dan penataan lingkungan hidup serta percepatan penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Untuk melihat hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 2012-2017 disajikan pada Tabel IV.1.

**Tabel IV.1**
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

Visi : *"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan".*

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Misi I : Mengembangkan ekonomi kerakyatan** | 1) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah | 1) Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.<br>2) Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat. |
| | 2) Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung | 3) Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.<br>4) Meningkatnya daya beli masyarakat<br>5) Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran |
| **Misi II : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** | 3) Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan | 6) Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. |
| | 4) Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia. | 7) Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.<br>8) Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.<br>9) Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. |
| **Misi III : Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** | 5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan. | 10) Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.<br>11) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. |
| | 6) Menguatkan kemitraan dan partisipasi aktif antar *stakeholders* dalam pengelolaan lingkungan hidup. | 12) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. |

Visi : *"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan".*

| Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| **Misi IV : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh** | 7) Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi. | 13) Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. |
| | 8) Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh. | 14) Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. |
| **Misi V : Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government** | 9) Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | 15) Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. |

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2017 akan dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yang diharapkan dapat mencapai 9 (Sembilan) tujuan utama yang ditandai dengan 15 (lima) sasaran utama. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari capaian sasaran pembangunan. Adapun target sasaran pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta nasional yang akan dicapai pada Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Gambar IV.4.

Gambar IV.4
Target Sasaran Pembangunan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015/2016

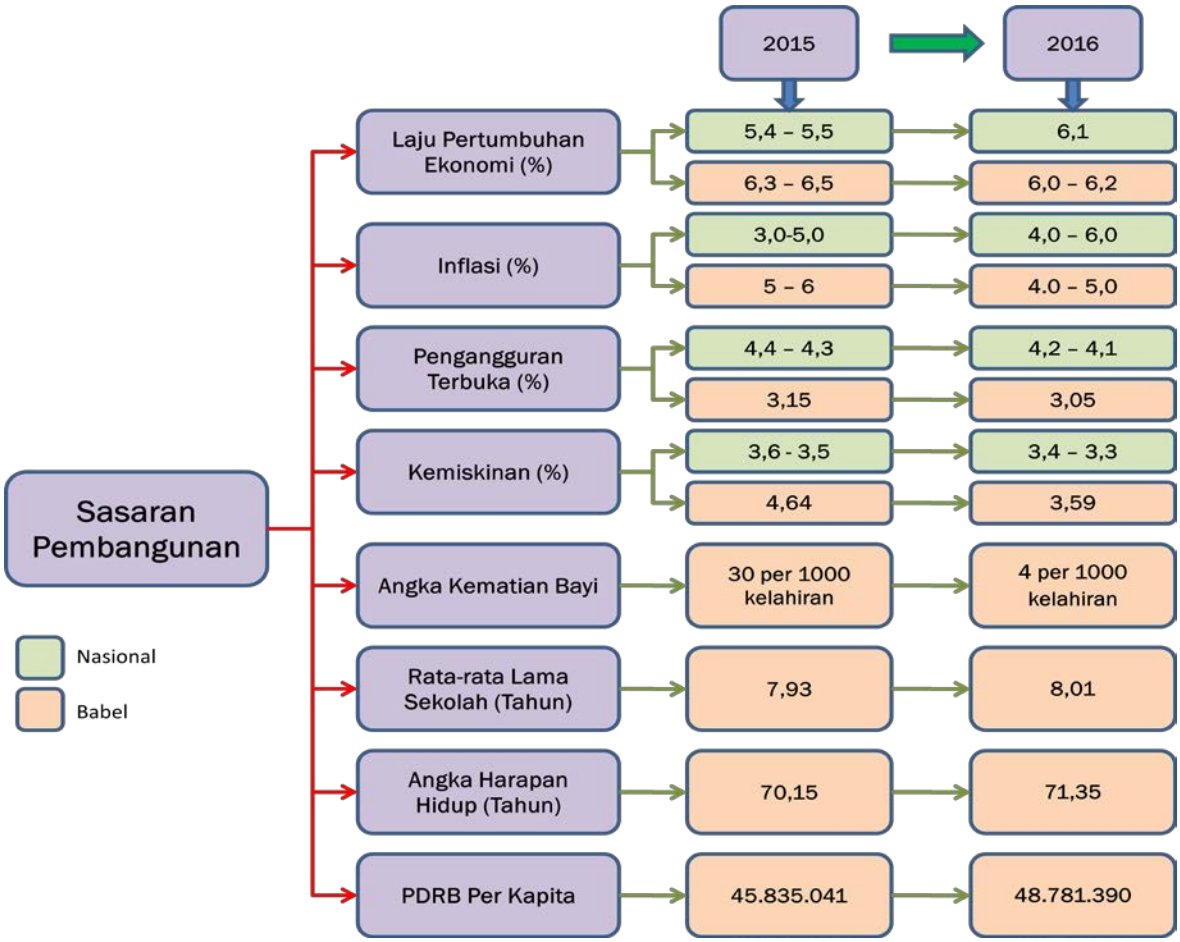


Secara umum, target yang dicanangkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap target sasaran makro pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui dokumen RPJMN 2015-2019 relatif lebih baik. Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah yang dijabarkan didalam dokumen RPJMD. Dokumen RKPD Tahun 2016 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut. Adapun sasaran prioritas dan target sasaran tahun 2016 yang akan dicapai sebagaimana dijabarkan pada Tabel IV.3.

Tabel VI.2
Matriks Indikator Sasaran

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2016 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Persentase Wirausaha Baru (%) | 1128 |
| Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi | Laju Pertumbuhan Ekonomi | 5,3 – 5,6 |
| | PDRB Per Kapita (Rp) | 48.781.390 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2016 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| masyarakat. | Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) | 10 |
| | Pertumbuhan Sektor Peternakan (%) | 10 |
| | Pertumbuhan Sektor Perkebunan (tanaman keras) (%) | 15 |
| | Pertumbuhan Sektor Kehutanan (%) | 10 |
| | Pertumbuhan Sektor Pertambangan (%) | 5 |
| | Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) (%) | 15 |
| | Pertumbuhan Sektor Perikanan (%) | 15 |
| | Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) | 10 |
| | Pertumbuhan Sektor Industri (%) | 10 |
| | Penguatan Cadangan Pangan Provinsi (%) | 22,0 |
| | Indeks Yang Diterima Petani (It) | 129,68 |
| | Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) | 129,48 |
| Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. | Laju Pertumbuhan Investasi (% / Tahun) | 5 |
| Meningkatnya daya beli masyarakat | Daya Beli Masyarakat (Rp) | 652,10 |
| | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) | 21.691.160,4 |
| | Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Rp) | 8.453.146 |
| Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran | Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) | 69,39 |
| | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | 10,45 |
| | Persentase Pengangguran Terbuka (%) | 3,05 |
| Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. | IPM | 74,57 |
| Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (%) | 80 |
| | Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga (%) | 20 |
| | Indeks Pemberdayaan Gender (%) | 69,99 |
| | Indeks Pembangunan Gender (%) | 61,93 |
| | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | 2,5 |
| Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. | Angka melek huruf | 96,21 |
| | Angka rata-rata lama sekolah | 7,93 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI | 95,46 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 66,11 |
| | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA | 51,57 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 112,68 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 92,81 |
| | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA | 81,11 |
| | APS SD/MI | 94,34 |
| | APS SMP/MTs | 64,35 |
| | APS SMA/SMK/MA | 51,52 |
| | Angka Kematian Bayi | 31/1000 |
| | Angka Kematian Balita | 21,27 |
| | Gizi Buruk Balita | 1 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2016 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | Kematian ibu (per 100.000 orang) | 130,48 |
| | Penderita Penyakit Malaria (per 1000) | 2,7 |
| | Prevelensi HIV (orang) | 3,61 |
| | Penderita DBD (per 100.000 orang) | 12,64 |
| | Jumlah Puskesmas (unit) | 67 |
| | Jumlah Posyandu (unit) | 1.050 |
| | Jumlah Dokter Se Bangka Belitung (orang) | 587 |
| | Angka Harapan Hidup (Tahun) | 71,35 |
| | Cakupan Pelestarian dan Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah (%) | 75,00 |
| | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (orang) | 33.889 |
| Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat (%) | 5 |
| Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. | Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik (Hari) | 360 |
| | Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Kolong (waduk buatan) (%) | 70 |
| | Cakupan Penurunan Beban Pencemaran Air Limbah Industri (%) | 16 |
| Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. | Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%) | 25 |
| Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. | Ketaatan terhadap RTRW | 110 |
| | Rasio Ruang Terbuka Hijau | 25 |
| Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 0,69 |
| | Panjang jalan dilalui roda 4 | 0,72 |
| | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 3,66 |
| | Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus | 22,00 |
| | Rasio daya tersambung pada rumah tangga | 66,98 |
| | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 71,60 |
| | Persentase Penduduk berakses air bersih (%) | 80 |
| | Jumlah Penerapan Energi Alternatif (unit) | 70,00 |
| | Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi Dasar (%) | 80 |
| | Cakupan Pembinaan Jasa Konstruksi (%) | 80 |
| | Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah (unit) | 4 |
| Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh. | Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%) | 10 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Target Tahun 2016 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Cakupan Penegakan PERDA (%) | 100 |
| | Cakupan Penyelesaian PERDA (%) | 100 |
| | Rasio Kemandirian Daerah (%) | 66 |
| | Cakupan Tindak Lanjut LHP (%) | 78 |
| | Opini Audit BPK | WTP |
| | Skala Kepuasan Masyarakat (skala 1-4) | 3,25 |
| | Skala Komunikasi dan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah (skala 1-7) | 7 |
| | Cakupan Mitigasi Kebencanaan (%) | 70 |
| | Tingkat Partisipasi Pemilih (%) | 72,5 |
| | Indeks Demokrasi Indonesia (peringkat di Indonesia) | 13 |
| | Angka Kriminalitas | 434 |
| | Jumlah unjuk rasa (kali) | 3 |
| | Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) | 85 |

## 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2012-2017. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, yaitu:

1. **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur**, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Secara spesifik prioritas ini dipilih untuk mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 5 RPJMD (Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean goverment*).

2. **Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi,** prioritas ini dipilih sebagai upaya untuk;
   a) Menguatkan kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
   b) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.
   c) Pengembangan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah.
   d) Meningkatkan daya beli masyarakat
   e) Penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan angka pengangguran.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 1 RPJMD (Mengembangkan ekonomi kerakyatan).

3. **Penguatan *rural urban linkages,*** prioritas ini dipilih untuk:
   a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
   b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
   c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.

d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

4. **Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun,** dalam rangka meningkatkan angka melek huruf menjadi 96,11%, angka lama sekolah menjadi 7,84%, angka partisipasi murni (APM) pendidikan 74,88%, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan 98,72%, angka partisipasi sekolah (APS) pendidikan 70,30%. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
   a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
   b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
   c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat Bangka Belitung.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

5. **Peningkatan pelayanan kesehatan**, melalui kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan anak balita dan lansia, pelayanan kesehatan penduduk miskin, peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak, dan pelayanan keperawatan dan kesehatan lainnya. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
   a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
   b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
   c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas kesehatan masyarakat Bangka Belitung.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

6. **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**, dalam upaya menurunkan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Secara umum prioritas ini dilipih untuk :
   a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
   b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
   c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
   d) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

7. **Program SATAM EMAS** (Satu Kecamatan Satu Milyar), melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi masyarakat di kecamatan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
   a) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung.
   b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
   c) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
   d) Meningkatkan kemandirian usaha.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

8. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup**, melalui pengendalian pencemaran dan perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
   a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
   b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

9. **Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang**, melalui pengendalian perusakan linkungan hidup, pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan, peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan koservasi sumberdaya alam. Secara khusus prioritas ini dipilih untuk :
   a) Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
   b) Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

   Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

10. **Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata**, melalui pengembangan kawasan pariwisata, pemberdayaan budaya lokal, pengembangan desa wisata serta peningkatan peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
    a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
    b) Pemenuhan kapasitas dan kualitas pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
    c) Meningkatkan kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

    Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 2 RPJMD (Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

11. **Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah**, melalui perencanaan dan pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh. Secara umum prioritas ini dipilih untuk:
    a) Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
    b) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

    Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD (Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

12. **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil,** melalui pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.

    Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 4 RPJMD

(Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh).

13. **Pengendalian pemanfaatan ruang**, melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Secara umum prioritas ini dipilih untuk pengendalian dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
    Disamping itu, prioritas ini juga untuk mendukung keberhasilan misi 3 RPJMD (Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang).

Bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan utuh dengan perencanaan pembangunan nasional, maka prioritas pembangunan daerah seharusnya mengacu dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam RPJMN 2015-2019 melalui NAWACITA.

Keterkaitan NAWACITA dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan didalam Tabel IV.3:

**Tabel IV.3**
Keterkaitan antara Nawa Cita, Prioritas Daerah dan Sasaran Daerah

| Nawa Cita | Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara | 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | 1. Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. |
| 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya | | |
| 3. Reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya | | |
| 4. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa | 2. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil | 2. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh |
| | 3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah | 3. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. |
| | 4. Pengendalian pemanfaatan ruang | 4. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat |

| Nawa Cita | Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | pemanfaatan ruang. |
| | 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup | 5. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan<br>6. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan |
| | 6. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang, | 7. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan |
| 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. | 7. Peningkatan pelayanan kesehatan | 8. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)<br>9. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. |
| | 8. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, | 10. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.<br>11. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja |
| 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional | 9. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | 12. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.<br>13. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>14. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>15. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>16. Meningkatnya daya beli masyarakat. |
| 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi | 10. Penguatan rural urban linkages | 17. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>18. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>19. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>20. Meningkatnya daya beli masyarakat |

| Nawa Cita | Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | 11. Program SATAM EMAS | 21. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah |
| | | 22. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah |
| | | 23. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja |
| | | 24. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran |
| | | 25. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. |
| 8. Melakukan revolusi karakter bangsa | 12. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, | 26. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)<br>27. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. |
| 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia | 13. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | 28. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah<br>29. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan |

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, maka terlihat bahwa satu prioritas daerah dapat mendukung beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun stakeholder lainnya.

Selain mendukung prioritas daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel IV.4, dalam penentuan prioritas daerah tahun 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan juga arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang di dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 perihal Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016. Arahan Pemerintah Pusat ini selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, maka prioritas lain yang akan dilaksanakan oleh Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 adalah disajikan pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4
Keterkaitan antara Skala Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi

| No | Skala Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Tecapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semagat bela negara.<br><br>. | Mendukung optimalisasi penerapan kurikulum baru Tahun 2013 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, pembangunan, operasional pemeliharaan, rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan alat peraga, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;<br><br>Pemenuhan obat-obatan, pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan masyarakat pada posyandu, puskesmas dan jaringannya, pencegahan penyakit menular (demam berdarah, flu burung, HIV/AIDS), mendukung program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, imunisasi, mengurangi prevalency gizi buruk, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan;<br><br>Penyediaan dan layanan air bersih setiap rumah tangga, penataan MCK, lingkungan kumuh, sanitasi, persampahan, polusi dan pencemaran air, udara dan tanah di perdesaan dan perkotaan;<br><br>Penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk ketersediaan rumah layak huni, menetapkan kebijakan dan strategi dibidang perumahan dan kawasan permukiman, kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun, fasilitasi pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman;<br><br>Pengembangan kepemimpinan pemuda, peningkatan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta menggerakkan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga, pendidikan dan pelatihan keolahragaan, pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat ;<br><br>Penyebarluasan dan penyuluhan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, pengembangan kemitraan media, pengendalian pemberian ijin menara telekomunikasi agar tidak mengganggu kepentingan umum, mendorong pengembangkan e-business pada pelaku usaha kecil dan menengah, pembentukan dan pengembangan media center dalam rangka pengendalian keseimbangan dan pertukaran informasi pemerintahan dan publik, pengendalian dan pengawasan pasca penataan/pembangunan jaringan telekomunikasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat;<br><br>Mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban, kerjasama dengan seluruh aparat keamanan, organisasi |

| No | Skala Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi |
|---|---|---|
| | | kemasyarakatan dalam pencegahan terorisme, konflik sosial, penyebaran idiologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pengembangan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pemahaman terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan, peningkatan pembinaan organisasi sosial, kepemudaan dan kemasyarakatan;<br><br>Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang usaha ekonomi masyarakat desa, peningkatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam bidang pertanian dalam arti luas (peternakan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan), pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan infrastruktur pedesaan (air bersih, jalan desa, pasar desa, MCK, listrik desa, telekomunikasi perdesaan), pelestarian dan pengembanga nilai-nilai budaya, adat istiadat dan semangat gotong royong;<br><br>Penanganan masalah sosial seperti pemberdayaan fakir miskin, anak terlantar, PSK, gelandangan dan pengemis, peningkatan penyediaan fasilitas dan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, mental dan lanjut usia, serta menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pengangguran dan fasilitasi penempatan pada berbagai bidang usaha sesuai dengan keahlian;<br><br>Perlindungan terhadap cagar budaya, perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan benda cagar budaya, pengembangan pemanfaatan kesenian tradisional, penyelenggaraan dan pengelolaan museum daerah, peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga adat, seni dan budaya daerah;<br><br>Mendorong peningkatan peranan perempuan berpartisipasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya mencapai 30% keterwakilan perempuan, perlindungan terhadap perempuan yang responsif gender berupa pemberdayaan, pelayanan kesehatan, mental spiritual, pendidikan, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi dan jual beli anak dan remaja (trafficking), kekerasan seksual;<br><br>Dukungan operasional jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, penyediaan sarana, alat, obat dan cara penggunaan kontrasepsi, penyuluhan keluarga sejahtera, pemberian dukungan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditiktif (NAPZA); |
| 2 | Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian lahan pertanian, | Penyediaan dan pengendalian ketersediaan pupuk, bibit, obat-obatan pembasmi hama dan sarana produksi pertanian serta peningkatan intensitas tenaga penyuluh pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pencegahan alih fungsi lahan pertanian, pengembangan keanekaragaman produk pertanian, |

| No | Skala Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi |
|---|---|---|
| | pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. | identifikasi kebutuhan ketersediaan pangan;<br><br>Penataan ruang dan lingkungan hidup dalam upaya pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan pengamanan kawasan lindung, sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan struktur ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; |
| 3 | Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardes dan pingiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah | Mendorong, melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang perizinan secara cepat, mudah dan murah;<br><br>Pengembangan usaha ekonomi masyarakat berupa kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen usaha serta pemasaran, pemberdayaan koperasi melalui penciptaan usaha simpan pinjam, pemberdayaan UKM dalam menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan UKM;<br><br>Mendorong peningkatan kegiatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha yang bersifat padat karya untuk mengurangi angka pengangguran dalam rangka pengentasan kemiskinan, pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja, pengawasan pelaksanaan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan kerja, serta penerbitan rekomendasi perijinan magang ke luar negeri, pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan kerja; |
| 4 | Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektivitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. | Penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur, jaringan irigasi, waduk dan situ, jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kantong-kantong produksi serta membuka keterisolasian untuk kelancaran arus barang dan orang dalam upaya menekan ekonomi biaya tinggi, pembangunan dan penataan pasar tradisional;<br><br>Pengendalian pemberian ijin trayek angkutan mempertimbangkan aspek kelayakan, daya dukung, kemampuan, sarana prasarana perhubungan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas, kemudahan akses antar moda angkutan umum, meningkatkan konektivitas melalui peningkatan kapasitas transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau kecil dan terpencil. |

| No | Skala Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi |
|---|---|---|
| 5 | Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing | Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, percepatan pembangunan daerah, iklim investasi yang kondusif, keseimbangan pembangunan antar daerah/wilayah dan negara serta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maka kegiatan prioritas lainnya yang perlu dirumuskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, penanganan gangguan keamanan dalam negeri, pembangunan perbatasan antar negara, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan wilayah, pengembangan ekonomi daerah, penataan perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan. |

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penentuan prioritas daerah juga harus memperhatikan dan selaras dengan arahan RPJMD 2012-2017, sehingga harus terdapat keterkaitan dan hubungan antara prioritas daerah tahun 2016 dengan prioritas jangka menengah daerah 2012-2017.

Keterkaitan/korelasi prioritas RPJMD dan prioritas pembangunan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel IV.5.

**Tabel IV.5**
Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2012-2017 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016

| Prioritas Tahun 2012-2017 (RPJMD) | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 |
|---|---|
| (1) | (2) |
| **1. Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan koperasi komoditi** | 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. |
| **2. Penguatan *rural urban linkages*** | 2. Pengembangan *One Village One Product* (OVOP) dan koperasi komoditi |
| **3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah** | 3. Penguatan *rural urban linkages* |
| **4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup** | 4. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun |
| **5. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang** | 5. Peningkatan pelayanan kesehatan |
| **6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil** | 6. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan |
| **7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | 7. Program SATAM EMAS |
| **8. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup |
| **9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan** | 9. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang |
| **10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | 10. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata |
| **11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi** | 11. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan |

| Prioritas Tahun 2012-2017 (RPJMD) | Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 |
|---|---|
| wisata | konektivitas antar wilayah |
| 12. Pengendalian pemanfaatan ruang | 12. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil |
| 13. Program SATAM EMAS. | 13. Pengendalian pemanfaatan ruang |

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, secara umum prioritas RPJMD sama dengan prioritas RKPD, yang berbeda hanya urutan beberapa prioritas. Hal ini terkait sebagai upaya untuk penyelesaian beberapa isu strategis. Bahwa salah satu pendekatan yang digunakan didalam penyusunan dokumen perencanaan adalah pendekatan teknokratik, maka didalam penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2016, dilakukan dengan menggunakan alat analis *Analitical Hierarchy Prosess* (AHP). Dengan menggunakan AHP inilah yang kemudian menentukan urutan prioritas sebagaimana table diatas.

Selain hal tersebut. pemilihan prioritas daerah sangat terkait dengan upaya pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti MDGs, SPM, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaaan serta keberlanjutan program. Oleh karenanya, didalam dokumen RKPD Tahun 2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk mengarahkan prioritas daerah yang sejalan dan relevan dengan upaya dan arahan pemerintah pusat didalam untuk mencapai sasaran dari kebijakan nasional. Penetapan prioritas pembangunan daerah dijabarkan lebih lanjut melalui strategi-strategi yang implementatif untuk dilaksanakan.

Guna menjaga keselarasan dan keterkaitan antara prioritas dan sasaran daerah dengan sasaran yang harus dicapai oleh SKPD sebagai ujung tombak pelaksana program kegiatan yang telah direncanakan, maka dirumuskan keterkaitan antara Prioritas dan Sasaran Daerah denga Sasaran SKPD sebagaimana tergambar pada tabel IV.6.

**Tabel IV.6**
Keterkaitan Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Sasaran SKPD
Pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Meningkatkan kepuasan pelayanan birokrasi, serta terciptanya pemerintah yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik |
| | | Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme dalam rangka peningkatan mutu layanan yang terstandar nasional |
| | | Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan formal |
| | | Terlaksananya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis ketrampilan dan atau keahlian |

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Terwujudnya peningkatan etos kerja dan karier aparatur pemerintah daerah melalui pembinaan karier/promosi jabatan |
| | | Terlaksananya penempatan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. |
| | | Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi |
| | | Terlaksananya pembinaan aparatur pemerintah daerah melalui penegakan disiplin aparatur pemerintah daerah dan penerapan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin pegawai. |
| | | Terwujudnya kesejahteraan aparatur pemerintah daerah melalui pemberian tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai yang berbasis Kinerja |
| 2. **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil** | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh | Meningkatnya pengelolaan dan pemberdayaan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sasaran adalah peningkatan pemanfaatan potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal dan lestari |
| | | Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. |
| 3. **Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah** | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. | Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. |
| | | Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulan dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitas kota dan desa barbasis potensi local |
| 4. **Pengendalian pemanfaatan ruang** | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. | Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produkstif dan terkendali |
| | | Implementasi dan pengembangan rencana yang terdapat dalam dokumen RTRW, penyusunan RDTR kawasan serta pembangunan RTH kota dan perkotaan |

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 5. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup** | Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan | Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sumber air,tanah dan udara; |
| | Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanrkaragaman hayati dan ekosistem hutan; |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| | | Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi dan sinergi dengan kabupaten / kota. |
| | | Meningkatnya pelayanan publik melalui penyediaan data/informasi, sarana dan prasarana penunjang, kapasitas sumber daya manusia serta tata kepemerintahan yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. |
| | | Meningkatkan upaya penegakan hukum bidang lingkungan. |
| 6. **Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang,** | Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Terlaksananya kegiatan reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan penghijauan (di luar kawasan hutan) |
| | | Terwujudnya pemulihan hutan dan lahan kritis secara bertahap sebagai bagian dari Gema Tri Karsa Utama/Green Babel |
| | | Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan; |
| 7. **Peningkatan pelayanan kesehatan** | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) | Meningkatnya upaya pembinaan dalam penanggulangan gizi kurang (KEP, anemia, gizi besi,GAKY dan KVA) |
| | Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian factor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui Imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra |
| | | Meningkatnya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan, higiene sanitasi pengolahan makanan dan minuman industri rumah tangga. |

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya penanganan medik keperawatan dan kefarmasian pada puskesmas dan rumah sakit dalam rangka menerapkan standar pelayanan minimal |
| | | Meningkatnya pembinaan kesehatan komunitas, kestrad dan olahraga serta penerapan PHBS untuk merubah prilaku dan kemandirian masyarakat |
| | | Meningkatnya pembinaan kesehatan ibu anak, kespro , dan KB dalam upaya pelayanan kesehatan dasar untuk penanggulangan AKI dan AKB |
| | | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum |
| | | Meningkatkan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang terjangkau |
| 8. **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,** | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Dukungan pengentasan kemiskinan melalui pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan |
| | | Terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan pertanian. |
| | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja. |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Sebanyak 1260 Unit |
| | | Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sebanyak 40 Unit Usaha |
| | | Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh Koperasi 1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang |
| 9. **Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Bertambahnya Koperasi 105 Unit (Perdesaan 70 Unit Dan Perkotaan 35 Unit); Dan 17.500 Unit UMKM |
| | Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah | Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas 166 Unit (Sehat 75 Kop, Kelas A 25 Kop Dan Kelas B 31 Kop, Mandiri 25 Kop Dan Tangguh 10 Kop) |
| | Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran | Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditampung Oleh Koperasi 1.000 Orang Dan UMKM 105.000 Orang |
| | | Terwujudnya 125 Kumkm Yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau |

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | Terkajinya produk komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| 10. **Penguatan rural urban linkages** | Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah | Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah |
| | Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran | Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pusat kegiatan wilayah serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. |
| | | Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulan dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergi dan konektivitas kota dan desa barbasis potensi local |
| | | Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa; |
| 11. **Program SATAM EMAS** | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah | Bertambahnya Koperasi 105 Unit (Perdesaan 70 Unit Dan Perkotaan 35 Unit); Dan 17.500 Unit UMKM |
| | | Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Sebanyak 1260 Unit |
| | | Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah Sebanyak 40 Unit Usaha |
| | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah |
| | | Mengembalikan kejayaan lada putih |
| | | Meningkatkan luas areal tanam lada seluas 23.243 ha sampai tahun 2017 |
| | | Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan sasaran adalah peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan |
| | | Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan sasaran adalah peningkatan produksi perikanan budidaya baik dalam volume maupun nilai ikan hasil budidaya |
| | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja. |
| | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Terlibatnya masyarakat dalam proses pembangunan pertanian. |

| Prioritas Daerah 2016 | Sasaran Daerah | Sasaran SKPD |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 12. **Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun,** | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) | Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan usia dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. |
| | Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. | Tersedia dan Terjangkaunya layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. |
| | | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. |
| | | Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan non formal yang berkualitas bagi seluruh masyarakat |
| | | Tersedianya sistem tata kelola pendidikan yang berkualitas, |
| | | Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya. |
| 13. **Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata** | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap PDRB |
| | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja daerah |
| | | Meningkatnya pengeluaran wisatawan di Bangka Belitung |
| | | Meningkatnya citra kepariwisataan daerah |
| | | Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata |
| | | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang berkualitas. |

## 4.4. Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan

### 4.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 disusun dengan telah memperhatikan tujuan dari pencapaian MDG's, sehingga apa yang telah diprioritaskan secara langsung merupakan upaya dari pencapaian tujuan MDG's itu sendiri. Demikian halnya dengan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 yang secara umum sama dengan prioritas jangka menengah.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan MDG's adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel IV.7.

**Tabel IV.7**
Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Tujuan MDGs

| | |
|---|---|
| **Memberantas kemiskinan dan kelaparan** | • Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi<br>• Penguatan rural urban linkages<br>• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>• Program SATAM EMAS |
| **Mencapai pendidikan dasar untuk semua** | • Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun<br>• Program SATAM EMAS |
| **Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan** | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>• Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata |
| **Menurunkan angka kematian anak** | • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan |
| **Meningkatkan kesehatan ibu** | • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan |
| **Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya** | • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan |
| **Menjamin kelestarian lingkungan hidup** | • Peningkatan kualitas lingkungan hidup<br>• Pengendalian pemanfaatan ruang<br>• Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang<br>• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil<br>• Program SATAM EMAS |
| **Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan** | • MDGs 8 memuat kewajiban yang harus dilakukan negara maju agar negara berkembangan dapat mencapai tujuh goal MDGs. |

Selanjutnya, prioritas dalam mendukung pencapaian target MDGs/SDGs tersebut diimplementasikan kedalam suatu strategi yang konkrit oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, antara lain:

1. Membentuk Kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan SKPD yang terkait langsung dengan pencapaian target-target MDGs.
2. Mengintegrasikan target-target indicator pencapaian MDGS sebagai indicator kinerja perencanaan penganggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Target MDGs dijadikan sebagai program prioritas daerah, sebagai salah satu dasar penyusunan arah APBD.
3. Menerapkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah untuk program-program pencapaian MDGs yang meliputi Penanggulangan Kemiskikan, Pengurangan Gizi Buruk dan Kurang, Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Bayi, Penanganan HIV dan Sanitasi.
4. Mengalokasikan Dana Bantuan Kepada Kabupaten/Kota berdasarkan target-target pencapaian MDGs. Besarnya Dana Bantuan tersebut dirumuskan berdasarkan variable

tingkat rendahnya pencapaian target MDGs untuk mengatasi kesenjangan pencapaian target MDGs antar Kabupaten/Kota.

5. Memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten/Kota yang pencapaian target MDGs-nya dibawah rata-rata Provinsi.
6. Memberikan insentif fiskal bagi Kabupaten/Kota yang mampu mencapai target MDGs yang menyeluruh.
7. Mensinergikan anggaran penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran kemiskinan yang ada.
8. Mengimplementasikan anggaran responsive gender dan *pro poor budget* dalam perencanaan penganggaran di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APDB.
10. Memperbaiki *system database* kependudukan sebagai basis data pencapaian indicator MDGs dan penggunaan data terpilah berdasarkan gender.

### 4.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan untuk mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi
   1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
   2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
   3) Pemanfaatan teknologi bagi apartur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
   4) Pemberian kemudahan akses insfrasruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan
   1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
   2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
   3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman *melalui pemanfaatan teknologi informas.*
   4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

Strategi dan kebijakan tersebut, merupakan implementasi dari prioritas daerah yang dicanangkan dalam pencapaian SPM. Korelasi antara SPM dengan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 terlihat pada table IV.8:

**Tabel IV.8**
Korelasi Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Mendukung Pelaksanaan SPM

| No. | Standar Pelayanan Minimum | Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012–2017 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Bidang Kesehatan | • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan<br>• Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan |
| 2 | Bidang Sosial*) | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>• Program SATAM EMAS |
| 3 | Bidang Lingkungan Hidup*) | • Peningkatan kualitas lingkungan hidup<br>• Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang |
| 4 | Bidang Pemdagri (revisi) | • Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur. |
| 5 | Bidang Perumahan Rakyat*) | • Program SATAM EMAS<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil |
| 6 | Bidang PP & PA*) | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan |
| 7 | Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan |
| 8 | Bidang Pendidikan Dasar | • Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun<br>• Program SATAM EMAS |
| 9 | Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang | • Penguatan *rural urban linkages*<br>• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil<br>• Pengendalian pemanfaatan ruang |
| 10 | Ketenagakerjaan*) | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan |
| 11 | Kominfo | • Penguatan *rural urban linkages*<br>• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil |
| 12 | Ketahanan Pangan*) | • Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi<br>• Penguatan rural urban linkages<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil<br>• Program SATAM EMAS |
| 13 | Kesenian*) | • Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan |

| No. | Standar Pelayanan Minimum | Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012–2017 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | kemiskinan<br>• Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata |
| 14 | Perhubungan*) | • Penguatan rural urban linkages<br>• Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil |
| 15 | Penanaman Modal*) | • Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur.<br>• Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi<br>• Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil |

*Keterangan : *) diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota*

### 4.4.3 Strategi dan Arah Kebijakan untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Selain mendukung pencapaian MDGs dan SPM, dokumen RKPD Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memuat upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dampak dari gejolak ekonomi global saat ini telah dirasakan oleh Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung terus menunjukkan perlambatan. Oleh karenanya, diperlukan strategi dan kebijakan khusus dalam rangka meningkatkan dan menjaga pertumbuhan ekonomi itu sendiri baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah yang dilaksanakan secara simultan.

Beberapa strategi dan arah kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses permodalan kepada masyarakat, meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta efisiensi pasar tradisional, dengan arah kebijakan:
    a. Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM dan kelembagaan ekonomi lainnya;
    b. Perluasan aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat.
    c. Peningkatan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK;
    d. Peningkatan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta kerjasama perdagangan;
    e. Pengembangan promosi produk-produk unggulan daerah;
    f. Pengembangan program CSR/CD dalam mendukung perekonomian bangka belitung termasuk pengembangan pariwisata.
2. Mempersiapkan SDM sebagai utama berkembangnya ekonomi kerakyatan, dengan arah kebijakan, meningkatkan kapasitas SDM, baik masyarakat maupun SDM Aparatur.

3. Mengembangkan desa yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru, dengan arah kebijakan:

   a. Pembentukan OVOP;
   b. Pengembangan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian dan pariwisata provinsi kepulauan bangka Belitung;
   c. Pengembangan desa mandiri pangan;
   d. Pengembangan kawasan integrasi ternak dan tanaman;
   e. Pengembangan desa mandiri energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata;
   f. Peningkatan aksesbilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan perkotaan;
   g. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
   h. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
   i. Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi batu terbarukan;
   j. Pengembangan ruang usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi mitan ke LPG 3 Kg.

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal dan daerah perbatasan, dengan arah kebijakan:

   a. Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah;
   b. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
   c. Pemerataan akses teknologi dan informasi sampai ke daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat serta mendukung perkembangan pariwisata;
   d. Pemenuhan energi di pulau-pulau kecil untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata.

5. Menetapkan dan mengembangkan kawasan berbasis ekonomi, dengan arah kebijakan:

   a. Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Berikat (Bangka Tengah) dan Tanjung Batu (Belitung);
   b. Rintisan pelabuhan tanjung berikat tanjung batu sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus'
   c. Peningkatan dan pengembangan kawasan KTM Batu Betumpang sebagai upayah untuk menciptakan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

### 4.4.4 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menetapakan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, telah disusun roadmap dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan daerah, sebagai berikut:

**Misi I: Mengurangi disparitas tingkat kemiskinan antara desa dan kota**, dengan Strategi:

1. Meringankan pengeluaran masyarakat miskin di desa dan perkotaan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Pemberian beras gratis kepada masyarakat miskin di desa dan perkotaan;
2. Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Pemberian keringanan harga kepada masyarakat miskin yang masuk dalam katagori desil 1, 2, dan 3;
3. Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran dan fungsi sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 1 di pedesaan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 1 di Pedesaan;
4. Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran dan fungsi sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 2 di pedesaan dan Perkotaan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 2 di Pedesaan dan Perkotaan;
5. Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran dan fungsi sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 3 di perkotaan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin yang masuk katagori desil 3 di Perkotaan;
6. Meningkatkan Pemberdayaan perempuan miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Kesejahteraan bagi Kepala Keluarga Perempuan miskin;
7. Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran dan fungsi sosial bagi penduduk miskin yang lanjut usia. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin yang lanjut usia;
8. Meningkatkan kemampuan melaksanakan peran dan fungsi sosial bagi penduduk miskin dengan kecacatan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pemberdayaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dengan kecacatan;
9. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kewirahusahaan bagi pemuda miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan pemberdayaan, pengembangan kepemimipinan dan kewirausahaan Pemuda miskin;
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk dalam jamkesmas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan: Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin yang tidak masuk dalam jamkesmas.

**Misi II: Mempercepat pengentasan kemiskianan multidimensi bidang pendidikan**, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut:

1. Menurunkaan angka drop out siswa/siswi SMP/MTs Miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan alokasi beasiswa bago penduduk miskin umur 12-15 tahun yang bersekolah SMP/MTs;
2. Menurunkaan angka drop out siswa/siswi SMA/MA Miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan alokasi beasiswa bagi penduduk miskin umur 12-15 tahun yang bersekolah SMA/MA;
3. Meningkatkan angka melanjut SMP/MTs bagi siswa/siswi miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan aloksi besiswa formal dan belajar paket B bagi penduduk miskin umur 12-15 tahun yang tidak bersekolah;
4. Meningkatkan angka melanjut SMA/MA bagi siswa/siswi miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan aloksi besiswa formal dan belajar paket C bagi penduduk miskin umur 16-18 tahun yang tidak bersekolah;
5. Menurunkaan angka drop out siswa/siswi SD Miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan alokasi beasiswa bagi penduduk miskin umur 12-15 tahun yang bersekolah SMA/MA;
6. Meningkatkan angka melanjut SD/MI bagi siswa/siswi miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan aloksi besiswa formal dan belajar paket A bagi penduduk miskin umur 6-12 tahun yang tidak bersekolah;
7. Menurunkan angka Buta Aksara bagi penduduk miskin usia 15-44. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan partisiapasi pendidikan non formal bagi penduduk miskin usia 15-44 tahun.

**Misi III: Mengoptimalkan pengentasan kemiskinan multi dimensi bidang kesehatan**, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut :

1. Menyeimbangkan antara rasio bidan dan jumlah penduduk. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, penambahan jumlah bidan pada daerah yang rasio jumlah bidan dan jumlah penduduk yang belum terpenuhi;
2. Meningkatkan kesahatan bagi balita miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi balita miskin;
3. Meningkatkan kesehatan ibu melahirkan dan anak bagi masyarakat miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang hamil dan melahirkan;
4. Meningkatkan kesehatan masyarakat miskin yang menderita penyakit kronis. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang menderinta penyakit kronis.

**Misi IV: Mempercepat penurunan tingkat pengganguran dalam pengentasan kemiskinan**, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas penduduk miskin yang bekerja sebagai pekerja. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan daya saing dan produktivitas masyarakat miskin yang bekerja sebagai pekerja;
2. Mengembangakan wirausaha baru bagi penduduk miskin yang bekerja sendiri. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, penciptaan wirausaha baru dari penduduk miskin yang bekerja sendiri;
3. Penduduk miskin yang bekerja bebas. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan , peningkatan Pelayanan penempatan dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk miskin yang bekerja bebas.

**Misi V: Memaksimalkan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat Miskin**, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatakan kesadaran masyarakat miskin terhadap sanitasi yang layak. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan akses dan pembinaan kepada rumah tangga miskin yang tidak mempunyai tempat buang air besar;
2. Meningkatkan akses dan sarana parasarana air minum bagi rumah tangga miskin yang tidak menggunakan air tidak terlindungi untuk air minum. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan akeses dan sarana prasarana air minum bagi rumah tangga miskin yang tidak menggunakan air tidak terlindungi untuk air minum;
3. Meningkatkan produktifitas dan pemerataan pemanfaatan energi bagi masyarakat miskin. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pemerataan pemanfaatan energi bagi masyarakat miskin.

**Misi VI: Mensinergikan pengetasan kemiskinan lintas sektor dalam peningkatan perekonomian**, ditempuh melalui Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor perkebunan Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatkan pemberdayaan kepada kelompok tani miskin yang bekerja disektor perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan;
2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor pertanian tanaman padi dan palawija. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan , peningkatkan pemberdayaan kepada kelompok tani miskin yang bekerja disektor pertanian tanaman padi dan palawija dalam meningkatkan produksi komoditi pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor Hortikultura. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatkan pemberdayaan kepada kelompok tani miskin yang bekerja disektor Hortikultura dalam meningkatkan komoditi hortikultura;
4. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor peternakan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatkan pemberdayaan kepada kelompok tani miskin yang bekerja disektor Peternakan dalam meningkatkan produksi peternakan unggas;

5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor Kehutanan/pertanian lainnya. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatkan pemberdayaan kepada kelompok tani hutan miskin dalam mengembangkan hasil hutan kayu dan pembangunan hutan kemasyarakatan;
6. Meningkatkan kulitas dan produktifitas Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Pertambangan/penggalian. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pembinaan kepada Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Pertambangan/penggalian;
7. Meningkatkan produktiftas Kepala kelurga miskin yang bekerja di sektor hotel dan rumah makan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pembinaan kepada kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor hotal dan rumah makan;
8. Meningkatkan kulitas dan produktifitas Kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan. . Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, pembinaan kemampuan kepala keluarga miskin yang bekerja disektor transportasi dan pergudangan;
9. Meningkatkan informasi berkaitan dengan semua masalah kemiskinan di masyarakat. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan keikutsertaan masyarakat miskin dalam dalam menginformasikan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan di masyarakat;
10. Menigkatkan kesejahteraan kelompok Tani Budidaya ikan yang anggotanya kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor perikanan Budidaya . Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pengembangan perikanan Budidaya bagi kelompok nelayan yang anggotanya kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor perikanan tangkap;
11. Menigkatkan kesejahteraan kelompok nelayan yang anggotanya kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor perikanan tangkap. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pengembangan perikanan tangkap bagi kelompok nelayan yang anggotanya kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor perikanan tangkap;
12. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil komoditas keluatan dan perikanan bagi kelompok nelayan miskim. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan bagi kelompok nelayan miskin;
13. Meningkatkan Produktivitas kualitas dan hasil Produksi industri kecil dan menengah. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan Pembinaan kepada kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Industri Pengolahan dalam meningkatkan hasil produksi IKM;
14. Meningkatkan jumlah industri yang berbasis SDA yang terbangun. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan Pembinaan kepada kepala keluarga miskin yang bekerja di sektor Industri Pengolahan dalam meningkatkan Jumlah Industri yang berbasisi SDA;
15. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat miskin yang bekerja disektor perdagangan. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatkan Pembinaan kepada kepala kelurga miskin yang bekerja disektor perdagangan dalam meningkatkan hasil perdagangan;

16. Mensinergikan seluruh program penanggulangan kemiskinan baik yang besumber dana APBD maupun APBN. Strategi ini akan dilaksanakan melalui kebijakan, peningkatan kualitas koordinasi terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan baik berseumber APBD maupun APBN (Kluster 1,2 dan 3).

### 4.4.5 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Penciptaan Lapangan Kerja.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan. Strategi disusun secara umum untuk menjadi panduan bagi satuan kerja pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan evaluasi agenda-agenda pembangunan.

Adapun strategi penciptaan lapangan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Mengarahkan kebijakan makro, sektoral dan spasial yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan. Dalam upaya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan diperlukan dukungan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorentasi pada kepentingan pekerja dan perluasan lapangan kerja dengan didukung penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja.
2. Penciptaan lapangan kerja langsung yang mewadahi kepentingan masyarakat pekerja. Dalam era pembangunan saat ini, manusia khususnya sebagai objek tenaga kerja produktif yang semula dipandang objek pembangunan berkiprah lebih luas menjadi pelaksana, pemanfaat dan penentu pembangunan. Pandangan baru yang melihat tenaga kerja sebagai sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kemampuan merubah hubungan industrial antara pemilik modal (pengusaha) dengan pekerja kearah kemitraan. Dengan demikian, maka perkembangan suatu kegiatan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan pekerja.
3. Mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas.Dalam era persaingan yang semakin ketat, upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja sangat dibutuhkan. Kebijakan tersebut diupayakan melalui peningkatan efesiensi dan produktifitas disetiap sektor ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang dinamis yang didukung nasional maupun internasional.
4. Pemberian perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan perlindungan bagi pekerja perlu diberikan selaras dengan arah pembangunan sistem hubungan industrial yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat industri yang langsung terlibat dalam proses produksi, perluasan jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat – syarat pekerja yang berkualitas.

### 4.4.6 Strategi dan Arah Kebijakan untuk Mendukung Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Demikian halnya dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016. Adapun strategi dan kebijakan yang akan diimplementasikan adalah:
Strategi meliputi:

1. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
   a. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial
   b. Mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh semua
   c. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
   d. Mewujudkan ruang-ruang publik untuk memacu dan mendorong aktifitas dan kreatifitas
2. Pemanfaatan SDA dan lingkungan yang seimbang dan berkelanjutan, dengan arah kebujakan:
   a. Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan
   b. Mengoptimalkan Pemanfaatan SDA

## 4.5. Prioritas dan Strategi Pembangunan Kewilayahan

### 4.5.1 Aspek Kewilayahan yang Mendukung Prioritas Nasional

Percepatan pembangunan infrastruktur dalam aspek pengembangan kewilayahan prioritas nasional 2015-2019 wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan dalam Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional sebagaimana yang disajikan pada tabel IV.9.

**Tabel IV.9**
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| | |
|---|---|
| **PERHUBUNGAN UDARA** | |
| 1. | Pengembangan Bandara H.A.S Hananjoeddin |
| 2. | Pengembangan Bandara Depati Amir |
| **PERHUBUNGAN LAUT** | |
| 1. | Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat - Bangka Tengah |
| 2. | Pengembangan Pelabuhan Muntok - Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka Ruas Tj. Batu - Manggar (P. Belitung) |
| 3. | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan* (menjadi entry point masuknya yacht) |
| 4. | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu |
| 5. | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang |
| 6. | Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai |
| 7. | Pengembangan Pelabuhan Balam |
| 8. | Pengembangan Pelabuhan Manggar |
| 9. | Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular |
| 10. | Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian |
| **JALAN** | |
| 1. | Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul |
| 2. | Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu |

| | |
|---|---|
| 3. | Pembangunan Jalan Tanjung Kelian - Petaling - Pangkalpinang |
| 4. | Pembangunan Jalan Petaling - Namang - Toboali |
| 5. | Pembangunan Jalan Koba - Lubuk Besar - Tanjung Berikat |
| 6. | Pembangunan Jalan Mendukung KSPN Belitung |
| **ASDP** | |
| 1. | Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar |
| 2. | Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mendanau |
| 3. | Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tjg. Ru |
| 4. | Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Manggar |
| 5. | Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Liat |
| **KETENAGALISTRIKAN** | |
| 1. | PLTG/MG Bangka Peaker 100 MW |
| 2. | PLTG/MG Mobile PP Bangka (Air Anyir) 50 MW |
| 3. | PLTG/MG Belitung Peaker 30 MW |
| 4. | Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi |
| 5. | Pembangunan PLTS di Pulau-Pulau Kecil |
| 6. | Pembangunan Instalasi Listrik di Pulau Karantina (P. Naduk- Belitung) |
| **TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | |
| 1. | Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota |
| 2. | Pengembangan transmisi penyiaran TVRI |
| **SUMBER DAYA AIR** | |
| 1. | Pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur Belitung Timur |
| 2. | Rehab Jaringan D.I Selingsing PKT I Belitung Timur |
| **PENDIDIKAN** | |
| 1. | Pembentukan Fak. Kedokteran Univ. Bangka Belitung |
| 2. | Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan Univ. Bangka Belitung |
| 3. | Peningkatan status STAIN Abdurrahman Sidiq menjadi IAIN Abdurrahman Sidiq |
| 4. | Pengembangan Institusi Riset yang fokus pada Pengelolaan Logam Tanah Jarang |
| 5. | Pengembangan Technopark berbasis Lada di Air Gegas (bangka Selatan) |
| 6. | Pengembangan Technopark berbasis Bahan Tambang di Muntok (Bangka Barat) |
| 7. | Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata |
| **KESEHATAN** | |
| 1. | Pengembangan RSUP Soekarno |
| 2. | Pengadaan sarana prasarana RSUD H. Mursidi Joedono,Pengadaan sarpras RSUD Depati Hamzah |

### 4.5.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

#### 4.5.2.1 Rencana Pola Ruang

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi : kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya; dan kawasan rawan bencana alam.

A. Penetapan Kawasan Lindung

1. Kawasan hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten meliputi:
   a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 28.589 (dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Hektar;
   b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 15.736 (lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam) Hektar;
   c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 32.226 (tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam) Hektar;
   d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 28.234 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat) Hektar;
   e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 39.306 (tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam) Hektar; dan
   f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 45.874 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) Hektar.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.
3. Kawasan perlindungan setempat meliputi:
   a. sempadan pantai yang terdapat seluruh wilayah Provinsi;
   b. sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di Provinsi;
   c. kawasan sekitar danau/waduk, berupa kolam bekas pertambangan yang disebut kolong;
   d. kawasan sempadan mata air yang menyebar di seluruh wilayah Provinsi; dan
   e. kawasan terbuka hijau kota, yang menyebar di kawasan perkotaan dan bukan perkotaan.
4. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya meliputi:
   a. kawasan hutan meliputi : Gunung Lalang dan Gunung Tajam di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing dan Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, dan Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan;
   b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur;
   c. kawasan pantai berhutan bakau terdapat diseluruh Kabupaten/Kota;
   d. taman wisata alam laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur dan Perairan Bangka Selatan; dan
   e. situs dan kawasan cagar budaya tersebar di Kabupaten/Kota.
5. Kawasan rawan bencana alam meliputi:
   a. kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);

b. kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan

c. kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

B. Penetapan Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana tersebar di seluruh Kabupaten meliputi:

   a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 77.841 Ha (tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu hektar);
   b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 65.884 Ha (enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat hektar);
   c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 84.990 Ha (delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh hektar);
   d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 106.154 Ha (seratus enam ribu seratus lima puluh empat hektar);
   e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.377 Ha (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh hektar); dan
   f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 57.638 Ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan hektar).

2. Kawasan peruntukan pertanian seluas 903.450 Ha (sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh hektar) terdiri atas:

   a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas kurang lebih 355.453 Ha (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga hektar);
   b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura dengan luas kurang lebih 221.512 Ha (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua belas hektar);
   c. kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 316.383 Ha (tiga ratus enam belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga hektar); dan
   d. kawasan peruntukan peternakan dengan luas kurang lebih 10.102 Ha (sepuluh ribu seratus dua hektar).

3. Pengembangan kawasan peruntukan tanaman pertanian pangan meliputi:

   a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 36.330 Ha (tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh hektar);
   b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 72.433 Ha (tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga hektar);

c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 11.044 Ha (sebelas ribu empat puluh empat hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 171.350 Ha (seratus tujuh puluh satu tiga ratus lima puluh hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 25.763 Ha (dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga hektar); dan
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 38.473 Ha (tiga puluh delapan empat ratus tujuh puluh tiga hektar).

4. Pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura meliputi:

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 53.116 Ha (lima puluh tiga ribu seratus enam belas hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 33.245 Ha (tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 23.171 Ha (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 52.958 Ha (lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 40.252 Ha (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua hektar); dan
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 18.000 Ha (delapan belas ribu hektar).

5. Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas:

a. Perkebunan Besar meliputi:

1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 30.808 Ha (tiga puluh ribu delapan ratus delapan hektar);
2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 16.590 Ha (enam belas ribu lima ratus sembilan puluh hektar);
3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 4.908 Ha (empat ribu sembilan ratus delapan hektar);
4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 4.329 Ha (empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan hektar);
5) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 35.047 Ha (tiga puluh lima ribu empat puluh tujuh hektar); dan
6) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 33.188 Ha (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektar).

b. Perkebunan Rakyat meliputi:

1) Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 40.120 Ha (empat puluh ribu seratus dua puluh) hektar);
2) Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 45.660 Ha (empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh hektar);
3) Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 34.687 Ha (tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh hektar);
4) Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 30.326 Ha (tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh enam hektar);

5) Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 22.264 Ha (dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat hektar); dan
6) Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 18.456 Ha (delapan belas ribu empat ratus lima puluh enam hektar).

6. Pengembangan peternakan meliputi:

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 791 Ha (tujuh ratus sembilan puluh satu hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 318 Ha (tiga ratus delapan belas hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 7.720 Ha (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 566 Ha (lima ratus enam puluh enam hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 467 Ha (empat ratus enam puluh tujuh hektar);
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 160 Ha (seratus enam puluh hektar); dan
g. Kota Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 80 Ha (delapan puluh hektar).

7. Kawasan peruntukan perikanan dilakukan di seluruh wilayah Provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

a. perikanan tangkap dikembangkan di perairan selat Bangka, perairan utara Pulau Bangka dan Zona Ekonomi Eklslusif (ZEE) Laut Cina Selatan, perairan timur Pulau Bangka dan ZEE Laut Cina Selatan, perairan Selat Gelasa dan selatan Pulau Bangka, perairan utara Pulau Belitung dan ZEE Laut Cina Selatan, dan perairan timur Pulau Belitung;
b. perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

8. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan darat seluas 400.000 Ha (empat ratus ribu hektar) di dalam WP yang menyebar di seluruh kabupaten/kota.
Luasan kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

a. Kabupaten Bangka Barat dengan luas kurang lebih 62.700 Ha (enam puluh dua ribu tujuh ratus hektar);
b. Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 79.900 Ha (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus hektar);
c. Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kurang lebih 55.800 Ha (lima puluh lima ribu delapan ratus hektar);
d. Kabupaten Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 125.700 Ha (seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus hektar);
e. Kabupaten Belitung dengan luas kurang lebih 29.900 Ha (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus hektar); dan
f. Kabupaten Belitung Timur dengan luas kurang lebih 46.000 Ha (empat puluh enam ribu hektar).

9. Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk pengembangan industri yang meliputi:

a. kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
b. kawasan peruntukan industri dan pelabuhan terpadu Jelitik dan Teluk Kelabat di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;
c. kawasan peruntukan industri Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;
d. kawasan peruntukan industri Ketapang di Pangkalpinang;
e. kawasan peruntukan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
f. kawasan peruntukan industri Besar Badau dan Membalong di Kabupaten Belitung; dan
g. kawasan peruntukan industri Air Kelik di Kabupaten Belitung Timur.

10. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
    a. Wisata alam meliputi:
        1) seluruh wilayah pesisir Pulau Bangka, Pulau Belitung dan pulau-pulau kecil;
        2) Kawasan pariwisata bahari yang berupa kawasan pantai dan lautnya yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang ada di Kabupaten/Kota, serta kawasan pariwisata pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur;
        3) Kawasan pariwisata alam berupa kawasan wisata hutan;
        4) Kawasan wisata alam berupa pemandian sumber air panas alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan;
        5) Taman wisata laut;
        6) Kawasan Strategis Pariwisata Tanjung Kelayang; serta
        7) Kawasan pariwisata alam unggulan lainnya di Kabupaten/Kota.
    b. Wisata budaya meliputi:
        1) Kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
        2) Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka;
        3) Kawasan yang di dalamnya terdapat cagar budaya dan atau yang memiliki ciri-ciri cagar budaya di Kabupaten/Kota;
        4) Kawasan wisata budaya yang memiliki daya tarik wisata budaya tangible maupun intangible yang ada di Kabupaten/Kota;
        5) Kawasan budaya Laskar Pelangi di Kabupaten Belitung Timur; dan
        6) Kawasan wisata budaya dan wisata kreatif lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota.
    c. Kawasan wisata buatan adalah kawasan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya, yang meliputi kawasan agro wisata, fasilitas rekreasi dan taman bertema dan resort serta fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten/Kota.

11. Kawasan peruntukan permukiman dengan luas kurang lebih 59.188 Ha (lima puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan hektar), meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang dikembangkan diseluruh wilayah Provinsi yang memenuhi kriteria sebagai permukiman.

12. Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan pertahanan keamanan berada di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan Kecamatan Badau Kabupaten Belitung.

#### 4.5.2.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah

**A. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi. Pengembangan pusat kegiatan terdiri dari: PKNp, PKW, PKWp, dan PKL.

1. Kota yang ditetapkan sebagai PKNp adalah Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kota Pangkalpinang.
2. Kota yang ditetapkan sebagai PKW meliputi: Mentok, Tanjungpandan, dan Manggar.
3. Kota yang ditetapkan sebagai PKWp meliputi: Toboali dan Koba.
4. Kota yang ditetapkan sebagai PKL meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

**B. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.**

1. Rencana Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
   a. jaringan jalan dan jembatan;
   b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
   c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

   Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:

   a. terminal;
   b. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
   c. unit pengujian kendaraan bermotor.

2. Rencana pengembangan jaringan jalan meliputi jalan kolektor primer 1 (K1) dan jalan kolektor primer 2 (K2).
3. Terminal meliputi terminal penumpang tipe B dan terminal tipe C.
4. Terminal penumpang tipe B dikembangkan di:
   a. PKNp Pangkalpinang;
   b. PKW Mentok;
   c. PKW Tanjung Pandan;
   d. PKW Manggar; dan
   e. PKL Sungailiat.
5. Pengembangan terminal penumpang tipe C dikembangkan di:
   a. PKL Kelapa;
   b. PKL Parittiga;
   c. PKL Sungai Selan;

d. PKL Belinyu;
e. PKWp Toboali;
f. PKWp Koba;
g. PKL Payung;
h. PKL Sijuk;
i. PKL Membalong;
j. PKL Kelapa Kampit;
k. PKL Gantung; dan
l. PKL Badau.

6. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan meliputi peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

7. Peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi penyeberangan dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan yang meliputi:

   a. pelabuhan penyeberangan Tanjung Kelian (Kabupaten Bangka Barat) – Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan);
   b. pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru (Kabupaten Bangka Barat) – Pelabuhan Belinyu (Kabupaten Bangka);
   c. pelabuhan penyeberangan Pangkal Balam (Kota Pangkalpinang) – Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
   d. pelabuhan penyeberangan Sadai (Kabupaten Bangka Selatan) - Tanjung Ru - Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung) & Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera Selatan).

8. Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun internasional.

9. Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan yang terdiri atas:

   a. Pelabuhan utama meliputi:

      1) Pelabuhan Tanjung Batu di Kabupaten Belitung; dan
      2) Pelabuhan Pangkal Balam dan sekitarnya.
      3) pelabuhan pengumpul meliputi :
      4) Pelabuhan Belinyu di Kabupaten Bangka;
      5) Pelabuhan Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
      6) Pelabuhan Mentok di Kabupaten Bangka Barat;
      7) Pelabuhan Tanjung Pandan di Kabupaten Belitung; dan
      8) Pelabuhan Manggar di Kabupaten Belitung Timur.

   b. Pelabuhan pengumpan meliputi:

      1) Pelabuhan Sungailiat di Kabupaten Bangka;
      2) Pelabuhan Sungai Selan di Kabupaten Bangka Tengah;
      3) Pelabuhan Toboali di Kabupaten Bangka Selatan;
      4) Pelabuhan Tanjung Berikat di Kabupaten Bangka Tengah;
      5) Pelabuhan Tanjung Kelian di Kabupaten Bangka Barat;

6) Pelabuhan Tanjung Tedung di Kabupaten Bangka Tengah;
7) Pelabuhan Teluk Asam di Kabupaten Belitung Timur; dan
8) Pelabuhan Dendang di Kabupaten Belitung Timur.

c. Pelabuhan khusus kunjungan Kapal Wisata Asing (Layar/*Yacht*):

1) Pelabuhan Tanjungpandan; dan
2) Pelabuhan Tanjung Kelayang.

10. Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan alur pelayaran yang terdiri atas:
    a. Lintas penyeberangan antar pulau yaitu Pelabuhan Tanjung Pandan – Pelabuhan Laut Pontianak (Kalimantan Barat);
    b. Lintas penyeberangan sabuk tengah yang menghubungkan pelabuhan:
        1) Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) – Tanjung Kalian (Bangka Barat);
        2) Sadai (Bangka Selatan) – Tanjung Ru (Kabupaten Belitung); dan
        3) Pelabuhan Manggar (Belitung Timur) – Ketapang (Kalimantan Barat).
    c. Lintas koneksitas yaitu:
        1) Sadai (Kabupaten Bangka Selatan)– Pulau Pongok;
        2) Pulau Pongok – Mendanau (Kabupaten Belitung);
        3) Pangkal Balam (Pangkalpinang) – Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); dan
        4) Mendanau – Tanjung Ru (Kabupaten Belitung).
11. Pengembangan sistem transportasi udara terdiri atas:
    a. Bandar Udara Dipati Amir dengan hirarki sebagai bandar udara pengumpul skala tersier; dan
    b. Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin dengan hirarki sebagai bandar udara pengumpul skala tersier.

## C. Rencana Sistem Jaringan Energi

1. Pengembangan jaringan energi listrik berupa:
    a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu Pangkalpinang, Air Anyir dan Sungailiat;
    b. Saluran Udara Tegangan Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu PLTD Mentok, PLTU Listrindo, Gardu Induk Sungailiat, PLTD Merawang, PLTD Koba, PLTD Toboali di Pulau Bangka;
    c. Saluran Udara Tegangan Tinggi koneksitas pembangkit listrik/gardu PLTD Pilang dengan PLTU Belitung Energi dan PLTD Pilang dengan PLTD Manggar.
2. Pembangunan jaringan listrik dan pipa gas bawah laut adalah untuk menyuplai listrik dan gas dari sistem Sumatera ke Bangka Belitung.
3. Pembangunan pembangkit listrik meliputi:
    a. PLTU 3 Air Anyir;
    b. PLTU Mentok;

c. PLTU Bangka Baru II Toboali;
d. PLTU Bangka Baru I Sungailiat;
e. PLTG Bangka;
f. PLTU Bangka Baru III;
g. PLTU Belitung Suge;
h. PLTG Belitung;
i. PLTU Belitung Baru III;
j. PLTU IPP Belitung New;
k. PLTU Listrindo (Biomassa);
l. PLTU Biomassa Bangka Tengah;
m. PLT Hibrid pulau-pulau dan daerah terpencil;
n. PLTNG Mini Gas (Belitung);
o. PLTGB Belitung;
p. PLTD Padang (Belitung Timur); dan
q. PLTU Mempaya (Belitung Timur).

4. Pengembangan dan pembangunan gardu induk dilakukan di Mentok, Kelapa, Sungailiat, Pangkalpinang, Toboali, Koba, Dukong, Tanjung Batu dan Manggar.
5. Pengembangan listrik perdesaan dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.
6. Pengembangan jaringan listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan listrik untuk seluruh permukiman perkotaan PKNp, PKW, dan permukiman perkotaan PKL dan seluruh permukiman perdesaan.
7. Pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah dari Pegantungan – PLTD Pilang – Perbatasan Belitung Timur.

## D. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

1. Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal.
2. Pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

## E. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

1. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Belitung.
2. Rencana pengembangan wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan pemanfaatan sungai lintas kabupaten/kota.
3. Sistem jaringan irigasi meliputi daerah irigasi sebagai berikut:
   a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah terdiri atas:

1) daerah irigasi Rias dengan luas kurang lebih 4.500 (empat ribu lima ratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
2) daerah irigasi I Selingsing dan Merantih dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Belitung Timur;
3) daerah irigasi Dungun Raya dengan luas kurang lebih 6.000 (enam ribu) hektar di Kabupaten Bangka Selatan; dan
4) daerah irigasi Batu Betumpang dengan luas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar di kabupaten Bangka Selatan.

b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri atas:

1) daerah irigasi Rindik/Kepoh dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
2) daerah irigasi Buleng dengan luas kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) hektar di Kabupaten Bangka Barat;
3) daerah irigasi Jeriji dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan;
4) daerah irigasi Serdang Pergem dengan luas kurang lebih 1.100 (seribu seratus) hektar di Kabupaten Bangka Selatan; dan
5) daerah irigasi Kimak dengan luas kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) hektar di Kabupaten Bangka.

4. Sistem jaringan air baku terdiri atas:

a. Sumber air baku terdiri atas:

1) sungai;
2) kolong;
3) air tanah; dan
4) air laut.

b. Sistem pengelolaan air baku berupa:

1) pengelolaan air baku oleh lembaga usaha;
2) pengelolaan air baku oleh masyarakat; dan
3) pengelolaan air baku oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Peruntukan air baku berupa:

1) air minum; dan
2) air baku untuk kegiatan budidaya.

5. Sistem pengendalian banjir berupa:

a. pengamanan kawasan tangkapan air hujan;
b. pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi;
c. pengamanan sempadan sungai;
d. pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air;
e. pembangunan kanal pengatur distribusi air sugai; dan
f. normalisasi sungai.

6. Sistem pengaman pantai dari abrasi dilakukan diantaranya dengan cara:
   a. naturalisasi pantai dengan penghijauan;
   b. pengamanan gundukan pasir;
   c. pemecah ombak;
   d. turap; dan
   e. pengamanan sempadan pantai.
7. Sistem prasarana lingkungan meliputi:
   a. TPA regional meliputi:
      1) TPA dikembangkan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung;
      2) Sistem pemrosesan sampah pada TPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan teknik *sanitary landfill.*
   b. Tempat pengolahan dan/atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan non bahan beracun berbahaya dikembangkan seperti berikut:
      1) Lokasi pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada:
         a) kawasan permukiman padat dan atau baru;
         b) kawasan pariwisata; dan
         c) kawasan industri.
      2) Jenis IPAL yang dikembangkan terdiri atas :
         a) IPAL industri; dan
         b) IPAL non industri.
   c. SPAM dikembangkan di setiap pusat kegiatan wilayah dan lokal (PKNp, PKW, PKWp dan PKL).

#### 4.5.2.3 Penetapan Kawasan Strategis

**A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi:**

1. kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat di Belinyu Kabupaten Bangka;
2. kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
3. kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Mentok di Kawasan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat;
4. kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan;
6. kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok di Kabupaten Bangka Selatan;
7. kawasan pelabuhan dan industri Sadai di Kabupaten Bangka Selatan;
8. kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. kawasan minapolitan Selat Nasik di Kabupaten Belitung;
10. kawasan industri perikanan Tanjung Binga di Kabupaten Belitung;
11. kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;

12. kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. kawasan lintas timur Pulau Bangka.

B. **Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya** berupa kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Kabupaten Bangka, kawasan Kota Tua Mentok di Kabupaten Bangka Barat dan Museum Nasional Maritim di Kabupaten Belitung.

C. **Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup** berupa Cagar Alam Gunung Lalang di Kabupaten Belitung, Gunung Menumbing di Kabupaten Bangka Barat, Hutan Konservasi Gunung Maras di Kabupaten Bangka, Gunung Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah, Gunung Permisan di Kabupaten Bangka Selatan, Jering Menduyung di Kabupaten Bangka Barat, Kawasan Situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka, Kawasan Kepulauan Buku Limau di Kabupaten Belitung Timur, Taman Kehati di Kabupaten Belitung dan Karantina Hewan di Pulau Nadu di Kabupaten Belitung.

#### 4.5.2.4 Kawasan Andalan

Rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis berupa kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional meliputi :

a. kawasan Bangka dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, pariwisata, dan perikanan;
b. kawasan Belitung dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan pertambangan;
c. kawasan laut Bangka dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata; dan
d. kawasan taman wisata alam laut perairan Belitung dan Bangka.

#### 4.5.2.5 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

Bahwa dalam perencanaan pembangunan, diharuskan adanya suatu keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Oleh karenanya, didalam dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan sektoral harus mengacu kepada dokumen RTRW yang merupakan dokumen perencanaan spasial sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang berorientasi pada kesesuaian antara sektoral dan spasial.

Adapun indikasi program dan kegiatan utama didalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel IV.10

Tabel IV.10

Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| A | **Pemantapan Sistem Perkotaan** | | | | | | | | | | | | |
| A1 | **Perwujudan PKNp Pangkal Pinang** | Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang | Dinas Pekerjaan Umum | ■ | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan | Dinas Pekerjaan Umum | ■ | ■ | ■ | | | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam | Dinas Perindag | | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pengembangan inner ringroad dan outer ring road | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pengembangan taman kota | Dinas Pekerjaan Umum | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat | Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | APBD Kokab | Badan Lingkhungan Hidup Daerah (BLHD) |
| | | Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam | Dinas Perhubungan | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi | Dinas Budpar | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Peningkatan terminal | Dinas Perhubungan | | ■ | | | | | | | APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| A2 | Perwujudan **PKW Muntok** | Pemantapan tata batas kawasan kota tua | BPN | | ■ | | | | | | | | BPN |
| | | Penyusunan RDTR Kota tua | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah | Dinas Pekerjaan Umum | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD | Dinas Pekerjaan Umum |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan sistem penyediaan air minum | Dinas Pekerjaan Umum | ■ | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | ■ | ■ | ■ | | | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | Badan Lingkhungan Hidup Daerah | ■ | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Badan Lingkhungan Hidup Daerah |
| A3 | Perwujudan **PKW Tanjung Pandan** | Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu | Disperindag | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Prov | Disperindag |
| | | Pengembangan kawasan wisata | Disbudpar | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Kokab | Disbudpar |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan berskala regional (pulau) | Disperindag | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Prov | Disperindag |
| | | Pembangunan museum bahari | Disbudpar | | ■ | ■ | ■ | | | | | APBD Prov | Disbudpar |
| | | Pembangunan terminal tipe B | Dinas Pekerjaan Umum | | | ■ | ■ | | | | | APBD Prov | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan sistem penyediaan air minum | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | | ■ | ■ | | | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | BHLD | | ■ | ■ | ■ | | | | | APBD Kokab | BHLD |
| A4 | Perwujudan **PKW Manggar** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar | Dinas Pekerjaan Umum | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pekerjaan Umum |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BHLD | | | | | | | | | APBD Prov/ APBD Kokab | BHLD |
| | | Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/ APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B | Dinas Kesehatan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kesehatan |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| A5 | Perwujudan **PKL Kelapa** | Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Penyusunan masterplan kawasan perdagangan | Disperindag | | | | | | | | | APBD Kokab | Disperindag |
| | | Pembangunan fasilitas wisata air panas | Disbudpar | | | | | | | | | APBD Kokab | Disbudpar |
| | | Pembangunan industri pengolahan sawit | Diperindag | | | | | | | | | APBD Prov/ APBD Kokab | Diperindag |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | BLHD | | | | | | | | | APBD Prov/ APBD Kokab | BLHD |
| A6 | Perwujudan **PKL Puding Besar** | Pembangunan fasilitas rest area | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BLHD | | | | | | | | | APBD Kokab | BLHD |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan | Disperindag | | | | | | | | | APBD Kokab | Disperindag |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan |
| A7 | Perwujudan **PKL Sungai Selan** | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | | | | | | Dinas PU |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan |
| A8 | Perwujudan **PKL Payung** | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BLHD | | | | | | | | | APBD Kokab | BLHD |
| | | Pembangunan fasilitas perdagangan | Disperindag | | | | | | | | | APBD Kokab | Disperindag |
| | | Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Perbaikan lingkungan kawasan permukiman | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/<br>APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/<br>APBD Kokab | Dinas Kesehatan<br>Dinas Pendidikan |
| A9 | Perwujudan **PKL Sungailiat** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/<br>APBD Kokab | BLHD |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pembangunan terminal tipe C | Dishub | | | | | | | | | APBD Kokab | Dishub |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Dibudpar | | | | | | | | | APBD Kokab | Dibudpar |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | | | | | | | | | | Dinas PU |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | BLHD |
| A10 | Perwujudan **PKWp Koba** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | BLHD |
| | | Pembangunan Pembangunan terminal tipe C | Dishub | | | | | | | | | APBD Kokab | Dishub |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Disbudpar | | | | | | | | | APBD Kokab | Disbudpar |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | BLHD |
| A11 | Perwujudan **PKWp Toboali** | Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | BLHD |
| | | Pembangunan Pembangunan terminal tipe C | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan | Disbudpar | | | | | | | | | APBD Kokab | Disbudpar |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Peningkatan penyediaan sistem air bersih | Dinas PU | | | ■ | ■ | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata | BLHD | | | ■ | ■ | | | | | APBD Kokab | BLHD |
| B | **Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah** | | | | | | | | | | | | |
| B1 | **Perwujudan Sistem Transportasi** | | | | | | | | | | | | |
| a | **Sistem Transportasi Darat** | Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer | Dinas PU | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | APBN | Dinas PU |
| | | Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten | Dinas PU | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar. | Dinas PU | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Prov | Dinas PU |
| b | **Sistem Transportasi Laut** | Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu | Dinas Perhubungan | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok), Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar) | Dinas Perhubungan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut | Dinas Perhubungan | | ■ | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| c | **Sistem Transportasi Udara** | Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Pengembangan fasilitas pendukung bandara | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| | | Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Perhubungan |
| B2 | **Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik** | Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik | PLN | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | PLN |
| | | Pengembangan sumber pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | | Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | | Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | | Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit | Dinas Pertambangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | Dinas Pertambangan dan Energi |
| B3 | **Perwujudan Sistem Telekomunikasi** | Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional | Dinas Kominfo | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Swasta | Dinas Kominfo |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong pengguanaan menara bersama antara operator (*join operation*) | Dinas Kominfo | | | | | | | | | Swasta | Dinas Kominfo |
| | | pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan. | Dinas Kominfo | | | | | | | | | APBN/Swasta | Dinas Kominfo |
| | | Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha | Dinas Kominfo | | | | | | | | | APBN/ Swasta | Dinas Kominfo |
| B4 | **Perwujudan Sistem Sumber Daya Air** | Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air mimun | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut | Dinas PU | | | | | | | | | | Dinas PU |
| | | Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pembangunan cekdam pada hulu sungai | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| B5 | **Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman** | Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL) | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3) | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | BLHD |
| | | Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan. | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| C | **Perwujudan Rencana Pola Ruang** | | | | | | | | | | | | |
| C1 | **Perwujudan Kawasan Lindung** | | | | | | | | | | | | |
| | Perwujudan Kawasan Hutan Lindung | Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung; | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Kerhutanan |
| | | Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan; | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan |
| | | Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung; | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan |
| | | Pengawasan kawasan lindung. | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan |
| | | Pengamanan kawasan lindung | Dinas Kerhutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas Kerhutanan |
| | Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya | Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung; | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | Dinas PU |
| | | Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. | Dinas PU | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas PU |
| | Pengelolaan kawasan perlindungan setempat | Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |
| | | Rehabilitasi dan penghijauan sempadan | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |
| | | Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |
| | | Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |
| | | Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/Masyarakat | BLHD |
| | Pengelolaan kawasan cagar budaya | (penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok) | - | | | | | | | | | - | - |
| | Pengelolaan kawasan rawan bencana alam | Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/LSM | BLHD |
| | | Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD | BLHD |
| | | Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD/LSM | BLHD |
| | | Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD/LSM | BLHD |
| | Pengelolaan kawasan lindung lainnya | pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah. | BLHD | | | | | | | | | APBN/APBD/LSM | BLHD |
| C2 | **Perwujudan Kawasan Budidaya** | | | | | | | | | | | | |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| a | Perwujudan Kawasan Hutan Produksi | Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN | Dinas Kehutanan |
| | | Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan) | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN | Dinas Kehutanan |
| | | Pembangunan jalan produksi | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN | Dinas Kehutanan |
| | | Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN | Dinas Kehutanan |
| b | Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat | Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan) | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Pembangunan jalan produksi dean inspeksi | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam) | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |
| | | Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBD Prov | Dinas Kehutanan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| c | Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian | Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegaitan pertanian hortikultur dan atau perkebunan | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| | | Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |
| d | Perwujudan Sentra Perikanan | Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan | Dinas Kelautan dan Perikanan | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk pengingkatan produktivitas perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| e | Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan | Pemantapan tata batas wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| | | Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| | | Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, | Dinas Pertembangan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | terutama pertambangan rakyat | dan Energi | | | | | | | | | | dan Energi |
| | | Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| | | Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| | | Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air | Dinas Pertembangan dan Energi | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Pertembangan dan Energi |
| f | Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri | Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/ APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN | Dinas Perindag |
| | | Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan. | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| g | Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata | Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | | | | | | | APBD Kokab | Dinas Budaya dan Pariwisata |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Berlitung | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas Budaya dan Pariwisata |
| | | Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat | Dinas Budaya dan Pariwisata |
| | | Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | | ■ | ■ | ■ | | | APBD Kokab | Dinas Budaya dan Pariwisata |
| | | Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata (*trip*) | Dinas Budaya dan Pariwisata | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat | Dinas Budaya dan Pariwisata |
| h | Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman | Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan | Dinas PU | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota | Dinas PU | | ■ | | | | | | | APBN/APBD Prov | Dinas PU |
| | | Penyusunan masterpal perencanaa kota yang ditetapkan | Dinas PU | | ■ | ■ | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni | Dinas PU | | ■ | | | | | | | APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota) | Dinas PU | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masyarakat | Dinas PU |
| D | **Perwujudan Kawasan Strategis** | | | | | | | | | | | | |
| D1 | Perwujudan **Kawasan Tanjung Kalian** | Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan | Dinas PU | | ■ | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan | Dinas PU | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung | Dinas PU | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya. | Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag |
| D2 | Perwujudan **Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu** | Penyusunan masterplan kawasan industri | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu | Dinas Perhubungan | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya | Dinas Perhubungan | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang | Dinas Perhubungan | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan | Dinas Perhubungan | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan dermaga & terminal | Dinas Perhubungan | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| D3 | Perwujudan **Pelabuhan dan** | Penyusunan masterplan kawasan | Dinas Perindag | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | **Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat** | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan kawasan wisata | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal) | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan) | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| D4 | Perwujudan **KTM Batu Betumpang** | Penyusunan RDTR KTM Batu Betumpang | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan infrastruktur permukiman | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan sarana sosial budaya | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pengembangan kawasan pertanian | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pengembangan kawasan lindung dan RTH | BLHD | | | | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | BLHD |
| D5 | Perwujudan **Kawasan Minapolitan Lepar Pongok** | Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok | Dinas Kelautan & Perikanan | | ■ | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | | ■ | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pengesahan kawasan minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan | Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung | Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan | Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| D6 | Perwujudan **Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik** | Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya | Dinas Kelautan & Perikanan | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove | BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan | | | | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan |
| | | Pembangunan tambak ikan | Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias) | Dinas Kelautan & Perikanan | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan & Perikanan |
| D7 | Perwujudan Kawasan **Industri Perikanan Tanjung Binga** | Penyusunan masterplan kawasan industri | Dinas Perindag | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya | Dinas Perindag | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan prasarana dan sarana penunjang | Dinas Perindag/PU | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag/PU |
| | | Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik) | Dinas PU | | | ■ | ■ | ■ | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan dermaga & terminal | Dinas PU | | | | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan pabrik pengolahan ikan | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| D8 | Perwujduan **Kawasan Kota Terpadu Mandiri** | Penyusunan RDTR KTM Gantung | Dinas PU | | ■ | ■ | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan | Dinas PU | | | ■ | ■ | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan infrastruktur permukiman | Dinas PU | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Pengembangan kawasan pertanian | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan |
| | | Pengembangan kawasan lindung dan RTH | BHLD | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | BHLD |
| D9 | Perwujduan **Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)** | Penyusunan masterplan kawasan | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Penyiapan lahan | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan jalan askes | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan infrastruktur penunjang | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor | Dinas Perindag | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perindag |
| | | Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan) | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan kawasan wisata | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Pembangunan prasarana penunjang lainnya | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| D10 | Perwujduan **Pelabuhan ASDP Manggar – Kepang** | Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan lahan | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Pembangunan infrastruktur pendukung<br>Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| | | Pengadaan kapal penumpang | Dinas Perhubungan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Perhubungan |
| | | Penyediaan sistem air baku dan air minum | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |
| D11 | Perwujduan **Kota Tua Muntok** | Identifikasi dan klasifikasi lokasi dan jenis bangunan *heritage* | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, *Asian Herritage* dan diupayakan menjadi *World Heritage* | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Penataan kawasan dan restorasi bangunan | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan heritage (nasional/dunia) | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Penyusunan heritage map dan promosi kawasan | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Penyusunan agenda tahunan | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler) | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| | | Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua | Dinas Budpar | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Budpar |
| D12 | Perwujudan Kawasan **Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim** | Pengembangan kawasan pendidikan | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pendidikan |
| | | penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pendidikan |
| | | penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pendidikan |
| | | pembangunan sarana penunjang pendidikan | Dinas PU | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas PU |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam | | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | |
| | | pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pendidikan |
| | | pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Pendidikan |
| D14 | Pengelolaan **Cagar Alam** Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), **Hutan Konservasi** Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung ); dan Karantina Hewan (Pulau | Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kehutanan |

| No | RENCANA PEMANFAATAN RUANG | | Penanggung Jawab | Tahun Pelaksanaan | | | | | | | | Sumber Dana | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Indikasi Program | Kegiatan | | Tahap I | | | | | Tahap II | Tahap III | Tahap IV | | |
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | Nadu, Kabupaten Belitung) | | | | | | | | | | | | |
| | | Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kehutanan |
| | | Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kehutanan |
| | | Perbaikan fasilitas penunjang | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kehutanan |
| | | Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik | Dinas Kehutanan | | | | | | | | | APBN/APBD Prov/APBD Kokab | Dinas Kehutanan |
| | | Peningkatan fasilitas karantina hewan | | | | | | | | | | | |

*Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010*

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016.

## 4.6 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama-sama dengan sektor kelautan dan perikanan, sektor pertanian dan kehutanan, sektor industri perdagangan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Beberapa kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memuat butir-butir yang dapat menjadi arahan bagi pengembangan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan pariwisata yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun pemerintah pusat, menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan dokumen RKPD dengan memperhatikan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Arah pengembangan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung telah ditentukan dalam visi dan misi pengembangan pariwisata yang akan dicapai. Visi pembangunan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 adalah: ”Terwujudnya wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah tujuan wisata (DTW) utama di Kawasan Barat Indonesia yang berdaya saing tinggi dengan menampilkan perpaduan keragaman kebudayaan daerah serta kekuatan potensi wisata bahari melalui pemanfaatan secara terkendali, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan pariwisata sebagai berikut:

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata (community based development)
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Pengembangan promosi dan pemasaran secara terpadu
4. Peningkatan program Sapta Pesona dan sadar wisata secara berkesinambungan
5. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana guna memacu percepatan pembangunan pariwisata

Sementara itu, kebijakan umum dan kebijakan daerah provinsi bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1 Meningkatkan kualitas kerukunan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara di semua lapisan masyarakat
2 Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana umum
3 Memberikan kemudahan kepada calon investor untuk menanamkan modal dan usahanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4 Menyiapkan dan mengembangkan seni budaya. wisata pendidikan, kegiatan ikutan (industri kecil dan kerajinan, jasa, perdagangan).

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diimplementasikan strategi sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan perwilayahan pariwisata
   Strategi pengembangan perwilayahan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi yang bertema khas dan mendukung tema pengembangan pariwisata provinsi, yaitu: 1. KWU Sejarah - Mentok 2. KWU Rekreasi Pantai – Sungailiat 3. KWU Perkotaan – Pangkalpinang 4. KWU Agrowisata – Koba 5. KWU Alam Bahari – Selat Lepar 6. KWU Budaya Pesisir – Tanjung Binga 7. KWU Bahari Minat Khusus - Memperak
   b. Pengembangan pusat pertumbuhan di setiap kawasan wisata unggulan provinsi, yang juga berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan penyebaran wisatawan ke daya tarik wisata unggulan.
   c. Penentuan gerbang masuk wisatawan, baik melalui laut maupun udara, dan aksesibilitas utama antara KWU satu dengan yang lain, yang menjadi jalur wisata utama provinsi.

2. Strategi pengembangan produk wisata
   Strategi pengembangan produk wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang memunculkan identitas lokal/keunikan dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendukung terwujudnya etalase kelautan wilayah barat Indonesia
   b. Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan
   c. Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah, bangunan, peralatan, maupun hal-hal lain yang terkait dengan penambangan timah

3. Strategi pengembangan pasar dan pemasaran
   Strategi pengembangan pasar dan pemasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Pengembangan pasar wisatawan nusantara (wisnus) dengan memanfaatkan secara optimal masyarakat Kepulauan Bangka Belitung sebagai sumber pasar utama dan dengan menjaring lebih banyak lagi wisnus dari daerah sumber pasar terdekat (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau).
   b. Pengembangan pasar wisatawan mancanegara (wisman) dengan menjaring wisman dari daerah sumber pasar terdekat, terutama DKI Jakarta dan Riau, dan dari negara-negara terdekat (Singapura, Malaysia).
   c. Pengembangan pasar wisnus maupun wisman yang memiliki ketertarikan dengan budaya pesisir yang tinggi dan yang memiliki keterkaitan dengan budaya/etnis Cina.
   d. Pengembangan sistem pemasaran dan promosi yang efektif dan terpadu. - Penentuan proyeksi pasar wisatawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 10 tahun mendatang, baik berdasarkan jumlahnya maupun segmen wisatawan yang akan dituju

4. Strategi Pengembangan transportasi dan infrastruktur
   Strategi pengembangan transportasi dan infrastruktur penunjang pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan aksesibilitas ke kawasan wisata unggulan provinsi melalui peningkatan jaringan jalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan infrastruktur
b. Peningkatan kemudahan aksesibilitas antarkota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang mendukung aksesibilitas antara ibu kota provinsi, pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lingkungan (PKL) dengan kawasan wisata unggulan provinsi
c. Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih dan listrik untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan wisata unggulan provinsi

5. Strategi Pengembangan SDM
   Strategi pengembangan produk sumber daya manusia pendukung pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pengelola daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata, termasuk masyarakat, terhadap pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
   b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pada bidangnya untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung
   c. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan

6. Strategi Pengembangan Kelembagaan
   Strategi pengembangan kelembagaan penujang pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antarlembaga pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dengan swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung
   b. Pengembangan kemitraan/kerja sama dengan negara-negara tetangga, organisasi dunia, maupun ahli-ahli dalam negeri dalam pengembangan pariwisata bahari dan pulaupulau kecil serta pengembangan bekas penambangan timah untuk menjadi daya tarik wisata
   c. Pengembangan lembaga pendidikan pariwisata sebagai pencetak sumber daya manusia pariwisata yang kompeten/berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pasar

7. Strategi Pengelolaan Lingkungan
   Strategi pengelolaan lingkungan untuk mendukung pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk membatasi kegiatan penambangan timah
   b. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan
   c. Peningkatan upaya dalam mengelola permasalahan lingkungan menjadi potensi wisata yang dapat diandalkan, seperti: pengembangan wisata air, reklamasi bekas galian menjadi kawasan wisata terpadu (contoh Mines City di Malaysia), dan lainlain.

Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada table IV.11

Tabel IV.11

Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

| Aspek Pengembangan | Strategi Pengembangan | Indikasi Program | Tahapan Pengembangan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahu n7 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. Pengembangan Perwilayahan Pariwisata | Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi | Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata unggulan sesuai tema yang ditetapkan | ■ | | | | | | |
| | Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan provinsi | Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata pada setiap kawasan wisata unggulan | ■ | | | | | | |
| | | Penyusunan rencana detil pengembangan pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan | | ■ | | | | | |
| 2. Pengembangan Produk Wisata | Pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang memunculkan keunikan/identitas lokal dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata | Penyusunan pedoman perencanaan dan pengelolaan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang spesifik Kepulauan Bangka Belitung | ■ | | | | | | |
| | | Penataan ruang dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pulau-pulau kecil yang menjadi unggulan | | ■ | ■ | ■ | | | |
| | Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan | Sosialisasi tema pengembangan pariwisata provinsi dan kawasan wisata unggulan | ■ | | | | | | |
| | | Pengemasan budaya pesisir dan budaya etnis Cina sebagai daya tarik wisata | | ■ | | | | | |
| | Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata provinsi dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah | Penelitian mengenai pengembangan bekas galian tambang menjadi wisata buatan yang mendukung tema wisata bahari dan pulau-pulau kecil | | | ■ | ■ | ■ | | |
| | | Pengembangan program interpretasi pariwisata pada lahan- lahan bekas penambangan timah | | | | ■ | | | |
| | Pengembangan wisata terpadu antarkawasan wisata unggulan dan dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kep. Bangka Belitung | Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu antara kawasan wisata unggulan | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kepulauan Bangka Belitung | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Aspek Pengembangan | Strategi Pengembangan | Indikasi Program | Tahapan Pengembangan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahu n7 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur | Peningkatan aksesibilitas kekawasan wisata unggulan provinsi | Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan antarkawasan wisata unggulan provinsi | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | | Penyediaan angkutan umum menuju dan antarkawasan wisata unggulan yang aman dan nyaman | | | | | | | |
| | Peningkatan kemudahan aksesibilitas antarprovinsi dan antarkota, khususnya yang mendukung aksesibilitas antara ibu kota provinsi, PKW, PKL, dan kawasan wisata unggulan | Peningkatan kapasitas dan jumlah lalu lintas penumpang dengan menggunakan moda transportasi udara dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (antara lain melalui perpanjangan landasan pacu (*runway*)). | ■ | ■ | | | | | |
| | | Pengkajian terhadap permintaan perjalanan dengan berbagai moda transportasi bagi wisatawan ke dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. | ■ | | | | | | |
| | | Peningkatan dan perbaikan kondisi fisik dan pelayanan pelabuhan laut untuk kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan. | | ■ | ■ | | | | |
| | | Perencanaan pengembangan transportasi terpadu yang memperhatikan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan. | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | Peningkatan aksesibilitas antardaya tarik wisata unggulan di setiap kawasan wisata unggulan provinsi | Peningkatan kualitas pelayanan jalan antardaya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung di setiap kawasan wisata unggulan | | ■ | ■ | | | | |
| | | Penyediaan angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata unggulan di setiap kawasan wisata unggulan provinsi | | ■ | ■ | | | | |
| | Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih dan listrik untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan wisata unggulan | Pengkajian analisis kebutuhan air bersih dan penyediaan sumber air bersih di kawasan wisata unggulan provinsi | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | | Penyediaan pemenuhan kebutuhan jaringan listrik di daerah tujuan wisata melalui penambahan jaringan dan atau pengembangan sumber-sumber tenaga listrik yang potensial untuk dikembangkan | | ■ | ■ | ■ | | | |
| 4. Pengembangan Pasar dan Pemasaran | Pengembangan pasar wisnus dengan memanfaatkan masyarakat Kep. Bangka Belitung sebagai sumber pasar utama dan menjaring wisnus dari daerah sumber | Penelitian profil dan preferensi wisnus Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Jambi terhadap produk wisata Kepulauan Bangka Belitung | ■ | | | | | | |
| | Pengembangan pasar wisman dengan menjaring wisman dari daerah sumber pasar terdekat | Penelitian profil dan preferensi wisman yang datang ke Kepulauan Bangka Belitung | | ■ | | | | | |
| | | Penelitian profil dan preferensi potensi wisman yang berkunjung | | ■ | | | | | |

| Aspek Pengembangan | Strategi Pengembangan | Indikasi Program | Tahapan Pengembangan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahun n7 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | ke daerah sumber pasar terdekat | | | | | | | |
| | Pengembangan pasar wisatawan yang memiliki ketertarikan dengan budaya pesisir dan budaya/etnis Cina | Penellitian profil dan preferensi potensi pasar dan pasar wisatawan eksisting terhadap budaya pesisir dan etnis Cina | | | | | | | |
| | maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dg swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kep. | Penyelenggaraan forum koordinasi rutin untuk pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung | | | | | | | |
| | Pengembangan kemitraan/kerja sama dengan negara-negara tetangga, organisasi dunia, maupun ahli- ahli dalam negeri dalam pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil serta pengembangan bekas penambangan timah untuk menjadi daya tarik wisata | Pembuatan MoU dengan negara- negara maupun organisasi dunia tentang pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan forum diskusi internasional tentang pengembangan lahan bekas penambangan timah menjadi daya tarik wisata | | | | | | | |
| | | Pengadaan kerja sama dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pemanfaatan bekas penambangan dan ahli-ahli lingkungan dan pariwisata Indonesia | | | | | | | |
| | Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata sebagai pencetak SDM pariwisata yg kompeten/berkualitas dan sesuai dg tuntutan pasar | Pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata yang berkualitas dan sesuai tuntutan pasar | | | | | | | |
| | | Pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan yang sesuai dengan tuntutan pasar | | | | | | | |
| 7. Pengelolaan Lingkungan | Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk membatasi kegiatan penambangan | Perumusan peraturan daerah mengenai pengendalian kegiatan penambangan timah inkonvensional | | | | | | | |
| | | Perumusan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | |
| | Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan | Pembentukan tim pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan forum koordinasi rutin antara instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan | | | | | | | |
| | Peningkatan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan di kawasan wisata unggulan dan sekitarnya | Pembinaan sadar lingkungan pada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan wisata unggulan provinsi | | | | | | | |

| Aspek Pengembangan | Strategi Pengembangan | Indikasi Program | Tahapan Pengembangan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | Tahun 6 | Tahu n7 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | Penyelenggaraan gerakan cintalingkungan di kawasan wisata unggulan provinsi | | | | | | | |

## 4.7 Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan

Sebagai salah satu provinsi yang bercirikan kepulauan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didalam konsep perencanaannya telah berorientasi pada pendekatan kepulauan. Hal ini tercermin didalam prioritas pembangunan provinsi yang tertuang didalam dokumen RPJMD 2012-2017 yang setiap tahunnya dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai bentuk implementasinya.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai cerminan pendekatan pembangunan kepulauan dan indikasi program yang dilaksanakan adalah sebagaimana termuat didalam table IV.11.

**Tabel IV.12**
Prioritas dan Indikasi Program Dukungan Pengembangan
Daerah Kepulauan Tahun 2016

| Prioritas Daerah | Program | Penanggungjawab |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Pengembangan wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil | Program Kerjasama Pembangunan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Pengembangan wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Kesejahteraan Sosial |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Dinas Kesejahteraan Sosial |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Kesejahteraan Sosial |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga | Badan Pemberdayaan Perempuan, Kb, Dan Perlindungan Anak |
| Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Dinas Pendidikan |
| Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Dinas Pendidikan |
| Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Pendidikan Non Formal | Dinas Pendidikan |

| Prioritas Daerah | Program | Penanggungjawab |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| Peningkatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Program Pendidikan Menengah dan Tinggi | Dinas Pendidikan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Peningkatan Pelayanan Kesahatan Lansia | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pertemuan Program Kesehatan Ibu | Dinas Kesehatan |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| Pemberdayaan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata | Program Pengembangan Nilai Budaya | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Badan Ketahanan Pangan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan |

| Prioritas Daerah | Program | Penanggungjawab |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak | Dinas Pertanian, Perkebunan, Dan Peternakan |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas antar Wilayah | Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | Dinas Pertambangan Dan Energi |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program pengembangan budidaya perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program pengembangan perikanan tangkap | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| Pengembangan One Village One Product (OVOP) dan Koperasi Komoditi | Program pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau kecil serta sumberdaya perikanan | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Desa | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Pengelolaan Sda Desa Dan Pengembangan TTG | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Program Raskintis | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa |
| Pengembangan wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Umum | Dinas Pekerjaan Umum |

| Prioritas Daerah | Program | Penanggungjawab |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya | Dinas Pekerjaan Umum |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan | Dinas Pekerjaan Umum |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Dinas Perhubungan |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program peningkatan pelayanan angkutan | Dinas Perhubungan |
| Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Dinas Perhubungan |

## 4.8 Prioritas dan Strategi Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2016

Guna mendukung Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Arah dan fokus pembangunan kewilayah tahun 2016 sebagaimana dimaksud, tersaji pada gambar IV.4 dan IV.5 berikut:

**Gambar IV.5**
Pemetaan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Potensi Lokal

*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)*

Gambar IV.6
Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

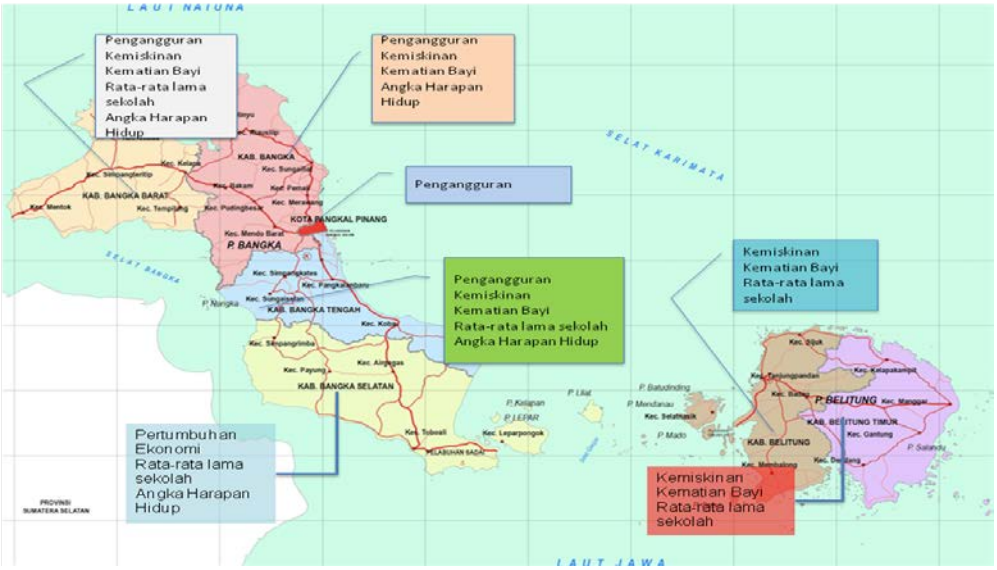


*Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)*

Berdasarkan Gambar IV.5 dan Gambar IV.6, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 diarahkan pada:

1. Kota Pangkalpinang

   Fokus dan prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran. Beberapa program kegiatan yang harus dilakukan adalah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM menuju SDM yang terampil dan berdaya saing.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, maka Pangkalpinang diarahkan pada pengembangan sektor: perdagangan dan jasa; industri pengolahan; serta, pariwisata.

2. Kabupaten Bangka

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka harapan hidup. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan dibidang kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian; pariwisata; perkebunan; pertambangan; dan industri pengolahan.

3. Kabupaten Bangka Barat

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Beberapa program kegiatan prioritas yang diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka Barat antara lain adalah, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertanian, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan.

4. Kabupaten Bangka Tengah

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pergadangan dan jasa, pertanian, perkebunan serta pertambangan.

5. Kabupaten Bangka Selatan

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, angka rata-rata lama sekolah dan kualitas hidup masyarakat, sehingga program kegiatan prioritas diharapkan dapat fokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat selain itu diupayakan untuk melakukan peningkatan terhadap beberapa sumber produksi.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Selatan diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan

6. Kabupaten Belitung

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka kemiskinan serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Beberapa program prioritas yang diarahkan antara lain pada upaya untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan, pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: perdagangan dan jasa, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan.

7. Kabupaten Belitung Timur

   Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2016 diarahkan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan angka kematian bayi serta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Program kegiatan prioritas diarahkan pada upaya untuk percepatan program-program penanggulangan kemiskinan serta pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan.

   Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Belitung Timur diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor: industri pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

# BAB V
# RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF

# BAB V
# RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH DAN PAGU INDIKATIF

## 5.1. Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

### A. Program yang Dilaksanakan Setiap SKPD:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

### B. Urusan Wajib dan Pilihan

Selanjutnya program indikator program urusan wajib dan pilihan serta indikator program yang akan dicapai adalah sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut ini:

Tabel V.1

Program dan Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2016

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **WAJIB** | | | | | |
| **PENDIDIKAN** | | | | | |
| Program PAUD | Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) | APK PAUD | 44,01% | Dindik |
| Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun | | | APK SMP sederajat | 96,86% | Dindik |
| Program Pendidikan Menengah dan Tinggi | | 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. | APK Pendidikan Menengah | 93,92% | Dindik |
| Program Pendidikan Non Formal | | | Penduduk buta aksara | 3,25% | Dindik |
| Program Manajemen Layanan Pendidikan | | | Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep, Babel | 2 Dok | Dindik |
| Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | Kesra |
| **KESEHATAN** | | | | | |
| Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Peningkatan pelayanan kesehatan | 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional) | Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota. | 100 | Dinkes |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat | | 2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung. | Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) | 29 | Dinkes |
| Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Persentase Kab/ Kota dengan cakupan perilaku hidup bersih dan sehat | 60 | Dinkes |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | (PHBS) (IKU) | | |
| Program Perbaikan Gizi Masyarakat | | | Persentasi balita yang ditimbang berat badan (IKU) | 70 | Dinkes |
| Program Pengembangan Lingkungan Sehat | | | Persentase penduduk yang mengakses air minum berkualitas (IKU) | 70 | Dinkes |
| Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular | | | Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk (API) (IKU) | < 2 | |
| Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | | | Persentase capaian nilai akreditasi yang diterima (standar Join Commision International (JCI)) | 45% | RSJ |
| Program pelayanan kesehatan penduduk miskin | | | Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan | 100 | Dinkes |
| Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata | | | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar (IKU) | 100 | Dinkes |
| Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/RSMata | | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | 1 | RSJ |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | | | Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU) | 8,2 | Dinkes |
| Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | | | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup | 30 | Dinkes |
| Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia | | | Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase) | 90 | Dinkes |
| Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan | | | Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan | 75 | Dinkes |
| Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak | | | Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU) | 29 | Dinkes |
| Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan | | | Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun (IKU) | 100 | Dinkes |
| Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya | | | Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS)) | 100 | Dinkes |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes | | | Cakupan pelayanan Laboratorium | 85 | Dinkes |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan | | | Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU) | 31,3 | Dinkes |
| Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan | | | Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana | 100 | Dinkes |
| **PEKERJAAN UMUM** | | | | | |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan*) | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan | Panjang jalan dalam kondisi mantap 66% dan Jembatan sepanjang 1870 meter | 3 Km | Dinas PU |
| Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | Panjang jalan dan jembatan provinsi yang terpelihara dengan baik | 874.33 km | Dinas PU |
| Program tanggap darurat jalan dan jembatan | | | Terpeliharanya jalan/jembatan yang diakibatkan bencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat | 1 unit | Dinas PU |
| Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan | | | Tersedianya dokumen data base jalan dan jembatan provinsi | 2 dokumen | Dinas PU |
| Program Perencanaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan | | | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jembatan | 1 unit alat-alat berat dan alat-alat laboratorium | Dinas PU |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja Tolok Ukur | Target | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan | 1.786 Ha | Dinas PU |
| Program penyediaan dan pengelolaan air baku | | | Terwujudnya layanan air baku untuk air minum | 25 Ha | Dinas PU |
| Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | | | Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air | 24 Ha | Dinas PU |
| Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | | | Tersedianya sumber air baku,air bersih dan pengelolaan limbah | 3 kws di ....ksk/ksp/ksn | Dinas PU |
| Program pengendalian banjir | | | Terwujudnya sistem pengendalian banjir | 10.000 M' | Dinas PU |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Penguatan *rural urban linkages* | Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat | tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan | 3 kws di 3 kab | Dinas PU |
| Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | | | | | Dinas PU |
| Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong | | | | | Dinas PU |
| **PERUMAHAN** | | | | | |
| Program Perencanaan Pengembangan Perumahan*) | Peningkatan kualitas | Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber | terbangunnya sarana dan prasarana rumah | 135 unit di 7 kab/kota | Dinas PU |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja Tolok Ukur | Target | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | lingkungan hidup | daya alam di perkotaan dan pedesaan. | sederhana sehat | | |
| Program Lingkungan Sehat Perumahan | | | terbangunnya sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi MBR | 7 kws di 7 kab/kota | Dinas PU |
| Program pemberdayaan komunitas perumahan | | | terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kws permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat | 50 desa di 7 kab/kota | Dinas PU |
| Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial | | | Tertanganinya lingkungan perumahan dan kws permukiman yang terkena dampak bencana alam/sosial | 7 kws di 7 kab/kota | Dinas PU |
| **PENATAAN RUANG** | | | | | |
| Program Perencanaan Tata Ruang | Pengendalian pemanfaatan ruang | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. | Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan | 1 RDTR& 2 R semua KSP | Bappeda, Dinas PU |
| Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung | 10 kasus per kab/kota dan 1 laporan penyelenngaraan PR | Bappeda, Dinas PU |
| **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. | Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Perda dan Kawasan Strategis | Bappeda |
| Program Kerjasama Pembangunan | 13 Prioritas | 15 Sasaran | kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta | Meneruskan kerjasama yang telah disepakati dengan daerah lain | Bappeda |
| Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Prioritas | 15 Sasaran | Jumlah kebijakan bidang perekonomian | 22 | Bappeda |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 Prioritas | 15 Sasaran | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 6 dokumen | Bappeda |
| Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 1. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi<br>2. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.<br>2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi | 7 dokumen | Bappeda |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | masyarakat<br>5. Meningkatnya daya beli masyarakat. | | | |
| Program perencanaan Sosial Budaya | 1. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>2. Peningkatan pelayanan kesehatan<br>3. Peningkatan kualitas pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | L. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)<br>2. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.<br>3. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.<br>4. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya | 5 dokumen | Bappeda |
| Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam | | | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam | 5 dokumen | Bappeda |
| Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | | | | | Bappeda |
| Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan | | | | | Bappeda |
| Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | | | | | Bappeda |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **PERHUBUNGAN** | | | | | |
| Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terbangun | Terpenuhinya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan di Bangka Belitung | Dinas Perhubungan |
| Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Transportasi | Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas Transportasi 30% | Dinas Perhubungan |
| Program pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan | Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. | Pembangunan Dermaga di Pulau-pulau Kecil Berpenduduk | | Dinas Perhubungan |
| Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | | | Dinas Perhubungan |
| Program Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas | | | | | Dinas Perhubungan |
| **LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | |
| Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | 1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan. | Cakupan pelayanan persampahan | Lanjutan penyelesaian 3 TPA Regional di Prov.Kep.Babel | Dinas PU, BLHD |
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | 2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung | Terpantaunya status mutu air | 7 smbr air | BLHD |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Peningkatan Kualitas serta Akses Informasi SDA dan LH | | lingkungan. | Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup | 7 jaringan | BLHD |
| Program Peningkatan Pengendalian Polusi | | | Terpantaunya status mutu udara | 6 kota | BLHD |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | | | Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel | RTH 3 KSP | Dinas PU, BLHD |
| Program Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam | | | | | BLHD |
| **PERTANAHAN** | | | | | |
| Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah | | | Terwujudnya Sistem Pendaftaran Tanah yang transparan, efektif dan efisien | Meningkatnya pemahaman 80 orang aparat pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat tentang system pendaftaran tanah | Biro Pemerintahan |
| Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | | | Terwujudnya penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | Tersedianya lahan untuk badan/dinas seluas 25 Ha, Tersedianya 1000 sertifikat milik masyarakat kurang mampu | Dinas PU, Biro Pemerintahan |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan | | | Menurunnya jumlah konflik-konflik yg terkait dengan pertanahan | | Biro Pemerintahan |
| Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | | | Terwujudnya Sistem Informasi Pertanahan | | Biro Pemerintahan |
| **KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL** | | | | | |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan | | | Tertatanya Administrasi Kependudukan | Terlaksananya koordinasi, meningkatnya kualitas SDM dan pemahaman masyarakat di bidang administrasi kependudukan, | Biro Pemerintahan |
| **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | |
| Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG | 14 % (6 dari 43 SKPD) | BPPPAKB |
| Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | | | Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | 6,02% | BPPPAKB |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja Tolok Ukur | Target | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | 11 | BPPPAKB |
| **KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA** | | | | | |
| Program Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | 11,69% | BPPPAKB |
| **SOSIAL** | | | | | |
| Program Rehabilitasi Sosial | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)<br>2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.<br>3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran | Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial | 1.475 orang | Dinkesos |
| Program perlindungan dan Jaminan sosial | | | Persentase desa yang di interpensi program | 10,3% | Dinkesos |
| Progaram Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan | | | Persentase PMKS penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan | 2,150 | Dinkesos |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja Tolok Ukur | Target | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pembinaan Generasi Muda | | | Jumlah Pemuda yang mengikuti bimbingan tehnis kepemudaan | 150 | Biro Kesra |
| Program Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama | | | Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel | | Biro Kesra |
| Program Pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan sosial | | | Jumlah Lembaga Keagamaan dan sosial di Prov Kep Babel | | Biro Kesra |
| Program Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah | | | Persentase sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal | 80% | Biro Kesra |
| Program Pembinaan Mental, Akhlak dan Etika | | | Persentase pembinaan Mental, Akhlak dan Etika Aparatur | 80% | Biro Kesra |
| Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | | | Persentase pembinaan terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama | 80% | Biro Kesra |
| Program Pengembangan Nilai Budaya | | | Jumlah lembaga adat dan Sanggar Seni | 12 | Biro Kesra |
| KETENAGAKERJAAN | | | | | |
| Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>2. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | Jumlah tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing | | Disnakertrans |
| Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | Jumlah tenaga kerja mandiri sektor informal di pedesaan dan perkotaan | 150 org | Disnakertrans |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan HI dan Jamsostek | | | Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah | 35 Prshn | Disnakertrans |
| Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan | | | Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak | 10% | Disnakertrans |
| Program Revitalisasi BLKI | | | Persentase Infrastruktur yang terbangun | 40% | Disnakertrans |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja | | | Pesentase kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja dengan dokumen RKPD | 80% | Disnakertrans |
| Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | Disnakertrans |
| **KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH** | | | | | |
| Program Penciptaan Iklim usaha, Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi | 1. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Bertambahnya Jumlah Sertifikat halal bagi UMKM | | Dinas KUMKM |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi | 2. Penguatan *rural urban linkages*<br>3. Pemberdayaan | 2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka | Meningkatnya jumlah usaha mengengah, kecil dan mikro | | Dinas KUMKM |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah | masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>4. Program **SATAM EMAS** | pengangguran<br>4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>5. Meningkatnya daya beli masyarakat. | Jumlah kredit Perbankan kepada UMKM, Dana BUMN/CSR, Dana Bantuan Hibah Pemerintah, dan Dana LPDB tersalurkan | kredit perbankan=2,50 T, dana BUMN/CSR=26 M, Daba pemerintah=70 M, dana LPDB=2M | Dinas KUMKM |
| | | | Jumlah OVOP UMKM | 2 | Dinas KUMKM |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM | | | jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM | Pedesaan= 14, perkotaan= 7 | Dinas KUMKM |
| Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM | | | Jumlah SDM Koperasi dan SDM KUMKM yang terlatih | 400 orang | Dinas KUMKM |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM | | | Bertambahnya SDM UMKM sebanyak 70.000 orang | | Dinas KUMKM |
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan | | | Pelaksanaan RAT Koperasi Minimal 60% | 12% | Dinas KUMKM |
| Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | | | | | Dinas KUMKM |
| Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal | | | | | Dinas KUMKM |
| Program Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah | | | | | Dinas KUMKM |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **PENANAMAN MODAL DAERAH** | | | | | |
| Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>4. Meningkatnya daya beli masyarakat | terselenggaranya promosi potensi daerah dan terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat provinsi dan pengusaha nasional dan asing | 7 kali pameran promosi di dalam dan luar negeri | BP2TPM |
| Program Peningkatan Iklim Investasi | | | terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha | 10 laporan kegiatan penanaman modal dan terselesaikan 4 permasalahan penanaman modal | BP2TPM |
| Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | | | tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan daerah | sektor usaha unggulan | BP2TPM |
| Program Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu | | | terwujudnya pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimum yang transparan, mudah dan cepat | 55 standar operasional prosedur | BP2TPM |
| **KEBUDAYAAN** | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya | | | | | Disbudpar |
| Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Persentase budaya yang dilestarikan | 79% kekayaan budaya telah terkelola dengan baik | Disbudpar |
| Program Pengelolaan Keragaman Budaya | | | Persentase budaya yang dilestarikan | | Disbudpar |
| Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | Persentase kemitraan dengan pelaku budaya | | Disbu dpar |
| Program Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman | | | Persentase cagar budaya dan museum yang dilestarikan | | Disbudpar |
| Program Pembinaan Seni dan Perfilman | | | Persentase hasil karya seni dan perfilman | | Disbudpar |
| Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya | | | | | Disbudpar |
| Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya | | | Persentase pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya | | Disbudpar |
| PEMUDA DAN OLAH RAGA | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan | | | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 287 pemuda | Dispora |
| Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | | | Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan | 74 Pemuda | Dispora |
| Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba | | | Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba | 250 pemuda | Dispora |
| Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga | | | Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga | 3 kali | Dispora |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | | | Jumlah atlet dan pelatih yang dibina | 70 orang | Dispora |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga | | | Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun di sport center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2 Sapras | Dispora |
| Program Pembinaan Generasi Muda | | | Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda | 32 pemuda | Dispora/Biro Kesra |
| **KESBANG DAN POLITIK DALAM NEGERI** | | | | | |
| Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan | persentase desa yang diinterpensi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | 35% | Kesbanglinmas |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | (dari jumlah total desa) | | |
| Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal | | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan poskamling (dari jumlah total desa) | 35% | Kesbanglinmas |
| Program Pengembangan wawasan Kebangsaan | | | Meningkatnya wawasan kebangsaaan | | Kesbanglinmas |
| Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan | | | Meningkatnya kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan | | Kesbanglinmas |
| Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | | | Menurunnya tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyakit masyarakat | | Kesbanglinmas |
| Program pendidikan politik masyarakat | | | Persentase Kelompok masyarakat yang ikut dalam politik (Dari jumlah total kelompok) | 35% | Kesbanglinmas |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan | | | Persentase kelompok pemebrdayaan masyarakat yang ikut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan (dari jumlah total kelompok total) | 60% | Kesbanglinmas |
| Program Kemitraan Kamtibmas | | | Persentase kemitraan yang dilaksanakan dalam kamtibmas | 70% | Kesbanglinmas |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Budaya | | | | | Kesbanglinmas |
| Program Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | Kesbanglinmas |
| Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada | | | | | Kesbanglinmas |
| Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | Kesbanglinmas |
| **OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;** | | | | | |
| Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota | | | | | DPPKAD |
| Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 6 Diklat | Sekretariat DPRD |
| Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah | | | Terwujudnya Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah | | Sekretariat Daerah |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | Terwujudnya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Terlaksananya pelaksanaan TP di 7 kab/kota serta | Biro Pemerintahan |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | peningkatan kualitas SDM sebanyak 100 orang dan terlaksananya pembinaan dan monitoring laporan pelaksanaan keuangan di provinsi dan 7 kab/kota | |
| Prog. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | | | jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke kas daerah/negara atas temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa temuan kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah | | Inspektorat, Satpol-PP |
| Prog. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | | | Jumlah pegawai yang telah memiliki sertifikasi penjejangan jabatan fungsional Auditor (JFA) dan pejabat pengawas penyelenggaraan urusan | | Inspektorat, Badan Diklat, BKD |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | pemerintahan daerah (P2UPD) serta jumlah pegawai yang dikirim untuk mengikuti diklat teknis lainnya | | |
| Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi | | | Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | LAKIP (Nilai A) | Biro Organisasi, Inspektorat |
| Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | Jumlah penangganan pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan | 5 Kasus | Inspektorat |
| Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | | | Terwujudnya optimalisasi perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan dan pengawasan kerjasama daerah | Terwujudnya capacity building dalam mendorong dan memfasilitasi kerjasama daerah, serta terevaluasinya permasalahan/kendala pelaksanaan kerjasama daeerah tingkat provinsi dan kab/kota | Biro Pemerintahan |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | | | Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan | | Biro Hukum |
| Program Penataan Daerah Otonomi Baru | | | Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di 7 kabupaten/kota serta terlaksananya sosialisasi 20 urusan wajib dan pilihan terkait dengan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota | Biro Pmerintahan |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan | | | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur | Tersedianya Pedoman Peraturan tentang kecamatan, desa/kelurahan, | Biro Pemerintahan |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | pemerintahan kecamatan, desa/kelurahanterhadap peraturan perundangan yang berlaku | terselengggaranya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur | |
| Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | | | efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan | 42 SKPD (Evaluasi Jabatan) | Biro Organisasi |
| Program peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | | | meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah | 42 SKPD (SOP, SPM, SP, TND, IKM) | Biro Organisasi |
| Program Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda) | | | Terlaksananya Legislasi Daerah dengan baik dan lancar | 12 Perda | Biro Hukum |
| Program Bantuan Hukum | | | Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan kepada aparatur /masyarakat | | Biro Hukum |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) | | | Jumlah Perda/Pergub yg terkait dengan pelayanan publik | | Biro Hukum |
| Program Penataan dan Dokumentasi Hukum | | | Jumlah Perda/Pergub yang sdh ditata dan didokumentasikan | | Biro Hukum |
| Sosialisasi Hukum dan Produk Perundang-undangan | | | Jumlah Sosialiasai Penyuluhan Hukum/Perundangan-undangan yang dilakukan | | Biro Hukum |
| Program Penataan di Bidang Administrasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jumlah Naskah Akademik yang disusun/dibuat | | Biro Hukum |
| Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah | | | Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kepala daerah | Tersusunnya pelaporan kepala daerah yang akuntabel dan peningkatan pemahaman SDM sebanyak 70 orang terhadap sistem pelaporan kepala daerah | Biro Pemerintahan |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | | | meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD | 14 LTD | Biro Organisasi |
| Program pengembangan koordinasi dan sikronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | | | Meningkatnya koordinasi dan sikronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD | 1 kota | Biro Organisasi |
| program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi | | | tertatanya manajemen pengelolaan SKPD | 14 LTD | Biro Organisasi |
| Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | | | Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan | 100% | BPBD |
| Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat | | | Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana | 100% | BPBD |
| Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | | | Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana | 50% | BPBD |
| Program Pendidikan Kedinasan | | | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan yang terkait dengan kedinasan | 55 | BKD |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | | Bandiklat |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan | 65% | Bandiklat |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | Aparatur | | |
| Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah | | | | | DPPKAD |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Represif Terhadap Produk Hukum Kab/Kota | | | | | Biro Hukum |
| **KETAHANAN PANGAN** | | | | | |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>4. Meningkatnya daya beli masyarakat | Persentase cadangan pangan pemerintah | 100% | Badan Ketahanan Pangan |
| **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** | | | | | |
| Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa | 1. Penguatan *rural urban linkages*<br>2. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<br>3. Program **SATAM EMAS** | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>4. Meningkatnya daya beli masyarakat | Persentase lembaga keuangan mikro perdesaan/usaha ekonomi produktif yang berfungsi (jumlah keseluruhan desa) | 75% | BPMPD |
| Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan | | | Persentase desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan yang mengaplikasikannya | 60% | BPMPD |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | 5. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | (Jumlah seluruh Desa/kelurahan) | | |
| Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan | | | Rasio Jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan jumlah penduduk desa/kelurahan (1 desa/20 Kelompok pemberdayaan..kondisi skr 6 kelompok)) | 0,45% | BPMPD |
| Program Pengelolaan SDA Desa/kelurahan dan Pengembangan TTG | | | Prosentase jumlah desa yang mengelola SDA dengan mendayagunakan TTG | 50% | BPMPD |
| Program Beras Miskin Gratis (Raskintis) | | | *Persentase rumah tangga miskin yang mendapat raskintis (Jumlah seluruh keluarga miskin)* | *100%* | BPMPD |
| **STATISTIK** | | | | | |
| Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah | | | Meningkatnya kualitas Pelaporan atas Evaluasi/Pemutakhiran Sistem pelaporan penyelenggaraan rencana pembangunan daerah yang disesuaikan dengan Dokumen Perencanaan | | Bappeda |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| **KEARSIPAN** | | | | | |
| Program Perbaikan SIstem Administrasi Kearsipan | | | Persentase system kearsipan yang diterapkan | | BPAD |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah | | | Persentase dokumen arsip yang berhasil diselamatkan | | BPAD |
| Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan | | | Persentase jumlah sarana dan prasarana kearsipan | | BPAD |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Meningkatkan apresiasi aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan serta peningkatan sarana kearsipan bagi pemerintahan desa/kelurahan | 40 desa/ kelurahan | BPAD |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan | | | Jumlah Aparatur yang dibina dan dikembangkan dalam pemahaman kearsipan | 160 org | BPAD |
| **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | |
| Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar | Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan | Terpenuhinya infrastruktur dan komunikasi dan informatika di tujuh kab/kota | | Diskominfo |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | wilayah | | | | |
| Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi | | | Tersedianya SOP bagi SKPD dalam pengelolaan TI | | Diskominfo |
| Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | | | Terwujudnya peningkatan SDM Komunikasi dan Informatika | | Diskominfo |
| Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media | | | Tersampaikan informasi kegiatan pembangunan daerah melalui website Prov. Kep. Babel | | Diskominfo |
| Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | | | Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat | | Diskominfo |
| Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | | | Diskominfo |
| **PERPUSTAKAAN** | | | | | |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Persentase desa/kelurahan yang diinterpensi pengembangan budaya baca | 120 desa | BPAD |
| **PILIHAN** | | | | | |
| **PERTANIAN** | | | | | |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi<br>Penguatan *rural* | 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.<br>2. Berkembangnya sentra-sentra | Persentase kelompok tani yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok tani miskin) | | Distanbunak, Bakorluh |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | *urban linkages* | produk unggulan daerah | | | |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | 3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>5. Meningkatnya daya beli masyarakat<br>6. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | Pengembangan kawasan perkebunan | Meningkatnya sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan yang tepat guna | Distanbunak, Bakorluh |
| Program Peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan | | | Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi yang memadai | Tersedianya sarana produksi pertanian/ perkebunan | Distanbunak |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak | | | pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan petani dan petugas | Pengendalian serta pemberantasan penyakit hewan menular di Bangka Belitung | Distanbunak |
| Program Peningkatan produksi hasil peternakan | | | Persentase kelompok ternak yang menerima manfaat (dari jumlah total kelompok ternak miskin) | | Distanbunak |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | | | Jumlah kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang dapat mengembangkan usahanya | 20 kelompok | Bakorluh |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha | | | Jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 orang | Distanbunak |
| Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | | | Jumlah Balai Penyuluh Pertanian/Kecamatan yang difasilitasi dan dikembangkan pada 7 | 6 unit BPP/BPK | Bakorluh |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | | | | | Distanbunak |
| Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan | | | | | Bakorluh |
| **KEHUTANAN** | | | | | |
| Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan | 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup<br>2. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang<br>3. Pengendalian pemanfaatan ruang | 1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.<br>2. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan. | Jumlah kelompok usaha masyarakat sekitar kawasan hutan yang didampingi | 4 kelompok | Dishut |
| Program Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat | | | Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan | Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas | Dishut |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | | | Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal | meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan dan tertip penatagunaan kawasan hutan | Dishut |
| Program perlindungan dan konservasi SDA | | | Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan | terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan | Dishut |
| **ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>2. Meningkatnya daya beli masyarakat | DBH sektor Migas (milyar rupiah) | 6 | Distamben |
| | | | DBH sektor tambang (milyar rupiah) | 65 | Distamben |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan | Tersedianya laporan pelaksanaan program reklamasi dan pasca Tambang sebanyak 75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiaan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi. | 15 Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang, 13 Lap pelaku tambang yang dibina dan 4 kegiatan peningkatan SDM | Distamben |
| Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>2. Meningkatnya daya beli masyarakat | PLT Hubrid 9 (sembilan) unit; PLTS Terpusat 10 (sepuluh) unit; PLS Tersebar 300 unit; PJU 1000 unit; Energi Baru Terbarukan (EBT) 5 (lima) paket; PLTU 193 MW; JTM 1.107,1 kms, JTR 1.239,9 kms; 1 (satu) laporan DED PLTMH; 1 (satu) Peraturan Gubernur | PLT Hybrid 2 unit; PLTS Terpusat 2 unit; PLTS Tersebar 60 unit; PJU 200 unit; EBT 1 paket; PLTU 30 MW; JTM 231,1 kms; JTR 258,8 kms | Distamben |
| Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan | Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung | 40 laporan | Distamben |
| Program Peningkatan Penganekaragaman Sumber Energi Alternatif Berbasis Lokal | | | Berkembangnya energi alternatif berbasis potensi lokal | Pengembangan energi alternatif (2 unit | Distamben |
| PARIWISATA | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | | | | | Disbudpar |
| Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Jumlah Desa sebagai Desa Wisata (Destinasi) | 80 | Disbudpar |
| Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata | | | Persentase kemitraan dengan pelaku wisata | | Disbudpar |
| Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya | | | | | Disbudpar |
| Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK | | | | | Disbudpar |
| **KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan | Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. | Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil Terluar yang dikelola (Pulau) | 12 pulau | DKP |
| Program Pengembangan Perikanan Budidaya | | | Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPI) Provinsi | 125 | DKP |
| Program Pengembangan Perikanan Tangkap | 1. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan | 1. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.<br>2. Meningkatnya kemandirian | Produksi perikanan tangkap (ton/tahun) | 175.000 | DKP |
| | | | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 125 | DKP |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan | kemiskinan<br>2. Program SATAM EMAS<br>3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | usaha dan kualitas tenaga kerja.<br>3. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah<br>4. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>5. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>6. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>7. Meningkatnya daya beli masyarakat. | Nilai ekspor hasil perikanan (USD juta) | | DKP |
| **PERDAGANGAN** | | | | | |
| Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>4. Meningkatnya daya beli masyarakat | - Retribusi Tera (Rp 000) | 266 | Disperindag |
| Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | | - Jumlah Pedagang UMKM | 1.358 | Disperindag |
| | | | - Jumlah Pasar Percontohan | 5 | Disperindag |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Peningkatan Pengembangan Ekspor | | | | | Disperindag |
| **PERINDUSTRIAN** | | | | | |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | 1. Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.<br>2. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>3. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>5. Meningkatnya daya beli masyarakat. | Jumlah unit usaha industri kecil dan menengah sebanyak 7.145 unit | 7.075 | Disperindag |
| | | | Total nilai investasi industri kecil dan menengah (Rp. milyar) | 359.561 | Disperindag |
| Program Penataan Struktur Industri | | | Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan sebanyak 5 jenis | 1 | Disperindag |
| Program Perencanaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial | | | Jumlah OVOP IKM Percontohan | 2 | Disperindag |
| | | | Jumlah forum pembentukan OVOP | 1 | Disperindag |
| Program pengembangan Industri Berbasis Sumber daya Alam (Agro dan Non Agro) | | | Jumlah potensi sumber daya alam yang dikembangkan | 1 | Disperindag |
| Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri | | | | | Disperindag |
| Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi | | | | | Disperindag |
| **KETRANSMIGRASIAN** | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Ssasaran Daerah | Indikator Kinerja | | SKPD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tolok Ukur | Target | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Penguatan *rural urban linkages* | 1. Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah<br>2. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran<br>3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat<br>4. Meningkatnya daya beli masyarakat | Jumlah pemukiman dalam kawasan transmigrasi | 100 kk | Disnakertrans |
| Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | | | Berkembangnya masyarakat dalam kawasan transmigrasi yang berintegrasi | 6 kgf | Disnakertrans |

## 5.2 Pagu Indikatif

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk merencakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penentuan pagu indikatif didasarkan oleh beberapa kriteria antara lain:

1. Realisasi APBD tahun 2014;
2. Anggaran 2015;
3. Dukungan SKPD terhadap prioritas RPJMD 2012-2017;
4. Dampak langsung maupun tidak langsung SKPD terhadap masyarakat;
5. Hasil penilaian LAKIP tahun 2014.

Berdasarkan beberapa kriteria dimaksud, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2016 sebagai berikut:

**Tabel V.2**
Pagu Indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

| No. | SKPD | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Dinas Pendidikan | 59,907,062,347.06 |
| 2. | Dinas Kesehatan | 60,982,677,697.00 |
| 3 | Rumah Sakit Jiwa | 54,904,469,532.67 |
| 4 | Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi | 76,636,364,023.00 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum | 233,074,046,762.00 |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 25,703,584,500.00 |
| 7 | Dinas Perhubungan | 36,746,184,899.75 |
| 8 | Badan Lingkungan Hidup Daerah | 16,996,408,159.00 |
| 9 | Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak | 13,402,391,758.00 |
| 10 | Dinas Kesejahteraan Sosial | 24,239,650,161.57 |
| 11 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 14,787,326,625.00 |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 28,264,521,977.00 |
| 13 | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 14,691,348,437.00 |
| 14 | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | 10,412,560,914.00 |
| 15 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 29,202,886,000.00 |
| 16 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 24,479,610,716.00 |
| 17 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 15,134,502,450.48 |
| 18 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 12,937,690,080.00 |
| 19 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1,582,408,920.00 |
| 20 | Sekretariat Daerah | 149,211,174,375.00 |

| No. | SKPD | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 21 | Sekretariat DPRD | 86,472,707,505.00 |
| 22 | Inspektorat | 22,927,674,761.20 |
| 23 | Badan Kepegawaian Daerah | 24,650,611,332.00 |
| 24 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 26,547,353,445.61 |
| 25 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | 833,306,628,085.21 |
| | A. Belanja SKPD DPPKAD | 77,301,275,963.00 |
| | B. Belanja PPKD | 756,005,352,122.21 |
| 26 | Sekretariat KORPRI | 7,958,318,190.00 |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja | 23,589,932,980.00 |
| 28 | Kantor Perwakilan | 10,990,289,975.86 |
| 29 | Badan Ketahanan Pangan | 13,090,821,917.17 |
| 30 | Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 32,406,933,198.00 |
| 31 | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah | 24,232,757,450.05 |
| 32 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 19,086,572,000.00 |
| 33 | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan | 42,510,641,595.48 |
| 34 | Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 12,277,526,900.00 |
| 35 | Dinas Kehutanan | 18,579,901,000.00 |
| 36 | Dinas Pertambangan dan Energi | 21,203,916,480.00 |
| 37 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 34,282,593,987.00 |
| 38 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 26,755,945,905.00 |
| | **JUMLAH** | **2,184,167,997,042.11** |

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

# BAB VI
# PENUTUP

# BAB VI
# PENUTUP

Bahwa keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan serta diikuti dengan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aparat Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintahan lainnya, untuk bersama-sama masyarakat secara sungguh-sungguh melaksanakan dan saling bersinergi dalam mendukung program-program pembangunan sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Bangka Belitung.

Rencana Kerja Pemerinrah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012–2017. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan hasil analisis, penegndalian serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015.

RKPD Tahun 2016 merupakan upaya memantapkan Pembangunan secara menyeluruh. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2016, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 13 (tiga belas) prioritas daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016, SKPD, dan seluruh pelaku pembangunan wajib menerapkan prinsip-prinsi pefisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergis.
2. Berkaitan dengan partisipasi stakeholder pembangunan, peran serta dan kontribusi dunia usaha, komunitas dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dan aktif sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2016.
4. RKPD Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5. Dalam menyusun RAPBD Tahun 2016, RKPD Tahun 2016 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD.
6. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA SKPD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2016.
7. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, difasilitasi melalui Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang dan Sistem Informasi Perencanaan On-Line.
8. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja SKPD dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda sebagai dasar pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2016.
9. BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari Renja SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan rencana.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

## LAMPIRAN I

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Total Belanja langsung | | | | | | | | | | 51.340.738.500 | | | |
| 1,01 | Belanja Rutin | | | | | | | | | | 8.487.903.000 | | | |
| 1,01 | Bidang Urusan Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | | Tersedianya layanan administrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | | | | 2.692.208.000 | | | |
| 1.01.01.01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Pangkalpinang | | | 1. Jumlah surat yang dikirim | 1000 surat | 1. Terlaksananya pengiriman surat dinas | 100% | 16.500.000 | 50.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Jumlah materai yang dibeli | 1250 materai | 2. Pemakaian untuk | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Langganan Koran/surat kabar | 6 Macam Surat kabar | 3. Tersedianya koran untuk dibaca | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4. Pemasangan iklan | 15 kali | 4. Terlaksananya pemasangan iklan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 5. Langganan internet | 12 bulan | 5. Terlaksananya fasilitas internet oleh pegawai | 100% | | | | |
| 1.01.01.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | Pangkalpinang | | | 1. Langganan jasa telepon | 12 bulan | 1. Terlaksananya pemakaian fasilitas telepon/faks | 100% | 150.000.000 | 350.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Langganan jasa listrik | 12 bulan | 2. Terlaksananya pemakaian listrik kantor | 100% | | | | |
| 1.01.01.01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Pangkalpinang | | | 1. Tenaga Pengelola Keuangan | 16 orang | 1. Terlaksananya penatausahaan keuangan | 100% | 191.790.000 | 250.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Pangkalpinang | | | 1. Penyediaan sarana kebersihan kantor | 12 bulan | 1. Terlaksananya kebersihan kantor | 100% | 36.000.000 | 50.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | | | 1. Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan | 1. Terlaksananya penyediaan ATK | 100% | 160.000.000 | 200.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.01.1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Pangkalpinang | | | 1. Penyediaan barang cetakan, penjilidan, spanduk | 12 bulan | 1. Tersedianya barang cetakan dan penjilidan dan spanduk | 100% | 43.000.000 | 75.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.01.1700 | Penyediaan makanan dan minuman | | | Pangkalpinang | | | 1. Penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu | 12 bulan | 1. Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu | 100% | 40.000.000 | 85.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.01.1800 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | | | Pangkalpinang | | | 1. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | 1. Terlaksananya rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 810.968.000 | 850.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| 1.01.01.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 1.093.950.000 | 1.200.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | | | | 5.201.460.000 | | | |
| 1.01.01.02.1300 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 bulan | 1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bagi pegawai | 100% | 327.500.000 | 350.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | | | 1. Pemeliharaan Gedung Kantor | 12 bulan | 1. Tersedianya pemeliharaan gedung kantor | 100% | 175.000.000 | 250.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.01.01.02.2400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | 1. Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional | 100% | 250.960.000 | 275.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.02.2801 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | 1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 12 bulan | 1. Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 21.000.000 | 30.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.02.xxxx | Pengadaan Kendaraan Dinas | | | | | | 1. Pengadaan kendaraan dinas | Kendaraan roda 2 dan roda 4 | 1. Tersedianya kendaraan operasional kantor | 100% | 1.000.000.000 | - | Dinas Pendidikan | Usulan Baru |
| 1.01.01.02.xxxx | Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis | | | | | | 1. Pembangunan Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis | 1 Mushola | 1. Tersedianya Fasilitas Penunjang Pusat Layanan Autis | 100% | 1.281.000.000 | - | Dinas Pendidikan | Usulan Baru |
| 1.01.01.02.xxxx | Pembangunan Gedung kantor | | | | | | 1.Pembangunan Gedung kantor | Gedung kantor 576 m2 | tersedianya gedung kantor 576 m2 | 100% | 2.146.000.000 | - | Dinas Pendidikan | Usulan Baru |
| **1.01.01.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | | **Peningkatan Disilpin Pegawai** | **100%** | | | | | **594.235.000** | | | |
| 1.01.01.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas | | | | | | 1. Penyediaan pakaian dinas pegawai | 200 stel | 1. Tersedianya pakaian dinas pegawai | | 151.175.000 | 180.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| 1.01.01.03.1100 | Peningkatan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan | | | | | | 1. Pelaksanaan upacara hari-hari besar | | | | 418.060.000 | 450.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Pemberian hadiah kepada orang berprestasi di pendidikan | 100 orang | 1. Tersalurnya hadiah dari pemerintah provinsi | 100% | | | | |
| | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **42.852.835.500** | | | |
| **1.01.01.15** | **Program Pendidikan Anak Usia Dini** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | | **APK PAUD** | | | | | | **2.375.491.000** | | | |
| | | | | | **TK/RA Terakreditasi min B** | | | | | | | | | |
| 1.01.01.15.7200 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD TK/RA | | | | | | | | | | 390.055.000 | 450.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 1. Pelatihan Pendidik TK/RA Terlatih | 126 pendidik | 1. Tesedianya pendidik TK/RA terlatih | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2. Pengelolaan Lembaga TK/RA memiliki Sarpras sesuai SNP | | 2. Tersedianya RK/RA memiliki sapras sesuai SNP | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Pengelolaan Pengelolan TK/RA menerapkan MPMBS | | 3. Tersedianya TK/RA yang menerapkan MPMBS | 100% | | | | |
| 1.01.01.15.7202 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Non Formal | | | | | | 1. Pelatihan Pendidik PAUD NF Terlatih | 360 orang | 1. Tersedianya Pendidik dan pengelola PAUD terlatih | 100% | 1.985.436.000 | 2.000.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Desa Terlayani PAUD NF | | 2. Tersedianya layanan PAUD NF di desa | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Pelaksanaan Lembaga PAUD NF menerapkan Parenting Education | | 3. Tersedianya PAUD yang menerapkan parenting education | 100% | | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | 4. Penyediaan Lembaga PAUD Memiliki Sarpras Sesuai Standar | | 4. Tersedianya PAUD yang memiliki sapras sesuai standar | 100% | | | | |
| **1.01.01.16** | **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | | **APK SD/MI** | **116,26%** | | | | | **13.741.475.000** | | | |
| | | | | | **APK SMP/MTs** | **97,96%** | | | | | | | | |
| | | | | | **APM SD/MI** | **97,00%** | | | | | | | | |
| | | | | | **APM SMP/MTs** | **84,00%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Angka DO SD/MI** | **0,30%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Angka DO SMP/MTs** | **0,23%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Kelulusan SD/MI** | **98,00%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Kelulusan SMP/MTs** | **99,35%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Angka Melanjutkan SD/MI** | **100,00%** | | | | | | | | |
| | | | | | **Angka Melanjutkan SMP/MTs** | **100,00%** | | | | | | | | |
| 1.01.01.16.9201 | Pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan SD/MI/SLB | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Pelaksanaan lomba-lomba siswa SD/MI/SDLB | 4 jenis lomba | 1. Terseleksinya siswa mengikuti lomba di tingkat nasional | 100% | 7.399.000.000 | 7.500.000.000 | | |
| | | | | | | | 2. PelatihanGuru SD/MI Terlatih | 6 jenis pelatihan | 2. Tersedianya guru SD/MI/SDLB yang terlatih | | | | | |
| | | | | | | | SD/MI menerapkan MPMBS | | | | | | | |
| 1.01.01.16.9300 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMP | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Pelaksanaan lomba-lomba siswa SMP/MTs/SMPLB | 3 jenis lomba | 1. Terseleksinya siswa mengikuti lomba di tingkat nasional | 100% | 6.342.475.000 | 6.500.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Pelatihan Guru SMP/Mts/SMPLB/MI Terlatih | 7 jenis lomba | 2. Tersedianya guru SD/MI/SDLB yang terlatih | | | | | |
| **1.01.01.18** | **Program Pendidikan Non Formal** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Angka Buta Aksara** | **2,50%** | | | | | **6.057.368.000** | | | |
| | | | | | **Persentase Kelulusan UNPK** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Pengangguran Terlatih** | | | | | | | | | |
| 1.01.01.18.2600 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan | | | | | **78,00%** | 1. Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C | 10.432 | 1. Tersedianya keg belajar paket | | 3.197.368.000 | 3.250.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | **19,23%** | 2. Pelatihan Tutor terlatih | 35,00% | 2. Tersedianya tutor terlatih | | | | | |
| | | | | | | | 3. Rata-rata Nilai UNPK Paket A | 6,20 | 3. Rata-rata Nilai UNPK Paket A | 6,20 | | | | |
| | | | | | | | 4. Rata-rata Nilai UNPK Paket B | 6,20 | 4. Rata-rata Nilai UNPK Paket B | 6,20 | | | | |
| | | | | | | | 5. Rata-rata Nilai UNPK Paket C | 6,20 | 5. Rata-rata Nilai UNPK Paket C | 6,20 | | | | |
| 1.01.01.18.2700 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Kursus dan Pelatihan dan Penuntasan Buta Aksara | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Lembaga Kursus memiliki izin operasional | 118 | 1. Tersedianya lembaga Kursus memiliki izin operasional | 100% | 2.860.000.000 | 3.000.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | Lembaga Kursus/Pelatihan terakreditasi | 25 | 2. Tersedianya Lembaga Kursus/Pelatihan terakreditasi | 100% | | | | |
| **1.01.01.22** | **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | | | | **Jumlah peserta kursus bersertifikat** | **5.370** | **3. Tersedianya peserta kursus bersertifikat** | **100%** | **1.566.100.000** | | | |
| | | | | | | | lembaga kursus/pelatihan memiliki sar/pras produktif | 100% | 4. Tersedianya lembaga kursus/pelatihan memiliki sar/pras produktif | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik kursus bersertifikasi | 25 | 5. Tersedianya Jumlah Pendidik kursus bersertifikasi | 100% | | | | |
| 1.01.01.22.2000 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Dokumen Renja Dinas Pendidikan | 1 Dok | 1. Tersedianya Renja Dinas Pendidikan | 100% | 628.575.000 | 650.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan | 1 Dok | 2. Tersedianya Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4. Kepala Sekolah Menegah | 1 Dok | 3. Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran Dinas Pendidikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Tahun 2015 | 1 Dok | 4. Tersedianya Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Tahun 2015 | 100% | | | | |
| 1.01.01.22.2200 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan Prov. Kep. Babel | 1 Dok | Tersedianya Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan Prov. Kep. Babel | 100% | 250.000.000 | 275.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Dokumen Laporan Akhir Tahun Disdik Prov. Kep. Babel | 1 Dok | Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun Disdik Prov. Kep. Babel | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3. Laporan Bulanan Daya Serap Anggaran | 1 Dok | Tersedianya Laporan Bulanan Daya Serap Anggaran | 100% | | | | |
| 1.01.01.22.2300 | Pendataan dan Sistem Informasi Pendidikan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Data Pokok Pendidikan Tk. Provinsi | 1 Dok | 1. Tersedianya Data Pokok Pendidikan Tk. Provinsi | | 687.525.000 | 700.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Profil Pendidikan Tk. Profinsi | 1 Dok | 2. Tersedianya Profil Pendidikan Tk. Profinsi | | | | | |
| **1.01.01.28** | **Program Pendidikan Menengah dan Tinggi** | **Peningkatan perluasan dan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung** | | **APK SMA/MA/SMK** | **95,95%** | | | | | **19.112.401.500** | | | |
| | | | | | **APM SMA/MA** | 75,00% | | | | | | | | |
| | | | | | **Angka DO SMA/MA** | 0,31% | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA** | 99,00% | | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase Kelulusan Siswa SMK** | 99,00% | | | | | | | | |
| | | | | | **Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan** | 750 Org | | | | | | | | |
| 1.01.01.28.0102 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA/SMALB | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Penyelenggaraan Ujian Nasional | 7,60 | 1. Rata-rata nilai UN Siswa SMA/MA IPA | 7,60 | 7.249.995.000 | 7.500.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | | 7,20 | Rata-rata nilai UN Siswa SMA/MA IPS | 7,20 | | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | 2. Pelatihan guru | 50,00% | 2. Tersedianya Guru SMA/MA terlatih | 50,00% | | | | |
| | | | | | | | 3. Lomba-lomba siswa | 70,00% | 3. Terseleksinya siswa mengikuti lomba tingkat nasional | 70,00% | | | | |
| 1.01.01.28.0200 | Pendampingan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMK | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Penyelenggaraan Ujian Nasional | 7,15 | 1. Rata-rata nilai UN Siswa SMK | 7,15 | 7.553.246.500 | 7.750.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | 2. Pelatihan guru | 50,00% | 2. Tersedianya Guru SMA/MA terlatih | | | | | |
| | | | | | | | 3. Lomba-lomba siswa | 18,39 | 3. Terseleksinya siswa mengikuti lomba tingkat nasional | | | | | |
| | | | | | | | 4. Pelatihan Sekolah menerapkan pendidikan kewirausahaan | 100% | 4. Tersedianya sekolah yang menerapkan pendidikan kewirausahaan | | | | | |
| 1.01.01.28.01400 | Pembinaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah ke Jenjang Perguruan Tinggi | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Beasiswa mampu berprestasi dan miskin berprestasi | 750 Org | Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin dan Berprestasi | 750 Org | 4.309.160.000 | 4.700.000.000 | Dinas Pendidikan | Sedang Berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | TOTAL BELANJA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | | | | | | | | | | 10.190.345.444 | 11.718.897.261,03 | | |
| | Total Belanja Langsung | | | | | | | | | | 48.567.717.936 | | | |
| 1 | Urusan Rutin | | | | | | | | | | 4.579.775.000 | | | |
| 1.02 | Bidang Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 2.906.025.000 | | | |
| 1.02.01.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Terdistribusinya surat menyurat | 12 Bulan | Tersedianya jasa pelayanan surat menyurat | 100% | 64.995.000 | 74.744.250,00 | F | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | 366.000.000 | 420.900.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.0600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas | 4 Mobil dan 7 Motor | Meningkatnya pelayanan operasional kantor | 100% | 322.730.000 | 371.139.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya jasa pengelola administrasi perkantoran | 54 Orang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran melalui jasa pengelolaan keuangan | 100% | 327.780.000 | 376.947.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Terpenuhinya pemenuhan sarana administrasi perkantoran | 100% | 100.000.000 | 115.000.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya barang pengadaan cetakan dan penggandaan | 30 Paket | Terpenuhinya administrasi operasional kantor | 100% | 239.870.000 | 275.850.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya komponen jaringan listrik Dinas Kesehatan dan Balai Labkesda | 8 Paket | Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan listrik kantor | 100% | 40.000.000 | 46.000.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya surat kabar lokal/nasional dan buku peraturan perundang-undangan | 3 Paket | Tersedianya sumber informasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100% | 16.800.000 | 19.320.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya makan minum tamu dan snack rapat pegawai | 12 Bulan | Terpenuhinya makan minum tamu dan snack rapat pegawai | 100% | 34.200.000 | 39.330.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.1800 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 Tahun | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 400.000.000 | 460.000.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.0119 | Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 1 Tahun | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 100% | 150.000.000 | 172.500.000,00 | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya pelayanan operasional kantor (cleaning service, tukang kebun, staf admin Dinkes, keamanan kantor) | 37 Orang | Meningkatnya kinerja pelayanan kantor Dinkes Provinsi dan Balai Labkes | 12 Bulan | 793.650.000 | 912.697.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.01.8100 | Penyediaan Operasional Kebersihan Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya alat-alat kebersihan kantor | 4 Paket | Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana operasional kebersihan kantor | 100% | 50.000.000 | 57.500.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **1.580.800.000** | | | |
| 1.02.01.02.0500 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Kendaraan operasional kantor Dinas Kesehatan dan Balai Labkesda | 8 Unit | Tersedianya kendaraan dinas dalam meningkatkan operasional kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 mobil dan 5 motor | 680.000.000 | 782.000.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.02.0700 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Perlengkapan gedung kantor | 6 Paket | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 100% | 132.800.000 | 152.720.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Balai Labkesda | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Perawatan dan rehab gedung kantor | 6 Paket | Terpeliharanya gedung kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Balai Labkesda | 100% | 220.400.000 | 253.460.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.02.2800 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Pemeliharaan peralatan kantor | 153 Unit | Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang layak pakai di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Balai Labkesda | 100% | 60.000.000 | 69.000.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.02. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Peralatan gedung kantor | 11 Paket | Tersedianya peralatan gedung kantor | 100% | 356.800.000 | 410.320.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.02. | Pengadaan Meubelair | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana operasional kantor | 100% | Tersedianya meubelair kantor | 7 Paket | Meningkatnya ketersediaan sarana kinerja perkantoran | 100% | 130.800.000 | 150.420.000,00 | Dinas Kesehatan | Baru |
| **1.02.01.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **92.950.000** | | | |
| 1.02.01.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya kedisiplinan pegawai melalui keseragaman pakaian kerja | 100% | Tersedianya pakaian batik cual bagi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi dan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah | 148 Orang | Meningkatnya kedisiplinan pegawai | 100% | 67.950.000 | 78.142.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Jumlah pegawai yang diadvokasi | 40 Orang | Terlaksananya Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | 100% | 25.000.000 | | | |
| **1.02** | **Urusan Wajib Bidang Urusan Kesehatan** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.02** | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **43.987.942.936** | | | |
| **1.02.01.15** | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | | | | | | | | | | **1.734.277.000** | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.15.0100 | Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya persentase ketersediaan obat buffer stok untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota | 90% | Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Provinsi | 1 Paket | Terpenuhinya kebutuhan obat-obat buffer stok dan perbekkes di Instalasi Farmasi Provinsi | 100% | 673.305.800 | 774.301.670,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.15.0100 | Pengadaan Sarana Prasarana dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya kinerja pelayanan kefarmasian | 90% | Tersedianya sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Provinsi | 7 Paket | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Instalasi Farmasi Provinsi | 90% | 755.855.000 | 869.233.250,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.15.1100 | Penggunaan Obat Rasional | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya penggunaan obat rasional di Fasyankes | 90% | Terbinanya petugas kesehatan dalam penggunaan obat rasional | 100 Orang | Meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan dalam penggunaan obat rasional | 90% | 185.206.600 | 212.987.590,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.15.1200 | Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat PKD dan Obat Program | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen perencanaan kebutuhan obat PKD dan obat program | 90% | Terkoordinasinya pengelola obat PKD dan pengelola program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota | 50 Orang | Tersusunnya perencanaan kebutuhan obat PKD dan obat program di tingkat Provinsi | 100% | 119.909.600 | 137.896.040,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.16** | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | | | | | | | | | | **1.256.251.344** | | | |
| 1.02.01.16.1700 | Lomba Balita Sehat dan Sejahtera | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Kabupaten/Kota | Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan anak balita | 100% | Terpilihnya pemenang lomba balita sehat dan sejahtera | 21 Orang | Meningkatkan motivasi perilaku hidup sehat bagi anak usia dini | 100% | 434.054.000 | 499.162.100,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.16.1900 | Penilaian Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Tenaga Gizi Teladan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Pemenang pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat Provinsi | 4 Orang | Meningkatnya motivasi tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat | 70% | 235.161.344 | 270.435.545,60 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.16.2400 | Penilaian Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Tingkat Provinsi | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan bagi usia anak-anak dan remaja | 100% | Terpilihnya peserta lomba balita sehat dan sejahtera | 14 Orang | Meningkatkan motivasi keluarga dalam merawat balita sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan balita | 100% | 385.376.000 | 443.182.400,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.16.2600 | Pemenuhan Instrumen Pemantauan Kesehatan Anak Sekolah | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | - | Terpenuhinya kebutuhan instrumen pemantauan anak sekolah | 100% | Tersedianya instrumen pemantauan kesehatan anak sekolah | 18000 Buku | Meningkatnya pemantauan capaian kesehatan anak sekolah | 100% | 201.660.000 | 231.909.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.19** | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | | **870.105.688** | | | |
| 1.02.01.19.1700 | Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Tersedianya media penyebaran informasi kesehatan melalui pameran dan media | 3 Paket | Meningkatnya penyebaran informasi melalui pameran dan media cetak dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan | 70% | 249.625.016 | 287.068.768,40 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.19.3000 | Pertemuan Koordinasi Forum Desa Siaga Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Terbinanya petugas pokjanal Desa Siaga dan Posyandu (laki-laki 20 orang dan perempuan 20 orang) | 40 Orang | Meningkatkan kinerja pokjanal Desa Siaga dan pokjanal Posyandu | 70% | 72.120.000 | 82.938.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.19.3500 | Pertemuan Koordinasi Saka Bhakti Husada (Pramuka) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Terkoordinasinya petugas pramuka dalam program saka bhakti husada (laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang) | 30 Orang | Meningkatnya promosi kesehatan terhadap petugas saka bhakti husada | 70% | 68.630.000 | 78.924.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.19.3700 | Pengukuran Kebugaran Jasmani bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Terukurnya kebugaran jasmani pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (laki-laki 110 orang dan perempuan 110 orang) | 220 Orang | Tergambarnya status kesehatan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pengukuran kebugaran jasmani | 70% | 76.342.672 | 87.794.072,80 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.19.3900 | Peningkatan Peran Bhakti Husada dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Terlaksananya peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi | 1 Dokumen | Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional | 70% | 148.410.000 | 170.671.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.19. | Peningkatan Promosi Kesehatan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui upaya promotif dan preventif | 70% | Penganugerahan tanda penghargaan bidang kesehatan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola promkes | 3 Paket dan 29 Orang | Terlaksananya peningkatan promosi kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70% | 254.978.000 | 293.224.700,00 | Dinas Kesehatan | Baru |
| **1.02.01.20** | **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** | | | | | | | | | | **1.881.228.000** | | | |
| 1.02.01.20.0200 | Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya status gizi masyarakat melalui pemberian PMT ASI | 75% | Jumlah anak kurang gizi mendapat makanan tambahan | 750 Balita | Terpenuhinya kebutuhan makanan tambahan bagi balita kurang gizi | 75% | 891.646.000 | 1.025.392.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.20.0800 | Peningkatan Konseling Gizi | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penanggulangan kurang gizi | 100% | Tersedianya sarana Konseling Gizi Kit | 63 Paket | Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita | 100% | 628.840.000 | 723.166.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.20.0900 | Pelacakan dan Konfirmasi Kasus Gizi Buruk | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya penanggulangan dan penanganan gizi buruk di masyarakat | 100% | Jumlah balita gizi buruk ditemukan dan ditangani | 60 Balita | Meningkatnya pelacakan kasus gizi buruk untuk mendapat perawatan | 100% | 70.670.000 | 81.270.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.20.1000 | Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Gizi | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pencapaian kinerja program gizi | 100% | Tersedianya dokumen program gizi | 2 Dokumen | Meningkatnya penanggulangan masalah gizi | 100% | 290.072.000 | 333.582.800,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.21** | **Program Pengembangan Lingkungan Sehat** | | | | | | | | | | **2.378.320.600** | | | |
| 1.02.01.21.0500 | Pengembangan Kabupaten/Kota Sehat | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Tersedianya dokumen penilaian Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | Terwujudnya kawasan pengembangan Kabupaten/Kota Sehat melalui pemilihan Kabupaten/Kota Sehat | 100% | 279.777.600 | 321.744.240,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.21.0700 | Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Lingkungan Sehat | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Terbinanya petugas kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan program lingkungan sehat (laki-laki 88 orang dan perempuan 87 orang) | 175 Orang | Meningkatnya capaian kinerja program TTU sesuai standar kesehatan | 100% | 496.478.000 | 570.949.700,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.21.0800 | Percepatan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Tersedianya dokumen STBM | 1 Dokumen | Terwujudnya percepatan pencapaian sanitasi total berbasis masyarakat | 100% | 267.696.000 | 307.850.400,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.21.0900 | Peningkatan SDM dalam Pemantauan Limbah Medis | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Terbinanya petugas dalam pemantauan limbah medis | 50 Orang | Meningkatnya penanganan dan pengelolaan limbah medis | 100% | 277.625.000 | 319.268.750,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.21.1000 | Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dalam Pembinaan Akses Air Minum yang Berkualitas | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan mengelola akses air minum berkualitas terdiri dari laki-laki 34 orang dan perempuan 33 orang | 67 Orang | Meningkatnya pengelolaan air minum yang berkualitas | 100% | 529.646.000 | 609.092.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.21.1100 | Kajian Dampak Radiasi dari Aktivitas Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Tersosialisasinya petugas terhadap dampak radiasi radioaktif bagi kesehatan (laki-laki 25 orang dan perempuan 25 orang) | 50 Orang | Meningkatnya penanggulangan dampak radiasi bagi kesehatan | 100% | 271.884.000 | 312.666.600,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.21.1200 | Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Program dalam Pembinaan Rumah Sehat | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Terbinanya petugas dengan kemampuan pembinaan rumah sehat (laki-laki 34 orang dan perempuan 33 orang) | 67 Orang | Meningkatnya capaian rumah sehat sesuai standar kesehatan | 100% | 255.214.000 | 293.496.100,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.22** | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular** | | | | | | | | | | **3.933.747.860** | | | |
| 1.02.01.22.0800 | Peningkatan Imunisasi | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Tersedianya sarana prasarana penunjang imunisasi | 9 Paket | Meningkatnya pelaksanaan program imunisasi | 80% | 840.740.000 | 966.851.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.2900 | Asistensi Pencapaian UCI | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Tersusunnya dokumen data cakupan imunisasi | 1 Dokumen | Meningkatnya validitas data cakupan imunisasi | 84% | 193.483.500 | 222.506.025,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.4300 | Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersosialisasinya penduduk tentang penanggulangan HIV/AIDS | 140 Orang | Menurunnya prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko) | <10 | 160.285.450 | 184.328.267,50 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.22.4400 | Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Media HIV | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersosialisasinya informasi kesehatan tentang HIV | 1500 Orang | Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung | 100% | 83.781.900 | 96.349.185,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.5500 | Peningkatan Program Kesehatan Matra | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Terbinanya petugas kesehatan dan masyarakat dalam penanganan kesehatan matra | 220 Orang | Meningkatnya upaya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra | 84% | 219.414.000 | 252.326.100,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.7700 | Peningkatan Kapasitas Petugas Kusta dalam rangka Tata Laksana Kusta | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersedianya dokumen pemantauan tata laksana kusta | 1 Dokumen | Menurunnya penyebaran penyakit kusta | 100% | 25.978.000 | 29.874.700,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.8000 | Pengadaan Bahan Habis Pakai Pengendalian Faktor Resiko PTM | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersedianya bahan habis pakai faktor resiko penyakit tidak menular | 4 Paket | Terlaksananya pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular | 100% | 104.810.000 | 120.531.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.8100 | Pemantapan Pelaksanaan Pengendalian Faktor Resiko PTM (Penyakit Tidak Menular) | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular | 20 Orang | Meningkatnya pengendalian dan pengelolaan faktor resiko PTM | 100% | 144.235.000 | 165.870.250,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.22.8200 | Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah (laki-laki 18 orang, perempuan 18 orang) | 36 Orang | Meningkatnya angka penemuan kasus dan penanggulangan wabah/KLB | 84% | 141.377.900 | 162.584.585,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.8900 | Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Program Surveilans | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang program surveilans | 10 Paket | Meningkatnya penyelidikan epidemiologi wilayah yang mengalami KLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84% | 511.130.000 | 587.799.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9000 | Pertemuan Koordinasi Program Pengendalian HIV-AIDS dan IMS | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas dengan kemampuan tata laksana HIV dan IMS | 54 Orang | Menurunnya prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko) | <10 | 166.602.300 | 191.592.645,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9100 | Mobile Klinik HIV dan IMS | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Kabupaten/Kota | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Jumlah pemeriksaan darah ke populasi beresiko | 3000 Orang | Terwujudnya pemeriksaan HIV dan IMS kepada populasi beresiko sehingga menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV/AIDS dan IMS | 100% | 399.962.300 | 459.956.645,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9300 | Monitoring Evaluasi Programatik Manajemen Of Drug Resistence Tuberculosis | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersedianya dokumen pemantauan tata laksana tuberculosis | 1 Dokumen | Meningkatnya angka penemuan kasus tuberculosis | CDR ≥ 70% | 198.073.000 | 227.783.950,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.22.9903 | Pengendalian Penyakit Filariasis | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas dalam pengendalian filariasis | 24 Orang | Meningkatnya penanggulangan penyakit filariasis | 100% | 80.123.910 | 92.142.496,50 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9908 | Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit DBD | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas dalam tata laksana P2 DBD | 60 Orang | Menurunnya angka incidence rate DBD (IR DBD) | ≤50/10000 0 penduduk | 153.631.000 | 176.675.650,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9909 | Pelatihan TB bagi Petugas Fasyankes dalam rangka Penguatan Tata Laksana TB Anak | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya angka penemuan kasus (Case Detection Rate) | CDR ≥ 70% | Terbinanya petugas yang mampu tata laksana penemuan kasus dan pengobatan TB (laki-laki 12 orang dan perempuan 12 orang) | 24 Orang | Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular (TB) | 70% | 116.078.000 | 133.489.700,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9911 | Peningkatan Kapasitas Petugas Program Pengendalian Penyakit Malaria | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Tersedianya laporan pengendalian penyakit malaria | 1 Dokumen | Menurunnya angka kesakitan malaria | < 1/1000 | 80.681.000 | 92.783.150,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22.9914 | Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit Zoonosis | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana pengendalian penyakit zoonosis | 20 Orang | Meningkatnya kemampuan penanganan kasus zoonosis oleh petugas kesehatan | 100% | 156.320.300 | 179.768.345,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.22. | Peningkatan Kapasitas Program Pengendalian Penyakit ISPA | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam pengendalian penyakit ISPA dan diare (laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan 10 orang) | 20 Orang | Menurunnya angka kesakitan ISPA dan diare | 100% | 157.040.300 | 180.596.345,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.02.01.23** | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | | | | | | | | | | **2.650.176.800** | | | |
| 1.02.01.23.1100 | Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar SPM-RS (laki-laki 146 orang dan perempuan 146 orang) | 292 Orang | Meningkatnya pelayanan kesehatan di RS sesuai standar mutu | 100% | 976.595.000 | 1.123.084.250,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.23.1500 | Monitoring dan Evaluasi Program PONEK di RS Provinsi/Kabupaten/Kota | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pelayanan kesehatan RS melalui koordinasi Tim PONEK RS | 2 RS Terakreditasi | Tersedianya dokumen evaluasi Tim PONEK di Rumah Sakit Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Meningkatnya kemampuan petugas pelayanan kesehatan dalam tata laksana PONEK RS | 2 RS Terakreditasi | 128.221.000 | 147.454.150,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.23.1600 | Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Management Mutu Laboratorium | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya pelayanan medik dasar, rujukan dan kefarmasian pada FKTP dan FKTL dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan JKN | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam management mutu laboratorium (laki-laki 13 orang dan perempuan 13 orang) | 26 Orang | Meningkatnya penerapan standar dan pedoman mutu laboratorium | 100% | 102.323.500 | 117.672.025,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.23.1700 | Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan SPM Rumah Sakit | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit | 50% | Terbinanya petugas kesehatan dalam penerapan SPM di Rumah Sakit | 267 Orang | Meningkatnya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai standar | 50% | 1.230.815.000 | 1.415.437.250,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.23.2400 | Peningkatan Kemampuan Petugas Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota dan RSJ | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya pengendalian dan pengobatan penyakit infeksi di sarana pelayanan kesehatan rujukan | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi (laki-laki 19 orang dan perempuan 18 orang) | 37 Orang | Meningkatnya pencegahan dan pengendalian infeksi | 100% | 212.222.300 | 244.055.645,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.24** | **Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin** | | | | | | | | | | **18.470.300.000** | | | |
| 1.02.01.24.1100 | Biaya Jaminan Kesehatan Masyarakat Serumpun Sebalai | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kualitas jaminan kesehatan melalui program JKN | 100% | Jumlah penduduk miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai | 79200 Peserta | Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin melalui Jaminan Kesehatan Serumpun Sebalai | 100% | 18.470.300.000 | 21.240.845.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.29** | **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita** | | | | | | | | | | **273.678.000** | | | |
| 1.02.01.29.0900 | Pertemuan Program Kesehatan Anak | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak | 100% | Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap ibu dan anak | 120 Orang | Meningkatnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap ibu dan anak | 100% | 273.678.000 | 314.729.700,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.30** | **Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila** | | | | | | | | | | **364.386.000** | | | |
| 1.02.01.30.0800 | Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan Posyandu Usila | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan usila | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usila (laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang) | 30 Orang | Tersedianya petugas yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan Posyandu Usila sehingga dapat melakukan penguatan dan pembinaan Puskesmas di Kabupaten/Kota | 100% | 364.386.000 | 419.043.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.31** | **Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan** | | | | | | | | | | **647.086.000** | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.31.0200 | Pengawasan dan Pengendalian Hygiene Sanitasi Pengolahan Pangan bagi Industri Makanan | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpantaunya pengawasan faktor resiko kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi pengolahan pangan industri rumah tangga | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dengan kemampuan pengelolaan TPM (laki-laki 34 orang, perempuan 33 orang) | 67 Orang | Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan TPM di Kabupaten/Kota | 100% | 647.086.000 | 744.148.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.32** | **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** | | | | | | | | | | **1.084.461.744** | | | |
| 1.02.01.32.0100 | Pertemuan Program Kesehatan Ibu | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya pembinaan, pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi dan kesehatan anak dalam upaya menurunkan AKI dan AKB | 28 per Kelahiran Hidup | Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana program kesehatan ibu dan anak | 120 Orang | Menurunkan angka kematian ibu | 28 per Kelahiran Hidup | 427.618.000 | 491.760.700,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.32.0200 | Pengembangan Model Kelas Ibu Hamil | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi | Meningkatnya pembinaan, pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi | 95% | Tersosialisasinya pengembangan model kelas ibu hamil | 90 Orang | Meningkatnya dukungan program kesehatan ibu hamil melalui persalinan oleh tenaga kesehatan | 95% | 456.433.744 | 524.898.805,60 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.32.0300 | Pemenuhan Instrument PWS KIA | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | - | Terpenuhinya kebutuhan instrumen PWS KIA | 100% | Tersedianya instrumen PWS | 60000 Buku | Terpantaunya kesehatan ibu dan anak melalui penyediaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu | 100% | 200.410.000 | 230.471.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.33** | **Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan** | | | | | | | | | | **759.208.600** | | | |
| 1.02.01.33.0100 | Rapat Koordinasi Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Barat | Tersusunnya sinkronisasi kebijakan pembangunan kesehatan pusat dan daerah melalui kesepakatan kinerja program kesehatan | 100% | Tersedianya dokumen kesepakatan Rakorkes | 1 Dokumen | Meningkatnya pencapaian target kinerja pembangunan kesehatan nasional dan daerah | 100% | 120.163.000 | 138.187.450,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.33.0300 | Peningkatan Korbinwas SPM Bidang Kesehatan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya pemantauan dan pembinaan terhadap SPM bidang kesehatan | 100% | Terbinanya petugas dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja SPM kesehatan | 46 Orang | Meningkatnya pencapaian indikator SPM kesehatan | 100% | 103.379.000 | 118.885.850,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.33.1200 | Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tersusunnya rencana kerja program, kegiatan dan anggaran bidang kesehatan secara epidance base | 100% | Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran (RKA-DPA, RKA-DPPA, KAK dan Renja) Dinas Kesehatan Provinsi | 4 Dokumen | Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan | 100% | 318.570.000 | 366.355.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.33.1300 | Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi SKPD | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban terhadap kinerja program kesehatan | 100% | Tersedianya dokumen pelaporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi (LKPJ, LAKIP, LPPD dan Laptan) | 4 Dokumen | Tersedianya informasi laporan kinerja program kesehatan melalui dokumen pelaporan Dinkes Provinsi | 100% | 38.900.600 | 44.735.690,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.33.1700 | Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersedianya informasi kesehatan yang berkualitas melalui database | 8 Bank Data | Bank data kesehatan | 8 Bank Data | Tersusunnya data dan informasi bidang kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 8 Bank Data | 178.196.000 | 204.925.400,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.34** | **Program Sumber Daya Kesehatan** | | | | | | | | | | **2.917.769.000** | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.34.0100 | Pengelolaan Tugas Belajar Dokter Spesialis Lanjutan, Spesialis Baru dan Sub Spesialis | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan | 88% | Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dokter spesialis lanjutan 6 orang, spesialis baru 2 orang, sub spesialis baru 2 orang, 3 orang S-1 profesi baru, 3 orang S-1 baru dan 3 orang S-2 baru | 19 Orang | Tersedianya pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis di sarana pelayanan kesehatan | 88% | 1.030.676.000 | 1.185.277.400,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34.0200 | Pelaksanaan Internship Dokter Indonesia | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan | 88% | Tersedianya dokter internship di Kabupaten/Kota | 110 Orang | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan tenaga dokter umum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 88% | 92.512.000 | 106.388.800,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34.0600 | Tim Jabatan Fungsional dan Honorarium Tenaga Kesehatan Khusus | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan | 88% | Terbentuknya Tim Jabfung 30 orang dan pemenuhan tenaga kesehatan khusus (dokter 2 orang, bidan 7 orang, perawat 3 orang, apoteker 2 orang dan 3 perawat mahir/perawat | 30 Orang Tim Jabfung dan 17 Nakes Khusus | Terlaksananya penilaian kinerja pegawai fungsional melalui Tim Jabfung dan terpenuhinya nakes di fasilitas kesehatan | 88% | 593.854.000 | 682.932.100,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34.0700 | Pelatihan Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan | 88% | Terlatihnya tenaga kesehatan sebagai fungsional adminkes | 30 Orang | Tersedianya tenaga kesehatan fungsional adminkes sesuai standar kompetensi | 88% | 268.346.000 | 308.597.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34.0800 | Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan | 88% | Terlatihnya tenaga kesehatan fungsional perawat jenjang ahli | 30 Orang | Meningkatnya kapasitas SDM jabatan fungsional perawat | 88% | 225.839.000 | 259.714.850,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34.2900 | Peningkatan Mutu Tenaga Teknis dan Administrasi Laboratorium | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tewujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia laboratorium | 100% | Tersertifikasinya petugas teknis pelayanan laboratorium | 8 Orang | Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium kesehatan sesuai standar | 100% | 411.034.000 | 472.689.100,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.34. | Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersedianya data tenaga kesehatan tingkat Provinsi | 100% | Tersedianya dokumen deskripsi data tenaga kesehatan | 7 Dokumen | Tersedianya informasi pemetaan tenaga kesehatan melalui dokumen deskripsi nakes | 100% | 295.508.000 | 339.834.200,00 | Dinas Kesehatan | Baru |
| **1.02.01.35** | **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes** | | | | | | | | | | **1.273.716.000** | | | |
| 1.02.01.35.2800 | Kalibrasi Peralatan dan Peningkatan Quality Control Laboratorium | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tercapainya persentase pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium | 100% | Terlaksananya pemeliharaan, kalibrasi alat/peralatan, QC laboratorium di Balai Labkes | 138 Unit | Tersedianya alat/peralatan laboratorium dengan kondisi baik sesuai standar dan peruntukannya | 100% | 222.230.000 | 255.564.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.35.4100 | Penyediaan Perlengkapan Alat/Peralatan, Bahan Material dan Reagensia Laboratorium | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya pelayanan pemeriksaan laboratorium di Balai Labkes | 90% | Tersedianya alat/peralatan, bahan dan reagensia Balai Labkes | 12 Paket | Terpenuhinya kebutuhan alat/peralatan di Balai Labkes | 100% | 1.051.486.000 | 1.209.208.900,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.36** | **Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya** | | | | | | | | | | **2.959.000.300** | | | |
| 1.02.01.36.0100 | Colaborative Improvement Pelayanan PONED-PONEK dalam rangka Implementasi JKN | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tercapainya peningkatan akses dan mutu pelayanan PONED | 100% | Tersedianya petugas yang mampu melakukan penatalaksanaan kasus emergency obstetri dan neonatal dasar sesuai standar | 39 Orang | Meningkatnya kapasitas petugas dalam penerapan standar PONED-PONEK dalam mendukung MDG's | 100% | 438.079.000 | 503.790.850,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.0500 | Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya akses dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan melalui upaya pelayanan medik dasar pada FKTP dan FKTL dalam rangka dukungan terhadap pelaksanaan JKN | 8,06% | Tersedianya FKTP (Puskesmas) terakreditasi | 5 Puskesmas | Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai standar | 8,06% | 506.470.000 | 582.440.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.0600 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung pelayanan di FKTP | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam tata laksana diagnosis dan rujukan | 121 Orang | Meningkatnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas | 100% | 236.500.000 | 271.975.000,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.0700 | Peningkatan Kemampuan Perawat dalam Menerapkan Modal Keperawatan Keluarga | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya upaya pemerataan pelayanan kesehatan dasar | 100% | Terbinanya petugas perawat dalam penerapan asuhan keperawatan | 64 Orang | Terlaksananya peningkatan penerapan keperawatan keluarga dalam mendukung penguatan dan pembinaan Puskesmas di Kabupaten/Kota | 100% | 348.014.500 | 400.216.675,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.0800 | Peningkatan Kemampuan Petugas dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tercapainya peningkatan kesehatan wajib lapor (IPWL) | 100% | Terbinanya petugas kesehatan dalam penatalaksanaan program IPWL dan rehabilitasi medik (laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang) | 30 Orang | Terwujudnya pelaksanaan dan pengelolaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam mendukung gerakan nasional rehab medik | 100% | 141.134.500 | 162.304.675,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.1100 | Sosialisasi Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Jiwa pada Masyarakat Akibat Bencana dan Konflik | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa | 100% | Terbinanya petugas dalam penatalaksanaan program jiwa anak dan remaja (laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang) | 30 Orang | Tersedianya SDM yang profesional di bidang kesehatan jiwa pada masyarakat dalam mendukung penguatan dan pembinaan Puskesmas di Kabupaten/Kota | 100% | 141.134.500 | 162.304.675,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.1300 | Peningkatan Teknis bagi Perawat dalam Menerapkan Perawat Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Dasar | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya kemampuan dan kapasitas petugas kesehatan dalam penerapan perkesmas | 100% | Terbinanya petugas dalam penguatan manajemen Puskesmas (laki-laki 47 orang dan perempuan 47 orang) | 94 Orang | Meningkatnya SDM kesehatan yang profesional di pelayanan kesehatan dasar | 100% | 291.776.000 | 335.542.400,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.1700 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di DTPK | 100% | Terlatihnya petugas dalam penanganan kegawatdaruratan di fasilitas kesehatan (laki-laki 35 orang dan perempuan 35 orang) | 70 Orang | Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan petugas kesehatan yang terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan | 100% | 499.657.000 | 574.605.550,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| 1.02.01.36.1900 | Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Klinik Kesehatan | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Terwujudnya upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan | 100% | Tersedianya dokumen pelaporan | 1 Dokumen | Terlaksananya pelayanan operasional di klinik kesehatan | 100% | 214.900.300 | 247.135.345,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.01.36.3300 | Pelatihan Teknis Kesehatan Indera bagi Dokter dan Perawat Puskesmas | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tercapainya peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan indera | 100% | Terlatihnya tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan indera (laki-laki 15 orang dan perempuan 15 orang) | 30 Orang | Meningkatnya kemampuan dan keterampilan dokter dan perawat Puskesmas mengenai teknis kesehatan indera | 100% | 141.334.500 | 162.534.675,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |
| **1.02.01.37** | **Program Bencana** | | | | | | | | | | **534.230.000** | | | |
| 1.02.01.37.0200 | Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanggulangan Bencana | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular dan terlaksananya pencegahan penyakit melalui imunisasi (PD3I) serta pengawasan penyakit dan situasi/kondisi matra | 74 - 84% | Terbinanya petugas kesehatan dalam penanggulangan kasus bencana | 132 Orang | Meningkatnya kesiapsiagaan petugas kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan pada situasi bencana | 84% | 534.230.000 | 614.364.500,00 | Dinas Kesehatan | Sedang Berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| 1,02 | Bidang Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Belanja Langsung | | | | | | | | | | 29.818.443.806 | | | |
| | Belanja Rutin | | | | | | | | | | 10.017.877.806 | | | |
| 1.02.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 5.794.411.350 | | | |
| 1.02.03.01.01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan | 700 lbr materai ,30 buku cek dan belanja jasa pengiriman | Tersedianya perangko,materai dan benda pos lainnya dan biaya pengiriman surat | 1 thn | 10.835.000 | 11.920.000 | RSJD Prov.Babel | Sedang Berjalan |
| 1.02.03.01.02 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Pemakaian Telephone, air dan listrik yang dibayar | pemakaian Telephone, air dan listrik selama 1 thn | Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air | 1 thn | 349.387.500 | 419.265.000 | RSJD Prov.Babel | Sedang Berjalan |
| 1.02.03.01.07 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Tenaga administrasi keuangan yang dilaksanakan | 37 orang Tenaga Administrasi keuangan | Tersedianya tenaga administrasi keuangan | 38 orang | 340.329.600 | 374.362.560 | RSJD Prov.Babel | Sedang Berjalan |
| 1.02.03.01,08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Tenaga Kebersihan yang dilaksanakan dan Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli | 10 orang tenaga cleaning service, 6 orang satpam, alat kebersihan dan bahan pembersih | Tersedianya tenaga Kebersihan, satpam, alat kebersihan dan bahan pembersih | 1 tahun | 580.000.000 | 650.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.09 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara | 15 Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | 15 Jenis | 145.200.000 | 174.240.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli | ATK selama 1 | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 1 tahun | 245.100.000 | 294.120.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang dibeli | Cetak dan penggandaan selama satu tahun | Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan | 1 tahun | 165.000.000 | 198.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibeli | Alat Listrik dan Elektronik selama 1 tahun | Tersedianya Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor | 1 tahun | 81.191.000 | 97.429.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.15 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah surat kabar dan buku peraturan Perundang-undangan yang dibeli | Jumlah surat kabar selama 1 Tahun | Tersediannya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan | 1 tahun | 30.280.250 | 36.336.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.16 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah tabung gas yang dibeli | tabung gas selama 1 tahun | Tersedianya bahan bakar minyak/gas | 1 Tahun | 108.000.000 | 129.600.000 | RSJD Prov.Babel | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.01.17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah makanan dan minuman pasie,petugas khusus,rapat,petugas jaga sore dan malam bulan puasa dan makanan dan minuman tamu yang dibeli | makanan dan minuman pasien 43.800 orang, petugas khusus 14.600, rapat 1.480 orang, petugas jaga sore dan malam bulan puasa 1.350 paket dan tamu 100% selama 1 thn | Tersedianya makanan dan minuman pasien,petugas khusus,rapat,petugas jaga sore dan malam bulan puasa serta makanan dan minuman tamu | 1 tahun | 1.852.068.000 | 2.222.481.600 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.18 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah | 1 tahun | 500.000.000 | 600.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.1900 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan administrasi Perkantoran | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah tenaga penunjang Pengelola administrasi perkantoran yang dilaksanakan | Tenaga penunjang pengelola administrasi perkantoran | Tersedianya tenaga penunjang pengelola administrasi perkantoran | 45 orang | 1.177.020.000 | 1.294.722.000 | RSJD Prov.Babel | |
| | Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah | | | | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jumlah Kabupaten/Kota yang terkoordinasi dan terkonsolidasi | 6 kabupaten 1 kota | Waktu tersedianya pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah | 12 bulan | 150.000.000 | 165.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.01.5100 | Kegiatan Pengelolaan Website | | | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah software data dan informasi yanag dilaksanakan | software data dan informasi | Tersedianya software data dan informasi | 100% | 60.000.000 | 72.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.02** | **Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur** | **Meningkatnya kapasitas dan kualitas pendidikan,kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat sarana dan prasarana aparatur** | | | | | | | **2.413.516.456** | | | |
| 1.02.03.02.05 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli | Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional | 2 kendaraan | 1.000.000.000 | 1.100.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.02.07 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli | 8 unit lemari, 5 unit filling kabinet, 6 white board, 2 unit mesin air, 1 handycam,1 unit proyektor | Tersedianya 28 unit perlengkapan gedung kantor | 28 unit | 300.000.000 | 360.000.000 | RSJD Prov.Babel | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.02.09 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli | Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 25 unit | 131.316.000 | 157.579.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.02.10 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah Mebeulair yang dibeli | Mebeulair | Tersedianya Mebeulair | 75 unit | 226.860.000 | 272.232.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.02.24 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai | Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional yang layak pakai | 7 unit kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda dua | 555.340.456 | 666.408.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.02.30 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Taman,Tempat Parkir dan Halaman Kantor | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Taman Rumah sakit ,tempat parkir dan halaman kantor yang terpelihara | 1 Paket Taman Rumah Sakit | Terpeliharanya Taman Rumah sakit dengan baik | 1 paket | 200.000.000 | 220.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **614.950.000** | | | |
| 1.02.03.03.02 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Jumlah pakaian dinas yang dibeli | Pakaian Dinas | Tersedianya pakaian dinas | 100% | 196.650.000 | 235.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.03.03 | Kegiatan pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Jumlah pakaian dinas hari-hari tertentuyang dibeli | Pakaian Dinas hari-hari tertentu | Tersedianya pakaian dinas | 100% | 196.650.000 | 235.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.03.04 | Kegiatan pengadaan pakaian olah raga | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Jumlah pakaian dinas yang dibeli | Pakaian olah raga | Tersedianya pakaian dinas | 100% | 196.650.000 | 235.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.03.25 | Kegiatan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Jumlah dokumen penganggaran yang responsif gender yang terlaksana | dokumen penganggaran yang responsif gender | Tersedianya Dokumen Penganggaran yang responsif gender | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat kapasitas sumber daya aparatur** | **100%** | | | | | **1.150.000.000** | | | |
| 1.02.03.05.09. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Informal | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat kapasitas sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Pendidikan dan Pealtihan informal yang diikuti | Workshop, diklat dan Bimtek untuk 1 thn | Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas | 100% | 350.000.000 | 385.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.05.05 | Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Personal Development | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat kapasitas sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Kegiatan Personal developmet yang dilaksanakan | 140 orang peserta personal development | Tersedianya sumber daya rumah sakit jiwa dalam bidang kesehatan dan administrasi | 140 orang | 800.000.000 | 800.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.06.** | **Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **100%** | | | | | **45.000.000** | | | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.06.01. | Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Jumlah laporan capaian kinerja yang dilaksanakan | 1 dokumen LAKIP, 1 dokumen LKPJ dan 1 dokumen LPPD | Tersusunnya LAKIP,LKPJ dan LPPD | 3 dokumen | 45.000.000 | 55.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| | **Total Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **19.800.566.000** | | | |
| **1.02.03.15.** | **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan** | **100%** | | | | | **2.052.869.000** | | | |
| 1.02.03.15.13. | Kegiatan Penyusunan Formularium Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 100% | Jumlah Formularium obat yang dilaksanakan | 1 kegiatan Formularium obat dan perbekalan kesehatan | Tersedianya pelayanan obat dan perbekalan | 100% | 71.060.000 | 86.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.15.19. | Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan | 100% | Jumlah jenis obat yang di beli | 1 thn obat generik dan non generik | Tersedianya obat generik dan non generik kepada publik | 66 jenis | 1.981.809.000 | 2.378.170.800 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.16.** | **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat** | **100%** | | | | | **5.889.347.000** | | | |
| 1.02.03.16.18 | Kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah Pasien dan Pendamping yang mengikuti Jambore Kesehatan Jiwa | 40 orang (pasien dan Pendamping) | Terlaksananya keikutsertaan 40 orang (pasien dan pendamping) | 40 orang | 432.845.000 | 519.414.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.16.2800 | Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan kesehatan | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah jasa pelayanan tenaga medis ,paramedis, non medis dan non paramedis yang dilaksanakan | 262 orang medis.non medis,paramedis dan non paramedis | Tersedianya upaya kesehatan masyarakat | 262 orang | 2.473.562.000 | 3.215.630.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.16.46 | Kegiatan Penyediaan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah Penyuluhan kesehatan jiwa dan home visit yang dilaksanakan | 7 kabupaten/kota Penyuluhan dan home visit | Tersedianya pelayanan jiwa dan home visit | 7 kab/kota | 479.540.000 | 575.448.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.16.90 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah tenaga penunjang dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan | 4 orang tenaga kontrak dokter spesialis PNS dan Non PNS ,60 orang tenaga medis(perawat),10 orang tenaga pramusaji/pengelola makanan | Tersedianya pelayanan kesehatan | 74 orang | 1.900.000.000 | 2.090.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.16.91 | Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah terapi rehabilitasi mental sosial yang dilaksanakan | 7 jenis terapi rehabilitasi mental sosial | Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Mental Sosial | 7 jenis terapi | 375.100.000 | 450.120.000 | RSJD Prov.Babel | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.16.94 | Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan | 1 dokumen laporan monev | Terlaksananya Pelayanan yang bertanggungjawab dan terukur sesuai SPM rumah sakit | 1 dokumen | 110.000.000 | 121.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.16.95 | Kegiatan Pendataan dan Penagihan Piutang Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Terhadap Masyarakat | 100% | Jumlah Tagihan Piutang yang dapat dilaksanakan | 1 dokumen laporan piutang rumah sakit | Tercapainya pendataan dan penagihan piutang rumah sakit | 1 dokumen | 118.300.000 | 141.950.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.19** | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat** | **100%** | | | | | **131.455.000** | | | |
| 1.02.03.19. 01. | Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 100% | Jumlah Jurnal Ilmiah kesehatan/Majalah/Buletin yang dibuat | jurnal ilmiah kesehatan/ majalah/bul etin untuk 1 tahun | Tersedianya media promosi dan informasi | 1 tahun | 86.660.000 | 103.992.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.19.06 | Kegiatan Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat | 100% | Jumlah Penyuluhan Pola Hidup sehat dan Informasi Rehabilitasi Narkoba dan Wadah Aduan yang diberikan | Penyuluhan Pola hidup sehat dan Informasi Rehabilitasi Narkoba dan Wadah Aduan untuk 1 tahun | Tersedianya informasi rehabilitasi narkoba dan wadah aduan masyarakat | 1 tahun | 44.795.000 | 53.754.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.23** | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan** | **100%** | | | | | **1.298.560.000** | | | |
| 1.02.03.23.07 | Kegiatan Persiapan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah sertifikat akreditasi yang dikeluarkan dari tim KARS dan BAPPETAN yang diterima | 1 sertifikat akreditasi | Tersedianya Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar pelayanan akreditasi tingkat dasar | 1 sertifikat | 380.000.000 | 460.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.23.10 | Kegiatan Penyusunan Standar Peralatan Keperawatan | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Buku Standar peralatan keperawatan yang dibuat | 1 buku standar peralatan keperawatan | Tersedianya kebutuhan peralatan keperawatan yang sesuai standar pelayanan rumah sakit | 1 buku | 63.100.000 | 76.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.23.0700 | Kegiatan Pembuatan Master plan Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Pembuatan masterplan pelayanan,masterplan fisik dan landscape rumah sakit yang dilaksanakan | 1DED Master plan bangunan Rumah Sakit, 1 dokumen masterplan | Terarahnya pengembangan rumah sakit dan pelayanan rumah sakit | 3 dokumen | 750.000.000 | - | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.23.11 | Kegiatan Penyusunan Satndar Asuhan Keperawatan (SAK) | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Buku Standar asuhan keperawatan yang dibuat | 1 buku standar Asuhan keperawatan | Tersedianya Pelayanan rawat inap,rawat jalan yang bermutu dan akuntabilitas berdasarkan SAK | 1 buku | 105.460.000 | 125.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.26** | **Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan** | **100%** | | | | | **2.203.745.000** | | | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.26.18 | Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah perbekalan kesehatan dan alat kesehatan | 1 paket peerbekalan kesehatan dan alat kesehatan inventaris yang dibeli | Tersedianya pelayanan kesehatan kepada publik | 1 paket | 909.210.000 | 1.100.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.26.22 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien, laudry,ruang tunggu dan lain-lain ) | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli | 1 paket perlengkapan rumahtangga rumah sakit | Tersedianya alat perlengkapan rumah tangga rumah sakit | 1 paket | 294.535.000 | 350.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.26.23 | Kegiatan Pembangunan Kamar Jenazah | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Kamar jenazah yang dibangun | 1 paket kamar jenazah | Tersedianya Pelayanan pasien dengan baik | 1 paket | 200.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.26.24 | Kegiatan Pengadaan SIM Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah SIM rumah sakit yang dilaksanakan | 1 paket Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit | Tersedianya Pelayanan yang baik terhadap rmasyarakat | 1 paket | 500.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.26.25 | Kegiatan Pengadaan Alat-alat dan Perlengkapan Psikologi | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah program MMPI yang dilaksanakan | 2 program MMPI yang dibeli | Tersedianya Pelayanan Psikologi dengan baik | 2 program | 300.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| **1.02.03.27** | **Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata** | | **Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan** | **100%** | | | | | **8.224.590.000** | | | |
| 1.02.03.27.01 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah gedung rumah sakit yang terawat | 1 tahun pemeliharaan gedung rumah sakit | Tersedianya gedung rumah sakit yang terawat | 1 tahun | 215.000.000 | 220.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.04 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP,VIP,kelas I,II dan III) | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah ruang rawat inap yang terawat | 1 tahun pemeliharaan ruang rawat inap | Tersedianya ruang rawat inap yang terawat | 1 tahun | 253.110.000 | 220.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.16 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Alat-alat kesehatan yang terpelihara | 1 paket pemeliharaan alat-alat kesehatan | Tersedianya pelayanan publik yang semakin baik | 1 tahun | 117.320.000 | 140.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.21 | Kegiatan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah pengujian dan kalibrasi alat kesehatan yang dilaksanakan | 1 paket pengujian dan kalibrasi alat kesehatan | Tersedianya mutu pelayanan kesehatan | 1 tahun | 94.720.000 | 118.000.000 | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.16 | Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit yang terpelihara | 1 tahun pemeliharaan instalasi pengolahan limbah rumah sakit | Tersedianya perlakuan terhadap limbah rumah sakit yang baik | 1 tahun | 224.440.000 | 270.000.000 | RSJD Prov.Babel | |

| Kode Urusan / Program/ Kegiatan | Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.03.27.23 | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Poliklinik dan gedung kantor rumah sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah Gedung kantor dan gedung poliklinik yang direhabilitasi | 1 paket rehabilitasi gedung poliklinik dan gedung kantor | Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan | 1 paket | 5.000.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.24 | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rawat inap Kelas III Intermedite laki-laki (DAK) | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah ruang rawat inap yang terehabilitasi | 1 paket gedung rawat inap yang di rehabilitasi | Terpeliharanya ruang rawat inap kelas III | 1 paket | 1.000.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.25 | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rawat inap Kelas III Intensive Psikiatric care (DAK) | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah ruang rawat inap kelas III intensive psikiatric care yang terehabilitasi | 1 paket gedung rawat inap yang di rehabilitasi | Terpeliharanya ruang rawat inap kelas III intensive psikistric care | 1 paket | 1.000.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.26 | Kegiatan Rehabilitasi ruang rapat rumah sakit | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah ruang rapat yang di rehabilitasi | 1 paket ruang rapat rumah sakit | Terawatnya ruang rapat rumah sakit | 1 paket | 200.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.27 | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Farmasi | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah gedung farmasi yang terawat | 1 paket ruang farmasi | Terawatnya ruang farmasi | 1 paket | 60.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |
| 1.02.03.27.28 | Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rekam Medik | | Meningkatnya Kapasitas dan kualitas pendidikan , kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarisasi Kesehatan | 100% | Jumlah gedung rekam medik yang terawat | 1 paket ruang rekam medik | Terawatnya ruang rekam medik | 1 paket | 60.000.000 | | RSJD Prov.Babel | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | Urusan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| | Total Belanja Langsung (Rutin + Wajib) | | | | | | | | | | 44.616.790.700 | | | |
| | Belanja Rutin | | | | | | | | | | 10.651.933.300 | | | |
| 1.02.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 7.737.952.000 | 15.958.000.000 | | |
| 1.02.02.01.01 | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sooekarno | 100% | Materai dan buku cek | Materai 6000 (500 buah), materai 3000 (200 buah) dan buku cek 6 buah | Terselenggaranya proses administrasi rumah sakit | 100% | 3.900.000 | 13.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.02 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Lancarnya pembayaran rekening | 100% | Rekening listrik, telepon dan internet | 12 bulan | Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet | 100% | 2.448.000.000 | 9.000.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.06 | Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasaran RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | 100% | Bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional, pajak kendaraan/STNK | 12 Bulan | Lancarnya sarana transportasi Rumah Sakit | 12 Bulan | 452.100.000 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.07 | Kegiatan pelayanan administrasi keuangan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan | 1 tahun | Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola adminstrasi keuangan | 100% | 318.240.000 | 500.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.08 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sooekarno | 100% | Tenaga cleaning service dan tukang kebun | Peralatan kebersihan (4 paket), bahan pembersih (4 paket), dan jasa kebersihan gedung dan halaman kantor 1 paket | Terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih dan nyaman | 100% | 666.592.000 | 1.000.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.09 | Kegiatan Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Terpeliharanya peralatan kerja | 100% | Peralatan kerja | **12 bulan** | Bermanfaatnya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 1.093.000.000 | 400.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.10 | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tercapainya peningkatan adminstrasi perkantoran rumah sakit | 100% | Alat tulis kantor | 12 bulan | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 152.040.000 | 250.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.11 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sooekarno | 100% | Publikasi, formulir rumah sakit, hasil cetakan, penggandaan dan penjilidan | Publikasi 1 paket, cetak 5 paket, fotocopy 150.000 lembar dan jilid 4 paket | Meningkatnya pelayanan administrasi rumah sakit | 100% | 341.000.000 | 800.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.02.01.12 | Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya pelayanan admininstrasi perkantoran | 100% | Komponen listrik dan elektonik | Alat listrik dan elektronik | Tersedianya komponen listrik dan elektronik | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.14 | Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Penyediaan peralatan rumah tangga | 100% | Kelengkapan rumah tangga rumah sakit | Peralatan dapur 1 paket, mesin penghancur kertas 2 unit, gorden 1 paket, kamera digital 2 unit, handycam 2 unit dan soundsyste m 1 unit | Tersedianya kelengkapan rumah tangga rumah sakit | 100% | 365.000.000 | 150.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.15 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | 100% | Surat kabar, bahan bacaan dan peraturan | 7710 eksemplar | Meningkatnya pengetahuan dengan penyediaan bahan bacaan di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 52.720.000 | 70.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.16 | Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan ketersediaan sarana prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. Sooekarno | 100% | BBM genset dan incenerator 12 bln, pengisian tabung pemadam kebakaran 35 bh, pengisian tabung gas 6 bh, pengisian ulang air galon, pengadaan tabung dan kompor gas | 1 PT | Terpenuhinya logistik operasional kantor | 100% | 215.500.000 | 800.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.17 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan penyediaan makanan dan minuman pasien, pegawai, rapat dan tamu di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Makanan dan minuman pasien, pegawai RS, Rapat dan tamu selama 1 tahun | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pasien dan pegawai RS | 100% | 570.040.000 | 1.000.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.18 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan wawasan pegawai RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 Dokumen | Tercapainya koordinasi di lingkungan kesehatan baik pusat maupun daerah oleh pegawai RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 426.320.000 | 1.000.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah | | | | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jumlah Kabupaten/Kota yang terkoordinasi dan terkonsolidasi | 6 kabupaten 1 kota | Waktu tersedianya pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah | 12 bulan | 150.000.000 | 165.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.01.6800 | Kegiatan validasi data perencanaan dan pelaporan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran rumah sakit | 100% | Berkas perencanaan dan berkas pelaporan | 2 dokumen perencanaan dan 2 dokumen pelaporan | Tercapainya peningkatan pelayanan adminstrasi rumah sakit | 100% | 40.700.000 | 60.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.02.01 | Kegiatan Pengadaan Tanaman Taman | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan pelayanan adminstrasi perkantoran | 100% | Taman rumah sakit | 1 paket | Terwujudnya taman RS | 100% | 62.800.000 | 150.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.02.02.01 | Kegiatan Penyediaan Logistik Loundry | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Tercapainya peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit | 100% | Kebersihan Linen Rumah Sak | 1 paket | Terpeliharanya kebersihan linen rumah sakit | 100% | 180.000.000 | 400.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **1.369.663.000** | **1.000.000.000** | | |
| 1.02.02.02.07 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan administrasi perkantoran rumah sakit | 100% | Papan pengumuman dan televisi | 2 unit | Meningkatnya pelayanan rumah sakit | 100% | 100.000.000 | 200.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.02.09 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan sarana dan prasarana | 100% | Peralatan kantor | mesin ketik, AC, Komputer pc, Laptop, Printer, scaner | Meningkatnya pelayanan administrasi rumah sakit | 100% | 372.000.000 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan Pengadaan Linen Rumah Sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Tercapainya pengadaan linen rumah sakit | 100% | Perlengkapan linen rumah skait | 1247 linen rumah sakit | Tersedianya linen rumah sakit | 100% | 897.663.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **350.635.000** | **400.000.000** | | |
| 1.02.02.03.02 | Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan disiplin aparatur pegawai RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung' | 100% | pakaian pasien dan seragam dinas pegawai | 561 pakaian pegawai dan 20 pakaian pasien | Terpenuhinya kebutuhan pakaian pasien dan seragam pakaian dinas pegawai rumah sakit | 100% | 325.635.000 | 400.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender | | | | | | Jumlah dokumen penganggaran yang responsif gender yang terlaksana | dokumen penganggaran yang responsif gender | Tersedianya Dokumen Penganggaran yang responsif gender | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur** | | | | | | | | | | **1.193.683.300** | **1.300.000.000** | | |
| | Workshop Manajemen Asuhan Keperawatan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Pengembangan sumber daya manusia rumah sakit | 100% | 50 orang peserta workshop | 100% | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perawat dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan di rumah sakit | 100% | 129.437.400 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai RSUDP | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan di RSUD Provinsi Kepualuan Bangka Belitung | 100% | Pelatihan tenaga kesehatan baik formal maupun non formal | 100% | Peningkatan pelayanan kesehatan RSUDP | 100% | 910.353.000 | 1.300.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Seminar Emotional Spiritual Quostient (ESQ) | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya motivasi dan terbentuknya karakter pegawai teladan | 100% | 45 orang peserta seminar | 45 orang | Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan rumah sakit | 100% | 77.736.300 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningktan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan | 100% | 63 peserta sosialisasi | 100% | Meningkatnya disiplin pegawai dan pelayanan rumah sakit | 100% | 31.511.300 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan pengetahuan tentang penilaian angka kredit pejabat fungsional | 100% | 63 orang peserta | 100% | Meningkatnya kinerja pegawai dan pelayanan rumah sakit | 100% | 44.645.300 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | **BELANJA WAJIB** | | | | | | | | | | **33.964.857.400** | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.02.02.19** | **Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | | | | | | | | | | **151.962.000** | - | | |
| | Penyelenggaraan Penyebaran Informasi melalui Pameran dan Media Cetak | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya persentase pemenuhan media promosi kesehatan | 100% | Penyebaran informasi melalui pameran dan media cetak | 1 Paket | Meningkatnya pengehtahuan masyarakat tentang kesehatan melalui penyebaran informasi | 100% | 151.962.000 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.23** | **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** | | | | | | | | | | **623.255.400** | **600.000.000** | | |
| 1.02.02.23.07 | Kegiatan Persiapan penilaian akreditasi Rumah Sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Tercapainya akreditasi pelayanan rumah sakit | 100% | Kesiapan RSUDP dalam penetapan akreditasi | Dokumen penilaian akreditasi | Terwujudnya akreditasi RSUD sesuai dengan kriteria | 100% | 214.647.000 | 600.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Penyusunan Standar Operasional Prosedur Medis | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Tersusunnya SOP medis | 100% | SOP Medis | 8 dokumen S | Meningkatnya pelayanan RS kepada publik | 100% | 84.000.000 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Persiapan Rumah Sakit menjadi BLUD | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Tercapainya PPK BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (h.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Persiapan Rumah Sakit menjadi rumah sakit BLUD | rumah sakit I | Peningkatan pelayanan kesehatan RSUDP | 100% | 300.901.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Evaluasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keperawatan | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Pengembangan manajemen rumah sakit | 100% | Standar operasional prosedur keperawatan | 9 dokumen | Jumlah SOP Keperawtan yang dievaluasi | 100% | 23.707.400 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.26** | **Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit** | | | | | | | | | | **31.167.440.000** | **11.400.000.000** | | |
| 1.02.02.26.18 | Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | Alat-alat kesehatan rumah sakit | 1 Paket | Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 1.009.600.000 | 200.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.26.19 | Kegiatan Pengadaan obat-obatan dan perbekalan rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit | 100% | Obat-obatan generik, obat-obatan non generik, reagen dan perbekalan kesehatan | 13 paket bahan habis pakai kesehatan, 1 paket obat ekatalog, 1 paket obat non ekatalog, 1 paket reagen laboratorium | Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan di rumah sakit | 100% | 6.000.010.000 | 2.300.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.26.21 | Kegiatan Pengadaan mebeulair rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | Almari, meja, kursi dan rak buku | Almari buku perpustakaan 3 unit, meja kerja 1 biro 1 unit, meja kerja 1/2 biro 15 unit, meja rapat 6 unit, kuri kerja 20 unit, rak buku 4 unit | Meningkatnya pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.02.26.33 | Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana operasional rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan sarana dan prasarana operasional di RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Mobil Ambulans Gawat Darurat dan Sepeda Motor | Ambulans 1 Unit, Sepeda Motor 10 Unit | Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan kesehatan | 100% | 807.830.000 | 700.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.26.37 | Kegiatan Peningkatan pelayanan rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan mutu pelayanan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | 100% | Honorarium tenaga PNS dan Non PNS | 194 orang | Terpenuhinya kebutuhan tenaga operasional medis dan non medis di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | 100% | 16.400.000.000 | 8.000.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Rehabilitasi gedung RSUD Prov. Babel | Tercapai | Optimalnya Pelayanan RS | 100% | 1.000.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan Pembangunan Gedung Gas Medis | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Gedung gas medis RSUDP | 1 Gedung | Meningkatnya pelayanan rumah sakit | 100% | 300.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Kegiatan Pengadaan UPS | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | Pengadaan UPS Sentral | 1 Unit | Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 1.000.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Pembangunan Pagar RSUD | | | | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | | | Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 2.000.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Pembangunan Masjid | | | | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | | | Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 2.000.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| | Pengadaan Trafo RSUD | | | | Meningkatnya sarana dan prasarana RS | 100% | | | Peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100% | 500.000.000 | | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| **1.02.02.27** | **Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit** | | | | | | | | | | **2.022.200.000** | **2.145.000.000** | | |
| 1.02.02.27.01 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan gedung rumah sakit | Tercapai | Optimalnya pelayanan RS | 100% | 350.000.000 | 500.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.27.16 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit | 12 bulan | Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah RS | 100% | 195.000.000 | 75.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.27.17 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan Alat Kesehatar | 1 paket | Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat | 100% | 800.000.000 | 500.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.27.18 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | Pangkalpinang | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Bahan bakar minyak dan pemeliharaan rutin mobil ambulance/jenazah | 12 bulan | Kendaraan operasional terpelihara dengan baik | 12 bulan | 177.200.000 | 800.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.27.25 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air RS | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan instalasi pengolahan air | 1 paket | Terlaksananya servis dan pemeliharaan instalasi pengolahan air rumah sakit | 100% | 100.000.000 | 70.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |
| 1.02.02.27.26 | Kegiatan Pemeliharaan instalasi c | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan instalasi oksigen sentral | 12 bulan | Optimalisasi operasionalisasi gas medis sentral | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.02.02.27.30 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik RS | Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Bangka Belitung | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | Peningkatan Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO | 100% | Pemeliharaan rutin/berkala instalasi listrik rumah sakit | 12 bulan | Terpeliharanya instalasi listrik rumah sakit | 100% | 200.000.000 | - | RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Urusan Wajib Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **5.579.120.000,00** | | | |
| | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran** | 100% | | | | | **3.204.045.000,00** | | | |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | Tersedianya perangko,materai dan benda pos lainnya | 1450 materai, 133 kilat khusus | | | | | 10.000.000,00 | | | |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Pangkalpinang | Rekening telepon dan listrik | 12 bulan | | | | | 325.000.000,00 | | | |
| 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | Tersedianya jasa adm. Keuangan | 12 bulan | | | | | 394.320.000,00 | | | |
| 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Pangkalpinang | Tersedianya jasa kebersihan | 12 bulan | | | | | 39.000.000,00 | | | |
| 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | Tersedianya ATK | 12 bulan | | | | | 78.000.000,00 | | | |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | | | | | 89.000.000,00 | | | |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Pangkalpinang | Tersedianya lampu pijar dan kabel listrik | 12 bulan | | | | | 34.000.000,00 | | | |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Tersedianya surat kabar/ majalah | 12 bulan | | | | | 29.750.000,00 | | | |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Pangkalpinang | Tersedianya isi tabung gas dan dispenser | 12 bulan | | | | | 27.500.000,00 | | | |
| 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Pangkalpinang | Tersedianya makan dan minuman harian dan rapat | 12 bulan | | | | | 78.750.000,00 | | | |
| 18 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | | | Luar daerah bangka belitung | Meningkatnya kinerja melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 12 bulan | | | | | 500.000.000,00 | | | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000,00 | | | |
| 19 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | | 20 orang | | | | | 579.150.000,00 | | | |
| 45 | Operasional UPTD Dinas Pekerjaan Umum (Belitung) | | | Belitung | Terwujudnya operasional kantor UPTD | 12 bulan | | | | | 869.575.000,00 | | | |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **1.574.800.000,00** | | | |
| 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | Pangkalpinang | | | | | | | 543.270.000,00 | | | |
| 22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor | | | | | | 195.000.000,00 | | | |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Pangkalpinang | Tersedianya biaya untuk perawatan rutin kendaraan dinas/operasional di Pangkalpinang | Ls | | | | | 436.530.000,00 | | | |
| 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | Ls | | | | | 150.000.000,00 | | | |
| 42 | Rehabilitasi gedung kantor | | | | Terpeliharanya gedung kantor (gedung serba guna dan kantor) | Paket | | | | | 250.000.000,00 | | | |
| | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | | | | | | | **58.750.000,00** | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | Pangkalpinang | Pengadaan Pakaian Satpam, Cleaning Servis, Sopir, Tukang Kebun, dan tukang genset | Stel | | | | | 33.750.000,00 | | | |
| | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | | | | | **138.000.000,00** | | | |
| 01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Luar dan Dalam Daerah | Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kep. Babel | | | | | | 138.000.000,00 | | | |
| | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | | | | **603.525.000,00** | | | |
| 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Pangkalpinang | Tersusunya Renja, LAKIP, LPPD, dan LKPJ Gubernur bidang ke PU an | 4 Laporan | | | | | 28.525.000,00 | | | |
| 06 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ke PU an | | | Bangka Belitung | Tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 2 Laporan | | | | | 150.000.000,00 | | | |
| 07 | Penyusunan Harga Satuan Upah dan Bahan | | | Bangka Belitung | Data harga satuan upah dan bahan provinsi | 1 laporan | | | | | 125.000.000,00 | | | |
| 24 | Survey dan Pengumpulan Data | | | Bangka Belitung | Lancarnya proses perencanaan | 1 laporan | | | | | 100.000.000,00 | | | |
| 25 | Penyusunan SPM bidang ke PU an | | | Bangka Belitung | Tersusunya dokumen SPM Bidang ke PU an | 1 laporan | | | | | 150.000.000,00 | | | |
| 28 | Penyusunan majalah bidang ke PU an | | | Pangkalpinang | Terwujudnya majalah bidang ke PU an | | | | | | 50.000.000,00 | | | |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **191.613.955.800,00** | | | |
| | **Bidang Urusan Pekerjaan Umum** | | | | | | | | | | **185.320.990.000,00** | | | |
| | **Program Pembangunan Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | | **67.844.510.000,00** | | | |
| 01 | Perencanaan Pembangunan Jalan | | | Bangka Belitung | | 1 Dok | | | | | 1.275.540.000,00 | | | |
| 03 | Pembangunan Jalan | | | Bangka Belitung | | 55 KM | | | | | 49.456.210.000,00 | | | |
| 04 | Perencanaan pembangunan jembatan | | | Bangka Belitung | | 1 Dok | | | | | 383.180.000,00 | | | |
| | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | 16.729.580.000,00 | | | |
| | **Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong** | | | | | | | | | | **6.342.950.000,00** | | | |
| 03 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | | | Bangka Belitung | | | | | | | 6.342.950.000,00 | | | |
| | **Program Pembangunan turap/talud/bronjong** | | | Mengukur panjang pantai yang terlindungi dari abrasi | | | | | | | **9.385.100.000,00** | | | |
| 01 | Perencanaan turap/talud/brojong | | | Bangka Belitung | | 2 dok | | | | | 1.535.380.000,00 | | | |
| | Pembangunan turap/talud/bronjong | | | Bangka Belitung | | 4000 M' | | | | | 7.849.720.000,00 | | | |
| | **Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | | **66.363.100.000,00** | | | |
| | Rehabilitasi/pemeliharaan jalan | | | Bangka Belitung | | Ef. 52,23 Km, Fs. 727,45 Km | | | | | 66.363.100.000,00 | | | |
| | **Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | | **572.150.000,00** | | | |
| | Pengadaan Alat Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | 572.150.000,00 | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** | | | | | | | | | | - | | | |
| | Pengadaan alat-alat berat | | | | | | | | | | - | | | |
| | **Program tanggap darurat jalan dan jembatan** | | | | | | | | | | **1.500.000.000,00** | | | |
| 01 | Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat | | | Bangka Belitung | Tertanganinya kondisi jalan akibat kerusakan bencana alam | | | | | | 1.000.000.000,00 | | | |
| 02 | Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat | | | Bangka Belitung | Tertanganinya kondisi jembatan akibat kerusakan bencana alam | | | | | | 500.000.000,00 | | | |
| | **Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | | **263.660.000,00** | | | |
| 01 | Penyusunan sistem informasi/data base jalan | | | Bangka Belitung | | 1 dok | | | | | 131.830.000,00 | | | |
| 02 | Penyusunan sistem informasi/data base jembatan | | | Bangka Belitung | | 1 dok | | | | | 131.830.000,00 | | | |
| | **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** | | | | | | | | | | **166.390.000,00** | | | |
| 10 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat | | | Pangkalpinang | | 1 Tahun | | | | | 166.390.000,00 | | | |
| | **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya** | | | | | | | | | | **5.593.250.000,00** | | | |
| | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | | | Bangka Belitung | | | | | | | 4.463.560.000,00 | | | |
| | Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (APBD & Pendamping DAK) | | | Bangka Belitung | | | | | | | - | | | |
| | Pemberdayaan Petani Pemakai air | | | Bangka Belitung | | | | | | | 1.129.690.000,00 | | | |
| | **Program penyediaan dan pengolahan air baku** | | | | | | | | | | **1.659.490.000,00** | | | |
| | Optimalisasi Sumber Air Baku | | | | | | | | | | 1.659.490.000,00 | | | |
| | **Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya** | | | | | | | | | | **985.770.000,00** | | | |
| 05 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya | | | | | | | | | | 175.500.000,00 | | | |
| 10 | Perencanaan Pengelolaan sumber Daya Air | | | | | | | | | | 810.270.000,00 | | | |
| | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** | | | | | | | | | | **12.909.420.000,00** | | | |
| 06 | Pengembangan distribusi air minum | | | | | | | | | | 12.909.420.000,00 | | | |
| | **Program Pengendalian Banjir** | | | | | | | | | | **11.660.200.000,00** | | | |
| 07 | Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali | | | | | | | | | | 7.574.750.000,00 | | | |
| 13 | Perencanaan Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | 4.085.450.000,00 | | | |
| | **Program pembangunan infrastruktur perdesaaan** | | | | | | | | | | **75.000.000,00** | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | Prov. Bangka Belitung | Meningkatkan sistem pelaporan | 1 Laporan | | | | | 75.000.000,00 | | | |
| **Bidang Urusan Perumahan** | | | | | | | | | | | **533.215.000,00** | | | |
| | **Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial** | | | | | | | | | | **162.490.000,00** | | | |
| 01 | Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat bencana alam | | | | | | | | | | 162.490.000,00 | | | |
| | **Program Pemberdayaan komunitas Perumahan** | | | | | | | | | | **370.725.000,00** | | | |
| | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan | | | | | | | | | | 370.725.000,00 | | | |
| **Bidang Urusan Penataan Ruang** | | | | | | | | | | | **3.178.710.000,00** | | | |
| | **Program Perencanaan Tata Ruang** | | | | | | | | | | **3.178.710.000,00** | | | |
| 05 | Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan | | | Prov. Bangka Belitung | Tersusunya dokumen rencana detail KSP Tanjung ular (Bangka Barat), Kawasan Pelabuhan dan Industri Sadai (Bangka Selatan), KSP Industri Perikanan Tanjung Binga (Belitung), | 3 Dokumen | | | | | 2.442.640.000,00 | | | |
| 17 | Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP | | | Kab. Bangka Tengah & Kab. Belitung Timur | Tersusunya dokumen KLHS KSP ASDP Manggar dan KSP Tanjung Berikat | 2 Dokumen | | | | | 736.070.000,00 | | | |
| **PERENCANAAN PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | | **467.300.800,00** | | | |
| | **Program Kerjasama Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah | | | Bangka Belitung | Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi usulan Kegiatan (Forum SKPD dan Rakor PU) | 2 Laporan | | | | | 237.940.000,00 | | | |
| 03 | Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Forum Jasa Konstruksi di Prov. Kep. Bangka Belitung | 1 Laporan | | | | | 62.290.800,00 | | | |
| 06 | Pelatihan Tenaga Terampil (SKT) | | | Pangkalpinang | | 1 Laporan | | | | | 167.070.000,00 | | | |
| **Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | **1.682.355.000,00** | | | |
| | **Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)** | | | | | | | | | | **1.482.355.000,00** | | | |
| 04 | Penyusunan program pengembangan RTH | | | Bangka dan Belitung | Teridentifikasinya kawasan perkotaan yang memiliki RTH | Bangka dan Belitung | | | | | 379.045.000,00 | | | |
| 05 | Penataan RTH | | | | Terbangunnya RTH pada kawasan Komplek Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | 1.103.310.000,00 | | | |
| | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | | | | | | | | | | **200.000.000,00** | | | |
| | Kerjasama Pengelolaan Sampah antar Daerah | | | | | | | | | | 200.000.000,00 | | | |
| | **Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | **431.385.000,00** | | | |
| | **Program Pengembangan Komunikasi, Informatika, dan Media Massa** | | | | | | | | | | **431.385.000,00** | | | |
| 06 | Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi | | | | | | | | | | 296.385.000,00 | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | Pengadaan Alat Jaringan Komputer | | | | | | | | | | 135.000.000,00 | | | |
| | | | | TOTAL | | | | | | | 197.193.075.800,00 | | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **1 TOTAL BELANJA LANGSUNG (RUTIN + WAJIB)** | | | | | | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| | **BELANJA RUTIN** | | | | | | | | | | **4.489.440.000** | **3.163.022.800** | | |
| **1.06.1.06.02.01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **2.805.310.000** | **3.109.022.800** | | |
| 1.06.1.06.02.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Perangko materai dan benda pos lainya Paket/ pengiriman | 12 bulan | Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor | 12 bulan | 16.000.000 | 17.280.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Pembayaran jasa listrik, telekomunikasi dan informasi | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bulan | 406.800.000 | 439.344.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.0700 | Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayaran honorarium Pengelolah keuangan | 12 bulan | Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolah Administrasi Keuangan | 12 bulan | 178.830.000 | 193.136.400 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Operasional Kebersihan kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor Bappeda | 12 bulan | 30.000.000 | 32.400.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.0900 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran | SKPD Bappeda | Jasa perbaikan peralatan kerja | Peralatan kerja, komputer | terpeliharanya dan terjaganya peralatan kerja | 12 bulan | 190.000.000 | 205.200.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | 12 bulan | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 141.400.000 | 200.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 1 kegiatan | Lancarnya aktivitas pelayanan adimisterasi perkantoran | 12 bulan | 64.950.000 | 70.146.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1200 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya peralatan listrik | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran Bappeda | 12 bulan | 30.000.000 | 32.400.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Belanja Surat kabar, majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi | 12 bulan | Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai | 12 bulan | 50.000.000 | 54.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1600 | Penyediaan bahan logistik kantor | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan palayanan administrasi perkantoran | 100% | Penyediaan bahan logistik kantor | 12 bulan | Terpenuhi bahan logistik kantor | 12 bulan | 32.240.000 | 34.819.200 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya makanan minuman rapat | 12 bulan | Terpenuhuinya makanan minuman rapat | 12 bulan | 100.000.000 | 108.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1800 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | | | Terfasilitasinya Perjalanan dinas luar daerah | | Lancarnya koordinasi, Konsultasi ke Pusat dan antar daerah | | 650.000.000 | 750.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | SKPD Bappeda | Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak | 25 Orang (13 Bulan) | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 715.090.000 | 772.297.200 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.01.8800. | Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah | | | | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terfasilitasinya perjanan dinas dalam daerah | 1 Tahun | Lancarnya koordinasi dan konsilidasi dengan Kabupaten/Kota | 12 bulan | 200.000.000 | 200.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| **1.06.1.06.02.02.** | **Progran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | | | | **1.684.130.000** | **54.000.000** | | |
| 1.06.1.06.02.02.0700 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Lancarnya Aktivitas Perkantoran Bappeda | 100% | Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor | 3 unit/paket | Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk menunjang aktivitas kerja | pegawai Bappeda | 447.500.000 | 750.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **1 TOTAL BELANJA LANGSUNG (RUTIN + WAJIB)** | | | | | | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| 1.06.1.06.01.02.1300. | Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | Terlaksana | Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor | 7 unit AC Split, 1 unit mesin pompa air, 1 unit mesin potong rumput, 20 unit P.C. unit, 10 unit printer, 21 unit UPS, 1 set sound system, 1 paket cctv | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 bulan | 560.560.000 | 750.000.000 | Bappeda | Baru |
| 1.06.1.06.02.02.2200 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur | 90% | Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Bappeda | 1 gedung | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 bulan | 30.600.000 | 33.048.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.02.2400. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 90% | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 7 Unit roda 4 dan 19 unit roda 2 | Lancarnya operasional kantor | 12 bulan | 595.470.000 | 643.107.600 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.02.3300 | Pemeliharaan Rutin/berkala Taman, Tempat parkir dan Halaman Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman kantor | 12 bulan | Terjaganya kebersihan dan keindahan taman, tempat parkir dan halaman | 12 bulan | 50.000.000 | 54.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| **1.06.1.06.02.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | **Persentase Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **51.100.000** | **55.188.000** | | |
| 1.06.1.06.02.03.0501. | Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | | | | Persentase Disiplin Aparatur | 100% | Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu | 101 stel pakaian (60 laki-laki/41 Perempuan) | Terciptanya disiplin aparatur dalam berseragam | 101 orang | 51.100.000 | 55.188.000 | | |
| | **URUSAN WAJIB** | | | | | | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| **1.06** | **URUSAN STATISTIK** | | | | | | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| **1.06.1.06.02.15.** | **Pengembangan Data/Informasi** | | | | **Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi** | **90%** | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| 1.06.1.06.02.15.2110. | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Ketersediaan Akurasi data dan informasi | 80% | Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) | 1 Aplikasi dan 1 Website | Lancarnya proses perencanaan dan penyebarluasan informasi perencanaan pembangunan daerah | 1 Aplikasi dan 1 Website | 1.647.500.000 | 1.779.300.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.15.2310. | Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Akurasi Data dan Informasi | 100% | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Forum Data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4 kali (RAKOR) | Tersedianya Data Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 369.888.000 | 399.479.040 | Bappeda | Sedang berjalan |
| **1.06.1.06.02.16.** | **Program Kerjasama Pembangunan** | | | | | | | | | | **249.370.000** | **269.319.600** | | |
| 1.06.1.06.02.16.0200 | Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antardaerah | | | Dalam dan luar Provinsi Babel | Terwujudnya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah | 5 Kerjasama | Terlaksananya kerjasama Pembangunan antardaerah | 5 (lima) kerjasama | Jumlah kesepakatan kerjasama pembangunan antar daerah | 5 (lima) kesepakatan kerjasama | 249.370.000 | 269.319.600 | Bappeda | Sedang berjalan |
| **1.06.1.06.02.20** | **Progran Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah** | | | | | | | | | | **428.220.000** | **462.477.600** | | |
| 1.06.1.06.02.20.0600 | Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana | | | Seluruh Wilayah Indonesia | Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan | 80% | Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, workshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana | 30 PNS Bappeda dan 6 JFP | Meningkatnya kualitas aparatus Bappeda | 30 PNS Bappeda dan 6 JFP | 428.220.000 | 462.477.600 | Bappeda | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | TOTAL BELANJA LANGSUNG (RUTIN + WAJIB) | | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | |
| 1.06 | URUSAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | 844.067.000 | 877.500.000 | | |
| 1.06.1.06.02.18 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh | | | | | | | | | | 139.180.000 | 110.000.000 | | |
| 1.06.1.06.02.18.1700. | Koordinasi Pengendalian Kawasan tertentu terbatas | | | Prov. Kep. Babel | Tercapainya Pengendalian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh | Prov/Kab/Kota | Terlaksananya Pengendalian Kawsan tertentu terbatas | 1 kawasan | Jumlah rekomendasi pemanfaatan lahan | 5 Rekomendasi | 139.180.000 | 110.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.19 | Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar | | | | | | | | | | 279.887.000 | 300.000.000 | | |
| 1.06.1.06.02.019.0900 | Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan | | | Prov. Kep. Babel | Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar | 7 Kab/Kota | fasilitasi program AMPL Nasional di Provinsi dan 7 Kab/Kota | Provinsi dan 7 Kab/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan implementasi RAD AMPL Provinsi/Kab/Kota | 1 Dokumen | 279.887.000 | 300.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.05.1.06.02.15 | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | | | | | 425.000.000 | 467.500.000 | | |
| 1.05.1.06.02.15.1600 | Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Babel | Meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang | 80% | Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi BKPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 10 Rakor | Jumlah Rekomendasi/persetujuan/ Keputusan/Laporan Gubernur | 10 Dokumen | 425.000.000 | 459.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| | Koordinasi penyusunan RZWP3K | | | Prov. Kep. Babel | Meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang | 180% | Terlaksananya koordinasi penyusunan RZWP3K | 9 kali Rakor | Tersedianya rancangan materi teknis RZWP3K | 1 Dokumen | 613.754.500 | 662.854.860 | | |
| 1.06 | URUSAN PERENCANAAN DAERAH | | | | | | | | | | 7.056.839.000 | 7.284.399.000 | | |
| 1.06.1.06.02.21 | Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | 3.561.327.000 | 3.284.399.000 | | |
| 1.06.1.06.02.21.0800 | Penyusunan RKPD | Pangkalpinang | | | Meningkatnya keselarasan antara Dokumen RKPD dengan RPJMD | 80% | Terlaksananya Penyusunan RKPD 2017 dan Perubahan RKPD 2016 | 2 Dokumen | Tersedianya dokumen Perencanaan tahunan | 2 Dokumen | 575.610.000 | 633.171.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.21.0900 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Pangkalpinang | | | Meningkatnya keselarasan antara Dokumen RKPD dengan RPJMD | 80% | Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan RKPD Tahun 2016 | 600 Orang | Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan | 100% | 884.195.000 | 892.664.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.21.1200. | Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Pangkalpinang | | | Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dan RPJMD | 80% | Terlaksananya penyusunan LKPJ | 1 dokumen (100 buku) | Jumlah dokumen LKPJ | 1 dokumen (100 buku) | 307.905.000 | 323.905.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.21.1300 | Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Meningkatnya keselarasan antara Dokumen RKPD dengan RPJMD | 80% | Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan | 2 Dokumen | Tersedianya dokumen Perencanaan tahunan | 2 Dokumen | 546.390.000 | 575.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.21.1600 | Penyusunan KUA PPAS | Pangkalpinang | | | Meningkatnya keselarasan antara Dokumen RKPD dengan RPJMD | 80% | Terlaksananya KUA PPAS Tahun Anggaran 2017 dan Perubahan KUA PPAS Tahun 2016 | 2 Dokumen | Tersedianya dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran tahunan yang baik sebagai bahan dalam penyusunan RAPBD 2017 serta Perubahan RAPBD 2016 | 2 Dokumen | 388.600.000 | 324.259.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.1.06.02.21.3100. | Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Meningkatnya keselarasan antara Dokumen RKPD dengan RPJMD | 80% | Terlaksananya Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan satam Emas | 7 Kabupaten/ Kota | Lancarnya kebijakan menuju kecamatan/desa/kelurahan yang mandiri dan maju | 7 Kabupaten/ Kota | 245.845.000 | 535.400.000 | Bappeda | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **1 TOTAL BELANJA LANGSUNG (RUTIN + WAJIB)** | | | | | | | | | | **#REF!** | **#REF!** | | |
| 1.06.xx.21.12 | Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-2025 | | | Pangkalpinang | Meningkatnya keselarasan antara dokumen RPJPD dan RPJPN | 80% | Terlaksananya Penyusunan Perubahan RPJPD 2005-202 | 1 dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan RPJPD | 1 dokumen (100 buku) | 612.782.000 | - | Bappeda | Baru |
| | **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | **595.512.000** | **650.000.000** | | |
| 1.06.xx.21.14 | Koordinasi Pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan | | | Provinsi | Persentase ketercapaian pembangunan Bidang Pemerintahan | 80% | Terlaksananya penyusunan pelaporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan | 4 laporan | Jumlah Laporan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan | 4 Laporan | 137.700.000 | 150.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.xx.21.15 | Koordinasi Perencanaan Berbasis SPM di Tingkat Provinsi | | | Provinsi | Persentase ketercapaian pembangunan Bidang Pemerintahan | 80% | Terlaksananya perencanaan berbasis SPM di Tingkat Provinsi | 9 SPM | Jumlah dokumen perencanaan berbasis SPM di Tingkat Provinsi | 9 dokumen SPM | 207.812.000 | 250.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| 1.06.xx.21.16 | Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | | | Provinsi | Persentase ketercapaian pembangunan Bidang Pemerintahan | 25% | Pencanangan, publikasi, pemilihan unit kerja, penetapan tim kerja, penyusunan dokumen, pembekalan, SOP, e-office, KIP, layanan pengaduan, survey kepuasan, penilaian, monev. | 10 SKPD | Pencanangan, publikasi, pemilihan unit kerja, penetapan tim kerja, penyusunan dokumen, pembekalan, SOP, e-office, KIP, layanan pengaduan, survey kepuasan, penilaian, monev. | 10 SKPD | 250.000.000 | 250.000.000 | Bappeda | Baru |
| **1.06.1.06.01.22.** | **Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | | | | **Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi** | **5 Dokumen** | | | | | **900.000.000** | **950.000.000** | | |
| 1.06.1.06.01.22.210. | Koordinasi Perencanaan bidang Ekonomi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi | 1 Dokumen | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang | 11 SKPD (4 Kali Rakor) | Tersusunnya Dokumen Rencana Bidang Ekonomi | 1 Dokumen | 300.000.000 | 330.000.000 | Bappeda | Baru |
| 1.06.1.06.01.22.209. | Penyusunan Tabel Input Output Daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi | 1 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan Tabel Input-Output | 1 Dokumen | Tersusunnya Tabel Input-Output | 1 Dokumen | 200.000.000 | 220.000.000 | Bappeda | Baru |
| 1.06.1.06.01.22.209. | Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi | 2 Dokumen | Terlaksananya Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi | 2 Dokumen | Tersusunnya Kajian Finansial Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi | 2 Dokumen | 400.000.000 | 400.000.000 | Bappeda | Baru |
| **1.06.1.06.01.23** | **Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya** | | | | **Prosentase Rencana Pembangunan bidang Sosial Budaya yang diakomodir dalam APBD** | **80%** | | | | | **1.000.000.000** | **1.300.000.000** | | |
| 1.06.1.06.01.23.300 | Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 7 Kabupaten/ Kota | Prosentase Rencana Pembangunan bidang Sosial Budaya yang diakomodir dalam APBD | 80% | Waktu koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan | 12 bulan | Tersedianya rencana Pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan | 8 Dokumen | 500.000.000 | 500.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| | Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia | | | | Prosentase Rencana Pembangunan bidang Sosial Budaya yang diakomodir dalam APBD | 80% | Waktu Koordinasi Perencanaan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia | 12 bulan | Tersedianya rencana Pembangunan Bidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia | 7 Dokumen | 500.000.000 | 800.000.000 | Bappeda | Sedang berjalan |
| **xxxxxx** | **PENGKAJIAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | **Presentase Pengkajian dan Penelitian yang direkomendasikan untuk Pembangunan Daerah** | **50%** | | | | | **1.000.000.000** | **1.100.000.000** | | |
| | Pengembangan Jaringan Penelitian | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Presentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah | 100% | Tersedianya jaringan penelitian pendidikan dan seminar penelitian, FGD | Tersedianyak ajian kebijakan | Terlaksananya jaringan penelitian pendidikan dan seminar penelitian, FGD | Jarlit pendidikan dan seminar penelitian, FGD | 250.000.000 | 275.000.000 | Bappeda | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1 TOTAL BELANJA LANGSUNG (RUTIN + WAJIB) | | | | | | | | | | #REF! | #REF! | | |
| | kajian Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Presentase Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang digunakan sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah | 100% | Terlaksananya Penelitian Pembangunan Di Bangka Belitung | Dokumen Kajian Penelitian n Di Bangka Belitung | Tersusunnya Kajian Penelitian Di Bangka Belitung | Laporan Rekomendasi Kebijakan | 350.000.000 | 385.000.000 | Bappeda | Baru |
| | Kajian Potensi Inovasi Daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Presentase Pengkajian dan Penelitian yang direkomendasikan untuk Pembangunan Daerah | 100% | Terlaksananya Studi Potensi Inovasi Daerah | 2 Inovasi (SIDa dan STP) | Tersedianya Dokumen Studi Potensi Inovasi Daerah | 2 Dokumen | 400.000.000 | 440.000.000 | Bappeda | Baru |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **3.612.267.000** | **4.455.126.000** | | |
| | **Urusan Bidang Perhubungan** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Penguatan rural urban linkages** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Tingkat pelayanan administrasi perkantoran** | 100% | | | | | **1.529.030.000** | **1.715.300.000** | **Dishub** | |
| 0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | - | Pangkalpinang | - | - | Materai dan Paket Pengiriman | 720 lbr Materai @6000, 360 lbr Materai @3000 dan Paket pengiriman 24 kali | Tersedianya Materai dan Paket Pengiriman untuk keperluan surat dinas | 12 bulan | 6.600.000 | 7.000.000 | | 1 |
| 0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik | | - | Pangkalpinang | - | - | Terbayarnya Jasa Listrik dan Telepon | 12 bulan | Tersediannya Pelayanan Jasa Listrik dan Telepon | 12 bulan | 154.000.000 | 300.000.000 | | 1 |
| 0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | - | Pangkalpinang | - | - | Terselenggaranya Jasa Admiistrasi Keuangan Perkantoran | 12 bulan | Tersediannya jasa administrasi keuangan guna memperlancar pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas perhubungan | 12 bulan | 127.260.000 | 150.000.000 | | 1 |
| 0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | - | Pangkalpinang | - | - | Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor | 12 bulan | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan-bahan Pembersihan Kantor | 12 bulan | 18.000.000 | 20.000.000 | | 1 |
| 0900 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja | | - | Pangkalpinang | - | - | Jasa Perbaikan dan servis peralatan kerja | AC 23 buah, Laptop 17 unit , Printer 22 unit, Komputer 23 unit dan peralatan operasional | Terjaga dan terawatnya kondisi baik peralatan kerja untuk kelancaran tugas pegawai | 12 bulan | 63.000.000 | 65.000.000 | | 1 |
| 1000 | Penyediaan Alat Tulis kantor | | - | Pangkalpinang | - | - | Alat tulis Kantor | 12 bulan | Tersedianya Alat tulis Kantor | 12 bulan | 120.000.000 | 150.000.000 | | 1 |
| 1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | - | Pangkalpinang | - | - | Barang Cetakan dan penggandaan | Penggandaan 33.300 lembar dan 12 bulan cetakkan SPM, BKU, Kwitansi, SPP dll | Tersedianya Barang Cetakkan dan Penggandaan | 12 bulan | 69.990.000 | 75.000.000 | | 1 |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | | - | Pangkalpinang | - | - | Lampu penerangan kantor, Battere dan Kabel Listrik | Lampu 60 buah, Kable 12 gulung, Battere AA 50 buah, Batere AAA 50 buah, Battere Kering Penerang Lampu Taman, 20 Terminal Listrik dan 45 Colokan Listrik. | Tersediainya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dalam menunjang kelancaran tugas pokok. | 12 bulan | 13.150.000 | 15.000.000 | | 1 |
| 1300 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | | - | Pangkalpinang | - | - | Printer type Laserjet | 15 unit | Tersediannya Printer untuk mencetak hasil kerja dan laporan kegiatan/keuangan perkantoran | 15 unit | 25.410.000 | 30.000.000 | | 1 |
| 1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | - | Pangkalpinang | - | - | Surat Kabar dan Buku Perpustakaan | 12 bulan Sura | Tersedianya Surat Kabar dan Buku Bacaan | 12 bulan Surat Kabar dan 40 Buku | 15.000.000 | 18.000.000 | | 1 |
| 1600 | Penyediaan bahan logistik kantor | | - | Pangkalpinang | - | - | Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup) | 5 Tabung Pemadam Kebakaran, 240 galon dan 720 dus air mineral cup | Tersedianya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran dan Pengisian Air Galon (air minum dalam kemasan cup) | 12 bulan | 21.320.000 | 25.000.000 | | 1 |
| 1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | - | Pangkalpinang | - | - | Makanan dan Minuman Rapat serta Makan dan Minuman Tamu | 1080 orang makan minum rapat dan makan minum 328 orang | Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat serta Makan dan Minuman Tamu | 12 bulan | 95.000.000 | 160.000.000 | | 1 |
| 1800 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultansi keluar daerah | | - | Pangkalpinang | - | - | Perjalanan Dinas Luar Daerah | 12 bulan | Peningkatan Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan di sektor Perhubungan | 12 bulan | 350.000.000 | 400.000.000 | | 1 |
| 1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi | | - | Pangkalpinang | - | - | Terselenggaranya Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 14 orang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 Tahun Angg | 300.300.000 | 300.300.000 | | 1 |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Penguatan rural urban linkages** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur daerah** | **100%** | | | | | **406.420.000** | **649.826.000** | **Dishub** | |
| 2200 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor | | - | Pangkalpinang | | | Perbaikan Atap Gedung Kantor dan Pintu Gerbang | 1 Gedung Kan | Terpeliharanya Gedung Kantor | 1 Tahun | 56.500.000 | 141.496.000 | | 1 |
| 2400 | Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | - | Pangkalpinang | | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 6 unit Kendaraan Roda 4 dan 6 unit Kendaraan Roda 2 | Terjaganya kondisi Kendaraan Dinas/Operasional yang baik dan layak | 12 bulan | 349.920.000 | 508.330.000 | | 1 |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Penguatan rural urban linkages** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkatnya Disiplin Aparatur** | | | | | | **25.000.000** | | | 1 |
| 0200 | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | 1 |
| **2** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Penguatan rural urban linkages** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkatnya kualifikasi dan Kompetensi SDM Perhubungan** | **100%** | | | | | **1.637.637.000** | **2.075.000.000** | | |
| 0100 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Pangkalpinang | | | Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis | 10 orang | Meningkatnya kualifikasi dan Kompetensi SDM Perhubungan | 10 orang | 59.920.000 | 75.000.000 | | 1 |
| 9932 | Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) | | | Pangkalpinang | | | Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2016 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014 dan Tahun 2015 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84 orang | Terselenggarannya Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2016 dan Beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2014 dan Tahun 2015 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 84 orang | 1.577.717.000 | 2.000.000.000 | | 3 |
| **3** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Penguatan rural urban linkages** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** | | | | | **14.180.000** | **15.000.000** | | |
| **0100** | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | - | Pangkalpinang | | | Penyusunan Renja, LKPJ dan LAKIP tahun 2016 | 4 Laporan | Tersedianya laporan pertangggung jawaban dan kinerja Dinas Perhubungan | 1 Tahun Angg | 14.180.000 | 15.000.000 | | 1 |
| **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | | **26.974.246.250** | **14.292.179.375** | | |
| **4** | **Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **Penguatan rural urban linkages** | **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah** | | **Terpenuhinya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **100%** | | | | | **4.061.331.250** | **4.467.464.375** | **Dishub** | |
| 0300 | Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS) | | | Pangkalpinang | | | Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rakornis) | 1 kali (60 pes | Adanya sinkronisasi Pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di sektor Perhubungan | 7 Kab/Kota | 53.950.000 | 59.345.000,00 | | 1 |
| 0800 | Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | 25 Kegiatan | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungansesuai rencana yang telah disusun | 12 bulan | 150.000.000 | 165.000.000,00 | | 1 |
| 1700 | Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ | 4 kali pertemuan (30 orang) | Tersediannya rumusan hasil kesepakatan disektor Perhubungan | 4 Kesepakata n | 59.586.250 | 65.544.875,00 | | 1 |
| | Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandar Udara | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Kegiatan Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandara | 2 Bandara | Meningkatkan Keselamatan Penerbangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2 Bandara | 106.975.000 | 117.672.500,00 | | 1 |
| | DED dan SID Pelabuhan Dendang | | | Bangka Belitung | | | DED dan SID Pelabuhan Dendang | 1 Lokasi | TersedianyaDED dan SID Pelabuhan Dendang | 1 Dokumen | 692.200.000,00 | 761.420.000,00 | | 3 |
| | Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu | | | Belitung | | | Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu | 1 Lokasi | Tersedianya Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Seliu | 2 Dokumen | 1.043.610.000,00 | 1.147.971.000,00 | | 3 |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar | | | Bangka Selatan | | | Studi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar | 1 Lokasi | Tersedianya Dokumen PerencanaanStudi Kelayakan dan Kajian Lingkungan Pelabuhan Pulau Besar | 2 Dokumen | 1.028.610.000,00 | 1.131.471.000,00 | | 3 |
| | Survey Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di pulau-pulau brpenduduk pada rute Sadai - Tg.Pandan | | | Bangka Selatan - Belitung | | | Studi Kelayakan Rute Jalur Perintis Pelayanan Antar Pulau Berpenduduk | 1 Lokasi | Tersedianya Dokumen Rute Jalur Perintis Pelayaran Antar Pulau Berpenduduk | 1 Dokumen | 854.910.000,00 | 940.401.000,00 | | |
| | Pembentukan Forum koordinasi SAR daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum Sar Daerah | 1 kali rapat | Tersediannya Forum koordinasi SaR Daerah | 1 Forum | 71.490.000 | 78.639.000,00 | | 3 |
| | **Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ** | **Penguatan rural urban linkages** | **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah** | | **Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ** | 100% | | | | | **200.000.000** | **230.000.000** | **Dishub** | |
| 0500 | Pemeliharaan Alat keselamatan Transporatasi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 4 unit APILL, 10 unit Rambu lalin/RPPJ, 4 unit LPJU, 2 unit WL ( 7 Kabupaten/ Kota) | Tersediannya Perlengkapan Jalan dengan kondisi baik | 12 bulan | 200.000.000 | 230.000.000 | | 1 |
| | **Program Peningkatan Pelayanan Angkutan** | **Penguatan rural urban linkages** | **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah** | | **Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Angkutan** | 100% | | | | | **517.965.000** | **594.715.000** | **Dishub** | |
| 0500 | Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pemeriksaan Surat-surat kendaraan, Penimbangan Kendaraan, dan Pengukuran Dimensi Kendaraan | 400 unit Ken | Meningkatnya disilplin pengendaraa angkutan penumpang dan barang | 400 orang | 68.960.000 | 75.000.000 | | 1 |
| 1500 | Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | | | Pangkalpinang | | | Terselenggaranya Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan | 14 orang (7 K | Terpilihnya peserta Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/ juru mudik/ awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan tingkat Provinsi untuk dikirimkan pada tingkat nasional | 2 orang | 69.925.000 | 90.000.000 | | 1 |
| 2100 | Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Lebaran | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Operasi Pengamanan lalu Lintas pada saat H-7 dan H+7 hari raya idul fitri | | | | | - | | |
| 2400 | Pengawasan dan Pengendalian Angkutan natal dan Tahun Baru | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Operasi Pengamanan lalu Lintas pada saat malam natal dan tahun baru | | | | | - | | |
| 2601 | Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | | Pangkalpinang | | | Terselenggaranya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat provinsi | 30 orang (7 K | Terpilihnya peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas tingkat Provinsi untuk dikirimkan pada tingkat nasional | 3 orang | 86.860.000 | 90.000.000 | | 1 |
| 2700 | Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terselenggaranya Penilaian Penghargaaan Wahana Tata Nugraha | 7 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terpilihnya Kota yang meraih Penghargaaan Wahan Tata Nugraha | 2 Kota | 61.380.000 | 75.000.000 | | 1 |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3001 | Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terselenggaranya Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di sekolah-sekolah. | 2 Kab/ Kota | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengguna jalan raya tentang peraturan dan perundang-undangan lalu lintas | 200 orang | 62.300.000 | 75.000.000 | | 1 |
| 4200 | Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari-hari besar keagamaan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada hari-hari besar keagamaan | 3 peringatan hari besar keagamaan | Terciptanya kelancaran angkutan di terminal-terminal, bandara dan pelabuhan pada hari besar keagamaan | 3 peringatan hari besar keagamaan | 82.120.000 | 90.332.000 | | 1 |
| | Sosialisasi Lingkup stakeholder pengguna jasa kepelabuhanan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Terselenggaranya Sosialisasi Lingkup stakeholder pengguna jasa kepelabuhanan | 40 orang | Terwujudnya kesadaran stakeholder pengguna jasa kepelabuhanan | 40 orang | 86.420.000 | 99.383.000 | | 3 |
| | **Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan** | **Penguatan rural urban linkages** | **Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan, lintas kabupaten/kota. Lintas regional/nasional, dan lintas negara** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan** | **100%** | | | | | **18.500.000.000** | **9.000.000.000** | **Dishub** | |
| 39 | Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.AS. Hanadjoeddin | | | Bandara H.AS. Hanadjoeddin - Tg.Pandan | | | Terselenggaranya Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara dan Shoulder Bandara H.AS. Hanadjoeddin | 92.955,18 M | Terpenuhinya Fasilitas Bandara dalam rangka Peningkatan Status Bandara H.AS. Hanadjoeddin menjadi Bandara Internasional | 92.955,18 M | 11.000.000.000 | 9.000.000.000,00 | Dishub | 1 |
| | Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkalpinang | | | | | | | | | | 7.500.000.000 | | | |
| | **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas** | **Penguatan rural urban linkages** | **Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan, lintas kabupaten/kota. Lintas regional/nasional, dan lintas negara** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Terpenuhinya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan** | **100%** | | | | | **3.694.950.000** | **-** | **Dishub** | |
| 1500 | Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Pulau Bangka | | | | | | Tersedianya Perlengkapan jalan ruas jalan provinsi di Pulau Bangka | 5 Jenis Perler | Ruas jalan provinsi yang terpasang perlengkapan jalan | 6 ruas jalan | 2.240.000.000 | | | 1 |
| 1600 | Pengadaan dan pemasangan Perlengkapan jalan pada ruas jlaan provinsi di Pulau Belitung | | | | | | Tersedianya Perlengkapan jalan ruas jalan provinsi di Pulau Belitung | 5 Jenis Perler | Ruas jalan provinsi yang terpasang perlengkapan jalan | 2 ruas jalan | 1.454.950.000 | | | 1 |
| | | | | **TOTAL** | | | | | | | **30.586.513.250** | **18.747.305.375** | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **5.552.148.000** | | | |
| | **Bidang Urusan Lingkungan Hidup** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran** | **100%** | | | | | **2.046.810.000** | **2.353.831.500** | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman | 12 Bulan | Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Pengiriman | 100% | 45.500.000 | 52.325.000 | **BLHD** | |
| | Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Layanan Jasa Telepon dan Listrik | 12 Bulan | Tersedianya Layanan Jasa Telepon dan Listrik | 100% | 201.500.000 | 231.725.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan | 12 Bulan | Tersedianya Honorarium Jasa Adminitrasi Keuangan | 100% | 136.590.000 | 157.078.500 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor | 12 Bulan | TersedianyaPeralatan Kebersihan Kantor | 100% | 36.000.000 | 41.400.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 131.600.000 | 151.340.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy | 12 Bulan | Tersedianya Spanduk, Barang Cetakan dan Fotocopy | 100% | 111.350.000 | 128.052.500 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak | 12 Bulan | Tersedianya Komponen Listrik Pengganti Komponen Yang Rusak | 100% | 18.000.000 | 20.700.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Bulan | TersedianyaBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 17.280.000 | 19.872.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Alat Logistik Kantor | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset | 12 Bulan | Tersedianya Isi Ulang Tabung Gas, Isi Ulang air Galon dan Bahan Bakar Genset | 100% | 29.100.000 | 33.465.000 | **BLHD** | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat dan Tamu | 12 Bulan | Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu | 100% | 105.000.000 | 120.750.000 | **BLHD** | |
| | Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Indonesia | | | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar Daerah | 12 Bulan | Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lingkungan hidup Ke Luar Daerah | 100% | 350.000.000 | 402.500.000 | **BLHD** | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | 172.500.000 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Penyediaan Honorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir | 12 Bulan | TersedianyaHonorarium Arsiparis, Caraka, Tukang Kebun, Jasa Keamanan Kantor dan Sopir | 100% | 514.890.000 | 592.123.500 | **BLHD** | |
| | Survey dan Pengumpulan Data | | | 7 Kab/Kota | | | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ke Kabupaten/Kota | 12 Bulan | Terlaksananya Koordinasi Ke Kabupaten/Kota | 100% | 200.000.000 | 230.000.000 | **BLHD** | |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **2.355.830.000** | **1.197.403.000** | | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | | | | | | Tersedianya Kendaraan/Operasional | 1 Unit | Tersedianya Kendaraan/Operasional | 1 Unit | 500.000.000 | - | BLHD | |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara dan Radioaktifitas | 2 Paket | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Udara dan Radioaktifitas | HVAS dan Stack Gas Sampler | 814.610.000 | - | BLHD | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Paket | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Paket | 198.295.000 | 228.039.250 | BLHD | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | | | Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor | 12 Bulan | Terpeliharanya Gedung dan Taman Kantor | 100% | 69.000.000 | 79.350.000 | BLHD | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Pangkalpinang | | | Tersedianya Kondisi dan Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional | 12 Bulan | Tersedianya Kondisi dan Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional | 100% | 232.580.000 | 267.467.000 | BLHD | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | | | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | 12 Bulan | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | 100% | 59.250.000 | 68.137.500 | BLHD | |
| | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air | 2 Paket | Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Sampling Kualitas Air | 2 Paket | 326.825.000 | 375.848.750 | BLHD | |
| | Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Laboratorium | | | Pangkalpinang | | | Terbangunnya tempat penyimpanan sementara LB3 Laboratorium | 1 Unit | Tersedianya Tempat penyimpanan sementara LB3 Laboratorium | 1 Unit | 82.710.000 | 95.116.500 | BLHD | |
| | Pembangunan Tangga Darurat | | | Pangkalpinang | | | Jumlah fasilitas penunjang K3 di Laboratorium | 2 Tangga Darurat | Tersedianya Fasilitas Penunjang K3 di Laboratorium | 2 Tangga Darurat | 72.560.000 | 83.444.000 | BLHD | |
| | Penambahan Daya dan Perbaikan Instalasi Listrik | | | Pangkalpinang | | | Jumlah penambahan daya dan instalasi listrik | 66.000 Kwh | Tersedianya Penambahan Daya dan Instalasi Listrik | 0% | - | - | BLHD | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur** | **100%** | | | | | **25.000.000** | **28.750.000** | **BLHD** | |
| | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | 28.750.000 | | |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | | | | | **1.022.240.000** | **1.152.903.750** | **BLHD** | |
| | Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup | | | Pangkalpinang | | | Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | 32 Orang | Terlaksananya Bimtek Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan | 100% | 79.375.000 | 91.281.250 | BLHD | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Indonesia | | | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup | 12 Bulan | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup | 100% | 150.000.000 | 172.500.000 | BLHD | |
| | Kegiatan Operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | | | Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi | 12 bulan | Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan Provinsi selama 12 Bulan | 100% | 773.150.000 | 889.122.500 | UPT LAB | |
| | Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup | | | | | | Jumlah Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Fungsional Pengawas | 10 Orang | Jumlah Aparatur yang mendapat penilaian angka kredit jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Fungsional Pengawas | 100% | 19.715.000 | 22.672.250 | BLHD | |
| | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | **Meningkatnya Sistem Pelaporan Tahunan dan Capaian Kinerja** | **100%** | | | | | **102.268.000** | **117.608.200** | | |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Indikatif | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 serta Evaluasi Laporan SLHD Kabupaten/Kota | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/Kota | 1 Laporan | Tersedianya Laporan SLHD dan Evaluasi Laporan SLHD kabupaten/Kota | 1 Laporan | 62.464.000 | 71.833.600 | **BLHD** | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Laporan Tahunan berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD | Rp - | Tersedianya Laporan Tahunan berupa LAKIP, LPPD, LKPJ, dan Renja SKPD | Rp - | - | - | **BLHD** | |
| | Penyusunan Laporan Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup tahun 2013 dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | | | Pangkalpinang | | | Jumlah Laporan SPM Bidang Lingkunga Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Tersedianya Laporan SPM Bidang Lingkunga Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Evaluasi Laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 39.804.000 | 45.774.600 | **BLHD** | |
| **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | | **3.788.728.800** | | | |
| | **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** | **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Terjaganya Kualitas Lingkungan dan Terkelolanya Sumber Daya Alam di Perkotaan dan Pedesaan Secara Arif dan Bijaksana** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **70%-80%** | | | | | - | - | **BLHD** | |
| | Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Penyusunan Kebujakan Manjaemen Pengelolaan Sampah | Tersedianya Naskah Akademis dan Perda Manajemen Pengelolaan Persampahan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | **70%-80%** | Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Rp - | Tersedianya Dokumen Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah | Rp - | - | - | **BLHD** | |
| | **Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup** | **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **70%-80%** | | | | | **2.455.390.300** | **4.523.738.770** | **BLHD** | |
| | Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Kota yang dinilai dan diekspos | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura) di 7 Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | 188.200.000 | 216.430.000 | **BLHD** | |
| | Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian Amdal Kab/Kota | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan lisensi | 7 Komisi Penilai AMDAL | Terlaksananya Penerbitan Rekomendasi, Verifikasi, Pembinaan dan Pengawasan Lisensi Komisi Penilai Amdal di 7 Kabupaten/Kota | 7 Komisi Penilai AMDAL | 59.713.000 | 62.748.000 | **BLHD** | |
| | Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Peserta Rapat koordinasi Amdal se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 35 orang | Terlaksananya Rapat Koordinasi AMDAL di-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Kali Rapat | 33.500.000 | 38.525.000 | **BLHD** | |
| | Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan izin lingkungan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah perusahaan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup | 21 keg/usaha | Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan RKL-RPL | 21 keg/usaha | 184.492.000 | 398.294.000 | **BLHD** | |
| | Evaluasi Mutu Dokumen Amdal yang dikeluarkan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Dokumen Amdal yang Dievaluasi Mutu | 7 Dokumen Amdal | Terlaksananya Evaluasi Mutu 7 Dokumen Amdal yang dikeluarkan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota | 7 Dokumen Amdal | 68.476.000 | 78.747.400 | **BLHD** | |
| | Verifikasi Tata Laksana Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL di Kabupaten/Kota | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Instansi Lingkungan Hidup yang melaksanakan Tata Laksana UKL-UPL | 7 Instansi Lingkungan Hidup | Terlaksananya Verifikasi Tata Laksana Pemeriksaan UKL-UPL di 7 Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 165.868.000 | 190.748.200 | **BLHD** | |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | Pemantauan Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah data kualitas dan status mutu sungai | 11 Data Sungai | Terlaksananya Pemantauan 11Kualitas Sungai dan Penentuan Status Mutu Sungai Provinsi | 11 Data Sungai | 328.692.000 | 377.995.800 | **BLHD** | |
| | Penyusunan Profil GRK Prov. Kep.Babel | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Profil Tahunan Gas Rumah Kaca | 1 Dokumen | Tersusunya 1 Dokumen Profil Tahunan Gas Rumah Kaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | 148.918.000 | 171.255.700 | **BLHD** | |
| | Pemantauan Bahan perusak Ozone | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Teridentifikasinya Potensi Penggunaan Bahan Perusak Ozon Skala Kota | 3 Kabupaten | Terlaksananya Pemantauan Bahan perusak Ozone di 3 Kabupaten | 3 Kabupaten | 57.329.000 | 65.928.350 | **BLHD** | |
| | Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup | 40 Perusahaan | Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup | 40 Perusahaan | 358.603.000 | 412.393.450 | **BLHD** | |
| | Verifikasi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Persentase terverifikasinya Pengaduan Masyarakat Bidang lingkungan Hidup | 7 Kab/Kota | Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Bidang lingkungan Hidup | 14 Kasus | 245.144.000 | 281.915.600 | **BLHD** | |
| | Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Kajian Sumber Pencemar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | Terlaksananya Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber-Sumber Pencemar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | 389.966.800 | 448.461.820 | **BLHD** | |
| | Pengembangan dan Inventarisasi Gas Rumah Kaca | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terkelolanya Lingkungan Hidup Berbasis Tanggung Jawab | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah kajian Komposisi Sampah dan Dry Matter Contain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | Terlaksananya Kajian Komposisi Sampah dan Dry Matter Contain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | 226.488.500 | 260.461.775 | **BLHD** | |
| | **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** | **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **70%-80%** | | | | | **1.087.848.500** | **1.251.025.775** | | |
| | Penilaian Program Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Sekolah yang dinilai untuk mendapatkan penghargaan sekolah | 28 sekolah | Terlaksananya Penilaian Program Adiwiyata di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | 105.150.000 | 120.922.500 | **BLHD** | |
| | Survailen, Audit Internal, Kaji Ulang dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Lingkungan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah dokumen untuk mempertahankan akreditasi laboratorium | 4 dokumen | Terlaksananya Survailen, Audit Internal, Kaji Ulang dokumen dan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Lingkungan | 4 dokumen | 66.545.000 | 76.526.750 | **BLHD** | |
| | Uji Profisiensi (Uji Banding antar Laboratorium ) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah dokumen Uji Profisiensi (Uji Banding antar Laboratorium ) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart | 4 dokumen | Terlaksananya Uji Profisiensi (Uji Banding antar Laboratorium ) dan Pengendalian Mutu Melalui Control Chart | 100% | 158.356.000 | 182.109.400 | **BLHD** | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal di Laboratorium Lingkungan | 3 Kali | Terlaksananya 3 Macam Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan | 3 Jenis | 91.895.000 | 105.679.250 | **BLHD** | |
| | Buletin Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Buletin Bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan | 3 Buletin | Tersedianya 3 Buletin Bidang Lingkungan Hidup Selama Setahun | 3 Buletin | 89.300.000 | 102.695.000 | **BLHD** | |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Ke Kabupaten/Kota | 7 Kab/Kota | Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup di 7 Kabupaten/Kota | 7 Kab/Kota | 98.089.500 | 112.802.925 | **BLHD** | |
| | Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Laporan Program Kerja Bidang Lingkungan Hidup | 1 laporan | Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | 71.555.000 | 82.288.250 | **BLHD** | |
| | Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Sungai Batu Rusa dan Sungai Buding | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Sungai yang Dikaji Daya Tampung Beban Pencemar | 2 Sungai | Tersedianya Dokumen Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran 2 Sungai | 1 Dokumen | 378.758.000 | 435.571.700 | **BLHD** | |
| | Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Pengaanggaran Responsif Gender | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan | Pangkalpinang | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Perencanaan Pengaanggaran Responsif Gender | 30 Orang | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Pengaanggaran Responsif Gender | 100% | 28.200.000 | 32.430.000 | **SEKRETARIAT** | |
| | **Program Peningkatan pengendalian Polusi** | **Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Berkurangnya Laju Kerusakan Lingkungan dengan Peningkatan Daya Dukung dan Daya Lenting Lingkungan** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **70%-80%** | | | | | **245.490.000** | **282.313.500** | **BLHD** | |
| | Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Terwujudnya Perlindungan Fungsi Ruang dan Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang | 7 Kab/Kota | Membaiknya kualitas hidup dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 70%-80% | Jumlah Kota yang dipantau Kualitas mutu udara ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kota | Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara Ambien di 7 Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kota | 245.490.000 | 282.313.500 | **BLHD** | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | 9.340.876.800,00 | - | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01.20 | Bidang Otonomi Daerah, Pemerinthan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | | | |
| 01.20..... | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | 69.813.726.000 | 80.221.057.502 | | |
| | Beanja Tidak Langsung | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 69.813.726.000 | 80.221.057.502 | | |
| | Rutin | | | | | | | | | | 40.816.625.000 | 44.898.287.500 | | |
| 01.20.....A | Biro Umum dan Perlengkapan | | | | | | | | | | 44.357.997.000 | 48.793.796.700 | | |
| | *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran* | | | *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* | *Tingkat pelayanan administrasi perkantoran* | *100%* | | | | | *33.809.349.000* | *37.190.283.900* | | |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Paket/Pengiriman | 1 paket | Lancarnya pengiriman paket dan surat untuk keperluan kantor | 12 bln | 332.926.000 | 366.218.600 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terbayarnya Jasa Listrik, Telekomunikasi dan Informasi | 12 bln | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 bln | 5.074.020.000 | 5.581.422.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terbayarnya Honorarium Pengelolaan Keuangan | 12 bln | Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan | 12 bln | 672.360.000 | 739.596.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Operasional Kebesihan Kantor | 12 bln | Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor | 12 bln | 690.000.000 | 759.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | Pangkalpinang | Penyediaan jasa persewaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12 bln | Jumlah capaian penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 bln | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja di lingkungan setda | 95% | 598.500.000 | 658.350.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terpeliharanya peralatan kerja | 12 bln | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bln | 245.000.000 | 269.500.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan alat tulis kantor | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | 1 paket | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bln | 700.000.000 | 770.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bln | 650.000.000 | 715.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Pangkalpinang | Terlaksananya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bln | Jumlah capaian penyediaan alat listrik dan elektronik | 12 bln | Tersedianya alat listrik dan elektronik di lingkungan setda | 95% | 175.000.000 | 192.500.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | | Pangkalpinang | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan setda | 12 bln | Jumlah capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Souvenir, plakat, pigura, cetak undangan, kalender, spanduk, buku kerja/agenda | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan setda | 95% | 2.558.180.000 | 2.813.998.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan peralatan rumah tangga | | | Pangkalpinang | Terlaksananya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga jabatan | 12 bln | Jumlah capaian penyediaan peralatan kebersihan rumah jabatan | 12 bln | Tersediana peralatan kebersihan di rumah jabatan | 95% | 192.000.000 | 211.200.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi | 1 paket | Terpenuhinya Informasi yang diterima pegawai | 12 bln | 620.420.000 | 682.462.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 paket | Terpenuhinya bahan logistik kantor | 12 bln | 118.500.000 | 130.350.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan makanan dan minuman | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 1 paket | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat | 12 bln | 3.580.000.000 | 3.938.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah | 1 paket | Lancarnya Koordinasi Konsultasi ke Pusat dan Antar Daerah | 12 bln | 4.000.000.000 | 4.400.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terbayarnya Tenaga Honorer dan Kontrak | 18 orang | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 13 bln | 4.809.090.000 | 5.289.999.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya keperluan kebutuhan tamu-tamu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12 bln | jumlah Capaian jasa pelayanan tamu pemerintah | 12 bln | Terpenuhinya kebutuhan bagi tamu-tamu Pemrpov.Kep. Babel dengan baik dan lancar | 95% | 1.950.000.000 | 2.145.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | |
| | Pembinaan Administrasi Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kab/Kota | | | Pangkalpinang | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | 12 bln | Jumlah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikunjungi | 7 kab/kota | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang kelancaran tugas-pokok kedinasan di dilikungan setda | 95% | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Kegiatan rumah dinas Gubernuran | | | Pangkalpinang | Terlaksananya kegiatan-kegiatan rumah dinas Gubernur dengan baik dan lancar | 12 bln | Jumlah kegiatan rumah dinas gubernuran | 24 kegiatan | Terselenggaranya kegiatan di rumah dinas gubernuran dengan baik dan lancar | 95% | 2.714.000.000 | 2.985.400.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Biaya operasional pengelolaan Wisma Bougenvile | | | Pangkalpinang | Terlaksananya operasional pengelolaan Wisma Bougenvile | 12 bln | Jumlah capaian operasional pengelolaan wisma Bougenvile | 12 bln | Terlaksananya kebersihan dan kenyamanan wisma bougenvile | 95% | 2.012.273.000 | 2.213.500.300 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pengelolaan Inventarisasi aset dilingkungan Setda | | | Pangkalpinang | Terdatanya penilaian aset milik Setda | 1 dokumen | Jumlah dokumen aset yg akuntabel | 1 dokumen | Tertatanya pengelolaan aset di lingkungan setda | 90% | 117.080.000 | 128.788.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Koordinasi, konsolidasi ke Dalam Daerah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | 12 bln | Jumlah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikunjungi | 7 kab/kota | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah guna menunjang kelancaran tugas-pokok kedinasan | 95% | 450.000.000 | 495.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan intern SKPD | | | Pangkalpinang | Terlaksananya pengadministrasian pengelolaan keuangan daerah di SKPD Sekretariat Daerah | 7 biro | Jumlah pengelola administrasi keuangan dilingkungan setda | 7 biro | Terselenggaranya pembinaan administrasi pengelilaan keuangan di lingkungan setda | PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu | 50.000.000 | 55.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Rehab Gedung Serba Guna | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Serba Guna | 100% | Pelayanan Gedung secara maksimaldan memberikan kepuasan kepada pengguna gedung | 1 paket | Peningkatan pendapatan retribusi | Terpenuhi | 2.616.470.000 | 2.878.117.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | DED Rehabilitasi Wisma Bougenville | | | Pangkalpinang | Terlaksananya DED Rehabilitasi Wisma Bougenville di Belitung | 100% | Tersedianya Wisma Bougenville yang Nyaman, Indah dan Representatif | 1 paket | Tersedianya Wisma Bougenville yang Nyaman, Indah dan Representatif Bagi Tamu | Terpenuhi | 153.860.000 | 169.246.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| | Pembangunan Masjid dan Ruang Pers | | | Pangkalpinang | Pembangunan Masjid dan Ruang Pers di Kawasan Kantor Gubernur | 100% | Pembangunan Masjid dan Ruang Pers di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 paket | Kenyamanan PNS dan Masyarakat di Sekitar Kantor Gubernur | Terpenuhi | 5.353.260.000 | 5.888.586.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| | Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Sarana Guna Penunjang di Kegiatan di Lingkungan Setda | 100% | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran | 1 (satu) unit | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pemadam Kebakaran di Lingkungan Sekretariat Daerah | Terpenuhi | 1.750.000.000 | 1.925.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengadaan Kendaraan Operasional Korem | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Sarana Guna Penunjang di Kegiatan di Lingkungan Setda | 100% | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Korem | 1 unit bus dan 2 unit sedan | Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah | Terpenuhi | 1.655.560.000 | 1.821.116.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan / Dinas KDH, WKDH dan Sekda | 1 paket | jumlah pengadaan tv, water hitr, sofa dan rak | 1 paket | Tersedianya pengadaan perlengkapan di rumah Gubernur, Wk. Gubernur dan Sekda | 95% | 497.920.000 | 547.712.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | | Pangkalpinang | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | 6 buah cinderamata, 1 unit almari arsip, 2 unit filling cabinet | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bln | 1.479.050.000 | 1.626.955.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas | | | Pangkalpinang | Tersedianya peralatan untuk rumah jabatan/dinas | Terlaksana | Jumlah pengadaan kompor gas, dispenser, kulkas, peralataan dapur, mesin cuci, lampu hias, jam dinding dan karpet. | 1 paket | Terlaksananya pengadaan peralatan di rumah Gubernur, Wk. Gubernur dan Sekda | 95% | 656.700.000 | 722.370.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pengadaan peralatan gedung kantor | | | Pangkalpinang | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 1 paket | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bln | 2.597.201.496 | 2.856.921.646 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pengadaan Baleho di Kabupaten/Kota | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pengadaan baleho di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersedianya Pengadaan baleho di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 8 Unit | Peningkatan PAD Sekretariat Daerah | Terpenuhi | 1.446.310.000 | 1.590.941.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan | Meningkat | Jumlah rumah jabatan yang dilakukan pemeliharan | 3 unit rumah | Terpeliharanya lingkungan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah | 95% | 2.264.700.000 | 2.491.170.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | Pangkalpinang | Terjaganya Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Meningkat | Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan | 6 gedung | Terpeliharanya gedung di lingkungan Sekretariat Daerah | 95% | 2.584.700.000 | 2.843.170.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | | | Pangkalpinang | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor | 1 paket | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bln | 2.264.340.000 | 2.490.774.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | Pangkalpinang | Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 1 unit mobil, 8 unit motor | Lancarnya kegiatan operasional kedinasan | 12 bln | 5.734.950.000 | 6.308.445.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | | | Pangkalpinang | Terpeliharanya secara rutin/berkala rumah dinas di lingkungan setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Jumlah rumah jabatan yg dilakukan pemerliharaan perlengkapannya | 3 rumah jabatan | Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan di lingkungan setda | 95% | 1.123.700.000 | 1.236.070.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas | | | Pangkalpinang | Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan rumah dinas di lingkungan setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Jumlah rumah jabatan yg dilakukan pemerliharaan peralatannya | 3 rumah jabatan | Terpeliharanya peralatan rumah jabatan di lingkungan setda | 95% | 609.600.000 | 670.560.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan listrik | | | Pangkalpinang | Pemeliharaan genset kantor dan rumah jabatan/dinas | Terlaksana | Jumlah genset dilingkungan setda yg diperlihara | 6 unit | Terpeliharanya generator set (genset) di Kantor gubernur, rumah jabatan dan wisma Bougenvile | 95% | 1.050.500.000 | 1.155.550.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Sarana dan Prasarana di Rumah Jabatan | Terlaksana | Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah jabatan | 1 paket (Almari, kursi kerja, karpet, TV, meja komputer, kompor gas, dispenser, lemari es, vitrage dll) | Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana dilingkungan rumah dinas jabatan Gubernur | 95% | 950.462.440 | 1.045.508.684 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan | Terlaksana | Jumlah gedung yang dilakukan pemerliharan | 3 gedung | Terpeliharanya kebersihan rumah jabatan | 95% | 1.090.800.000 | 1.199.880.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pemeliharaan secara rutin/berkala kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi | Terlaksana | Jumlah panjang jalan Milik Pemerintah Provinsi yang dipeliihara | 15.349 M | Terpeliharanya kebersihan jalan Perkantoran Milik Pemerintah Provinsi | 95% | 1.553.800.000 | 1.709.180.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat disiplin aparatur** | **100%** | | | | | **1.221.600.000** | **3.895.509.200** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas KDH, WKDH dan pakaian bagi Humas Protokol | Terlaksana | Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, PNS, THL dan Humas Protokol | 2232 lbr | Terciptanya keseragaman dan kenyamanan dalam berpakaian dalam meningkatkan disiplin dan motivasi kerja | 95% | 926.600.000 | 1.019.260.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Peningkatan Kebugaran Pegawai Pemprov. | | | Pangkalpinang | Terlaksananya senam kesegaran jasmani pegawai di lingkungan pemeintah Prov.Kep. Babel | Terlaksana | Jumlah pegawai yg mengikuti senam kesegaran jasmani (jumat) di lingkungan pemeintah Prov.Kep. Babel | 400 orang | Terselenggarannya senam kesegaran jasmani (jumat) bagi pegawai di lingkungan pemeintah Prov.Kep. Babel | 95% | 270.000.000 | 297.000.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov.Kep.Babel | | | Pangkalpinang | Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov.Kep.Babel | Terlaksana | Jumlah dokumen penganggaran yang responsif gender di Biro Umum | 1 Laporan | Tersedianya laporan penganggaran yang responsif gender di Biro Umum | 1 Laporan | 25.000.000 | 27.500.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | Baru |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat pelayanan kapasitas sumber daya aparatur** | **100%** | | | | | **2.319.772.000** | | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan | | | Pangkalpinang | Kualitas pelayanan bagi aparatur dan masyarakat | 95% | Jumlah Bintek Implementasi Kehumasan dan Keprotokolan Bidang Humas dan Protokol di Bidang Humas dan Keprotokolan | 2 kali | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kehumasan dan keprotokolan aparatur pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 orang | 256.300.000 | 281.930.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Workshop Jurnalistik dan Fotography | | | Pangkalpinang | Peningkatan kualitas SDm aparatur dan non aparatur di bidang fotografi dan jurnalistik | 95% | Jumlah workshop bidang fotography dan jurnalistik | 2 kali | meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang fotografi | 60 orang | 206.472.000 | 227.119.200 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| | Kegiatan Publikasi dan Siaran | | | Pangkalpinang | Untuk mewujudkan publikasi dan siaran kegiatan-kegiatan pemerintah daerah | 12 bln | Jumlah kegiatan yg dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik | 60 kali | Terlaksananya kegiatan Publikasi dan Siaran baik melalui Media Cetak, elektronik. | 95% | 1.857.000.000 | 2.042.700.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| | Penyusunan Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya penyusunan perencanaan dan pelaporan | 12 bln | Jumlah data penyusunan perencanaan dan pelaporan | 1 dokumen | Tersedianya data-data dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan di Biro Umum dan Perlengkapan | 6 laporan | 128.900.000 | 141.790.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Terwujudnya peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah** | **100%** | | | | | **7.007.276.000** | **7.708.003.600** | | |
| | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri | | | Pangkalpinang | Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri | 12 bln | Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen / lembaga pemerintah non departemen / luar negeri | 15 kunjungan | Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri dengan baik dan lancar | Terlaksana | 2.882.100.000 | 3.170.310.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah | | | Pangkalpinang | Terwujudnya Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah | Terlaksana | Terlaksananya kunjungan KDH WKDH dalam daerah | Terlaksana | Terlaksananya dengan baik dan lancar tugas-tugas pokok kedinasan dalam daerah KDh dan WKDH | Terlaksana | 1.488.800.000 | 1.637.680.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Penyelenggaraan Pemerintahan Otonomi dan Akuntabel | | | Pangkalpinang | Terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Tersedianya kebijakan-kebijakan provinsi yang akuntabel | Menyusun regulasi | Tersedianya regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi yg akuntabel | Terlaksanaan ya penyusunan Perda dan Pergub | 1.419.696.000 | 1.561.665.600 | Biro Umum dan Perlengkapan | SEDANG BERJALAN |
| | Dukungan Publikasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di dalam dan | | | Pangkalpinang | Untuk mewujudkan publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di dalam dan luar daerah | 30 kegiatan | Adanya dukungan dan fasilitasi publikasi kegiatan pemerintah provinsi di dalam dan luar daerah | 30 kegiatan | Adanya informasi dalam bentuk pemberitaan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov.Kep.Babel di dalam dan luar daerah | 95% | 1.216.680.000 | 1.338.348.000 | Biro Umum dan Perlengkapan | BARU |
| 01.20 | Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | 3.332.173.000 | 5.160.000.000 | | |
| | **Wajib** | | | | | | | | | | **28.997.101.000** | **35.322.770.002** | | |
| | **Biro Pemerintahan** | | | | | | | | | | **3.332.173.000** | **5.160.000.000** | | |
| **1.06.17** | **Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi** | | | | | | | | | | **470.940.000** | **750.000.000** | | |
| 7800 | Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota. | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang | 7 Kab/Kota | Peningkatan tertib administrasi daerah perbatasan. | 100% | Terlaksananya pembinaan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/ kota. | 7 Kab/ Kota | Terwujudnya kesepakatan batas daerah. | 5 kesepakatan | 102.980.000 | 200.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 8000 | Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah antar Kabupaten/ Kota. | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang | Kab. Belitung dengan Kab. Belitung Timur | Peningkatan jumlah pilar batas daerah antar kab/kota. | 100% | Terlaksananya pemasangan perapatan pilar batas daerah . | 7 buah pilar batas | Semakin jelasnya batas daerah antar kab/kota | 7 buah pilar batas | 183.980.000 | 300.000.000 | Biro Pemerintahan | BARU |
| 8100 | Pemasangan Pilar Batas Wilayah antar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang | Pesisir Pantai Barat Selat Bangka | Peningkatan pilar batas wilayah antar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan | 100% | Terlaksananya pemasangan pilar batas wilayah | 8 buah pilar | Semakin jelasnya petunjuk batas wilayah antar kedua provinsi | 8 buah pilar batas | 183.980.000 | 250.000.000 | Biro Pemerintahan | BARU |
| **01.09.18** | **Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan** | | | | | | | | | | **2.500.000** | **-** | | |
| 0100 | Penyediaan Jasa Penitipan Ganti Rugi Uang Pembebasan Tanah | Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Terlaksananya pembayaran biaya penitipan ganti rugi uang pembebasan tanah | 2 (dua) kali pembayaran | Terlaksananya penitipan ganti rugi uang pembebasan | Terlaksana | 2.500.000 | - | Biro Pemerintahan | BARU |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0100 | Pembinaan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan Pemahaman terhadap substansi bidang penanganan sengketa dan konflik pertanahan | Meningkat | Terlaksananya Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan | 2 (dua) kali pertemuan | Teridentifikasinya Sengketa dan Konflik Pertanahan | 7 kab/kota | 126.290.000 | - | Biro Pemerintahan | BARU |
| **01.20.16** | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | | | **1.058.034.000** | **1.450.000.000** | | |
| 0700 | Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov, Kab/Kota | Meningkatkan konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan kebijakan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | Terlaksananya Rapat Koordinasi antar Kepala Daerah sebagai daerah Otonomi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2 Kali Rakor Gubernur dengan Bupati dan Walikota | Tersusunnya Kesepakatan Antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota | 2 Kesepakatan Gubernur dengan Bupati dan Walikota | 307.574.000 | 600.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 2100 | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sosialisasi IKK LPPD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | - | Tersusunnya LPPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tersosialisasinya IKK LPPD | 1 Dokumen (35 Buku), 36 SKPD, 7 Kab/Kota | Tersedianya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jumlah Aparatur yang Memahami LPPD | 1 Dokumen (35 Buku), 50 orang | 400.070.000 | 400.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 3200 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | - | - | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | Tersedianya Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | 350.390.000 | 450.000.000 | Biro Pemerintahan | BARU |
| **01.20.17** | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | | | | | | | | | | **200.000.000** | **200.000.000** | | |
| 1100 | Monitoring Evaluasi dan Verifikasi bantuan Hibah kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananyan monitoring evaluasi dan verifikasi pengelolaan dan penyaluran bantuan hibah kepada Pemerintah/Pemerintah daerah lainnya dan Perusahaan Daerah | 100% | Terlaksananyan monitoring evaluasi dan verifikasi terhadap usulan proposal hibah | 1 paket | Lancarnya proses perencanaan pelaksanaan belanja hibah | 12 bulan | 200.000.000 | 200.000.000 | Biro Pemerintahan | BARU |
| **01.20.025** | **Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | **439.980.000** | **800.000.000** | | |
| 1500 | Partisipasi Kontribusi Iuran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan. | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya kerjasama antar pemerintah provinsi kepulauan | Meningkat | Terlaksananya keikutsertaan provinsi pada rapat kerja BKS | 12 bulan | Lancarnya kegiatan-kegiatan BKS kepulauan | 12 bulan | 225.000.000 | 400.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 1300 | Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Berkembangya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Kabupaten Belitung | Terwujudnya koordinasi antara pemerintah daerah mengenai kerjasama | Meningkat | Terlaksananya rakor kerjasama kab/kota | 1 (satu) kali rakor | Tersusunnya kesepakatan kerjasama | 1 dokumen kesepakatan | 214.980.000 | 400.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| **01.20.27** | **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** | | | | | | | | | | **212.080.000** | **750.000.000** | | |
| 1000 | Koordinasi Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov, Kab/Kota | - | - | Terlaksananya Penataan Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 9 urusan | Tersedianya dokumen yang menjadi Urusan/Kewenangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 9 dokumen | 212.080.000 | 750.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| **01.20.99** | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | | | | | | | | | | **948.639.000** | **1.210.000.000** | | |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0100 | Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov, Kab/Kota | Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | 75% | Terlaksananya Rapat Koordinasi Administrasi Kependudukan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | 2 kali Rakor | Tersedianya Kesepakatan dan Rekomendasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 dokumen | 159.298.000 | 300.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 0400 | Pendayagunaan Data Kependudukan | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov, Kab/Kota | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 75% | Tersedianya buku database kependudukan | 2 dokumen (60 buku) | Tersedianya informasi administrasi kependudukan yang valid, akurat dan berkualitas lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung | Tersedianya database kependudukan yang valid 12 bulan | 346.996.000 | 310.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 0600 | Peningkatan kapasitas aparatur Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov, Kab/Kota | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 75% | Terlaksananya Bimbingan Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 kali bimbingan teknis | Meningkatnya kapasitas SDM bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 75 orang | 200.953.000 | 300.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| 1300 | Sosialisasi Bidang Kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peningkatan manajemen pemerintah dan aparatur. | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov, Kab/Kota | Terwujudnya tertib administrasi kependudukan | 75% | Tersosialisasinya Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 Bulan | 2 kali sosialisasi dan 7 baliho | Diketahuinya kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil oleh masyarakat | 12 bulan | 241.392.000 | 300.000.000 | Biro Pemerintahan | SEDANG BERJALAN |
| **01.20.03** | **Biro Hukum** | | | | | | | | | | **3.670.785.000,00** | **4.812.770.000,00** | | |
| **01.02.20** | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | | | | | | | | | | **988.620.000,00** | **1.098.430.000,00** | | |
| **2500** | Penyelesaian Perselisihan /Sengketa antara Pemda ( Penguasa) dengan orang/ masyarakat secara litigasi/non litigasi | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Perdata antara Pemda dengan orang/ masyarakat secara litigasi/non litigasi | 1 Kasus | Terselesaikannya Sengketa antara Pemda dengan orang/masyarakat secara litigasi/non litigasi | 1 Kasus | 270.270.000,00 | 283.600.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **2600** | Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | Terlaksananya Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda | 1 Kasus | Terselesaikannya Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda | 1 Kasus | 328.650.000,00 | 397.000.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **2700** | Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Terciptanya aparatur yang memahami teknis penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum serta kebijakan Pemda | 60 Orang | Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa akibat Pelaksanaan Produk Hukum Serta Kebijakan Pemda | 1 Kegiatan Bimtek | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | 113.080.000,00 | 125.170.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| | Monitoring pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | Terlaksananya monitoring bantuan hukum dan penyelesaian sengketa akibat pelaksanaan produk hukum daerah dan kebijakan Pemda di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka | 7 Kab/kota | Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian sengketa di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/kota | 130.560.000,00 | 146.330.000,00 | Biro Hukum | |
| | Monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 100% | Terlaksananya monitoring Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/kota | Meningkatnya koordinasi dan pengawasan pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/kota | 146.060.000,00 | 146.330.000,00 | Biro Hukum | |
| **1.20.26** | **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | | | | | | **2.198.830.000,00** | **2.802.235.000,00** | | |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0900 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah | 12 Raperda | Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah yang Berkualitas ke DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung | 10 Raperda | 625.300.000,00 | 905.405.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| 1200 | Bimbingan Teknik Legal Drafting | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terlaksananya Bimtek Legal Drafting | 2 Kegiatan Bimtek | Meningkatnya Pemahaman aparatur terhadap teknik Penyusunan PHD | 50 orang | 147.740.000,00 | 124.620.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| 1400 | Sosialisasi Perda | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terlaksananya Sosialisasi Perda | 2 Kali Kegiatan | Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap Perda yang sudah berlaku. | 80 orang | 150.000.000,00 | 151.270.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| 1900 | Penyusunan Produk Hukum Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terlaksananya penyusunan Produk Hukum Daerah | 1400 PHD | Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah yang Berkualitas | 1400 PHD | 336.000.000,00 | 459.280.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| 3500 | Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terselenggaranya Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kab/Kota dan Instansi terkait lainnya | 2 Kali Pelaksanan Rakor | Meningkatnya koordinasi permasalahan hukum antara Biro Hukum Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Bagian Hukum Kab/Kota dan Instansi terkait lainnya | 7 kab/kota | 377.260.000,00 | 438.840.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| | Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terlaksananya Penyuluhan Hukum di 7 wilayah kabupaten/kota | 7 Kab/kota | Meningkatnya kesadaran aparatur dan masyarakat yang memahami hukum dan tata pelaksanaan hukum | 350 Orang | 446.800.000,00 | 598.700.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| | Rakor Prolegda | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan | 100% | Terselenggaranya Rakor Program legislasi daerah | 1 Kegiatan | Meningkatnya Jumlah Aparatur Pemerintah yang Memahami Teknis Penyusunan Program Legislasi Daerah | 50 orang | 115.730.000,00 | 124.120.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **1.20.20.105** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota** | | | | | | | | | | **160.750.000,00** | **351.840.000,00** | | |
| 0100 | Monitoring dan Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota | 100% | Terlaksananya Klarifikasi Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota | 50 PHD | Meningkatnya Jumlah Perda Peraturan Kab/Kota yang Berkualitas | 50 PHD | 70.750.000,00 | 152.770.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| 0200 | Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota | 100% | Terselenggaranya Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota | 10 Raperda | Meningkatnya kualitas Raperda Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan RUTR Kab/Kota yang Dievaluasi | 10 Raperda | 90.000.000,00 | 199.070.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.20.20.106** | **Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH)** | | | | | | | | | | **322.585.000,00** | **560.265.000,00** | | |
| | Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam jaringan webisite | 75 PHD | Tersedianya Informasi Hukum dan Peraturan Perudang-undangan bagi Aparatur dan Masyarakat | 75 PHD | 106.540.000,00 | 209.100.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **3000** | Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Tersusunnya Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 | 57 Jilid | Meningkatnya Jumlah Dokumentasi Himpunan Keputusan Gubernur dan Keputusan Sekretaris Daerah Tahun 2015 | 57 Jilid | 29.995.000,00 | 55.595.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **3200** | Penyusunan Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Tersusunnya Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 | 75 Buku | Meningkatnya Jumlah himpunan ` Katalog Perda dan Pergub Tahun 2001 s.d 2015 | 75 Buku | 50.000.000,00 | 58.085.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **3300** | Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Tersusunnya Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 | 100 buku | Meningkatnya Jumlah dokumentasi Himpunan Perda dan Pergub Tahun 2015 | 100 buku | 50.000.000,00 | 98.320.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| **3400** | Penginventarisasian Produk Hukum Pusat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Inventarisasi Penghimpunan Produk Hukum Pusat | 69 jilid | Meningkatnya Jumlah Dokumentasi Inventarisasi Produk Hukum Pusat | 69 jilid | 40.000.000,00 | 46.195.000,00 | Biro Hukum | Sedang Berjalan |
| | Pengumpulan dan Penyusunan Arsip PHD Tahun 2016 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum | Pemprov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Pelaksanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 100% | Terselenggaranya pengumpulan dan penyusunan arsip PHD Tahun 2016 | 80 jilid | Meningkatnya Jumlah arsip PHD yang terkelola dan tertata dengan baik | 80 jilid | 46.050.000,00 | 92.970.000,00 | Biro Hukum | |
| | **Biro Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | **12.886.225.000** | **13.170.000.002** | | |
| **1.20.29** | **Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan** | | | | | | | | | | **500.000.000** | **500.000.000** | | |
| 1.20.29.0100 | Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk kesejahteraan masyarakat | Teciptanya kualitas pendidikan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) | 7 kab/kota | Terlaksannya Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | TP UKS | - | Meningkatmya kemampuan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 500.000.000 | 500.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| **1.13.04** | **Program Peningkatan Generasi Muda dan Olahraga** | | | | | | | | | | **4.139.350.000** | **4.165.000.000** | | |
| 1.13.11.0100 | Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi, dan informasi serta pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan. | Terciptanya pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan | pangkalpinang | Meningkatnya generasi muda / Masyarakat yang mencintai thdp bangsa dan negara melalaui HUT RI | 8 kegiatan | Terlaksananya peringatan HUT RI di Prov. Kep. Babel | 100% | Meningkatnya rasa kecintaan generasi muda dan masyarakat thdp NKRI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3000org | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.11.0200 | Peningkatan Kecintaan bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi, dan informasi serta pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan. | Terciptanya pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan | pangkalpinang | Kecintaan bermasyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat | Rangkaian acara peringatan HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1500 orang | erciptanya harmonisasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.11.0300 | Sinkronisasi dan Informasi bidang kesejahteraan Provinsi kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi, dan informasi serta pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan. | Terciptanya pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pembinaan bidang pemuda dan keolahragaan | pangkalpinang | Keterbukaan komunikasi dan Informasi bidang kesejahteraan | Meningkat | Tercapainya kesejahteraan masyarakat | Meningkat | Tercapainya kesepakatan dalam meginplementasikan kegiatan Provinsi dengan kab/kota di Provinsi kepulauan Bangka Belitung | 45 org | 106.750.000 | 115.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.11.0100 | Seleksi POSPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | Meningkatkan kualitas peserta atlet POSPEDA Provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2016 | Teciptanya kualitas atlet POSPEDA Provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2016 | Pangkalpinang | Meningkatkan kualitas olahraga dan seni santri ponpes Prov. Kep. Babel | Meningkat | Seleksi POSPEDA tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 500 peserta | Juara POSPEDA tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat | 600.000.000 | 600.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | baru |
| 1.13.11.0200 | Pembinaan dan pemberangkatan kontingen POSPENAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke tingkat Nasional th 2016 | Meningkatkan kualitas peserta atlet POSPEDA Provinsi kepulauan bangka belitung tahun 2016 | Teciptanya kualitas atlet POSPEDA Prov Kep Babel 2016 | Jakarta | Meningkatkan kualitas olahraga dan seni santri ponpes Prov. Kep. Babel | Juara 1 POSPEDA Tingkat Prov. Kep. Babel | POSPEDA Tingkat Nasional | Meningkat | Kontingen yang mengikuti POSPEDA Tingkat Nasional | Meningkat | 982.600.000 | 1.000.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | baru |
| **1.13.05** | **Program Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama** | | | | | | | | | | **6.082.950.000** | **6.330.000.002** | | |
| 1.13.08.0100 | Peningkatan pengetahuan keagamaan bagi masyarakat | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | pangkalpinang | meningkatnya jumlah peserta dalam memahami pengetahuan keagamaan | 1000 orang | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | 7 kab/kota | Terlaksananya ceramah agama bagi masyarakat | 1 | 500.000.000 | 500.000.001 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0200 | Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | pangkalpinang dan NTB | Meningkatnya jumlah peserta MTQ yang berprestasi Prov. Kep. Babel | 32 orang | Terlaksananya Pembinaan dan Pemberangkatan Kafilah MTQ Provinsi Kepulauan Babel | 100% | Menigkatnya Kualitas Qori & Qoriah melalui MTQ Prov. Kep. Babel | 33 org | 875.000.000 | 875.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0300 | Peningkatan Kehidupan beragama pada Bulan Ramadhan | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | 7 kab/kota | Meningkatkan Hablumminannass dan Hablumminallah | 14 Masjid, Rumah Dinas Gubernur, Wagub dan Sekda | Terselengaranya kegiatan safari ramadhan di 7 kab/kota di provinsi kepulauan bangka belitung | 100% | Meningkatkan tali persaudaraan antar sesama muslim | 2800 orang | 670.000.000 | 670.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0400 | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada hari jumat | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | 7 kab/kota | Meningkatnya kunjungan Safari Jumat pada Masjid yang ada di Prov kep Bangka Belitung | 24 Masjid | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | 7 kab/kota | TerselenggaranyaSafari Jumat di 7 kab/kota di Prov kep Bangka Belitung | 100% | 360.000.000 | 360.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0500 | Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji/TPHD/TKHD/TPIHD | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | Pangkalpinang | meningkatnya jamaah haji masyarakat di Prov Kep Bangka Belitung | 913 jamaah | Terlaksananya Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji/TPHD/TKHD/TPIHD | 100% | Meningkatnya rasa kenyamanan dan keamanan jamaah haji dlm melaksanakan haji | 1100 org | 1.107.500.000 | 1.150.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0600 | Fasilitasi Biaya Transportasi Daerah | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | Pangkalpinang | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Biaya Transportasi Domestik Jemaah Haji | 913 jamaah | Bantuan Biaya Transportasi Domestik Jemaah Haji Prov Kep Babel | 913 jamaah | Terbantunya Biaya Transportasi Domestik Jemaah Haji Prov Kep Babel | 100% | 2.195.450.000 | 2.400.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.05.0700 | Kepedulian terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah | 7 kab/kota | Bertambahnya jumlah hewan qurban yang tersalurkan di kab/kota | 16 ekor | terlaksananya penyaluran hewan qurban ke kab/kota | 100% | tersalurnya hewan qurban ke kab/kota | 1600 org | 375.000.000 | 375.000.001 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| **1.13.07** | **Program Kepedulian Tterhadap Masyarakat** | | | | | | | | | | **699.825.000** | **700.000.000** | | |
| 1.13.07.0100 | Monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah | Meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan dana bantuan yang tepat sasaran pada masyarakat | Terwujudnya penerima dana bantuan yang tepat sasaran pada masyarakat | 7 kab/kota | Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan sosial dan hibah | Meningkat | Monitoring dan evaluasi bantuan APBD Prov Kep Babel | 90% | Penyaluran dana bantuan yang tepat sasaran | 90% | 499.825.000 | 500.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| 1.13.07.0200 | Sosialisasi pemberian dana bantuan sosial dan hibah | Meningkatkan kualitas layanan dalam pelaksanaan sosialisasi dana hibah | Terwujudnya pelaksanaany sosialisasi masalah pemberian dana bantuan yang tepat sasaran pada masyarakat | 7 kab/kota | Peningkatan pemahaman tata cara pemberian dana bansos dan hibah | Terlaksanaan ya sosialisasi pada 7 kab/kota | Terlaksananya sosialisasi tata cara pemberian dana bansos dan hibah | Terlaksanaan ya sosialisasi pada 7 kab/kota | Pemahaman yang jelas dan tepat mengenai syarat dan peruntukan dana bantuan sosial dan hibah | Penyaluran dana bantuan sosial dan hibah sesuai aturan | 200.000.000 | 200.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| **1.13.10** | **Program pengembangan nilai budaya** | | | | | | | | | | **539.100.000** | **550.000.000** | | |
| 1.13.10.0100 | Festival seni budaya Islami Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap seni budaya islami | Terciptanya kualitas para tokoh seni budaya islami provinsi kepulauan bangka belitung | pangkalpinang | Melestarikan seni budaya Islami | 3 seni | Kelompok seni budaya Islami | 100% | Terbentuknya Kelompok seni budaya Islami | 77 orang | 339.100.000 | 350.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.10.0200 | Musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku seni provinsi kepulauan bangka belitung | Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap seni budaya islami | Terciptanya kualitas para tokoh seni budaya islami provinsi kepulauan bangka belitung | pangkalpinang | Terlaksananya kegiatan Musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku seni provinsi kepulauan bangka belitung | 4 jenis tokoh | Terselenggaranya Musyawarah tokoh adat, tokoh agama dan pelaku sen | 100% | Terciptanya kesepakatan antara tokoh adat di daerah Bangka Belitung | 35 orang | 200.000.000 | 200.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| **1.13.08** | **Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama** | | | | | | | | | | **750.000.000** | **750.000.000** | | |
| 1.13.08.0100 | Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama | Meningkatkan Pelayanan kesejahteraaan masyarakat bidang agama.. | Terciptanya kualitas layanan kerukunan umat beragama | pangkalpinang | meningkatnya layanan kegiatan kerukunan antar umat beragama | 3 kegiatan | terlaksanya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama | 100% | meningkatnya peran tokoh agama thdp kegiatan umat beragama | 7 kab/kota | 750.000.000 | 750.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| **1.13.11** | **Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi** | | | | | | | | | | **175.000.000** | **175.000.000** | | |
| 1.13.11.0400 | informasi dan publikasi bidang kesejahteraan | Meningkatkan fungsi koordinasi, komunikasi, dan informasi bagi masyarakat. | Terciptanya pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan informasi di masyarakat | pangkalpinang | Peningkatan penyampaian informasi kepada masyarakat bidang kesejahteraan | Terlaksana | Tersedianya informasi dan komunikasi yang akurat dan terpercaya bidang kesejahteraan | Terlaksana | Terciptanya informasi yang akurat dan akuntabel | Terlaksana | 175.000.000 | 175.000.000 | Biro Kesejahteraan Rakyat | |
| | **BIRO PEMBANGUNAN** | | | | | | | | | | **5.438.904.000,00** | **6.835.000.000,00** | | |
| **1.20.03.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | | | | | | | | | | **625.635.000,00** | **755.000.000,00** | | |
| 9953 | Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa" | Pangkalpinang | Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam bidang pengadaan barang/jasa | 3 Bulan | Bimbingan teknis Pengadaan barang/jasa | 60 Orang | Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan kompetensi pengadaan barang/jasa | 2 Angkatan, 1 Kelas 30 Orang | 225.910.000,00 | 205.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| 9954 | Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa" | Pangkalpinang | Meningkatnya kompetensi pengguna jasa konstruksi | 3 Bulan | Bimbingan teknis | 50 orang | Terselenggaranya Bimbingan Teknis bagi pengguna jasa konstruki | 1 kali bimtek, 50 orang | 126.400.000,00 | 250.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| 9917 | Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa" | Pangkalpinang | Meningkatnya kompetensi penyedia jasa konstruksi | 4 Bulan | Bimbingan teknis | 60 Orang | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyedia jasa konstruksi | 2 Kali Bimtek, 60 Orang | 186.550.000,00 | 150.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| | Pemberdayaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa" | Pangkalpinang | Mengkoordinasikan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi | 3 Bulan | Masyarakat Jasa Konstruksi | 40 orang | Terlaksananya Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi | 1 kali pertemuan, 40 orang | 86.775.000,00 | 150.000.000,00 | Biro Pembangunan | Baru |
| **01.20.03.020** | **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** | | | | **INDIKATOR PROGRAM:<br>1. Prosentase SKPD dan Kab/kota dlm pelaksanaan apbd pencapaian target<br>2. pencapaian laporan skpd tepat waktu<br>3.jml paket barang dan jasa dan kegiatan LPSE** | | | | | | **4.813.269.000,00** | **6.080.000.000,00** | | |
| 3400 | Sinkronisasi Percepatan Pembangunan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Melaksanakan Sinkornisasi Percepatan Pembangunan | 3 Bulan | Koordinasi Prov/Kab/kKta | 32 Orang | Terlaksananya koordinasi antara Biro Pembangunan Provinsi dengan Bagian Pembangunan Kab/Kota | 1 Kali Pertemuan, 32 Orang | 139.304.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| 1100 | Operasional LPSE | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Melaksanakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik | 12 Bulan | Kegiatan yang dilelangkan secara elektronik | 220 paket | Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik | 12 bulan, 220 paket | 1.022.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2901 | Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pengendalian Kegiatan APBD | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12 Bulan | Jumlah SKPD | 36 SKPD | Terlaksananya Pengawasan Pembangunan dan Realisasi Anggaran | 12 Bulan, 36 SKPD | 673.365.000,00 | 850.000.000,00 | Biro Pembangunan | Baru |
| 2200 | Rakor LPSE | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Meningkatkan Koordinasi LPSE se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 Bulan | Rapat Koordinasi | 55 orang dari LPSE Prov/Kab/Kota dan LPSE Polda Babel | Terselenggaranya Rakor LPSE se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Kali Rakor, 3 Hari | 233.710.000,00 | 205.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| | Operaional ULP | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Melaksanakan pengadaan barang/jasa | 12 Bulan | Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang difasilitasi melalui ULP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 190 Paket | Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara terintegrasi oleh ULP Prov. Kep. Bangka Belitung | 12 Bulan, 190 paket | 2.298.095.000,00 | 2.900.000.000,00 | Biro Pembangunan | Baru |
| | Rakor ULP | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Meningkatkan Koordinasi ULP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 Bulan | Rapat Koordinasi | 50 Orang | Terkoordinasinya ULP Prov. dengan ULP kab/kota | 1 kali rakor, 3 hari | 172.035.000,00 | 205.000.000,00 | Biro Pembangunan | Baru |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Renja/Revisi Renja dan Penyusunan Anggaran | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Renja/Revisi Renja dan Penyusunan Anggaran Lingkup Setda | 6 Bulan | Renstra/Revisi Renstra, RKPD dan RKA dan DPA | 7 Biro, 28 Orang | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Renja/Revisi Renja danPenyusunan Anggaran Lingkup Setda | 6 Bulan | 50.000.000,00 | 260.000.000,00 | Biro Pembangunan | Baru |
| 0400 | Pembinaan Petugas SKPD Pelaporan SiRUP dan Monev Online | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | "Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien" | Pangkalpinang | Mengkoordinasikan pertugas SiRUP dan Monev Online | 12 Bulan | Honor Admin SIRUP dan e-Monev | 42 Orang Operator SIRUP dan 42 Orang Operator e-Monev | Terlaksananya pelaporan SiRUP dan Monev Online dengan lancar | 12 Bulan | 224.760.000,00 | 260.000.000,00 | Biro Pembangunan | Sedang Berjalan |
| | **Biro Organisasi** | | | | | | | | | | **1.944.646.000,00** | **2.845.000.000,00** | | |
| | **Program penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi** | **Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur** | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | | | | | | | | **73.710.000,00** | **150.000.000,00** | | |
| | Optimalisasi pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta perbuatan tercela lainnya | 7 Kabupaten/ Kota | Pengelolaan LHKPN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang optimal | 100% | Terkoordinasinya penyelenggara negaa wajib lapor LHKPN di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan BangkaBbelitung | Laporan Pengelolaan LHKPN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 73.710.000 | 150.000.000 | Biro Organisasi | |
| | **Program peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah** | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | **230.940.000,00** | **370.000.000,00** | | |
| | Kegiatan Penyusunan Perjanjian (PK ) Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Tahun 2015 Pemerintah Pemprop.Kep Babel | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penilaian sakip baik | LAPKIN 2015 dan TAPKIN 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 60 buku LAPKIN dan 60 Buku TAPKIN | LAPKIN 2015 dan TAPKIN 2016 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 2 dok | 133.540.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Organisasi | rutin |
| | Kegiatan Monitoring & Evaluasi Pelaksana Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi sistem penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Se –Kabupaten/Kota Tahun 2016 | 7 Kabupaten/ Kota | Persentase Kabupaten/Kota yang memahami penyusunan SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Meningkatnya kualitas penyusunan SAKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 97.400.000,00 | 170.000.000,00 | Biro Organisasi | rutin |
| | **Program peningkatan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi** | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah | | | | | | **82.335.000,00** | **200.000.000,00** | | akan berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tercapainya pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Unit pelaksana pelayanan publik diprovinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terkoordinasinya pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik yang diberiikan oleh pelaksana unit pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 82.335.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| | **Program pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi** | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | efektifnya penataan jabatan dalam dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan dan standar kompetensi jabatan | | | | | | **845.571.000,00** | **1.110.000.000,00** | | Sedang Berjalan |
| | Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Untuk Mendukung Manajemen pegawai dalam rangka penataan kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 Unit Kerja dilingkungan Pemprop Kep Babel | Buku Rumpun Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 buku | Rumpun Jabatan memudahkan dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan | Jabatan Fungsional Umum | 124.154.000 | 160.000.000 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| | Penyusunan Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Tersedianya Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 Unit Kerja dilingkungan Pemprop Kep Babel | Buku Profil Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | 50 buku | Data profil Aparatur sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas penataan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 90.940.000 | 150.000.000 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| | Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan dan akuntabel | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bimbingan teknis sofware Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 unit kerja dilingkungan pemprop kep babel | Terlaksananya Bimtek Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 Buku Kompilasi | Meningkatnya pemahaman peserta bimtek tentang Software Aplikasi Tunjangan Kinerja Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 122.930.000,00 | 250.000.000,00 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| | Penyusunan Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan Pemprop Kep. Babel | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang berwibawa | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Standarisasi Beban Kerja PNS pada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instrumen pengukuran norma, waktu penyelesaian pekerjaan tingkat efisiensi kerja, standar beban kerja dan prestasi kerja | SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Telaksananya Analisis Beban Kerja PNS pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 buku kompilasi | Tersusunnya Analisa beban kerja Pegawai Negeri Sipil pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 218.433.000,00 | 150.000.000,00 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| | Kegiatan validasi analisis jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang berwibawa | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersusunnya informasi jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 Unit Kerja dilingkungan Pemprov Kep Babel | Kompilasi analisis jabatan yang memuat informasi jabatan struktural dan fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan gubernur | 50 buku kompilasi | Informasi jabatan sebagai instrumen penataan jabatan, analisis kebutuhan diklat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 144.557.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Organisasi | akan berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Kegiatan Validasi evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang berwibawa | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersusunnya nilai, kelas dan klasifikasi jabatan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 Unit Kerja dilingkungan Pemprov Kep Babel | Kompilasi evaluasi jabatan yang memuat nilai, kelas dan klasifikasi jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilngkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur | 50 buku kompilasi | Nilai, kelas, dan klasifikasi jabatan sebagai instrumen meningkatkan manajemen PNS terutama perbaikan sistem pembinaan karier dan penggajian pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 144.557.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Organisasi | akan berjalan |
| 2011 | **Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi** | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | | | Tertatanya dan sempurnanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan | | | | | | **167.310.000,00** | **200.000.000,00** | | akan berjalan |
| | Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | 43 unit kerja dilingkungan Pemprop Kep Babel | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 unit kerja dilingkungan Pemprop Kep Babel | Laporan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 167.310.000,00 | 200.000.000,00 | Biro Organisasi | |
| | **Program Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi** | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | meningkatnya rasionalitas struktur dan kapasitas kelembagaan SKPD | | | | | | **385.520.000,00** | **515.000.000,00** | | akan berjalan |
| | Penyusunan Draft Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dana aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | Tertatanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Prangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Draf Raperda | Terfasilitasinya penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja pangkat daerah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Draf Raperda | Tersusunnya Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Rp 216.520.000 | Rp 275.000.000 | Biro Organisasi | akan Berjalan |
| | Penyusunan Draft Rapergub tentang Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dana aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | Tertatanya draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang tentang Uraian Tugas organisasi prangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bahan pertimbangan Penataan Kelembagaan | 28 Draf Rapergub | Terlaksananya penyusunan draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang tentang Uraian Tugas organisasi prangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 28 Draf Rapergub | Tersusunnya draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Rp 169.000.000 | Rp 240.000.000 | Biro Organisasi | akan Berjalan |
| | **Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi** | Peningkatan manajemen pemerintahan dana aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintahan Provinsi dan Pemkab/ Pemkot dalam penataan kelembagaan SKPD | | | | | | **159.260.000,00** | **300.000.000,00** | Biro Organisasi | akan Berjalan |
| | Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dana aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 kab/Kota | Terevaluasinya Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 kab/Kota | Rekomendasi Tentang Evaluasi Raperda Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota | 100% | Rp 74.100.000 | Rp 160.000.000 | Biro Organisasi | akan Berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Rakornis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Kep.Babel | | Terciptanya sistem birokrasi pemerintah yang kuat,transparan,akuntabilitas dan efesien | Prov. Kep. Bangka Belitung | Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Biro Organisasi Pemprov Kep. Babel dengan Bagian Biro Organisasi Kab/Kota dan Instansi terkait lainnya | SKPD dilingkungan Provinsi dan 7 Kabupaten/ Kota | jumlah peserta Rakornis Biro/ Bagian Organisasi Se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 30 orang | Terselenggaranya Rapat Koordinasi antara Biro organisasi Prov. Kep. Bangka Belitung dengan Bagian Organisasi Kabupaten/kota dan Instansi terkait lainnya | SKPD dilingkungan Provinsi dan 7 Kabupaten/ Kota | Rp 85.160.000 | Rp 140.000.000 | Biro Organisasi | akan Berjalan |
| | **Biro Perekonomian** | | | | | | | | | | **1.724.368.000** | **2.500.000.000** | | |
| **1.10** | **Urusan Perencanaan Pembangunan** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.10.01.01** | **Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi** | | | | **Indikator Program:** | | | | | **9 Rekomendasi/ Kajian** | **1.174.368.000** | **2.500.000.000** | | |
| | | | | | **Jumlah Rekomendasi dan Kajian Tentang Pembangunan Ekonomi** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Target 2016 :** | | | | | | | | | |
| | | | | | **9 Kajian/ Rekomendasi** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Target 2017 :** | | | | | | | | | |
| | | | | | **9 Kajian/ Rekomendasi** | | | | | | | | | |
| 1.10.01.01.01 | Fasilitasi Program CSR | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Sumber Pembiayaan Pembangunan Ekonomi | 11,1% | Tertatanya Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan dan 2 Kali Rapat | Tersalurnya Dana Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 Kab/Kota | 150.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sedang Berjalan |
| 1.10.01.01.02 | Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah | Meningkatnya Kemampuan Merencanakan Pembangunan Bdang Ekonomi | 11,1% | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal | 5 Provinsi, 2 Kabupaten | Tersedianya Laporan Monitoing, Evaluasi dan Rekomendasi Pengembangan Penyertaan Modal | 1 (Satu) Dokumen | 150.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sedang Berjalan |
| 1.10.01.01.03 | Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terkendalinya Inflasi Daerah | 11,1% | Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah | 3 Kali Rapat | Terjalinnya Koordinasi Dalam Mengendalikan Inflasi Daerah | 1 (Satu) Tahun | 97.068.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sedang Berjalan |
| 1.10.01.01.04 | Monitoring dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Termonitorya Pendistribusian BBM dan MIgas | 11,1% | Terlaksananya Monitoring BBM dan Gas | 7 Kab/Kota | Tersedianya Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tentang BBM dan Gas | 1 (Satu) Laporan | 100.000.000 | 200.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah | Sedang Berjalan |
| 1.10.01.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Komoditi Lada di 7 (tujuh) Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Kemampuan Menyusun Kebijakan Pengembangan Komoditi Lada | 11,1% | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Perkembangan Komoditi Lada | 7 Kab/Kota | Tersedianya Data Hasil Monitoring, Evaluasi Perkembangan Komoditi Lada | 1 (Satu ) Dokumen | 200.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Baru |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.10.01.01.06 | Fasilitasi Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya kawasan ekonomi daerah khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Pembangunan Ekonomi | 11,1% | Terlaksananya Rapat Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung | 3 Kali Rapat Tim | Terdapatnya Langkah Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung | 1 (Satu) Tahun | 77.300.000 | 200.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Baru |
| 1.10.01.01.07 | Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya kawasan ekonomi daerah khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meingkatnya Dukungan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah | 11,1% | Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Kantor Pemasaran Bersama Komoditi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Rekomendasi dan 3 Kali Rapat | Tersedianya Dua Kebijakan Pemasaran Komoditi Sawit dan Karet di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Komoditi Sawit dan Karet | 100.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Baru |
| 1.10.01.01.08 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pengaturan Tata Kelola Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya kawasan ekonomi daerah khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meingkatnya Dukungan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah | 11,1% | Terlaksananya Koordinasi dan Data Tata Kelola Timah di Babel | 3 Kali Rapat | Tersedianya Bahan dan Data Tata Kelola Timah di Babel | 3 Kebijakan | 100.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Baru |
| 1.10.01.01.09 | Fasilitasi Penataan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya kawasan ekonomi daerah khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meingkatnya Dukungan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah | 11,1% | Terlaksananya Koordinasi dan Rekomendasi Penataan Lahan Kritis di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung | 3 Rekomendasi dan 3 Kali Rapat | Terlaksananya dan Tersedianya Bahan Kebijakan Penataan Lahan Kritis | 4 Kebijakan | 200.000.000 | 300.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Baru |
| **1.10.01.02** | **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | | | | **Jumlah Rekomendasi dan Kajian Tentang Peningkatan Promosi dan Investasi** | | | | | **1 Kajian/ Rekomendas** | **550.000.000** | | | |
| | | | | | **Target 2016 :** | | | | | | | | | |
| | | | | | **1 Kajian/ Rekomendasi** | | | | | | | | | |
| | | | | | **Target 2017 :** | | | | | | | | | |
| | | | | | **1 Kajian/ Rekomendasi** | | | | | | | | | |
| 1.10.01.02.01 | Monitoring, Evaluasi dan Fasillitasi Promosi Potensi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemadirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Luar Daerah | Meningkatnya Pengenalan, Penjualan dan Investasi Produk Bangka Belitung | 100% | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Promosi Potensi Daerah Kep. Bangka Belitung | 8 Kali Luar Daerah dan 3 Kali Dalam Daerah | Tersedianya Laporan dan Rekomendasi Pengembangan Produk Daerah Kep. Bangka Belitung | 1 (Satu ) Dokumen | 330.700.000 | 500.000.000 | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Sedang Berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| **Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Total Belanja langsung** | | | | | | | | | | | **7.035.383.000** | | |
| **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | | **2.184.971.700** | | |
| **1.11.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | | | | | **1.441.129.700** | | |
| 1.11.01.01.01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 1. Belanja Materai | 800 Lembar | Kelancaran administrasi surat menyurat | 100% | 6.000.000 | | |
| | | | | | | | 2. Belanja Paket Pengiriman | 1 Paket | | | | | |
| 1.11.01.01.01.0100 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | 1. Belanja Telepon | 12 Bulan | Terbayarnya telepon, listrik dan internet | 12 Bulan | 40.000.000 | | |
| | | | | | | | 2. Belanja Internet | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | 250.000.000 | | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | | | Belanja Alat Kebersihan Kantor | 12 Bulan | Terciptanya Kebersihan Kantor | 100% | 24.000.000 | | |
| | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | | | Service Mesin Tik, Komputer, Mesin Fotocopy dan AC | 1 Paket | Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja | 1 Paket | 27.225.000 | | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 Paket | Tersedianya ATK | 100% | 129.774.700 | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 Paket | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 100% | 32.980.000 | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Paket | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 168.900.000 | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | Belanja Surat Kabar dan Lainnya | 1 Paket | Terpenuhinya Bahan Bacaan | 100% | 16.000.000 | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | | | Belanja Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat | 1 Paket | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu serta rapat | 100% | 60.000.000 | | |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | | | | | Belanja Perjalanan dinas | 1 Paket | Tercapainya koordinasi dilingkungan pemberdayaan perempuan dengan pemerintah pusat | 100% | 400.000.000 | | |
| | Koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | 1 Paket | | | 150.000.000 | | |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran | | | | | | Belanja Honorarium Tenaga Kontrak | 13 Bulan | Terciptanya kinerja pegawai pengelola administrasi perkantoran secara optimal | 13 Bulan | 107.250.000 | | |
| | Pengelolaan Arsip dan Perpusakaan Kantor | | | | | | 1. Belanja Honorarium Tenaga Arsiparis | 12 Bulan | Terciptanya kinerja pegawai pengelola arsip dan perpustakaan kantor yang optimal | 100% | 29.000.000 | | |
| | | | | | | | 2. Belanja Bahan Arsip | 1 Paket | | | | | |
| | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **190.800.000** | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas | | | | | | Belanja telepon, listrik dan internet rumah dinas | 12 Bulan | Terbayarnya telepon, listrik dan internet rumah dinas | 12 Bulan | 10.000.000 | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | | | | 1. Kend. Roda 4 | 2 Unit | Kelancaran operasional kendaraan dinas | 100% | 180.800.000 | | |
| | | | | | | | 2. Kend. Roda 2 | 6 Unit | | | | | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | **Meningkatnya Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **68.640.000** | | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | | | | PDH berserta perlengkapannya | 42 Paket | Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya | 42 Stel | 19.620.000 | | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | | | | | | Pakaian Khusus hari-hari tertentu | 54 Paket | Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Khusus hari-hari tertentu | 54 Paket | 49.020.000 | | |
| | | | | | | | Pakaian Olahraga | 54 Paket | Terpenuhinya kebutuhan pakaian olahraga | 54 Paket | | | |
| | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | **Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | | | | | **106.130.000** | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | | | | Peserta Bimbingan Teknis | 8 Orang | Tersedianya SDM yang berkualitas | 8 Orang | 76.600.000 | | |
| | Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan | | | | | | Peserta Peningkatan Kepribadian Bagi Perempuan | 30 Orang | Tersedianya SDM yang berkualitas | 30 Orang | 29.530.000 | | |
| | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | **Optimalnya Kualitas Manajemen yang Akuntabel dan Terintegrasi dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan** | **100%** | | | | | **378.272.000** | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | | | 1. Dokumen evaluasi kinerja (LAKIP, LPPD, LKPJ) | 4 Dokumen | Optimalisasi kualitas penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD | 100% | 136.392.000 | | |
| | | | | | | | 2. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD dan APBN | 1 Dokumen | | | | | |
| | Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPKBPA | | | | | | Jumlah peserta Rakor Renja BPPKBPA | 57 Orang | Optimalisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 80% | 96.880.000 | | |
| | Survey dan Pengumpulan Data | | | | | | 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 Paket | Optimalisasi koordinasi dilingkungan pemberdayaan perempuan dengan badan/unit PP Kab/Kota | 80% | 75.000.000 | | |
| | | | | | | | 2. Data pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak | 4 Dokumen | | | | | |
| | Pengembangan Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | Website BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung | 1 Paket | Optimalisasi Sistem Informasi Pemperdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 80% | 70.000.000 | | |
| **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | | **4.850.411.300** | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1.11.01.20 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG | 14 % (6 dari 43 SKPD) | | | | | 537.281.000 | | |
| | | | | | Persentase SKPD yang memiliki Data Terpilah | 21 % (9 dari 43 SKPD) dan 7 Instansi Vertikal | | | | | | | |
| | | | | | Jumlah Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan | 31 Lembaga | | | | | | | |
| 1.11.01.20.0100 | Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Jumlah Peserta Rakor yang paham tentang GFP PUG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 Org | Optimalisasi pelaksanaan program dan rencana kerja GFP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 89.328.000 | | |
| | | | | | | | 2. Jumlah Peserta Rakor yang paham tentang Pokja PUG Prov. Kep. Bangka Belitung | 50 Org | Optimalisasi pelaksanaan program dan rencana kerja GFP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | | |
| 1.11.01.20.0200 | Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah Buku Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 120 Buku | Jumlah SKPD yang memiliki data terpilah | 9 SKPD | 116.182.000 | | |
| 1.11.01.20.0400 | Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media massa | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah peserta Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi Institusi Media massa | 30 Org | Meningkatnya Partisipasi Institusi Media Massa di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 80% | 58.968.000 | | |
| 1.11.01.20.0500 | Penguatan Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan(Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah peserta pertemuan yang paham tentang kapasitas lembaga masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 50 Org | Optimalisasi kemitraan lembaga masyarakat dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | 80% | 63.488.000 | | |
| 1.11.01.20.0700 | Advokasi dan Pelatihan PPRG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah peserta advokasi dan pelatihan yang paham tentang PPRG | 50 Org | Dokumen PPRG SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung | 24 Dok | 89.816.000 | | |
| 1.11.01.20.0800 | Advokasi dan Fasilitasi Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah peserta advokasi dan fasilitasi yang paham tentang pemberdayaan lembaga masyarakat | 50 Org | Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat yang peduli di bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak | 32 Lembaga | 45.329.000 | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1.11.01.20.1000 | Sosialisasi Penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) | | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah peserta Sosialisasi yang paham tentang Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) | 80 Org | Meningkatnya pemahaman terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) | 80% | 74.170.000 | | |
| **1.11.01.21** | **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | | | **Jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan peran serta posisi perempuan** | **1 Kebijakan** | | | | | **1.463.038.300** | | |
| | | | | | **Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan** | **6,02%** | | | | | | | |
| | | | | | **Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan** | **6,46%** | | | | | | | |
| 1.11.01.21.0300 | Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia | | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | 7 Kab/Kota | | | Jumlah Pemenang lomba P2WKSS, Kelompok Bina Keluarga Balita, Pengelola Bina Keluarga Balita, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja perempuan, Kecamatan sayang ibu | 6 Kategori | Meningkatnya kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek kehidupan | 100% | 300.962.000 | | |
| 1.11.01.21.0500 | Pameran Hasil Karya Perempuan | | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Lokasi Pameran | | | Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Pameran Hasil Karya Perempuan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan | 70% | 216.985.000 | | |
| 1.11.01.21.1300 | Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif | | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab/Kota | | | Jumlah Kelompok Keluarga Perempuan Miskin di kab/kota yang dilakukan Pembinaan Usaha Kelompok Ekonomi Perempuan Produktif | 21 Kelompok | Meningkatnya kualitas hidup perempuan sekaligus mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang ekonomi baik kepada masyarakat yang ekonomi lemah | 80% | 130.037.000 | | |
| 1.11.01.21.1400 | Advokasi Bidang Partisipasi Politik Perempuan | | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | 7 Kab/Kota dan Provinsi | | | 1. Kompilasi data terpilah bidang politik | 1 Dokumen | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik | 80% | 75.480.000 | | |
| | | | | | | | 2. Rekomendasi tentang upaya peningkatan partisipasi politik perempuan | 1 Dokumen | | | | | |
| | | | | | | | 3. Jumlah peserta yang paham tentang kedudukan perempuan dalam bidang politik | 30 Orang | | | | | |
| 1.11.01.21.1500 | Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan | | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Provinsi | | | Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Politik Perempuan | 30 Orang | Meningkatnya kapasitas kader partai politik perempuan | 80% | 78.395.000 | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1.11.01.21.1600 | KIE Partisipasi Politik Perempuan | | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | 7 Kab/Kota | | | Jumlah Peserta yang Paham tentang pentingnya partisipasi politik perempuan | 210 Orang | Meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan | 80% | 138.695.300 | | |
| | Operasional Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | | | | | | | | 522.484.000 | | |
| **1.11.01.22** | **Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | | | **Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak** | **1 Kebijakan** | | | | | **1.616.977.000** | | |
| | | | | | **Jumlah instansi yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan** | **11 Instansi** | | | | | | | |
| | | | | | **Jumlah Kabupaten / Kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)** | **1 Kab/Kota** | | | | | | | |
| 1.11.01.22.0100 | Fasilitasi Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tidak kekerasan | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kwalitas Layanan Pemerintah | Pangkalpinang, Daerah Asal Korban | | | Jumlah Penanganan korban kekerasan dan korban perdagangan orang | 5 Kasus | Optimalisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan | 100% | 138.817.000 | | |
| 1.11.01.22.0300 | Penyusunan Profil Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah Buku profil Kesejateraan Perlindungan anak Prov. Kep. Bangka Belitung | 70 Buku | Sebagai bahan dokumen perencanaan/penyusunan program/kegiatan bidang perlindungan anak | 80% | 68.780.000 | | |
| 1.11.01.22.0400 | Pembinaan Partisipasi Hak Anak | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 1. Peserta Forum Anak daerah tingkat provinsi | 77 Orang | Terwujudnya mekanisme hak partisipasi anak | 100% | 233.558.000 | | |
| | | | | | | | 2. Peserta Forum Anak Nasional dan Kongres Anak Indonesia | 12 Orang | | | | | |
| 1.11.01.22.0700 | Bimbingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 50 Orang | Meningkatnya pemahaman tentang tata cara pelaporan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan | 100% | 103.768.000 | | |
| 1.11.01.22.1100 | Workshop dan Fasilitasi Kebijakan Kab/Kota Layak Anak | | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pemerintah | Belitung | | | Jumlah peserta workshop dan fasilitasi kebijakan Kab/Kota Layak Anak | 40 Orang | Terwujudnya komitmen bersama untuk menciptakan kab/kota layak anak | 80% | 80.387.000 | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | SKPD | Jenis Keg. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 1.11.01.22.1300 | Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan Anak | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kwalitas Layanan Pemerintah | 7 Kab/Kota | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-undang Perlindungan Anak | 280 Orang | Optimalisasi jumlah instansi yang berperan dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan | 11 Instansi | 232.620.000 | | |
| 1.11.01.22.1500 | Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perlindungan Perempuan dan Anak | | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Peraturan Daerah (Perda) Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 Dokumen | Tersusunnya Perda Anak di Prov. Kep. Bangka Belitung | 90% | 116.376.000 | | |
| 1.11.01.22.1900 | Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kwalitas Layanan Pemerintah | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 50 Orang | Meningkatnya pemahaman tentang tata cara/sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 100% | 67.768.000 | | |
| | Operasional Kegiatan Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | | | | | | | | | | 506.303.000 | | |
| 1.11.01.22.2000 | Penyusunan Kajian Akademik tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam Seluruh Proses Pembangunan dan Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kwalitas Layanan Pemerintah | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Kajian Akademik tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Prov. Kep. Bangka Belitung | 1 Dokumen | Tersusunnya Kajian Akademik Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Prov. Kep. Bangka Belitung | 90% | 68.600.000 | | |
| **1.11.01.23** | **Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | | | **Jumlah kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga** | **1 Kebijakan** | | | | | **1.233.115.000** | | |
| | | | | | **Tingkat prevalensi peserta KB aktif** | **78,74%** | | | | | | | |
| | | | | | **Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera** | **11,69%** | | | | | | | |
| 1.11.01.23.0200 | Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (Fasilitasi KB Muspida) | | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung | 7 Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan KB di 7 Kab/Kota | 1400 Orang | Meningkatnya Pencapaian Perserta KB baru dan peserta KB aktif pria di 7 Kab/Kota | 100% | 631.829.000 | | |
| 1.11.01.23.0300 | Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan dalam Kehidupan Keluarga (HARGANAS) | | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat | Penilaian lomba di 7 Kab/Kota. Hari Keluarga Tk. Prov. Di Kab. Bangka Selatan dan HARGANAS di Banten | | | Jumlah pemenang lomba dalam rangka Hari Keluarga | 7 Kategori | Optimalisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas | 100% | 415.228.000 | | |
| 1.11.01.23.0600 | Sosialisasi Reproduksi Sehat bagi Remaja | | Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat | 4 Kab/Kota | | | Jumlah peserta sosialisasi yang paham tentang reproduksi sehat bagi remaja | 40 Orang | Optimalisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana menuju keluarga yang berkualitas | 100 | 186.058.000 | | |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Total Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **15.305.000.000** | **16.217.210.000** | | |
| | **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | **5.105.660.000** | **4.688.660.000** | | |
| **1.13.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **3.319.160.000** | **2.828.660.000** | | |
| **1.13.01.01** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat pelayanan administrasi kantor | 100% | Jumlah materai/benda pos lainnya dan jasa pengiriman barang/surat yang dilaksanakan | 3000 materai/benda pos lainnya dan 150 kali jasa pengiriman | Terpenuhinya kebutuhan materai/benda pos lainnya dan jasa pengiriman barang/surat untuk meningkatkan pelayanan administrasi kantor | 100% | 30.000.000 | 25.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.02** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Ketersediaan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | Jasa pemeliharaan dan honorarium petugas | 12 bulan | Tersedianya belanja untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 100% | 172.000.000 | 180.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.06** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat pemeliharaan kendaraan dinas | 100% | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara | 17 roda 4 dan 13 roda 2 | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas | 100% | 700.000.000 | 650.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.07** | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat pelayanan administrasi kantor dan kinerja petugas dinas | 100% | Jumlah pengelola administrasi keuangan yang melaksanakan tugas rutin kantor | 14 orang | Tersedianya honorarium pengelola administrasi keuangan daerah | 100% | 183.660.000 | 183.660.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.08** | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat keindahan dan kebersihan lingkungan kantor | | Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan kebersihan kantor | 12 bulan | Tersedianya berbagai kebutuhan peralatan/perlengkapan kebersihan dan terpenuhinya biaya petugas kebersihan | 100% | 70.000.000 | 70.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.10** | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat pelaksanaan Tugas Rutin dan Kegiatan kantor | 100% | Jumlah penyediaan kebutuhan ATK | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk meningkatkan pelayanan publik | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.11** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Pelaksanaan Operasional Administrasi Kantor | 100% | Jumlah buku kas,Dokumen,SPP, Spanduk, DLL | 12 bulan | Terpenuhinya Operasional Administrasi Kantor | 100% | 85.000.000 | 85.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.12** | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa dan penyediaan alat listrik atau penerangan lainnya | 100% | Jumlah Komponen/Alat Listrik | 12 bulan | Terpenuhinya Komponen Listrik dan Alat Penerangan kantor | 100% | 35.000.000 | 50.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.15** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Penyediaan Bahan Bacaan di Dinkessos/UPTD | 100% | Jumlah Koran dan Bahan Bacaan Lainnya | 12 bulan | Terpenuhinya Bahan Bacaan Kantor | 100% | 100.000.000 | 25.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.17** | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Penyediaan Makan Minum rapat dan Tamu Dinas | 100% | Jumlah Pegawai dan Tamu yang Terlayani | 12 bulan | Terlayaninya pegawai dan Tamu Kantor | 100% | 30.000.000 | 30.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.18** | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Luar Daerah | Tingkat Koordinasi Dengan Instansi Terkait | 100% | Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Kantor | 12 bulan | Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah | 100% | 400.000.000 | 550.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.19** | Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Kantor | 100% | Jumlah Pengelola Administrasi Perkantoran | 28 Orang | Terpenuhinya Tugas dan Tanggung Jawab Kantor | 100% | 643.500.000 | 630.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.01.80** | Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Kabupaten/Kota | Tingkat Koordinasi Dengan Instansi Terkait | 100% | Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pegawai Kantor | 12 Bulan | Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 100% | 150.000.000 | 150.000.000 | Dinkessos | |

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.13.02.09** | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Kinerja Pegawai Kantor | 100% | Jumlah Peralatan Gedung Kantor | 4 paket | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | 100% | - | 200.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.02.10** | Pengadaan Meubelair | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Pelayanan dan Kinerja Pegawai | 100% | Jumlah penyediaan kebutuhan meubelair | 1 Paket | Tersedianya Meubelair Kantor | 100% | - | 200.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.02.22** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Kualitas Gedung Kantor | 100% | Jumlah peralatan yang disediakan | 1 Paket | Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung Kantor | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.02.28** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Kualitas Peralatan Gedung Kantor | 100% | Jumlah Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 12 Bulan | Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 100% | 50.000.000 | 50.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.02.35** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Khusus Lapangan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Kualitas Peralatan Khusus Lapangan | 100% | Jumlah Dana Pemeliharaan Peralatan Khusus Lapangan | 12 Bulan | Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan Khusus Lapangan | 100% | 320.000.000 | 320.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.03** | **Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **215.000.000** | **270.000.000** | Dinkessos | |
| **1.13.03.02** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinas Kesejahteraan Sosial | Tingkat Disiplin Pegawawi | 100% | Jumlah Pakaian Dinas Pegawai | 166 Stel | Tersedia Pakaian Dinas Pegawai Kantor | 100% | 70.000.000 | 80.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.03.25** | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kep. Babel | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Tingkat Responsif gender dalam | 100% | Jumlah Program yang responsif gender | 3 program | Meningkatnya pemahaman dan komitmen pengelola program dalam perencanaan yang responsif gender | 100% | 25.000.000 | 20.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.03.26** | Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM di Lingkungan Dinkessos | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Luar dan Dalam Daerah | Meningkatnya Kualitas SDM di | 90% | Tersedianya SDM yang berkualitas | 15 orang | SDM yng terlatih dapat diaplikasijan dalam pelaksanaan Kegiatan | 100% | 100.000.000 | 150.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.03.27** | Penyusutan Arsip SKPD | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Dinkessos | | 100% | Jumlah petugas yang terlibat dalam tim | Dinkessos | | | 20.000.000 | 20.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.07** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | | | | | | | | | | **1.571.500.000** | **1.590.000.000** | | |
| **1.13.07.04** | Penyuluhan Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Desa ADES | Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan kessos | 100% | Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial | 42 desa | Terlaksananya berbagai program pembangunan bidang kesos dan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan kessos | 100% | 381.500.000 | 300.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | | 6 kabupaten | Tersedianya tenaga penyuluh sosial masyarakat di setiap kecamatan | 15 kecamatan | | | | |
| | | | | | | | | 400 orang | Tersebarluaskannya informasi pembangunan kessos kepada masyarakat | 400 orang | | | | |
| **1.13.07.05** | Pemutakhiran Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kessos | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Kabupaten/Kota | Database PMKS dan PSKS yang valid disetiap kabupaten/kota | 100% | Jumlah PMKS dan PSKS yang terintegrasi melalui sistem informasi PMKS | 26 PMKS dan 12 PSKS | Tersedianya database PMKS dan PSKS di setiap kabupaten/kota yang valid dan responsif gender | 7 kab/kota | 150.000.000 | 250.000.000 | Dinkessos | |
| **1.13.07.06** | Penyusunan Kebijakan Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Adopsi Desa Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Desa | Terintegrasinya program pembangunan kessos di desa miskin (ADES) | 100% | Jumlah desa miskin yang dipetakan dan diadopsi menjadi Desa Binaan Sosial (ADES) | 42 desa | Terpetakannya profil PMKS desa ADES di 7 kabupaten/kota | 42 desa | 450.000.000 | 450.000.000 | Dinkessos | |

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.07.07 | Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan | 100% | Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran SKPD yang diusulkan | 5 program teknis dan 4 program rutin | Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan dakam bentuk RKA/DPA SKPD | 55 dokumen RKA/DPA SKPD | 100.000.000 | 100.000.000 | Dinkessos | |
| 1.13.07.08 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Kabupaten/Kota | Pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, tepat waktu, bermanfaat dan akuntabel | 100% | Jumlah program dan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan | 5 program teknis dan 4 program rutin | Meningkatnya kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS dan PSKS | 7 kabupaten/kota | 250.000.000 | 250.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah temuan (LHP) yang ditindaklanjuti | 2 laporan (TLHP) dana APBD dan APBN | | | | | | |
| 1.13.07.09 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat kinerja laporan keuangan | 100% | Jumlah laporan realisasi anggaran yang dapat disusun | laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan | Tersusunnya laporan realisasi keuangan tepat waktu | laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan | 40.000.000 | 40.000.000 | Dinkessos | |
| 1.13.27.07 | Fasilitasi Penyelesaian KUPEM | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Kabupaten/Kota | Tingkat pengembalian pinjaman debitur KUPEM | 30% | Jumlah debitur KUPEM yang mencicil atau melunasi tunggakannya | 1205 debitur | Meningkatnya kemauan dan kemampuan debitur untuk membayar atau melunasi tunggakan KUPEM | 362 debitur | 200.000.000 | 200.000.000 | Dinkessos | |
| | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **10.199.340.000** | **11.528.550.000** | | |
| **1.13.26** | **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** | | | | | | | | | | **2.000.000.000** | **2.778.550.000** | | |
| 1.13.26.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | 7 KabKota (KSB Pangkalpinang) | Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam | 100% | Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibina dan disiagakan | 1 lokasi | Jumlah Relawan dan korban bencana alam yang dibantu dan mampu menghadapi musibah bencana | 100% | 500.000.000 | 550.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah SDM (relawan bencana) yang memperoleh pelatihan dan pembekalan dalam melakukan pendampingan sosial | 60 orang (Pengurus KSB) | | 110 orang/KK | | | | |
| | | | | | | | Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana alam | 50 KK | | | | | | |
| 1.13.26.02 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | 7 Kab/Kota | Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sosial | 100% | Jumlah bantuan darurat yang diberikan bagi korban bencana sosial | 142 KK | Tersalurkannya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana sosial | 142 KK | 400.000.000 | 400.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah bantuan rehabilitasi yang diberikan bagi korban bencana sosial | 142 KK | Korban bencana sosial yang dibantu dan dipulihkan | 142 KK | | | | |
| | | | | | | | Jumlah wilayah yang memiliki kearifan lokal dan diberikan bantuan keserasian sosial (Pembentukan Forum Keserasian Sosial) | 21 lokasi | Terpetakannya potensi kearifan lokal di setiap kabupaten dan mendapatkan bantuan keserasian sosial | 21 lokasi | | | | |
| 1.13.26.03 | Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab/Kota | Tingkat kehidupan sosial ekonomi korban tindak kekerasan | 100% | Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh perlindungan sosial melalui bimbingan teknis dan advokasi sosial | 30 orang | Pulihnya kondisi sosiopsikis korban tindak kekerasan | 30 orang | 200.000.000 | 300.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah korban tindak kekerasan yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) | 30 orang | | | | | | |

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.13.26.04** | Jaminan Kesejahteraan Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 kab/kota | Tingkat keikutsertaan pekerja sektor informal/mandiri dalam mengikuti program askessos | 100% | Jumlah peserta penerima jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial | 1.500 orang | Meningkatnya jumlah peserta askessos dalam program askessos | 100% | 400.000.000 | 700.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga pengelola/pelaksana askessos | 10 lembaga | Meningkatnya peran dan fungsi lembaga pengelola/pelaksana askessos | 100% | | | | |
| **1.13.26.06** | Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab/Kota | Tingkat partisipasi kabupaten/kota dalam program PKH | 100% | Jumlah lokasi fasilitasi dan koordinasi yang dapat dilaksanakan | 7 kabupaten/kota | Meningkatnya peran dan fungsi tim PKH baik provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasiltasi program PKH | 100% | 500.000.000 | 828.550.000 | Dinkessos | |
| **1.13.27** | **Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan** | | | | | | | | | | **4.699.340.000** | **4.500.000.000** | | |
| **1.13.27.01** | Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan | Tingkat taraf hidup dan kehidupan keluarga miskin di pedesaan | 100% | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | 700 KK | Meningkatnya peluang berusaha dan penghasilan keluarga miskin | 700 KK | 1.400.000.000 | 1.700.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha | 100 KK | Terlatihnya keterampilan teknis berusaha keluarga miskin dalam mengelola bantuan UEP | 100 KK | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis | 35 orang | Tersedianya tenaga pendampingan sosial dalam memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial | 35 orang | | | | |
| **1.13.27.02** | Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Pangkalpinang dan Belitung | Tingkat taraf hidup dan kehidupan keluarga miskin di perkotaan | 100% | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | 300 KK | Meningkatnya peluang berusaha dan penghasilan keluarga miskin | 300 KK | 900.000.000 | 1.000.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelatihan dan keterampilan teknis berusaha | 60 KK | Terlatihnya keterampilan teknis berusaha keluarga miskin dalam mengelola bantuan UEP | 60 KK | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pendamping sosial yang memperoleh pelatihan dan bimbingan teknis | 12 orang | Tersedianya tenaga pendampingan sosial dalam memberikan motivasi, pembinaan dan pendampingan sosial | 12 orang | | | | |
| **1.13.27.03** | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Bangka Tengah, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat | Kualitas kehidupan warga binaan sosial di desa KAT | 100% | Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan usaha dan pembinaan sosial | 60 KK | Meningkatnya kualitas kehidupan sosial warga KAT purna bina | 100% | 599.340.000 | 700.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah sarana dan prasarana sosial yang dibantu | 3 paket | | | | | | |
| **1.13.27.04** | Pemberdayaan Keluarga | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 kab/kota | Tingkat keberfungsian sosial keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi | 100% | Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) | 150 Keluarga | Tersalurkannya bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi untuk meningkatkan fungsi | 100% | 600.000.000 | 800.000.000 | Dinkessos | |

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | Jumlah keluarga rentan atau wanita rawan sosial ekonomi yang memperoleh pelatihan/pembekalan dan bimbingan teknis usaha | | sosialnya secara layak | | | | | |
| | | | | 7 kab/kota | Tingkat keberfungsian LK3 dalam memberikan pelayanan dan pendampingan keluarga | | Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diberdayakan | 7 LK3 | Meningkatnya kualitas SDM dan peran LK3 dalam memberikan pelayanan dan pendampingan keluarga | | | | | |
| **1.13.27.05** | Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Kabupaten/Kota | Tingkat perhatian Pemda terhadap jasa para pejuang | 100% | Jumlah keluarga pahlawan/perintis/warakawuri/veteran yang memperoleh bantuan atau santunan sosial | 25 orang | Tersantuninya keluarga pahlawan/perintis/warakawuri/veteran | 25 orang | 300.000.000 | 250.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | | | Terlaksananya peringatan hari pahlawan | | | | | |
| | | | | Bangka Tengah | | | Jumlah TMP yang dapat dipelihara dengan baik | 1 TMPN | Terpeliharanya kualitas TMP dengan baik | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sarana TMP (sumur bor, ruang tunggu, Mesin rumput, toilet, mebeler) | | | | | | | |
| **1.13.27.06** | Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Bakti Sosial KT (Belitung) | Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam pembangunan kessos | 100% | Jumlah Orsos yang dapat dibina dan diberdayakan | 9 Orsos | Peran dan fungsi orsos dalam memberikan pelayanan sosial semakin berkualitas | 100% | 600.000.000 | 450.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan | 42 PSM | Meningkatnya peran dan motivasi PSM dalam melakukan pendampingan sosial | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan | 43 KT | Meningkatnya aktifitas kepemudaan melalui Karang Taruna | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah dunia usaha yang peduli dan menyelenggarakan UKS melalui dana CSR | 10 dunia usaha | Meningkatnya kepedulian dunia usaha dalam menyelenggarakan usaha kessos | 100% | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK ) yang aktif | 47 TKSK | Meningkatnya kinerja TKSK dalam menjalankan tugas dan fungsinya | 100% | | | | |
| | Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya keterlibatan masy. Dalam seluruh proses pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam pembangunan kessos | 100% | Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) | 100% | Terlaksananya peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN) | 100% | 300.000.000 | | | |
| **1.13.28** | **Program Rehabilitasi Sosial** | | | | | | | | | | **3.500.000.000** | **4.250.000.000** | | |
| **1.13.28.01** | Pelayanan Sosial Lanjut Usia | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab./Kota | Kualitas kehidupan lanjut usia semakin baik | 100% | Jumlah lanjut usia yang memperoleh pelayanan dan bantuan stimulan/santunan sosial | 500 orang | Meningkatnya kualitas pelayanan dan fungsi sosial lanjut usia | 100% | 700.000.000 | 700.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah lembaga pelayanan lanjut usia yang dapat dibina dan dikembangkan | 2 lembaga | | | | | | |
| **1.13.28.02** | Rehablitasi dan Perlindungan Sosial Anak | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Kabupaten/Kota | Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar anak penyandang masalah kessos | 100% | Jumlah pelayanan dan bantuan sosial yang diberikan kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial | 215 anak | Terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk meningkatkan fungsi sosial anak yang bermartabat dan layak | 100% | 400.000.000 | 500.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang diberdayakan | 7 LKSA | | | | | | |

| KODE URUSAN/PROG/ KEG | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF (Rp) | PRAKIRAAN MAJU (Rp) | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEGIATAN |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.28.03 | Rehablitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Kabupaten/Kota | Tingkat keberfungsian sosial korban Napza dalam menghadapi kehidupan sosialnya | 100% | Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi dan bantuan usaha | 100 orang | Meningkatnya kualitas kehidupan dan fungsi sosial korban penyalahgunaan Napza dalam menjalankan kehidupan sosial | 100% | 250.000.000 | 350.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh pelatihan keterampilan dan bimbingan teknis usaha | | | | | | | |
| 1.13.28.04 | Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat kemandirian warga binaan sosial dalam melaksanakan tugas kehidupannya | | Jumlah warga binaan sosial yang dilayani dan dibina | 40 orang | Meningkatnya fungsi sosial warga binaan sosial dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya | 100% | 550.000.000 | 800.000.000 | UPTD PSBS | |
| 1.13.28.05 | Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat pelayanan dan rehabilitasi sosial | 100% | Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabiltasi sosial yang disediakan | 5 paket | Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana fisik dan penunjang pelayanan dan rehabilitasi sosial Panti Sosial Bina Serumpun | 100% | 800.000.000 | 1.000.000.000 | UPTD PSBS | |
| 1.13.28.06 | Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab/Kota | Tingkat kemandirian ODK | 100% | Jumlah orang dengan kecacatan yang memperoleh pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial | 600 orang | Terlayaninya dan terpenuhinya kebutuhan dasar dan pelayanan sosial bagi ODK menuju kemandirian diri | 600 orang | 500.000.000 | 450.000.000 | Dinkessos | |
| | | | | | | | Jumlah tenaga pendampingan sosial yang memperoleh pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis | 20 orang | Terlatihnya tenaga pendampingan sosial bagi ODK | 20 orang | | | | |
| 1.13.28.07 | Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja | 7 Kab/Kota | Tingkat perubahan perilaku dan sikap tuna sosial | 100% | Jumlah penyandang tuna sosial yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial berupa bantuan usaha dan bimbingan teknis usaha | 40 orang | Meningkatnya motivasi dan kemampuan berusaha tuna sosial | 40 orang | 150.000.000 | 250.000.000 | Dinkessos | |
| 1.13.28.08 | Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Tersedianya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat kemandirian warga binaan sosial dalam melaksanakan tugas kehidupannya | 100% | Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja | 30 orang | Terlatihnya warga binaan sosial dalam meningkatkan keterampilan kerja | 100% | 150.000.000 | 200.000.000 | UPTD PSBS | |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode Urusan/Program /Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Total Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **10.517.260.000** | **3.915.307.000** | | |
| 1 | **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | **3.381.440.000** | **3.915.307.000** | | |
| 1.13 | **Bidang Urusan Sosial** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.02.13.01.01 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | | | | | | | | | **2.403.881.000** | **2.839.551.000** | | |
| 1.13.02.13.02.01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terbiayayainya pelaksanaan jasa surat menyurat perkantoran | 12 Bln | Terlaksananya penyediaan jasa surat masuk dan surat keluar kantor | 12 Bln | 12.100.000 | 13.310.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terbiayainya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik perkantoran | 12 Bln | Terlaksananya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik perkantoran | 12 Bln | 124.200.000 | 136.620.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terbiayainya honorarium pelaksana administrasi keuangan | 12 Bln | Terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan kantor | 12 Bln | 98.160.000 | 107.976.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.0800 | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan kebersihan kantor | 12 Bln | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan kebersihan kantor | 12 Bln | 30.000.000 | 33.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Jumlah Dana | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor | 12 Bln | Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor | 12 Bln | 64.000.000 | 70.400.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya pelayanan pencetakan dan penggandaan yang diperlukan | 12 Bln | Terlaksananya pelayanan pencetakan dan penggandaan yang diperlukan | 12 Bln | 47.000.000 | 51.700.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bln | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bln | 9.600.000 | 10.560.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1400 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga | 12 Bln | Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga | 12 Bln | 20.000.000 | 22.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bln | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bln | 20.400.000 | 22.440.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya bahan logistik kantor | 12 Bln | Terlaksananya bahan logistik kantor | 12 Bln | 21.000.000 | 23.100.000 | BPBD | |
| 1.13.02.13.02.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | 12 Bln | Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman | 12 Bln | 56.500.000 | 62.150.000 | BPBD | |
| 1 13 02 01 1800 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Luar Daerah | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 1 Tahun | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 400.000.000 | 365.781.900 | BPBD | |
| 1 13 02 01 1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan Administrasi perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya dukungan pelaksanaan administrasi kantor | 12 Bln | Terlaksananya dukungan pelaksanaan administrasi kantor | 12 Bln | 1.350.921.000 | 1.486.013.100 | BPBD | |
| 1 13 02 01 1100 | Koordinasi, Konsolidasi ke dalam daerah | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | 7 Kab/Kota | Meningkatnya kinerja operasional kantor | 100% | Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 1 Tahun | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 100% | 150.000.000 | 434.500.000 | BPBD | |

| Kode Urusan/Program /Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 13 02 02 | **Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | | | | | | | | | **810.349.000** | **891.383.900** | | |
| 1 13 02 02 0700 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya sarana/prasarana perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | Terbiayainya pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | 46.999.000 | 51.698.900 | BPBD | |
| 1 13 02 02 0900 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya sarana/prasarana peralatan gedung kantor | 1 Paket | Terbiayainya pengadaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor | 1 Paket | 21.220.000 | 23.342.000 | BPBD | |
| 1 13 02 02 2400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Terpeliharanya sarana/prasarana kendaraan dinas/operasional kantor | 12 Bln | Terbiayainya Sarana/Prasarana kendaraan dinas/operasional Kantor | 12 Bln | Terbiayainya Sarana/Prasarana kendaraan dinas/operasional Kantor | 12 Bln | 674.430.000 | 741.873.000 | BPBD | |
| 1 13 02 02 2800 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 Bln | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 12 Bln | Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor | 1 | 67.700.000 | 74.470.000 | BPBD | |
| **1 13 02 03** | **Program Peningkatan Disiplin aparatur** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | | **Pangkalpinang** | | | | | | | **156.110.000** | **172.162.100** | **BPBD** | |
| 1 13 02 03 0200 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | | Meningkatnya disiplin penggunaan pakaian dinas | 1 | | 1 | | 1 | 131.110.000 | 144.221.000 | | |
| 1 13 02 23 03 2501 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Terciptanya minimal satu dokumen Penganggaran yang Responsif Gender di setiap bidang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksana | Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 5 buku laporan | 25.000.000 | 27.941.100 | BPBD | |
| **1.13.02.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | | | | | | | | | **11.100.000** | **12.210.000** | | |
| 1.13.02.06.05 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan | 1 | Tersedianya Lakip dan Laporan Keuangan | Dokumen | Meningkatnya kualitas penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan | meningkat | 11.100.000 | 12.210.000 | BPBD | |
| 1 | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **7.135.820.000** | | | |
| 1.13.02.25 | **Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana** | | | | | | | | | | **2.635.820.000** | - | | |
| 1.13.02.25 | Pemeliharaan Jembatan Portable Bailey | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Meningkatkan Durasi pemakaian jembatan portable bailey | 1 Keg | Pemeliharaan jembatan potable bailey | 1 unit p:15 m | Terpeliharanya Jembatan Potable (Balley) | 1 unit | 120.620.000 | - | BPBD | Kegiatan Baru |
| 1.13.02.25 | Penunjang Install Jembatan Bailey dan Logistik | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Meningkatnya kinerja aparatur dalam melayani masyarakat pasca bencana | | Alat angkat mobil crane truck | 1 unit | Terbantunya alat untuk mengangkat jembatan Portable (balley) | 1 unit | 717.010.000 | - | BPBD | Kegiatan Baru |
| 1.13.02.25 | Pengembangan Jembatan Portable (Bailey) | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Meningkatnya kinerja aparatur yang tanggap akan bencana | | | 1 unit | Tersedianya jembatan portable (Balley) sebagai prasarana penting bagi masyarakat terdampak bencana | Jembatan Portable | 1.609.300.000 | - | BPBD | |

| Kode Urusan/Program /Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.02.25 | Pembekalan Teknis dan koordinasi fasilitator penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Daerah Pasca Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | | | Terlaksananya pembekalan teknis dan koordinasi aparatur dalam memberikan playanan kepada masyarakat pada daerah pasca bencana | 1 kegiatan | Tercapainya pembekalan teknis dan koordinasi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada daerah pasca bencana | 40 Org | 188.890.000 | | BPBD | |
| **1.13.02.29** | **Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | **1.750.000.000** | **1.943.737.300** | | |
| 1.13.02.29.0900 | Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Penanggulangan Resiko Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Terwujudnya Identifikasi Titik-titik Daerah rawan bencana Di Prov.Kep.Babel | 12 Bln | Terselenggaranya Identifikasi Daerah Rawan Bencana Di Prov.Kep.Babel | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Identifikasi Daerah Rawan Bencana Di Prov.Kep.Babel | 7 Kab/Kota | 307.340.000 | 440.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.29 | Sosialisasi Tentang Bencana Bagi Dinas/Instansi terkait di 7 Kabupaten/Kota | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Peningkatan Peran serta PNS/Instansi terkait dalam pengurangan Risiko bencana | Meningkat | Meningkatnya pemahaman PNS/Instansi tentang bencana | 50 Org | Terlaksanannya sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan PNS | 1 Kegiatan | 113.525.000 | 220.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.29 | Sosialisasi tentang Bencana ke Anak-anak Sekolah | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Peningkatan peran serta pelajar dalam pengurangan risiko Bencana | Meningkat | Meningkatnya Pemahaman pelajar tentang bencana | 700 Org | Terlaksananya sosialisasi pengurangan risiko bencana di kalangan pelajar | 7 Kegiatan | 341.762.000 | 550.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.29 | Rapat Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Penyusunan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 100 Org | Terkoordinasinya rencana Program provinsi dan Kabupaten | 100 Org | Terlaksananya Rapat Koordinasi Pencegahan dan kesiapsiaagaan Penanggulangan Bencana antara Provinsi dan Kabupaten | 1 kegiatan | 650.000.000 | 700.000.000 | BPBD | |
| 1.13.02.29 | Pembentukan Desa Tangguh | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep. Babel | Peningkatan Peran serta PNS / instansi terkait dalam Pengurangan Risiko Bencana | Meningkat | Meningkatnya pemahaman PNS / instansi tentang Bencana | 50 Org | Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana di Lingkungan PNS / Instansi terkait di 7 kabupaten dan kota | 1 kegiatan | 337.373.000 | 33.737.300 | BPBD | |
| **1.13.02.30** | **Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana** | | | | | | | | | | **2.750.000.000** | **2.855.000.000** | | |
| 1.13.02.30.0300 | Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatkan pemeliharaan/perawatan logistik dan peralatan bencana serta tersedianya sarana tempat penyimpanan logistik dan peralatan | 1 Keg | Tersedianya peralatan untuk Penanggulangan bencana yang siap pakai | 1 | Tercapainya pemeliharaan dan perawatan peralatan untuk penanggulangan bencana | 1 Keg | 187.150.000 | 200.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.0601 | Kegiatan Operasional Kegiatan Pos Komando (Posko) Tim Reaksi Cepat BPBD | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya kegiatan penanggulangan bencana | 12 Bln | Terlaksananya operasional kegiatan Posko TRC BPBD | 12 Bln | Meningkatnya pemantauan dan penanganan kejadian bencana | 12 Bln | 1.076.445.000 | 1.100.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.0701 | Kegiatan Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat BPBD | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang dan Bangka Tengah | Meningkatnya kapasitas dan keterampilan TRC BPBD | 5 Keg | Terlaksananya pelatihan penguatan TRC BPBD | 5 Keg | Meningkatnya ketangguhan TRC BPBD | 200 Org | 305.840.000 | 310.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.1000 | Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatanya ketersediaan perlengkapan penanggulangan bencana | 1 Keg | Terlaksananya penyediaan perlengkapan tanggap darurat TRC | 55 Org | Meningkatnya perlengkapan tanggap darurat TRC | 55 Org | 196.660.000 | 200.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.1200 | Kegiatan Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang dan Jakarta | Meningkatnya persediaan bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana untuk BPBD Prov. Kep. Babel | 1 Keg | Tersedianya logistik serta diterimanya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana dari BNPB/Pusat | 1 | Diterimanya bantuan logistik/peralatan penanggulangan bencana dari BNPB/Pusat | 1 | 141.720.000 | 150.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/Program /Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.13.02.30.1301 | Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Tim Reaksi Cepat BPBD | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang dan Bangka Tengah | Meningkatnya kapasitas dan kemampuan TRC BPBD | 1 Keg | Terlaksananya peningkatan kualitas SDM TRC BPBD | 1 Keg | Meningkatnya kualitas SDM TRC BPBD | 40 Org | 128.530.000 | 130.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.1401 | Kegiatan Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov. Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya tanggung jawab Tim Reaksi Cepat pada saat terjadi bencana | 12 Bln | Terlaksananya pengerahan dan mobilisasi TRC pada masa tanggap darurat bencana | 12 Bln | Meningkatnya kecepatan mobilisasi TRC ke lokasi bencana | 7 Kab/ Kota | 163.300.000 | 200.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.4002 | Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Meningkatnya ketersediaan peralatan penanggulangan bencana | 1 Keg | Terbiayainya pengadaan peralatan penunjang bencana alam | 1 | Tersedianya peralatan penanggulangan bencana | 1 Keg | 332.905.000 | 340.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |
| 1.13.02.30.4004 | Kegiatan Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov. Kep. Bangka Belitung | Meningkatkan persediaan logistik penanggulangan bencana untuk masyarakat yang korban bencana di Prov. Kep. Babel | 1 Keg | Tersedianya buffer stock logistik penanggulangan bencana untuk korban bencana | 1 | Tercapainya penyediaan logistik untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana | 1 Keg | 217.450.000 | 225.000.000 | BPBD | Sedang Berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Total Belanja Langsung | | | | | | | | | | 198.395.825.000 | | | |
| 1 | Belanja Rutin | | | | | | | | | | 186.846.818.000 | | | |
| 1.01 | Bidang Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.01 | Program pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | | | | | 184.527.407.500 | 202.799.968.250 | Disnakertrans | |
| | Operasional Perkantoran UPTD BLKI | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional perkantoran UPTD BLKI | 12 bulan | Tersedianya operasional perkantoran UPTD BLKI | 12 bulan | 476.867.500 | 524.554.250 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pemeliharaan Gedung UPTD BLKI | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya pemeliharan gedung kantor UPTD BLKI | 12 bulan | terpenuhinya dan lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bulan | 57.250.000 | 62.975.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD BLKI | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPTD BLKI | 12 bulan | Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPTD BLKI | 12 bulan | 52.670.000 | 57.937.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Operasional Kios 3 In 1 | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya operasional Kios 3 in 1 | 12 bulan | Terpenuhinya operasional Kios 3 in 1 | 12 bulan | 296.508.500 | 326.159.350 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Operasional Perkantoran UPTD Hyperkes | | Terciptanya Sistem birokarsi yang kuat, Transparan, akuntabel dan efisien | UPTD Hyperkes | Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Operasional Perkantoran UPTD Hyperkes | 12 Bulan | Tersedianya Operasional Perkantoran UPTD Hyperkes | 12 Bulan | 296.980.500 | 326.678.550 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Operasional Pekantoran BPPD | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntebel dan efisien | UPTD | Persentase pelayanan administrasi pekantoran | 100% | Terlaksananya oprasional perkantoran UPTD BPPD | 12 bulan | Tersedianya oprasionalperkantoran UPTD BPPD | 12 bulan | 252.140.000 | 277.354.000 | Disnakertrans | Sedang berjalan |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terbayarnya honorarium Pengelola keuangan | 12 bulan | Lancarnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan | 12 bulan | 160.860.000 | 176.946.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Jasa kebersihan Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional kebersihan kantor | 12 bulan | Terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor | 12 bulan | 559.591.000 | 615.550.100 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bulan | 216.000.000 | 237.600.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | tersedianya surat kabar, majalah dan buku bacaan sebagai sarana informasi | 12 bulan | bertambahnya informasi pegawai | 12 bulan | 24.820.000 | 27.302.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya perbaikan peralatan kantor | 12 bulan | Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor | 12 bulan | 147.382.000 | 162.120.200 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya komponen instalasi listrik | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bulan | 47.295.000 | 52.024.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya kegiatan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 33.000.000 | 36.300.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya ATK | 12 bulan | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 262.257.000 | 288.482.700 | Disnakertrans | sedang berjalan |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan | 700 lembar materai, 30 buku cek dan belanja jasa pengiriman | tersedianya perangko, materai dan beda pos lainnya dan biaya pengiriman surat | 12 bulan | 15.500.000 | 17.050.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Luar Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah | 12 bulan | lancarnya konsultasi dan koordinasi ke pusat dan antar daerah | 12 bulan | 400.000.000 | 440.000.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik | | | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terpeliharanya generator set | 12 bulan | Pemeliharaan rutin/ berkala generator set (genset) | 12 bulan | 180.800.000.000 | 198.880.000.000 | Disnakertrans | Baru |
| | Koordinasi dan konsolidasi ke dalam Daerah | | | Luar Daerah | | | | | | 12 Bulan | 150.000.000 | 165.000.000 | Disnakertrans | Baru |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya bahan logistik kantor | 12 bulan | Terpenuhinya bahan logistik kantor | 12 bulan | 18.511.000 | 20.362.100 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya makan dan minum tamu | 12 bulan | Terpenuhinya makan dan minum tamu | 12 bulan | 60.000.000 | 66.000.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Fasilitasi Tim penilai angka kredit (TPAK) Fungsional Provinsi | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Berjalannya Pelayanan Teknis dan Administrasi TPAK Fungsional Para Instruktur BLKI | 12 bulan | TPAK Fungsional para Instruktur BLKI dapat melaksanakan operasional secara maksimal dan terdata dengan baik. | 100% | 35.975.000 | 39.572.500 | Disnakertrans | Kegiatan Baru |
| | Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik UPTD BLKI | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran UPTD BLKI | 12 bulan | 163.800.000 | 180.180.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| 1.01.02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Tingkat Sarana dan Prasarana** | | | | | | **892.350.000** | **903.683.000** | Disnakertrans | |
| | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Bengkel UPTD BLKI | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | UPTD BLKI | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya Pemeliharaan alat praktikum yang ada di Workshop UPTD BLKI | | Lancarnya Pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh UPTD BLKI | 12 bulan | 56.700.000 | 62.370.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pengadaan Konstruksi Jaringan Air | | | Bangka Belitung | Terpenuhinya kebutuhan konstruksi jaringan air kantor UPTD Hyperkes sebagai penunjang dalam kegiatan Kantor | tersedianya 1 jaringan sumur bor | Aktivitas kegiatan Perkantoran yang tertib dan lancar | tersedianya 1 jaringan sumur bor | Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari | tersedianya 1 jaringan sumur bor | 27.550.000 | 30.305.000 | Disnakertrans | baru |
| | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pengadaan sarana perlengkapan gedung kantor | Tersedianya 1 unit tangga logam, 20 buah meja 1/2 biro dan 20 buah rak buku | Tersedianya sarana perlengkapan gedung kantor | 100% | 77.740.000 | 85.514.000 | Disnakertrans | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor; | I Gedung Dinas | Terpeliharanya Gedung/kantor kantor | 12 bulan | 175.025.000 | 192.527.500 | Disnakertrans | |
| | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona; | 12 bulan | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor dan dapat digunakan | 12 bulan | 317.350.000 | 349.085.000 | Disnakertrans | |
| | Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Disnakertrans | Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksanya pembangunan tempat parkir kendaraan | 1 Unit | Tersedianya tempat parkir kendaraan | 100% | 167.165.000 | 183.881.500 | Disnakertrans | baru |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Pengadaan Sarana Promosi Hyperkes | | | Disnakertrans | | | | | | 100% | 70.820.000 | 77.902.000 | Disnakertrans | Baru |
| **1.01.04** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Tingkata Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | **264.695.000** | **291.164.500** | Disnakertrans | |
| | Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Bangka Belitung | Persentase peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Terkoordinasinya rencana program provinsi dan kab/kota | 35 peserta | Terlaksananya rakor antar provinsi dan Kab/kota | 100% | 264.695.000 | 291.164.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| **1.01.05** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Tingkat Disiplin aparatur** | | | | | | **197.255.000** | 216.980.500 | Disnakertrans | |
| | Pengadaan Pakaian dinas dan Atribut | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan atribut | 153 PNS | Terpenuhinya disiplin aparatur | 100% | 172.255.000 | 189.480.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Bangka Belitung | | | | | | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | Disnakertrans | Baru |
| **1.01.06** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Tingkat Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya** | | | | | | **965.110.500** | 1.061.621.550 | Disnakertrans | |
| | Monitoring dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Bangka Belitung | Persentase Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya | 100% | lancarnya koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota | 7 Kabupaten/ Kota | terlaksanya koordinasi di 7 Kabupaten/Kota | 7 Kabupaten/ Kota | 239.918.500 | 263.910.350 | disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya | 100% | tersusunnya laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan dan paripurna tentang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | 223 dokumen | tersedianya laporan bulanan, triwulan, semesteran dan paripurna | 12 bulan | 96.993.000 | 106.692.300 | disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pengadaan dan Sosialisasi Aplikasi Database Ketenagakerjaan | | | Pangkalpinang | Tingkat perencanaan tenaga kerja | 100% | tersedianya sistem aplikasi database ketenagakerjaan | 1 sistem aplikasi | tersedianya database ketenagakerjaan | 100% | 158.105.000 | 173.915.500 | disnakertrans | baru |
| | Pameran Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Kabupaten Belitung | Persentase Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya | 100% | Terlaksananya Pameran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | 3 hari | Tersebarnya informasi terkait ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | 100% | 179.810.000 | 197.791.000 | Disnakertrans | |
| | Penyusunan LAKIP | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya | 100% | tersusunya dokumen LAKIP | 25 buku | tersedianya dokumen LAKIP | 100% | 38.244.000 | 38.244.000 | disnakertrans | sedang berjalan |
| | Perencanaan dan penyusunan Rencana Kegiatan anggaran (RKA) | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase penimgkatan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan | 100% | tersusunnya RKA dan DPA untuk meningkatkan sistem pelaporan | 25 dokumen | tersedianya dokumen RKA dan DPA | 100% | 35.720.000 | 39.292.000 | Disnakertrans | baru |
| | Rapat Koordinasi seluruh jabatan fungsional Kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Terciptanya sistem birokrasi yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi jabatan fungsional antar provinsi dan kab/kota | 30 peserta | terkoordinasinya jabatan fungsional antar provinsi dan kab/kota | 100% | 216.320.000 | 237.952.000 | Disnakertrans | |
| **2** | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **11.549.007.000** | | | |
| **2.1** | **Program Pengembangan HI dan Jamsostek** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **1.446.742.000** | **1.591.416.200** | Disnakertrans | |
| | Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Pangkalpinang | Pemahaman mengenai Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit | 30 orang | Terlaksananya Penyuluhan Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit | 30 Orang | Meningkatnya pemahaman Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit | 100% | 145.595.000 | 160.154.500 | Disnakertrans | |
| | Bimtek Tatacara Pembuatan, Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Pangkalpinang | Pemahaman mengenai tatacara pembuatan, pendaftaran dan pengesahan PP/PKB | 30 orang | Terlaksananya bimtek tatacara pembuatan, pendaftaran & pengesahan PP/PKB | 30 Orang | Meningkatnya pemahaman tatacara pembuatan, pendaftaran & pengesahan PP/PKB | 100% | 145.595.000 | 160.154.500 | Disnakertrans | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyelesaian Kasus hubungan Industrial (PPHI) | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 Kabupaten / kota | Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus PHK | 35 Kasus | Terlaksananya penyelesaian kasus phk | 35 Kasus | Terselesainya kasus phk di Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | 89.300.000 | 98.230.000 | Disnakertrans | |
| | Forum Mediator Se- Prov. Kep. Bangka Belitung | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Pangkalpinang | Terlaksananya Forum Mediator se Prov.Kep. Bangka Belitung | 25 Orang | Singkronisasi Mediator Provinsi dan Kabupaten/Kota | 25 Orang | Jumlah Mediator HI | 100% | 122.600.000 | 134.860.000 | Disnakertrans | |
| | Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat pembahasan UMP, Survey KHL dan Sosialisasi Upah Minimum | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pemahaman upah minimum | 150 Orang% | Terlaksananya Sosialisasi Upah Minimum | 150 Orang | Meningkatnya Pemahaman Upah Minimum | 100% | 622.022.000 | 684.224.200 | Disnakertrans | |
| | Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Pangkalpinang | Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja | Perusahaan | Terlaksananya rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan | Perusahaan | Rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan | 80% | 321.630.000 | 353.793.000 | Disnakertrans | |
| **2.3** | **Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **1.732.990.000** | **1.552.919.500** | Disnakertrans | |
| | Bimtek bagi LPK | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka belitung | terciptanya lembaga pelatihan kerja yang berkualitas | 100% | peningkatan kualitas dan relevansi program pelatihan dengan dunia usaha dan industri | 60 LPK | LPK mampu membantu program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kompetensi tenaga kerja | 100% | 359.360.000 | 419.529.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka belitung | pengurangan jumlah pengangguran | 100% | jumlah tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis enterpreneurship | 20 orang | pertumbuhan lapangan kerja baru dan kesempatan berusaha yang bekelanjutan | 100% | 219.000.000 | 250.316.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Bimtek 5 S | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Kabupaten dan Kota | Terlaksana penerapan 5 s di lingkungan kerja | 100% | 60 pekerjaan di perusahaan mendapatkan Bimtek 5 S | 6 bulan | Meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja dengan tersedianya lingkungan / tempat kerja yang tertata rapi (5 S) sehingga terciptanya efesiensi, efektivitas dan kulaitas kerja | 6 Bulan | 158.925.000 | 174.817.500 | Disnakertrans | Sedang berjalan |
| | Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri bagi Pemula | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Kabupaten dan Kota | wirausaha baru laki-laki/perempuan yang mendapatkan materi kewirausahaan bagi pemula | 60% | Terlaksananya pelatihan calon wirausaha mandiri bagi pemula | 40 Orang | Terlatihnya wirausaha mandiri bagpemula | 100% | 274.270.000 | 301.697.000 | Disnakertrans | Sedang berjalan |
| | Sosialisasi Peningkatan Produtifitas Daerah | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Kabupaten dan Kota | Tersosialisasinya keberadaan UPTD BPPD dalam upaya membantu SDM usia produktif dalam menciptakan lapangan kerja/ usaha | 100% | Terwujudnya revitalisasi peningkatan produktifitas sebagai strategi pembangunan | 9 bulan | Meningkatnya produktifitas daerah dalam menciptakan lapangan kerja/ usaha | 9 bulan | 369.600.000 | 406.560.000 | Disnakertrans | baru |
| | Kegiatan Padat Karya Produktif | | | Kabupaten dan Kota | | | | | | | 351.835.000 | 387.018.500 | Disnakertrans | Baru |
| **2.4** | **Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **1.677.243.500** | **1.763.369.850** | Disnakertrans | |
| | Pengujian Lingkungan Kerja | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 kab/kota | Terlaksananya Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja | 14 Perusahaan di 7 kab/ kota | Terlaksananya Pengujian Lingkungan Kerja | 14 Perusahaan di 7 kab/ kota | Terciptanya Lingkungan Kerja yang sehat dan Kondusif | 14 Perusahaan di 7 kab/ kota | 77.850.000 | 85.635.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pengadaan Alat Pelindung Diri | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Terpernuhinya kebutuhan alat pelindung diri sebagai standar pemeriksaan dalam kegiatan Hyperkes | 160 Buah Alat Pelindung Diri | Aktivitas Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja yang sesuai standar K3 | 160 Buah Alat Pelindung Diri | Optimalnya Pelayanan Pengujian Lingkungan Kerja pada Perusahaan | 160 Buah Alat Pelindung Diri | 33.600.000 | 36.960.000 | Disnakertrans | Baru |
| | Pemeriksaan Kesehatan tenaga Kerja sektor UMKM ( UPTD Hyperkes) | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Terpantaunya kesehatan Tenaga kerja dan terdeteksinya penyakit akibat kerja serta terpantaunya lingkungan kerja di sektor UMKM | 70 Tenaga Kerja dan 7 UMKM | Terciptanya Tenaga Kerja yang sehat dan Produktif dan Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan kondusif di sektor UMKM | 70 Tenaga Kerja dan 7 UMKM | Terpantaunya kesehatan keselmatan kerja pada Sektor UMKM | 70 Tenaga Kerja dan 7 UMKM | 123.972.500 | 136.369.750 | Disnakertrans | Baru |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Penyuluhan pengetahuan praktis tentang K3 di perusahaan ( UPTD Hyperkes ) | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Kab. Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Kab. Bangka Selatan | Terlaksananya Penerapan Keselamatan dan Kesahatan kerja yang baik di Perusahaan | 120 Tenaga Kerja perusahaan di 4 kabupaten di pulau bangka | Terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan yang optimal sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat | 120 Tenaga Kerja perusahaan di 4 kabupaten di pulau bangka | Terlaksananya kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahan | 120 Tenaga Kerja perusahaan di 4 kabupaten di pulau bangka | 32.775.000 | 36.052.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pemantauan Faktor Risiko Lingkungan Kerja | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 kab/kota | Terlindunginya Tenaga kerja terhadap faktor risiko lingkungan kerja | 7 Perusahaan di 7 kab/ kota | Terpantaunya faktor resiko akibat lingkungan kerja di perusahaan | 7 Perusahaan di 7 kab/ kota | Terdeteksinya sumber faktor resiko akibat lingkungan kerja di perusahaan | 7 Perusahaan di 7 kab/ kota | 55.457.000 | 61.002.700 | Disnakertrans | Baru |
| | Pemeriksaan Kesehatan tenaga Kerja dan kadar Hb pada Tenaga Kerja Perempuan | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 kab/kota | Terlaksanya pemerikasaan kesehatan dan kadar hb pada tenaga kerja perempuan | 140 Tenaga Kerja | Terdeteksinya kadar Hb darah pada tenaga kerja perempuan | 140 Tenaga Kerja | Terlaksanya pemeriksaan kadar Hb pada tenaga kerja perempuan | 140 Tenaga Kerja | 91.820.000 | 101.002.000 | Disnakertrans | Baru |
| | Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja bagi petugas K3 | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 kab/kota | Terlaksananya penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik diperusahaan | 35 Tenaga kerja di 7 kab/ kota | Terlaksananya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang optimal sehingga menciptakan lingkungan kerja yang sehat | 35 Tenaga kerja di 7 kab/ kota | Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 35 Tenaga kerja di 7 kab/ kota | 132.425.000 | 145.667.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Kalibrasi alat pemeriksaan kesehatan dan Pengujian lingkungan ( UPTD Hyperkes) | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Bangka Belitung | Terpenuhinya alat uji yang baik sebagai penunjang kegiatan pemeriksaan dan pengujian Lingkungan Perusahaan (UPTD Hyperkes) | Terkalibrasinya 8 alat uji kesehatn dan 10 alat uji lingkungan kerja | Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Kerja Yang Optimal | Terkalibrasinya 8 alat uji kesehatn dan 10 alat uji lingkungan kerja | Terlaksananya kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian Lingkungan | Terkalibrasinya 8 alat uji kesehatn dan 10 alat uji lingkungan kerja | 74.180.000 | 81.598.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pemetaan Wajib Lapor Konstruksi | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 kab/kota | terciptanya perlindungan jaminan sosial dan terpenuhinya hak normatif pekerja sektor konstruksi | 7 kab/kota | terlaksananya pemeriksaan dan pemetaan perusahaan sektor konstruksi | 7 kab/kota | terpantaunya pelaksanaan peraturan perundang-undangan di sektor konstruksi | 7 kab/kota | 222.380.000 | 244.618.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Gema bulan bhakti keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 1 Kab | Peringatan Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | 1 Keg | Terlaksananya Apel hari K3 Nasional | 1 Keg | membudayanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di kalangan masyarakat. | 1 Keg | 133.760.000 | 147.136.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 Kab/Kota | dipatuhinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan | 40 Perusahaan | Pemeriksaan pelaksanaan Norma Kerja dan Norma K3 | 40 Perusahaan | hak-hak normatif pekerja yang terpenuhi dan terlindungi | 40 Perusahaan | 300.000.000 | 330.000.000 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Sosialisasi SMK3 | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Pangkalpinang | penerapan sistem manajemen K3 oleh perusahaan | 60 org | terlaksananya sosialisasi Sistem Manajemen K3 bagi pengurus perusahaan | 60 org | menurunnya tingkat kecelakaan kerja dan meningkatnya kualitas kesehatan pekerja di perusahaan | 60 org | 252.120.000 | 277.332.000 | Disnakertrans | baru |
| | Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan | | Meningkatnya Kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | 7 Kab/Kota | Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan di Perusahaan | 7 Kasus | Pemeriksaan terhadap kasus-kasus ketenagakerjaan | 7 Kasus | terciptanya penegakan hukum bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan | 7 Kasus | 146.904.000 | 161.594.400 | Disnakertrans | baru |
| **2.5** | **Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **4.681.534.500** | **509.129.500** | Disnakertrans | |
| | Penyuluhan Bimbingan Jabatan | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka Belitung | meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK | 100% | terlaksananya penyuluhan bimbingan jabatan dan bursa kerja khusus | 200 orang | meningkatnya pemahaman siswa terhadap minat, bakat dan potensi dirinya untuk memasuki dunia kerja | 100% | 201.330.000 | 217.833.000 | Disnakertrans | baru |
| | Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka Belitung | keikutsertaan calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan TKI | 100% | terlaksananya sosialisasi | 100 orang | terlaksananya peraturan perundang-undangan | 100% | 169.125.000 | 191.537.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Sosialisasi Informasi Pasar Kerja | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka Belitung | penyebaran informasi pasar kerja bagi pencari kerja dan pemberi kerja | 100% | kemudahan bagi pengguna dalam mendapatkan data IPK | 60 orang | pengurangan angka pengangguran | 100% | 90.690.000 | 99.759.000 | Disnakertrans | baru |
| | Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal ) | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | UPTD BLKI | Persentase Peningkatan aparatur | 100% | Terciptanya Intruktur yang Profesional dan sesuai dengan Upgrading yang berkualitas | | Terpenuhinya Instruktur yang berkualitas dan Profesional | 12 bulan | 374.249.000 | 411.673.900 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kab/ Kota | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | UPTD BLKI | Persentase Peningkatan Tenaga Kerja | 100% | Terciptanya Tenaga kerja yang siap pakai yang berkualitas | | Terpenuhinya Tenaga kerja yang mampu dan handal sesuai dengan kompetensi yang di didik | | 2.323.975.500 | 2.556.373.050 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Pembinaan Desa Produktif | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Kabupaten dan Kota | Terlaksananya Peningkatan Kewirausahaan bagi Masyarakat Desa | 100% | Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | 12 bulan | Terwujudnya peningkatan kewirausahaan bagi pelaku UMKM di desa | 12 bulan | 631.560.000 | 694.716.000 | Disnakertrans | Sedang berjalan |
| | Sertifikasi Tenaga Kerja | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Prov. Kep. Bangka belitung | pengurangan jumlah pengangguran | 100% | pengakuan atas kompetensi yang dimiliki tenaga kerja | 96 orang | kemudahan bagi tenaga kerja dalam memasuki dunia kerja | 100% | 569.755.000 | 626.730.500 | Disnakertrans | sedang berjalan |
| | Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan produktif | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Kabupaten dan Kota | wirausaha baru laki-laki/perempuan yang menerapkan materi kewirausahan Produktif | 60 orang | terlaksananya pelatihan peningkatan produktivitas dan terserapnya alumni pelatihan sebagai wirausaha baru | 60 orang | Meningkatnya kompetensi para wirausahawan produktif melalui pelatihan | 100% | 320.850.000 | 352.935.000 | Disnakertrans | |
| **2.6** | **Program Perencanaan Tenaga Kerja** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **306.025.000** | **510.543.000** | Disnakertrans | |
| | Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Pangkalpinang | Tingkat perencanaan tenaga kerja | 100% | Terlaksananya Bimtek Penyusunan Tenaga Kerja Kab/Kota | 40 peserta | Tersedianya Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten/ Kota | 100% | 184.560.000 | 203.016.000 | disnakertrans | baru |
| | Workshop PTK | | Tersedianya Lapangan kerja dan Berkurangnya angka Pengangguran | Pangkalpinang | Tingkat perencanaan tenaga kerja | 100% | Terlaksananya Workshop PTK Mikro di Perusahaan | 35 peserta | Meningkatnya pemahaman tentang proses penyusunan PTK di perusahaan | 100% | 121.465.000 | 133.611.500 | disnakertrans | sedang berjalan |
| **3** | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | **1.704.472.000** | | | |
| **3.1** | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil** | **Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **796.271.000** | **960.047.900** | disnakertrans | |
| | Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi | | Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa | Provinsi Kep Bangka Belitung | Terciptanya kawasan Transmigrasi Baru | 100% | Terlaksananya Rapat Pokja KTM | Terpenuhi | Program dan Kegiatan KTM Lintas Sektor | Dokumen Program Lintas Sektor KTM | 241.682.000 | 350.000.000 | disnakertrans | sedang berjalan |
| | Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Partisipasi Masyarakat | | Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa | Kab Bangka Selatan | Terciptanya kawasan Transmigrasi Baru | 100% | Tersedianya Calon Areal Baru untuk Lokasi Transmigrasi | 3 Lokasi | Menciptakan Lahan Areal Baru Transmigrasi | 3 Lokasi Transmigrasi | 161.785.000 | 177.963.500 | disnakertrans | sedang berjalan |
| | Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi | | Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa | Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur | Tersenggaranya Kerjasama Antar Daerah | 100% | Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah | 2 Prov | Adanya Kerjasama Antar Daerah | 2 Prov | 150.000.000 | 165.000.000 | disnakertrans | baru |
| | Fasilitasi Penempatan Transmigrasi | | Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa | Jebus Kab Bangka Barat | Peningkatan Kualitas Lokasi Transmigrasi di UPT Jebus | 100% | Lingkungan Transmigrasi yang Rapi dan Bersahaja | 1 lokasi | Terciptanya Penataan Lingkungan yang berhasil guna | 1 lokasi | 125.804.000 | 138.384.400 | disnakertrans | baru |
| | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | | Meningkat dan Meratanya Aktivitas Perekonomian di Kawasan-kawasan Desa | Prov. Kep. Bangka Belitung | Tersedianya data Transmigrasi | 100% | Data Transmigrasi | 4 Kab | Adanya Data Transmigrasi | 4 Kab | 117.000.000 | 128.700.000 | disnakertrans | baru |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **3.2** | **Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi** | **Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil** | **Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan** | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | | | | | | **908.201.000** | **661.486.100** | disnakertrans | |
| | Pengembangan sarrana dan prasarana di kawasan transmigrasi | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan | Jebus Kab Bangka Barat | Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi | 100% | Terlaksananya Peningkatan sarana dan Prasarana | 1 Lokasi | Tersedianya Sarana dan Prasarana | 1 Lokasi | 62.260.000 | 68.486.000 | disnakertrans | baru |
| | Peningkatan Kapasitas SDM di Kawasan Transmigrasi | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan | Kab Bangka Barat dan Kab Bangka Selatan | Terciptanya Permukiman Transmigrasi yang mandiri | 100% | Terlaksanya Bintek/ Pelatihan peternakan unggas sarana air bersih | 2 lokasi | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Warga Transmigrasi | 2 Lokasi | 203.527.000 | 223.879.700 | disnakertrans | |
| | Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan | Kab Bangka Barat dan Kab Bangka Selatan | Terciptanya Permukiman Transmigrasi yang mandiri | 100% | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi | 4 Lokasi | Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat Transmigrasi | 4 Lokasi | 306.850.000 | 337.535.000 | disnakertrans | Baru |
| | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya | | Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam seluruh Proses Pembangunan | KTM Kabupaten Bangka Selatan | Terlaksananya Kegiatan Gema Hari Bhakti Transmigrasi | 100% | Terselenggarakannya Gema Hari Bhakti Transmigrasi | Warga Trans | Terciptanya semangat para warga Transmigrasi | warga trans | 335.564.000 | 369.120.400 | disnakertrans | sedang berjalan |

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **8.765.825.000** | **15.952.700.000** | | |
| **1** | **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | **3.185.630.000** | **3.732.700.000** | | |
| **1.15.01.01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN** | | | | | | | | | | **2.327.200.000** | **3.197.500.000** | | |
| 1.15.01.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar Kantor | 12 Bulan | 25.000.000 | 45.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Jasa Komunikasi dan Listrik Perkantoran | 12 Bulan | 219.800.000 | 200.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya honorarium Pelaksana Administrasi Keuangan | 12 Bulan | Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor | 12 Bulan | 185.100.000 | 200.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Jasa Kebersihan Lingkungan Kantor | | Terbiayainya Honorarium Petugas Kebersihan dan alat-alat Kebersihan Kantor | 12 Bulan | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | 45.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | Menyediakan Alat Tulis Secukupnya | | Terbiayainya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Dinas 1 PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Dinas dan 1 PLUT | 12 Bulan | 100.000.000 | 275.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas dan PLUT | 12 Bulan | Terlaksananya Pelayanan Pencetakan dan Penggandaan Yang diperlukan | 12 Bulan | 100.000.000 | 235.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan UPTD | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | 12 Bulan | 30.000.000 | 25.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Bulan | 25.000.000 | 27.500.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 Bulan | 35.000.000 | 90.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk Mengikuti Rapat dan Konsultasi | 12 Bulan | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 12 Bulan | 300.000.000 | 575.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| 1.15.01.01.19 | Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Terbiayainya Honorarium Tenaga Kontrak | 12 Bulan | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Administrasi Kantor | 12 Bulan | 772.200.000 | 930.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.01.70 | Operasional UPT. Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah | | Terbiayainya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran Untuk Operasional UPT. Balai Latihan Koperasi dan UMKM | 12 Bulan | 365.100.000 | 550.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | | | | | | | | **712.430.000** | **320.000.000** | | |
| 1.15.01.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana/Prasarana Bagi Aparatur | | Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas dan Gedung | 3 Paket | Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan Kantor Dinas dan Gedung PLUT | 3 Paket | 461.750.000 | | Dinas Koperasi dan UMKM | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.15.01.02.24 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana/Prasarana Bagi Aparatur | | Terbiayainya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Motor Dinas Kantor | 12 Bulan | Terlaksananya Pemeliharaan 4 Unit Mobil dan 12 Unit Motor Dinas Kantor | 12 Bulan | 230.680.000 | 250.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.02.28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Terpeliharanya Sarana Prasarana Peralatan Kantor | | Terbiayainya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor | 12 Bulan | Terlasananya Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | 70.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | | | | | | | | | | **25.000.000** | | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **1.15.01.05** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | | | | | | | | **106.000.000** | **200.200.000** | | |
| 1.15.01.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Informal | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatue | | Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur | 100% | Meningkatnya Aparatur yang dilatih dan Dididik | 100% | 106.000.000 | 200.200.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | | | | | | | | | **15.000.000** | **15.000.000** | | |
| 1.15.01.06.39 | Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan LKPJ SKPD | 10 Buku | Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan LKPJ SKPD | 10 Buku | 15.000.000 | 15.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1** | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **Rp 5.580.195.000** | **Rp 12.220.000.000** | | |
| | **Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | **Rp 5.580.195.000** | **Rp 12.220.000.000** | | |
| **1.15.01.15** | **PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF** | | | | | | | | | | **390.590.000** | **125.000.000** | | |
| 1.15.01.15.1100 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Pengawasan, Pengendalian, Pelaporan serta Pendataan Data Koperasi dan UMKM | | Terbiayainya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Tindak Lanjut Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | 12 Bulan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Tindak Lanjut Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | 12 Bulan | 100.000.000 | 125.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.15..... | Pengembangan Database UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota | Terciptanya Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif | | Trbiayainya Pengembangan Database UMKM | | Tersedianya Database UMKM di Prov. Kep. Bangka Belitung | 1 Paket Database UMKM | 290.590.000 | 310.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.16** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH** | | | | | | | | | | **413.000.000** | **545.000.000** | | |
| 1.15.01.16..... | Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM | | | Kab. Bangka | Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM | | Terjalinnya Kemitraan Usaha Antara Pelaku Usaha UMKM Dengan Pengusaha Besar | 30 UMKM | Tercapainya MoU antar Pelaku Usaha UMKM Dengan Pengusaha Pasar Modern | 30 UMKM | 96.020.000 | 125.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.16.1600 | Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi | | | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Untuk Usaha Kecil 5 Unit dan Usaha Menengah 5 Unit | | Terbiayainya Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Untuk Usaha Kecil 5 Unit dan Usaha Menengah 5 Unit | 10 UMKM | Terpilihnya UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi Ke. Bangka Belitung | 10 UMKM | 150.310.000 | 280.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.1.01.16..... | Kegiatan Seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing Online | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dan Koperasi | | Terlaksananya Seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing Online | 50 UMKM | Meningkatnya Pengetahuan dan Informasi UMKM Dalam Mengatasi Kendala Dalam Hal Promosi dan Pemasaran Produk Melalui Marketing Online | 50 UMKM | 116.786.000 | 75.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.15.1.01.16..... | Kegiatan Temu Mitra Dengan Rumah Kemasan dan Lembaga Pembiayaan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM dan Koperasi | | Terlaksananya Temu Mitra UMKM Dengan Rumah Kemasan dan Lembaga Pembiayaan | 35 UMKM | Meningkatnya Kerjasama UMKM Dengan Rumah Kemasan Dan Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan Kemasan Produk UMKM | 35 UMKM | 49.884.000 | 65.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| | Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| **1.15.01.17** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM** | | | | | | | | | | **1.458.960.000** | **2.020.000.000** | | |
| 1.15.01.17.0100 | Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan | | | Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan Koperasi | | Terbiayainya Sosialisasi Kepada KUMKM dan Instansi Terkait | 560 KUMKM, 140 Pegawai Dinas | Meningkatnya Pemahaman KUMKM Terhadap Bantuan-bantuan Permodalan dari Bank, Instansi, BUMN dll | 560 KUMKM, 140 Pegawai Dinas | 264.704.000 | 570.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.17.0300 | Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM) | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Koordinasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan Koperasi | | Terbiayainya Pertemuan Forum Koordinasi Pemberdayaan KUMKM | 3 Kali | Meningkatnya Keterpaduan Pelaksanaan Program Dengan Koordinasi Antar Anggota Forum Dalam Pemberdayaan KUMKM | 3 Kali | 85.296.000 | 140.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.17.14 | Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran INA CRAFT | | | Di Jakarta | Meningkatkan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | | Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2016 | 6 UMKM | Meningktnya Hasil Produk Unggulan Daerah Yang Dipromosikan Ke Luar Daerah | 6 UMKM | 218.592.000 | 275.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.17.... | Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran di Provinsi Babel | | | Di Wilayah Bangka Belitung | Meningkatkan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | | Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2016 | 4 UMKM | Meningktnya Hasil Produk Unggulan Daerah Yang Dipromosikan Ke Luar Daerah | 4 UMKM | 77.990.000 | 110.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.17..... | Kegiatan Promosi Produk UMKM Melalui Pameran di Belitung | | | Di Wilayah Belitung | Meningkatkan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | | Terlaksananya Promosi Unggulan Daerah Prov. Kep. Babel Tahun 2016 | 4 UMKM | Meningktnya Hasil Produk Unggulan Daerah Yang Dipromosikan Ke Luar Daerah | 4 UMKM | 162.128.000 | 225.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.17.2400 | Kegiatan Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran Pekan Raya Jakarta | | | Provinsi DKI Jakarta | Mengembangkan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dan Koperasi | | Dikenal dan Terjualnya Kerajinan Khas Daerah | 1 Kali | Adanya Peningkatan Penjualan Produk Kerajinan Khas Daerah | 15 UMKM | 650.250.000 | 700.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.18** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI** | | | | | | | | | | **1.111.441.000** | **1.945.000.000** | | |
| 1.15.01.18.0500 | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | | | 7 Kab/Kota | Menigkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terlaksananya Peningkatan Koperasi | 2 Kegiatan | Terbiayainya Penilaian Pemeringkatan Koperasi | 2 Kegiatan | 99.920.000 | 115.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.0600 | Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi | | | Pangkalpinang | Menigkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi 3 Angkatan di Provinsi Kep. Babel | 3 Angkatan | Terjadi Kesepakatan Kegiatan di Bidang Penyaluran Usaha Pupuk di Prov. Kep Babel | 90 Koperasi/Orang | 69.500.000 | 115.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.0700 | Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi | | | Jawa Tengah | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terlaksananya Kegiatan Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi | 35 Koperasi/Orang | Meningkatnya Pengetahuan, Wawasan, Motivasi dan Inovasi Pengelola Koperasi simpan Pinjam dalam Mengembangkan Koperasinya | 35 Koperasi/Orang | 303.311.000 | 320.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.1200 | Bimbingan Teknis Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi) | | | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terbiayainya Bimtek Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi | 560 Koperasi | Meningkatnya Pemahaman Pengurus Koperasi Dalam Rangka Memberdayakan Fungsi Kelembagaan Koperasi | 560 Koperasi | 104.376.000 | 575.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.15.01.18.1400 | Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | | | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Jumlah Tokoh Koperasi, Koperasi Berprestasi dan Pemda Penggerak Koperasi di Prov. Kep. Babel | | Terlaksananya Pemilihan Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Ber[restasi di Kab/Kota Se-Prov. Kep. Babel | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Jumlah Tokoh Koperasi dan Koperasi Berprestasi di Prov. Kep. Babel | 7 Kab/Kota | 52.710.000 | 65.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.1700 | Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | | | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terbiayainya Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi Dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) | 280 LKM | Meningkatnya Pemahaman Pengurus LKM Agar Dapat Berubah Menjadi Badan Hukum Koperasi | 280 LKM | 327.936.000 | 295.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.1800 | Benah Koperasi Tidak Aktif | | | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terbiayainya Kegiatan Benah Koperasi Tidak Aktif | 560 Koperasi | Bertambahnya Koperasi Aktif | 560 Koperasi | - | 300.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.1900 | Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota | | | Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terbiayainya Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi | 4 Kali | Terlaksananya Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi | 4 Kali | 153.688.000 | 160.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.19** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)** | | | | | | | | | | **1.340.000.000** | **2.715.000.000** | | |
| 1.15.01.19.0400 | Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi | | Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam | 30 Orang | Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Tentang Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam | 30 Orang | 130.000.000 | 190.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.16.1200 | Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Serta Daya Saing Koperasi | | Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi | 30 Koperasi/Orang | Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Juru Buku dan Pengelola Keuangan Koperasi | 30 Koperasi/Orang | 130.000.000 | 190.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.16.0600 | Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT Bagi Koperasi dan UMKM | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil menengah dan Koperasi | | Terbiayainya Pelatihan Kewirausahaan Sebanyak 4 Angkatan | 120 Orang | Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman Kewirausahaan Bagi UMKM Sebanyak 4 Angkatan | 120 Orang | 550.000.000 | 800.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.16.1700 | Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kemampuan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Serta Daya Saing Koperasi | | Terlaksananya Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan | 60 Koperasi/Orang | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Dalam Menegelola Koperasi Pertanian/Perkebunan di Provinsi Kep. Babel | 60 Koperasi/Orang | 130.000.000 | 375.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.16.1800 | Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk Bagi UMKM | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain | | Terbiayainya Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide desain | Dinas Koperasi dan UMKM | Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman UMKM Terhadap Kemasan Produk UMKM Sebanyak 2 Angkatan | 60 Orang | 140.000.000 | 390.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.18.1300 | Pelatihan Pengawasan Koperasi | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi | | Terlaksananya Diklat Pengawasan Koperasi | 30 Koperasi/Orang | Meningkatnya Kemampuan dan Keterampilan Badan Pengawasan Koperasi | 30 Koperasi/Orang | 130.000.000 | 220.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.19.0800 | Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Diklat Studi Kelayakan USaha | | Terbiayainya Kegiatan Studi Klayakan Usaha | 90 Orang | Meningkatnya Pengetahuan Wirausaha Mengenai Kelayakan Usaha Sebanyak 3 Angkatan | 90 Orang | 130.000.000 | 550.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.20** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM BERBASIS POTENSI LOKAL** | | | | | | | | | | **666.204.000** | **4.870.000.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.15.01.20.0300 | Rapat Pokja Penyelesaian Penyimpangan/Penyalahgunaan Prinsip-prinsip Koperasi | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Rapat Pokja Tim Satuan Pengawas KSP Pada 7 Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung | | Terwujudnya Rapat Pokja Tim Satuan Tugas Pengawas KSP pada 7 Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung | 26 Orang | Terwujudnya Rapat Pokja Tim Satuan Tugas Pengawas KSP Pada 7 Kab/Kota di Prov. Kep. Bangka Belitung | 26 Orang | 60.076.000 | 70.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.20.0800 | Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM | | | 7 Kab/Kota | Terciptanya Iklim UMKM dan Koperasi Yang Kondusif | | Terlaksananya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha di 7 Kab/Kota | 175 Orang/UMKM | Terfasilitasinya UMKM Dalam Memperoleh P-IRT | 175 Orang/UMKM | 284.440.000 | 1.150.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| 1.15.01.20..... | Fasilitasi Sertifikat Halal | | | 7 Kab/Kota | Berkembangnya Koperasi dan UMKM Berbasis Lokal | | Jumlah Pengakuan Jaminan Mutu/Kualitas Produk UMKM Dengan Sertifikat Halal | 35 Orang | Jumlah UMKM Yang Memiliki Sertifikat Halal | 35 Orang | 321.688.000 | 3.650.000.000 | Dinas Koperasi dan UMKM | |
| **1.15.01.21** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SEKTOR LEMBAGA DAN WILAYAH** | | | | | | | | | | **200.000.000** | - | | |
| 1.15.01.21. .... | Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah | | | Pangkalpinang | Terciptanya Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang Kondusif | | Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Mikro Kecil | 1 Kegiatan | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Usaha Kecil Menengah | 1 Rancangan Peraturan Daerah | 200.000.000 | - | Dinas Koperasi dan UMKM | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| 1,16 | Bidang Urusan Penanaman Modal | | | | | | | | | | 2.117.740.000 | | | |
| 1.16.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | | | | | 1.626.550.000 | 1.887.000.000 | | |
| 1.16.02.01.01 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan | 1300 materai dan 12 kali belanja jasa pengiriman | Tersedianya materai dan jasa pengiriman barang untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 36.750.000 | 72.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.02 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah telpon, jasa internet dan listrik yang dibayarkan | 3 telpon, 2 jasa internet dan 12 kali belanja listrik | Terbayarnya biaya telpon, jasa internet dan belanja listrik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 153.000.000 | 155.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.07 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah pengelola keuangan kantor yang dibayarkan | 14 orang | Terbayarnya honorarium 14 orang untuk meningkatkan pelayanan administrasi keuangan | 100% | 137.700.000 | 174.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli | 1 Paket | Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kerja | 100% | 262.500.000 | 264.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.09 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Alat Kerja | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah reparasi/service mesin fotocopy, pemeliharaan komputer, pompa air, mesin tik, AC, Printer, Genset yang dilaksanakan | 12 kali reparasi/service mesin fotocopy, 37 unit komputer, 2 unit pompa air, 2 unit mesin tik, 22 unit AC, 16 Unit Printer, 1 unit genset | Terlaksananya reparasi/service mesin fotocopy, pemeliharaan komputer, pompa air, mesin tik, AC, Printer dan Genset | 100% | 126.600.000 | 130.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.10 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Alat Tulis Kantor yang dibeli | 1 Paket | Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100.000.000 | 120.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.11 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah cetak dan penggandaan yang dilaksanakan | 1 Paket cetak dan 1 paket penggandaan | Terlaksananya cetak dan penggandaan untuk meningkatkan kerapihan dan ketertiban administrasi kerja | 100% | 125.000.000 | 127.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.12 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Jumlah Alat listrik dan elektronik yang dibeli | 1 Paket | Tersedianya Alat listrik dan elektronik untuk meningkatkan kualitas kerja | 100% | 10.000.000 | 15.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.15 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | Meningkatnya aparatur | kinerja 100% | Surat Kabar/Majalah yang dibeli | 1 Paket | Tersedianya surat kabar/majalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah | 100% | 25.000.000 | 30.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.16.02.01.17 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | Meningkatnya kinerja aparatur | 100% | Makanan dan minuman rapat/tamu yang dibeli | 1 paket makanan dan minuman rapat dan 1 paket makanan dan minuman tamu | Tersedianya makanan dan minuman tamu/rapat | 100% | 100.000.000 | 150.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.18 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | Meningkatnya kinerja aparatur | 100% | Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan | 1 Paket | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk meningkatkan investasi secara terpadu | 100% | 400.000.000 | 500.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.01.36 | Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | | | | Meningkatnya kinerja aparatur | 100% | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan | 1 Paket | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | 100% | 0 | 150.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| **1.16.02.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah** | **100%** | | | | | **343.750.000** | 1.150.000.000 | | |
| 1.16.02.02.22 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | | Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah | 100% | Jumlah cetak dan penggandaan laporan yang dilaksanakan, jasa konsultasi perencanaan dan pengawas lapangan yang dibayarkan, rehab sedang/berat gedung kantor yang dilaksanakan | 1 paket cetak laporan, 1 paket penggandaan laporan, 1 orang jasa konsultasi perencanaan, 1 orang pengawas lapangan dan 1 paket rehab sedang/berat gedung kantor | Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah | 100% | 30.000.000 | 750.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.02.24 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | | Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah | 100% | - Service dan Ganti Oli Kendaraan Roda 4 | 4 unit | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah | 100% | 313.750.000 | 400.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| | | | | | | | - Service dan Ganti Oli Kendaraan Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Penggantian suku cadang Roda 4 | 4 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Penggantian suku cadang Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - BBM Kendaraan Roda 4 Eselon II | 3600 liter | | | | | | |
| | | | | | | | - BBM Kendaraan Roda 4 Operasional | 9600 liter | | | | | | |
| | | | | | | | - BBM Kendaraan Roda 2 | 3120 liter | | | | | | |
| | | | | | | | - BBM Genset | 1200 liter | | | | | | |
| | | | | | | | - STNK Bermotor Roda 4 | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - STNK Bermotor Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Ban Kendaraan Roda 4 | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Ban Kendaraan Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Accu Mobil | 3 unit | | | | | | |
| | | | | | | | - Accu Motor Roda 2 | 13 unit | | | | | | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000** | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **1.16.02.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Menyusun Laporan usulan program/kegiatan provinsi dan kabupaten/kota serta capaian program dan realisasi kegiatan, Menyusun Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD** | **7 kabupaten/ kota, 100 %** | | | | | **122.440.000** | 127.000.000 | | |
| 1.16.02.06.05 | Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal | | | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Menyusun Laporan usulan program/kegiatan provinsi dan kabupaten/kota serta capaian program dan realisasi kegiatan | 7 kabupaten/kota | Jumlah peserta aparatur bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan 7 kabupaten/kota | 35 orang | Tersusunnya laporan Rencana Kinerja (Renja) dan usulan program/kegiatan dari kabupaten/kota TA 2016 | 1 laporan renja | 122.440.000 | 115.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.06.68 | Kegiatan Penyusunan RKA | | | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Menyusun Laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | 100% | Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD | 1 Dokumen | Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD TA 2016 | 100% | 0 | 12.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| | WAJIB | | | | | | | | | | **4.955.542.000** | | | |
| **1.16.02.15** | **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** | | | **Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bali, GPID, Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal** | **100%** | | | | | **963.447.000** | 1.177.000.000 | | |
| 1.16.02.15.10 | Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi | | | Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bali, GPID, Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal | 100% | Jumlah pameran investasi dalam negeri | 5 Pameran | Terlaksananya pameran dalam negeri | 100% | 506.607.000 | 700.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.15.15 | Kegiatan Workshop Pembuatan Bahan Promosi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal | 100% | Peserta workshop pembuatan bahan promosi | 35 orang | Tersampaikannya tata kelola bahan promosi investasi | 1 laporan | 150.000.000 | 100.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.15.24 | Kegiatan Kerjasama Investasi antar Daerah | | | Provinsi Jawa Tengah | Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal | 100% | Forum kerjasama investasi dengan instansi pemerintah di provinsi lain | 50 undangan | Terlaksananya kerjasama dengan instansi pemerintah di provinsi lain | 1 MoU | 135.180.000 | 137.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.15.25 | Kegiatan Promosi Investasi melalui Media Massa | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal | 100% | Tersedianya informasi promosi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 7 (tujuh) sektor unggulan daerah | 2 Media | Tersebarnya informasi promosi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 kab/kota di 7 (tujuh) sektor unggulan daerah | Buletin dan Website | 171.660.000 | 175.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.15.27 | Kegiatan Pengadaan Bahan Promosi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya strategi promosi lingkup provinsi yang berorientasi pada peningkatan daya saing penanaman modal | 100% | Tersedianya Bahan Promosi Investasi | Tas Promosi 500 buah, pembatas buku 2000 buah, kalender duduk 500 buah, peta investasi 500 buah | Terpublikasikannya potensi dan peluang investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 0 | 65.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.16.02.16** | **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya realisasi penanaman modal** | **100%** | | | | | **2.184.685.000** | 2.636.000.000 | | |
| 1.16.02.16.16 | Kegiatan Penyusunan Data LKPM Tahun Anggaran 2016 | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya realisasi penanaman modal | 100% | Tersedianya buku data laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) | 100 buku | Terwujudnya realisasi investasi penanaman modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.16.17 | Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LKPM Secara Online | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya realisasi penanaman modal | 100% | Sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara online pada perusahaan-perusahaan | 1 sistem | Terwujudnya pelaporan kegiatan penanaman modal dengan cepat dan akurat | 1 laporan | 84.685.000 | 86.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| **1.16.02.17** | **Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Terkajinya produk komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tersedianya informasi Rencana Umum Penanaman Modal beserta Sarana dan Prasarananya** | **100%** | | | | | **1.000.000.000** | 1.225.000.000 | | |
| 1.16.02.17.04 | Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan proposal investasi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terkajinya produk komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersusunnya peta potensi investasi daerah yang interaktif berupa soft copy dan hard copy | 1 peta | Peta potensi investasi | 100% | 300.000.000 | 275.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.17.05 | Kegiatan Penyusunan Proposal Potensi Investasi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terkajinya produk komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Buku kajian proposal potensi investasi daerah | 2 buku | proposal potensi investasi daerah | 2 SEKTOR | 0 | 240.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.17.06 | Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersedianya informasi Rencana Umum Penanaman Modal beserta Sarana dan Prasarananya | 100% | Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Povinsi Kepulauan Bangka Belitung | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Belitung | Analisa dan kajian rencana umum Penanaman Modal Povinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 700.000.000 | 710.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| **1.16.02.18** | **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Terwujudnya Pelayanan prima dalam pemberian layanan perizinan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** | **100%** | | | | | **807.410.000** | 1.240.000.000 | | |
| 1.16.02.18.02 | Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya Pelayanan prima dalam pemberian layanan perizinan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 100% | Terlaksananya operasional pelayanan perizinan di PTSP 1 tahun anggaran; sosialisasi pelayanan perizinan melalui media massa, buku, leaflet, dan spanduk; terlaksananya rapat-rapat pembahasan perizinan dengan SKPD teknis | 10 kali terbit, 3 radio, 150 buku, 8 rim leaflet, 16 buah spanduk | Terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu provinsi kepulauan bangka belitung | 7 kab/kota | 622.840.000 | 1.050.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |
| 1.16.02.18.08 | Kegiatan Rapat Koordinasi Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terwujudnya Pelayanan prima dalam pemberian layanan perizinan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik | 100% | pertemuan PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 kali pertemuan dengan total 150 peserta | Meningkatnya forum PTSP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 7 kab/kota | 184.570.000 | 190.000.000 | BPPTPM | Sedang berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 27.461.019.000 | 19.427.455.280 | | |
| 1.17. | Rutin | | | | | | | | | | 5.938.919.500 | 4.180.231.695 | | |
| 01 . | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 2.302.727.500 | 2.367.469.725 | | |
| 0100 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah dokumen layanan administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen) | 1860 Pucuk surat dan 1 paket Pengiriman | Tersedianya dokumen layanan administrasi umum, ketatalaksanaan, layanan informasi, hubungan antar lembaga (dokumen) | 1860 Pucuk surat dan 1 paket Pengiriman | 24.600.000 | 24.600.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0200 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bln | 321.600.000 | 321.600.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0600 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan operasional perkantoran (bulan) | 12 bln | Terpeliharanya kendaraan dinas untuk menunjang kerja pegawai | 12 bln | 386.800.000 | 386.800.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0700 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah layanan bidang keuangan | 12 bln | Tersedianya jasa administrasi pengelolaan Keuangan | 12 bln | 150.720.000 | 150.720.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0800 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya lingkungan kantor yang kondusif | 12 bln | 30.000.000 | 30.000.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1000 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bln | 138.200.000 | 142.346.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1100 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang / Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah penyediaan barang cetakan (eksemplar) & penggandaan (lembar) | 626 eksemplar / 240.000 lbr penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 626 eksemplar / 240.000 lbr penggandaan | 90.007.500 | 92.707.725 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1200 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Peningkatan manajemen pemerin | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya alat listrik dan elektronik | 12 bln | 50.000.000 | 51.500.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1500 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Informasi | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah bahan bacaan yang tersedia (eksemplar) | 4 surat kabar dan 1 paket buku perpustakaan | Tersedianya bahan bacaan bagi para pegawai | 4 surat kabar dan 1 paket buku perpustakaan | 28.600.000 | 29.458.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1600 | Kegiatan Penyediaan bahan Logistik kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya bahan logistik kantor | 12 bln | 8.700.000 | 8.961.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1700 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bln | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 12 bln | 117.200.000 | 120.716.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1800 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang / Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Rakor dan Konsultansi ke luar daerah (kali) / Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah) | 100 kali / 85 laporan | Terbinanya hubungan koordinasi dengan pemerintah Pusat dan Daerah lainnya | 100 kali / 85 laporan | 500.000.000 | 515.000.000 | Disbudpar | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| | Kegiatan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten / Kota | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang / Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Rapat Koordinasi dan Fasilitasi di daerah (kali) / Jumlah laporan perjalanan dinas (naskah) | 200 kali / 185 laporan | Terbinanya hubungan koordinasi pembangunan dengan kabupaten/kota | 200 kali / 1 85 laporan | 150.000.000 | 177.572.000 | Disbudpar | baru |
| 1900 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Layanan Operasional Perkantoran (bulan) | 12 bulan | Terbayarnya honorarium pegawai honorer | 100% | 306.300.000 | 315.489.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| **02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur** | | | | | | **2.546.043.000** | **715.658.500** | | |
| 0700 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah pengadaan perlengkapan dan fasilitas perkantoran (unit) | 1 unit | Tersedianya sarana perkantoran | 1 unit | 131.000.000 | 134.930.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0900 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (unit) | 32 unit dan 184m² | Tersedianya sarana perkantoran | 32 unit dan 184m² | 229.025.000 | 235.895.750 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1000 | Kegiatan Pengadaan Meubelair | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran (unit) | 57 unit | Tersedianya sarana perkantoran | 57 unit | 79.875.000 | 82.271.250 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1100 | Kegiatan Pengadaan Peralatan Alat Informasi Mandiri | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah ketersedianya Alat Informasi Mandiri (AIM) dalam rangka promosi kepariwisataan | 9 unit | Tersedianya sarpras promosi kepariwisataan | 9 unit | 475.548.000 | 489.814.440 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1500 | Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah instalasi jaringan listrik dan telepon yang terpasang (paket) | 1 paket | Tersedianya prasarana penerangan dan komunikasi perkantoran | 1 paket | 351.175.000 | 361.710.250 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 2200 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah peningkatan layanan gedung (m2) | 1600m² | Tersedianya sarpras perkantoran | 1600m² | 491.620.000 | 506.368.600 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 2600 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Rekondisi sarana dan prasarana (unit) | 1 unit | Tersedianya sarpras perkantoran yang kondusif | 1 unit | 387.800.000 | 399.434.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 4200 | kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Jumlah peningkatan layanan gedung (m2) | 1600m² | Tersedianya sarpras perkantoran | 1600m² | 400.000.000 | 412.000.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| **03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **107.010.000** | **84.470.300** | | |
| | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pangkalpinang | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | **100%** | Jumlah pakaian khusus hasil pengadaan (stel) | 144 stel | Tersedianya seragam pegawai | 144 stel | 82.010.000 | 84.470.300 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Adfokasi Perencanaan penganggaran responsif Gender Prov Kep Babel | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | | | | | **297.600.000** | **306.528.000** | | |
| 4901 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Dalam dan luar daerah | Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 30 orang | Jumlah SDM Disbudpar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan teknis (orang) | 20 orang | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajemen pegawai | 20 orang | 297.600.000 | 306.528.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 06 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | | | | **983.139.000** | **1.012.633.170** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| 5101 | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | 7 kab/kota | Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi dan sinergitas perencanaan kebudayaan dan pariwisata daerah | 100% | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi target program & kegiatan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan program & kegiatan | 1 dokumen | 215.550.000 | 222.016.500 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 5800 | Kegiatan Perencanaan Kebudayaan & Pariwisata | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | Pulau Belitung & Pulau Bangka | Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi dan sinergitas perencanaan kebudayaan dan pariwisata daerah | 100% | Jumlah Dokumen Perencanaan | 6 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan | 6 dokumen | 599.956.000 | 617.954.680 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Kegiatan Pengembangan Database Kebudayaan dan Pariwisata | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien. | 7 kab/kota | Meningkatnya kualitas dan kuantitas koordinasi dan sinergitas perencanaan kebudayaan dan pariwisata daerah | 100% | Jumlah Verifikasi dan Validasi data kebudayaan dan kepariwisataan | 7 kab/kota | Tersedianya data kebudayaan dan pariwisata daerah yang up to date | 7 kab/kota | 167.633.000 | 172.661.990 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1 | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **21.522.099.500** | **15.247.223.585** | | |
| 1.17 | **Kebudayaan** | | | | | | | | | | **7.567.564.500** | **7.310.779.835** | | |
| | **Program Pengembangan Nilai Budaya** | | | | | | | | | | **1.534.706.000** | **1.580.747.180** | | |
| | Penyusunan Kebijakan tentang Budaya Lokal | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Cakupan Kajian Seni (target 50%) -Dokumenter | 13,33% | jumlah kajian Dokumenter Budaya Daerah | 4 dokumen | Tersedianya kajian ikon seni Bangka Belitung | 4 dokumen | 266.576.000 | 274.573.280 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 2600 | Peningkatan pelestarian tradisi | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Cakupan Kajian Seni (target 50%) - Revitalisasi | 13,33% | Jumlah Kajian Revitalisasi Budaya | 1 dokumen | Tersedianya kajian seni tradisi Bangka Belitung | 1 dokumen | 526.559.000 | 542.355.770 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) - Pemberian Bantuan | 47,62% | Jumlah event budaya daerah yang difasilitasi | 14 event | Terfasilitasinya event budaya daerah | 14 event | 741.571.000 | 763.818.130 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 17 | **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** | | | | | | | | | | **3.962.359.500** | **4.081.230.285** | | |
| 3300 | Pembinaan Kesenian dan Perfilman | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Cakupan Gelar Seni (target 75%) (Festival) | 33,33% | Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba dan pawai | 2 festival | Tersedianya ruang kreasi pelaku seni budaya | 2 festival | 1.500.000.000 | 1.545.000.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) - Pemberian Bantuan | 50,00% | Jumlah fasilitasi sarpras pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya daerah | 70 kali | Tersedianya sarpras bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya | 70 kali | 600.987.500 | 619.017.125 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 1900 | Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Misi Kesenian) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Jakarta, Sumatera | Misi Kesenian antar daerah (target 100%) - (pertukaran budaya, diplomasi, promosi) keluar daerah | 100% | Jumlah keikutsertaan pada even daerah, nasional, internasional yang difasilitasi | 5 event | Terlaksananya misi budaya daerah Babel di ajang nasional | 5 event | 1.298.314.000 | 1.337.263.420 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Seminar dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Cakupan Kajian Seni (target 50%) - Seminar | 13,33% | Jumlah peserta yang memahami kebudayaan daerah (orang) | 42 orang | Revitalisasi & Reaktualisasi budaya lokal | 42 orang | 227.330.000 | 234.149.900 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0300 | Penyelenggaan Dialog Kebudayaan (Lembaga Adat dan Dewan Kesenian) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Belitung | Cakupan Organisasi (target 34%) - Lembaga Adat/ Dewan Kesenian | 98,04% | Jumlah peserta yang memahami kebudayaan daerah (orang) | 130 orang | Tersedianya SDM yang memahami budaya daerah | 130 orang | 335.728.000 | 345.799.840 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | | | | | | | | | **644.416.500** | **337.733.395** | Disbudpar | |
| | Pengembangan dan Pemahaman atas Kekayaan Budaya Daerah | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya | 7 kab/kota | Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya | 100 orang | Meningkatnya Partisipasi pelestarian cagar budaya | 100 orang | 116.520.000 | 120.015.600 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pengelolaan Peninggalan Purbakala | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pangkalpinang | Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya | 7 kab/kota | Jumlah SDM yang mampu melakukan pelestarian CB/struktur/situs/ kawasan | 50 orang | Tersedianya pengelola cagar budaya | 50 orang | 157.745.000 | 162.477.350 | Disbudpar | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| | Pendukungan pengembangan kekayaan budaya daerah | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Muntok - Kab. Bangka Barat | Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya | 7 kab/kota | Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman | 1 Cagar Budaya | Terpeliharanya Cagar Budaya Daerah/Nasional | 1 Cagar Budaya | 170.151.500 | 175.256.045 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya daerah | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. | Kota Kapur - Kab. Bangka | Jumlah pengelolaan terpadu cagar budaya | 7 kab/kota | Jumlah lahan yang dimatangkan | 1 bangunan | Tersedianya lahan untuk pembangunan Pusat Informasi Kota Kapur | 1 bangunan | 200.000.000 | - | Disbudpar | sedang berjalan |
| | **18 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | | | | | | | | | **419.820.000** | **274.618.600** | Disbudpar | |
| 0500 | Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Drum Band Serumpun Sebalai) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | | Jumlah kebudayaan yang Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) (Bimbingan Organisasi) | 47,62% | Jumlah SDM yang difasilitasi | 38 orang | Tersedianya Drum Band Serumpun Sebalai | 1 Drumb Band Provinsi | **153.200.000** | 157.796.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0501 | Kegiatan Pengembangan Kerjasama Budaya (Dukungan Komunitas Budaya) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | | Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) - Pemberian Bantuan | 47,62% | Jumlah komunitas budaya yang difasilitasi | 10 komunitas | Terfasilitasinya komunitas budaya | 10 komunitas | **266.620.000** | 274.618.600 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | **21 Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya** | | | | | | | | | | **536.635.000** | **552.734.050** | | |
| 0100 | Kegiatan Peningkatan Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | | Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) - Kaderisasi | 47,62% | Jumlah peserta internalisasi nilai budaya dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa/kampanye jatidiri bangsa. | 156 orang | Meningkatnya rasa cinta tanah air dan budi pekerti siswa/ pelajar | **156 orang** | **536.635.000** | 552.734.050 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | **22 Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya** | | | | | | | | | | **469.627.500** | **483.716.325** | | |
| 0200 | Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Nilai Budaya | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | | Cakupan Fasilitasi Seni (target 30%) (Kaderisasi) | 47,62% | Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah | 161 orang | Meningkatnya wawasan kebangsaan & cinta tanah air siswa/ pelajar | 161 orang | 469.627.500 | 483.716.325 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | **2 Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | Disbudpar |
| | **2.04 Pariwisata** | | | | | | | | | | **13.954.535.000** | **7.936.443.750** | | **-** |
| | **15 Program Pemasaran Pariwisata** | | | | | | | | | | **5.100.372.000** | **4.299.601.100** | | |
| | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Eropa Barat | Tingkat kunjungan wisman | 8 persen wisman | Jumlah event promosi pariwisata internasional yang diikuti | 1 kali | Terpromosikannya pariwisata Babel pada pasar langsung luar negeri | 1 kali | 519.270.000 | 534.848.100 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 0501 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Bali, Batam, Palembang, Jakarta, Bandung | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 % wisnu & 8 % wisman | jumlah event Promosi Pariwisata luar daerah & dalam daerah yang diikuti | 4 Event nasional; 2 event daerah | Terpromosikannya pariwisata Babel pada pasar langsung dalam negeri dan dalam daerah | 4 Event nasional; 2 event daerah | 1.073.875.000 | 1.106.091.250 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 4000 | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (Roadshow Stakeholder Pariwisata) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 persen wisnu & 8 persen wisman | Jumlah mitra pariwisata yang difasilitasi | 300 orang | terselenggaranya promosi potensi pariwisata daerah melalui mitra pariwisata | 100% | 526.002.000 | - | 541782060 | Disbudpar |
| 3202 | Peningkatan Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus (Dukungan Promosi Even Pariwisata) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 persen wisnu & 8 persen wisman | Jumlah Event Promosi Pariwisata Daerah yang didukung | 3 event | Terselenggaranya event promosi pariwisata daerah | 3 event | 822.410.000 | 847.082.300 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 4100 | Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 persen wisnu & 8 persen wisman | Jumlah media cetak, media elektronik, media ruang, media digital | 5.000 leaflet, 5.000 DVD Pariwisata, 2.100 Goodie Bag, 5.000 booklet | Tersedianya media cetak, media elektronik, media ruang, media digital untuk promosi pariwisata daerah | 5.000 leaflet, 5.000 DVD Pariwisata, 2.100 Goodie Bag, 5.000 booklet | 751.305.000 | 773.844.150 | Disbudpar | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 |
| 9700 | Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Pangkalpinang | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 100% | 1 Website, 2 AIM, 60 Artikel 60 halaman naskah | 1 Website, 2 AIM, 60 Artikel 60 halaman naskah | tersedianya data dan informasi kepariwisataan babel yang dapat diakses publik | 1 Website, 2 AIM, 60 Artikel 60 halaman naskah | 97.650.000 | 100.579.500 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 4001 | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata (TIC) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Bandara Depati Amir- Bangka dan bandara Hanadjuddin - Belitong | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 persen wisnu & 8 persen wisman | Jumlah TIC yang dikelola | 2 unit | Tersedianya pusat informasi turis di pintu masuk daerah | 2 unit | 799.860.000 | 823.855.800 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Publikasi Tahun 2016 | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Tingkat kunjungan wisnu & wisman | 9 persen wisnu & 8 persen wisman | Jumlah publikasi | 1 paket | Tersedianya informasi event kebudayaan dan pariwisata daerah | 1 paket | 110.000.000 | 113.300.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Fasilitas Dukungan Event Gerhana Matahari total | | | | | | | | | | 400.000.000 | | | |
| 16 | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | | | | **ra** | | | | | | **6.234.452.000** | **1.350.540.320** | | |
| | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | 7 kab/kota | Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata | 6 destinasi pariwisata unggulan | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata | 100 orang | Fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan homestay | 100 orang | 504.500.000 | 519.635.000 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata (Lomba Pokdarwis dan Desa Wisata) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | 7 kab/kota | Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata | 6 destinasi pariwisata unggulan | Jumlah kelompok sadar wisata dan desa wisata yang difasilitasi | 7 pokdarwis dan 7 desa wisata | Fasilitasi Pokdarwis dan desa wisata | 7 pokdarwis dan 7 desa wisata | 267.913.000 | 281.308.650 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata | 6 destinasi pariwisata unggulan | Jumlah masyarakat yang mendapat bimtek pengelolaan homestay | 90 orang | Fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan homestay | 90 orang | 275.739.000 | 284.011.170 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 2700 | Pengembangan Usaha dan Produk Pariwisata (Review Pembuatan Paket Wisata Bangka Belitung) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah. | Pulau Bangka & Pulau Belitung | Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata | 6 destinasi pariwisata unggulan | Jumlah Mitra Pariwisata yang dilatih | 60 orang | Fasilitasi Mitra Pariwisata | 60 orang | 257.850.000 | 265.585.500 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh. | Pulau Bangka | Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata | 6 destinasi pariwisata unggulan | Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata (lokasi) | 1 lokasi | Tersedianya destinasi pariwisata di DPN | 1 lokasi | 4.928.450.000 | | Disbudpar | baru |
| 17 | **Program Pengembangan Kemitraan** | | | | | | | | | | **2.219.711.000** | **2.286.302.330** | **0** | |
| 0302 | Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | pulau Bangka | Meningkatnya Kapasitas SDM Kebudayaan & Pariwisata | 1000 orang | Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan | 40 orang | Terpilihnya Putra/Putri Pariwisata tingkat nasional | 1 pasang dan 3 orang putri | 930.672.000 | 958.592.160 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan (Sertifikasi Profesi Sumber Daya Manusia) | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | 7 kab/kota | Meningkatnya Kapasitas SDM Kebudayaan & Pariwisata | 1000 orang | Jumlah SDM sektor pariwisata yang disertifikasi (Orang) | 300 orang | Fasilitasi sertifikasi SDM sektor pariwisata | 300 orang | 1.125.448.000,00 | 1.159.211.440 | Disbudpar | sedang berjalan |
| | Pengembangan SDM di bidang budpar bekerjasama dengan lembaga lainnya | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja. | Pulau Bangka & Pulau Belitong | Meningkatnya Kapasitas SDM Kebudayaan & Pariwisata | 1000 orang | Jumlah Lembaga/organisasi Kepariwisataan yang difasilitasi | 2 lembaga | Fasilitasi lembaga/ organisasi kepariwisataan daerah | 2 lembaga | 163.591.000 | 168.498.730 | Disbudpar | sedang berjalan |
| 18 | **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif** | | | | | | | | | | **400.000.000** | **-** | **0** | |
| | festival laskar Pelangi | | | | | | | | | | 400.000.000 | - | Disbudpar | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 18.712.696.450 | 19.848.230.170 | | |
| 030 | Belnja Rutin | | | | | | | | | | 5.037.865.000 | 3.578.790.000 | | |
| 01.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 2.612.915.000 | 2.760.790.000 | | |
| 0101 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket/Pengiriman | 12 bulan | Lancarnya Pengiriman Paket dan Surat Untuk Keperluan Kantor | 12 bulan | 19.050.000 | 21.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0102 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya Jasa listrik Telekomunikasi dan Informasi | 12 bulan | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 bulan | 213.600.000 | 225.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0107 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan | 12 bulan | Lancarnya Kinerja Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan | 12 bulan | 153.540.000 | 153.540.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0108 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Kebersihan dan Kerapihan Kantor | 12 bulan | 72.000.000 | 75.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0109 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Ketersediaan peralatan kerja | 12 bulan | Peralatan kerja dapat diperbaiki dan dipergunakan | 12 bulan | 60.000.000 | 60.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0110 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 150.000.000 | 160.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0111 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya kegiatan percetakan dan pengadaan | 12 bulan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 bulan | 78.000.000 | 80.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0112 | Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan | 12 bulan | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12 bulan | 30.000.000 | 35.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0113 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur | 100% | Printer dan peralatan komputasi lainnya | 1 paket | Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran | 100% | 186.950.000 | 200.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0115 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Surat Kabar Majalah dan Buku Perpustakaan Sebagai Sarana Informasi | 12 bulan | Bertambahnya Informasi Yang Diterima Pegawai | 12 bulan | 40.000.000 | 40.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0116 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan logistik kantor | 12 bulan | Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor | 100% | 32.525.000 | 33.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0117 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Makanan dan minuman rapat | 12 bulan | Terpenuhinya Tersedianya makanan dan minuman rapat | 100% | 62.000.000 | 63.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0118 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah | 12 bulan | Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah | 100% | 400.000.000 | 650.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 119 | Koordinasi, Konsilidasi di Dalam Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah | 12 bulan | Lancarnya koordinasi Konsultasi ke Pusat dan antar daerah | 100% | 150.000.000 | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Operasional Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 45 Orang | Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 45 Orang | 965.250.000 | 965.250.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 01.01.02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **2.313.155.000** | **705.000.000** | | |
| 0222 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur | 100% | Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan GOR | 12 bulan | Tercapainya pemeliharaan rutin gedung kantor dan GOR | 12 bulan | 315.600.000 | 350.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0224 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | | 100% | Keterlaksanaan Pemeliharaan Kendaraan DInas/ Operasional | 4 unit mobil; 3 unit motor | Kendaraan dinas/ operasional kantor yang terpelihara dan dapat digunakan | 4 unit mobil; 3 unit motor | 273.130.000 | 290.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0230 | Pemeliharaan berkala gedung PPLP | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur | 100% | Pemeliharaan Berkala Gedung PPLP | 12 bulan | Tercapainya pemeliharaan rutin gedung PPLP | 12 bulan | 59.950.000 | 65.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur | 100% | Terslaksananya Kendaraan Dinas/Operasional | 2 unit mobil; 6 unit motor | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | 2 unit mobil; 6 unit motor | 710.275.000 | 0 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | Pengadaan Mesin Genset | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase penyediaan dan pemeliharaan saran dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya Pengadaan Mesin Genset | 1 Set | Tersedianya Mesin Genset | 1 Set | 954.200.000 | 0 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 01.01.03 | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **73.795.000** | **75.000.000** | | |
| 0302 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | 1 kegiatan | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | 1 kegiatan | 48.795.000 | 50.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 0310 | Advokasi perencanaan penganggaran resnponsif gender | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | Menyusun dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) | 1 dokumen | Tersusunnya dokumen perencanaan yang responsif gender | 1 dokumen | 25.000.000 | 25.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 01.01.06 | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD** | | | | | | | | | | **38.000.000** | **38.000.000** | | |
| 06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat transparan akuntabel dan efisien. | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Persentase peningkatan disiplin aparatur | 100% | Tersedianya Laporan Dinas | 6 Laporan | Terpenuhinya dan Terlaksananya Laporan Dinas | 6 Laporan | 38.000.000 | 38.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **13.674.831.450** | **16.269.440.170** | | |
| 01.18.16 | **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** | | | | | | | | | | **1.695.155.000** | **1.842.435.500** | | |
| 1611 | Seleksi Pertukan Pemuda Antar Negara (PPAN) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Luar daerah | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 100% | Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel | 35 Org | Terpilihnya Wakil Bangka Belitung dalam Pertukaran Pemuda Antar Negara | 5 Orang | 163.925.000 | 180.317.500 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1612 | Seleksi Kapal Pemuda ASEAN (KPA) dan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Luar daerah | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 100% | Terseleksinya pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka belitung yang akan dikirim ke tingkat nasional | 42 Org | Para pemuda pemudi Provinsi Kepulan Bangka Belitung | 6 Orang | 188.690.000 | 207.559.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1613 | Pendidikan Kesadaran dan Bela Negara Tk. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 100% | Pemuda yang memiliki sikap demokrasi dan membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI | 100 Org | Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100 Orang | 423.530.000 | 465.883.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1614 | Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 100% | Pelajar dan Mahasiswa yang dapat Mengimplementasikan dalam lingkungan sekitar | 1 kegiatan | Para pemuda pemudi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 Orang | 223.365.000 | 245.701.500 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1615 | Kajian Akademik dan Penyiapan Draft Rancangan Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel dan Luar daerah | Jumlah Peraturan Daerah | 100% | Tersedianya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan | 1 Peraturan Daerah | Peraturan Daerah tentang Kepemudaan | 1 Peraturan Daerah | 248.800.000 | 273.680.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1706 | Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terselenggaranya Pelatihan dan Fasilitasi Pemuda Bidang Kewirausahaan Pemuda | 100% | Pemuda Pelopor Bangka Belitung yang dikirim ke tingkat Nasional | 10 org | Meningkatnya dan bertambah Pemuda Pelopor Bangka Belitung yang dikirm ke tingkat Nasional | 10 Orang | 62.995.000 | 69.294.500 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1617 | Jambore Pemuda Daerah (JPD) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda | 100% | Terlaksananya silahturahmi antara pemuda Indonesia | 80 Org | Pemuda berusia 16-30 tahun | 80 Org | 383.850.000 | 400.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.17** | **Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda** | | | | | | | | | | **800.480.000** | **880.528.000** | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1703 | Penyusunan Dokumen Informasi Akses Modal Pengusaha Muda | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan data jumlah dan jenis bidang Wirausaha Muda | 100% | Database Jumlah dan Jenis Wirausaha Muda | 1 kegiatan | Tersedianya Database jenis dan jumlah Wirausaha Muda, serta terbentuknya Forum Kelembagaan Jaringan Wirausaha Muda | 1 dokumen | 172.030.000 | 189.233.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1704 | Pendidikan Kewirausahaan Pemuda | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terselenggaranya Pelatihan Wirausaha dan Keterampilan Membaca Peluang Bisnis | 100% | Pemuda yang terlatih dibidang Wirausaha | 1 kegiatan | Terlatihnya Wirausahaan Pemuda di Provinisi Kepulauan Bangka Belitung | 40 Orang | 135.460.000 | 149.006.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1705 | Pelatihan Pengelolaan Permodalan Pemuda | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terbentuknya Jaringan Permodalan antara Pelaku Wirausaha Pemuda dan Stakeholder | 100% | Terbentuknya Jaringan Permodalan antara Pelaku Wirausaha Pemuda dan Stakeholder | 1 kegiatan | Meningkatnya kemampuan dalam pengelolaan permodalan bagi para pelaku wirausaha pemuda dan memberikan solusi dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menekan angka pengangguran | 40 Orang | 130.600.000 | 143.660.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1707 | Sosialisasi dan Gelar Karya Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Peserta PSP3 | 100% | Meningkatnya Kapasitas dan Kulaitas Peserta PSP3 | 7 Kabupaten/ Kota | Meningkatnya Kapasitas dan Kulaitas Peserta PSP3 | 120 Orang | 362.390.000 | 398.629.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.18** | **Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba** | | | | | | | | | | **134.280.000** | **147.708.000** | | |
| 1802 | Pelatihan penanggulangan bahaya narkoba dan AIDS | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | Jumlah pemuda yang mengikuti penyuluhan tentang bahaya narkoba | 100% | Pemuda/i Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kep. Babel | 1 kegiatan | Meningkatkan Pengetahuan Tentang Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS | 35 Orang | 134.280.000 | 147.708.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.19** | **Program Kebijakan dan Manajemen Olah Raga** | | | | | | | | | | **542.270.000** | **602.278.000** | | |
| 1908 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel | Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga | 100% | Pegawai DISPORA | 1 kegiatan | Tersedianya laporan monev Program dan Kegiatan | 4 Kegiatan/Bulan | 223.050.000 | 250.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1909 | Rapat koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel | Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga | 100% | Terciptanya laporan monev dan peloporan Dinas Pemuda dan Olahraga | 1 kegiatan | Dinas yang menangani kepemudaan dan keolahragaan di 7 kab/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 kegiatan | 226.240.000 | 250.000.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 1910 | Penyusunan Profil Bidang Olahraga dan Kepemudaan DISPORA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel | Jumlah Rakor dan Workshop Olahraga | 100% | Tersedianya buku profil bidang olahraga dan pemuda | 1 dokumen | Tersedianya data bidang olahraga dan kepemudaan | 1 dokumen | 92.980.000 | 102.278.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.20** | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** | | | | | | | | | | **6.883.563.750** | **8.815.499.700** | | |
| 2011 | Pengembangan Olahraga Rekreasi | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel | a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia | 100% | Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan | 44 Kali | Pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat | 25 Orang | 465.919.500 | 512.511.450 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2018 | Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat PPLP & PPLPD | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kep. Babel dan Luar daerah | Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) | 100% | Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan | 7 Cabang Olahraga | Pelajar Berprestasi | 12 Mendali | 1.457.800.000 | 1.603.580.000 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2019 | Penyelenggaraan Perlombaan Olahraga Rekreasi, Tradisional Tingkat Provinsi | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia | 100% | Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan | 3 Kategori | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | 29 Orang | 147.147.750 | 161.862.525 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2020 | Pemberangkatan Kontingen Olahraga, Rekreasi & Trdisional Ke Tingkat Nasional | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bnagka Belitung dan Luar Daerah | a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia | 100% | Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan | 2 Cabang | Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Peringkat 10 Besar | 608.858.250 | 669.744.075 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2022 | Training Camp (TC) POPWIL I Sumatera | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) | 100% | Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga | 1 kegiatan | Atlet Pelajar | 115 Orang | 1.118.356.000 | 1.230.191.600 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2023 | Pengiriman kontingen POPWIL I Sumatera | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Luar daerah | Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) | 100% | Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga | 1 kegiatan | Atlet Pelajar | 10 Medali | 1.259.129.000 | 1.385.041.900 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026 | Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Pelajar VIII | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Kabupaten Bangka Tengah | Penyelenggaraan dan partisipasi even olahraga (POPDA Kejurda POPWIL POPNAS POPCANAS Olahraga Rekreasi SKJ dan HAORNAS) | 100% | Meningkatkan kerjasama dengan daerah dan lembaga lain dalam pengembangan lain dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan | 8 cabang olahraga | Atlet Pelajar | 115 Orang | 1.264.534.500 | 1.390.987.950 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2028 | Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia | 100% | Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga | 1 kegiatan | Pelajar | 10 Orang | 271.184.500 | 298.302.950 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2029 | Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | a. Memberdayakan masyarakat memulai keterlibatan secara aktif dalm pembangunan, b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia | 100% | Meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga | 1 kegiatan | Pelajar Tk. SMP dan SMA sederajat | 54 Orang | 290.634.250 | 319.697.675 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.21** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga** | | | | | | | | | | **2.216.980.700** | **2.438.678.770** | | |
| 2108 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Panjat Tebing Tahap II | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Pembangunan sehingga membuka | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Arena Sport Center | 100% | Tersedianya Sarana dan Prasarana Panjat Tebing (dinding) | 3 paket sapras panjat tebing | Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana panjat Tebing (dinding) | 3 paket sapras panjat tebing | 1.799.630.700 | 1.979.593.770 | Sedang berjalan | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2109 | DED Pembangunan Lintasan dan lapangan Atletik | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Penunjang Pembangunan sehingga membuka | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Arena Sport Center | 100% | Tersedianya DED Pembangunan lintasan dan Lapangan Atletik | 2 laporan | DED Pembangunan lintasan dan Lapangan Atletik | 2 laporan | 417.350.000 | 459.085.000 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| **01.18.22** | **Program Pembinaan Generasi Muda** | | | | | | | | | | **1.402.102.000** | **1.542.312.200** | | |
| 2201 | Seleksi Paskibraka tingkat nasional dan tingkat Provinsi Kepulauan bangka belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Para Siswa SLTA Kab/Kota | 1 Kegiatan | Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi | 32 Orang | 292.835.000 | 322.118.500 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 2202 | Pelaksanaan Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | 1. a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung. b. Terlibatnya masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. c. Meningkatnya Kepercayaan Terhadap Kulaitas Pelayanan Pemerintah | Pangkalpinang | 1. Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan pembinaan generasi muda 2. Terselenggaranya pelaksanaan paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Para Siswa SLTA Kab/Kota | 1 Kegiatan | Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional dan Tk. Provinsi dan Nasional | 32 Orang | 1.109.267.000 | 1.220.193.700,00 | Baru | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 7.867.977.000,00 | 8.927.062.000,00 | | |
| 1 | Urusan Rutin | | | | | | | | | | 3.332.977.000,00 | 3.667.062.000,00 | | |
| 1 19 01 01 | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Provinsi Kep. Babel** | | | | | | | **1.616.920.000** | **1.778.612.000** | | |
| 1 19 01 01 0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Memperlancar Ekspedisi Surat Menyurat dan Biaya Pajak Tetap | | Pengiriman Barang/ Jasa Surat Menyurat, Materai Lebih Efektif | | 24.500.000 | 26.950.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam menunjang kerja Aparatur | | Pekerjaan Aparatur menjadi lebih efektif dan efisien | | 175.000.000 | 192.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 0300 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Tersedianya Peralatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Pekerjaan Aparatur menjadi lebih efektif dan efisien | | 45.000.000 | 49.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan selama 12 Bulan | | Pekerjaan Aparatur menjadi lebih efektif dan efisien | | 114.420.000 | 125.862.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Tersedianya Bahan Kebersihan Kantor selama 12 Bulan | | Terpeliharanya Kebersihan Kantor selama 12 bulan | | 45.000.000 | 49.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan | | Pelaksanaan Administrasi menjadi lancar | | 125.000.000 | 137.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan | | Pelaksanaan Administrasi menjadi lancar | | 50.000.000 | 55.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya komponen Instalasi Listrik selama 12 Bulan | | Terpeliharanya Instalasi Listrik selama 12 bulan | | 25.000.000 | 27.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya Kebutuhan Bacaan dan Peundangan-undangan sebagai sumber informasi | | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran menjadi lancar | | 80.000.000 | 88.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor selama 12 bulan | | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran menjadi lancar | | 25.000.000 | 27.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman | | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran menjadi lancar | | 85.000.000 | 93.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1800 | Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berjalan lancar | | 400.000.000 | 440.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terbayarnya Jasa Administarsi Perkantoran | | Kebersihan dan Keamanan Kantor Terjaga | | 273.000.000 | 300.300.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 01 5000 | Koordinasi dan Pengumpulan Data Kesbangpol | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Data Kesbangpol | | Koordinasi dan pengumpulan data kesbangpol | | 150.000.000 | 165.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | Provinsi Kep. Babel | | | | | | | **1.479.500.000** | **1.627.450.000** | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 19 01 02 | 0700 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor | | 50.000.000 | 55.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 0900 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | Tersedianya Peralatan Gedung Kantor | | 150.000.000 | 165.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 1000 Pengadaan Meubelair | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Meubelair | | Tersedianya Meubelair berupa 2 Lemari Arsip, 55 Buah Kursi Rapat | | 100.000.000 | 110.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 0500 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | | Tersedianya 1 (satu) unit Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) dan 11 (sebelas) unit kendaraan roda 2 (dua) | | 425.000.000 | 467.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | |
| 1 19 01 02 | dst Pengadaan Rumah Genset | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksanya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Rumah Genset | | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran menjadi lancar | | 100.000.000 | 110.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | |
| 1 19 01 02 | 2200 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksanya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | | Terpeliharanya Gedung kantor | | 150.000.000 | 165.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 2400 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional | | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional | | 340.500.000 | 374.550.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 2800 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor | | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor | | 72.000.000 | 79.200.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 2600 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor | | Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor | | 65.000.000 | 71.500.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 02 | 2900 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Meubelair | | Terpeliharanya Meubelair | | 27.000.000 | 29.700.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| **1 19 01 03** | **Program Peningkatan Disilin Aparatur** | Provinsi Kep. Babel | | | | | | | | | **110.000.000** | **121.000.000** | | |
| 1 19 01 03 | 0200 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | Tersedianya 50 Stel Pakaian Linmas, 50 Stel PDH, 50 Stel Baju batik. | | 80.000.000 | 88.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 03 | 0500 Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari Tertentu | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | | Tersedianya 50 Stel Baju Karnaval | | 30.000.000 | 33.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | |
| **1 19 01 05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | Provinsi Kep. Babel | | | | | | | | | **100.000.000** | **110.000.000** | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | 19 01 05 | 9935 | Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Kesbangpol | | | | Aparatur Badan Kesbangpol | 100,00% | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Teknis | | Aparatur yang memiliki kemampuan teknis | | 100.000.000 | 110.000.000 | Badan Kesbangpol Prov. Kep. Babel | Sedang Berjalan |
| **1** | **19 01 03** | | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **26.557.000** | **30.000.000** | | |
| 1 | 19 01 03 | 2500 | Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Pengganggaran Resfonsif Gender | | | Prov.Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya Fasilitas dan Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Badan Kesatuan Banngsa dan Politik di Daerah | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Pengetahuan Penerapan dalam Pelaksanaan Gender bagi Masyarakat dan Aparatur | 7 Kab/Kota | Meningkatnya peran masyarakat dan Aparatur dalam Penerapan dan Pelaksanaan Gender di daerah | 7 Kab/Kota | 26.557.000 | 30.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| 1 | 19 01 06 | | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | 847.924.000 | 932.716.400 | | |
| 1 | 19 01 06 | 0100 | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Prov.Kep .Bangka Belitung | Terlaksananya Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja | 4 Laporan | Tersedianya Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4 Laporan | 52.250.000 | 57.475.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| 1 | 19 01 06 | 0400 | Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | Prov.Kep .Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kep. Bangka Belitung yang disusun | 3 Dokumen | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kep. Bangka Belitung | 3 Dokumen | Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 Dokumen | 52.250.000 | 57.475.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| 1 | 19 01 06 | 4801 | Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol se Provinsi Kep. Bangka Bellitung | | | Kabupaten Bangka Barat | Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota pada Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol se Provinsi Kep. Bangka Belitung | 7 Usulan | Jumlah Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota yang dihasilkan Pada Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol se Provinsi Kep. Bangka Belitung | 7 Usulan | Tercapainya Sinkronisasi Program dan Kegiatan pada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | 225.874.000 | 248.461.400 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| 1 | 19 01 06 | 4802 | Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Badan KesbangPol | | | Prov.Kep .Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Badan Kesbangpol Prov. Kep. Bangka Belitung | 2 Dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan tahunan Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD ) | 2 Dokumen | Tersusunnya Dokumen Perencanaan tahunan Renja SKPD, TAPKIN, RKA SKPD ) | 2 Dokumen | 145.200.000 | 159.720.000 | Badan KesbangPol | Sedang berjalan |
| 1 | 19 01 06 | 6500 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.Kep. Bangka Belitung | | | Prov.Kep .Bangka Belitung | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monev Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Se-Prov.Kep. Babel | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen yang dihasil pada Pelaksanaan Monev Badan Kesatuan bangsa dan Politik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | Meningkatnya Pengelolahan Administrasi Urusan KesbangPol semakin Efektif, Transparan dan Kuntabel | 100% | 271.150.000 | 298.265.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 19 01 06 6600 | Kegiatan Koordinasi dan Suvervisi Bidang Perencanaan | | | Prov.Kep .Bangka Belitung | Terlaksananya Koordinasi dan Pengumpulan Data Koordinasi dan Suvervisi Kegiatan Badan KesbangPol 7 Kabupaten/ Kota | 1 Laporan | Tersedianya Data Koordinasi dan Suvervisi Kegiatan Badan KesbangPol 7 Kabupaten/Kota | 1 Laporan | Meningkatnya Koordinasi dan Pengumpulan Data Koordinasi dan Suvervisi Kegiatan pada Badan kesatuan Bangsa dan politik di Kab/Kota | 100% | 101.200.000 | 111.320.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| | **WAJIB** | | | | | | | | | | **4.535.000.000,00** | **5.260.000.000,00** | | |
| **1 19 1 16** | **Program Pemeliharaan dan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan** | | **Meningkatnya daya tanggap dalam deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi konflik** | **75%** | | | | | **1.550.000.000** | **1.705.000.000** | | |
| 1 19 01 16 0900 | Penguatan Fungsi Intelijen Aparatur Kesbangpol | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Kab/Kota Prov. Kep. Babel | terciptanya sinergitas dan kebersamaan yang harmonis antara aparat keamanan dengan pemerintah serta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban | 100% | Terlaksananya Fungsi Intelijen Kesbangpol | 100% | Tersedianya Input bagi daerah dalam mengambil keputusan | 100% | 630.000.000 | 693.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 16 3000 | Pelatihan penanganan konflik bagi aparatur | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Aparatur | 40 Orang | Meningkatkan Wawasan aparatur dalam menghadapi konflik | 40 Orang | Tercwujudnya situasi yang kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 40 Orang | 140.000.000 | 154.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 16 dst | Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Aparatur | 100% | Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri | 100% | Terciptanya situasi Kamtibmas kondusif di Masyarakat | 100% | 730.000.000 | 803.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 16 dst | Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang Intelijen Aparatur Kesbangpol | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Aparatur | 100% | Memperlancar pelaksanaan operasional Komunite Intelijen Daerah (KOMINDA) | 100% | Terlaksananya Fungsi Intelijen Kesbangpol | 100% | 50.000.000 | 55.000.000 | Badan Kesbangpol | Baru |
| **1 19 1 17** | **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan** | | **Peningkatan Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan** | **100%** | | | | | **1.165.000.000,00** | **1.460.000.000** | | |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 19 1 17 2100 | Kegiatan Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | pangkalpinang | Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama | | Terbentuknya Kepengurusan PPWK se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Terbinanya Kepengurusan PPWK se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 540.000.000 | 600.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 1 17 2300 | Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta generasi muda | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | pangkalpinang | Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama | | Terlaksananya Kegiatan Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta generasi muda | | Meningkatkan pemahaman dalam penguatan wawasan kebangsaan bagi Aparatur, Akademisi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta generasi muda | | 395.000.000 | 500.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 1 17 dst | Kegiatan Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel | Perorangan, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Desa/Kel | | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Pembauran Kebangsaan | | Terpilihnya Juara I, II dan III Penerima Penghargaan Pembauran Kebangsaan | | 230.000.000 | 360.000.000 | Badan Kesbangpol | Baru |
| **1 19 01 18** | **Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan** | **pangkalpinang** | **Tumbuhnya rasa solidaritas antar sesama umat dalam berkehidupan berbangsa** | **100%** | | | | | **300.000.000** | **380.000.000** | **Badan Kesbangpol** | **Sedang Berjalan** |
| 1 19 01 18 0600 | Kegiatan Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | pangkalpinang | Aparatur dan Tokoh Masyarakat | | Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan | | Terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan | | 95.000.000 | 105.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 18 0700 | Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Belitung Timur | Aparatur dan Tokoh Masyarakat | | Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | Miningkatkan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 205.000.000 | 275.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| **1 19 01 19** | **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama** | | **Meningkatnya Pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman** | **100%** | | | | | **750.000.000** | **825.000.000** | | |
| 1 19 xx 19 dst | Sosialisasi Kewaspadaan Dini Bagi Aparatur Pemerintah dalam Menghadapi Potensi Ancaman | Peningkatan manajemen pemerintahan Aparatur dan Masyarakat | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Pangkalpinang | Aparatur dan Masyarakat | 40 Orang | Menongkatkan Wawasan Aparatur yang siap menghadap[I segala potensi ancaman | 40 Orang | Tersediannya aparatur yang siap menghadapi segala potensi ancaman | 40 Orang | 120.000.000 | 132.000.000 | Badan Kesbangpol | Baru |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 19 xx 19 dst | Simulasi Penanganan Konflik | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Kab/Kota Prov. Kep. Babel | Aparatur dan Masyarakat | 100 Orang | Terlaksananya Kegiatan Simulasi Penanganan Konflik | 60 Orang | Terminimalisirnya dampak potensi konflik | 60 Orang | 175.000.000 | 192.500.000 | Badan Kesbangpol | Baru |
| 1 19 xx 19 dst | Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabaupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Kab/Kota Prov. Kep. Babel | Aparatur dan Masyarakat | 60 Orang | Terlaksananya Sosialisasi Radikal Terorisme di 7 (tujuh) Kabaupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 60 Orang | Meningkatkan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Dinamika Perkembangan Radikalisasi Terorisme | 60 Orang | 455.000.000 | 500.500.000 | Badan Kesbangpol | Baru |
| **1 19 01 21** | **Program Pendidikan Politik Masyarakat** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningakatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah** | | **Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik** | **70%** | | | | | **570.000.000,00** | **670.000.000,00** | | |
| 1 19 01 21 0600 | Kegiatan Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Partai Politik dan Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintah dan Partai Politik (KPPP) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningakatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Penguatan kapasitas Partai Politik dan Literatur untuk evaluasi kinerja bidang politik dalam negeri | 100% | Tersalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan database kelembagaan | 11 (sebelas) Partai Politik | Terverikasikan 11 (sebelas) Partai Politik yang mendapatakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan data base kelembagaan politik partai politik | 11 (sebelas) Partai Politik dan 10 buku yang menjadi literatur untuk evaluasi kinerja | 150.000.000,00 | 70.000.000,00 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 21 1600 | Kegiatan Fasilitasi Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningakatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tercapainya Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia di Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | Hasil IDI 2015 dan 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peningkatan Pemahaman Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70% | Meningkatnya Hasil IDI 2015 dam Memahami Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70/100=30% | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 | Badan Kesbangpol | Sedang Berjalan |
| 1 19 01 21 dst | Kegiatan Bintek pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningakatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Penguatan kapasitas pelaporan Partai Politik | 40 orang | Tercapaiannya Pelaporan bantuan keuangan yang baik bagi Partai Politik | 40 orang | jumlah peserta yang memahami pelaporan bantuan keuangan yang baik partai politik | 40 orang | 70.000.000,00 | 200.000.000,00 | Badan Kesbangpol | Baru |
| **1 19 01 dst** | **Program Kemitraan Kamtibnas** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **semakin tebukanya lintas desa/kecamatan. Lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas negara** | | meningkatnya pemahaman dalam menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat | 100% | | | | | **200.000.000** | **220.000.000** | | **Baru** |

| Kode Urusan Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| -1 | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 19 01 dst dst | Pemetan Daerah Rawan Konflik | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | semakin tebukanya lintas desa/kecamatan. Lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional, dan lintas negara | Provinsi Kep. Bangka Belitung | terlibatnya Aparatur dan Masyarakat dalam pemetaan daerah rawan konflik | 100% | Terpetanya Daerah Rawan Konflik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersediannya Peta data Daerah Rawan Konflik untuk mengantisipasi terjadinya konflk sosial | 100% | 200.000.000 | 220.000.000 | Badan Kesbangpol | Baru |
| **1 19 01 32** | **Program Peningkatan Ketahanan ekonomi, budaya, agama, kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan** | | **1. Meningkatnya hubungan teoleransi antar umat beragama. 2. Terciptanya Stabilitas Ketahanan Ekonomi. 3. Meningkatnya peran ormas dalam masyarakat.** | **100%** | | | | | **450.000.000** | | | |
| 1 19 01 32 0100 | Monitoring dan Evaluasi Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Dalam Daerah dan Luar Daerah Propinsi Kepulauan Bangka belitung | Jumlah data Monitoring dan Evaluasi Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan | 4 Dokumen | tersedianya data Monitoring dan Evaluasi Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan | 2 Dokumen | Meningkatnya jumlah data-data Bidang ketahanan Ekonomi, seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan | 2/4= 50% | 300.000.000 | 350.000.000 | Badan Kesbangpol | Sedang berjalan |
| 1 19 01 32 dst | Sosialisasi UU, Peraturan Pemerintah, Permendagri tentang Organisasi Masyarakat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruhn proses pembangunan | Propinsi Kep. Bangka Belitung | Jumlah Oramas dan Aparatur yang Mengikuti Sosialisasi | 100 Ormas dan 14 Aparatur | Jumlah ormas dan aparatur yang memahami tentang UU ormas | 100 Ormas dan 14 Aparatur | Meningkatnya jumlah ormas dan aparatur yang memahami tentang UU ormas | 100 Ormas dan 14 Aparatur | 150.000.000 | 175.000.000 | Badan Kesbangpol | Baru |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **SATPOL PP** | | | | | | | | | | **14.828.669.980** | **13.664.198.570** | | |
| **1,19** | **Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** | | | | | | | | | | **14.828.669.980** | **13.664.198.570** | | |
| 01 | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | 14.828.669.980 | 13.664.198.570 | | |
| **URUSAN WAJIB YANG BIASA DILAKSANAKAN SKPD** | | | | | | | | | | | **8.297.503.700** | **11.461.965.570** | | |
| **1.19.03.01** | **Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **4.057.639.700** | **7.720.025.170** | | |
| 1.19.03.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jumlah Materai, Paket Pengiriman dan Honorarium Staf Pengelola arsip | 700 materai, 12 kali pengiriman paket, honorarium pengelola arsip | Tercapainya Kelancaran Administrasi Perkantoran Secara Maksimal | 100% | 11.450.000 | 12.595.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jasa Telepon, Listrik dan Internet | 12 bulan pembayaran Lisrik, telepon dan internet | Terpenuhinya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | 24.000.000 | 26.400.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.0300 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | | | Pangkalpinang | Pengadaan Barang penunjang administrasi perkantoran | 100% | jumlah peralatan dan perlengkapan kantor | meningkat | Meningkatnya perlengkapan dan peralatan kantor | 100% | 199.990.000 | 219.989.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.0400 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kecelakaan Satpol PP | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jasa Asuransi untuk Anggota Satpol PP | 12 Bulan Asuransi kecelakaan dan kesehatan | Meningkatnya kinerja anggota Satpol PP | 210 anggota terproteksi jasa asuransi | 56.250.000 | 61.875.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Honorarium Penata Kelolaan Keuangan SKPD | 12 bulan | Tercapainya Kelancaran Administrasi Keuangan SKPD | 100% | 157.260.000 | 172.986.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | jumlah peralatan dan bahan pembersih | Peralatan Kebersihan selama 12 Bulan dan Bahan Pembersih | Terjaganya kebersihan dan keindahan Kantor Satuan Polisi pamong Praja | 100% | 11.710.200 | 12.881.220 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | tersedia alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Terpenuhinya Kebutuhan ATK untuk Pelayanan Administrasi Satuan polisi Pamong Praja | 100% | 104.428.500 | 114.871.350 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | Terpenuhinya barang cetakan untuk kebutuhan Administrasi Satuan Polisi Pamong praja | 100% | 41.315.000 | 45.446.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1100 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang Undangan | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Bahan bacaan | 12 bulan | Terpenuhinya bahan bacaan untuk kebutuhan Administrasi Satuan Polisi Pamong praja | 100% | 72.740.000 | 45.446.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | tersedia komponen instalasi listrik/ penerangan kantor | 12 bulan | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 100% | 12.480.000 | 13.728.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya isi ulang Tabung Gas dan Isi Ulang Air Galon | 12 kali pengisian untuk tabung gas dan 2304 galon air | Tersedianya Bahan Logistik Kantor pada Kantor Satuan Polisi Pamong praja | 100% | 23.016.000 | 25.317.600 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.19.03.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Makanan dan Minum Harian pegawai, Tamu Kantor dan Rapat | 12 Bulan | Tercapainya Makanan dan Minuman pagawai dan Tamu Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 60.000.000 | 66.000.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1800 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 100% | 375.000.000 | 412.500.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1800 | Koordanasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | tersedianya dana rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 12 Bulan | Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah | 100% | 150.000.000 | 412.500.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.1900 | Penyediaan Jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Honorarium Gaji Clanning service ,sopir, Tenaga Kontrak | 3 orang cleanning service, 8 orang sopir, 109 Tenaga Kontrak | Tercapainya administrasi perkantoran | 100% | 2.574.000.000 | 2.831.400.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.01.8700 | Koordinasi Bidang Tibumtransmas dan Penegakan Perda (Satpol PP) | | | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya koordinasi dalam daerah | Laporan | Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah | 100% | 184.000.000 | 202.400.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| **1.19.03.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **833.100.000** | | | |
| 1.19.03.02.1000 | Pengadaan Meubelair | | | Pangkalpinang | Pengadaan Barang penunjang sarana dan prasaran aparatur | 100% | Tersedianya jumlah perlengkapan meubelair | 1 meja tulis pimpinan 10 buah meja 1/2 biro 10 buah kasur 1 set sofa, 1 buah rak tv, 1 buah lemari | Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur Secara Maksimal | 100% | 64.405.000 | 70.845.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya pemelliharaan Gedung kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Gedung Kantor/Peralatan kantor untuk kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong praja | 100% | 30.000.000 | 33.000.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.02.2400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan prasarana aparatur | 100% | tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional untuk kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 500.220.000 | 550.242.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.02.2801 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan prasarana aparatur | 100% | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Gedung Kantor/Peralatan kantor untuk kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong praja | 100% | 20.000.000 | 22.000.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.02.xxxxx | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi | | | Pangkalpinang | Pengadaan Barang jasa penunjang Sarana prasarana aparatur | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan komunikasi | 25 buah HT, 9 buah RIG dan 1 buah Reapeter, 1 buah antena | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Apartur Pol PP | | 218.475.000 | 240.322.500 | SATPOL PP | Baru |
| **1.19.03.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **659.774.000** | **698.251.400** | | |
| 1.19.03.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | Pangkalpinang | Pengadaan Barang jasa penunjang Tingkat disiplin Aparatur | 100% | Tersedianya jumlah pakaian dinas beserta atribut | PDL, PDH dan atribut | Tercapainya Perlengkapan dan kedisiplinan pakaian pegawai | 100% | 390.850.000 | 429.935.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.19.03.03.0600 | Razia Kedisiplinan PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Tingkat disiplin Aparatur | 100% | waktu pelaksanaan Razia kedisiplinan PNS | 12 kali | Terlaksananya peningkatan Disiplin Aparatur/PNS Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | 243.924.000 | 268.316.400 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.09.03.0200 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya kegiatan responsig gender | 1 kegiatan | Terpenuhinya kegiatan responsif gender | 100% | 25.000.000 | - | Badiklat | sedang berjalan |
| **1.19.03.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | | | | 100% | **2.392.263.000** | **2.631.489.300** | | |
| 1.19.03.05.9934 | Pelatihan rutin kemampuan bela diri, senam, serta korsik Satpol PP . | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitaas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Tersedianya instruktur dan pakaian olahraga | 210 Orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 267.495.000 | 294.244.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.1501 | Pembinaan mental dan spritual Satpol-PP | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Kuantitas pelaksanaan pembinaan | 210 Orang | Terlaksananya pembinaan bagi satpol pp | 100% | 81.500.000 | 89.650.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.6701 | Pengiriman Peserta Diklat dan Pendidikan PPNS Peningkatan Kompetensi Aparatur | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Kota-kota di Indonesia | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Kuantitas pelaksanaan pengiriman | 20 orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 241.160.000 | 265.276.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.6801 | Instruktur upacara dan kesemaptaan Satpol-PP se-Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah pelatihan upacara dan kesemaptaan | 210 Orang | Terlaksananya upacara peringatan dan apel Bulanan | 100% | 171.140.000 | 188.254.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.7000 | Pelatihan pengendalian massa/Unjuk rasa | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumah Peserta | 70 Orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 140.000.000 | 154.000.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.9927 | Bintek PPNS Penegak Perda se-Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Peserta | 40 orang | Peningkatan kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 137.008.000 | 150.708.800 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.9928 | LATSAR POL PP | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -terwujudnya proses keperintahan yang bersih dan berwibawa | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah peserta dan kelengkapan | 40 orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 551.438.000 | 606.581.800 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.3800 | Bintek penyuluhan bagi Satpol PP se Kabupaten/Kota se-Prov.Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Peserta | 40 orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 129.823.000 | 142.805.300 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.1.19.03.05xxxx | Sosialisasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol-PP (Permendagri No.54 Tahun 2011) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Peserta | 80 orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | 100% | 298.897.000 | 328.786.700 | SATPOL PP | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.19.03.05xxxx | Sosialisasi Pedoman Penetapan Jumlah Posisi Pamong Praja (Permendagri 60 Tahun 2012) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah Peserta | 24 Orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | | 84.167.000 | 92.583.700 | SATPOL PP | Baru |
| 1.19.03.05.xxxx | Pelatihan Teknis Fungsional Sumber Daya Aparatur bagi Anggota Satpol PP Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Kuantitas pembinaan | 40 orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | | 123.953.000 | 136.348.300 | SATPOL PP | Baru |
| 1.19.03.05.xxxx | Pembaretan Satpol PP Provinsi Kep. Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 200% | Jumlah peserta | 40 Orang | Peningkatan kemampuan dan performance anggota Satuan Polisi Pamong Praja | | 165.682.000 | 182.250.200 | SATPOL PP | Baru |
| **1.19.03.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | | | | **354.727.000** | **412.199.700** | | |
| 1.19.03.06.3901 | Penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ SKPD, dan Tapkin SKPD | | | Pangkalpinang | Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Tersedianya jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan | 5 dokumen | Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan | 100% | 13.740.000 | 15.114.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.06.6400 | Forum Pelaporan Penyelenggaraan Pembangunan bidang ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda | | | Pangkalpinang | Tingkat pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Jumlah Peserta Forum pelaporan | 7 Kabupaten/ Kota | Terlaksananya forum pelaporan penyelenggaraan pembanguan bidang trantib dan penegakan perda | 100% | 84.605.000 | 93.065.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.6900 | Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan Satpol PP se-Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Waktu Pelaksanaan | 4 triwulan | Terlaksanya Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban di Prov. Kep. Babel | 100% | 62.920.000 | 69.212.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.05.1200 | Rapat koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS dilingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Tingkat Sumber daya aparatur | 100% | Jumlah peserta | 7 Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Rapat koordinasi | 100% | 193.462.000 | 212.808.200 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.03.2500 | Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov.Kep.Babel | | | Pangkalpinang | Tingkat disiplin Aparatur | 100% | jumlah peserta Responsif Gender | 35 orang peserta | Terlaksananya pemahaman gender bagi aparatur | 100% | | 22.000.000 | SATPOL PP | Baru |
| **WAJIB** | | | | | | | | | | | **6.531.166.280** | **2.202.233.000** | | |
| **1.19.03.16** | **Program Pemeliharaan Kantrantibummas dan Pencegahan Tindak Kriminal** | | | | | | | | | | **3.803.453.000** | **1.314.519.800** | | |
| 1.19.03.16.1400 | Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Kuantitas Pengamanan pengawalan | 12 bulan | Terlaksananya pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah | 100% | 192.580.000 | 211.838.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.xxxxx | Patroli | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Berkurangnya laju kerusakan lingkungan<br>- Terwujudnya perlindungan fungsi ruang<br>-Terjaganya kualitas lingkungan hidup | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Kuantitas Patroli pengawasan dan panertiban gangguan di kwasan terpadu | 12 bulan | Terlaksananya patroli pengawasan dan penertiban gangguan di kawasan terpadu | 100% | 250.390.000 | 275.429.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.4500 | Pengamanan Unjuk Rasa | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Kuantitas pengamanan unjuk rasa | 12 bulan | Terciptanya kondisi kondusif, aman | 100% | 100.000.000 | 110.000.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.19.03.16.03 | Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | jumlah peserta Upacara | 750 orang | Terlaksananya gelar pasukan HUT Pol PP | 100% | 116.590.000 | 128.249.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.2200 | Penyidikan, Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Perda di Prov. Kep. Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Jumlah kasus Penyidikan dan pemeriksaaan | 3 Kasus penyidikan dan 12 kali pemeriksaan | Terlaksananya penegakan Perda | 100% | 80.435.000 | 88.478.500 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.2700 | Penyelenggaraan Koordinasi Penyidikan, Pemeriksaan dan Penertiban SATPOL PP | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Kuantitas Koordinasi | 12 bulan | Terlaksananya penegakan Perda | 100% | 55.170.000 | 60.687.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.2400 | Penata Kelolaan sekretariat PPNS<br>Prov. Kep. Bangka Belitung | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | pelaksanaan koordinasi PPNS SKPD se- provinsi kep. Babel | 12 kali | Terlaksananya penegakan Perda | 100% | 70.648.000 | 77.712.800 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.2201 | Penyelidikan Pelanggaran Perda/Pergub/Kebijakan Gubernur | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Informasi yang diperoleh Satpol PP untuk dilakukan penindakan | 12 bulan, 4 dokumen | Terlaksananya penyelidikan pelanggaran perda/pergub/kebijakan gubernur | 100% | 90.810.000 | 99.891.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.16.1600 | Penertiban Pelanggaran Perda yang Berdampak pada Peningkatan PAD | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>'- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal | 100% | Melaksanakan koordinasi terhadap SKPD dan UPT | 12 bulan | Terlaksananya penertiban pelanggaran perda yang berdampak terhadap penerimaan PAD | 100% | 159.430.000 | 175.373.000 | SATPOL PP | Sedang Berjalan |
| 1.19.03.x.xxxx | Pembuatan MOU Kegiatan Penegakan PERDA, Trantibum Linmas dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota se-Prov.Kep.babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemberantasan Pekat | 70% | Tersedianya MoU | 6 Kabupaten | Terlaksananya penegakan perda, kantrantibummas dan perlindungan masayarakat | 70% | 78.965.000 | 86.861.500 | SATPOL PP | Baru |
| 1.19.03.x.xxxx | Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi kep. Babel (tanah dan bangunan) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien<br>- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi, Kabupaten/Kota | Tingkat pemberantasan Pekat | 70% | Tersedianya MoU | 6 Kabupaten | Terlaksananya penegakan perda, kantrantibummas dan perlindungan masayarakat | 70% | 2.608.435.000 | 2.869.278.500 | SATPOL PP | Baru |
| **1.19.3.19** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan** | | | | | | | | | | **807.012.000** | **887.713.200** | | |
| 1.19.03.19.0900 | Pelatihan Penanggulangan Banjir bagi Satlinmas se-Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat pemberdayaan Satlinmas | 100% | Jumlah Peserta Pelatihan | 50 orang | Terciptanya Satlinmas yang terampil | 100% | 156.623.000 | 172.285.300 | SATPOL PP | Sedang berjalan |
| 1.19.03.19.1100 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satlinmas Prov.Kep.Babel | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Provinsi/Kabupaten/ Kota | Tingkat pemberdayaan Satlinmas | 100% | Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi | 6 laporan | Terlaksananya pelaporan Monitoring dan evaluasi Satlinmas | 100% | 82.805.000 | 91.085.500 | SATPOL PP | Sedang berjalan |
| 1.19.03.19.0701 | Pelatihan Pengamanan Pemilu 2017 pada Satlinmas | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat pemberdayaan Satlinmas | 100% | Jumlah peserta pelatihan | 80 orang peserta | Terciptanya ketertiban dan keamanan pemilu | 100% | 148.185.000 | 163.003.500 | SATPOL PP | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.19.03.19.8001 | Bintek pemberdayaan Satlinmas dalam menunjang terwujudnya trantib swakarsa | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat pemberdayaan Satlinmas | 100% | Jumlah peserta pelatihan | 100 orang peserta | Terlaksananya trantib swakarsa yang handal | 100% | 184.906.000 | 203.396.600 | SATPOL PP | Sedang berjalan |
| 1.19.03.x.xxxx | Pelatihan dan pembinaan bela Negara bagi satlinmas dan masyarakat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat pemberantasan Pekat | 70% | Jumlah peserta pelatihan | 100 orang peserta | Terciptanya Satlinmas dan masyarakat yang berjiwa patriotisme | 100% | 234.493.000 | 257.942.300 | SATPOL PP | Baru |
| **1.19.3.19** | **Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** | | | | | | | | | | **1.920.701.280** | **172.285.300** | | |
| 1.19.03.19.0900 | Psatuan Polisi Pamong Praja | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | -meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Pangkalpinang | Tingkat pemberdayaan Satlinmas | 100% | Jumlah Peserta Pelatihan | 50 orang | Terciptanya Satlinmas yang terampil | 100% | 1.920.701.280 | 172.285.300 | SATPOL PP | Sedang berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | PRAKIRAAN MAJU | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEG. |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **1 Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **97.663.965.000** | **83.942.246.500** | | |
| | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **14.868.220.000** | **16.682.302.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **10.894.700.000** | **11.745.859.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 90% | Jumlah materai dan jasa pengiriman surat menyurat | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 22.800.000 | 25.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Penyediaan Jasa Komunikasi Listrik, Air dan Komunikasi | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 988.000.000 | 1.075.800.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional di Link. Sekretariat DPRD. | 40 Unit kend roda 4 dan 15 Unit kend roda 2 | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 2.392.010.000 | 2.612.643.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Dana yang tersedia bagi pelaksana administrasi perkantoran di link. Set. DPRD | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 458.430.000 | 504.174.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Belanja Operasional Kebersihan Gedung Kantor | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 84.000.000 | 92.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.0900 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Perbaikan Peralatan Kerja | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 316.000.000 | 176.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 95% | Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kinerja | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 198.000.000 | 208.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Penggandaan dan Percetakan Bahan | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 256.650.000 | 260.650.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Komponen listrik dan penerangan kantor | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 78.000.000 | 82.500.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1300 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Peralatan dan Perlengkapan kantor sebagai alat bantu administrasi | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 780.475.000 | 1.540.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Buku Perpustakaan dan Bahan Bacaan surat Kabar | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 439.920.000 | 384.912.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Logistik Kantor sebagai penunjang operasional kegiatan | Tabung Gas, Tabung Pemadam Kebakaran, Cinderamata | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 141.250.000 | 415.250.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 90% | Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat-Rapat dan Tamu | Makan dan Snack | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 962.275.000 | 1.095.215.000 | **Sekretariat DPRD** | |

| KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | PRAKIRAAN MAJU | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEG. |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.04.01.1800 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan tupoksi | 95% | Media Koordinasi dan Konsultasi dalam peningkatan kualitas pelaksanaan tupoksi | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 300.000.000 | 500.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.1.20.09.01.1800 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlakaasananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bln | Meningkatnya fungsi badan diklat prov. Kep. Babel | 100% | 150.000.000 | 160.000.000 | **Sekretariat DPRD** | Baru |
| 1.20.04.01.1900 | Penyediaan Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pelayanan Adm. Perkantoran | 100% | Pembayaran Gaji Honorer | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 3.031.690.000 | 2.288.715.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01.2400 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | administrasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Anggota DPRD | 100% | Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD. | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 225.000.000 | 250.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.01..... | Penyediaan Belanja Operasional Rumah Tangga Rumah Dinas Jabatan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Administrasi Operasional Rumah Dinas Jabatan | 90% | Operasionalisasi Rumdinjab | 1 Tahun | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tersedia | 70.200.000 | 75.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **3.435.820.000** | **4.194.723.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.0600 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Perlengkapan di Rumah Dinas Jabatan | 1 Tahun | Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas Jabatan | Tersedia | 66.825.000 | 264.330.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.2000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Rumah jabatan yang terjaga kualitas dan nilai kapitalnya. | 1 Tahun | Tersedianya Pemeliharaan Rumah Dinas jabatan | Tersedia | 394.000.000 | 457.600.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Gedung kantor yang asri dan representatif | 1 Tahun | Tersedianya Pemeliharaan Sedang/Berat kantor | Tersedia | 597.800.000 | 914.980.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.0900 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Gedung Kantor yang nyaman dan representatif | 1 Tahun | Rehabilitasi Sedang Berat Kantor | Tersedia | 474.670.000 | 648.637.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.9968 | Peningkatan Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Rumah dinas jabatan yang representatif | 1 Tahun | Tersedianya Rumah Dinas Jabatan yang representatif | Tersedia | 332.550.000 | 339.201.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.02.9969 | Peningkatan Gedung/Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Gedung Kantor yang tertata baik dan representatif | 1 Tahun | Tersedianya gedung kantor yang representatif | Tersedia | 1.569.975.000 | 1.569.975.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.03** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | | | | | | | 251.700.000 | 450.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Prov. Kep. Babel | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Penyediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD | 1 Tahun | tesedianya pakaian dinas yang representatif | Tersedia | 226.700.000 | 450.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.1.20.09.03.0200 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya kegiatan responsig gender | 1 kegiatan | Terpenuhinya kegiatan responsif gender | 100% | 25.000.000 | 25.500.000 | **Sekretariat DPRD** | Baru |
| **1.20.04.05** | **Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** | | | | | | | | | | **286.000.000** | **291.720.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.05.0300 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kompetensi Aparatur | 100% | penyediaan dana Bimbingan Teknis DPRD | 1 Tahun | tersedianya dana peningkatan kualitas sdm aparatur terhadap peraturan dan perundang-undangan | Tersedia | 286.000.000 | 286.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **82.795.745.000** | **67.259.944.500** | **Sekretariat DPRD** | |

| KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | PRAKIRAAN MAJU | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEG. |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1,2 | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan** | | | | | | | | | | **82.347.145.000** | **66.769.344.500** | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.15** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | | | | | | | | | | **82.347.145.000** | **66.769.344.500** | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0100 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Pembahasan Raperda pada tingkat Legislatif | 1 Tahun | tersedianya Peraturan Daerah yang berkualitas | Tersedia | 9.518.100.000 | 415.360.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0400 | Rapat-Rapat Paripurna | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna | 1 Tahun | tersedianya Peraturan Daerah yang berkualitas | Tersedia | 218.300.000 | 236.830.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0500 | Kegiatan Reses | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Reses | 1 Tahun | Laporan Hasil Reses | 3 Laporan | 5.310.795.000 | 5.610.795.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0600 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah | 1 Tahun | Tersedianya Kunjungan kerja bagi peningakatan kualitas pemerintahan | Tersedia | 3.513.200.000 | 3.618.596.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0700 | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Peningkatan Kualitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis | 1 Tahun | meningkatnya kualitas SDM anggota DPRD | Tersedia | 4.245.650.000 | 4.835.215.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0800 | Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/tokoh masyarakat/tokoh agama | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Dialog DPRD dengan Tokoh masyarakat, agama, pemda kab/kota, dll | 1 Tahun | Dengar Pendapat Dengan Masyarakat | Tersedia | 1.104.350.000 | 1.200.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.0900 | Studi Banding DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Studi Banding sebagai bahan masukan evaluasi implementasi kebijakan di daerah | 1 Tahun | Tersedianya pengetahuan dan Studi Banding bagi anggota DPRD | Tersedia | 1.605.550.000 | 1.653.716.500 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.1.20.04.15. | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD | 1 Tahun | Terlaksananya fungsi lembaga DPRD | Tersedia | 33.251.200.000 | 24.640.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1400. | Publikasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Tersedianya kualitas kelembagaan DPRD melalui kegiatan Parlementaria | 1 Tahun | Tersebarluasnya informasi pelaksanaan tugas DPRD | | 1.647.450.000 | 1.863.070.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1000 | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah | 1 Tahun | Tersedianya Kunjungan kerja bagi peningakatan kualitas pemerintahan | Tersedia | 20.013.200.000 | 20.613.596.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1100 | Rapat Koordinasi Asosiasi Pimpinan DPRD Se-Indonesia | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Rapat Koordinasi ADPSI | 1 Tahun | Tersedianya Kunjungan kerja bagi peningakatan kualitas pemerintahan | Tersedia | 236.250.000 | 259.875.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1300 | Penyediaan Tenaga Ahli dan Kegiatan Akademik | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Tenaga Ahli dan Akademisi | 1 Tahun | Tersedianya Kunjungan kerja bagi peningakatan kualitas pemerintahan | Tersedia | 730.000.000 | 803.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1400 | Fasilitasi dan Konsultasi Masalah Hukum dan Administrasi Kesekretariatan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyediaan Fasilitasi Konsultasi Permasalahan Hukum | 1 Tahun | Tersedianya Kunjungan kerja bagi peningakatan kualitas pemerintahan | Tersedia | 301.400.000 | 348.040.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.15.1800 | Parlementaria | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Kapasitas Lembaga DPRD | 100% | Penyebaran Informasi kepada Masyarakat terkait Kegiatan DPRD | 1 Tahun | Tersedianya media bagi keparlemenan | Tersedia | 651.700.000 | 671.251.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.17** | **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** | | | | | | | | | | **378.000.000** | **420.000.000** | **Sekretariat DPRD** | |

| KODE URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PRIORITAS DAERAH | SASARAN DAERAH | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | | | | | | PAGU INDIKATIF | PRAKIRAAN MAJU | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HASIL PROGRAM | | KELUARAN KEGIATAN | | HASIL KEGIATAN | | | | SKPD | JENIS KEG. |
| | | | | | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | TOLAK UKUR | TARGET | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.04.17.2900 | Pembahasan RKA-SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Tingkat Pembahasan APBD dan APBD-P | 100% | Penyediaan Fasilitasi kegaitan rapat-rapat dan konsolitasi eksekutif dan legislatf dalam pembahasan APBD dan APBD-P | 1 Tahun | tersedianya RKA SKPD yang berkualtias | Tersedia | 378.000.000 | 420.000.000 | **Sekretariat DPRD** | |
| **1.20.04.26** | **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** | | | | | | | | | | **70.600.000** | **70.600.000** | **Sekretariat DPRD** | |
| 1.20.04.26.0700 | Fasilitasi dan Dokumentasi Persidangan dan Peraturan Perundang-undangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Prov. Kep. Babel | Penataan Dokumentasi Persidangan dan Perundang-undangan | 100% | Penyediaan Fasilitasi Dokumentasi Persidangan dan Undang-undang | 1 Tahun | Terdokumentasinya hasil peridangan | Tersedia | 70.600.000 | 70.600.000 | **Sekretariat DPRD** | |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 | | | BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEU DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 05 | | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN SETIAP SKPD (RUTIN) | | | | | | | | | | 22.424.815.620 | | | |
| 20 | 05 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | | | | | 11.103.625.000 | 12.213.987.500 | | |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya prangko, materai, dan benda pos lainnya, paket/pengiriman | 1 paket | Lancarnya hasil pengiriman surat untuk keperluan kantor | 12 bulan | 160.800.000 | 176.880.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran | 12 bulan | 1.353.100.000 | 1.488.410.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya honorarium pengelolaan keuangan | 12 bulan | Lancarnya kinerja aparatur pengelola keuangan | 12 bulan | 803.490.000 | 883.839.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional kebersihan kantor | 12 bulan | Terpeliharanya kebersihan dan kerapihan kantor | 12 bulan | 139.200.000 | 153.120.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terpeliharanya peralatan kerja | 12 bulan | Lancarnya aktivitas perkantoran | 100% | 977.689.000 | 1.075.457.900 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 613.520.000 | 674.872.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 1.588.100.000 | 1.746.910.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya peralatan listrik | 1 paket | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran | 12 bulan | 110.000.000 | 121.000.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya surat kabar dan majalah sebagai sarana informasi | 1 paket | Terpenuhinya informasi yang diterima pegawai | 12 bulan | 51.096.000 | 56.205.600 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan logistik kantor | 1 paket | Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor | 12 bulan | 239.775.000 | 263.752.500 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Makanan dan minuman | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat | 1 paket | Terpenuhinya persediaan makan dan minum rapat | 12 bulan | 109.040.000 | 119.944.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah | 1 paket | Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerntah Daerah Lainnya | 12 bulan | 846.000.000 | 930.600.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah | 1 paket | Lancarnya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 12 bulan | 250.000.000 | 275.000.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Pangkalpinang | Jasa tenaga kerja pelayanan administrasi perkantoran non pns | 12 bulan | Aktivitas administrasi perkantoran yang tertib dan lancar | | Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari | 100% | 3.718.090.000 | 4.089.899.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 01 | Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Pengelolaan daftar gaji PNS | 37 SKPD | Tersedianya sistem komputerisasi daftar gaji PNS | 37 SKPD | Terwujudnya pembayaran gaji PNS yang tepat waktu | 37 SKPD | 143.725.000 | 158.097.500 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| | | 01 | Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Bangka Sungailiat | | | Sungailiat | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional rutin kantor | 12 bulan | Lancarnya pelayanan UPTD | 12 bulan | 685.295.000 | 753.824.500 | DPPKAD | |
| | | 01 | Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kota Pangkalpinang | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional rutin kantor | 12 bulan | Lancarnya pelayanan UPTD | 12 bulan | 663.908.000 | 730.298.800 | DPPKAD | |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| | | 01 | Operasional UPT DPPKAD Wilayah Kabupaten Belitung | | | Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional rutin kantor | 12 bulan | Lancarnya pelayanan UPTD | 12 bulan | 638.629.000 | 702.491.900 | DPPKAD | |
| | | 01 | Pengelolaan Kehumasan Pada DPPKAD | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya Pengelolaan Kehumasan DPPKAD | 12 bulan | Tersedianya informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat | 12 bulan | 199.840.000 | 219.824.000 | DPPKAD | |
| **20** | **05** | **02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah** | **Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan** | | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat** | **100** | | | | | **10.426.477.400** | **11.469.125.140** | | |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | peningkatan konektivitas | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 452 unit | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat | 100% | 1.441.535.000 | 1.585.688.500 | DPPKAD | |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | Pangkalpinang | Peningkatan kualitas pelayanan | 100% | Tersedianya kendaraan dinas operasional | 4 unit | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat | 100% | 1.282.650.000 | 1.410.915.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | peningkatan konektivitas | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 452 unit | Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat | 100% | 1.441.535.000 | 1.585.688.500 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya peralatan gedung kantor | 187 unit | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 1.451.492.400 | 1.596.641.640 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Penyediaan Peralatan Sekretariat TAPD Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Kelancaran pelayanan administrasi TAPD | Tersedia | Terlaksananya penyediaan peralatan sekretariat TAPD | terlaksana | lancarnya aktivitas sekretariat TAPD | terlaksana | 162.060.000 | 178.266.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Peralatan Kerja TAPD | | | Pangkalpinang | Peningkatan Kerja Aparatur | TAPD | Tersedianya i-perisalah | 1 unit | terekamnya pelaksanaan rapat TAPD | pembahasan APBD | | - | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Peralatan Komputer | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat | 100 | PC, Komputer Mainframe, Laptop, Printer, Scanner, UPS, Switch router | 127 unit | Tersedianya Peralatan Komputer untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD | 100% | 992.500.000 | 1.091.750.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Peralatan Studio | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat | 100 | Proyektor, Handycam, Kamera, Televisi | 24 unit | Tersedianya Studio untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD | 100% | 669.500.000 | 736.450.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pengadaan Meubelair | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat | 100 | Meja Kepala UPTD, meja rapat, meja komputer, meja kerja, kursi kerja, kursi tunggu, sofa, kursi komputer, meja pelayanan | 356 unit | Tersedianya Meubelair untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD | 100% | 1.180.750.000 | 1.298.825.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 | 05 | 02 | Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor | | | Prov Kep Bangka Belitung | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terpeliharanya gedung kantor | 8 unit | Tersedianya tempat kerja yang nyaman | 12 bulan | 1.074.040.000 | 1.181.444.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Prov Kep bangka Belitung | Persentase penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 62 unit | Lancarnya kegiatan operasional kedinasan | 12 bulan | 1.147.900.000 | 1.262.690.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD | | | Belitung | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat | 100 | Tempat parkir pada UPTD Belitung | 1 unit | Tersedianya Tempat parkir untuk menunjang tugas dan fungsi SKPD | 100% | 150.000.000 | 165.000.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 02 | Pembangunan Musholla pada UPTD | | | Kab Bangka Tengah, kab Bangka Selatan | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pembangunan musholla pada UPTD DPPKAD | 2 unit | Tersedianya sarana peribadatan bagi aparatur dan masyarakat | 2 unit | 732.050.000 | 805.255.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 02 | Pembuatan ruangan rapat kepala DPPKAD | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya ruang rapat kepala DPPKAD | 1 paket | Lancarnya tugas pimpinan | 100% | 142.000.000 | 156.200.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 02 | Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor | 8 area | Terjaganya kebersihan dan keindahan taman, tempat parkir dan halaman kantor | 12 bulan | 306.680.000 | 337.348.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 02 | Pembangunan tempat parkir, pagar dan sumur bor pada UPTD | | | Prov Kep Bangka Belitung | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya tempat parkir, pagar dan sumur bor pada UPTD | 6 paket | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran | 100% | 448.750.000 | 493.625.000 | DPPKAD | Baru |
| **20** | **05** | **03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan disiplin aparatur** | **Terciptanya aparatur yang disiplin** | | **meningkatnya disiplin aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung** | **100** | | | | | **197.000.000** | **1.489.164.600** | | |
| 20 | 05 | 03 | Pengadaan pakaian dinas/pakaian kerja/pakaian khusus dan hari-hari | | | Prov Kep Bangka Belitung | Tersedianya pakaian dinas untuk aparatur pemerintah | 100% | Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk aparatur | 344 stel | Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah | 100% | 172.000.000 | 189.200.000 | DPPKAD | |
| 20 | 05 | 03 | Advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov Kep Bangka Belitung | Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan perencanaan penganggaran responsif gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersedianya dokumen penganggaran yang responsif gender di setiap bidang kerja | 6 dokumen PPRG | Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan penganggaran responsif gender di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | DPPKAD | |
| **20** | **05** | **05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung** | **100** | | | | | **801.228.000** | **881.350.800** | | |
| 20 | 05 | 05 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Persentase peningkatan sumber daya aparatur | 100% | Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimtek/Diklat | 34 orang (50% Perempuan & 50% Laki-laki) | Menngkatnya kualitas aparatur pemerintah | 100% | 355.558.000 | 391.113.800 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 05 | Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan di UPTD serta Koordinasi dan Konsultasi dengan Kabupaten/Kota | | | Prov Kep Bangka Belitung | meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung | 100 | Pembinaan ke UPTD | 7 UPTD | meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung | 100% | 278.950.000 | 306.845.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |

| Kode | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 | 05 | 05 | Konsultasi/Koordinasi dan Bimbingan teknis Pajak Daerah | | | Prov Kep bangka Belitung | meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung | 100 | Terlaksananya Konsultasi/Koordinasi dan Bimbingan teknis Pajak Daerah | Dinas dan 7 UPTD | Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Aparatur | Dinas dan 7 UPTD | 166.720.000 | 183.392.000 | DPPKAD | Baru |
| **20** | **05** | **06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkat nya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyediakan informasi keuangan** | **100** | | | | | **93.485.220** | **102.833.742** | | |
| 20 | 05 | 03 | Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender | | | Pangkalpinang | Meningkatnya kedisiplinan aparatur pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100 | Terciptanya minimal satu dokumen Penganggaran yang Responsif Gender di setiap bidang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 dokumen | Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 06 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | Prov Kep Bangka Belitung | Terwujudnya laporan keuangan daerah yang efektif | 100% | Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semester I APBD TA 2016 | 1 Laporan | Tersedianya informasi keuangan semester I APBD TA 2016 | 100% | 68.485.220 | 75.333.742 | DPPKAD | Sedang berjalan |
| | | | **URUSAN WAJIB** | | | | | | | | | | **9.563.847.280** | | | |
| **20** | **05** | **17** | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah** | **100** | | | | | **4.251.456.000** | **4.676.601.600** | | |
| 20 | 05 | 05 | Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD | | | Pangkalpinang | Terlaksananya pembinaan terhadap bendahara pengeluaran dan PPK SKPD dalam pencairan dana SKPD dan penggunaan dana | 100% | Bimbingan teknis terhadap Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD dalam pencairan dan penggunaan dana SKPD | 37 SKPD | Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan keuangan daerah | 100% | 305.022.000 | 335.524.200 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang APBD TA 2017 | | | Pangklapinang | Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran | 100% | Penyusunan Raperda dan Rapergub tentang APBD TA 2017 | 2 paket | Penetapan Perdan dan Pergub tentang APBD TA 2017 | 1 paket regulasi | 721.360.000 | 793.496.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Pergub tentang Perubahan APBD TA 2016 | | | Pangklapinang | Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD tahun anggaran | 100% | Penyusunan Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD TA 2016 | 1 paket regulasi | Penetapan Perdan dan Pergub tentang Perubahan APBD TA 2016 | 1 paket regulasi | 679.450.000 | 747.395.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah | | | Prov Kep Bangka Belitung | Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | 100% | Terlaksananya Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah | Dinas dan 7 UPTD | Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah | 100% | 725.520.000 | 798.072.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 | | | Pangklapinang | Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD dalam Tahun anggaran 2017 | 100% | Terlaksananya Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD TA 2017 | 100% | Meningkatnya pemahaman aparatur dan anggota DPRD tentang Penyusunan APBD | SKPD dan Anggota DPRD di lingkungan Pemprov Kep Babel | 239.100.000 | 263.010.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Sosialisasi Regulasi Penyusunan Anggaran | | | Pangklapinang | Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah | **100** | Sumber daya manusia yang memahami proses penyusunan anggaran | 150 peserta | Penyusunan anggaran yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan | SKPD Kab/Kota dan SKPD di lingkungan Pemprov Kep Babel | 115.320.000 | 126.852.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 17 | Operasional Aplikasi SIPKD | | | Pangkalpinang | Operasional Aplikasi SIPKD | 100% | Beroperasinya Aplikasi SIPKD | 12 bulan | Tercapainya pengelolaan keuangan daerah | 12 bulan | 799.800.000 | 879.780.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |

| Kode | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 | 05 | 17 Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D | | | Pangkalpinang | Terselenggaranya kearsipan SP2D bulan Desember 2015 s.d. November 2016 | 100% | Tertatanya arsip SP2D tahun 2016 | 500 bukudan arsip SP2D | Terpeliharanya arsip SP2d yang dikeluarkan oleh BUD dan Kuasa BUD | 100% | 265.889.000 | 292.477.900 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 17 Penyusunan Rancangan Perda tetang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | Pangkalpinang | Terwujudnya laporan keuangan yang efektif | 100% | Tersusunnya Laporan Realisasi APBD TA 2015 | 1 Laporan | Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 | 100% | 294.157.000 | 323.572.700 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 17 Penyusunan Pergub tentang Standar Sarana dan Prasaran Pemerintahan Daerah | | | Pangkalpinang | Tercapainya pelaksanaan standar sarana dan prasarana pemerintah daerah | 100% | Tersusunnya Pergub tentang Standar Sarana dan Prasaran Pemerintahan Daerah | 100 buku | Tersedianya pedoman pengadaan Sarana dan Prasaran Pemerintahan Daerah | 100% | 105.838.000 | 116.421.800 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 17 Bimtek penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | | | Pangkalpinang | Tertib administrasi dan penyusunan anggaran | 100% | Terlaksananya penyusunan RKA SKPD | 130 peserta | Menngkatnya pemahaman SKPD terhadap penyusunan RKA | 100% | 292.065.000 | 321.271.500 | DPPKAD | Baru |
| 20 | 05 | 17 Pengalihan aset milik pemerintah 7 kabupaten/kota ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov Kep Bangka Belitung | Terlaksananya proses/tahapan pemindahtanganan barang milik kab/kota ke provinsi atau sebaliknya | 6 SKPD | Proses/tahapan pengalihan aset milik kab/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam rangka implementasi UU 23/2014 | 6 SKPD | Tertibnya penatausahaan administrasi aset daerah | 100% | 248.252.000 | 273.077.200 | DPPKAD | Baru |
| **20** | **05** | **18 Program Pembinaaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota** | **100** | | | | | **1.032.776.280** | **1.136.053.908** | | |
| 20 | 05 | 18 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD TA 2017 | | | Pangkalpinang | Terdapatnya Raperda dan Raperkada Kab/Kota tentang APBD TA 2017 yang sinkron dg prioritas dan program nasional dan tidak bertentangan dg peraturan perundang-undangan | 100% | Evaluasi Raperda Kab/kota tentang APBD TA2017 dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan Apbd TA 2017 | 7 kb/kota | Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang APBD TA 2017 | 7 kb/kota | 207.788.000 | 228.566.800 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 18 Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD TA 2016 | | | Pangkalpinang | Terdapatnya raperda dan Raperkada kab/kota tentang Perubahan APBD 2016 yang sinkron dg prioritas dan program nasional dan dan tidak bertentangan dg peraturan perundang-undangan | 100% | Evaluasi Raperda Kab/kota tentang perubahan APBD TA2016 dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan Apbd TA 2016 | 7 kb/kota | Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD TA 2016 | 7 kb/kota | 207.788.000 | 228.566.800 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 18 Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kab/Kota | | | Pangkalpinang | pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota | 100 | Pemantauan dan EvaluasiBantuan Keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota | 7 kb/kota | Pemantauan dan EvaluasiBantuan Keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota yang sejalan dengan peraturan perundang- undangan | 7 kb/kota | 520.930.000 | 573.023.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 18 Evaluasi Raperda Kaupaten/Kota dan Peraturan Bupat/Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | | Prov Kep Bangka Belitung | Tersedianya pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota | 100% | Evaluasi Raperda Kaupaten/Kota dan Peraturan Bupat/Walikota tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 7 Keputusan | Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanasaan APBD | 7 kab/kota | 96.270.280 | 105.897.308 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 | 05 | 18 Rapat koordinasi pembinaan keuangan pemerintah kabupaten/kota | | | Prov Kep Bangka Belitung | Terselenggaranya rapat koordinasi pembinaan keuangan dengan pemerintah Kab/Kota Se-Prov. Kep. Babel | 100% | Terselenggaranya rapat koordinasi pembinaan keuangan dengan pemerintah Kab/Kota Se-Prov. Kep. Babel | 7 Kab/Kota | Rapat koordinase pembinaan keuangan dengan pemerintah Kab/Kota se-Prov. Kep. Babel yg selaras dengan peraturan perundang-undangan | 7 Kab/Kota | 269.856.000 | 296.841.600 | DPPKAD | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **20 05 50** | **Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan Lain-Lain** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah** | **100** | | | | | **1.958.055.000** | **2.153.860.500** | | |
| 20 05 05 | Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait | | | Prov Kep Bangka Belitung | meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung | 100 | Terlaksananya Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait | 2 kali | Meningkatnya Kapabilitas Sumber Daya Aparatur | Dinas dan 7 UPTD | 127.940.000 | 140.734.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 50 | Sosialisasi Pajak Daerah | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Terlaksananya sosialisasi Pajak daerah | Media Massa lokal | Tercapainya Target Pajak Daerah | 100% | 74.000.000 | 81.400.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 50 | Opersional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah | | | Prov Kep Babel | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah | 7 UPTD | Tercapainya target penerimaan PKB dab BBNKB | 100% | 661.770.000 | 727.947.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 50 | Operasional Samsat Keliling | | | Prov Kep Babel | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Terlaksananya Operasional Samsat Keliling | 4 unit | Tercapainya target penerimaan PKB dab BBNKB | 100% | 618.690.000 | 680.559.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 50 | Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Tersusunnya Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB | 3 Pergub | Tercapainya target penerimaan PKB dab BBNKB | 100% | 95.280.000 | 104.808.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 50 | Operasional Samsat Corner | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Terlaksananya Operasional Samsat Corner | 1 unit | Terpenuhinya kebutuhan Samsat Corner | 100% | 87.015.000 | 95.716.500 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 50 | Intensifikasi dan ekstensifikasi restribusi dan pendapatan lain-lain | | | Prov Kep Babel | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan restribusi daerah dan dana bagi hasil | 3 kali kunjungan ke SKPDdan UPT Pengelola Restribusi daerah | Tercapainya target dan penerimaan restribusi dan pendapatan lain-lain | 100% | 150.000.000 | 165.000.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 50 | Koordinasi dan Konsultasi Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain | | | Prov Kep Babel | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terjalin koordinasi yang baik dan berkesinambungan antar instansi terkait | Tersedianya data dan informasi atas pendapatan restribusi daerah dan pendapatan lain-lain | 100% | 100.000.000 | 110.000.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 50 | Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah | 100 | Rapat kerja antar SKPD Pengelola restribusi dan instansi pemerintah daerah Kab/Kota | 4 kali Raker | Tersedianay data yang aktual terhadap penerimaan restribusi dan pendapatan lain-laindaerah serta meningkatnya pendapatan daerah | 100% | 43.360.000 | 47.696.000 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| **20 05 87** | **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah** | | | | | | | | | | **2.321.560.000** | **2.208.234.600** | | |
| 20 05 87 | Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang | | | Pangkalpinang | Terwujudnya pengelolaan aset daerah secara baik dan benar | 100% | Terlaksananya Pembinaan Teknis Bendahara/Penyimpan Barang dan Pengurus Barang | 100 orang | Kelancaran dalam Pengelolaan Asset Daerah | 100% | 245.462.000 | 270.008.200 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 87 | Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | Terinformasinya data/penyusunan dokumen harga satuan barang dan jasa (HSBJ) | 100% | Tersusunnya buku Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ tahun 2017) | 100 buku | Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ tahun 2017) | 100% | 261.415.000 | 287.556.500 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 87 | Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung | | | Pangklapinang | Terlaksananya penghapusan barang inventaris | 100% | Penghapusan barang-barang inventaris milik Pemerintah Prov. Kep. Babel | 36 SKPD | Tertibnya administrasi barang-barang inventaris | 36 SKPD | 164.338.000 | 180.771.800 | DPPKAD | Sedang Berjalan |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 05 | 87 Sensus Barang Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangklapinang | Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 | Tersusunnya Laporan sensus Barang Tahun 2016 | | Tersedianya Data Inventaris Barang Milik Daerah yang Up to date yang bisa digunakan dalam rangka penyusunan neraca daerah | 100 | | - | DPPKAD | Baru |
| 20 05 | 87 Penyusunan Laporan Barang Milik daerah | | | Pangklapinang | Terlaksananya penyusunan laporan barang milik daerah | 100% | Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan Daftar Mutasi Barang Tahun 2016, Laporan Barang Semester I Tahun 2016 | 100% | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang akuntabel | 100% | 193.154.000 | 212.469.400 | DPPKAD | Sedang Berjalan |
| 20 05 | 87 Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | Pangklapinang | Tercapainya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah tertib dan akuntabel | 100% | Tersusunnya Pergub Barang Milik daerah | 185 buku | Tersusunnya Buku Pergub Barang Milik Daerah sebagai panduan SKPD | 100% | 199.430.000 | 219.373.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 | 87 Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Provinsi Kep Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah | **100** | Barang milik daerah yang dipindahtangankan | terlaksana | Terlaksananya pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah | 100% | 500.000.000 | 550.000.000 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 | 87 Pengamanan Barang Milik Daerah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya pengamanan dan pengawasan barang milik Prov. Kep. Babel | 100% | Pengamanan dan pengawasan terhadap barang milik Prov. Kep. Babel | 34 SKPD | Tertibnya Barang Milik Daerah Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 34 SKPD | 216.053.000 | 237.658.300 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 | 87 Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah | | | Pangkalpinang | Tingkat Pengelolaan Keuangan Daerah | **100** | Peningkatan pemahaman dan keseragaman manajemen asset diseluruh pemkab dan pemkot di lingkungan Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung | terlaksana | terjalinnya peningkatan pemahaman dan keseragaman manajemen asset daerah diseluruh pemkab dan pemkot di lingkungan Pemerintah Prov Kep Bangka Belitung | 100% | 227.634.000 | 250.397.400 | DPPKAD | Baru |
| 20 05 | 87 Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah Daerah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya pensertifikatan tanah milik Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Pengamanan secara hukum barang/lahan milik Provinsi Kep. Bangka Belitung | 20 bidang tanah Eks P3D% | Tertib pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | 20 bidang tanah Eks P3D% | 314.074.000 | 345.481.400 | DPPKAD | Baru |
| **20 05** | **119 Program Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain** | | | | | | | | | | **34.178.133.900** | **37.250.465.890** | | |
| 20 05 | 119 Rapat koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi terkait | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi PKB dan BBN-KB dengan instansi terkait | 2 kali rapat | Tersusunnya kesepakatan penerimaan PKB dan BBNKB dengan instansi terkait | 1 dok kesepakatan % | 123.870.000 | 136.257.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Sosialisasi Pajak Daerah | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Terlaksananya osialisasi pajak daerah | | Tercapainya target penerimaan pajak daerah | 7 UPTD | 74.000.000 | 81.400.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Operasional dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Beroperasi dan terpeliharanya sistem informasi pajak daerah | 12 bulan | Tercapainya target PKB dan BBNKB | 100% | 629.170.000 | 692.087.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Operasional Samsat Keliling | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Terlaksananya operasional samsat keliling | 12 bulan | Tercapainya target PKB | 100% | 532.890.000 | 586.179.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Tersusunnya peraturan gubernur tentang perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB | 3 pergub | Tercapainya target penerimaan PKB dan BBNKB | 100% | 94.290.000 | 103.719.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Operasional Samsat Corner | | | Prov Kep Babel | Tercapainya peningkatan penerimaan pajak daerah | 100% | Terlaksananya samsat corner | 12 bulan | Tercapainya target PKB | 100% | 87.013.000 | 95.714.300 | DPPKAD | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | patnya | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | Tolok ukur | Target | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 20 05 | 119 Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi dan pendapatan lain-lain | | | Prov Kep Babel | Tercapainya target penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain | 100% | Terlaksananya intensifikasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain | 1 paket | Meningkatnya pendapatan dari retribusi dan pendapatan lain-lain | 100% | 478.278.000 | 526.105.800 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Rapat kerja retribusi daerah dan pendapatan lain-lain | | | Prov Kep Babel | Tercapainya target pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain | 100% | Terlaksananya rakernis retribusi daerah dan pendapatan lain-lain | 1 paket | Akurasi data penerimaan dan koordinasi yang bersinergi antara instansi terhadap penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain | 100% | 87.860.000 | 96.646.000 | DPPKAD | |
| 20 05 | 119 Penyusunan Pergub tentang Lain-lain PAD yang sah | | | Prov Kep Babel | Terlaksananya penyusunan pergub tentang lain-lain PAD yang sah | 100% | Pergub tentang lain-lain PAD yang sah | 1 paket | Tersedianya Pergub tentang lain-lain PAD yang sah | 100% | 82.100.000 | 90.310.000 | DPPKAD | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | **31.988.662.900** | **34.842.047.790** | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2016 | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **10.987.955.000,00** | **12.086.750.500,00** | | |
| **1.20** | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **2.548.960.000,00** | **2.803.856.000,00** | | |
| **1.20.11.01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **1.795.830.000,00** | **1.975.413.000,00** | **Inspektorat** | |
| 1.20.07.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan jasa surat menyurat | 12 bulan | Terselenggaranya surat menyurat | 12 bulan | Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100% | 112.350.000,00 | 123.585.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.0200 | Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pembayaran Jasa Telepon dan Listrik Kantor | 12 bulan | Terpenuhinya jasa telepon dan Listrik kantor | 12 bulan | Mendukung Komunikasi dan Penerangan Kantor | 100% | 270.000.000,00 | 297.000.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.0600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | Terpeliharanya Kend.Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4 | 12 bulan | Terpeliharanya dengan baik 9 (sembilan) kendaraan roda 2 dan roda 4 | 100% | 325.380.000,00 | 357.918.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Administrasi Keuangan | 12 bulan | Terselenggaranya Tertib administrasi Keuangan | 12 bulan | Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 100% | 125.400.000,00 | 137.940.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.0800 | Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Penyediaan jasa dan alat kebersihan kantor | 12 bulan | Terpeliharanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat | 12 bulan | Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat | 100% | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.0900 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Perbaikan Peralatan Kerja | 12 bulan | Terpeliharanya Peralatan Kerja | 12 bulan | Terpeliharanya sarana dan prasarana Peralatan Kerja | 100% | 25.000.000,00 | 27.500.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1000 | Penyediaan Alat tulis Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelayanan Penyedu\iaan Alat Tulis Kantor | 12 bulan | Tersedianya Alat tulis Kantor | 12 bulan | Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 Tahun | 100% | 136.000.000,00 | 149.600.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Belanja Cetak dan Penggandanaan | 12 bulan | Tersedianya barang cetakan dan bahan penggandaan | 12 bulan | Terselenggaranya Kelancaran Ketatausahaan kantor | 100% | 15.000.000,00 | 16.500.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharann Bangunan gedung Kantor | 12 bulan | Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrik dan Elektronik Gedung Kantor | 12 bulan | Membantu Kelancaran Tugas-Tugas | 100% | 9.000.000,00 | 9.900.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengadaan Majalah/Surat Kabar | 12 bulan | Tersediaan Bahan Bacaan Kantor | 12 bulan | Meningkatnya Kualitas SDM Aparat Pengawas dan Hasil Pemeriksaaan | 100% | 18.500.000,00 | 20.350.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 12 bulan | Mendukung Kelanncaran Tugas-Tugas | 100% | 21.800.000,00 | 23.980.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyediaan Makanan dan Minuman | 12 bulan | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu | 12 bulan | Mendukung Kelanncaran Tugas-Tugas | 100% | 42.000.000,00 | 46.200.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.01.1800 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan rapat, koordinasi dan konsultasi | 12 bulan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun | 100% | 400.000.000,00 | 440.000.000,00 | Inspektorat | |
| | Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah | | | | | | | | | | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | | |
| 1.20.07.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | Terlaksananya Pembayaran Honorarium Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 bulan | Mendukung Kelancaran Tugas-Tugas | 100% | 125.400.000,00 | 137.940.000,00 | Inspektorat | |
| **1.20.11.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **572.500.000,00** | **629.750.000,00** | **Inspektorat** | |
| 1.20.07.02.0700 | Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 5 paket | Tersediannya Almari dan Kursi Tamu | 5 paket | Mendukung Kelancaran PelaksanaanTugas-Tugas Kantor | 100% | 89.000.000,00 | 97.900.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.02.0900 | Pengadaan Peralatan gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 10 unit | Tersediannya Printer dan Komputer | 10 unit | Mendukung Kelancaran PelaksanaanTugas-Tugas Kantor | 100% | 120.600.000,00 | 132.660.000,00 | Inspektorat | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2016 | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.07.02.2000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatn/Dinas | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas | 12 bulan | Terpeliharanya secara baik rumah jabatan/dinas | 12 bulan | Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor | 100% | 26.300.000,00 | 28.930.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 100% | 255.400.000,00 | 280.940.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.02.2600 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Secara Baik Perlengkapan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor | 100% | 36.600.000,00 | 40.260.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.02.2800 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya Secara Baik Peralatan Gedung Kantor | 12 bulan | Terpeliharanya sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor | 100% | 44.600.000,00 | 49.060.000,00 | Inspektorat | |
| **1.20.11.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **64.500.000,00** | **70.950.000,00** | **Inspektorat** | |
| 1.20.07.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengadaan Pakaian Dinas Harian | 95 stel | Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 95 stel | Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor | 100% | 39.500.000,00 | 43.450.000,00 | Inspektorat | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | 25.000.000,00 | 27.500.000,00 | | |
| **1.20.07.06** | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Penyusunan LAKIP/LKPJ** | **10 buku** | | | | | **116.130.000,00** | **127.743.000,00** | **Inspektorat** | |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan semester I dan II | 10 buku | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2015 | 10 buku | | | | | | | Inspektorat | |
| 1.20.07.06.0100 | Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Penyusunan LAKIP/LKPJ | 10 buku | Tersedianya LAKIP/LKPJ | 10 buku | Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | 100% | 91.420.000,00 | 100.562.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.06.0200 | Kegiatan penyusunan laporan keuangan semester | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Penyusunan laporan keuangan semester I dan II | 10 buku | Tercetaknya laporan keuangan semester I dan II | 10 buku | Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | 100% | 14.180.000,00 | 15.598.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.06.0400 | Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2015 | 10 buku | Tercetaknya laporan keuangan akhir tahun 2015 | 10 buku | Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah | 100% | 10.530.000,00 | 11.583.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **8.438.995.000,00** | **9.282.894.500,00** | | |
| **1.20.07.20** | **Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Pelaksanaan pemeriksaan/reviu lapkeu/evaluasi LAKIP SKPD dan kabupaten/kota /evaluasi LPPD kab/kota** | **100 obrik** | | | | | **5.979.545.000,00** | **6.577.499.500,00** | **Inspektorat** | |
| | | | | | Pelaksanaan pengawasan atas laporan pengaduan masyarakat | 10 kasus | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Kep. Bangka Belitung | 12 bulan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan pengawasan atas laporan pengaduan masyarakat | 3 kasus | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan rapat gelar pengawasan daerah | 1 kali | | | | | | | Inspektorat | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2016 | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | Pelaksanaan gelar rapat tindak lanjut hasil pengawasan | 1 kali | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan koordinasi pengawasan, rakorwasda dan rakorwasdanas | 2 kegiatan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan | 12 bulan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan Forum Koordinasi Inspektur se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 kali | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TP - TGR | 12 bulan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Penyusunan buku laporan semester ikhtisar hasil pengawasan | 2 semester | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi dan birokrasi secara online | 12 bulan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan | 1 unit | | | | | | | Inspektorat | |
| | Pelaksanaan Penghitungan Penilaian Angka Kredit JFA dan P2UPD | | | | | | | | | | 22.900.000,00 | 25.190.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.20.0100 | Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kantor perwakilan di Jakarta | Pelaksanaan pemeriksaan/reviu lapkeu/evaluasi LAKIP SKPD dan kabupaten/kota /evaluasi LPPD kab/kota | 100 obrik | Jumlah LHP/LHE yang diterbitkan | 100 LHP/LHE | Meningkatnya ketaatan dan kedisplinan dalam pelaksanaan tugas | 100% | 2.861.920.000,00 | 3.148.112.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0200 | Kegiatan penanganan kasus di lingkungan Pemerintah Daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan pengawasan atas laporan pengaduan masyarakat | 10 kasus | Terperiksanya pengaduan masyarakat yang dituangkan dalam LHP | 10 LHP | Meningkatnya ketaatan dan kedisplinan dalam pelaksanaan tugas | 100% | 203.100.000,00 | 223.410.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0400 | Kegiatan penanganan kasus di lingkungan Pemerintahan di bawahnya | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan pengawasan atas laporan pengaduan masyarakat | 3 kasus | Terperiksanya pengaduan masyarakat yang dituangkan dalam LHP | 3 LHP | Meningkatnya ketaatan dan kedisplinan dalam pelaksanaan tugas | 100% | 77.890.000,00 | 85.679.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0500 | Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan rapat gelar pengawasan daerah | 1 kali | Informasi data perkembangan penyelesaian tindak lanjut atas pengawasan APIP dan BPK RI dari 71 objek | 100 buku | Meningkatkan kesadaran penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK RI terhadap SKPD di lingkungan Pemprov Babel dan Pemerintah kab/kota | 100% | 213.385.000,00 | 234.723.500,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0600 | Kegiatan Tindak lanjut Hasil temuan pengawasan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan gelar rapat tindak lanjut hasil pengawasan | 1 kali | Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI | 43 SKPD di lingkungan Pemprov Kep. Babel; 28 SKPD di lingkungan 7 pemerintah kab/kota | Meningkatnya prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan | Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Tahun2016 sebanyak 100 LHP | 219.313.000,00 | 241.244.300,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2016 | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.07.20.0700 | Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Irjen Kemendagri di Jakarta | Pelaksanaan koordinasi pengawasan, rakorwasda dan rakorwasdanas | 2 kegiatan | Terlaksananya kordinasi pengawasan, rakorwasda dan rakorwasdanas | 1 (satu) Program Kerja Pemeriksa Tahunan (PKPT) | Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan secara nasional | 100% | 308.660.000,00 | 339.526.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.800 | Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kantor perwakilan di Jakarta | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan | 12 bulan | Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan SKPD Pemprov Kep. Bangka Belitung dan di lingkungan SKPD pemerintah kab/kota | 43 SKPD di lingk. Pemprov. Kep. Babel; 28 SKPD di lingk. pemkab/kota; 133 tim dan 133 laporan hasil pemantauan evaluasi | Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI terhadap SKPD di lingkungan Pemprov Babel, kantor perwakilan di Jakarta dan SKPD di lingkungan pemerintah kab/kota | Mencapai opini WTP | 1.266.217.000,00 | 1.392.838.700,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0900 | Kegiatan Forum Komunikasi Inspektur se- Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan Forum Koordinasi Inspektur se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 kali | Rapat koordinasi Inspektur se- Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 kali | Koordinasi dan sinkronisasi program kerja inspektorat se- Provinsi Kep. Bangka Belitung | Agenda kesepakatan bersama | 203.184.000,00 | 223.502.400,00 | Inspektorat | Baru |
| 1.20.07.20.1000 | Kegiatan penyelesaian kerugian daerah oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TP - TGR keuangan dan barang daerah | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TP - TGR | 12 bulan | Berupaya menyelesaikan TP - TGR keuangan serta barang daerah milik negara/daerah | 12 bulan | Intensifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK RI thd pengembalian kerugian keuangan serta barang milik negara/daerah | 100% | 513.236.000,00 | 564.559.600,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.3000 | Kegiatan Penyusunan Laporan Ikhtisar hasil pengawasan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyusunan buku laporan semester ikhtisar hasil pengawasan | 2 semester | Tersedianya laporan hasil pengawasan | 150 buku (75 buku/semester) | Informasi berkala laporan hasil pengawasan kpd gubernur untuk bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan | Buku semester I TA 2015 dan buku semester II TA 2016 | 89.740.000,00 | 98.714.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| **1.20.07.21** | **Program pelatihan profesiaonalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **PNS yang mengikuti diklat fungsional/diklat teknis dibidang pengawasan** | **85 orang PNS** | | | | | **1.300.030.000,00** | **1.430.033.000,00** | **Inspektorat** | |
| | | | | | Pelaksanaan rakor APIP dan seminar standar audit, kode etik dan telaahan sejawat | 2 kegiatan | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Pelaksanaan pelatihan evaluasi LAKIP kab/kota | 100 orang | | | | | | | Inspektorat | |
| | | | | | Terlaksananya peningkatan kompetensi auditor dan P2UPD | 2 kegiatan | | | | | | | Inspektorat | |
| | Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja | | | | | | | | | | 226.930.000,00 | 249.623.000,00 | Inspektorat | |
| 1.20.07.21.0100 | Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PNS yang mengikuti diklat fungsional/diklat teknis dibidang pengawasan | 86 orang PNS | Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat fungsional/diklat teknis | 86 orang PNS | Meningkatnya kualitas aparat pengawas pemerintah | 100% | 796.900.000,00 | 876.590.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.21.0400 | Kegiatan seminar dan koordinasi aparatur pengawas intern pemerintah (AAIP) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan rakor APIP dan seminar standar audit, kode etik dan telaahan sejawat | 2 kegiatan | Terlaksananya rakor APIP dan seminar standart audit, kode eti dan telaahan sejawat | 2 kegiatan | Tersusunnya program kerja APIP | 100% | 177.600.000,00 | 195.360.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) | | | | | | | | | | 98.600.000,00 | 108.460.000,00 | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif 2016 | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.20.07.24** | **Program pengintefsifan penanganan pengaduan masyarakat** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | **Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Penanganan pengaduan masyarakat yang dapat di selesaikan** | **3 kasus** | | | | | **85.400.000,00** | **93.940.000,00** | **Inspektorat** | |
| 1.20.07.24.0100 | Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penanganan pengaduan masyarakat yang dapat di selesaikan | 3 kasus | Jumlah penanganan pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti | 3 kasus | Penyelesaian atas kebenaran laporan pengaduan masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut | 100% | 85.400.000,00 | 93.940.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| | **Progam Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi** | | | | | | | | | | **1.074.020.000,00** | **1.181.422.000,00** | **Inspektorat** | |
| 1.20.07.20.3100 | Kegiatan Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi dan birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara online | 12 bulan | Laporan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi dan birokrasi secara online terhadap 44 SKPD di lingkungan Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kementrian PAN dan RB, Kementrian Dalam Negeri dan Serketariat Negara UKP4 | Laporan 4 Triwulan dan Laporan Tahunan | Informasi kpd Kepala Daerah dan kepala SKPD untuk mengupayakan perbaikan kebijakan dan kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 43 SKPD diharapkan telah melakukan reformasi birokrasi | 565.100.000,00 | 621.610.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| 1.20.07.20.0300 | Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2016 | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov Kep. Bangka Belitung | 12 bulan | Tersedianya Laporan Pengendalian Gratifikasi | 1 Laporan | Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan serta pembuat kebijakan | 43 SKPD di Lingkungan Pemprov Kep. Bangka Belitung | 372.250.000,00 | 409.475.000,00 | Inspektorat | Baru |
| 1.20.07.20.093.0100 | Kegiatan penignkatan sistem aplilasi tindak lanjut hasil pengawasan (*upgrading* ) | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan sistem aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan | 1 unit | Penyempurnaan dan peningkatan sistem aplikasi TLHP | Upgrading sistem aplikasi | Informasi hasil tindak lanjut pengawasan berbasis sistem aplikasi | 100% | 136.670.000,00 | 150.337.000,00 | Inspektorat | Sedang Berjalan |
| **TOTAL PAGU PROGRAM RUTIN + WAJIB** | | | | | | | | | | | **10.987.955.000** | **12.086.750.500** | | |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Keg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.08. | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 7.384.043.700 | 7.880.439.500 | | |
| | Urusan Rutin | | | | | | | | | | 5.791.110.000 | 6.130.439.500 | | |
| 1.20.1.20.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | 4.798.380.000 | 5.055.000.000 | | |
| 1.20.1.20.08.01.0100. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah perangko dan materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan | 3850 lembar perangko dan materai, 12 bulan belanja pengiriman | tersedianya perangko dan materai yang dibeli dan jasa pengiriman barang yang dilaksanakan | 100% | 50.250.000 | 60.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.0200. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah rekening listrik, telefon, internet dan faksimil yang dibayarkan | 12 bulan | tersedianya rekening listrik, telefon, internet dan faksimil yang dibayarkan | 100% | 172.800.000 | 225.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.0700. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah honor administrasi keuangan yang dibayarkan | 13 orang | tersedianya honor administrasi keuangan yang dibayarkan | 100% | 112.050.000 | 150.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.0800. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 12 bulan | tersedianya bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 100% | 42.000.000 | 70.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.0900. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki | 100% | 60.000.000 | 70.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1000. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 1 paket | tersedianya alat tulis kantor yang tersedia | 100% | 66.000.000 | 70.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1100. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | 4680 lembar, 1088 buku, 4465 buah | tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang diadakan | 100% | 83.020.000 | 90.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1200. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | 12 bulan | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | 100% | 25.000.000 | 30.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1200. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | 1 paket | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia | 100% | 1.965.430.000 | 1.600.000.000 | Kantor Perwakilan | Baru |
| 1.20.1.20.08.01.1300. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli | 100% | 453.095.000 | 300.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1400. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah bahan perlengkapan yang dibeli | Bahan perlengkapan | tersedianya bahan perlengkapan yang dibeli | 100% | 73.415.000 | 80.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1500. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah bahan bacaan yang tersedia | 1.992 buah | tersedianya bahan bacaan yang tersedia | 100% | 16.740.000 | 25.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1600. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah bahan logistik yang tersedia | 53 tabung, 1200 galon, 530 kotak | tersedianya bahan logistik yang tersedia | 100% | 45.290.000 | 50.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1700. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah makan dan minum yang tersedia | 12 bulan | tersedianya makan dan minum yang tersedia | 100% | 336.000.000 | 400.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.1800. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan | 12 bulan | tersedianya perjalanan dinas yang dilaksanakan | 100% | 250.000.000 | 600.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.01.1800 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Jakarta | | | Terlakaasananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bln | Meningkatnya fungsi badan diklat prov. Kep. Babel | 100% | 100.000.000 | 200.000.000 | Kantor Perwakilan | Baru |
| 1.20.1.20.08.01.1900. | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah tenaga PHL yang dibayarkan | 7 orang supir, 8 orang kebersihan, 8 orang keamanan, 6 orang TU | tersedianya tenaga PHL yang dibayarkan | 100% | 915.290.000 | 1.000.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.01.2000. | Pengelolaan Website | | | Jakarta | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | jumlah honor pengelola website dan artikel yang dibayarkan | 12 bulan | tersedianya honor pengelola website dan artikel yang dibayarkan | 100% | 32.000.000 | 35.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| **1.20.1.20.08.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **556.005.000** | **625.439.500** | | |
| 1.20.1.20.08.02.1000. | Pengadaan Meubelair | | | Jakarta | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | jumlah meubelair yang dibeli | 10 buah meja dan 10 buah kursi kerja | tersedianya meubelair yang dibeli | 100% | 197.070.000 | 200.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.02.2200. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Jakarta | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 2 paket pemeliharaan rutin/berala gedung kantor | tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 153.990.000 | 200.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.02.9913. | Pengadaan Sarana Pendukung di Anjungan | | | Jakarta | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | jumlah sarana pendukung di anjungan yang dibangun | dapur, mushola, kamar mandi, gudang | tersedianya sarana pendukung di anjungan yang dibangun | 100% | 204.945.000 | 225.439.500 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| **1.20.1.20.08.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **43.770.000** | **30.000.000** | | |
| 1.20.1.20.08.03.0200. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | | Jakarta | Tingkat disiplin aparatur | 100% | jumlah pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapan | 114 stel Baju Dinas | tersedianya pakaian dinas dan pakaian hari-hari tertentu beserta perlengkapan | 100% | 18.770.000 | - | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.03.0200 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Jakarta | | | Terlaksananya kegiatan responsig gender | 1 kegiatan | Terpenuhinya kegiatan responsif gender | 100% | 25.000.000 | 30.000.000 | Kantor Perwakilan | Baru |
| **1.20.1.20.08.04.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | | | | | | | | | | **392.955.000** | **420.000.000** | | |
| 1.20.1.20.08.05.0300. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | Jakarta | Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur | 100% | jumlah pelatihan/bimtek yang akan diikuti | 1 paket | tersedianya pelatihan/bimtek yang akan diikuti | 100% | 135.940.000 | 150.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.05.9910. | Training Motivasi dan Keagamaan | | | Jakarta | Tingkat kapasitas sumberdaya aparatur | 100% | jumlah training motivasi dan keagamaan | 1 kegiatan training motivasi dan keagamaan | tersedianya training motivasi dan keagamaan yang diikuti | 100% | 257.015.000 | 270.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| **1.24.1.26.01.17.** | **Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan** | | | | | | | | | | - | - | | |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **1.592.933.700** | **1.750.000.000** | | |
| **1.20.** | **Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | **1.592.933.700** | **1.750.000.000** | | |
| **1.20.1.20.08.16.** | **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** | | | | | | | | | | **783.891.000** | **750.000.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.08.16.0100. | Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan | | | Yogyakarta | Tingkat pelayanan kedinasan kepala dinas/wakil kepala daerah | 100% | jumlah kegiatan yang dilaksanakan | 1 kegiatan yang dilaksanakan | tersedianya kegiatan yang dilaksanakan | 100% | 639.115.000 | 750.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.16.0500. | Pengadaan Cinderamata | | | Jakarta | Tingkat pelayanan kedinasan kepala dinas/wakil kepala daerah | 100% | jumlah cinderamata yang dibeli | 100 buah cinderamata | tersedianya cinderamata yang dibeli | 100% | 85.698.000 | - | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.20.1.20.08.16. | Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) | | | Jakarta | Tingkat pelayanan kedinasan kepala dinas/wakil kepala daerah | 100% | jumlah Handy Talkie yang dibeli | 8 buah handy talkie | tersedianya handy talkie yang dibeli | 100% | 59.078.000 | - | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| **1.17.1.20.08.16.** | **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** | | | | | | | | | | **809.042.700** | **1.000.000.000** | | |
| 1.17.1.20.08.16.2500. | Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Kebudayaan | Jakarta | Terselenggaranya kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | Terlaksananya kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung | 12 bulan | Laporan kegiatan Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di Anjungan Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | 42.670.000 | 100.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.17.1.20.08.16.3900. | Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Kebudayaan | Jakarta | Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII | 100% | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII | 1 pagelaran | Laporan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT TMII | 100% | 223.818.700 | 250.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.17.1.20.08.16.4000. | Pagelaran Seni Drama Tari Khas Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Kebudayaan | Jakarta | Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi | 100% | Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi | 1 pagelaran | Laporan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Budaya Daerah Gelar Kesenian Dalam Rangka HUT Provinsi | 100% | 240.589.000 | 250.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |
| 1.17.1.20.08.16. | Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung | Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata | Kebudayaan | Jakarta | Terselenggaranya Kegiatan Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung | 100% | Terlaksananya Kegiatan Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung | 7 pentas seni | Laporan Kegiatan Paket Acara Khusus Pentas Seni 7 Kabupate/Kota Se-Provinsi Bangka Belitung | 100% | 301.965.000 | 400.000.000 | Kantor Perwakilan | Sedang berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 12.649.281.600 | 8.910.787.160 | | |
| 1.20 | Urusan Rutin | | | | | | | | | | 6.034.111.600 | 4.770.119.860 | | |
| 1.20.1.20.09.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terwujudnya sistem administrasi perkantoran yang benar, baik dan profesional | 660 bln | | | | | 3.556.452.600 | 3.895.311.860 | | |
| 1.20.1.20.09.01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas surat-menyurat dengan baik | 100% | Tersedianya pelayanan administrasi surat menyurat selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat | Kualitatif | 10.925.000 | 12.017.500 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya pelaksanaan tugas operasional perkantoran | 100% | Tersedianya pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam menjalankan operasional kantor | 100% | 556.400.000 | 612.040.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas dengan baik dan benar | 100% | Tersedianya pelayanan administrasi keuangan yang prima selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 254.850.000 | 280.335.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas fungsi dan pelayanan kantor | 100% | Tercipta dan tersedianya pelayanan kebersihan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan sekitar | 100% | 598.200.000 | 658.020.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1000 | Penyediaan alat tulis kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Peningkatan kualitas kerja | 100% | Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kediklatan | 100% | 87.999.600 | 96.799.560 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya pelaksanaan tugas operasional perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan kebutuhan barang cetakan | 100% | 50.000.000 | 55.000.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1200 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya pelaksanaan tugas operasional perkantoran | 100% | Tersedianya dan terciptanya penerangan lingkungan kantor lebih baik selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya pelayanan penerangan lingkungan kerja | 100% | 219.000.000 | 240.900.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1300 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas dengan baik | 100% | Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor dalam mendukung operasional kantor | 12 bln | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 100% | 72.060.000 | 79.266.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terciptanya informasi dan data pendukung selama 12 bulan | 12 bln | Meningkatnya capaian informasi dan data dalam bentuk media cetak | 100% | 51.424.000 | 56.566.400 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1700 | Penyediaan makanan dan minuman | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Tersedianya makanan dan minuman petugas, rapat dan tamu selama 12 bulan | 12 bln | Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan petugas | 100% | 57.044.000 | 62.748.400 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1800 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi | 100% | Terlakaasananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Pegawai yang melakukan perjalanan dinas | Meningkatnya fungsi badan diklat prov. Kep. Babel | 100% | 350.000.000 | 385.000.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1800 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Kegiata rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100% | Terlakaasananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Pegawai yang melakukan perjalanan dinas | Meningkatnya fungsi badan diklat prov. Kep. Babel | 100% | 175.000.000 | 192.500.000 | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas fungsi dan pelayanan perkantoran | 100% | Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi selama 12 bulan | 37 orang | Meningkatnya pelayanan administrasi | 1 PT | 1.058.290.000 | 1.164.119.000 | Badiklat | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.01.1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Tersedianya logistik operasional kantor | Isi ulang gas elpiji 12 bh dan tabung pemadam kebakaran 12 bh, bahan pertanian 1 paket, logistik rumah tangga 1 tahun | Terpenuhinya kebutuhan logistik operasional kantor | 100% | 15.260.000 | 16.786.000 | Badiklat | Baru |
| **1.20.1.20.09.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang diklat** | **136 unit/ paket/ bln** | | | | | **2.347.895.000** | **874.808.000** | | |
| 1.20.1.20.09.02.0900 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya anggaran untuk pengadaan peralatan gedung kantor | Peralatan gedung kantor | Meningkatnya kinerja badan diklat | 1 tahun | 752.695.000 | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.02.1000 | Pengadaan Meubelair | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Pengadaan meubelair kantor | Tersedianya meublair kantor yang lebih baik | Meja kerja, kursi kerja, meja baca perpustakaan, meja kecil, meja resepsionis, meja komputer, rak tabloid/koran | Meningkatnya sarana dan prasarana operasional kantor | kuantitatif | 227.630.000 | 250.393.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.02.2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya tugas dengan baik | 100% | Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor | Gedung-gedung badan diklat yang terpelihara | Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan | 1 tahun | 799.920.000 | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.02.2400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan dinas/operasional dan BBM mesin potong rumput | 5 unit mobil, 22 unit motor yang terpelihara | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan | 1 tahun | 342.800.000 | 377.080.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.02.2800 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan | AC, mesin genset, komputer, mesin fotocopy, tv, proyektor, sound system dan pompa air | Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan | 1 tahun | 186.000.000 | 204.600.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.02.9980 | Pengembangan dan Pengelolaan Website/Sistem Informasi database | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Fasilitas peralatan kantor tercapai dengan baik | 100% | Tersedianya website dan sistem informasi database yang memadai | 1 dokumen | Meningkatnya sistem informasi database kediklatan yang memadai | kuantitatif | 38.850.000 | 42.735.000 | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.02.... | Pembangunan Gedung Tamu (Guest House) Badiklat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Tersedianya gedung tamu (Guest House) Badiklat | 1 gedung | Meningkatnya sarana dan prasarana kantor | 100% | | - | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.02.... | Pembangunan Ruang makan Diklat | | | | | | Tersedianya gedung ruang makan diklat | 1 gedung | Meningkatnya sarana dan prasarana kantor | 100% | | - | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.02.... | Pembangunan Gedung Ruang Belajar Diklat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Tersedianya ruang belajar diklat | 1 gedung | Meningkatnya sarana dan prasarana kantor | 100% | | - | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.02.... | Pengadaan Kendaraan Roda 4 | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Tersedianya kendaraan roda 4 untuk kegiatan diklat | 2 unit | Lancarnya pelaksanaan kegiatan pada Badiklat | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.20.1.20.09.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Meningkatnya disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi** | **200 stel** | | | | | **129.764.000** | **-** | | |
| 1.20.1.20.09.03.0501 | Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Peningkatan disiplin aparatur pegawai Diklat provinsi kepulauan bangka belitung | 100% | Pakaian seragam dinas pegawai Diklat provinsi kepulauan bangka belitung | Pakaian dinas harian 89 stel, pakaian satuan pengamanan dan atribut 12 stel, pakaian batik tradisional/cual 101 stel | Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai Badiklat provinsi kepulauan bangka belitung | 100% | 104.764.000 | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.03.2500 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Dana yang tersedia | terlaksana | Dokumen hasil fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender | 1 dokumen | Dokumen hasil fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender bidang diklat | 1 dokumen | 25.000.000 | - | Badiklat | Baru |
| **1.20.1.20.09.06.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | | **5 dok** | | | | | **-** | **-** | | |
| 1.20.1.20.09.06.1601 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya penyusunan anggaran kegiatan berbasis kinerja | 5 dok | Dokumen pelaksana anggaran tahun anggaran 2016 | 100% | | | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.06.2500 | Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan Tahunan SKPD | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terbiayainya penyusunan Renja, Lakip dan LKPJ Badiklat | 6 dok | Terlaksananya penyusunan Renja, Lakip dan LKPJ SKPD | 100% | | | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.06.2901 | Pengumpulan Data Kediklatan Penyelenggaraan Diklat Kabupaten/Kota | | | Kab/Kota | | | Terencananya kediklatan yang komperhensif | 1 dok | Terwujudnya kediklatan yang handal dalam menjalankan tugas dan fungsi | 100% | | | Badiklat | Baru |
| **1.20** | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **6.615.170.000** | **4.140.667.300** | | |
| **1.20** | **OTDA, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan** | | | | | | | | | | **6.565.941.000** | **4.086.515.400** | | |
| **1.20.1.20.09.064.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur pemerintah yang profesional** | **6.140 org** | | | | | **6.298.485.000** | **3.927.368.500** | | |
| 1.20.1.20.09.064.0500 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (3 angkatan) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksanya diklat PIM Tk.III selama 93 hari erja (585 JP) | 120 org | Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon III, peningkatan kompetensi etos kerja dan berbahasa inggris | Meningkat | 2.703.255.000 | 2.973.580.500 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.0600 | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (3 angkatan) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat kepemimpinan tingkat IV selama 97 hari kerja (585 JP) | 120 org | Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan struktural esselon IV | 100% | 2.728.605.000 | 2.974.081.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.0700 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Golongan III (3 angkatan) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat prajabatan CPNS golongan III selama 31 hari (263 JP)/18 hari pembelajaran klasikal dan 13 hari pembelajaran non klasikal | 120 org | CPNS yang telah memahami tugas kepemerintahan | 100% | | | Badiklat | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.064.0701 | Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Reguler Golongan II dan I (3 angkatan) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat prajabatan CPNS golongan II selama 27 hari (230 JP)/13 hari pembelajaran klasikal dan 14 hari pembelajaran non klasikal | 120 org | CPNS yang telah memahami tugas kepemerintahan | 100% | | | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.0900 | Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat bendahara pengeluaran | 30 org | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS sebagai bendahara pengeluaran/calon bendahara pengeluaran dalam mengelola anggaran daerah | Peningkatan kompetensi 30 orang aparatur peserta diklat | 125.544.000 | 138.098.400 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.0901 | Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat bendahara penerimaan | 30 org | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS sebagai bendahara penerima/calon bendahara penerima dalam mengelola anggaran daerah | Peningkatan kompetensi 30 orang aparatur peserta diklat | 93.527.000 | 102.879.700 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.1300 | Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat pengadaan barang/jasa pemerintah | 30 org | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah | 100% | 82.460.000 | 90.706.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.1800 | Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya ujian sertifikasi barang/jasa pemerintah | 100 org | Meningkatnya aparatur yang memiliki Sertifikat Nasional Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | Peningkatan sertifikasi 100 aparatur peserta ujian | 31.342.000 | 34.476.200 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.3100 | Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kepribadian SDM aparatur | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat pengembangan kepribadian SDM aparatur | 30 org | Meningkatnya sikap dan prilaku PNS dengan pola pikir yang komprehensif | 100% | | | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.3300 | Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah (Legal Drafting) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat penyusunan produk-produk hukum daerah (legal drafting) | 40 0rg | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur terkait dengan penyusunan produk-produk hukum daerah | meningkat | 107.159.000 | 117.874.900 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.3400 | Pelatihan Spiritual Etos Kerja | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya pelatihan spiritual etos kerja selama 3 hari | 250 org | Terwujudnya PNS yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik dalam menjalankan tugas | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.3700 | Bimtek Bahasa Inggris | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya bimtek bahasa inggris | 240 org | Jumlah peserta bimtek yang memenuhi standar kelulusan | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064.4000 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat teknis penyusunan LAKIP | 30 org | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur dalam menyusun LAKIP | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064..... | Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan Tata Naskah Dinas | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat teknis penyusunan tata naskah dinas | 30 org | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS dalam menyusun tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 100% | | - | Badiklat | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.064 ..... | Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Antar Daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat kerjasama antar daerah | 30 org | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS sebagai pelaksana kerjasama daerah untuk mewujudkan kerjasama berkesinambungan dalam pembangunan daerah | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.064 ..... | Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya diklat pengelolaan keuangan daerah | 30 org | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur PNS dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah | 100% | | - | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.064. 5111 | Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksnanya diklat pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual | 80 Org | Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur PNS dalam mengelola keuangan yang berbasis akrual | Peningkatan kompetensi 80 orang aparatur peseta diklat | 183.667.000 | 202.033.700 | | |
| 1.20.1.20.09.064. 5112 | Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pra Purna Bakti | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya diklat kewirausahaan pra purna bakti | 70 org | Meningkatnya kesiapan mental dan wawasan aparatur PNS dalam menghadapi masa purna bakti | Peningkata kompetensi 70 orang aparatur peserta diklat | 242.926.000 | 267.218.600 | Badiklat | Baru |
| 1.20.1.20.09.064 ..... | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terbiayainya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan Widyaiswara | 55 org | Meningkatnya aparatur yang dilatih dan di-didik | 100% | | - | Badiklat | baru |
| **1.20.1.20.09.065 .** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | **Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur** | | **Prov. Kep. Bangka Belitung** | **Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas** | **1.590 org/ bk/dok** | | | | | **267.456.000** | **159.146.900** | | |
| 1.20.1.20.09.064. 7111 | Rapat Koordinasi antar Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi dengan baik | 40 orang | Adanya koordinasi dengan kabupaten/kota | Meningkat | 78.205.000 | 86.025.500 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065. 1401 | Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya pelaksanaan analisis kebutuhan diklat | 5 skpd | Dokumen hasil analisis kebutuhan diklat (AKD) | 5 laporan | 44.572.000 | 49.029.200 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065. 1600 | Koordinasi Penyelenggaraan Diklat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan diklat | 12 bln | Meningkatnya fungsi Badiklat Prov. Kep. Bangka Belitung | 100% | | - | Badiklat | baru |
| 1.20.1.20.09.065. 2901 | Penyusunan Profil Kediklatan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terinformasikannya Badiklat sebagai lembaga peningkat kompetensi aparatur melalui buku profil | Bahan berupa buku profil, leaflet dan kalender pendidikan badan diklat provinsi kepulauan bangka belitung sebanyak 100 buku | Buku profil, leaflet,kalender diklat | 3 dokumen | 75.200.000 | 82.720.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065. 3702 | Evaluasi Pasca Diklat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya evaluasi pasca diklat | 8 jenis diklat | Laporan hasil evaluasi pasca diklat | 8 laporan | 49.229.000 | 54.151.900 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065. 4701 | Monitoring Penyelenggaraan Diklat Kab/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Kabupaten/Kota | | | Terlaksananya monitoring penyelenggaraan diklat kabupaten/kota | 7 kab/ kota | Dokumen hasil monitoring penyelenggaraan diklat kab/kota | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065. 4800 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badiklat | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya penyusunan SOP Badiklat | 6 dok | Dokumen SOP Badiklat | 100% | | - | Badiklat | baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.09.065 ..... | Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya penilaian angka kredit widyaiswara | 2 dok | Dokumen Hasil Penilaian Angka Kredit (Dupak) widyaiswara | 100% | | - | Badiklat | baru |
| 1.20.1.20.09.065. 7109 | Monitoring dan Evaluasi Diklat Penjenjangan | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Pelaksanaan tugas dengan baik | 100% | Terlaksananya monitoring dan evaluasi diklat penjenjangan | 8 diklat | Laporan hasil monitoring dan evaluasi diklat penjenjangan | 8 laporan | 20.250.000 | 22.275.000 | Badiklat | sedang berjalan |
| 1.20.1.20.09.065 ..... | Monitoring dan Evaluasi Diklat Teknis Fungsional | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Terlaksananya monitoring dan evaluasi diklat teknis fungsional | 10 dok | Laporan hasil monitoring dan evaluasi diklat teknis fungsional | 100% | | - | Badiklat | sedang berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **1 Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **13.159.637.000** | **31.995.774.400** | | |
| | **RUTIN** | | | | | | | | | | **4.218.897.000** | **6.514.680.000** | | |
| **1.20.1.20.10.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **2.143.393.000** | **3.574.680.000** | | |
| 1.20.1.20.10.01.0100 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya | 1 paket | Lancarnya surat menyurat untuk keperluan kantor | 12 bulan | 20.400.000 | 22.440.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.0200 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya jasa listrik, telekomunikasi dan informasi | 12 bulan | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 bulan | 108.000.000 | 230.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.0700 | Kegiatan Penyediaan Jasa administrasi Keuangan | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya honorarium pengelola keuangan | 12 bulan | Lancarnya kinerja aparatur pengelolaan administrasi keuangan | 12 bulan | 128.910.000 | 270.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.0800 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya operasional kebersihan kantor | 12 bulan | Terpeliharanya kebersihan kantor | 12 bulan | 36.000.000 | 60.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.0900 | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terpeliharanya peralatan kantor | 12 bulan | Lancarnya aktiftas perkantoran | 12 bulan | 53.748.000 | 75.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.0900 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 120.000.000 | 250.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.1100 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | 169.640.000 | 250.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.1300 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 3 lemari arsip, 2 filling kabinet, 4 water dispenser dan 1 unit kulkas | Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 3 lemari arsip, 2 filling kabinet, 4 water dispenser dan 1 unit kulkas | 203.275.000 | 450.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.1600 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan logidtik kantor | 1 paket | Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor | 12 bulan | 9.690.000 | 9.690.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.1700 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya makanan dan minuman | 1 paket | Terpenuhinya penyediaan makan dan minuman | 12 bulan | 79.600.000 | 90.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.1800 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksanya perjalanan dinas luar daerah | 1 paket | Lancarnya koordinasi ke pusat dan antar daerah | 12 bulan | 350.000.000 | 700.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.09.01.1800 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Prov. Kep. Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksanya perjalanan dinas dalam daerah | 1 paket | Lancarnya koordinasi, konsolidasi ke UPT dan pemerintah kabupaten/kota | 12 bulan | 200.000.000 | 220.000.000 | BKD | Baru |
| 1.20.1.20.10.01.1800 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan administrasi Perkantoran | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya honorarium/upah pegawai honorer/tidak tetap | 17 orang | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 13 bulan | 486.290.000 | 407.550.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.01.3100 | kegiatan pengelolaan website | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya penyediaan data dan informasi kepegawaian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 12 bulan | Meningkatnya informasi bidang kepegawaian | 12 bulan | 177.840.000 | 290.000.000 | BKD | |
| 1.20.1.20.10.01.6700 | Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kepegawaian | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Terjalinnya koordinasi dengan Instansi Kabupaten / kota | 100% | Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kepegawaian dilaksanakan | 7 Kabupaten / Kota | Terlaksananya Pembinaan dan Penguatan Koordinasi Kepegawaian | 100% | | 250.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| **1.20.1.20.10.02** | **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatus** | | | | | | | | | | **2.050.504.000** | **2.940.000.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.10.02.0500 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasional untuk menunjang operasional BKD | 100% | Penyediaan Kendaraan Dinas / Operasiona roda 4 dilaksanakan | 1 Unit Mobil | Tersedianyan Kendaraan dinas/operasional roda 4 | 100% | | 350.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.02.2200 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja di unit kerja BKD | 100% | Baiknya kondisi gedung kantor BKD | 1 Unit Gedung | Terpeliharanya gedung kantor BKD | 100% | | 80.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.02.2400 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terpeliharanya kondisi dan tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas dan operasional | 4 mobil, 22 motor | Lancarnya operasional kedinasan | 12 bulan | 255.965.000 | 380.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Pengadaan Perangkat Data Center | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Perangkat Data Center | 1 server, 3 scaner, 1 display elektronik, 1 UPS Server, 1 microsoft SQL, 2 computer clien (tab) | Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi kepegawaian | 75% | 178.070.000 | 485.000.000 | BKD | Baru |
| | Kegiatan Pengadaan Peralatan Absensi Terigrasi | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pengadaan peralatan absensi terintegrasi | 100% | Tersedianya peralatan absensi terintegrasi | 114 unit mesin absensi | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melakukan absensi terintegrasi | 12 bulan | 1.616.469.000 | 1.645.000.000 | BKD | Baru |
| 1.19.03.03.2500 | Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Prov.Kep.Babel | | | Pangkalpinang | Pelaksanaa fasilitasi dan pembinaan perencanaan penganggaran responsif gender pada BKD Provinsi dan Kabupate/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 20 orang | Terciptanya minimal satu dokumen penganggaran yang responsif gender pada BKD Provinsi dan Kabupate/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 20 orang | Laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan penganggaran responsif gender pada BKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 25.000.000 | 25.000.000 | BKD | Baru |
| | **WAJIB** | | | | | | | | | | **8.940.740.000** | **25.481.094.400** | | |
| **1.20** | **OTDA, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian** | | | | | | | | | | **8.940.740.000** | **25.481.094.400** | | |
| **1.20.1.20.10.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | | | | | **1.215.670.000** | **14.413.047.200** | | |
| 1.20.1.20.10.03.2700 | Diseminasi Beasiswa Kerjasama Pendidikan Kedinasan | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase kapasitas sumber daya apartaur | 100% | Terlaksananya diseminasi beasiswa kerjasama pendidikan kedinasan | 350 orang pelajar SLTA | Tersosialisasinya informasi peluang pendidikan kedinasan | 1 tahun | 235.910.000 | 250.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya apartaur | 100% | Terlaksanay sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian | 2 kegiatan | Meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan ketaatan pada aturan kepegawaian | 200 orang | 302.806.000 | 280.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Rapat Koordinasi Kepegawaian | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya apartaur | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi program kepegawaian daerah antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota | 1 kegiatan | Terkoordinasi program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota | Provinsi dan 7 Kabupaten/ Kota | 235.854.000 | 350.000.000 | BKD | Baru |
| | Workshop Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin disertai Praktek | | | Pangkalpinang | PNS Eselon 3 dan eselon 4 perempuan atau sebesar 30% mengenal dan memiliki kemampuan teknis dalam menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin disertai praktek | 100% | Terlaksanya workshop penyelesaian kasus pelanggaran displin disertai praktek | 45 orang laki-laki, 45 orang perempuan | Meningkatnya pemahaman aparatur cara menyelesaikan proses pelanggaran disiplin diserta praktek | 90 orang (2 hari) | 169.234.000 | 230.000.000 | BKD | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Kegiatan Penerbitan Buletin Kepegawaian | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase penyebaran berita/informasi aktual kepegawaian di Prov. Kep.Babel | 100% | Tabloid kepegawaian Triwulan 1,2,3,4 Tahun 2016 | 400 buletin | Meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan bertema kepegawaian | 4 bulan untuk SKPD dan 7 BKD/BKPP Kabupaten/ Kota | 71.940.000 | 200.000.000 | BKD | Baru |
| | Kegiatan Pembuatan Buku Profil Kepegawaian | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersedianya data informasi dalam rangka penyiapan profil kepegawaian | 100% | Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kep. Babel semester 1 dan semester 2 dan buku DUK th. 2016 | 240 buku profil dan 80 buku DUK | Meningkatnya kualitas dan kuantitas informasi profil kepegawaian PNS Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung | 49 SKPD dan 7 BKD/BKPP Kabupaten/ Kota | 108.870.000 | 120.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Workshop Sistem Informasi Berbasis Web Bidang Kepegawaian | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 15 Kasubbag kepegawaian perempuan dan 15 staff sub bagian kepegawaian perempuan atau sebesar 34% mengenal dan memiliki kemapuan teknis dalam pengelolaan sistem informasi WEB bidang kepegawaian | 100% | Terlaksananya bimbingan teknis tentang sistem informasi berbasi WEB bidang kepegawaian | 2 kegiatan | Meningkatnya kemampuan teknis pegawai perempuan dalam pengelolaan sistem informasi berbasis WEB bidang kepegawaian | 60 orang laki-laik, 30 orang perempuan | 91.056.000 | 180.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Penyusunan Buku DUK PNS Pemprov Babel | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya penempatan aparatur pemerintah daerah yang sesuai kompetensi | 100% | Buku Data DUK Pemprov. Kep. Babel | 80 buku | Tersedianya Data DUK PNS Pemprov. Kep. Babel | 80 buku DUK | | 80.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Pendidikan Bela Negara | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa | Bangka Tengah | Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur | Terlaksana | Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Angkatan | Tercapainya CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwawasan Kebangsaan, disiplin, cinta tanah air dalam mewujudkan good governance dan clean government | 150 Orang | | 1.300.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Kegiatan Pembekalan Kewirausahan PNS Pra Purnabhakti | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kesejahteraan PNS menghadapi persiapan masa pensiun | 90% | Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan kewirausahaan PNS Pra Purnabhakti | 83 Orang PNS | Terlaksanannya kegiatan Pembekalan Kewirausahaan yang di ikuti oleh PNS Pra Purnabhakti | 90% | | 195.000.000 | BKD | Baru |
| | Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terselesaikannya administrasi kepegawaian seperti Karpeg, Karis, Karsu dan Penghargaan Satyalancana | 100% | Jumlah Karpeg, Karis, Karsu sebanyak 200 kartu serta piagam satyalancana sebanyak 150 buah | 200 kartu dan 150 piagam | tersedianya penerbitan Karpeg, Karis, Karsu sebanyak 200 kartu dan piagam satyalancana sebanyak 150 buah | 100% | | 60.000.000 | BKD | Baru |
| **1.20.1.20.10.065** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | | | | | | | | | | **7.725.070.000,00** | **11.068.047.200,00** | | |
| | Fasilitas perjalanan pindah tugas PNS | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan kesejahteraan PNS yang pindah tugas ke SKPD Prov. Kep Babel di luar kabupaten/kota/pulau asal | 90% | Jumlah PNS yang difasilitasi biaya pindah tugas pada SKPD Prov. Kep Babel di luar kabupaten/kota/pulau asal | 65 Orang | Terlaksananya pemberian biaya pindah tugas PNS | 90% | 100.000.000 | BKD | Sedang berjalan | |
| | Kegiatan Pembinaan Bagi CPNS, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Prov.Kep.Babel | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan aparatur | 100% | Terlaksananya pembinaan aparatur CPNS/PNS/PTT | 6 kegiatan | Meningkatnya penegakan disiplin aparatur | 1 tahun | 94.820.000 | 230.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.03.1700 | Penyelesaian Permasalahan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin CPNS, PNS dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep.Babel | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | Persentase penyelesaian permasalahan pelanggaran kasus kode etik dan disiplin aparatur | 100% | Terlaksananya penyelesaian permasalahan kasus pelanggaran kode etik dan disiplin CPNS/PNS | 15 Kasus | Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik aparatur | 15 keputusan | 211.890.000 | 275.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.10.065.0200 | Seleksi Penerimaan Calon PNS | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa | Pangkalpinang | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2016 berbasis Computer Assisted Test (CAT) | 1 kegiatan | Terpenuhinya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 | 158 orang | 849.940.000 | 1.700.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.1201 | Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terwujudnya proses Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa | Jatinangor - Bandung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terselenggaranya seleksi penerimaan calon praja IPDN, Tahun 2016 yang transparan, obyektif, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme | 1 kegiatan | Terpenuhinya Capra IPDN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang handal, kompeten serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 | 24 Orang | 578.030.000 | 1.500.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.2500 | Pengembangan Kompetensi PNS Melalui Kediklatan dan Bimbingan Teknis | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 30 orang PNS berjenis kelamin perempuan berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi melalui kediklatan dan bimtek di TA 2016 | 100% | Terlaksananya pengembangan kompetensi PNS melalui kediklatan dan bimbingan teknis | 90 orang (60 laki-laki, 30 perempuan) | Memberikan quota/prioritas yang diutamakan nagi PNS perempuan untuk dapat memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas melalui kontribusi kediklatan dan bimbingan teknis | 1 tahun | 896.800.000 | 1.100.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.2701 | Beasiswa Tugas Belajar PNS Pemprov Kepulauan Bangka Belitug | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | terlaksananya peningkatan pendidikan formal PNS melalui beasiswa tugas belajar PNS Pemprov Kep. Bangka Belitung | S2=55 Orang dan S3=2 Orang | Tersedianya biaya pendidikan PNS tugas belajar Pemprov Kep. Bangka Belitung | 1 tahun | 2.398.650.000 | 2.600.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.5300 | Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar | Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya seleksi penerimaan pegawai tugas belajar | 21 orang | Terpenuhinya pegawai yang mengikuti tugas belajar | 1 tahun | 137.256.000 | 200.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.5400 | Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terbinanya Jabatan Fungsional Tertentu guna penetapan keberadaan dan pengembangan karier jabatan fungsional tertentu pada Pemprov. Kep. Babel | 123 orang | Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional | 123 orang | Peningkatan pemahaman dan wawasan tentang peraturan bagi para pejabat fungsional tertentu dalam melaksanakan tugas dan pengembangan karier pangkat serta jabatan | 123 orang | | 200.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.6200 | Penyelenggaraan pengukuhan dan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terselenggaranya pengukuhan dan pengambilan sumpah CPNS menajdi PNS | 136 CPNS yang dikukuhkan menajdi PNS | Terwujudnya CPNS yang telah dilakukan pengukuhan dan pengambilan sumpah menjadi PNS dapat melaksanakan tugasnya secara profesional | 1 tahun | 26.500.000 | 65.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.6300 | Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya penyelesaian kenaikan pangkat/jabatan, pensiun pegawai bagi PNS di lingkungan Pemprov dan PNS golongan IV.a ke atas di BKD Kabupaten/Kota | 700 SK | Sesuainya SK kenaikan pangkat/jabatan, pensiun PNS dengan berkas usulan kenaikan pangkat pegawai dari SKPD di lingkungan Pemprov dan PNS golongan IV.a ke atas kabupaten/kota | 1 tahun | 137.715.000 | 350.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.1.20.10.065.6400 | Penyusunan Formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya penyusunan formasi pegawai aparatur sipil negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 42 SKPD, dan 10 buku penyusunan formasi | Formasi pegawai aparatur sipil negara yang tepat, baik secara kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusinya secara proporsional | 125 Formasi ASN 2016 | 164.856.000 | 170.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.6500 | Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Struktural | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya pengambilan sumpah dan pelantikan Pejabat Struktural | 12 Pelantikan | Terisinya jabatan struktural | 1 tahun | 150.300.000 | 230.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| 1.20.1.20.10.065.6600 | Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Prov. Kep. Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya sidang Baperjakat | 12 sidang | Terbitnya Rekomendasi hasil penilaian pangkat dan jabatan kepada PPKD atau Sekda | 12 rekomendasi | 341.560.000 | 375.000.000 | BKD | Sedang Berjalan |
| | Monitoring dan Evaluasi SKP | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya evaluasi dan pembinaan tata cara pengisian SKP (penilain prestasi kerja) SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 45 SKPD | Meningkatnya Pemahaman pegawai tentang penerapan penyusunan SKP pada SKPD Provinsi Kep. Bangka Belitug | 45 SKPD | 83.805.000 | 185.000.000 | BKD | Baru |
| 1.20.1.20.10.065.7106 | Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Partisipasi wanita untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi meningkat 50% laki-laki, 50% perempuan | 100% | Terlaksananya Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka Oleh Tim Panitia Seleksi Pimpinan Tinggi di lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung | 4 kegiatan | Meningkatnya partisipasi wanita untuk mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi | 4 rekomendasi | 990.746.000 | 1.089.820.600 | | |
| | Workshop Kepemimpinan dan Inovasi aparatur Prov. Kep. Banel | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Pelaksanaan workshop kepemimpinan dan inovasi aparatur | 100 orang | Meningkatnya profesionalisme, leadership dan sikap inovatif SDM Aparatur | 1 tahun | 180.206.000 | 198.226.600 | | |
| | Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur | 100% | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pemabngunan karakter bangsa Indonesia | 130 orang pejabat eselon | Meningkatnya profesionalisme dan kinerja PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 tahun | 481.996.000 | 600.000.000 | BKD | Baru |
| | | | | JUMLAH | | | | | | | 13.159.637.000 | 31.995.774.400 | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1. Urusan Wajib | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20. | Urusan Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandiaan | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20.11.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | | | | | 1.423.000.000 | 1.565.300.000 | | |
| 1.20.11.01.0100. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Materai yang dibeli 3000 dan 12 kali Belanja Jasa Pengiriman | 3000 Materai dan 12 kali Belanja Jasa Pengiriman | Tersedianya 3000 Materai dan 12 kali Belanja Jasa Pengiriman | 100% | 20.000.000 | 22.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.0200. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | 12 kali Belanja Telepon dan Internet | Jumlah 12 kali Belanja Telepon dan Internet | Tersedianya Belanja Telepon dan Internet | 100% | 60.000.000 | 66.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.0700. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Pengelolaan Keuangan Daerah Selama 1 Tahun | 1 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Keuangan | 100% | 120.000.000 | 132.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.0800. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Peralatan dan Bahan Kebersihan | Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan | 100% | 50.000.000 | 55.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.0900. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 30.000.000 | 33.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.1000. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Alat Tulis Kantor Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 100% | 65.000.000 | 71.500.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.1100. | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Belanja Cetak, Belanja Pengadaan dan Belanja Penjilidan Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Belanja Cetak, Belanja Pengadaan & Belanja Penjilidan | Tersedianya Belanja Cetak, Belanja Pengadaan dan Belanja Penjilidan | 100% | 40.000.000 | 44.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.1500. | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Belanja Surat Kabar Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Belanja Surat Kabar | Tersedianya Belanja Surat Kabar | 100% | 10.000.000 | 11.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.1600. | Penyediaan bahan logistik kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Belanja Bahan Logistik Kantor Sebanyak 12 Kali | 12 Kali Belanja Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Belanja Bahan Logistik Kantor | 100% | 20.000.000 | 22.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.11.01.1700. | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu | Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat dan Tamu | 100% | 40.000.000 | 44.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.01.1800. | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 100% | 400.000.000 | 440.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| | Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah | | | | | | | | | | 100.000.000 | 110.000.000 | | |
| 1.20.11.01.1900. | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Jumlah Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (18 Orang) dalam 1 Tahun | 18 Orang Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (18 Orang) | Tersedianya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (18 Orang) | 100% | 468.000.000 | 514.800.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| **1.20.11.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | **Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** | **Pangkalpinang** | **Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **335.000.000** | **368.500.000** | | |
| 1.20.11.02.0700. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Tersedianya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 100% | 30.000.000 | 33.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.02.0900. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Jumlah Belanja leptop dan Pengadaan Printer dalam 1 Tahun | 1 Tahun Belanja leptop dan Pengadaan Printer | Tersedianya Belanja leptop dan Pengadaan Printer | 100% | 50.000.000 | 55.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.02.1000. | Pengadaan Meubelair | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Pengadaan Meubelair Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pengadaan Meubelair | Tersedianya Belanja Pengadaan Meubelair | 100% | 30.000.000 | 33.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.02.2300. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Selama 1 Tahun | 1 Tahun Pemeliharaan Rutin/Berkala | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor | 100% | 25.000.000 | 27.500.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.02.2400. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala | Tersedianya Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 100% | 200.000.000 | 220.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| **1.20.11.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | **Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** | **Pangkalpinang** | **Tingkat Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **25.000.000** | **27.500.000** | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Profinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | | | | 25.000.000 | 27.500.000 | | |
| | | | | | TOTAL PAGU PROGRAM RUTIN | | | | | | **1.783.000.000** | **1.961.300.000** | | |
| **1.20.11.05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | **Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** | **Pangkalpinang** | **Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | | | | | **75.000.000** | **82.500.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.11.05.0100. | Pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Aparatur Diklat dalam 1 Tahun | Jumlah Aparatur yang Diklat dalam 1 Tahun | Tersedianya Aparatur yang Berkualitas | 100% | 75.000.000 | 82.500.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| **1.20.11.65.** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | **Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** | **Pangkalpinang** | **Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur** | **100%** | | | | | **1.901.200.000** | **2.091.320.000** | | |
| 1.20.11.65.5700. | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan danPengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 100% | 75.000.000 | 82.500.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.65.4400. | Persiapan Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan serta Pelaporan Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Kab/Kota KORPRI, Dewan Pengurus Unit Provinsi KORPRI dan DPP KORPI Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah dan Pelantikan 7 Pengukuhan DP KORPRI Kab/Kota | Pengukuhan dan Pelantikan 7 DP KORPRI Kab/Kota | Terbentuknya Kepengurusan DP KORPRI Kab/Kota | 80% | 136.200.000 | 149.820.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.65.6100. | Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Rapat Kerja KORPRI | Tersedianya Belanja Rapat Kerja KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 200.000.000 | 220.000.000 | SET DPP KORPRI | Baru |
| 1.20.11.65.3800. | Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat | Tersedianya Belanja Bhakti Sosial KORPRI dan Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 250.000.000 | 275.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.65.5800. | Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara | Tersedianya Belanja Pemberian Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara | 100% | 500.000.000 | 550.000.000 | SET DPP KORPRI | Baru |
| 1.20.11.65.4300. | Pembinaan Rohani PNS/CPNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Pembentukan yayasan KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pembentukan yayasan KORPRI | Tersedianya Belanja Pembentukan yayasan KORPRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 240.000.000 | 264.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.20.11.65.3300. | Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | 100% | Jumlah Belanja Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016 Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016 | Tersedianya Belanja Seleksi STQ KORPRI Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) KORPRI Tingkat Nasional III Tahun 2016 | 100% | 500.000.000 | 550.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| **1.20.11.075.** | **Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | **Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya** | **Pangkalpinang** | **Tingkat Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga** | **100%** | | | | **100%** | **1.609.815.000** | **1.770.796.500** | **SET DPP KORPRI** | **Sedang Berjalan** |
| | Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 100% | Jumlah Belanja Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 | Tersedianya Belanja Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KORPRI ke II Tahun 2016 | 100% | 1.259.815.000 | 1.385.796.500 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| 1.20.11.075.0600. | Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Membangun Tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya | Pangkalpinang | Tingkat Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | 100% | Jumlah Belanja Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selama 1 Tahun | 1 Tahun Belanja Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersedianya Belanja Pertandingan olahraga antar Unit KORPRI se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 350.000.000 | 385.000.000 | SET DPP KORPRI | Sedang Berjalan |
| **TOTAL PAGU PROGRAM WAJIB** | | | | | | | | | | | **3.586.015.000** | **3.944.616.500** | | |
| **TOTAL PAGU PROGRAM RUTIN + WAJIB** | | | | | | | | | | | **5.369.015.000** | **5.905.916.500** | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Belanja Langsung | | | | | | | | | | 7.887.510.000 | 27.665.675.140 | | |
| | Urusan Rutin | | | | | | | | | | 2.858.050.000 | 16.154.489.140 | | |
| 1.21.02.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 12 Bulan | | | | | 1.698.050.000 | 1.782.952.500 | BKP Prov | |
| 1.21.02.01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Pelayanan dsn Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos | 12 Bulan | Lancarnya Pelayanan dan Pengiriman Surat Menyurat, Perangko, Materai dan Benda Pos | 12 Bulan | 15.000.000 | 15.750.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi SDAL | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi berupa jaringan Telepon dan Internet, Penyediaan Sumber Air Bersih Kantor dan Daya Listrik Kantor | 12 Bulan | Meningkatnya Jasa Pelayanan Komunikasi dan Jaringan Telepon dan Internet Kantor, Ketersediaan Air Bersih di Lingkungan Kantor dan Optimalnya Pemakaian Daya Listrik Perkantoran | 12 Bulan | 75.000.000 | 78.750.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.0300 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Keuangan SKPD | 12 Bulan | Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD | 12 Bulan | Tertibnya Administrasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 150.000.000 | 157.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya jasa adm.keuangan dan honor PPTK, Tim pengadaan Barang dan Jasa serta Pemeriksa Barang | 12 Bulan | lancarnya Jasa Administrasi Keuangan dan honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pengadaan barang dan jasa serta Pemeriksa Barang | 12 Bulan | - | - | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Pangkalpinang | Terjaganya Kebersihan Ruangan Kerja dan Lingkungan Kantor | 12 Bulan | Tersediannya Peralatan Kebersihan Kantor, Terlaksananya Kebersihan Ruangan Kerja dan Lingkungan Kantor | 12 Bulan | Meningkatnya Kebersihan Ruangan dan Lingkungan Kantor | 12 Bulan | 200.000.000 | 210.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.0900 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Motivasi dan Etos Kerja Pegawai | 12 Bulan | Terlaksanya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor beupa Perbaikan AC, Komputer, Laptp, Telepon,dan Instalasi Air/Ledeng | 12 Bulan | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor berupa Perbaikan AC, Komputer/Laptop, Telepon dan Instalasi Air/Ledeng | 12 Bulan | 40.000.000 | 42.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.1000 | Penyediaan alat tulis kantor | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya alat tulis kantor berupa Kertas HVS, Amplop, Map, Toner Printer, Pensi, Binder, dan ATK Lainnya | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa Kertas HVS, Amplop, Map, Toner Printer, Pensil, Binder dan ATK Lainnya | 12 Bulan | 100.000.000 | 105.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya Blanko, Kop Surat, Amplop, Lembaran Disposisi Surat, Buku Ekspedisi Surat, Buku Memo, Buku Surat Masuk/Keluar dan Bahan Cetakan/Perbanyakan Naskah Kantor | 12 Bulan | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 100.000.000 | 105.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.21.02.01.1200 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik seperti Pembuatan Jaringan/Terminal Kabel Listrik disetian Ruangan Kerja Kantor, Lampu Penerangan Bangunan Kantor dan Lingkungan/Halaman Perkantoran | 12 Bulan | Tersedianya Jaringan/Terminal Kabel Listrik disetiap Ruangan Kerja Kantor, Berfungsinya Lampu Penerangan Bangunan Kantor dan Lingkungan/Halaman Perkantoran | 12 Bulan | 45.000.000 | 47.250.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pustaka Ketahanan Pangan | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan bahan Bacaan seperti Koran/Surat Kabar, Majalah dan Buku-buku Pertanian | 12 Bulan | Tersedianya Bahan Bacaan seperti Koran/Surat Kabar, Majalah dan Buku-buku Pertanian | 12 Bulan | 20.000.000 | 21.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.1700 | Penyediaan makanan dan minuman | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Peningkatan Kinerja Aparatur | 12 Bulan | Tersedianya Makan Minum Rapat baik Makan Minum Rapat Intern maupun Makan Minum Tamu | 12 Bulan | Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan SKPD | 12 Bulan | 60.000.000 | 63.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.01.01.1800 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Koordinasi Pembangunan Ketahanan Pangan | 12 Bulan | Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan Rapat ke Luar Daerah | 12 Bulan | Tersedianya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi, Undangan Rapat ke Luar Daerah | 12 Bulan | 400.000.000 | 420.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.8800 | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Terlaksananya Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan Ketahanan Pangan dengan Kabupaten/Kota | 100% | Terlaksananya Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dan Konsolidasi Pembangunan Ketahanan Pangan ke Kab/Kota | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kab/Kota | 7 Kab/Kota | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| 1.21.02.01.1900 | Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | | | Pangkalpinang | Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efisiensi dan Keamanan Kantor | 12 Bulan | Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dan Pengamanan Lingkungan Perkantoran | 12 Bulan | Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keamanan Perkantoran | 12 Bulan | 193.050.000 | 202.702.500 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.01.4100 | Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Kedaulatan Pangan | | | Tanjung Krasak, Toboali | Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Katahanan Pangan serta Pembinaan Kelembagaan Katahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksanannya Perjalanan Dinas dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Kedaulatan Pangan serta Pembinaan Kelembagaan Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Pembaungan dan Koordinasi tentang Kebijakan Kedaulatan Pangan | 7 Kab/Kota | 150.000.000 | 157.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| **1.21.02.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur** | **12 Bulan** | | | | | **800.000.000** | **13.582.032.640** | **BKP Prov** | |
| 1.21.02.02.1300 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Pangkalpinang | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor | 12 Bulan | Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor | 12 Bulan | 375.000.000 | 393.750.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02.2400 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Jabatan | 12 Bulan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Badan Ketahanan Pangan | 12 Bulan | Meningkatkan Pelayanan Terhadap Kinerja Badan Ketahanan Pangan | 12 Bulan | 265.000.000 | 278.250.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02.0300 | Pembangunan Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Diperolehnya Rincian Anggaran dan Gambar | 100% | Diperolehnya Rincian Gedung Kantor BKP | 12 Bulan | Lancarnya Pembuatan Pagar Kantor Dinas | 100% | - | 10.800.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02.2200 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pelayanan Perkantoran | 12 Bulan | Terpeliharanya Perawatan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan | 12 Bulan | Terlaksananya Peningkatan Perawatan Gedung Kantor Badan Ketahanan Pangan | 12 Bulan | 160.000.000 | 700.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02. | Pengadaan Partisi ruangan resepsionis | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya Partisi Ruangan Resepsionis | 12 Bulan | Lancarnya Partisi Ruangan Resepsionis | 100% | - | 165.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02.1000 | Pengadaan Mebeleur | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya sarana dan prasarana kerja perkantoran | 12 Bulan | Lancarnya pelayanan dan kinerja | 100% | - | 240.828.390 | BKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.21.02.02 | Pengadaan Kendaraan Operasional | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya kendaraan operasional Kantor dan UPTD | 1 mobil operasional mini bus, 1 mobil operasional pick up, 9 motor operasional | Lancarnya operasional Kantor | 1 mobil operasional mini bus, 1 mobil operasional pick up, 9 motor operasional | - | 705.210.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02.0400 | Pengadaan Mobil Jabatan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan dan Dedikasi terhadap kinerja | 100% | Tersedianya sarana dan prasarana jabatan | 1 mobil jabatan | Meningkatnya pelayanan dan dedikasi terhadap kinerja | 1 mobil jabatan | - | 532.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.02. | Peserta exhibition and conference | | | USA, Europe dan Australia | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya data pangan yang aman | 12 Bulan | Lancarnya exhibition and conference | 100% | - | 420.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| | | | | | | | | | | | | | BKP Prov | |
| **1.21.02.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | **Meningkatnya Disiplin Aparatur** | **40 Pegawai dan 25 Honorer** | | | | | **360.000.000** | **789.504.000** | **BKP Prov** | |
| 1.21.02.03.0200 | Pengadaan pakaian olahraga pegawai lengkap dengan sepatu | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 40 Pegawai dan 25 Honorer | Tersedianya Pakaian Olahraga Pegawai lengkap dengan sepatu | 65 stel pakaian olahraga lengkap | Lancarnya pelaksanaan kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel | 100% | - | 78.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0200 | Pengadaan pakaian dinas pegawai lengkap | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur/Pegawai | 12 Bulan | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya bagi Pegawai Badan Ketahanan Pangan | 150 Set | Meningkatnya Disiplin Aparatur/Pegawai Badan Ketahanan Pangan | 41 PNS dan 9 PHL | 65.000.000 | 78.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0400 | Pengadaan pakaian korpri pegawai lengkap | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 40 Pegawai | Tersedianya Pakaian KORPRI Pegawai lengkap | 40 stel pakaian korpri lengkap | Lancarnya pelaksanaan kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel | 100% | - | 14.400.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0500 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 40 Pegawai | Tersedianya Pakaian hari-hari tertentu | 40 stel pakaian hari-hari tertentu | Lancarnya pelaksanaan kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel | 100% | - | 50.400.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0700 | Pengadaan pakaian/perlengkapan kerja lapangan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 40 Pegawai | Tersedianya Pakaiankerja lapangan | 40 stel pakaian kerja lapangan | Lancarnya pelaksanaan kinerja Pegawai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Babel | 100% | - | 19.200.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.2500 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Peningkatan Kapabiltas dan Kredibilitas Sumber Daya Aparatur/Pegawai | 100% | Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pegawai Badan | 100% | Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Keahlian Pegawai Badan Ketahanan Pangan terhadap Pengelolaan Administrasi Perkantoran | 98% | 100.000.000 | 110.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0700 | Optimalisasi Kebijakan Standar Kompetensi Manajerial/Pegawai | | | Pangkalpinang | Terlaksanannya Kebijakan Standar Kompetensi Pegawai | 1 Badan | Tersedianya Sistem Penilaian Standar Kompetensi Pegawai (Prestasi Kerja Pegawai) | 1 Badan | Meningkatnya Kinerja dan Prestasi Kerja Pegawai di Badan Ketahanan Pangan | 1 Badan | 100.000.000 | 110.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.2500 | Fasilitasi dan Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | Pangkalpinang | Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketahanan Pangan | 2 Bulan | Terlaksananya Perencanaan Responsif Gender di Bidang Ketahanan Pangan | 2 Bulan | Tersedianya Perencanaan Responsif Gender di Badan Ketahanan Pangan | 10 Laporan | 25.000.000 | 27.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.03.0100 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 100% | Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Bulan | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | 100% | 70.000.000 | 77.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **5.029.460.000** | **11.511.186.000** | **BKP Prov** | |
| **1.21** | **Bidang Urusan Ketahanan Pangan** | | | | | | | | | | **5.029.460.000** | **11.511.186.000** | BKP Prov | |
| **1.21.02.15** | **Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan** | **3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi,** | **Meningkatnya Ketahanan Pangan** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Tercapainya Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan di Lingkup BKP** | **7 Kab/Kota** | | | | | **5.029.460.000** | **11.511.186.000** | BKP Prov | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.21.02.15.0100 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan | 7 Kab/Kota | Terfasilitasinya masyarakat daerah rawan pangan | 7 Kab/Kota | 400.000.000 | 420.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.1400 | Pengembangan Desa Mandiri Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Kab. Belitung, Bateng, dan Beltim | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya penumbuhan desa mandiri pangan | 3 desa baru dan pembinaan 56 desa mandiri pangan | Tersalurkannya bantuan program desa mandiri pangan | 3 kab/kota | 150.000.000 | 157.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.5000 | Peningkatan Ketersediaan Pangan Hewani | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Kab. Belitung, Bateng, dan Beltim | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Tersedianya sumber pangan hewani | 200 ekor | Terpenuhinya ketersediaan pangan hewani | 3 kab | 138.355.000 | 145.272.750 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4300 | Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan | 10 buku | Tersedianya data analisis ketersediaan pangan | 10 buku | 183.405.000 | 192.575.250 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.1000 | Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Kab. Belitung, Beltim dan Bangka | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya pemantauan dan analisis akses pangan | 2 kab | Tersedianya data dan analisis akses pangan masyarakat | 2 kab | 123.420.000 | 129.591.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.1100 | Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan di Babel | Tercapai | Data harga pangan pokok strategis dan menjelang HBKN | 7 Kab/Kota | Diketahuinya data dan informasi harga pangan | 7 Kab/Kota | 250.000.000 | 262.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.5200 | Pemantauan dan Analisis Harga Pangan di Pulau Terpencil | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Pulau Selat Nasik, Buku Limau, Lepar dan Pongok | Meningkatnya Ketahanan Pangan di Babel | Tercapai | Data harga pangan pokok strategis dan menjelang HBKN di pulau terpencil | 6 pulau | Diketahuinya data dan informasi harga pangan di pulau terpencil | 6 pulau terpencil | 250.000.000 | 262.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.5300 | Pemantauan Pasokan dan Pemasaran Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Diketahuinya data dan informasi rantai pasokan dan pemasaran pangan | Tercapai | Data pemasukan pangan di pelabuhan | 5 komoditi | Diketahuinya pasokan pangan ke Babel | 5 komoditi | 213.000.000 | 223.650.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.1801 | Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Desa Labu, Riding Panjang, Fajar Indah, Gudang, Tanjung Pura, Tuik, Batu Betumpang, Pangkalbuluh, Pergam, Serda | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat | 18 kelompok | Tercapainya Pengembangan Lumbung Pangan | 18 kelompok | 195.230.000 | 204.991.500 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.1300 | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi | 50 ton | Tersedianya Cadangan Pangan bagi Masyarakat | 50 ton | 262.180.000 | 275.289.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4500 | Promosi Keamanan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksananya promosi keamanan pangan ke masyarakat/pelaku usaha di kab/kota | 7 Kab/Kota | Tersedianya media promosi keamanan pangan | 7 Kab/Kota | 158.000.000 | 165.900.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.2200 | Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terawasinya pangan segar melalui uji sampel dan tersedianya rapid test | 70 sampel pangan segar, 12 paket | Tersedianya data pengujian pangan segar yang aman dikonsumsi | 70 sampel pangan segar, 12 paket rapid test | 340.850.000 | 357.892.500 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.3200 | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PMHP) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Prov. Kep. Babel | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terawasinya Peredaran Produk pangan segar dan Olahan yang Bermutu dan Berkualitas, Tersedianya Alat Pengujian Pangan Segar dan Olahan | 15 sampel pangan segar dan olahan 4 paket rapid test | Tersedianya data produk hasil pertanian yang bermutu sesuai dengan standar keamanan pangan | 1 Laporan | 146.850.000 | 154.192.500 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.0300 | Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksananya survey pola konsumsi rumah tangga | 189 desa | Tersedianya analisis data pola konsumsi pangan penduduk (PPH) | 189 desa | 301.000.000 | 316.050.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.3900 | Lomba Cipta Menu Pangan Beragam,Bergizi, Berimbang dan Aman | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Pangkalpinang dan Nasional | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Provinsi | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman | 7 Kab/Kota | 170.000.000 | 178.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4701 | Promosi Pangan Lokal | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Provinsi dan Padang | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksananya promosi pangan daerah melalui pameran hari pangan sedunia dan pameran pangan nusantara | 2 pameran | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menurunkan konsumsi beras dan terpromosinya pangan lokal daerah | 7 Kab/Kota | 442.170.000 | 464.278.500 | BKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.21.02.15.4000 | Pengkajian Makanan Tradisional | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Kab. Bangka dan Bangka Barat | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 3 Komoditi dan 25 Peserta Pelatihan | Terlaksananya pengujian kandungan gizi tepung keladi, tepung sagu rarut, tepung rab dan pelatihan pengolahan pangan lokal pada kelompok wanita P2KP | 3 Komoditi dan 25 Peserta Pelatihan | Tersedianya hasil pengujian kandungan gizi tepung keladi, tepung sagu rarut , tepung rab, serta terlatihnya kelompok wanita P2KP | 3 Komoditi dan 25 Peserta Pelatihan | 200.000.000 | 210.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4700 | Pengembangan Pangan Lokal | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Tercapai | Teroptimalisasinya Pekarangan Kelompok | 15 Kelompok Wanita | Tercapainya Diversifikasi Pangan | 4 Kab/Kota | 300.000.000 | 315.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4000 | Sinkronisasi dan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kedaulatan Pangan 2016 - 2026 | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 102 Orang | Terlaksananya Strategis Kebijakan Kedaulatan Pangan | 30 Buku dan 7 Kab/Kota | Terlaksananya pertemuan sinkronisasi dan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) kedaulatan pangan 2016 - 2026 | 30 Buku dan 7 Kab/Kota | Tersedianya Rencana Strategis (RENSTRA) Kedaulatan Pangan 2016 - 2026 dan Meningkatnya Peralatan dan Fungsi BKP | 30 Buku dan 7 Kab/Kota | - | 287.016.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4200 | Upaya Khusus Pencapaian Swasembada Pangan (Beras) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Tercapainya Swasembada Pangan (Beras) | Tercapai | Terlaksananya pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam rangka upaya khusus BKP dan studi banding pengelolaan pengawalan pendampingan UPSUS di Jawa Tengah | 5 Kab dan Jawa Tengah | Tercapainya swasembada pangan (beras) di Prov.Kep.Babel | 5 Kab dan Jawa Tengah | 200.000.000 | 3.145.725.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.3100 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Monev kegiatan ketahanan pangan | 1 Kegiatan | Diperolehnya kinerja program ketahanan pangan | 1 Kegiatan | 150.000.000 | 385.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.3800 | Forum Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Kab. Bangka | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya forum koordinasi perencanaan ketahanan pangan | 40 Orang | Tercapainya persamaan persepsi dalam perencanaan ketahanan pangan | Provinsi dan 7 Kab/Kota | 150.000.000 | 162.955.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4800 | Penyusunan Data base Ketahanan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Provinsi dan 7 Kab/Kota | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Tercapai | Terlaksananya penyusunan buku data base ketahanan pangan | 25 Buku | Tersedianya data base ketahanan pangan | 25 Buku | - | 195.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.4200 | Operasional Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Pangkalpinang | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya permohonan sertifikasi produk prima 3 | 2 permohonan | Tersedianya data permohonan produk pangan segar yang akan disertifikasi | 2 permohonan | 180.000.000 | 234.000.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.21.02.15.3400 | Operasional Dewan Ketahanan Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Ketahanan Pangan | Pangkalpinang | Meningkatnya Ketahanan Pangan | 4,4% | Terlaksananya program kerja Dewan Ketahanan Pangan | 27 Orang (1 DKP) | Meningkatnya kinerja anggota Dewan Ketahanan Pangan | 80% | 125.000.000 | 162.500.000 | BKP Prov | Sedang Berjalan |
| | | | | | TOTAL URUSAN RUTIN DAN URUSAN WAJIB | | | | | | 7.887.510.000 | 27.665.675.140 | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan//Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan maju | Jenis Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **26.177.523.800** | **26.971.766.800** | | |
| | **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | **2.932.452.000** | **3.671.190.000** | | |
| **1.22.1.22.01.01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terselnggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran** | | **Terselnggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **2.146.202.000** | **2.411.190.000** | **BPMPD** | |
| 01.0100. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Pengiriman paket dan surat menyurat, perangko, materai. | Institusi pemerintah dan masyarakat | 7 kab/kota | Tercapainya administrasi perkantoran yang baik | 100% | Jumlah surat menyurat yang terkirim | 550 surat | Terkirimnya paket dan surat menyurat untuk kelancaran tugas kantor | 100% | 30.000.000 | 35.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.0200. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Pembayaran listrik dan komunikasi serta langganan internet | kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Tercapainya pelayanan maksimal | 100% | Jumlah Pembayaran listrik dan komunikasi serta langganan internet | 12 Bln | Pembayaran listrik dan komunikasi serta langganan internet | 100% | 107.400.000 | 120.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.0600. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Bbm dan Pelumas | Pejabat Eselon II,III dan IV BPMPD Provins Kep.Bangka Bellitung | BPMPD | Tercapainya pelayanan publik yang optimal | 100% | Jumlah Bbm dan Pelumas yang digunakan | 1580 Liter | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 100% | 212.870.000 | 370.370.000 | | Sedang berjalan |
| 01.0700. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terpenuhinya honorarium bagi pengelola keuangan | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Tercukupinya petugas dalam penyeleaian administrasi keuangan | 100% | Pembayaran honorarium bagi pengelola keuangan | 12 Bln | Terpenuhinya honorarium bagi pengelola keuangan | 100% | 140.820.000 | 140.820.000 | | Sedang berjalan |
| 01.0800. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Tersedianya jasa untuk kebersihan kantor | kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Tercukupinya kebutuhan alat kebersihan kantor | 100% | Alat-alat kebersihan kantor | 12 Bln | Tersedianya alat kebersihan kantor | 100% | 43.992.000 | 50.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1300. | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya jasa untuk pemeliharaan dan perlengkapan kantor | kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Terpeliharanya | 100% | Tersedianya jasa untuk pemeliharaan dan perlengkapan kantor | 12 Bln | Tersedianya jasa untuk pemeliharaan dan perlengkapan kantor | 100% | 40.000.000 | 55.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1000. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terpenuhinya alat tulis kantor | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Tersedianya ATK BPMPD | 100% | Barang alat tulis kantor pakai habis | 12 Bln | Terpenuhinya alat tulis kantor BPMPD | 100% | 150.000.000 | 210.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1100. | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Terciptanya kinerja yang optimal | 100% | Barang cetakan dan penggandaan | 12 Bln | Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan | 100% | 100.000.000 | 100.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1200. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Lampu, kabel listrik, instalasi listrik | kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Komponen instalasi dan penerangan kantor yang memadai | 100% | Lampu, kabel listrik, instalasi listrik | 12 Bln | Tersedianya Lampu, kabel listrik, instalasi listrik | 100% | 25.020.000 | 30.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1500. | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Koran, majalah | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Tingkat mutu pelayanan masyarakat | 100% | Koran, majalah | 5040 koran | Tersedianya Koran, majalah | 100% | 36.000.000 | 36.000.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1700. | Penyediaan Makanan Dan Minuman | Makanan dan minuman | Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu | BPMPD | Tercukupinya makanan dan minuman rapat | 100% | Makanan dan minuman rapat pegawai dan tamu | 12 Bln | Tersedianya makanan dan minuman rapat | 100% | 66.600.000 | 66.600.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1800. | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Perjalanan dinas luar daerah | internal dan eksternal SKPD | Luar Daerah | Terciptanya program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran | 100% | Perjalanan dinas luar daerah | 12 Bln | Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah | 100% | 400.000.000 | 403.900.000 | | Sedang berjalan |
| 01.1900. | Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | Terbayarnya honor PHL 30 orang petugas administrasi perkantoran selama 13 Bulan | internal dan eksternal SKPD | BPMPD | Terlaksananya dan tertanya administrasi perkantoran yang baik | 100% | Terbayarnya honor PHL 30 orang petugas administrasi perkantoran selama 13 Bulan | 13 Bln | Terbayarnya honor PHL 30 orang petugas administrasi perkantoran selama 13 Bulan | 100% | 643.500.000 | 643.500.000 | | Sedang berjalan |
| 01.8600. | Perjalanan dinas dalam daerah | Terlaksananya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten | internal dan eksternal SKPD | Dalam Daerah | Terpenuhinya koordinasi dengan Pemda Kab/Kota | 100% | Jumlah Kabupaten yang terkoordinasi | 6 Kab | Terlaksananya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten | 100% | 150.000.000 | 150.000.000 | | Sedang berjalan |
| **1.22.1.22.01.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **Kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | **Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | **397.500.000** | **860.000.000** | | Sedang berjalan |
| 02.0500. | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Fasilitas kantor | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Terpenuhinya kebutuhan kantor | 100% | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional | 1 roda empat, 2 roda dua | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | 100% | 232.000.000 | 800.000.000 | | Sedang berjalan |
| 02.2200. | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Fasilitas kantor | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Terpenuhinya kebutuhan kantor | 100% | Pengadaan Filling kabinet dan laptop | 2 Filling kabinet, 1 laptop | Kelancaran dalam bekerja | 100% | 15.000.000 | 30.000.000 | | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan//Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan maju | Jenis Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02.2200. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Fasilitas kantor | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | Terpenuhinya kebutuhan kantor | 100% | Perbaikan gedung kantor | 1 Pkt | Terpeliharanya gedung kantor | 100% | 150.500.000 | 30.000.000 | | Sedang berjalan |
| **1.22.1.22.01.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Tercapainya aparatur yang rapi, bersih dan berwibawa** | **Kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | **Tingkat Disiplin Aparatur** | | **Tercapainya aparatur yang rapi, bersih dan berwibawa** | | **Tercapainya aparatur yang rapi, bersih dan berwibawa** | | **63.750.000** | **-** | | Sedang berjalan |
| 03.0200. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | | 100% | Jumlah pakaian dinas batik yang dijahit | 79 stel | Tersedianya Pakaian dinas batik | 100% | 38.750.000 | - | | Sedang berjalan |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | | 100% | Jumlah pegawai yang diadvokasi | 30 orang | Terlaksananya Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | 100% | 25.000.000 | | | |
| **1.22.1.22.01.07.** | **Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | **Tercapainya target kinerja anggaran setiap tahun** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Tingkat pelayanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | | **Tercapainya target kinerja anggaran setiap tahun** | | **Tercapainya target kinerja anggaran setiap tahun** | | **325.000.000** | **400.000.000** | | Sedang berjalan |
| 07.0900. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | % keberhasilan BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | BPMPD | | 100% | Jumlah laporan yang terselesaikan | 3 Lap | Persentase capaian kinerja terhadap indikator kegiatan dalam 1 tahun anggaran | 100% | 40.000.000 | 50.000.000 | | Sedang berjalan |
| 07.3700. | Monitoring Dan Evaluasi Program | | Evaluasi Kegiatan Bidang-bidang BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Prov.Kep.Babel | | 100% | Jumlah kegiatan yang di Monitoring dan Evaluasi | 6 Kabupaten | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang | 100% | 110.000.000 | 150.000.000 | | Sedang berjalan |
| 07.8000. | Survey Dan Pengumpulan Data bidang pemberdayaan masyarakat dan desa | | internal dan eksternal SKPD | Prov.Kep.Babel | | 100% | Jumlah desa yang terdata | 6 Kabupaten | Tersedianya data desa/kelurahan | 100% | 175.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | | **23.245.071.800** | **23.300.576.800** | | |
| **1.22.1.22.01.20.** | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Tingkat pelayanan terhadap Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa** | | **Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel yang mengaplikasikannya** | | **Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel yang mengaplikasikannya** | | **2.112.000.000** | **2.051.000.000** | | Sedang berjalan |
| 20.0100. | Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase pemahaman Penyusunan Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan | 100% | Jumlah Aparatur Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya | 100 Org | Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desa | 100% | 250.000.000 | 250.000.000 | | Sedang berjalan |
| 20.0200. | Rakor BPMPD dan Institusi Desa/kelurahan terhadap pembangunan desa se-prov.Kep.Babel | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terwujudnya proses kepemerintahan yang bersih dan berwibawa | Bangka, Bangka Tengah dan Belitung | Peran Institusi Desa/kelurahan terhadap pembangunan desa | 100% | Jumlah Aparatur BPMPD daan Kepala Desa yang terkoordinasi | 6 Kab/Kota | Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desa | 100% | 509.000.000 | 509.000.000 | | Sedang berjalan |
| 20.0300. | Bimtek Bendahara Tata Kelola Penyelenggaraan keuangan Pemerintahan Desa | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan Tata Kelola Penyelenggaraan keuangan Pemerintahan Desa | 100% | Jumlah Aparatur BPMPD daan Kepala Desa yang terkoordinasi | 6 Kab | Meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan administraasi keuangan aparatur desa | 100% | 592.000.000 | 592.000.000 | | Sedang berjalan |
| 20.0400. | Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Mandiri Percontohan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Bantuan Keuangan yang monitor | 100% | Jumlah desa/kelurahan mandiri percontohan yang di monitoring bantuan keuangannya | 40 Desa | Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepada desa/ kel Mandiri Percontohan | 100% | 115.000.000 | 100.000.000 | | Sedang berjalan |
| 20.0500. | Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Bantuan Keuangan yang monitor | 100% | Jumlah desa/kelurahan mandiri percontohan yang di monitoring bantuan keuangannya | 7 kab/kota | Terpantaunya dana Bantuan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung | 100% | 175.000.000 | 150.000.000 | | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan//Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan maju | Jenis Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20.0700. | Temu karya Aparatur Desa/Kelurahan Se-Prov.Kep.Bangka Belitung | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | CAparatur Desa/Kelurahan | 100% | Jumlah Aparatur Desa yang meningkat Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya | 6 Kab | Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desanya | 100% | 220.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 20.1100. | Monitoring dan evaluasi pengelolaan Anggaran Dana Desa | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Persentase pengelolaan Anggaran Dana Desa | 100% | Jumlah ADD desa yang dapat di monev | 6 Kab | Jumlah desa yang terpantau dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa | 100% | 251.000.000 | 250.000.000 | | Sedang berjalan |
| **1.22.1.22.01.21.** | **Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa** | | **Persentase meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan** | | **Persentase meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan** | | **1.200.000.000** | **1.225.000.000** | | Sedang berjalan |
| 21.0100. | Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Bangka Belitung | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Penerapan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan | 100% | Jumlah Apatur Lembaga kemasyarakatan yang hadir | 42 org | Peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 21.0200. | Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam membangun desa dan kelurahan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam membangun desa dan kelurahan | 100% | Jumlah desa / kelurahan yang berpartisipasi | 6 Desa, 6 kel | Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa / kelurahan | 100% | 399.700.000 | 399.700.000 | | Sedang berjalan |
| 21.0500. | Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Persentase Desa yang menyusun Profil Desa/ Kelurahan | 100% | Jumlah kelompok kerja yang difasilitasi dalam penyusunan Profil Desa/ Kelurahan | 6 Kab | Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid | 100% | 400.300.000 | 400.300.000 | | Sedang berjalan |
| 21.1100. | Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | 100% | Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif | 42 orang | Meningkatkan peran Aktif Aparatur Desa/Kelurahan | 100% | 200.000.000 | 225.000.000 | | Sedang berjalan |
| **1.22.1.22.01.22.** | **Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa** | | **Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa** | | **Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa** | | **3.452.121.800** | **3.543.626.800** | | Sedang berjalan |
| 22.0100. | Bantuan dan Monitoring PMTAS | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep.Babel | Siswa daerah tertinggal penerima bantuan PMTAS | 100% | Jumlah SD daerah tertinggal yang dibantu melalui penyediaan makanan tambahan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya asupan gizi peserta didik melalui penyediaan makanan tambahan | 100% | 998.470.000 | 998.470.000 | | Sedang berjalan |
| 22.1000. | Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terjaganya kualitas lingkup hidup dan terkelolanya sumberdaya alam di perkotaan dan perdesaan secara aktif dan bijaksana | Pangkalpinang | Persentase masyarakat yang berperan Dalam Bulan Bakti Goton Royong Masyarakat | 100% | Jumlah desa yang berperan serta dalam budaya gotong royong di masyarakat | 7 Kab/Kota | Menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat | 100% | 249.495.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 22.0700. | Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan Manajemen Badan Usaha Milik Desa | 100% | Jumlah Pengelola Bumdes yang memahami terhadap manajemen pengelolaannya | 6 Kab | Memahami terhadap manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa | 100% | 75.000.000 | 130.000.000 | | Kgt baru |
| 22.1100. | Fasilitasi dan pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan Fasilitasi dan pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat | 100% | Penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat,kelembagaan dan kemitraan | 6 Kab | Penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat,kelembagaan dan kemitraan | 100% | 120.000.000 | 120.000.000 | | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan//Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan maju | Jenis Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22.1200. | Fasilitasi dan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkat dan meratanya aktifitas perekonomian di kawasan-kawasan perdesaan | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan pendampingan teknis pengelolaan pasar desa | 100% | Jumlah pasar desa yang aktif | 6 Kab | Berlakunya pasar desa secara optimal | 100% | 90.000.000 | 150.000.000 | | Kgt baru |
| 22.1500. | Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan | Prov.Kep.Babel | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) | 100% | kelompok kerja (Pokja) PKK yang aktif | 7 Kab/Kota | Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK | 100% | 1.544.156.800 | 1.570.156.800 | | Sedang berjalan |
| 22.1600. | Bantuan keuangan dan pendampingan teknis bagi BUMDES percontohan/unggulan dan mandiri | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkat dan meratanya aktifitas perekonomian di kawasan-kawasan perdesaan | 6 Kab | Bantuan keuangan dan pendampingan teknis bagi BUMDES percontohan/unggulan dan mandiri | 100% | Jumlah BUMDes yang fasilitasi | 6 Kab | Terfasilitasi BUMDes | 100% | 300.000.000 | 300.000.000 | | Sedang berjalan |
| 22.1700. | Fasilitasi pendampingan dan pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkat dan meratanya aktifitas perekonomian di kawasan-kawasan perdesaan | 6 Kab | Persentase pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) | 100% | Jumlah lembaga cadangan pangan pemerintahan desa di Kabupaten yang terbentuk | 6 Kab | Terbentuknya lembaga cadangan pangan pemerintahan desa | 100% | 75.000.000 | 75.000.000 | | Kgt baru |
| 22.1800. | Fasilitasi Pembinaan Pokjanal Posyandu dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkat dan meratanya aktifitas perekonomian di kawasan-kawasan perdesaan | 7 Kab/Kota | Persentase Pembinaan Pokjanal Posyandu dan PAUD-HI | 100% | Jumlah Pokjanal Posyandu dan PAUD-HI | 7 Kab/Kota | Terbinanya Pokjanal Posyandu dan PAUD-HI | 100% | 172.427.000 | | | |
| **1.22.1.22.01.23.** | **Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | **Lingkungan internal dan eksternal SKPD** | | **Tingkat Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG** | | **Persentase SDA yang dikelola dan Posyantek yang berfungsi** | | **Persentase SDA yang dikelola dan Posyantek yang berfungsi** | | **1.605.000.000** | **1.605.000.000** | | Sedang berjalan |
| 23.0300. | Inventarisasi Database Potensi Desa/kelurahan Daerah pesisir | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terjaganya kualitas lingkup hidup dan terkelolanya sumberdaya alam di perkotaan dan perdesaan secara aktif dan bijaksana | Prov.Kep.Babel | Data Potensi Desa/kelurahan Daerah pesisir | 100% | Jumlah Desa pesisir yang yang data | 7 Kab/Kota | Terlaksananya pendataan Data base daerah pesisir | 100% | 190.000.000 | 190.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.0301. | Gelar TTG Tingkat Nasional | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Gorontalo | Peserta Gelar TTG Tingkat Nasional | 100% | Jumlah Jenis TTG Prov Kep.Babel yang diikutsertakan | 7 kab/kota | Pengenalan Jenis TTG Prov Kep.Babel | 100% | 365.000.000 | 365.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.0800. | Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Prov.Kep.Babel | Peserta Lomba TTG Tingkat Provinsi | 100% | Jumlah Jenis TTG Prov Kep.Babel yang diikutsertakan | 7 Kab/Kota | Meningkatkan Daya saing Produk daerah | 100% | 250.000.000 | 250.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.0900. | Pelatihan Pengurus Posyantek | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Pangkalpinang | Tingkat pelayanan Pengurus Posyantek | 100% | Jumlah Pengurus Posyantek di Kecamatan yang terlatih | 7 Kab/Kota | Meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.0600. | Operasionalisasi Posyantek Percontohan | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terkelolanya lingkungan hidup berbasis tanggungjawab bersama | Prov.Kep.Babel | Tingkat pelayanan Posyantek Percontohan | 100% | Jumlah Posyantek yang berfungsi | 7 Kab/Kota | Terlaksananya operasionalisasi Posyantek di tingkat Kecamatan | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.0701. | Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Berkembangnya daerah kawasan ekonomi khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Pangkalpinang | Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir | 100% | Jumlah masyarakat daerah pesisir yang mengelola sumber daya alam daerah pesisir | 7 Kab/Kota | Terlaksananya sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| 23.1600. | Faslitasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan Desa | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Terjaganya kualitas lingkup hidup dan terkelolanya sumberdaya alam di perkotaan dan perdesaan secara aktif dan bijaksana | Pangkalpinang | Persentase Desa yang mengelola dan memanfaatkan hutan Desa | 100% | Jumlah Desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa yang berwawasan lingkungan | 6 Kab | Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa yang berwawasan lingkungan | 100% | 200.000.000 | 200.000.000 | | Sedang berjalan |
| **1.22.1.22.01.24.** | **Program Raskintis** | **Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan** | **Masyarakat miskin** | | **Pembagian Raskintis** | | **Persentase RTM yang mendapat RASKINTIS** | | **Persentase RTM yang mendapat RASKINTIS** | | **14.875.950.000** | **14.875.950.000** | | Sedang berjalan |

| Kode Urusan/Program/ Kegiatan | Urusan//Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan maju | Jenis Kegiatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 24.0100. | Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi keluarga Miskin | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep.Babel | Bantuan Beras Bagi keluarga Miskin dimonev | 100% | Jumlah Bantuan sosial Subsidi Raskin yang dapat di monev | 7 Kab/Kota | Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Raskin | 100% | 175.000.000 | 175.000.000 | | Sedang berjalan |
| 24.0200. | Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep.Babel | Tingkat pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis | 100% | Jumlah masyarakat miskin Desa/Keluraahan yang disalurkan beras RASKINTIS | 7 Kab/Kota | Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin | 100% | 14.500.000.000 | 14.500.000.000 | | Sedang berjalan |
| 24.0300. | Pemberian penghargaan kepada Desa Swasembada beras | Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah | Prov.Kep.Babel | Persentase Desa yang memanfaatkan SDA | 100% | Jumlah Desa penerima penghargaan | 3 Desa | Membangun Desa swasembada beras | 100% | 200.950.000 | 200.950.000 | | Kgt baru |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **11.776.954.000** | **6.196.907.800** | | |
| | **Belanja Rutin** | | | | | | | | | | **8.046.586.000** | **2.792.681.000** | | |
| **1.26.01.01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran** | **100%** | | | | | **2.118.680.000** | **2.112.481.000** | | |
| 1.26.01.01.01. | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Jumlah Materai Yang Dibeli dan Paket Pengiriman Yang Dilaksanakan | 3.300 Materai dan Paket Pengiriman | Tersedianya Materai dan Terlaksananya Paket Pengiriman Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 26.400.000 | 29.300.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.02. | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Telepon, dan Internet | 12 Bulan | Tersedianya Listrik, Telepon, dan Internet Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 156.000.000 | 171.600.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.07. | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Pembayaran Honora-rium Pengelola Adminis-trasi Keuangan | 12 Bulan | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan | 12 Bulan | 157.620.000 | 173.300.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.08. | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 12 Bulan | Terpeliharanya Kebersihan Kantor Dengan Baik | 12 Bulan | 32.010.000 | 33.011.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.09. | Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Perbaikan Peralatan Kerja | 12 Bulan | Terpeliharanya Peralatan Kerja dan Meningkatnya Kinerja Aparatur | 12 Bulan | 72.300.000 | 79.530.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.10. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 Bulan | Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Yang Mencukupi | 12 Bulan | 230.000.000 | 253.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.11. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Mencukupi | 12 Bulan | 46.225.000 | 50.800.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.12. | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Yang Mencukupi dan Penerangan Bangunan Kantor Yang Baik | 12 Bulan | 18.025.000 | 19.800.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.13. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Bulan | Meningkatnya Kinerja Aparatur | 12 Bulan | 169.460.000 | 187.000.000 | BPAD | |
| 1.26.01.01.15. | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 12 Bulan | Bertambahnya Informasi Aparatur Guna Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 12 Bulan | 38.400.000 | 42.240.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.16. | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Pengisian Tabung Gas | 12 Bulan | Terpenuhinya Pengisian Tabung Gas Yang Mencukupi | 12 Bulan | 3.840.000 | 4.200.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.17. | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu | 12 Bulan | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Yang Mencukupi | 12 Bulan | 53.600.000 | 58.900.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.01.18. | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | 12 Bulan | Terpenuhinnya Informasi dan Koordinasi Lintas Daerah | 12 Bulan | 450.000.000 | 495.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| 1.26.01.01.19 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelayanan Administrasi Perkan-toran | 100% | Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor | 12 Bulan | Tersedianya Tenaga Penunjang Pengelolaan Administrasi Kantor Yang Mencukupi | 12 Bulan | 514.800.000 | 514.800.000 | BPAD | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.26.01.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | | | | | **5.518.380.000** | **515.900.000** | | |
| 1.26.01.02.12 | Kegiatan Pembangunan Tempat Parkir | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya Tempat Parkir yang memadai | 1 unit | Terwujudnya keamanan parkir kendaraan aparatur | 1 unit | 49.360.000 | | BPAD | Baru |
| 1.26.01.02.22. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Terlaksananya Pemeli-haraan Gedung Kantor | 1 Unit Gedung | Terpeliharanya Gedung Kantor Dengan Baik | 2 Unit Gedung | 150.000.000 | 165.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.02.24. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Terlaksananya Pemeli-haraan Kendaraan Dinas/Operasional | 12 Bulan | Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dengan Baik | 12 Bulan | 169.020.000 | 185.900.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.02.54. | Kegiatan Sewa Gedung Kantor | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Tersedianya Gedung Kantor Yang Disewa | 1 Unit Gedung | Tersedianya Gedung Kantor Yang Disewa Yang Mencukupi | 1 Unit Gedung | 150.000.000 | 165.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| | Pengadaan Tanah Untuk Kantor BPAD | | | | | | | | | | 5.000.000.000 | | | |
| **1.26.01.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | **Pangkalpinang** | **Tingkat Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **65.500.000** | **40.500.000** | | |
| 1.26.01.03.02. | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur | 90 stel | Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur Yang Baik | 90 stel | 40.500.000 | 40.500.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **1.26.01.05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **100%** | | | | | **344.026.000** | **123.800.000** | | |
| 1.26.01.05.01. | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur | 12 Bulan | Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur | 12 Bulan | 112.550.000 | 123.800.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.05.27. | Kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Terlaksananya Pembina-an, Pendampingan dan Lomba Kearsipan di SKPD | 43 SKPD | Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Kearsipan di SKPD | 43 SKPD | 231.476.000 | | BPAD | Sedang Berjalan |
| | **Belanja Wajib** | | | | | | | | | | **3.730.368.000** | **3.404.226.800** | | |
| **1.26.** | **Bidang Urusan Perpustakaan** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.26.01.21.** | **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan** | **100%** | | | | | **1.778.992.000** | **2.060.926.800** | | |
| 1.26.01.21.09. | Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keperca-yaan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Tersedianya Fasilitas Layanan Perpustakaan Keliling Bagi Masyarakat | 4 Kabupaten | Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling | 4 Kabupaten | 316.085.000 | 372.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.10. | Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keperca-yaan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Minat dan Budaya Baca Masyarakat | 100% | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat | 600 Orang | Terwujudnya Budaya Baca Di Masyarakat | 600 Orang | 166.634.000 | 189.750.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.11. | Kegiatan Lomba Penulisan Cerita Rakyat Daerah Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Terlaksananya Lomba Penulisan Cerita Rakyat Daerah Bangka Belitung | 50 Orang | Tersedianya Muatan Lokal Cerita Rakyat Bangka Belitung | 50 Orang | 81.798.000 | 90.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.19. | Kegiatan Lomba Menulis SMP dan SMA | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Bakat Menulis Bagi Pelajar SMP dan SMA | 100% | Terlaksananya Lomba Menulis Tingkat SMP dan SMA | 100 Orang | Meningkatnya Bakat Menulis Bagi Pelajar SMP dan SMA | 100 Orang | 111.718.000 | 117.500.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.21. | Kegiatan Lomba Menulis Puisi Untuk Anak SD | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Bakat Menulis Bagi Anak Sejak Usia Dini | 100% | Terlaksananya Lomba Menulis Puisi Anak SD Tingkat Provinsi | 50 Orang | Meningkatnya Bakat Menulis Bagi Anak SD | 50 Orang | 70.768.000 | 80.900.000 | BPAD | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.26.01.21.27 | Kegiatan Pendataan NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Jumlah Perpustakaan Yang Memiliki NPP | 42 Perpustakaa n | Bertambahnya Jumlah Perpustakaan Yang Miliki NPP | 42 Perpustakaa n | 79.966.000 | 88.226.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.35. | Kegiatan Penilaian Angka Kredit Pustakawan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Pustakawan | 15 DUPAK | Meningkatnya Penilaian Angka Kredit Pustakawan DUPAK | 15 DUPAK | 37.698.000 | 48.653.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.39 | Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Perpustakaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Terlaksananya Bimtek Bagi Pengelola Perpustakaan | 40 Orang | Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Pengelola Perpustakaan | 40 Orang | 160.815.000 | 188.700.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.42. | Kegiatan Lomba Bercerita Bahasa Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Terlaksananya Lomba Bercerita Bahasa Daerah | 20 Kelompok | Tumbuhnya Kecintaan Akan Khasanan Budaya Daerah | 20 Kelompok | 101.618.000 | 108.500.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.47. | Kegiatan Pengumpulan Hasil Terbitan Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Tersedianya Hasil Terbitan Daerah | 55 KCKR | Tersedianya Hasil Terbitan Daerah Yang Dapat Digunakan Bagi Pemustaka | 55 KCKR | 81.252.000 | 90.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.48. | Kegiatan Pengelolaan Layanan Website | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Semakin Terbukanya Akses Lintas Desa/Kecamatan, Lintas Kabupaten/Kota, Lintas Regional/Nasional | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pengelolaan Layanan Website | 100% | Tersedianya Layanan Teknologi Informasi Website | 500 Orang | Meningkatnya Penday-gunaan teknologi Informasi Website | 500 Orang | 112.496.000 | 130.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.50. | Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelo-laan Perpustakaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pengelolaan Perpustakaan | 100% | Terbinanya Pengelolaan Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 28 Perpustakaa n | Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Yang Baik dan Benar Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 28 Perpustakaa n | 71.978.000 | 79.505.800 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21.51. | Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Tersedianya Profil Perpustakaan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 Perpustakaa n | Meningkatnya Data Profil Perpustakaan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 50 Perpustakaa n | 130.740.000 | 141.614.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.26.01.21..... | Kegiatan Penyusunan Katalog Induk Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Tersedianya Data Koleksi Antar Perpustakaan Dalam Bentuk Katalog Induk | 40 Buku | Bertambahnya Daftar Katalog Induk Daerah | 40 Buku | 47.138.000 | 89.600.000 | BPAD | Baru |
| 1.26.01.21..... | Kegiatan Pelestarian Bahan Pustaka | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perkembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpus-takaan | 100% | Terlaksananya Perawa-tan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka | 12 Bulan | Terpeliharanya Bahan Pustaka Dengan Baik | 12 Bulan | 60.197.000 | 70.600.000 | BPAD | Baru |
| 1.26.01.21..... | Kegiatan Bimbingan Teknis Pelestarian Bahan Pustaka | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100% | Terlaksananya Bimtek Tentang Pelestarian Bahan Pustaka | 40 Orang | Meningkatnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam pelestarian bahan pustaka | 40 Orang | 148.091.000 | 175.378.000 | BPAD | Baru |
| **1.24.01.15** | **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** | **100%** | | | | | **100.000.000** | **150.000.000** | | |
| 1.24.01.15.02. | Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Bersinerginya Pembangu-nan Antara Kawasan Pedesaan dan Perkotaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 100% | Terlaksananya Monito-ring dan Evaluasi Program Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan | 7 Kabupaten/ Kota | Tersedianya Informasi Mengenai Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Yang Lebih Baik | 1 dokumen | 100.000.000 | 150.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| **1.24..01.16** | **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** | **100%** | | | | | 382.938.000 | 395.303.000 | | |
| 1.24.01.16.... | Kegiatan Penelusuran Arsip Pembentukan Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 100% | Tersedianya Data Arsip Pembentukan Kabupa-ten/ Kota | 7 Kabupaten/ Kota | Tersedianya Data Informasi Arsip Pembentukan Kabupaten/Kota Yang Bermanfaat | 7 Kabupaten/ Kota | 93.208.000 | 96.800.000 | BPAD | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.24.01.16.... | Kegiatan Penelusuran Foto-Foto Tokoh Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 100% | Tersedianya Foto-Foto Tokoh Daerah | 7 Kabupaten/ Kota | Tersedianya Foto-Foto Tokoh Daerah Yang Bermanfaat | 7 Kabupaten/ Kota | 87.205.000 | 87.800.000 | BPAD | Baru |
| 1.24.01.16.... | Kegiatan Pendataan Arsip Terjaga di Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 100% | Tersedianya Data Arsip Terjaga Di Kabupaten/ Kota | 7 Kabupaten/ Kota | Tersedianya Data Arsip Terjaga Di Kabupaten/ Kota Yang Akurat | 7 Kabupaten/ Kota | 92.405.000 | 92.405.000 | BPAD | Baru |
| 1.24.01.16.... | Kegiatan Pengumpulan Data Personal File Pejabat Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 100% | Tersedianya Data Fersonal File Pejabat Daerah | 20 Arsip Personal File | Tersedianya Data Fersonal File Pejabat Daerah Yang Bermanfaat | 20 Arsip Personal File | 61.822.000 | 70.000.000 | BPAD | Baru |
| 1.24.01.16.... | Kegiatan Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah | 100% | Terlaksananya Pendata-an Arsip Statis Kabupa-ten/Kota | 7 Kabupaten/ Kota | Tersedianya Data Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Akurat | 21 Arsip Statis Se-Kab/Kota | 48.298.000 | 48.298.000 | BPAD | Baru |
| **1.24.01.17.** | **Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan** | **Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur** | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** | **100%** | | | | | 71.817.000 | 125.000.000 | | |
| 1.24.01.17.02. | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintah dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan | 100% | Terlaksananya Pemeli-haran Arsip Daerah | 200 Arsip | Terlaksananya Pemeli-haran Arsip Daerah Dengan Baik dan Benar | 200 Arsip | 71.817.000 | 125.000.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| **1.24.01.18.** | **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi** | **Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan** | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi** | **100%** | | | | | **674.415.000** | **554.639.000** | | |
| 1.24.01.18.05. | Kegiatan Pelayanan Masyarakat Sadar Arsip | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi | 100% | Tersedianya Layanan Sadar Arsip Bagi Masyarakat | 5 Kabupaten/ Kota | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Arsip | 5 Kabupaten/ Kota | 114.868.000 | 114.868.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01.18.06. | Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Bersinerginya Pembangu-nan Antara Kawasan Pedesaan dan Perkotaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi | 100% | Terlaksananya Rakor Program Pengemba-ngan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 45 Orang | Meningkatnya Pemahaman Aparatur Mengenai Program Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota | 45 Orang | 244.150.000 | 244.150.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01.18.07. | Kegiatan Pameran Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi | 100% | Tersedianya Informasi Tentang Arsip Statis Prov. Kep. Babel. | 700 Pengunjung | Tersedianya Informasi Tentang Arsip Statis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat | 700 Pengunjung | 63.833.000 | 63.833.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01.18.11. | Kegiatan Lomba Pengelolaan Arsip Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi | 100% | Pemenang Lomba Desa/ Kelurahan, SKPD, LKD Kab/Kota | 9 Juara | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip | 9 Juara | 131.788.000 | 131.788.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01.18..... | Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kearsipan | Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan | Bersinerginya Pembangu-nan Antara Kawasan Pedesaan dan Perkotaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Kualitas Pelayanan Informasi | 100% | Terlaksananya Rakor Teknis Kearsipan | 43 SKPD Prov, 7 LKD Kab/Kota | Tersinkronisasi Kegiatan Kearsipan Antara SKPD Provinsi dan LKD Kab/Kota | 43 SKPD Prov, 7 LKD Kab/Kota | 119.776.000 | | BPAD | Baru |
| **1.24.01.....** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan** | | | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan** | **100%** | | | | | **722.206.000** | **118.358.000** | | |
| 1.24.01..... | Kegiatan Penilaian Angka Kredit Arsiparis | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Terciptanya Sistem Birokrasi Pemerintahan Yang Kuat, Transparan, Akuntabel dan Efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terlaksananya Penilai-an Angka Kredit Arsiparis | 30 Orang Arsiparis | Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Arsiparis | 30 Orang Arsiparis | 26.080.000 | 26.080.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01..... | Kegiatan Lomba Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terpilihnya Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi | 30 Orang Arsiparis | Meningkatnya Kompetensi dan Wawasan serta Motivasi Arsiparis | 30 Orang Arsiparis | 92.278.000 | 92.278.000 | BPAD | Sedang Berjalan |
| 1.24.01..... | Kegiatan Bimtek Pemberkasan dan Penyusutan Arsip | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terciptanya Pengelola Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip | 50 Orang | Meningkatnya Jumlah Pengelola Arsip Yang Memahami Pemberkasan dan Penyusutan Arsip | 50 Orang | 136.146.000 | | BPAD | Baru |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Prakiraan Maju (Rp.) | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.24.01..... | Kegiatan Bimtek Pengelolaan Arsip Kepegawaian | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Meningkatnya Keterliba-tan Masyarakat Dalam Seluruh Proses Pembangunan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terciptanya Pengelola Arsip Yang Memahami Arsip Kepegawaian | 50 Orang | Meningkatnya Jumlah Pengelola Arsip Yang Memahami Arsip Kepegawaian | 50 Orang | 135.476.000 | | BPAD | Baru |
| 1.24.01..... | Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Asosiasi Profesi Kearsipan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Semakin Terbukanya Akses Lintas Desa/Kecamatan, Lintas Kabupaten/Kota, Lintas Regional/Nasional | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terbentuknya Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Prov. Kep. Babel dan Workshop Pengemba-ngan Arsiparis | 40 Orang | Meningkatnya Profesiona-lisme Arsiparis Prov. Kep. Babel. | 40 Orang | 120.416.000 | | BPAD | Baru |
| 1.24.01..... | Kegiatan Penerapan e- -Arsip | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | Semakin Terbukanya Akses Lintas Desa/Kecamatan, Lintas Kabupaten/Kota, Lintas Regional/Nasional | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tingkat Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kearsipan | 100% | Terlaksananya Pelati-han Penerapan Kearsipan Elektronik | 50 Orang | Terciptanya Pemahaman dan Pengelolaan Kearsipan Elektronik | 50 Orang | 211.810.000 | | BPAD | Baru |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Belanja Langsung** | | | | | | | | | | **12.580.749.000,00** | **10.001.902.900,00** | | |
| | **Urusan Rutin** | | | | | | | | | | **3.274.543.000,00** | **3.354.497.300,00** | | |
| **01.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **3.099.543.000,00** | **3.244.497.300,00** | **DISKOMINFO** | |
| 0100. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 1.250 Buah Materai dan 3 Kegiatan Belanja Paket/Pengiriman | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 9.775.000,00 | 10.752.500,00 | **DISKOMINFO** | |
| 0200. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 1.100.000.000,00 | 1.210.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 0600. | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 6 Unit Kendaran Roda Empat, 13 Unit kendaraan Roda Dua | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 400.000.000,00 | 440.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 0700. | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 20 Orang Selama 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 176.160.000,00 | 193.776.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 0800. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 18.000.000,00 | 19.800.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 0900. | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 10 Komputer, 11 Laptop, 1 Mesin Fotocopy, 6 Printer, 4 Telepon/Fax, dan 4 Dispenser | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 38.100.000,00 | 41.910.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1000. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | ATK Selama 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 126.978.000,00 | 139.675.800,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1100. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Belanja Cetak dan Belanja Penggandaan Selama 1 Tahun | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 33.500.000,00 | 36.850.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 1 paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1300. | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 4 Unit Notebook, 2 Unit Printer, 1 paket filing kabinet | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1500. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 1 Paket Surat Kabar Harian Nasional dan Surat Kabar Harian, 24 Buku Majalah Komputer Bulanan dan 48 Buku Majalah Bulanan Nasional | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 45.480.000,00 | 50.028.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1600. | Penyediaan bahan logistik kantor | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Air Mineral Isi Ulang Sebanyak 800 Galon, Obat-Obatan 1 Paket, dan Isi Ulang Gas Sebanyak 12 Tabung Selama 1 Tahun | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 12.000.000,00 | 13.200.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1700. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 60.000.000,00 | 66.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1800. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 400.000.000,00 | 440.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1900. | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 15 Orang Tenaga Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 329.550.000,00 | 362.505.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 2100. | Survey dan Pengumpulan Data | | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pelayanan administrasi perkantoran | 100% | meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Pengumpulan Data di Kabupaten/ Kota, Luar Daerah | tersedianya barang dan jasa pelayanan administrasi perkantoran | 100% | - | - | **DISKOMINFO** | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | | |
| **02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **150.000.000,00** | **110.000.000,00** | **DISKOMINFO** | |
| 1000. | Pengadaan Meubelair | | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | 10 Meja Kerja | tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 50.000.000,00 | | **DISKOMINFO** | |
| 02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | terpeliharanya gedung kantor | tersedianya sarana dan prasarana aparatur | 100% | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000,00** | | | |
| | Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000,00 | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | | **7.133.156.000,00** | **6.647.405.600,00** | **DISKOMINFO** | |
| | **Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika** | | | | | | | | | | **7.133.156.000,00** | **6.647.405.600,00** | **DISKOMINFO** | |
| **1** | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** | | | | | | | | | | **4.995.016.000,00** | **4.428.551.600,00** | **DISKOMINFO** | |
| 0802. | Pengelolaan dan operasional Jaringan Hotspot | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Biaya Operasional Listrik, Internet | | | 450.884.000,00 | 495.972.400,00 | **DISKOMINFO** | |
| 1200. | Pengelolaan dan operasionalisasi Mobile Community Access Point (M-CAP) | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | 4 Kali di Tiap Kab. di Pulau Bangka dan 2 Kali di Tiap Kab. di Pulau Belitung | | | 141.964.000,00 | 156.160.400,00 | **DISKOMINFO** | |
| 2101. | Pengelolaan dan Operasional Media Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | 7 Kab/Kota | | | 343.000.000,00 | 377.300.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 2102. | Pengelolaan dan Operasional Stasiun Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | 7 Kab/Kota | | | 478.340.000,00 | 526.174.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 3900. | Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | 1 Kali Sosialisasi dan Jarkomsanda ke 7 Kabupaten/ Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung | | | 250.000.000,00 | 275.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 5300. | Pengadaan licensi Peralatan NOC | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Lisensi NOC | | | 146.810.000,00 | 161.491.000,00 | **DISKOMINFO** | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5800. | Operasionalisasi Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Terlaksananya Operasionalisasi KI Prov. Kep. Babel | | | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 6201. | Pengembangan Portal Induk dan SKPD | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Konten Portal induk dan SKPD | | | 101.010.000,00 | 111.111.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 6202. | Peningkatan Jaringan Komunikasi Data Antar SKPD | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Instalasi Jaringan | | | 501.270.000,00 | 551.397.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 6400. | Pengelolaan dan operasional Peralatan Disaster Recovery Center (DRC) | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Keamanan Data | | | 361.678.000,00 | 397.845.800,00 | **DISKOMINFO** | |
| 6900. | Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Kominfo | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | Monev Perencanaan Kominfo di 7 Kab/Kota | | | 62.000.000,00 | 68.200.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| 00xx | Pembangunan repeater(pemancar ulang) Radio Antar Penduduk Indonesia | Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesbilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana TIK | | | | | | 189.000.000,00 | 207.900.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui TVRI | | | | | | | | | | 750.000.000,00 | 825.000.000,00 | | |
| | Pengadaan dan OM Peralatan Perangkat Radio Telekomunikasi Tetap dan Bergerak | | | | | | | | | | 219.060.000,00 | 240.966.000,00 | | |
| **16.** | **Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi** | | | | | | | | | | **111.370.000,00** | **122.507.000,00** | **DISKOMINFO** | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 00xx | Penyelenggaraan dan pengendalian bidang telekomunikasi | Meningkatkan kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika; | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | 58.850.000,00 | 64.735.000,00 | **DISKOMINFO** | 2 |
| 00xx | Koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan kewajiban universal service obligation | Meningkatkan kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika; | Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | | | | | 52.520.000,00 | 57.772.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | **Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi** | | | | | | | | | | **2.026.770.000,00** | **2.096.347.000,00** | **DISKOMINFO** | |
| | Rapat Koordinasi Forum SKPD Diskominfo | | | | | | | | | | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Peningkatan Kapasitas SDM Kominfo | | | | | | | | | | 400.000.000,00 | 440.000.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Sertifikasi SDM Pengelola TIK | | | | | | | | | | 205.820.000,00 | 226.402.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Pelatihan SDM Aparatur Pemerintah Bidang Pengelolaan TIK | | | | | | | | | | 326.800.000,00 | 359.480.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Fasilitasi Jabatan Fungsional Komputer | | | | | | | | | | 120.710.000,00 | 132.781.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat | | | | | | | | | | 421.850.000,00 | 464.035.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah bidang komunikasi dan kehumasan | | | | | | | | | | 230.590.000,00 | 253.649.000,00 | **DISKOMINFO** | |
| | Fasilitasi Jabatan Pranata Humas | | | | | | | | | | 121.000.000,00 | | **DISKOMINFO** | |
| | **Program Kerjasama Informasi dan Media Massa** | | | | | | | | | | **2.173.050.000,00** | | | |
| | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Cetak | | | | | | | | | | 1.219.950.000,00 | | | |
| | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Elektronik | | | | | | | | | | 953.100.000,00 | | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2 Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.01 BIDANG URUSAN PERTANIAN | | | | | | | | | | 40.606.415.079 | 42.793.761.499 | | |
| | 5 BELANJA | | | | | | | | | | 40.606.415.079 | 42.793.761.499 | | |
| | 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | | 12.438.564.999 | 13.682.421.499 | | |
| | 5.2 BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | 28.167.850.080 | 29.111.340.000 | | |
| | KEGIATAN RUTIN | | | | | | | | | | 10.911.343.080 | 11.481.340.000 | | |
| | 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | | | | | 6.712.525.080 | 6.966.340.000 | | |
| 0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal | Terfasilitasinya pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksterl | 1 tahun anggaran | 9.047.080 | 10.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 0200 | Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik | Terfasiliasinya pelayanan jasa komunikasi, air, listrik selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan jasa komunikasi,air dan listrik | Kelancaran pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik dengan baik selama 1 tahun anggaran | 280.000.000 | 300.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 0700 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan jasa administrasi Keuangan | Terfasiliasinya pelayanan jasa administrasi Keuangan selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan jasa administrasi Keuangan | 1 tahun anggaran | 224.040.000 | 224.040.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan kantor | Terfasiliasinya pelayanan jasa Kebersihan Kantor selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan jasa Kebersihan Kantor | 1 tahun anggaran | 42.000.000 | 54.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0900 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Terfasiliasinya pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 1 tahun anggaran | 71.000.000 | 75.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Terfasiliasinya alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap penyediaan alat tulis kantor | 1 tahun anggaran | 91.000.000 | 100.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan pelayanan percetakan dan penggandaan | Terfasiliasinya pelayanan percetakan dan penggandaan selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan percetakan dan penggandaan | 1 tahun anggaran | 50.100.000 | 65.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1200 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terfasiliasinya pelayanan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantorselama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 tahun anggaran | 150.000.000 | 200.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1500 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terfasiliasinya pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 tahun anggaran | 25.000.000 | 30.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1600 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terfasiliasinya pelayanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 tahun anggaran | 15.000.000 | 20.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Makanan dan Minuman | Terfasiliasinya pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pelayanan Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman | 1 tahun anggaran | 35.000.000 | 35.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1800 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | Terfasiliasinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah | 1 tahun anggaran | 560.000.000 | 600.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| 1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Terfasiliasinya Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun anggaran | 3.303.300.000 | 3.303.300.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 7000 | Operasional Balai Benih Pertanian | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Operasional Balai Benih Pertanian | Terfasiliasinya Operasional Balai Benih Pertanian selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Operasional Balai Benih Pertanian | 2 tahun anggaran | 700.000.000 | 750.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 7100 | Operasional Balai Proteksi Tanaman | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Operasional Balai Proteksi Tanaman | Terfasiliasinya Operasional Balai Proteksi Tanamann selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Operasional Balai Proteksi Tanaman | 1 tahun anggaran | 100.000.000 | 200.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 7200 | Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi | Terfasiliasinya Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Operasional Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi | 1 tahun anggaran | 339.938.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7800 | Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan | | | Prov. Kep. Babel | Operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Lancarnya operasional pelayanan administrasi perkantoran pada SKPD | Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan | Terfasiliasinya Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewani selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap Operasional Laboratorium Keswan, Kesmavet dan Klinik Hewan | 1 tahun anggaran | 387.100.000 | 450.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Peningkatan Kapasitas Laboratorium UPTD Balai Proteksi Tanaman | | | | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Tersedianya layanan operasional Laboratorium Pestisida | Layanan operasional laboratorium selama 12 bulan | Meningkatknya kapasitas Laboratorium Pestisida | Peningkatan pelayanan uji residu pestisida pada produk tanaman | 180.000.000 | 200.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | | | | | | | | | | | 5.240.000.000 | 8.590.000.000 | | |
| | | | | | | | | | | | (DENGAN DAK) | (DENGAN DAK) | | |
| 02 | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD** | **Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD** | | | | | **2.240.000.000** | **2.290.000.000** | | |
| | | | | | | | | | | | (TANPA DAK) | (TANPA DAK) | | |
| 0329 | Pembangunan Gedung , Prasarana dan Sarana Pendukung UPTD Balai Proteksi Tanaman (DAK) | | | | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Tersedianya sarana dan prasarana pada Balai Proteksi Tanaman Prov.Kep. Babel | Pengadaan Gedung , Prasarana dan Sarana Laboratorium Pestisida UPTD Balai Proteksi Tanaman | Meningkatnya operasional pelayanan teknis pada Balai Proteksi Tanaman Prov.Kep.Babel | Tersedianya gedung laboratorium pestisida dan Prasarana serta Sarana Laboratorium untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian/perkebunan | 3.000.000.000 | | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 0700 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Penyediaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | Fasilitasi terhadap penyediaan perlengkapan gedung kantor | Meningkatnya jumlah perlengkapan gedung kantor | 120.000.000 | 120.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0900 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Penyediaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | Fasilitasi terhadap penyediaan peralatan gedung kantor | Meningkatnya jumlah peralatan gedung kantor | 500.000.000 | 500.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 1000 | Pengadaan Meubelair | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Penyediaan meubelair gedung kantor | Tersedianya meubelair gedung kantor | Fasilitasi terhadap penyediaan meubelair gedung kantor | Meningkatnya jumlah meubelair gedung kantor | 800.000.000 | 800.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 2200 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Penyediaan pemeliharaan untuk gedung kantor | Terpeliharanya gedung kantor dengan baik selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pemeliharaan untuk gedung kantor | Terjaganya kondisi gedung kantor dengan baik selama 1 tahun | 120.000.000 | 120.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 2400 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Penyediaan pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik selama 1 tahun anggaran | Fasilitasi terhadap pemeliharaan untuk kendaraan dinas/operasional | Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional dengan baik selama 1 tahun | 700.000.000 | 750.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 4105 | Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendukung UPTD Balai Benih Pertanian (DAK) | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Tersedianya sarana dan prasarana perbenihan dan perbibitan pada Balai Benih Prov.Kep. Babel | Pengadaan sarana dan prasarana perbenihan dan perbibitan pada Balai Benih Prov.Kep. Babel | Meningkatnya operasional pelayanan teknis bidang perbenihan dan perbibitan | Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana perbenihan dan perbibitan di Balai Benih Prov.Kep.Babel | | 5.000.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pengadaan sarana prasarana, peralatan laboratorium BPSMB (DAK) | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Tersedianya unit peralatan laboratorium / sub laboratorium pengujian mutu benih tanaman di Propinsi Kep. Bangka Belitung serta fasilitas operasional kendaraan roda 2 untuk pengawas benih tanaman | UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi dan Mutu Benih Prov. Kep.Babel | Lancarnya operasional pelayanan teknis dibidang pengujian mutu benih, pengawasan serta sertifikasi benih tanaman | UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi dan Mutu Benih Prov. Kep.Babel | | 1.300.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XXXX | Pembangunan Jalan Akses Perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman dan BPSMB (DAK) | | | Prov. Kep. Babel | Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Lancarnya pelayanan operasional perkantoran pada satuan kerja perangkat daerah dan UPTD | Terbangunnya jalan akses perkantoran UPTD Balai Proteksi Tanaman dan BPSMB | 1,5 Km Jalan Aspal | Terbangunnya jalan akses perkantoran UPTD lingkup Distanbunnak Prov.Kep.Babel | UTPD Balai Proteksi Tanaman dan BPSMB | | | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000** | | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Aresponsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | **Prov. Kep. Babel** | **Peningkatan kemampuan SDM pada PNS** | **Meningkatnya kemampuan aparatur PNS** | | | | | **838.728.000** | **950.000.000** | | |
| 0100 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Prov. Kep. Babel | Peningkatan kemampuan SDM pada PNS | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS | Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi PNS | Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan bagi PNS | Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi PNS | Meningkatnya keahlian dan kemampuan pada PNS | 200.000.000 | 250.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Operasional Kegiatan Pejabat Fungsional | | | | Peningkatan kemampuan SDM pada PNS | Meningkatnya kemampuan aparatur PNS | Terlaksana kegiatan operasional pejabat fungsional khusus di dinas pertanian perkebunan dan peternakan provinsi kepulauan bangka belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada masing - masing peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau setingkat esselon I | Pejabat fungsional sebanyak 37 org yang meliputi : Pengawas benih tanaman 10 orang, Pengawas mutu hasil pertanian 4 orang, Analisis pasar hasil pertanian 2 orang, Wastukan 2 org, Wasbitnak 6 org, Penyuluh pertanian 5 org, Paramedik veteriner 1 org, statisi 1 org, perencana 1 | Tercapainya target kegiatan dalam butir - butir kegiatan pejabat fungsional serta terlaksananya kegiatan rakor pejabat fungsional tingkat provinsi kepulauan bangka belitung | Rencana kerja kegiatan baik APBD maupun APBN | 638.728.000 | 700.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | | | | | | | **1.120.090.000** | **1.275.000.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2200 | Penyusunan Program Pembangunan Pertanian Perkebunan dan Peternakan | | | Prov. Kep. Babel | Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada satuan kerja | Tersusunnya dokumen perencanaan program kerja pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan | Dokumen perencanaan program kerja pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan( RKAKL & RKA SKPD TA.2016 untuk 1 tahun anggaran) | Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan program kerja pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan | Dokumen perencanaan program kerja pembangunan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan | 800.000.000 | 900.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 5600 | Evaluasi Program dan Pembangunan Pertanian | | | Prov. Kep. Babel | Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada satuan kerja | Evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan program dan rencana kerja pembangunan pertanian | Dokumen dan laporan terhadap hasil Evaluasi dan pembangunan terhadap perkembangan program dan rencan kerja pembangunan pertanian selama 1 tahun anggaran (TA.2016) | Fasilitasi untuk pemantauan terhadap perkembangan program dan rencana kerja pembangunan pertanian | Program kerja dan rencana kerja pembangunan pertanian dapat berjalan dan terpantau dengan baik dan tersedianya data laporan mengenai perkembangan kegiatan pembangunan pertanian | 154.250.000 | 175.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 5700 | Data dan Statistik Pertanian Perkebunan dan Peternakan | | | Prov. Kep. Babel | Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada satuan kerja | Penyediaan Data dan statistik sektor Pertanian Perkebunan dan Peternakan | Dokumen data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan untuk tahun 2015 dan 2016 | Fasilitasi untuk penyediaan data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan | Tersedianya data dan statistik sektor pertanian perkebunan dan peternakan untuk tahun 2015 dan 2016 | 165.840.000 | 200.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | **KEGIATAN WAJIB/PILIHAN** | | | | | | | | | | **17.256.507.000** | **17.630.000.000** | | |
| **15** | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **Meningkatnya kesejahteraan petani** | **Prov. Kep. Babel** | | | | | | | **1.264.500.000** | **1.370.000.000** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0100 | Pelatihan Kelembagaan (SKE)/Pelatihan Petani | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya kesejahteraan petani | Prov. Kep. Babel | Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani | Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan petani | Penumbuhan kelembagaan petani yang mampu mendampingi/melatih petani dalam pemberdayaan petani yang mandiri dan profesional | Terlaksananya pelatihan bagi fasilitator daerah sebanyak 12 kelompok (masing-masing kelompok sebanyak 25 orang) | Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi fasilitator daerah yang mampu melatih dalam pemberdayaan petani dan kelembagaan berdasarkan manajemen kemitraan | Meningkatnya pemberdayaan petani dan kelembagaan petani yang profesional | 600.000.000 | 650.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 2500 | Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya kesejahteraan petani | Prov. Kep. Babel | Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani | Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan petani | Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi pemandu lapang yang mampu mendampingi petani dalam sekolah lapang pengendalian hama terpadu komoditas lada | Terlaksanaya pelatihan bagi pemandu lapang (masing-masing kelompok sebanyak 25 orang) | Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pemandu lapang yang mampu mendampingi petani dalam sekolah lapang pengendalian hama terpadu komoditas lada | Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani lada dalam pengendalian hama terpadu tanaman lada | 600.000.000 | 650.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pendampingan/Pengawalan Kegiatan Penangkaran Benih Padi | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya kesejahteraan petani | Prov. Kep. Babel | Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan petani | Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan petani | Berkembangnya produksi benih bina bersertifikat di bangka belitung khususnya benih padi di penangkar benih | Penangkar benih padi 50 ha | Tersedianya benih bina bermutu dan unggul hasil penangkaran yang dilakukan oleh petani berhasil mencapai target | Penangkar benih padi 50 ha | 64.500.000 | 70.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| **XX** | **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan** | **Prov. Kep. Babel** | | | | | | | **900.000.000** | **1.000.000.000** | | |
| XXXX | Bimbingan Teknis Jaminan Mutu Produk Perkebunan (Lada dan Karet) | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan | Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan | Terlatihnya petani dan pelaku agribisnis dalam peningkatan mutu dan daya saing hasil produksi perkebunan | Terlaksanaya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis dalam peningkatan mutu dan daya saing hasil produksi perkebunan (2 Kegiatan) | Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis dalam penerapan teknologi perkebunan dalam peningkatan mutu dan daya saing hasil produksi perkebunan | Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani dan pelaku agribisnis dalam peningkatan mutu dan daya saing hasil produksi perkebunan | 300.000.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan | Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan dalam mendukung peningkatan mutu dan daya saing produksi perkebunan | Terfasilitasinya kegiatan Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) | Terlaksanaya kegiatan fasilitasi Pengelolaan Limbah Ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) | Pengelolaan limbah ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) di Prov.Kep.Babel terkelola dengan baik | Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah ternak (Biogas, Kompos, Pupuk Cair, Bio Urine) di Prov. Kep. Babel | 600.000.000 | 650.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **17** | **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan** | **Prov. Kep. Babel** | | | | | | | **600.000.000** | **700.000.000** | | |
| 079090 | Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan terhadap pemasaran produk-produk dan hasil produksi perkebunan | Meningkatnya pemasaran produk-produk dan hasil produksi perkebunan | Penyediaan sarana promosi produk-produk dan hasil dari produksi sektor pertanian/perkebunan | Berpartisipasi dalam 2 event agenda pameran | Fasilitasi penyediaan sarana promosi produk-produk dan hasil dari produksi sektor pertanian/perkebunan | Terpromosikannya produk pertanian/perkebunan unggul daerah pada tingkat Nasional maupun Lokal | 300.000.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan terhadap pemasaran produk-produk dan hasil produksi perkebunan | Meningkatnya pemasaran produk-produk dan hasil produksi perkebunan | Penyediaan data nilai indeks K dan Harga TBS Prov.Kep.Babel dan peningkatan kapasitas petugas informasi pasar hasil pertanian/ perkebunan | Informasi data nilai indeks K dan Harga TBS Prov.Kep.Babel dan Meningkatnya kualitas petugas PIP | Penyediaan data nilai indeks K dan Harga TBS Prov.Kep.Babel per Bulan dan fasilitasi terhadap petugas informasi pasar | Tersedianya data nilai indeks K dan Harga TBS Prov.Kep.Babel per Bulan yang tepat waktu, akuntable dan valid | 300.000.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| **19** | **Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan** | **Prov. Kep. Babel** | **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan** | **Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan** | | | | | **11.912.007.000** | **11.810.000.000** | | |
| XXXX | Demplot Budidaya Tanaman Lada Ramah Lingkungan | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Inovasi teknologi melalui demplot/percontohan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Terlaksananya inovasi teknologi melalui 2 Ha demplot/percontohan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Informasi dan tersedianya demplot/percontohan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Tersedianya demplot/percontohan budidaya tanaman lada ramah lingkungan seluas 2 Ha dan bertambahnya ilmu/informasi akibat kegiatan inovasi teknologi pada demplot | 250.000.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Intensifikasi Tanaman Lada | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Peningkatan luasan tanaman menghasilkan dari tanaman lada | Meningkatnya luasan tanaman menghasilkan dari tanaman lada seluas 500 Ha | Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman lada per tanaman | Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman lada per tanaman | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XXXX | Study Banding Usaha Budidaya Lada Ramah Lingkungan ke Vietnam | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Peningkatan wawasan dan pengetahuan penerapan serta pengembangan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Meningkatnya wawasan dan pengetahuan penerapan serta pengembangan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Penerapan hasil studi dalam pengembangan budidaya tanaman lada ramah lingkungan | Terciptanya budidaya tanaman lada yang ramah lingkungan dan meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman lada per tanaman | | 600.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Penyediaan Sarana Penanggulangan OPT/DPI | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyediaan sarana untuk penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) | Bantuan sarana penanggulangan OPT sebanyak 1 paket bantuan pestisida dan 1 paket bantuan Agens Hayati | Fasilitasi penyediaan untuk penanggulangan serangan OPT | Tersalurnya bantuan sarana penanggulangan OPT kepada kelompok tani untuk meminimalisir serangan OPT | 206.000.000 | 250.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pengembangan Produksi Benih Sumber Pertanian | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyediaan benih sumber tanaman perkebunan di balai benih | Tersedianya benih sumber tanaman perkebunan di balai benih | Meningkatnya jumlah bibit/benih sumber tanaman perkebunan | Tercapainya perbanyakan bibit/benih sumber tanaman perkebunan | 1.670.111.000 | 650.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyediaan kebun sumber tanaman perkebunan di balai benih | Tersedianya kebun sumber tanaman perkebunan di balai benih | Meningkatnya jumlah kebun sumber tanaman perkebunan | Tercapainya perbanyakan bibit/benih sumber tanaman perkebunan | | 650.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XXXX | Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyusunan kebijakan KP3 Prov. Kep. Babel, pelaksanaan verifikasi dan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi 7 Kab/Kota, penguatan kelembagaan alsintan | Penyusunan RDKK 7 Kab/Kota, laporan validasi data penyaluran pupuk bersubsidi 7 Kab/Kota, data ketersediaan dan kebutuhan alsintan di Prov.Kep.Babel | Meningkatnya kinerja KP3, tepatnya validasi penyaluran pupuk bersubsidi di 7 Kab/Kota, Peta distribusi ketersediaan dan kebutuhan alsintan Prov.Kep.Babel | Tersedianya pupuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penyaluran pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan dan alokasi/RDKK, tersedianya data perencanaan penguatan dan pemenuhan kebutuhan alsintan | 350.000.000 | 400.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pengawasan Peredaran Benih | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Melindungi petani konsumen benih agar dapat memperoleh benih sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta Melindungi pedagang benih dengan jalan menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam perdagangan benih dan sekaligus bergerak dalam pembinaannya. | 36 Penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 Penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian | Tersedianya benih bina yang bersertifikat di bangka belitung . | 36 Penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan, 5 Penangkar benih hortikultura serta 73 kios maupun toko pertanian | 137.500.000 | 150.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Penilaian Kultivar/Varietas Unggul Lokal Daerah | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Teridentifikasinya potensi unggul lokal yang akan direncanakan untuk di lepas varietasnya sebagai unggul lokal nasional berdasarkan SK Menteri Pertanian. | Komoditi durian super tembaga dan padi mayang pandan | Tersedianya benih sumber dari varietas unggul yang dominan disuatu daerah untuk pengembangan produksi dan mengetahui jenis/ varietas hortikultura/ pangan yang terdapat disuatu daerah, yang mempunyai prospek untuk dikembangkan. | Komoditi durian super tembaga dan padi mayang pandan | 125.500.000 | 130.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XXXX | Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Mengadakan pemeriksaan lapang; Mengadakan pengawasan panen dan pengolahan benih; Mengadakan pemeriksaan alat panen dan alat pengolahan benih; Mengadakan Pengambilan contoh benih untuk diuji di laboratorium; Menetapkan lulus atau tidak lulus suatu benih dalam rangka Sertifikasi; Mengadakan pengawasan pemasangan label dan segel sertifikasi; Mengadakan pengumpulan dan penilaian data pelaksanaan sertifikasi untuk penyempurnaan penerapan system sertifikasi benih; serta Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan data yang berhubungan dengan kegiatan sertifikasi. | 36 Penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan yang telah di register sebagai penangkar tetap | Untuk mempertahankan kemurnian keturunan yang dimiliki oleh suatu varietas, Membantu para produsen benih dalam memproduksi benih dengan mutu yang baik serta Membantu para petani dalam mendapatkan benih serta penyediaannya di pasaran. | 36 Penangkar perkebunan, 11 penangkar tanaman pangan yang telah di register sebagai penangkar tetap | 125.500.000 | 130.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pemantapan Kawasan Horti Park Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Kab. Belitung | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyediaan lahan pengembangan kawasan horti park di Prov.Kep.Babel | 1 Lokasi, Kab. Belitung | Fasilitasi penyediaan lahan pengembnangan tanaman buah | 1 Lokasi, Kab. Belitung | 252.910.000 | | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Peningkatan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Tanaman Pangan | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Terealisasinya pelaksanaan GP-PTT tanaman pangan di Prov. Kep. Babel | Padi 4 Kabupaten (500 ha) | Meningkatnya produksi tanaman pangan | Prov. Kep. Babel | 2.803.261.000 | 3.000.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Meningkatnya produksi hasil pertanian/ perkebunan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Pertanian/Perkebunan | Penyediaan lahan pengembangan tanaman sayuran komoditi bawang merah dan cabe merah | Bawang merah 2 lokasi (5 ha), Cabe keriting 2 lokasi (2 ha) | Fasilitasi penyediaan lahan pengembangan tanaman sayuran bawang merah dan cabe merah | Prov. Kep. Babel | 491.225.000 | 500.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| | Pengembangan Perbenihan Produksi Benih Sumber Tanaman Perkebunan | | | | | | | | | | 500.000.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **Mencegah dan menanggulangi penyakit ternak** | **Prov. Kep. Babel** | **Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak** | **Minimalisir penyebaran penyakit ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak** | | | | | **750.000.000** | **800.000.000** | | |
| 0200 | Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Mencegah dan menanggulangi penyakit ternak | Prov. Kep. Babel | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak | Penyebaran penyakit ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak dapat diminimalisir | Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) Pada Ternak | Tidak ada kasus Zoonosis pada manusia dan Pengawasan Peredaran PAH yang ASUH | Terjaganya status bebas Penyakit Zoonosis di Bangka Belitung dan Tersedianya Pangan Asal Hewan (PAH) yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) | Prov. Kep. Babel | 427.715.000 | 450.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 0600 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | Mencegah dan menanggulangi penyakit ternak | Prov. Kep. Babel | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak | Penyebaran penyakit ternak dan penyakit menular yang disebabkan oleh ternak dapat diminimalisir | Meningkatnya koordinasi dan kinerja KOMDA ZOONOSIS Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota | mempertahankan Status Bangka Belitung Bebas Penyakit Zoonosis dan tersosialisaikannya penyakit zoonosis kepada pelajar di Bangka Belitung | Terbebasnya Penyakit Hewan Menular (PHM), Zoonosis di Bangka Belitung dan Tersedianya Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH | Prov. Kep. Babel | 322.285.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| 22 | **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** | **3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi** | **meningkatnya produksi hasil peternakan** | **Prov. Kep. Babel** | **Peningkatan produksi sapi ternak di provinsi kep.Bangka Belitung** | **Meningkatnya hasil produksi dari sektor peternakan** | | | | | **1.830.000.000** | **1.950.000.000** | | |
| XXXX | Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | meningkatnya produksi hasil peternakan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan produksi sapi ternak di provinsi kep.Bangka Belitung | Meningkatnya hasil produksi dari sektor peternakan | Tercapainya target swasembada daging sapi dan peningkatan mutu bibit | Terdistribusinya bibit ternak dan tersedianya sarana prasarana yang mendukung peningkatan produksi sapi ternak | Peningkatan populasi sapi di Prov. Kep. Babel | Distanbunnak Prov. Kep. Babel | 1.268.050.000 | 1.300.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | SKPD | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0800 | Pengembangan agribisnis peternakan | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | meningkatnya produksi hasil peternakan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan produksi sapi ternak di provinsi kep.Bangka Belitung | Meningkatnya hasil produksi dari sektor peternakan | Bantuan Perbibitan ternak ayam merawang di Balai Benih Pertanaian | Tersedianya bibit ayam merawang dan peralatan beternak ayam buras di Balai Benih Pertanian | Bertambahnya populasi ayam merawang | pertambahan populasi ayam merawang | 300.000.000 | 350.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| XXXX | Pengembangan SPIB 1 | 3. Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi | meningkatnya produksi hasil peternakan | Prov. Kep. Babel | Peningkatan produksi sapi ternak di provinsi kep.Bangka Belitung | Meningkatnya hasil produksi dari sektor peternakan | Tercapainya target swasembada daging sapi dan peningkatan mutu bibit | Berkembangnya SPIB melalui ketersediaan petugas SIB dan tersedianya sarana prasarana IB | Peningkatan populasi sapi di Prov. Kep. Babel | Distanbunnak Prov. Kep. Babel | 261.950.000 | 300.000.000 | DISTANBUNNAK PROV. KEP. BABEL | APBD |
| **Total Pagu usulan Program dan Kegiatan** | | | | | | | | | | | **28.167.850.080** | | | |
| **Alokasi Pagu Kegiatan Rutin** | | | | | | | | | | | **10.911.343.080** | | | |
| **Alokasi pagu Kegiatan Pilihan** | | | | | | | | | | | **17.256.507.000** | | | |

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| 2. | Urusan Pilihan | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01. | Bidang Urusan Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01.04. | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN RUTIN | | | | | | | | | | 7.688.117.000 | | | |
| 2.01.2.01.04.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional kantor | | | | | 1.251.930.000 | 1.628.693.000 | | |
| 2.01.2.01.04.01.0100 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Penyediaan pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal | Terfasilitasinya pelayanan jasa surat menyurat internal dan ekternal selama 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan jasa surat menyurat internal dan eksternal | 1 tahun Anggaran | 30.000.000 | 33.000.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.0200 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Penyediaan pelayanan jasa Komunikasi, Air dan Listrik | Terfasilitasinya pelayanan jasaKomunikasi, Air dan Listrik selama 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan jasa Komunikasi, Air dan Listrik | 1 tahun Anggaran | 72.000.000 | 79.200.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Penyediaan pelayanan jasa administrasi keuangan | Terfasilitasinya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan jasa administrasi keuangan | 1 tahun Anggaran | 97.080.000 | 106.788.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.0800 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan pelayanan jasa Kebersihan Kantor | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan jasa Kebersihan Kantor | 1 tahun Anggaran | 18.000.000 | 19.800.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.0900 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan jasa perbaikan peralatan kerja | 1 tahun Anggaran | 45.000.000 | 49.500.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan alat tulis kantor | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap penyediaan alat tulis kantor | 1 tahun Anggaran | 80.000.000 | 88.000.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1100 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan Pelayanan Percetakan dan Penggandaan | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Pelayanan Percetakan dan Penggandaan | 1 tahun Anggaran | 46.000.000 | 50.600.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 tahun Anggaran | 20.000.000 | 22.000.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| 2.01.2.01.04.01.1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | Penyediaan Pelayanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Pelayanan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 tahun Anggaran | 24.000.000 | 26.400.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1600 | Penyediaan bahan logistik kantor | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan bahan logistik kantor | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Penyediaan bahan logistik kantor | 1 tahun Anggaran | 6.000.000 | 6.600.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1700 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 1 tahun Anggaran | 35.000.000 | 38.500.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.01.1800 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Penyediaan akomodasi dan transportasi untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | kelancaran akomodasi dan transportasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap Penyediaan akomodasi dan transportasi untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | kelancaran akomodasi dan transportasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah selama 1 tahun Anggaran | 350.000.000 | 660.000.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |
| 2.01.2.01.04.01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran | Penyediaan pelayanan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | elama 1 tahun Anggaran | fasilitasi terhadap pelayanan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1 tahun Anggaran | 278.850.000 | 448.305.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.02.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur** | **terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung bagi operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah** | **Lancarnya Pelayanan Operasional Kantor** | | | | | **482.170.000** | **530.387.000** | | |
| 2.01.2.01.04.02.2400 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung bagi operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah | Lancarnya Pelayanan Operasional Perkantoran | Penyediaan Pemeliharaan bagi kendaraan dinas/Operasiona | 7 unit roda empat dan 17 unit roda dua | fasilitasi terhadap pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional | 7 unit roda empat dan 17 unit roda dua | 482.170.000 | 530.387.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.03.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur** | **terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Peningkatan Disiplin pada Aparatur Pemerintahan** | **Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan** | | | | | **140.750.000** | - | | |
| 2.01.2.01.04.03.0200 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Disiplin pada Aparatur Pemerintahan | Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan | Penyediaan Pakaian seragam dinas bagi aparatur | penyediaan pakaian seragam dinas bagi 39 aparatur | Fasilitasi penyediaan pakaian seragam dinas bagi aparatur | 39 aparatur dalam berpakaian | 115.750.000 | - | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **2.01.2.01.04.05.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur** | **terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Pegawai Negeri Sipil** | **Meningkatnya kemampuan Aparatur pada Pegawai Negeri Sipil** | | | | | **100.000.000** | **110.000.000** | | |
| 2.01.2.01.04.05.0100 | Pendidikan dan pelatihan formal | Peningkatan Manajemen Pemerintahan dan Aparatur | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Pegawai Negeri Sipil | Meningkatnya kemampuan Aparatur pada Pegawai Negeri Sipil | Penyediaan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil | terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil | Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil | meningkatnya keahlian dan kemampuan pada pegawai negeri sipil | 100.000.000 | 110.000.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **PROGRAM PILIHAN** | | | | | | | | | | | **5.713.267.000** | | | |
| **2.01.2.01.04.15.** | **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | | | **Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha)** | **Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutana** | | | | | **2.154.565.000** | **2.370.021.500** | | |
| 2.01.2.01.04.15.0200 | Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | Meningkatnya jalinan komunikasi dan tersampaikannya informasi petani dengan pemerintah dan pengelola teknis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 238.680.000 | 262.548.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.15.0300 | Peningkatan kemampuan lembaga petani | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung | Terpilihnya petani, penyuluh PNS, penyuluh swadaya, gapoktan teladan, BPP, penyuluh THL terbaik, Karya Tulis ilmiah dan Kelembagaan Ekonomi Berprestasi di Prov. Kep. Babel | 10 kategori | Meningkatnya kompetensi pelaku utama dalam mengelola usaha tani dan organisasinya dan tersedianya SDM penyuluh pertanian yang kompeten dalam jumlah dan mutu serta memenuhi standart kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 324.670.000 | 357.137.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.15.2000 | Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya penilaian dan pendampingan kelompok usaha pengembangan perhutanan rakyat | 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota | Terbinanya dan termonitornya kegiatan kelompok usaha pengembangan perhutanan rakyat | Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan Petugas bidang kehutanan | 414.210.000 | 455.631.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.15.2300 | Temu Karya / Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya Kegiatan Temu Karya / Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | 1 kali pertemuan | Meningkatnya kompetensi pelaku utama dalam mengelola usahanya dan organisasinya | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung | 627.755.000 | 690.530.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| 2.01.2.01.04.15.2400 | Peningkatan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama ( Magang ) | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | wilayah Jawa | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya magang penyuluh/Petugas dan pelaku utama pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 3 Lokasi | Meningkatnya Wawasan, Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh dan Pelaku Utama | 30 orang (Penyuluh/petugas dan Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) | 334.300.000 | 367.730.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.15.2500 | Pertemuan Penilaian Kelas Kelompok | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Kesejahteraan Petani (Pelaku Utama dan Pelaku Usaha) | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya pertemuan lapang petani dengan perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Laporan | Meningkatnya semangat semangat kelompok untuk memajukan kelompoknya | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 214.950.000 | 236.445.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.18.** | **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | **Meningkatnya pemanfaatan penerapan teknologi informasi pertanian, perikanan dan kehutanan** | **Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan** | | | | | **209.560.000** | **230.516.000** | | |
| 2.01.2.01.04.18.1900 | Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya pemanfaatan penerapan teknologi informasi pertanian, perikanan dan kehutanan | Pelaku utama sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Tersebarnya materi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ke 7 kabupaten/kota melalui media cetak dan website | 7 Kabupaten/ kota | Meningkatnya pengetahuan dan wawasan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan di Prov. Kep. Bangka Belitung | Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di 7 Kabupaten/ Kota | 150.000.000 | 230.516.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.20.** | **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan** | **Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi** | **terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien** | | **Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan** | **Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan** | | | | | **3.349.142.000** | **3.697.256.200** | | |
| 2.01.2.01.04.20.0500 | Peningkatan SDM Penyuluh melalui Diklat Dasar/Pembentukan bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | 3 lokasi diklat, Wilayah Jawa dan Sumatera | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya keikutsertaan penyuluh untuk mengikuti Diklat Dasar/Pembentukan penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 3 (tiga) Badan Diklat pada Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 30 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 482.675.000 | 530.942.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.0600 | Diklat Manajemen Kepemimpinan Bagi Koordinator BP3K | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terselenggaranya Diklat Manajemen Kepemimpinan bagi Koordinator BP3K | 1 (satu) Angkatan, 7 Hari | Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan kemampuan Koordinator BP3K dalam Manajemen Kepemimpinan | 31 Koordinator BP3K | 252.205.000 | 290.625.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.0700 | Penyusunan programa Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Tersedianya pedoman kerja bagi penyuluh pertanian,perikanan dan kehutanan | 1 (satu) pedoman | Terarahnya penyelenggaraan penyuluhan di 7 kabupaten/kota | Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di 7 Kabupaten/ kota | 181.650.000 | 199.815.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| 2.01.2.01.04.20.0800 | Pelatihan Penyuluh Pertanian (ditambahkan perikanan, dan kehutanan) | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terselenggaranya Pelatihan Penyuluh Pertanian | 1 (satu) Angkatan, 3 Hari | Meningkatnya pengetahuan, wawasan dan kemampuan SDM penyuluh Pertanian | 30 Penyuluh Pertanian | 110.765.000 | 121.841.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.0900 | Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Kep. Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya penilaian angka kredit penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | 2 semester | Penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang | Penyuluh PNS Prov. Kep.Bangka Belitung | 49.330.000 | 54.263.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.1100 | Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya rapat dan forum koordinasi penyuluhan | 1 kali pertemuan | Terciptanya persamaan persepsi serta terjalinnya hubungan antara dinas/instansi terkait dibidang penyuluhan di prov/kab/kota | 60 orang | 166.935.000 | 183.628.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.1600 | Fasilitasi Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terselenggaranya fasilitasi kegiatan Komisi Penyuluhan Provinsi | 25 orang | Tersusunnya rekomendasi KPP kepada Ketua Bakorluh (Gubernur) tentang segala sesuatu untuk penguatan dan kelancaran pelaksanaan serta pengembangan fungsi penyuluhan untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. | 1 Laporan | 256.200.000 | 281.820.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.1900 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Meningkatnya operasional Balai Penyuluhan Pertanian/Kecamatan, terlaksananya kegiatan sosialisasi data kelembagaan dan tersedianya data kelembagaan penyuluhan | 1 (satu) kegiatan sosialisasi, data kelembagaan penyuluhan 7 kab./kota | Meningkatnya peran kelembagaan penyuluhan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 462.985.000 | 509.283.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.2000 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ke Kab. Kota | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Termonitor dan terevaluasinya kegiatan penyuluh di kab/kota | Penyuluh di 7 Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Monev kegiatan penyuluhan | Prov. Kep. Bangka Belitung | 102.200.000 | 112.420.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.2100 | Pembinaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya dan tersusunnya dokumen hasil pembinaan penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan | Penyuluh di 7 Kabupaten/ Kota | Meningkatnya kinerja penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan | Prov. Kep. Bangka Belitung | 355.320.000 | 390.852.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.2200 | Peningkatan Wawasan pelaku utama dan pelaku usaha | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkatnya kemandirian Usaha dan Kualitas Tenaga Kerja | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Meningkatnya semangat pelaku utama dan pelaku usaha dalam memajukan kelompoknya | 1 (satu) kegiatan sosialisasi, data kelembagaan penyuluhan 7 kab./kota | Meningkatnya peran pelaku utama dan pelaku usaha di bidang perikanan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 251.302.000 | 276.432.200 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran kegiatan | | hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | | (13) | (14) | (15) |
| 2.01.2.01.04.20.2300 | Pertemuan Penyuluhan Bidang Perikanan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya kegiatan pendampingan dan pengawalan pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan | Kelompok usaha Perikanan di Kab/Kota | Terbinanya dan termonitornya kegiatan pendampingan dan pengawalan pelaku utama dan pelaku usaha pembudidaya ikan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 292.520.000 | 321.772.000 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| 2.01.2.01.04.20.2600 | Supervisi Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan | Penyuluh pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | Terlaksananya dan tersusunnya dokumen hasil supervisi kegiatan penyuluhan dan pendampingan kelompok pelaku utama pertanian/ perikanan/ kehutanan | 1 (satu) dokumen penyelenggaraan penyuluhan | Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian/perikanan/kehutanan dalam penyelenggaraan penyuluhan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | 385.055.000 | 423.560.500 | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.XX.** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha** | | | | | | | | | | - | - | | |
| 2.01.2.01.04.XX.XXX | | | | | | | | | | | - | - | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.XX.** | **Program Peningkatan kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha** | | | | | | | | | | - | - | | |
| 2.01.2.01.04.XX.XXX | | | | | | | | | | | - | - | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |
| **2.01.2.01.04.XX.** | **Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan** | | | | | | | | | | - | - | | |
| 2.01.2.01.04.XX.XXX | | | | | | | | | | | - | - | Sekretariat BKP3K | sedang berjalan |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | URUSAN RUTIN | | | | | | | | | | 2.875.620.000 | 2.970.111.000 | | |
| A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | 1.748.500.000 | 1.835.925.000 | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Prioritas I | | Pangkalpinang | Terkirimnya surat menyurat dan dokumen lainnya | 1 dinas | surat-surat dinas terkirim | 12 bln | meningkatnya jasa surat menyurat | 1 SKPD dinas | 45.000.000 | 47.250.000 | | |
| 2 | penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Prioritas I | | Pangkalpinang | Tersedianya komunikasi , sumberdaya air dan linstrik kantor | 1 dinas | terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 bln | meningkatnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik | 1 SKPD dinas | 201.000.000 | 211.050.000 | | |
| 3 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Prioritas I | | Pangkalpinang | tercapainya pelayanan keuangan dinas | 1 dinas | berkas administrasi keuangan | 12 bln | meningkatnya jasa pelayanan keuangan dinas | 1 SKPD dinas | 109.400.000 | 114.870.000 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa kebersihan kantor | Prioritas I | | Pangkalpinang | terpeliharanya kebersihan kantor | 1 dinas | tersedianya jasa kebersihan kantor | 12 bln | meningkatnya kebersihan kantor | 1 SKPD dinas | 43.200.000 | 45.360.000 | | |
| 5 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Prioritas I | | Pangkalpinang | terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor | 1 dinas | tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bln | meningkatnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1 SKPD dinas | 53.500.000 | 56.175.000 | | |
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Prioritas I | | Pangkalpinang | terpenuhi ATK | 1 dinas | tersedianya ATK | 12 bln | tersedianya ATK | 1 SKPD dinas | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan pengadaan | Prioritas I | | Pangkalpinang | terpenuhi barang cetak dan penggandaan | 1 dinas | tersedianya barang cetak dan penggandaan | 12 bln | tersedianya barang cetak dan penggandaan | 1 SKPD dinas | 60.000.000 | 63.000.000 | | |
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksananya makan dan minum | 1 dinas | tersedianya makan dan minum rapat makanan dan minum tamu | 12 bln | tersedianya makan dan minum | 1 SKPD dinas | 34.500.000 | 36.225.000 | | |
| 9 | Penyediaan bahan logistik kantor | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksananya logistik | 1 dinas | tersedianya logistik untuk kantor | 12 bln | tersedianya logistik untuk keperluan kantor | 1 SKPD dinas | 30.000.000 | 31.500.000 | | |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 1 dinas | terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bln | terselenggaranya konsultasi dan koordinasi yang baik | 1 SKPD dinas | 400.000.000 | 420.000.000 | | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| 11 | Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | Prioritas I | | Pangkalpinang | tercapainya pelayanan perkntoran | 1 dinas | terlaksanan pelayanan penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran | 12 bln | meningkatkan pelayanan perkantoran | 1 SKPD dinas | 471.900.000 | 495.495.000 | | |
| B | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | 852.120.000 | 884.186.000 | | |
| 1 | Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | Pangkalpinang | kualitas pelayanan publik dan administrasi perkantoran | 100% | tersedianya gedung kantor dinas kehutanan Prov. Kep. Babel yang representatif dan memadai | 1 unit/1800m2 | tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna pengembangan pembibitan atau pos bibit, gaharu information center, tempat penyimpanan barang bukti hasil penertiban atas tindakan pidana kehutanan, gudang senjata, ruang introgasi, ruang tahanan sementara dan pusat informasi kehutanan | 100% | - | - | | |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksananya pemeliharaan gedung kantor | 1 dinas | terpeliharanya gedung kantor | 8 bln | meningkatnya kenyamanan bekerja | 1 SKPD Dinas | 210.800.000 | 210.800.000 | | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksananya pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas/operasional | 1 dinas | terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 12 bln | meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 SKPD Dinas | 496.320.000 | 521.136.000 | | |
| 4 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Prioritas I | | Pangkalpinang | tersedianya peralatan gedung kantor | 1 dinas | tersedianya peralatan kantor berupa laptop dan kamera foto | 5 laptop, 7 kamera | meningkatkan kualitas kerja | 1 SKPD Dinas | 145.000.000 | 152.250.000 | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000** | | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **C** | **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | | | | | | | | **250.000.000** | **250.000.000** | | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Prioritas I | | Pangkalpinang | meningkatnya kualitas SDM bidang kehutanan | 1 dinas | terlaksananya pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bidang kehutanan | aparatur/SDM kehutanan | terlatihnya paratur bidang kehutanan | 1 SKPD Dinas | 250.000.000 | 250.000.000 | | |
| **2** | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | **9.158.668.000** | **9.301.601.400** | | |
| | **BIDANG URUSAN KEHUTANAN** | | | | | | | | | | | | | |
| **A** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN** | | | | | | | | | | **2.971.865.000** | **3.120.458.250** | | |
| 1 | Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan | Prioritas I | | Pangkalpinang | Tersusunnya Dokumen Perencanaan | 1 Dinas | Dokumen Perencanaan SKPD | 4 bulan | Terlaksananya Rakoren | 1 SKPD | 166.300.000 | 174.615.000 | | |
| 2 | Rekonsiliasi dan Informasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Prioritas I | | Pangkalpinang | terlaksanya pemulaan data dan informasi kehutanan | 100% | meningktanya product Domestic Bruto PDB Bidang Kehutanan | 7 Kab/Kota | tersedinya data Base Pembangunan Kehutanan Se Babel | 100% | 500.000.000 | 525.000.000 | | |
| 3 | Sosialisasi Pemenuhan kewajiban bagi pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan | Prioritas I | | Pangkalpinang | tersedinya dukungan dalam pelaksanaan dan pengembangan Hutan | 1 prov | terlaksanya sosialisasi dan arahan terhadap pemenuhan kewajiban IPPKH | 40 perusahan | terujutnya standarisasi pemenuhan kewajiban bagi pemegang ijin IPPKH | 40 Perusahan | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| 4 | Sosialisasi Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi ke Pengelola Hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | tersosialisasinya NSDH Prov kepengeolaan Hutan | 1 prov | terlaksanya sosialisasi NSDH prov kepeneloaan Hutan | 1 prov | adanya sosialisasi NSDH prov kepengelolaa hutan | 1 prov | 370.000.000 | 388.500.000 | | |
| 5 | Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi | Prioritas I | | Pangkalpinang | terrevisinya RKTP | 1 prov | terlaksanya revisi RKTP | 1 prov | adanya laporan revisi RKTP | 1 laporan | 157.280.000 | 165.144.000 | | |
| 6 | Penyiapan Penyusunan Kelembagaan dan Pembangunan KPH Provinsi | Prioritas I | | Pangkalpinang | tersusunya kelembangaan dan pembangunan KPH | 1 prov | terlaksanya penyusunan kelembangaan dan pembangunan KPH prov Babel | 1 prov | adanya laporan penyusunan kelembangaan kPH prov | 1 laporan | 223.550.000 | 234.727.500 | | |
| 7 | Pemantapan Kawasan Hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | tercapainya pemantapan kawasan hutan dalam perencanaan hutan secara lestari | 1 prov | terlaksanya IP4T dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemanpaatan kawasan hutan | 30 orang dan data kondisi batas 90 KM terayek batas Luar Kh | tersedinya kondisi Batas Kawasan hutan Yang terkini dan terciptanya kesepahaman aparatur terhadap aspek yang terkait dengan IP4T | 30 orang dan data kondisi batas 90 KM terayek batas Luar Kh | 245.785.000 | 258.074.250 | | |
| 8 | Koordinasi dan Perencanaan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah provinsi | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | tersedinay dukungan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan hutan | 1 prov | terlaksnya koordinasi dan perencanaan pemanfaatan ruang Dalam RTRW | 6 kab | tersedinya 1 Buku laporan perencanaan pemnapaatan ruang dalam RTRW | 1 laporan | 100.200.000 | 105.210.000 | | |
| 9 | Operasionalisasi GIS dan peralatan pendukung pengukuran dan perpetaan | Prioritas I | | Pangkalpinang | mningktkan kualitas pelayanan publik dalam penyediaan data dan informasi batas kawasan hutan | 1 prov | terlaksanya opersionalisasi peralatan Gis dan alat pengukuran dan pemetaan | 10 Bulan | tersedinya peta kawasan hutan dan optimalnya operasionan peralatan dan perpetaan | 10 Bulan | 184.850.000 | 194.092.500 | | |
| 10 | Monitoring dan Evaluasi penggunaan kawasan hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | tersedinya dukungan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan hutan | 1 prov | terlaksnanya evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban IPPKH | 6 perusahaan | terujunya pengemdalian terhadp pemanpaatan serta penggunan kawasan hutan | 6 perusahaan | 365.000.000 | 383.250.000 | | |
| 11 | Konsultasi Publik Rencana pengelolaan dan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan | Prioritas I | | 4 kab | tersedianya dukungan dalam pelaksanaan perencaan dan pengembangan hutan | 1 prov | terlaksanay konsultasi publik rencana pengelolaan dan tata hutan KPH Model | 4 KPH Model | terujudnya pengelolaan hutan ditingkat tapak yang optimal oleh perngkat KPH beserta masyarakat sekitar | 4 KPH Model | 283.900.000 | 298.095.000 | | |
| 12 | Rapat Koordinasi teknis kepala dinas Kabupaten/Kota se-Provinsi kepulauan Bangka Belitung | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Terlaksananya koordinasi perenvanaan dan pengembangan hutan | 100% | Terbangunya koordinasi yang baik | 7 Kab/Kota | Terlaksananya koordinasi dan sepahaman di bidang kehutanan | 100% | 225.000.000 | 236.250.000 | | |
| **B** | **PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN** | | | | | | | | | | **1.734.438.000** | **1.821.159.900** | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | Bimbingan teknis penguatan HTR dan penatausahaan hasil hutan | Prioritas I | | 6 Kab | Tercapainya pembangunan tanaman HTR dan tertip penatausahaan hasil hutan | 1 Prov | Terlatihnya pendampingan HTR dan pemegang IUPHHK HTR 60 orang dan terlatihnya kualitas petugas penatausahaan hasil hutan 40m orang | 6 Kab | Meningkatkan kualitas petugas penatausahaan hasil hutan dan penapatan negara | 6 Kab | 350.000.000 | 367.500.000 | | |
| 2 | Observasi lapangan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat | Prioritas I | | | tercapainya penguatan HTR | 1 Prov | Terlaksananya observasi lapangan HTR | 6 Kab | Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan | 6 Kab | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| 3 | Pengembangan Industri dan pemasaran hasil hutan | Prioritas I | | Jakarta | Tercapainya promosi produk-produk unggul HHK dan HHBK | 1 Prov | Terlaksananyapromosi produk-produk unggul HHK dan HHBK | 6 Kab | Meningkatkan pemasaran HHK dan HHBK | 6 Kab | 400.000.000 | 420.000.000 | | |
| 4 | Pembinaan Hutan Tanaman Rakyat | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Tercapainya peningkatan pemanfaatan HTR | 1 Prov | Terlaksananya ppembinaan program HTR | Kelompok pemegang izin IUPHHK-HTR 6 kab | Meningkatnya pemahaman masyarakat dlm pemanfaatan hutan melalui HTR | 6 Kab | 263.500.000 | 276.675.000 | | |
| 5 | Bedah Kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | peningkatan kinerja melaui identifikasi dan penyelesaian masalah izin UPHHK-HTI | 1 Prov | teridentifikasinya kendala dan masalah pembangunan HTI | 6 Kab | Meningkatkan kinerja PHPL IUPHHK-HTI | 6 Kab | 170.938.000 | 179.484.900 | | |
| 6 | sosialisasi HTI dan Peredaran Hasil Hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Tercapainya peningkatan pemanfaatan hutan dan tertibnya peredaran hasil hutan | 1 Prov | terlaksananya sosialisasi HTI dan peredaran hasil hutan | 1 Prov, 6 Kab | Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan hutan dan peredaran hasil hutan | 1 Prov, 6 Kab | 300.000.000 | 315.000.000 | | |
| 7 | Pengembangan informasi komoditi kehutanan prioritas penyuluh kehutanan dan pelaku usaha melalui potensi sumber daya hutan Bangka Belitung | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Berkembangnya komoditi kehutanan melalui HHBK | 1 Prov | Terbentuknya komoditas kehutanan bersama prioritas penyuluh melalui SDH | 6 Kab | Meningkatnya komoditi dan koperasi kehutanan HHBK | 6 unit | 100.000.000 | 105.000.000 | | |
| **C** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA** | | | | | | | | | | **2.327.770.000** | **2.129.158.500** | | |
| 1 | Operasionalisasi Polisi Hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | tercapainay perlindungan dan Konservasi SDA | 1 Prov | terselenggarnya upaya perlindungan hutan dan hasil hutan | Prov.Kep Babel | Brkurangnya Tindak Pidana Kehutanan sehingga meningkatkan kegiatn perlindungan hutan | Prov.Kep Babel | 174.500.000 | 183.225.000 | | |
| 2 | Pengendalian Kebakaran Hutan dan Sosialiasi peraturan bidang perlindungan hutan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Terlaksanya perlindungan hutan dan Konservasi SDA | 6 Kab | terlaksannya pertemuan pengendalian kebakaran hutan dan sosialisasi peraturan bidang perlindungan hutan | 6 Kab | terciptanya keamanan kawasan hutan | 6 kab | 329.550.000 | 346.027.500 | | |
| 5 | Pembuatan Pos jaga dan papan pengumunan di Hutan Produksi | Prioritas I | | 6 Kabupaten | terlaksanya perlindugan hutan dan konservasi SDA | 6 Kabupaten | terlaksanya pembuatan pos jaga dan terpasangnya papan penumuman | 6 kab | terciptanya kemanan kawasan hutan | 6 Kab | 297.400.000 | 312.270.000 | | |
| 6 | Fasilitasi pengamanan hutan swakarsa Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | 6 Kabupaten | terlaksanya pembinaan dan koordinasi pamhut swakarsa | 1 Prov | terbangunya koordinasi yang baik | 6 kab | terlaksanya pasilitasi pamhut suakrsa kabupaten | 6 kab | 483.460.000 | 507.633.000 | | |
| 7 | Pendampingan Penyuluh kehutanan untuk perlindungan dan konservasi SDA | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | terbangunnya perlindungan konservasi SDA | 1 Prov | Terdorongnya masyarakat dalam perlindungan SDA | 1 Prov | tercapainya perlindungan SDA dan pendamping penyuluh | 6 Kab | 81.500.000 | 85.575.000 | | |
| 8 | Identifikasi sebaran flora dan fauna langka (TSL) di Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Teridentifikasi dan terfasilitasi para penangkar | 1 Prov | Terlaksananya konservasi | 1 Buku | Tersedianya penangkar yang memiliki izin | 1 Provinsi | 300.000.000 | 315.000.000 | | |
| 9 | Survey potensi dan sebaran mangrove di Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Teridentifikasinya sebaran mangrove | 1 Prov | tersusunnya buku laporan mangrove | 1 Buku | terlaksananya konservasi (perlindungan mangrove) | 1 Provinsi | 245.810.000 | 258.100.500 | | |
| 10 | Penilaian Lomba PKA Wana Lestari | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | Terlaksananya keberhasilan PKA wana lestari | 1 Prov | tersedianya lomba PKA wana lestari | Polhut dan kder konservasi | Terlaksananya keberhasilan PKA wana lestari | Polhut dan kder konservasi | 115.550.000 | 121.327.500 | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator kinerja | | | | | | Pagu Hasil Pembahasan | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 11 | Perlindungan dan Pengamanan hutan terpadu di Provinsi Kep. Babel | | | | | | | | | | 300.000.000 | 315.000.000 | | |
| **D** | **PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI DAN DAYA DUKUNG DAS BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | | **2.124.595.000** | **2.230.824.750** | | |
| 1 | Penanaman satu milyar pohon di Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | pangkalpinang | terlaksanya penanaman pohon dalam mendukung Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 10 Juta Pohon | tercapaianya jumlah penghijuan/penanaman yang telah dilakukan oleh Prov | 10 Juta Pohon | tercapainya hutan Babel Hijau | 10 Juta Pohon | 479.910.000 | 503.905.500 | | |
| 5 | Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kelekak kelukoi serta hutan desa | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | terpeliharanya areal Hkm dalam kawasan hutan dan kelekak kelukoi | se-Prov. Kep. Babel | terpeliharanya areal Hkm dalam kawasan hutan dan kelekak kelukoi | se-Prov. Kep. Babel | terlaksanya pembinaan dan pemeliharaan Hkm dan Kelekak Kelukoi | se-Prov. Kep. Babel | 493.910.000 | 518.605.500 | | |
| 6 | Rapat koordinasi dalam penyusunan rencana kerja hutan desa dan hutan kemasyarakatan se-Prov. Kep. Babel | Prioritas I | | pangkalpinang | terlaksanya koordinasi dan terkelola HD dan Hkm | 1 Provinsi | terlaksanya koordinasi dan terkelola HD dan Hkm | pulau Bangka | terlaksanya penyusunan rencana kerja HD dan hkm | 45 Peserta dan 6 Dokumen Renja | 187.800.000 | 197.190.000 | | |
| 7 | Bimbingan teknis reklamasi dan rehabilitasi DAS pada IPPKH dan stakeholder lainnya se-prov. Kep. Babel | Prioritas I | | pangkalpinang | terlaksanya bimbinga teknis reklamasi dan rehabilitasi DAS | 1 Provinsi | terlaksanya bimbinga teknis reklamasi dan rehabilitasi DAS | Pulau Belitung | terlaksanya bimbinga teknis reklamasi dan rehabilitasi DAS | 60 Peserta dengan 2 Dokumen Rencana Reklamasi | 282.225.000 | 296.336.250 | | |
| 8 | Penyusunan DED Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pulau Bangka | Prioritas I | | Bangka Tengah | Terlaksanya pembuatan DED pengelolan mangrove di Bateng | 1 Kab | tersedinya dokumen DED pengelolaan ekosistem mangrove | Buku Laporan | terlaksanya dan terencanya pemanfaatan potensi,rehabilitasi dan HHBK mangrove di Kab Bateng | 1 Dokumen DED | 385.000.000 | 404.250.000 | | |
| 9 | Fasilitasi Penyusunan Perda Pengelolaan DAS | Prioritas I | | Pangkalpinang | tersedianya perda dalam pengelolaan DAS | 1 Provinsi | terlaksanya pasilitasi dan penyusunan perda pengelolaan DAS | 1 Perda | tercapainya pengelolaan DAS yang terpadu dan berkelanjutan | 1 Perda | 295.750.000 | 310.537.500 | | |
| 11 | Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang (DAK) bidang Kehutanan | Prioritas I | | se-Prov. Kep. Babel | | | | | | | - | - | | |
| | **JUMLAH BELANJA LANGSUNG** | | | | | | | | | | **12.034.288.000** | **12.271.712.400** | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 02 | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | | 11.115.911.000 | 11.138.300.000 | | |
| 1 | URUSAN RUTIN | | | | | | | | | | 5.008.520.000 | 4.066.300.000 | | |
| A | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 1.808.520.000 | 2.289.300.000 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Jumlah Pengiriiman Surat tiap Bulan | 12 Bulan | Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos lainnya untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 15.600.000 | 16.800.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terciptanya komunikasi sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | Tercapainya komunikasi, sumber daya air dan listrik yg lancar | 100% | 120.000.000 | 125.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 3 | Penyedia jasa administrasi keuangan | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan | 26 Orang selama 12 Bulan | Terlaksananya pengadministrasian keuangan dan perkantoran yang tertib | 100% | 152.870.000 | 160.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 4 | Penyediaan jasa Kebersihan kantor | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor dan terbayarnya honorer tidak tetap | 12 Bulan | Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor | 100% | 18.000.000 | 200.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 5 | Penyediaan alat tulis kantor | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya ATK yang memadai | Alat Tulis Kanor Selama 12 Bulan | Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik | 100% | 144.000.000 | 155.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 6 | Penyedia barang cetakan dan pengandaan | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang memadai | Spanduk, Cetak Buku dan Fotocopy selama 12 Bulan | Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik | 100% | 65.000.000 | 70.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya komponen listrik dan penerangan | Lampu, kabel dan komponen elektronik lainnya Selama 12 Bulan | Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik, nyaman dan lancar | 100% | 6.500.000 | 7.500.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Surat kabar/majalah dan buku selama 12 Bulan | Menambah wawasan dan pengetahuan pegawai | 100% | 40.000.000 | 45.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 9 | Penyediaan makan dan minum | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya makan dan minum rapat | Makan dan Minum selama 12 bulan | Pelayanan pegawai yang memadai | 100% | 39.000.000 | 45.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya perjalanan Dinas luar daerah | 12 Bulan | Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan baik | 100% | 400.000.000 | 750.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | | | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11 | Penyedia jasa penunjang dan pengelolaan administrasi perkantoran | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya honorarium tidak tetap | Honorarium tenaga cleaning services 7 orang, petugas keamanan 6 orang, sopir 4 orang | Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor | 100% | 407.550.000 | 415.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral Se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang Pertambangan dan Energi | 100% | Terlaksananya koordinasi, konsultasi pembinaan dan monev ESDM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4 Laporan Per Triwulan | Terselenggaranya koordinasi, konsultasi pembinaan monev ESDM se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 250.000.000 | 300.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **B** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | | | | **Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran kerja** | | | | | | **1.635.000.000** | **577.000.000** | | |
| 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | AC, Komputer, Laptop dan dispenser | Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik | 100% | 200.000.000 | 220.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 2 | Pengadaan Genset dan Pembangunan Rumah Pembangkit | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Genset dan Rumah Pembangkit | Genset, Rumah Pembangkit, SLO, Tabung Gas, APAR | Tersedianya cadangan daya listrik | 100% | 510.000.000 | - | Distamben | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Perbaikan peralatan kerja | Tabung Pemadam Kebakaran, AC, laptop, komputer, printer, mesin tik, listrik, telepon, meja, kursi dan pompa air | Pelayanan administrasi perkantoran yang baik | 100% | 25.000.000 | 27.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Tersedianya kondisi & BBM kendaraan dinas/operasional | 18.000 ltr/thn BBM, 5 pkt ban mobil, 14 pkt ban motor, 12 accu, 19 STNK, 19 pkt service & suku cadang | Terjaganya dengan baik sarana kerja dinas | 100% | 300.000.000 | 330.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 5 | Pengadaan Kelengkapan Penunjang Peralatan Lapangan | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Tersedianya peralatan dan perlengkapan lapangan | Alat Ukur Listrik | Terlaksananya pengawasan lapangan yang akurat dan aman bagi aparatur dinas | 100% | 200.000.000 | - | Distamben | Sedang Berjalan |
| 6 | Penggantian Instalasi Listrik Perkantoran | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Peningkatan Instalasi Listrik perkantoran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Gedung | Instalasi listrik perkantoran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 200.000.000 | - | Distamben | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7 | Pengadaan Peralatan Pemantauan Pergerakan Penambangan Laut (Kapal Keruk dan Kapal Isap Pertambangan ) | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasaran yang dapat menunjang kelancaran kerja | 100% | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pergerakan Penambangan Laut | 1 Unit | Terpantaunya kegiatan penambangan laut yang dilakukan oleh kapal teruk dan kapal misap pertambangan | 100% | 200.000.000 | - | Distamben | |
| | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000** | | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **C** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | | | | **Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota** | | | | | | **1.465.000.000** | **1.120.000.000** | | |
| **1** | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | Luar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota | 100% | Bertambahnya sumber daya aparatur dinas yang terlatih | 25 orang | Tersedianya aparatur yang memiliki kapasitas bersertifikasi | 100% | 115.000.000 | 120.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **2** | Rapat Koordinasi dan Implementasi Program Pertambangan dan Energi Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota | 100% | Terlaksananya Program, kegiatan Pertambangan dan Energi | 55 Orang | Sinkronisasi Program Pertambangan dan Energi | 100% | 200.000.000 | 190.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **3** | Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang Ketenagalistrikan | 100% | Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan | Laporan | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan oleh inspektur ketenagalistrikan | 100% | 250.000.000 | 280.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **4** | Pengawasaan dan Pembinaan Inspektur Tambang | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersediannya data, informasi, pembinaan, pengawasan dan koordinasi di bidang pertambangan dan energi | 100% | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pertambangan | Laporan | Terselanggaranya pembinaan dan pengawasan oleh Inspektur Tambang | 100% | | 900.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **5** | Pertemuan Tahunan Inspketur Tambang, KAIT dan KTT Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah | 100% | Terlaksananya Pengelolaan Peertambangan yang baik dan benar serta berkualitas | Laporan | terselengaranya Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 200.000.000 | 230.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **3** | Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota | 100% | Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan | 4 Laporan Per Triwulan | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan oleh inspektur ketenagalistrikan | 100% | - | 280.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **0** | Pertemuan Tahunan Inspketur Tambang, KAIT dan KTT Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota | 100% | Terlaksananya Pengelolaan Peertambangan yang baik dan benar serta berkualitas | Laporan | Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Pertambangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | - | 230.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5 | Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya sumber daya manusia dan kinerja pegawai negeri sipil serta terjalinnya hubungan yang sinergis antara Distamben Provinsi dengan distamben Kab/Kota | 100% | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pertambangan | 4 Laporan Per Triwulan | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan oleh inspektur tambang | 100% | 700.000.000 | 300.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **D** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | | | | **Penyelenggaraan monev perencanaan dan pelaporan** | | | | | | **75.000.000** | **80.000.000** | | |
| 1 | Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 6 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Penyelenggaraan monev perencanaan dan pelaporan | 100% | Penyusunan perencanaan dan pelaporan yang baik | RKA, DPA, DPPA, LKPJ, LAKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA, SEUPPD, MUSRENBANG | Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akuntabel | 100% | 75.000.000 | 80.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **2** | **URUSAN PILIHAN** | | | | | | | | | | **6.107.391.000** | **7.072.000.000** | | |
| **B** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN** | | | | **Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan** | | | | | | **3.384.701.000** | **4.267.000.000** | | |
| 1 | Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana umum mengunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 2 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat ) | Pemanfaatan energi baru terbarukan (Tenaga Surya) | 100% | Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PJU 100 unit | Tersedianya Penerangan Jalan Umum dan Sarana Umum di Daerah | 100% | | 4.000.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| 1 | Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana umum mengunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Pemanfaatan energi baru terbarukan (Tenaga Surya) | 100% | Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PJU 100 unit | Tersedianya Penerangan Jalan Umum dan Sarana Umum di Daerah | 100% | 3.124.770.000 | 4.000.000.000 | Distamben | |
| 2 | Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan DaeraH (RUKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tersusunnya RUKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersedianya Dokumen RUKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan Dokumen RUKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 85.510.000 | 87.000.000 | Distamben | |
| 3 | Bimtek pengoperasian dan pemeliharaan PLTS | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 100% | Peningkatan pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan | 35 Peserta | Meningkatnya pemahaman aparatur dan pelaku usaha tentang aturan yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan | 100% | | 180.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 4 | Pengadaan dan pemasangan Sparepart PLTS di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | Pemanfaatan energi baru terbarukan (Tenaga Surya) | 100% | Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauann Bangka Belitung | PLTS 1 Paket | Tersedianya PLTS di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | 250.000.000 | Distamben | Drop / Delate ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| 5 | Inventarisasi Data Perizinan dan Sertifikasi Pembangkit Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan | 100% | Tersedianya Data Perizinan dan Sertifikasi Pembnagkit Tenaga Listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Laporan | Tersedianya Data yang dijadikan Dasar Perhitungan pasokan energi listrik di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | 326.000.000 | Distamben | Drop / Delate ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Verifikasi dan validasi Program Pemasangan Listrik di Perdesaan | | | 6 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya pembinaan bidang ketenagalistrikan | 100% | Tersedianya data Verifikasi dan Falidasi Pemasangan Listrik di Perdesaan | 6 Kabupaten | MeningkatnyaVerifikasi dan Falidasi Pemasangan Listrik di Perdesaan tentang aturan yang berlaku dalam bidang ketenagalistrikan | 100% | 174.421.000 | 180.000.000 | Distamben | |
| **C** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI** | | | | **Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi** | | | | | | **546.440.000** | **660.000.000** | | |
| 1 | Fasilitasi Kegiatan Migas dengan pemerintah pusat dan partisipasi keanggotaan ADPM | | | Luar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi | 100% | Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | DBH sektor MIGAS 6 Miliar / Tahun | Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan kepada Lembaga penyalur dan badan usaha pendistribusian BBM dan Gas dalam pendistribusian BBM dan Gas | 100% | 246.440.000 | 280.000.000 | Distamben | |
| 2 | Pembinaan dan Pengawasaan Pendistribusian BBM dan Gas Sektor Hilir Migas | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi | 100% | Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Laporan | Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan kepada Lembaga penyalur dan badan usaha pendistribusian BBM dan Gas dalam pendistribusian BBM dan Gas | 100% | 300.000.000 | 380.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 3 | Pengawasan Keteknikan di Bidang Hilir Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi | 100% | Tersedianya Pengawasan Keteknikan dan K3 pada usaha Hilir Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, agar tercapainya kondisi standar keteknikan badan usaha hilir migas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Laporan | Tersedianya data peralatan dan Intalasi yang berlaku | 100% | 155.000.000 | Distamben | Drop / Delate ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) | |
| **D** | **PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH** | | | | **Tersedianya data Penyelidikan dan Pengembagan ESDM dan Air Tanah** | | | | | | **615.000.000** | | | |
| 1 | Pemantauan dan supervisi pengelolaan air tanah | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Pemantauan dan supervisi pengelolaan air tanah yang baik dan terintergrasi | Data dan Laporan | Meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan air tanah | 100% | 185.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) | |
| 2 | Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akufier bawah permukaan | | | 2 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur ) | Terlaksananya Penelitian/Pengambangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Tersedianya data pendukung sebagai usulan/rekomendasi penentuan titik sumur bor | Data dan Laporan | Terjaganya kelestarian fungsi dan keberadaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang air tanah | 100% | 150.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Survey Perizinan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian / Pengembangan ESDM air Tanah | 100% | Data Teknis hasil survey lapangan | Data dan Laporan | Tersedianya data teknis untuk rekomendasi pengajuan izin mineral di Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | 120.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| 4 | Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Terdianya data hasil penyelidikan kebumian | laporan data geologi dan sumber daya mineral | Tersedianya data dan informasi hasil penyeledikan kebumian dalam menunjang kegiatan bidang geologi dan sumber daya mineral | 100% | | 160.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| 5 | Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Air Tanah | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan air Tanah | 1 Perda Pengelolaan Air Tanah | Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | - | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| **D** | **PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH** | | | | **Tersedianya data Penyelidikan dan Pengembagan ESDM dan Air Tanah** | | | | | | **783.950.000** | **615.000.000** | | |
| 1 | Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana umum mengunakan EBT di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 2 Kabupaten Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat ) | Pemanfaatan energi baru terbarukan (Tenaga Surya) | 100% | Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunakan Tenaga Surya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | PJU 100 unit | Tersedianya Penerangan Jalan Umum dan Sarana Umum di Daerah | 100% | | 4.000.000.000 | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| 1 | Pemantauan dan supervisi pengelolaan air tanah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian / Pengembangan ESDM air Tanah | 100% | Pemantauan dan supervisi pengelolaan air tanah yang baik dan terintergrasi | Data dan Laporan | Meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan air tanah | 100% | 175.000.000 | 185.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 2 | Survey Geolistrik untuk pendugaan keberadaan lapisan akufier bawah permukaan | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian/ Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Tersedianya data pendukung sebagai usulan/rekomendasi penentuan titik sumur bor | Data dan Laporan | Terjaganya kelestarian fungsi dan keberadaan air tanah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang air tanah | 100% | 120.000.000 | 150.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| 3 | Survey Perizinan Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/ Kota Provinsi Kepuluan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian/ Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Data Teknis hasil survey lapangan | Data dan Laporan | Tersedianya data teknis untuk rekomendasi pengajuan izin mineral di Provinsi Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 100.000.000 | 120.000.000 | Distamben | |
| 4 | Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian/ Pengembangan ESDM dan Air Tanah | 100% | Tersedianya data hasil penyelidikan kebumian | laporan data geologi dan sumber daya mineral | Tersedianya data dan informasi hasil penyeledikan kebumian dalam menunjang kegiatan bidang geologi dan sumber daya mineral | 100% | 150.000.000 | 160.000.000 | Distamben | |
| 5 | Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (PERDA) Pengelolaan Air Tanah | | | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Penelitian / Pengembangan ESDM air Tanah | 100% | Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan air Tanah | 1 Perda Pengelolaan Air Tanah | Tersedianya Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan air tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 238.950.000 | - | Distamben | |

| Nomor | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Perioritas Daerah | Sasaran Daearah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Kegiatan |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **E** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH** | | | | **Tersedianya data, informasi, pembinaan, pengawasaan dan koordinasi di bidang pertambangan dan energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** | | | | | | **1.392.300.000** | **1.530.000.000** | | |
| **1** | Penyebaraan data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM) | | | Kabupaten Belitung, Kota Pangkalpinang dan Luar Daerah | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta penyebaran data di Bidang Pertambangan | 100% | Tersedianya bahan dan tempat kegiatan pameran | 3 Kegiatan Pameran | Tersebarnya data dan informasi potensi SDA di bidang energi dan sumber daya mineral | 100% | 200.000.000 | 250.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **2** | Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah | 100% | Terselesaikannya tunggakan kurang bayar PNBP SDA PU tahun sebelumnya dan meningkatnya penyelesaian tunggakan tahun berjalan | 4 Sosialisasi dan 4 rapat rekonsiliasi | Meningkatnya penerimaan kas daerah dari PNBP SDA PU | 100% | | 200.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **2** | Pengawasan Operasi Produksi dan Konservasi | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berjalannya pengawasan operasi produksi dan konservasi | 100% | Tersedianya data Produksi | Laporan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Produksi | 100% | 300.000.000 | 250.000.000 | Distamben | |
| **3** | Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Terlaksananya Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah | 100% | Terlaksananya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 3 Nominator | Terselenggaranya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang akan menjadi Nominator di tingkat Nasional | 100% | 200.000.000 | 250.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **5** | Pengadaan drone (pesawat tak berawak), softwware dan pelatihan | | | Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pangkalpinang | | 100% | Tersedianya peralatan drone (pesawat tak berawak) | 1 Unit | terdapatnya data area terganggu secara akurat data iup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | | - | Distamben | Masuk lampiran III Pembahasan lebih lanjut ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| **6** | Inventarisasi dan Verifikasi up date data pemegang IUP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | 100% | Tersedianya data IUP | Laporan dan data | Terlaksananya pembinaan pemegang IUP | 100% | - | - | Distamben | Drop / Delate ( Hasil Rapat Bappeda tgl 24 Maret 2015) |
| **4** | Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum | | | Pangkalpinang | Terlaksananya Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah | 100% | Terselesaikanya tunggakan kurang bayar PNBP SDA Pertambangan Umum tahun sebelumnya dan meningkatnya penyelesaian tunggakan tahun berjalan | 4 Sosialisasi dan 4 rapat rekonsilisasi | Terselenggaranya Penilaian Pengelolaan Keselamatan Pertambangan yang akan menjadi Nominator di tingkat Nasional | 100% | 184.700.000 | 200.000.000 | Distamben | Sedang Berjalan |
| **5** | Inventarisasi dan Verifikasi data cadangan berdasarkan dokumen RKAB atau RKTL | | | 7 Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Validasi data cadangan yang dimiliki oleh pelaku Usaha pertambangan berdasrkan dokumen RKAB dan RKTTL | 100% | Tersedianya data cadangan Mineral | Laporan | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan data cadangan yang dimiliki oleh pelaku usaha | 100% | 62.250.000 | 80.000.000 | Distamben | |
| **6** | Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Melaksanakan Verifikasi dan Validasi lahan terganggu pada pemegang IUP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | Tersedianya data dan luasan lahan terganggu di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 4 Laporan Per Triwulan | Tersedianya data yang dijadikan dasar perhitungan jaminan Reklamsi para pemegang IUP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 445.350.000 | 500.000.000 | Distamben | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| **1** | **Urusan Wajib/Rutin** | | | | | | | | | | | | | |
| **1,5** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | **9.731.842.000** | **11.285.172.400** | **DKP Prov** | |
| **1.5.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | **Persentase pelayanan administrasi perkantoran** | **100%** | | | | | **5.584.522.000** | **6.595.795.400** | **DKP Prov** | |
| 1.5.01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya prangko materai dan benda pos lainnya Paket/Pengiriman | 1 Paket | Lancarnya pengiriman paket dan surat untuk keperluan kantor | 12 Bulan | 15.390.000 | 18.468.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi SDAL | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya jasa listrik, Telekomunikasi dan Informasi | 12 Bulan | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 Bulan | 244.800.000 | 293.760.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya honorarium pengelola administrasi keuangan | 12 Bulan | Lancarnya kinerja aparatur pengelola administrasi keuangan | 12 Bulan | 364.770.000 | 437.724.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya operasional kebersihan kantor | 12 Bulan | Terpeliharanya kebersihan dan kerapian kantor | 12 Bulan | 32.056.000 | 38.467.200 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.0900 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terpeliharanya peralatan kerja | 12 Bulan | Lancarnya aktifitas perkantoran | 12 Bulan | 90.000.000 | 108.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1000 | Penyediaan alat tulis kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya alat tulis kantor | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 185.000.000 | 222.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 1 paket | Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 65.000.000 | 78.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1200 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya peralatan listrik | 1 paket | Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 15.000.000 | 18.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya surat kabar majalah sebagai sarana informasi | 1 paket | Terpenuhinya informasi yang diterima pegawai | 12 Bulan | 7.920.000 | 9.504.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1700 | Penyediaan makanan dan minuman | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu | 1 paket | Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu | 12 Bulan | 53.000.000 | 63.600.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1800 | Rapat-rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah | 1 paket | Lancarnya koordinasi Konsultasi ke pusat dan daerah | 12 Bulan | 300.000.000 | 360.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.1900 | Penyediaan jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Terbayarnya tenaga honorer dan kontrak | 26 bulan | Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran | 12 Bulan | 743.690.000 | 966.797.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.3900 | Operasional Balai Benih Ikan Sentra (BBIS) Pemali | | | Pemali, Sungailiat | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) | 26 bulan | Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) | 12 Bulan | 686.000.000 | 823.200.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.4000 | Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak | | | Tanjung Krasak, Toboali | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan dan perlengkapan Operasional BBIAP Tanjung Krasak | 12 Bulan | Lancarnya Operasional Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak | 12 Bulan | 533.560.000 | 640.272.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.4100 | Operasional Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa | | | Tanjung Rusa, Belitung | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional BBIL Tanjung Rusa | 12 Bulan | Lancarnya Operasional BBIL Tanjung Rusa | 12 Bulan | 800.200.000 | 960.240.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.4200 | Operasional Boost Center | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Lancarnya Operasional Boost Center | 12 Bulan | Lancarnya Operasional Boost Center | 12 Bulan | 183.800.000 | 220.560.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.01.4400 | Operasional Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) | | | Pangkalpinang | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional LPPMHP | 12 Bulan | Lancarnya pengelolaan/Operasional LPPMHP | 12 Bulan | 457.936.000 | 549.523.200 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.4700 | Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | | | 7 Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan administrasi perkantoran | 100% | Tersedianya bahan dan perlengkapan operasional Kapal Pengawas | 12 Bulan | Lancarnya Pelaksanaan Operasional Pengawas Sumber daya kelautan dan perikanan | 12 Bulan | 656.400.000 | 787.680.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.01.8800 | Koordinasi, konsolidasi kedalam daerah | | | 7 Kabupaten/Kota | Lancarnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran | 12 bulan | Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah | 12 bulan | Lancarnya pelaksanaan Koordinasi dan konsolidasi kedalam daerah | 100% | 150.000.000 | 180.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| **1.5.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | **Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur** | **100%** | | | | | **2.874.070.000** | **3.161.477.000** | **DKP Prov** | |
| 1.5.02.1300 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Pangkalpinang, Pemali (Bangka), Tanjung Krasak (Basel), Tanjung Rusa (Belitung) | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 1 Paket | Meningkatnya kinerja Aparatur | 100% | 868.500.000 | 1.129.050.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2202 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya jasa pemeliharaan dan rehab gedung kantor | 12 Bulan | Meningkatnya kenyamanan kinerja dan keamanan bangunan | 100% | 195.000.000 | 273.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2203 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali | | | Sungailiat | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIS Pemali | 1 paket | Meningkatnya kenyamanan kinerja dan keamanan bangunan | 100% | 220.000.000 | 308.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2204 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak | | | Toboali | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIAP Tanjung Krasak | 2 paket | Meningkatnya kenyamanan kinerja dan keamanan bangunan | 100% | 220.000.000 | 308.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2205 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa | | | Belitung | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa | Pemeliharaan dan Rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa | Lancarnya jasa Pemeliharaan dan rehab UPTD BBIL Tanjung Rusa | 100% | 220.000.000 | 308.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2206 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Rehab UPTD LPPMHP | Pemeliharaan dan rehab UPTD LPPMHP | Lancarnya jasa Pemeliharaan dan rehab UPTD LPPMHP | 100% | 220.000.000 | 308.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.2400 | Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor | 8 Mobil dan 23 Kendaraan | Lancarnya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 12 bulan | 490.570.000 | 588.684.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.7101 | Pengadaan Space Baleho | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya Pengadaan Space Baleho | 3 Unit Space Baleho | Lancarnya Pengadaan Space Baleho | 3 Unit Space Baleho | 150.000.000 | | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.7201 | Pembuatan Pagar Kantor Dinas | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya Pembuatan Pagar Kantor Dinas | Pagar kantor yang berbatasan dengan kantor BLHD | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kinerja | Pagar kantor yang berbatasan dengan kantor BLHD | 80.000.000 | 96.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.02.9984 | Perbaikan Instalasi Listrik Kantor | | | Pangkalpinang | Persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya Perbaikan Instalasi Listrik Kantor | 1 Paket | Meningkatnya kenyamanan kinerja | 100% | 90.000.000 | 99.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.02.9985 | Pengadaan Partisi ruangan resepsionis | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | Terlaksananya Pengadaan Partisi Ruangan Resepsionis | Partisi Ruang Resepsionis, Nama Dinas, beserta lambang Provinsi, Pintu Kaca | Meningkatnya kenyamanan kinerja | 100% | 120.000.000 | 132.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| **1.5.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | **Meningkatnya Disiplin Aparatur** | **100%** | | | | | **85.000.000** | **102.000.000** | **DKP Prov** | |
| 1.5.03.0501 | Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100% | Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu | 120 pegawai, laki-laki 89 orang dan perempuan 31 orang | Dimanfaatkannya pakaian pegawai serta meningkatnya kinerja Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung | 120 pegawai, laki-laki 89 orang dan perempuan 31 orang | 60.000.000 | 66.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.03.2500 | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Disiplin Aparatur | 100% | Terciptanya minimal satu dokumen penganggaran yang responsif gender di setiap bidang dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 18 Laki-Laki dan 17 Perempuan | Laporan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan penganggaran responsif gender di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 18 Laki-Laki dan 17 Perempuan | 25.000.000 | 30.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| **1.5.07** | **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** | | | **Pangkalpinang** | **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas** | **1 Berkas Dokumen Perencanaan, 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev** | | | | | **1.188.250.000** | **1.425.900.000** | **DKP Prov** | |
| 1.5.07.2600 | Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan monev pembangunan kelautan dan perikanan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas | 1 Berkas Dokumen Perencanaan, 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan kegiatan, dan Monev serta koordinasi Perencanaan dengan KKP RI | Konsep RKA&DPA, Lap. Musrenbang, Laporan Renja, Laporan Tahunan Dinas, Lap. APBD & APBN, Laporan Lakip, Buku Kelautan dan Perikanan Babel dalam Angka, Buku Saku Kelautan dan Perikanan Babel dalam Angka | Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan hasil kegiatan dan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi (Monev) serta meningkatnya kinerja perencanaan DKP Provinsi Kep. Babel | 10 Dokumen | 533.900.000 | 640.680.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 1.5.07.2700 | Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas | 1 Berkas Dokumen Perencanaan , 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev | Terlaksananya Studi Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung | Laporan Tinjauan Lapangan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Bangka Belitung | Lancarnya studi pengembangan kelautan dan perikanan Bangka Belitung | 1 Laporan | 270.900.000 | 325.080.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.07.2800 | Sosialisasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas | 2 Berkas Dokumen Perencanaan , 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev | Tersosialisasinya kebijakan kelautan dan perikanan | 210 orang yang tersosialisasi | Meningkatnya Pemahaman tentang mekanisme dan tata cara pengajuan perencanaan | 210 orang yang tersosialisasi | 218.450.000 | 262.140.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.07.3100 | Penunjang pelaksanaan kegiatan kehumasan dan protokoler | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas | 2 Berkas Dokumen Perencanaan , 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev | Terlaksananya pelaksanaan kehumasan dan protokoler yang baik | 100% | Lancarnya pelaksanaan kegiatan kehumasan dan protokoler | 100% | 90.000.000 | 99.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 1.5.07.3200 | Penilaian Angka Kredit JFT Pengawas Perikanan | | | Pangkalpinang | Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dinas | 2 Berkas Dokumen Perencanaan , 1 Berkas Dokumen Pelaporan dan 1 Berkas Dokumen Monev | Usulan Penetapan Angka Kredit JFT Pengawas Perikanan | 27 orang | Penetapan Angka Kredit JFT Pengawas Perikanan | 100% | 75.000.000 | 82.500.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| **2** | **Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | **11.947.672.000** | **16.654.843.600** | **DKP Prov** | |
| **2,05** | **Kelautan dan Perikanan** | | | | | | | | | | **11.947.672.000** | **16.654.843.600** | **DKP Prov** | |
| **2.05.20** | **Program Pengembangan Budidaya Perikanan** | **3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi,** | **Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Produksi Perikanan Budidaya (ton)** | **62.046** | | | | | **3.123.980.000** | **4.685.970.000** | **DKP Prov** | |
| 2.05.20.4100 | Pelatihan Auditor CBIB | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | Pangkal Pinang | meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan kehidupan pembudidaya ikan | produksi perikanan budidaya 13.765 ton dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksanaya Pelatihan Calon Auditor CBIB petugas DKP Kab/Kota | 30 Calon auditor CBIB (15 Perempuan dan 15 Laki-Laki) | Tersedianya Auditor CBIB | 30 Calon auditor CBIB (15 Perempuan dan 15 Laki-Laki) | 190.000.000 | 228.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2.05.20.4200 | Pembina Mutu Pembenihan (PMP) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | 7 Kab/Kota | meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan kehidupan pembudidaya ikan | produksi perikanan budidaya 13.765 ton dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksanaya Pelatihan Pembinaan Mutu pembenihan-PB | 30 Pembina Mutu Pembenihan (15 Perempuan dan 15 Laki-Laki) | Tersedianya Pembina Mutu Pembenihan di 7 Kab/Kota | 30 Pembina Mutu Pembenihan (15 Perempuan dan 15 Laki-Laki) | 200.000.000 | 240.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.4300 | Penyusunan Data Statistik Perbenihan Tingkat Provinsi | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | Pangkalpinang | meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan kehidupan pembudidaya ikan | produksi perikanan budidaya 13.765 ton dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya Penyusunan Data Statistik Pembenihan Tingkat Provinsi | 1 Dokumen (10 Eksemplar) | Tersedianya Data Statistik yang bisa digunakan untuk menyusun program pembenihan | 1 Dokumen (10 Eksemplar) | 77.080.000 | 92.496.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.4400 | Pengembangan Budidaya Ikan hias air tawar dan air laut | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | BBIS Pemali | meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan kehidupan pembudidaya ikan | produksi perikanan budidaya 13.765 ton dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya pengembangan ikan hias air Tawar | 1 Paket | Peningkatan produksi dan kualitas ikan hias air tawar dan air laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 100% | 203.080.000 | 243.696.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.4500 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan POKDAKAN | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | 7 Kab/Kota | meningkatnya produktivitas perikanan budidaya dan kehidupan pembudidaya ikan | produksi perikanan budidaya 13.765 ton dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya penguatan Kapasitas Kelembagan Pokdakan | 14 Kelompok | Meningkatnya kapasitas kelembagaan POKDAKAN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 14 Kelompok | 96.150.000 | 180.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.2100 | Supervisi dan pembinaan pemanfaatan kredit program, investasi, permodalan dan perizinan perikanan budidaya | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | 7 Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan Pembudidaya Ikan | Produksi Perikanan Budidaya 13.765 dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya Supervisi dan pembinaan pemanfaatan kredit program, pengembangan investasi, fasilitasi akses permodalan dan perizinan perikanan budidaya | 1 Kegiatan | Bertambahnya jumlah pembudidaya ikan yang memanfaatkan kredit program | 7 (tujuh) Kelompok | 72.700.000 | 87.240.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.1900 | Pengembangan dan Peningkatan Sistem Penyuluh Perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan Pembudidaya Ikan | Produksi Perikanan Budidaya 13.765 dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Kelompok Pembudidaya ikan Masyarakat Kelautan dan PerikananPerikanan | 150 peserta | Masyarakat pembudidaya ikan lebih mengerti dan memahami dalam melakukan kegiatan cara budidaya ikan | 150 peserta | 154.970.000 | 185.964.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.20.4700 | Bimbingan Teknis dan Temu Lapang Pengembangan Pembenihan dan Pembudidaya Ikan Air Payau | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan Pembudidaya Ikan | Produksi Perikanan Budidaya 13.765 dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya Bimtek dan temu lapang, usaha budidaya ikan air payau | 2 Kali temu lapang dan 2 kali bimtek | Meningkatnya keterampilan pembudidaya ikan air payau | 90 orang | 200.000.000 | 240.000.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2.05.20.4800 | Pengembangan Air Baku UPTD BBIS Pemali | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan Pembudidaya Ikan | Produksi Perikanan Budidaya 13.765 dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Tersedianya sumur bor dan peralatannya untuk memasok kebutuhan air BBIS Pemali | 1 Unit | Meningkatnya Jumlah Pasokan air baku untuk UPTD Balai Benih | 1 Unit | 350.000.000 | 420.000.000 | | |
| 2.05.20.4900 | Pengadaan Alat Bantu Budidaya Air Tawar | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan pembudidaya Ikan | | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya dan Kehidupan Pembudidaya Ikan | Produksi Perikanan Budidaya 13.765 dan jumlah produksi benih 31.000 ekor | Terlaksananya Bantuan Alat Budidaya Air Tawar | 28 POKDAKAN | Meningkatnya Produksi Ikan Air Tawar di Provinsi Kep. Bangka Belitung | 28 POKDAKAN | 1.580.000.000 | 1.896.000.000 | | |
| **2.05.21** | **Program Pengembangan Perikanan Tangkap** | **3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi,** | **Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Produksi Perikanan Tangkap (ton)** | **166.035** | | | | | **3.991.342.000** | **5.188.744.600** | | |
| 2.05.21.1101 | Pengelolaan Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | Prov. Kep. Bangka Belitung,Kab. Bangka dan Kab.Bangka Tengah | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 109 | Terlaksananya pendataan Statistik Perikanan Tangkap | 7 Kab/Kota | Tersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap | 10 Buku dan 6000 Kartu Nelayan | 266.810.000 | 293.491.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.21.1801 | Pembinaan Pengeloaan Sumberdaya Perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 109 | Terlaksananya Pertemuan FKPPS Tk Provinsi | 1 Kegiatan | Meningkatnya pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang bertanggung jawab | 40 orang | 139.300.000 | 153.230.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.21.2000 | Peningkatan kualitas SDM Perikanan Tangkap | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 110 | 1. Terlaksananya kemitraan antara KUB dan lembaga keuangan sebagai sumberdana alternatif pengembangan usaha KUB; 2. Terwujudnya peningkatan motivasi dan kompetensi wanita nelayan dan keluarga nelayan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif; 3. Tersedianya laporan administrasi dan keuangan KUB perikanan tangkap yang terencana dan terstruktur dalam pengembangan usaha kelompok; 4. Nelayan memiliki pemahaman tentang pentingnya memiliki kartu nelayan | 420 Peserta | 1. Terlaksananya Kemitraan Usaha KUB Pasca BLM PUMP, 2. Terwujudnya peningkatan motivasi dan konpetensi Wanita Nelayan dan keluarganya dalam pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, dan 3. Tersedianya laporan administrasi keuangan KUB KUB di Kab. Bangka | 90 Orang | 513.382.000 | 564.720.200 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.21.0801 | Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | Pangkalpinang | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 109 | Terlaksananya Bimtek Pembuatan dan Perawatan Kapal Fiber | 1 Kegiatan | Bertambahnya pengetahuan nelayan mengenai pembuatan dan perawatan kapal fiber | 40 orang | 135.300.000 | 162.360.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2.05.21.1900 | Peningkatan Kesejahteraan Nelayan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 7 Kab/Kota dan Luar Daerah | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 109 | Sosialisasi SeHAT Nelayan | 1 Kegiatan | Tersampaikannya informasi tentang Sertifikasi hak atas tanah (SeHAT) Nelayan dan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah | 60 Nelayan | 354.190.000 | 425.028.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.21.10 | Sosialidasi dan Validasi Data Perizinan Perikanan Tangkap | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 7 Kab/Kota dan Luar Daerah | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 109 | Terlaksananya Keg. Sosialisasi Perizinan Perikanan Tangkap dan validasi data perizinan | 7 Kegiatan sosialisasi di 7 Kabupaten Kota dan 1 keg validasi untuk semua kab/kota | Meningkatnya pengetahuan petugas dan masyarakat tentang prosedur Perizinan Perikanan dan meningkatnya kualitas data perizinan | 420 Orang Nelayan dan 35 Aparatur Pemerintah di 7 Kabupaten Kota | 432.360.000 | 475.596.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.3900 | Pembangunan Tambat Labuh di Tanjung Binga (Kabupaten Belitung) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | Desa Tanjung Binga, Kab Belitung | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 110 | Terlaksananya Pembangunan Tambat Labuh di Tanjung Binga | Tambat Labuh | Lancarnya Pembangunan Tambat Labuh di Tanjung Binga | Tambat Labuh | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 | | |
| 2.05.4000 | Pembangunan Tambat Labuh di Jelitik (Kabupaten Bangka) | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | Jelitik, Kabupaten Bangka | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 111 | Terlaksananya Pembangunan Tambat Labuh di Jelitik | Tambat Labuh | Lancarnya Pembangunan Tambat Labuh di Jelitik | Tambat Labuh | 350.000.000 | 385.000.000 | | |
| 2.05.4100 | Supervisi dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Masyarakat Nelayan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 7 Kabupaten/Kota | Meningkatnya Produktivitas Perikanan Tangkap dan Kehidupan Nelayan | 175.000 Ton dan NTN = 112 | Terlaksananya Kegiatan Supervisi dan Pendampingan Pembentukan Koperasi Masyarakat Nelayan | 15 KUB (Pengurus KUB) DI 7 KAB/KOTA | Terbentuknya KUB Masyarakat Nelayan menjadi koperasi | 15 KUB di 7 Kab/Kota | 300.000.000 | 330.000.000 | | |
| **2.05.26** | **Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan** | **3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi,** | **Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Tingkat Konsumsi Ikan** | **48 Kg/Kap/Tahun** | | | | | **2.341.980.000** | **3.044.574.000** | **DKP Prov** | |
| 2.05.26.2000 | Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya pembinaan pasar ikan se-Bangka Belitung | 18 Pasar | Membaiknya cara pedagang pasar dalam memasarkan ikan | 18 Pasar | 38.920.000 | 50.596.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.2100 | Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Pangkalpinang | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya Kegiatan Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi dan Nasional, Bazar Hasil Perikanan, Safari Gemarikan, Pemanfaatan Mobil ATI dan Rakor Forikan | 5 Kegiatan | Meningkatnya Awareness masyarakat terhadap ikan sebagai bahan pangan yang nikmat, menyehatkan dan mencerdaskan; memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan serta produk-produk olahan ikan kepada masyarakat; meningkatkan peluang pasar produk ikan; koordinasi dan integrasi program/kegiatan serta meningkatkan peran aktif para stakeholders perikanan | 5 Kegiatan | 860.245.000 | 1.118.318.500 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2.05.26.2200 | Workshop Perhitungan Angka Konsumsi ikan untuk dua semester | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terselenggaranya Workshop Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (2 Semester) | 1 Kegiatan | Terukurnya angka konsumsi ikan tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung | 100% | 42.390.000 | 55.107.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.2300 | Pembinaan Pengembangan Produk Konsumsi bagi Pelaku Usaha Produk Olahan Hasil Perikanan dan Masyarakat | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan produk olahan hasil perikanan | 30 Pelaku Usaha | Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengolah terkait teknologi pengolahan hasil perikanan khususnya ragam produk yang dapat dikembangkan dan peluang pengembangan nilai tambah produk | 30 Pelaku Usaha | 123.630.000 | 142.174.500 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.2400 | Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Nonkonsumsi | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Poduk Olahan Hasil Perikanan Nonkonsumsi | 31 Pelaku Usaha | Meningkatnya Kemampuan Teknis Pelaku Usaha Produk Perikanan Nonkonsumsi | 31 Pelaku Usaha | 123.630.000 | 142.174.500 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.2500 | Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan untuk Unit Pengolahan Ikan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya sosialisasi sistem pelayanan dan penerbitan SKP dan dilakukannya pembinaan di kabupaten/kota kepada para pelaku usaha baik terhadap UPI skala besar maupun skala UMKM | 30 Pelaku Usaha | Meningkatnya UPI skala besar/industri maupun skala UMKM terkait penerapan GMP dan SSOP dalam rangka proses penerbitan SKP sebagai jaminan mutu dan keamanan atas produk perikanan yang dihasilkannya | 30 Pelaku Usaha | 165.460.000 | 215.098.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.1800 | Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Dalam dan Luar Daerah Prov Kep. Babel | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Terlaksananya Pameran Industri Kelautan dan Perikanan | 5 Kali Pameran | Terpromosikannya produk perikanan khas Babel dan babel sebagai daerah tujuan investasi usaha perikanan dan kelautan | 5 Kali Pameran | 496.650.000 | 645.645.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.26.2600 | Pendataan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | 7 Kab/Kota | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Tersedianya Data UMKM Bidang P2HP yang akurat dan akuntabel | 1 Dokumen | Dokumen Laporan Data UMKM Bidang P2HP | 1 Dokumen | 101.800.000 | 122.160.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 2.05.26.1900 | Peningkatan kapasistas Laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan | 3. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi, | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan | Ketapang Pangkalpinang | Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan pasar hasil perikanan | Tingkat Konsumsi Ikan 48 Kg/Kapita/Tahun dan volume produksi olahan 21.000 ton | Bimtek/magang/uji profisiensi untuk peningkatan kapasitas SDM UPTD LPPMHP di dalam dan luar daerah | 24 kali survey (560 sampel di 7 kab/kota) | Meningkatnya Kapasitas SDM UPTD LPPMHP | 100% | 389.255.000 | 428.180.500 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| **2.05.27** | **Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan** | **4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup** | **meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing** | **Provinsi Kep. Bangka Belitung** | **Kawasan Konservasi** | **4,000 ha** | | | | | **2.490.370.000** | **3.735.555.000** | **DKP Prov** | |
| 2.05.27.2400 | Sosialisasi penyuluhan hukum peraturan dan perundang-undangan Kelautan dan Perikanan | 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Kab Belitung | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Kawasan Konservasi 500.000 Ha | Tersosialiasinya Penyuluhan Hukum Peraturan dan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan Terbaru kepada Masyarakat Nelayan | 90 Orang (3 Kabupaten) | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut | 90 Orang (3 Kabupaten) | 111.280.000 | 122.408.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.27.2300 | Fasilitasi Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut | 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Belitung dan Basel | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Kawasan Konservasi 500.000 Ha | Terlaksananya Bimbingan Teknis Transplantasi Terumbu Karang | 1 Kegiatan | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemeliharaan ekosistem pesisir dan laut | 40 orang | 179.090.000 | 196.999.000 | DKP Prov | Sedang Berjalan |
| 2.05.27.2800 | Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 | 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Kawasan Konservasi 500.000 Ha | Dokumen RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 Dokumen | Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung | 100% | 1.500.000.000 | 1.650.000.000 | | |
| 2.05.27.2700 | Profil Identifikasi Potensi Sumber Daya Laut | 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Pulau Bangka | meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat dan bangka belitung bebas IUU Fishing | Kawasan Konservasi 500.000 Ha | Profil Identifikasi Kondisi Terumbu Karang Pulau Bangka | 1 Dokumen | Tersedianya informasi kondisi Terumbu Karang di Pulau Bangka | 100% | 700.000.000 | 770.000.000 | | |
| | | | | **TOTAL URUSAN RUTIN DAN URUSAN WAJIB** | | | | | | | **21.679.514.000** | **27.940.016.000** | | |

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| *2.* | **Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | ***12.604.393.721*** | | | |
| **2.07** | **Bidang Urusan Perindustrian (RUTIN)** | | | | | | | | | | **4.704.509.721** | | | |
| **2.07.01.01** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | | | | | **3.139.120.000** | | | |
| 01.0100 | Penyediaan jasa surat menyurat | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | Lancarnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 14.080.000 | 14.784.000 | | |
| 01.0200 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 bulan | Lancarnya Pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 374.800.000 | 393.540.000 | | |
| 01.0600 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terpeliharanya kendaraan dinas operasional | 4 mobil dan 11 motor | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Pelayanan Lancar | 364.960.000 | 383.208.000 | | |
| 01.0700 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan | 12 bulan | Lancarnya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan | 12 bulan | 225.300.000 | 236.565.000 | | |
| 01.0800 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | Lancarnya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor | 12 bulan | 16.000.000 | 16.800.000 | | |
| 01.1000 | Penyediaan alat tulis kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor | 12 bulan | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 12 bulan | 115.500.000 | 121.275.000 | | |
| 01.1100 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | Lancanya pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 40.000.000 | 42.000.000 | | |
| 01.1200 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya penyediaan komponen instalas listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | Lancarnya pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 14.000.000 | 14.700.000 | | |
| 01.1300 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksanaya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 12 bulan | Meningkatnya pelayanan dan pelaksanaan Tupoksi Dinas Perindag | Pelayanan Lancar | 595.250.000 | 625.012.500 | | |
| 01.1500 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 bulan | 26.000.000 | 27.300.000 | | |
| 01.1700 | Penyediaan makanan dan minuman | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu | 12 bulan | Tersedianya makan minum rapat dan tamu | 12 bulan | 123.930.000 | 130.126.500 | | |
| 01.1800 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 bulan | Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 bulan | 350.000.000 | 367.500.000 | | |
| 01.1900 | Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | Tersedianya jasa penunjang pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran | 1 tahun | Lancarnya penyediaan jasa administrasi perkantoran | 1 tahun | 729.300.000 | 750.750.000 | | |
| | Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah | | | | | | | | | | 150.000.000 | 157.500.000 | | |
| **2.07.01.02** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | | | | | | | | | | **802.863.721** | **469.807.500** | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| 02.2200 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | 1 tahun | Terpeliharanya gedung kantor | 3 gedung kantor | 734.648.721 | 360.000.000 | | |
| 02.2800 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur | 100% | Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | 1 tahun | Terpeliharanya peralatan gedung kantor | 1 paket | 68.215.000 | 109.807.500 | | |
| **2.07.01.03** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | | | | | | | | | | **25.000.000** | **195.236.206** | | |
| 03.0200 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya disiplin aparatur | 100% | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1 paket | Tersedianya pakaian dinas | 1 paket | | 195.236.206 | | |
| | Advokasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender | | | | | | | | | | 25.000.000 | | | |
| **2.07.01.05** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | | | | | | | | | | **289.996.000** | **328.538.000** | | |
| 05.0100 | Pendidikan dan pelatihan formal | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya kapasitaas sumber daya aparatur | 100% | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal | 1 tahun | Tersedianya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 1 paket | 165.750.000 | 263.538.000 | | |
| 05.9909 | Bimtek Implemenasi Permendagri 54 Tahun 2010 (Renstra, Renja), Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bidang Indag | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya kapasitaas sumber daya aparatur | 100% | Terlaksananya Bimtek | 24 Orang | Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Indag | 1 Laporan | 60.073.000 | 65.000.000 | | |
| | Bimtek Penilaian Angka Kredit | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya kapasitaas sumber daya aparatur | 100% | Terlaksananya Bimtek | 1 Kegiatan | Tata Cara Penetapan Angka Kredit Penera yang benar dan akurat oleh Tim Penilai PAK Penera | 27 Orang (Tim penilai Penera , Penera) | 64.173.000 | - | | |
| **2.07.01.06** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | | | | | | | | | | **447.530.000** | **425.000.000** | | |
| 06.0100 | Forum SKPD | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Terlaksananya Forum SKPD | 1 Kegiatan | Berita Acara Forum SKPD | 1 Dokumen | 130.190.000 | 55.000.000 | | |
| 06.1200 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi | 4 Kegiatan | Tersedianya dokumen LAKIP, LKPJ, LPPD TA 2015 dan Monev Program dan Kegiatan | 4 Dokumen | 138.810.000 | 225.000.000 | | |
| 06.3801 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran 2017 | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien | Pangkalpinang | Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dinas Perindag Tahun 2017 | 1 Kegiatan | Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Disperindag TA 2017 | Renja, RKA, DPA (APBD, DIPA (APBN) TA 2017 | 178.530.000 | 145.000.000 | | |
| | **URUSAN WAJIB** | | | | | | | | | | **7.899.884.000** | - | | |
| **2.07** | **Bidang Urusan Perindustrian (RUTIN)** | | | | | | | | | | **2.679.378.000** | - | | |
| **2.07.01.16** | **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah** | | | | | | | | | | **1.084.385.000** | - | | |
| | Penyuluhan dan Pendampingan IKM oleh PFPP | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Bangka Selatan | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Terlaksananya Pembinaan terhadap masalah Industri yang dihadapi oleh IKM oleh PFPP dan Shindanshi | 217 IKM/ Masyarakat | Terbinanya IKM dalam menciptakan Sistem kerja menjadi lebih produktif | 217 IKM/ Masyarakat | 234.750.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | Fasilitasi Keterampilan Teknik Produksi Bio Shell | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Belitung Timur | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Jumlah Perajin Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang Bio Shell dalam kesehariannya sebagai pelaku IKM | 1 kegiatan (20 IKM/ perajin) | Tersedianya Perajin yang Memiliki Keterampilan Teknis dalam hal berbaikan mutu produk makan dengan Bio Shell | 1 kegiatan (20 IKM/ perajin) | 180.725.000 | | | |
| | Fasilitasi Sertifikasi Halal | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Jumlah IKM yang memiliki sertifikasi Halal | 30 IKM | Meningkatnya Jumlah Pengakuan Jaminan Mutu/Kualitas Produk IKM dengan sertifikasi Halal | 30 IKM | 161.645.000 | | | |
| | Sosialisasi Regulasi Keamanan Produk Pangan kepada Asosiasi IKM | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Bangka Tengah | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Jumlah IKM Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan | 30 IKM | Bertambahnya IKM yang berwawasan terhadap Sosialisasi Regulasi Keamanan Pangan | 30 IKM | 51.460.000 | | | |
| | Pembekalan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Sukun di Kab Belitung Timur | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Bangka | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan diversifikasi produk olahan sukun | 30 peserta | Tersedianya IKM yang memiliki kemampuan memproduksi produk olahan sukun | 30 peserta | 179.025.000 | | | |
| | Pendampingan bagi IKM Furniture Berbahan Batang Kelapa di Koba, Bangka Tengah | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Koba, Bangka Tengah | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Meningkatnya Kemampuan Mendesain Furniture Bagi IKM Furniture Berbahan Batang Kelapa di Kecamatan Koba | 20 peserta | Terciptanya Desain Furniture Khas Bangka Belitung | 1 sentra | 236.440.000 | | | |
| | Sosialisasi Penerapan SNI dan Green Industry pada Produk Berbahan Baku Semen | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Jumlah IKM yang berwawasan terhadap SNI untuk bahan semen | 30 IKM | Bertambahnya IKM yang berwawasan terhadap SNI untuk bahan semen | 30 IKM | 40.340.000 | | | |
| | DED IKM Center | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah | 100% | Tersusunnya DED IKM Centre | 1 Dokumen | DED IKM Cnbter | 1 Dokumen | | | | |
| **2.07.01.mm** | **Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan** | | | | | | | | | | **600.770.000** | | - | |
| | Gelar Produk Kerajinan Unggulan di Lingk Prov. Kep. Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Komoditas Kerajinan | 100% | Meningkatnya jumlah Perajin dalam memasarkan produk kerajinan | 40 perajin | Meningkatnya Akses dan Perluasan Pangsa Pasar Produk Unggulan Daerah baik secara lokal maupun Nasional | 40 perajin | 88.240.000 | | | |
| | Rumah Rajutan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Komoditas Kerajinan | 100% | Jumlah IKM/Masyarakat yang mendapatkan Layanan Rumah Rajutan | 60 IKM/Masyarakat yang Terfasilitasi | Tersedianya Jumlah IKM/Masyarakat yang memiliki keterampilan kerajinan rajutan | 60 IKM/Masyarakat yang Terfasilitasi | 187.100.000 | | | |
| | Pembuatan Katalog Kerajinan Unggulan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | 7 Kab/ Kota | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Komoditas Kerajinan | 100% | Peningkatan Kualitas dan Perluasan Pemasaran Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah | 21 Kerajinan Unggulan | Meningkatnya Kualitas dan Perluasan Produk Unggulan Industri Kecil dan Menengah | 21 Kerajinan Unggulan | 54.760.000 | | | |
| | Sekretariat Dekranasda | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah Komoditas Kerajinan | 100% | Administrasi Sekretariat Dekranasda Prov.Kep.Babel | 1 kegiatan | Tersedianya Layanan Sekretariat Dekranasda Prov.Kep.Bangka Belitung | Pelaporan dan tertib administrasi | 270.670.000 | | | |
| **2.07.01.18** | **Program Penataan Struktur Industri** | | | | | | | | | | **630.910.000** | | - | |
| | Pemberdayaan Klinik Kemasan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Bangka Selatan | Tertatanya Struktur Industri | 100% | Jumlah IKM yang telah terfasilitasi dalam rangka pemanfaatan Klinik Kemasan di Provinsi Kepulauan Bangka | 100 IKM yang Terfasilitasi | Meningkatnya Jumlah IKM yang Memilki Kemasan yang Sesuai Standar dan Menarik | 100 IKM yang Terfasilitasi | 246.020.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | Pendampingan Tenun ATBM di Kab. Bangka Selatan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Bangka Selatan | Tertatanya Struktur Industri | 100% | Peserta yang memiliki kemampuan memproduksi Tenun ATBM Bagi Peserta | 10 peserta | Mampu Memproduksi Tenun ATBM di Kabupaten Bangka Selatan | 10 perajin | 128.475.000 | | | |
| | Koordinasi Percepatan Pembentukan Kawasan Strategis Industri Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis dan kawasan cepat tumbuh | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Tertatanya Struktur Industri | 100% | Terlaksananya Koordinasi Percepatan Pembentukan Kawasan Strategis Industri Bangka Belitung | 1 Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Industri Bangka Belitung | Terbentuknya Kawasan Strategis Industri Bangka Belitung | Kawasan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Sentra | 256.415.000 | | | |
| **2.07.01.19** | **Program Perencanaan dan Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial** | | | | | | | | | | **125.948.000** | - | | |
| | Pembentukan dan Penetapan Sentra Makanan Olahan Ikan | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Bangka | Berkembangnya sentra-sentra Industri Potensial Bangka Belitung | 100% | Terlaksananya Forum Diskusi dan Pembelajaran Kelembagaan Ke Provinsi Jawa Timur | 1 kegiatan | Tersusunnya pedoman teknis pembentukan Sentra Makanan Olahan Ikan Hasil Laut | 1 dokumen | 125.948.000 | | | |
| **2.07.01.xx** | **Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)** | | | | | | | | | | **110.375.000** | - | | |
| | Penyusunan Buku Direktori Data Industri Besar/ IAMT | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Berkembangnya Industri Berbasis Sumber Daya Alam (agro dan Non Agro) | 100% | Diperolehnya Data Industri yang valid dan terbarukan | 1 paket | Tersedianya Buku Direktory Industri Besar/IAMT | 20 buku | 110.375.000 | | | |
| **2.07.01.yy** | **Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri** | | | | | | | | | | **126.990.000** | - | | |
| | Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kreatif Telematika | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri | 100% | Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kreatif Telematika | 2 Kegiatan, 80 orang | Terbentuknya Embrio Komunitas Telematika di Bangka Belitung | 1 Komuitas Industri Telematika | 126.990.000 | | | |
| **2.06** | **Bidang Urusan Perdagangan** | | | | | | | | | | **5.220.506.000** | - | | |
| **2.06.01.15** | **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** | | | | | | | | | | **3.202.078.000** | - | | |
| | Monitoring dan Evaluasi dalam rangka kesiapan pelepasan UPT Metrologi Provinsi kepada Kab/Kota | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Laporan Data Informasi kesiapan pemerintah Kab/Kota | 1 Laporan | Kesiapan Kab/Kota menerima Urusan Tera/ Tera Ulang | 6 Kab dan 1 Kota | 97.630.000 | | | |
| | Sosialisasi Kemetrologian | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Pangkalpinang | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terlaksananya sosialisasi Kemetrologian | 2 kali | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur | 80 orang | 140.520.000 | | | |
| | Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Pengawasan Barang Beredar dan Jasa | 10 bulan | Meningkatnya Pengawasan Barang dan jasa | Pasar Modern dan Pasar Tradisional | 213.334.000 | | | |
| | Pos Layanan Pengaduan Konsumen | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Pangkalpinang | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Tersedianya Pos layanan Pengaduan Konsumen | 1 Kegiatan | Pos Pelayanan Pengaduan Konsumen | Masyarakat selaku Konsumen | 52.496.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | 1 Kota dan 6 Kabupaten | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terlaksananya pengawasan dan penyuluhan kemetrologian | 1 tahun | Meningkatnya kesadaran wajib tera ulang | Perusahaan dan SPBU | 377.488.000 | | | |
| | Sosialisasi Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) dan Pupuk Bersubsidi | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Pangkalpinang | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terlaksananya Sosialisasi | 1 kegiatan | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dan masyarakat tentang Pengawasan Minuman Beralkohol, Bahan Berbahaya (B2) dan Pupuk Bersubsidi | 1 Dokumen | 100.000.000 | | | |
| | Pelayanan dan Pengembangan UPT Kemetrologian Provinsi | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | 1 Kota dan 6 Kabupaten | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terlaksananya Pelayanan dan Pengembangan Kemetrologian | 1 tahun | Terjaminnya kebenaran Pengukuran Alat UTTP dalam Transaksi Jual Beli | 7500 UTTP dari 15000 UTTP | 1.250.000.000 | | | |
| | Pelatihan ISO 9001 dan validasi metode pengujian ISO/IEC 17025-2005 | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terselenggaranya Pelatihan ISO 9001 dan pelatihan validasi metode pengujian bagi personil Lab | 2 kegiatan | Personil Laboratorium mampu menerapkan ISO 9001 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mengerjakan validasi metode pengujian untuk mempertahankan status akreditasi KAN dan menambah ruang lingkup pengujian | 2 kegiatan | 150.000.000 | | | |
| | Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Terselenggaranya Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM | 4 kegiatan | Meningkatnya Kemampuan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM dalam Melakukan Pengujian Mutu Komoditi untuk mempertahankan status akreditasi | 15 orang | 300.000.000 | | | |
| | Pengadaan Alat-alat Laboratorium UPTD BSPM | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kep. Bangka Belitung | Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | 100% | Tersedianya Peralatan Laboratorium | 100% | Peningkatan kemampuan Lab BSPM dalam melakukan pengujian untuk peningkatan PAD | 1 paket | 520.610.000 | | | |
| **2.06.01.17** | **Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor** | | | | | | | | | | **1.569.651.000** | | | |
| | Temu Usaha Bisnis antara Produsen dengan Eksportir/ Calon Eksportir | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya Temu Usaha Bisnis antara Produsen dengan Eksportir/Calon Eksportir | 1 kegiatan | Meningkatkan kerjasama dalam pemasaran guna peningkatan komoditi daerah | 50 orang | 74.837.000 | | | |
| | Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Agribisnis untuk Ekspor | 30 orang | Meningkatnya pengetahuan dunia usaha yang bergerak khusus dibidang agribisnistentang strategi pemasaran memasuki pasar tujuan ekspor | 30 orang | 79.317.000 | | | |
| | Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait yang menangani Ekspor Impor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi perkembangan dunia usaha di era perdagangan bebas | 2 kali | Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga/instansi terkait yang menangani ekspor impor | 100% | 98.534.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | Pelatihan Pengembangan Produk Hendicraft untuk Ekspor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya pelatihan Pengembangan Produk Handicraft untuk ekspor | 30 orang | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur dan calon/pelaku ekspor tentang pengembangan produk handicraft untuk ekspor | 30 orang | 104.131.000 | | | |
| | Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah dalam rangka Hilirisasi | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Jumlah UKM dan kelompok tani yang mampu meningkatkannilaitambah produk yang dihasilkan | 50 orang | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman UKM dan kelopok tani dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan | 50 orang | 83.290.000 | | | |
| | Pelatihan Prosedur Impor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya Pelatihan Prosedur Impor Perdagangan Luar Negeri | 30 orang | Meningkatnya pemehaman dan pengetahuan aparatur dan calon/pelaku ekspor impor tentang kebijakan peraturan perdagangan luar negeri | 30 orang | 79.740.000 | | | |
| | Operasionalisasi Website Disperindag | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya operasional website | 10 bulan | Tersedianya informasi kinerja Disperindag | 10 bulan | 62.160.000 | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas laboratorium Ekspor dan Impor | 100% | Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang | 100% | 432.180.000 | | | |
| | Pemeliharaan Status Akreditasi Laboratorium UPTD BSPM | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi di BSPM | 100% | Terpeliharanya status akreditasi | 100% | 160.552.000 | | | |
| | Monitoring Mutu Lada Putih, Gaharu, CPO dan AMDK se Bangka Belitung | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terselenggaranya Monitoring kualitas mutu barang lada putih, gaharu, CPO dan AMDK | 1 kegiatan | Kualitas Mutu Barang lada Putih, Gaharu, CPO dan AMDK terkendali sesuai SNI | 1 kegiatan | 318.570.000 | | | |
| | Evaluasi PAK Penguji Mutu Barang | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Meningkat dan meratanya aktivitas perekonomian di kawasan-kawasan pedesaan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkat dan Berkembangnya Ekspor | 100% | Terselenggaranya Evaluasi PAK Penguji Mutu Barang | 1 kegiatan | Tercapainya kualitas PAK PMB sesua dengan aturan angka kredit penguji mutu barang | 1 kegiatan | 76.340.000 | | | |
| **2.06.01.bb** | **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri** | | | | | | | | | | **448.777.000** | | - | |
| | Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Fasilitasi pasar Lelang) | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Surabaya | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri | 100% | Terbentuknya Pasar Lelang Produk Unggulan Daerah | 1 kali | Meningkatnya Pemasaran Produk Unggulan Daerah | 100% | 87.916.000 | | | |
| | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Pangkalpinang | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri | 100% | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1 Kegiatan | Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisai | 30 Orang | 59.037.000 | | | |
| | Peningkatan Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri | 100% | Terlaksananya Penyusunan Data Informasi Perdagangan Daerah | 10 bulan | Tersedianya Laporan Data Informasi Perdagangan Daerah | 10 buku | 91.516.000 | | | |

| Kode Urusan/ Program/ Kegiatan | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | SKPD | Jenis Keg |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| | Bimbingan Teknis Perdagangan Dalam Negeri | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Pangkalpinang | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri | 100% | Terlaksananya Bimtek Perdagngan Dalam Negeri | 1 Kegiatan | Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dan masyarakat | 50 orang | 80.000.000 | | | |
| | Pengembangan Pasar melalui Promosi Produk Unggulan Daerah di Surabaya | Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi | Semakin terbukanya akses lintas desa/kecamatan,lintas kabupaten/kota, lintas regional/nasional dan lintas negara | Pangkalpinang | Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri | 100% | Terlaksananya Misi Dagang Produk Unggulan Daerah | 1 kali | Meningkatnya pemasaran produk unggulan daerah | 100% | 130.308.000 | | | |

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
+ KOMPLEKS PUSAT PERKANTORAN DAN PERUMAHAN TERPADU
+ JL. PULAU BELITUNG NO. 2, KELURAHAN AIR ITAM
-- TELP. (0717) 439333 - 439336
-- FAX. (0717) 439335
+ PANGKALPINANG, BANGKA